



Creating Value for Sustainable Growth

Menciptakan Nilai untuk Pertumbuhan Berkelanjutan





Creating Value for Sustainable Growth

Menciptakan Nilai untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Inovasi telah menginspirasi Pertamina Trans Kontinental untuk terus secara konsisten mengokohkan komitmen demi meraih kesempurnaan mutu dan kepuasan bagi seluruh pelanggan. Layaknya karya seni, kami mengukir karya dengan konsisten dan ketekunan. Didukung manajemen yang andal dan profesional, kami siap membangun Indonesia yang lebih baik.

Upaya maksimal di tahun 2020 telah kami lakukan dengan cermat dalam berbagai peluang yang ada. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur menjadi peluang bagi Perseroan untuk memaksimalkan usaha agar peningkatan kinerja dapat tercapai lebih baik.

Innovation has inspired Pertamina Trans Kontinental to consistently strengthen commitment to achieve quality and satisfaction perfection for all customers. Like an artwork, we craft our work consistently and sincerely. Supported by reliable and professional management, we are ready to build a better Indonesia.

The optimum effort in 2020 was done carefully through various opportunities. The Government's policy to accelerate completion of the infrastructure development becomes opportunity for the Company to optimize our efforts to pursue a higher performance growth.

Kesinambungan Tema Laporan Tahunan

Annual Report Theme Consistency



2020

Menciptakan Nilai untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Creating Value for Sustainable Growth



2019

Digitalisasi Proses Bisnis dan Penguatan SDM
Digitalization of Businesses Process and Strengthening HR



2018

Membangun Integrasi, Melampaui Tantangan
Building Integration, Beyond Challenges



2017

Berkomitmen untuk Memberikan Layanan Handal, Profesional & Terpercaya
Commitment To Deliver Reliable, Professional & Trusted Services

Kesinambungan tema laporan tahunan PT Pertamina Trans Kontinental dalam 4 tahun terakhir menjadi gambaran singkat perjalanan kinerja Perusahaan yang senantiasa berupaya untuk maju dan meningkat dari tahun sebelumnya.

PT Pertamina Trans Kontinental's Annual Report theme continuity in the last 4 years illustrates a brief overview of the Company's performance journey that constantly strives to advance and improve from the previous year.

Dalam laporan tahunan tahun 2017 yang bertema **"Berkomitmen untuk Memberikan Layanan Handal, Profesional & Terpercaya"** berfokus pada komitmen Perusahaan untuk menciptakan SDM PTK yang ekselen dan profesional. Di tahun 2018, tema memberikan gambaran kesinambungan kinerja Perusahaan dengan **"Membangun Integrasi, Melampaui Tantangan"** dalam hal ini menggambarkan bagaimana Perseroan dengan bermodalkan SDM yang Profesional, Handal dan Terpercaya melakukan integrasi untuk masa depan yang berkelanjutan. Di tahun 2019, langkah lebih maju dengan memfokuskan kembali untuk mendorong tujuan dengan **"Digitalisasi Proses Bisnis dan Penguatan SDM"** untuk memanfaatkan tantangan dan peluang yang sangat besar dari revolusi digital guna memastikan bahwa PTK dapat terus menciptakan nilai-nilai terbaik di masa depan. Di tahun 2020, meskipun dunia mengalami tantangan berat dengan pandemi COVID-19 PTK tetap konsisten dengan semangat dan profesionalisme untuk mencapai target dan tujuan, mengkokohkan usaha dan **"Menciptakan Nilai untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"**.

In the Annual Report 2017 with the theme **"Commitment to Deliver Reliable, Professional & Trusted Services"** focuses on commitment of the Company to create excellent PTK human resources and professional. In 2018, the theme presents a description of the continuity of the company's performance through **"Building Integration, Beyond Challenges"** in this case, the theme illustrates how the Company supported with professional, reliable human resources and Trusted drives integration for the future sustainable. In 2019, a step forward by refocusing on driving goals with **"Digitalization of Businesses Process and Strengthening HR"** to take advantage of challenges and opportunities of the digital revolution to be sure that PTK can continue to create the best values at future. In 2020, despite the world is experiencing tough challenges during the COVID-19 pandemic, PTK remains consistent with passion and professionalism to achieve targets and goals, to solidify the business and **"Creating Value for Continuous Growth."**

Tentang Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental

About PT Pertamina Trans Kontinental Annual Report

PT Pertamina Trans Kontinental atau disebut “PTK” dan “Perusahaan” atau “Perseroan”, menyajikan Laporan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang memuat informasi kinerja keuangan dan hasil usaha berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik. Dalam Laporan Tahunan PTK juga menyertakan Laporan Keberlanjutan.

Laporan tahunan ini juga memuat informasi-informasi yang mengandung proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan yang bukan merupakan pernyataan data historis yang pada umumnya menggunakan kata seperti “percaya”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “memperkirakan”, “memproyeksikan” atau kata-kata serupa lainnya, dan dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang dapat bersifat pandangan ke depan (*forwardlooking statement*) sesuai definisi pada ketentuan yang berlaku.

Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut termasuk yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik dan sosial di Indonesia.

Penyebutan satuan mata uang “Rupiah” atau Rp atau IDR merujuk pada mata uang resmi Indonesia, sedangkan “Dollar AS atau USD” merujuk pada mata uang resmi Amerika. Kecuali jika disebutkan lain, semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

PT Pertamina Trans Kontinental, or “PTK” or “the Company”, is presenting The Annual Report ended on December 31, 2020 which contains information about the financial performance and the results of operations based on the Financial Statements audited by a Public Accounting Firm. The Annual Report of PTK also contains a Sustainability Report.

This annual report also contains information on projections, plans, strategies, and objectives that are not statements of historical data, which generally uses words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “estimate”, “projected” or other similar words, and can be categorized as statements that may be forward looking statement as defined by the existing regulations.

Statements containing the foresight to load the risk and uncertainty of the results and events may differ materially from what is expected and mentioned in the statement including those caused by changes in the economic environment, political and social in Indonesia.

The mention of the currency unit “Rupiah” or “Rp” or “IDR” refers to the official currency of Indonesia, while “US Dollars” or “USD” refers to the official currency of the United States. Unless otherwise stated, all financial information presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Jl. Kramat Raya No. 29, Jakarta Pusat 10450
Tel : (+6221) 31923005
Faks : (+6221) 3106804

Laporan Tahunan Pertamina Trans Kontinental 2020 juga dapat dilihat dan di unduh pada :
www.ptk-shipping.com

For further information please contact:
Jl. Kramat Raya No. 29, Central Jakarta 10450
Phone : (+6221) 31923005
Fax : (+6221) 3106804

Pertamina Trans Kontinental Annual Report 2020 can also viewed and downloaded in: www.ptk-shipping.com

Daftar Isi

Table of Contents

KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN Annual Report Theme Continuity	2	
TENTANG LAPORAN TAHUNAN PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL About Annual Report PT Pertamina Trans Kontinental	3	
DAFTAR ISI Table of Contents	4	
CAPAIAN 2020 Achievement in 2020	8	

IKHTISAR 2020

2020 Highlights

13

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlight

14

Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Operasional

Business and Operational Performance Highlight

19

Ikhtisar Saham dan Obligasi

Stocks and Bonds Highlights

20

Ikhtisar Dividen

Dividend Summary

21

Ikhtisar Kinerja Lainnya

Other Performance Summary

21

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

23

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

24

Laporan Direksi

Board of Directors Report

34

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk Laporan Tahunan 2020

Statement of Responsibility from Board of Commissioners for 2020 Annual Report

42

Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2020

Statement of Responsibility from Board of Directors for 2020 Annual Report

43

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

45

Identitas Perusahaan

Corporate Identity

46

Sejarah Singkat Perusahaan

Corporate Brief History

48

Jejak Langkah Perusahaan

Corporate Milestone

50

Bidang Usaha

Line of Business

52

Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Value

60

Logo dan Filosofinya

Logo and The Philosophy

62

Struktur Organisasi

Organizational Structure

64

Daftar Nama Pengurus dan Pejabat Perusahaan

List of Management and Executives of the Company

66

Profil Dewan Komisaris

Profile of Board of Commissioners

68

Profil Direksi

Profile of Board of Directors

74

Profil Pejabat Perusahaan

Executives Profile

78

Sumber Daya Manusia

Human Resource

82

Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure

86

Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Subsidiary and/or Associated Company

87

Pemegang Saham & Informasi Kepemilikan Saham

Shareholders and Shares Ownership Information

90

Kronologi Pencatatan Saham

Shares Listing Chronology

92



Kronologi Pencatatan Efek dan Obligasi Securities and Bonds Listing Chronology	92
Nama & Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Name & Address of Supporting Institution and/or Profession	93
Jaringan Wilayah Operasi Operational Area	94
Daftar Alamat Kantor Office Address	96
Informasi pada Website Perusahaan Information on Official Website	100
Penghargaan dan Sertifikasi Tahun 2020 Awards and Certification in 2020	102
Peristiwa Penting Tahun 2020 Significant Events 2020	107

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Business Function Support

Sumber Daya Manusia Human Resources	112
Teknologi Informasi Information Technology	134

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis

TINJAUAN EKONOMI GLOBAL Global Economic Overview	148
TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN INDUSTRI Overview of the National Economy and Industry	152
SINERGI BISNIS PERUSAHAAN - GROUP PERTAMINA Company Business Synergy – Pertamina Group	153
TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA Operational Review Per Business Segment	154
RENCANA STRATEGIS 2021-2026 Strategic Plan 2021-2026	172
TINJAUAN KEUANGAN Financial Review	176
Analisis Posisi Keuangan Financial Position Analysis	178
Analisis Laba Rugi Profit and Loss Analysis	184
Analisis Arus Kas Cash Flow Analysis	186
Analisis Rasio Keuangan Financial Ratio Analysis	190
Struktur Modal dan Kebijakan Atas Struktur Modal Capital Structure and Capital Structure Policies	192
Kontribusi Kepada Negara Contribution to The Nation	193
Key Performance Indicator dan Tingkat Kesehatan Perusahaan Key Performance Indicator and Company Soundness Level	194



Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 Serta Proyeksi Tahun 2021 Comparison Between 2020 Target and Realization and The 2021 Projection	198
Investasi Barang Modal Capital Goods Investment	204
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Goods Investment	206
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Subsequent Material information and Facts After The Date of The Accountant's Report	207
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	208
Kebijakan Dividen Dividend Policy	215
Program Kepemilikan Saham Bagi Manajemen (MSOP) dan Pekerja (ESOP) Management And Employee Stock Option Plan	215
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Proceeds from Public Offering	216
Buy Back Saham dan Buy Back Obligasi Buy Back Shares and Buy Back Bonds	216
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi Material Information Containing Conflict of Interest and/or Affiliated Party Transaction	217
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary Event	220
Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir Changes in Accounting Policies Implemented by the Company in the Current Fiscal Year	220

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan Changes In Laws And Regulations That are Significant to the Company	222
Prospek Usaha Business Prospects	223
Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information	226

TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance	229
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	230
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	251
Dewan Komisaris Board of Commissioners	262
Direksi Board of Directors	287
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment	305
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy	313
Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs Under The Board of Commissioners	321
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to The Board of Commissioners	321



Komite Audit Audit Committee	325
Komite Investasi dan Risiko Usaha Investment and Business Risk Committee	340
Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee	350
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	351
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	363
Audit Eksternal External Audit	381
Manajemen Risiko Risk Management	385
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	405
Permasalahan Hukum Litigation	414
Akses Informasi Perusahaan Access to Company Information	416
Kode Etik Code of Conduct	420
Whistleblowing System Whistleblowing System	431
Manajemen Persediaan Pengadaan Barang dan Jasa Inventory Management for Goods and Services Procurement	440

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environment Responsibility	449
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environment Responsibility	450
Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil Social Responsibility Related to Fair Operations	457
Tanggung Jawab Sosial dalam Penerapan HAM Social Responsibility in The Implementation of Human Rights	459
Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup Social Responsibility for The Environment	460
Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat Social Responsibility to The Community	467
Tanggung Jawab Sosial Terkait K3 Social Responsibility Related to HSSE	479
Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan Social Responsibility to Customers	494

REFERENSI PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2020

2020 Annual Report Cross-Reference

LAPORAN KEUANGAN AUDIT

Audited Financial Statements

CAPAIAN 2020

Achievement in 2020



Tingkat Kesehatan
SEHAT (AA) dengan nilai score 90,00

HEALTHY (AA) Soundness Level with score of 90.00

▲ **103,63%**

Pendapatan usaha tercatat sebesar Rp3,06 triliun, tercapai 103,63% dibanding RKAP tahun 2020 sebesar Rp2,95 triliun dan meningkat 20,41% dari sebesar Rp2,54 triliun di tahun 2019.

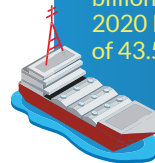
Revenues recorded Rp3.06 trillion, achieved 103.63% compared to RKAP 2020 of Rp2.95 trillion and increased by 20.41% from Rp2.54 trillion in 2019.



▲ **112,16%**

PTK membukukan pencapaian laba tahun berjalan tahun 2020 sebesar Rp423,38 miliar atau 112,16% dibanding RKAP tahun 2020 sebesar Rp377,49 miliar, dan meningkat 43,52% dari tahun 2019 sebesar Rp294,99 miliar.

PTK recorded profit for the year of Rp423.38 billion in 2020, or 112.16% compared to the 2020 RKAP of Rp377.49 billion, and an increase of 43.52% from 2019 of Rp294.99 billion.



▲ **0,36%**

Transportasi Losses (R2) ytd Desember 2020 sebesar 0,36% (*gain*) dan lebih rendah dari *base target* (0,08%) dan *stretch target* (0,07%).

Transportation Losses (R2) ytd December 2020 achieved 0.36% (*gain*) and lower than the base target (0.08%) and stretch target (0.07%).





10,73%

Secara konsolidatif naiknya pendapatan usaha selain disebabkan oleh kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan mutu layanan sehingga dapat menjaga kepercayaan pelanggan, terdapat juga faktor utama yaitu peningkatan kapasitas penggunaan Kapal Milik (Segmen Eksploitasi Kapal) hingga mencapai 10,73% atau setara dengan Rp1.026,75 miliar dan Rp1.043,26 miliar pada tahun 2019.

Consolidatedly, the increase in operating revenues was not only driven by the Company's ability to maintain service quality in maintaining the customer's trust, there are also other factors, such as the increase in the capacity to use owned vessels (Ship Exploitation Segment) to reach 10.73% or equivalent to Rp1,026.75 billion. and Rp1,043.26 billion in 2019.

PTK mendapatkan Penugasan atas pengelolaan kegiatan STS FAME di Balikpapan sejak tahun 2019, Pada tahun 2020 PTK meningkatkan penggunaan Kapal Milik PT Pertamina (Persero).

PTK received an assignment for the management of STS FAME activities in Balikpapan since 2019, in 2020 PTK intensified the use of ships owned by PT Pertamina (Persero).



Safety Performance



Zero Fatality



Zero Loss Time Injury



Zero Restricted Work Case



Zero Medical Treatment Case

.....

CAPAIAN 2020

Achievement in 2020



Total cost saving dari biaya sewa kapal non-milik Pertamina pada tahun 2019 adalah sebesar Rp7.660.800.000/Tahun. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar **Rp7.783.146.900/Tahun.**

total cost saving from the rental fee for non-Pertamina-owned vessels in 2019 is Rp7,660,800,000 / year. Meanwhile, in 2020 the amount of Rp7,783,146,900/Year.

Rp31.296.853.620,20

Efisiensi bunker pada tahun 2020 adalah Rp31.296.853.620,20 dibanding tahun 2019 Rp14.624.999.090.

Bunker efficiency in 2020 achieved Rp31,296,853,620.20 compared to Rp14,624,999,090 in 2019.



Selama 2020 tidak ada *claim off spec* (Off Quality Cargo), *Working losses*, dan *excess laytime* kapal. Tidak ada pula kejadian yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

In 2020, there was no claim off spec (Off Quality Cargo), Working losses, and excess laytime of the ship. There is also no incident that causes environmental pollution.

374 call

Jumlah call kapal Konsinyasi adalah 374 call dan kapal Supplier 147 call selama tahun 2020.

The number of consignment vessels calls achieved 374 calls and Supplier ships 147 calls in 2020.



1.135.600.339 liter

Total throughput FAME selama 2020 adalah penerimaan sebesar 1.135.600.339 liter dan penyaluran sebesar 1.114.787.260 liter.

Total throughput FAME in 2020 booked revenue of 1,135,600,339 liters and distribution of 1,114,787,260 liters.

Dari total 137 unit yang akan dibangun baru dan pengadaan *second hand* (2nd hand) oleh PTK (Harbour Tug 23 unit, Mooring Boat 22 unit, Aluminium Boat 18 unit, Fighting Craft 15 unit, Rigid Buoyant Boat 44 unit, LDPE 5 unit, Pilot Boat 3 unit, Clamshell 1 unit, SPSHB 2 unit, Harbour Tug 1.000 – 1.200 HP 1 unit (2nd hand), Crew Boat 3 unit, hingga 31 Desember 2020 PTK telah Delivery sebanyak 36 unit kapal baru.

From total 137 unit to be built new and second hand was procured by the PTK (23 units of Harbor Tug, 22 units of Mooring Boat, 18 units of Aluminum Boat, 15 units of Fighting Craft, 44 units of Rigid Buoyant Boat, 5 units of LDPE, 3 units of Pilot Boat, 1 unit of Clamshell, SPSHB 2 unit, Harbor Tug 1,000 - 1,200 HP 1 unit (second hand), Crew Boat 3 units., as of December 31, 2020 PTK had Delivery of 36 new vessels.



Rp279 miliar billion

PTK Shore Base Tanjung Batu (PSTB) mampu mencatatkan revenue sebesar Rp279 miliar di tengah efek *triple shock* yang menimpa bisnis minyak dan gas. Hal ini disebabkan oleh :

PTK Shore Base Tanjung Batu (PSTB) managed to record revenue of Rp279 billion amidst of the triple shock effect that hit the oil and gas business. This was due to:

1



Pemberlakuan efisiensi dalam kegiatan operasional, diantaranya kegiatan investasi beberapa alat berat sebagai pengganti alat berat eksisting yang disewa pada Pihak Ketiga.

Implementation of efficiency in operational activities, including investing in several heavy equipment as a substitute for existing heavy equipment leased to third parties.

2



Berhasil memperoleh pendapatan tambahan di luar RKAP berupa Project Cargo Handling Timas Sapura Offshore J.V.

Successfully earned additional income outside the RKAP in form of the Timas Sapura Offshore J.V. Cargo Handling Project.

3



Dampak dari dimulainya pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Pertamina (Persero) yang berlokasi di sebelah fasilitas PSTB. Dalam proses pembangunan tersebut, PSTB menyediakan fasilitas pendukung berupa akses jetty dan kegiatan *cargo handling* yang turut berperan dalam meningkatkan pendapatan PSTB.

The impact of the commencement of the construction of PT Pertamina (Persero)'s Oil Fuel Terminal (TBBM) which is located next to the PSTB facility. In the development process, the PSTB provides supporting facilities in the form of jetty access and cargo handling activities which contributes in increasing PSTB revenue.





1

IKHTISAR 2020

2020 Highlights

1
Ikhtisar 2020
2020 Highlights

2
Laporan
Manajemen
Management Report

3
Profil Perusahaan
Company Profile

4
Fungsi Penunjang
Bisnis
Business Function
Support

5
Analisa & Pembahasan
Manajemen
Management Discussion &
Analysis

6
Tata Kelola
Perusahaan
Good Corporate
Governance

7
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlight

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam juta Rupiah)

Consolidated Statement of Financial Position (in million Rupiah)

Uraian Description	2020	2019	2018	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease	
						%	SELISIH Difference
Aset Lancar Current Assets	2.160.035	1.778.646	1.513.600	1.187.840	1.149.924	21,44	381.389
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.836.315	2.954.877	2.939.580	2.699.512	2.263.049	29,83	881.438
Jumlah Aset Total Assets	5.996.350	4.733.523	4.453.180	3.888.352	3.412.973	26,68	1.262.827
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.320.665	1.351.807	1.266.095	1.250.799	1.086.373	71,67	968.858
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.096.086	1.039.575	1.120.806	806.580	662.928	5,44	56.511
Jumlah Liabilitas Total Liability	3.416.751	2.391.382	2.386.901	2.057.378	1.749.301	42,88	1.025.369
Ekuitas Equity	2.579.599	2.342.141	2.066.279	1.830.973	1.663.673	10,14	237.458
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities & Equity	5.996.350	4.733.523	4.453.180	3.888.352	3.412.973	26,68	1.262.827
Kurs Nilai Tukar Akhir Tahun Per 1 USD Exchange Rate per 1 USD	14.105,01	13.901,01	14.481,00	13.384,00	13.307,00	1,47	204

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam juta Rupiah)

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

Uraian Description	2020	2019	2018	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease	
						%	SELISIH Difference
Pendapatan usaha Revenue	3.058.197	2.539.806	2.050.272	1.779.411	1.717.495	20,41	518.391
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(2.181.550)	(1.859.832)	(1.399.856)	(1.331.380)	(1.311.438)	17,30	(321.718)
Laba bruto Gross profit	876.647	679.974	650.416	448.031	406.057	28,92	196.673
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	483.930	374.161	326.775	235.881	222.380	29,34	109.769

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam juta Rupiah)

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

Uraian Description	2020	2019	2018	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease	
						%	SELISIH Difference
Laba tahun berjalan Profit for the year	423.377	294.998	279.092	182.984	163.028	43,52	128.379
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	413.733	275.862	235.306	167.300	157.965	49,98	137.871
EBITDA	823.547	634.089	591.697	412.617	387.544	26,03	165.045
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to:							
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	423.377	294.998	279.092	182.984	163.028	43,52	128.379
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Total comprehensive income attributable to:							
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	413.733	275.862	235.306	167.300	157.965	49,98	137.871

Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam juta Rupiah)

Consolidated Statement of Cash Flow (in million Rupiah)

Uraian Description	2020	2019	2018	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease	
						%	SELISIH Difference
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	604.669	427.195	210.646	186.204	304.769	41,54%	177.474
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(733.156)	(130.796)	(285.324)	(444.723)	(545.565)	460,53%	602.360
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	55.534	(130.282)	218.553	242.069	113.769	142,63%	185.816
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate on cash and cash equivalents	(10.938)	(12.427)	25.977	(1.956)	13.114	(11,98%)	(1.489)

Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam juta Rupiah)
Consolidated Statement of Cash Flow (in million Rupiah)

Uraian Description	2020	2019	2018	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease	
						%	SELISIH Difference
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas Increase (decrease) of net cash and cash equivalents	(62.015)	153.690	169.852	(18.406)	(113.913)	(140,35%)	(215.705)
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of year	714.498	560.808	390.956	409.362	523.275	27,41%	153.690
Kas dan setara kas akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of year	652.483	714.498	560.808	390.956	409.362	(8,68%)	(62.015)

Rasio Keuangan (%)
Financial Ratio (%)

URAIAN Description		SATUAN Units	2020	2019	2018	2017	2016
Rasio Likuiditas	Liquidity Ratio						
Rasio Kas	Cash Ratio	%	28,12	52,90	44,36	31,25	37,68
Rasio Lancar	Current Ratio	%	95,92	131,58	119,55	91,39	104,23
Rasio Solvabilitas	Solvency Ratio						
Rasio Jumlah Modal Sendiri terhadap Total Aset	Ratio of Total Own Capital to Total Assets	%	43,02	49,48	46,40	47,09	48,70
Kolektibilitas Piutang	Accounts Receivable Collectability						
Rata-rata Periode Penagihan Piutang	Average Accounts Receivable Collection Period	Hari Days	117,69	84,59	93,89	98,44	130,61
Rasio Profitabilitas	Profitability Ratio						
Ratios Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)	Return to Equity (ROE) Ratio	%	19,64	14,41	15,62	11,10%	10,89

Rasio Keuangan (%)

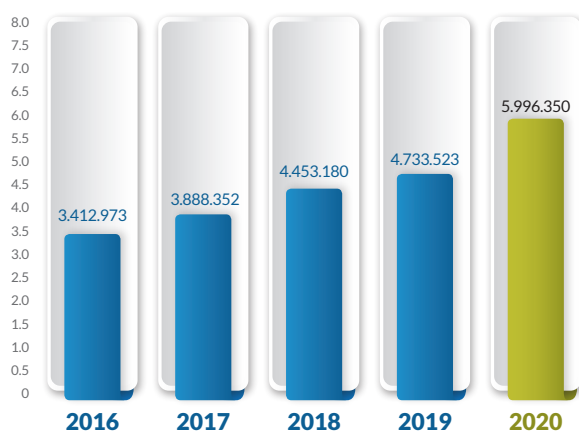
Financial Ratio (%)

URAIAN Description		SATUAN Units	2020	2019	2018	2017	2016
Imbalan Investasi (ROI)	Return on Investment (ROI)	%	13,73	13,57	13,42	10,85	12,13
Marjin Laba Operasi (OPM)	Operating Profit Margin (OPM)	%	18,26	14,13	20,57	13,54	14,30
Marjin Laba Bersih (NPM)	Net Profit Margin (NPM)	%	13,84	10,64	13,61	10,28	9,00
Rasio Aktivitas		Activity Ratio					
Rasio Perputaran Persediaan	Inventory Turnover Ratio	hari days	-	-	-	0,07	0,03
Perputaran Jumlah Aset	Total Asset Turnover	%	50,98	60,14	46,98	48,92	56,31

JUMLAH ASET

Total Assets

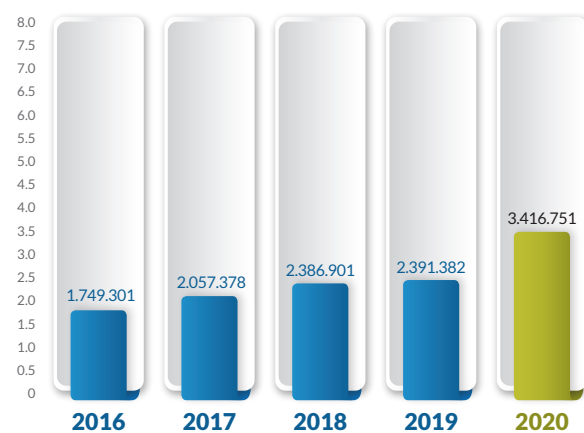
dalam juta Rupiah/ in million Rupiah



JUMLAH LIABILITAS

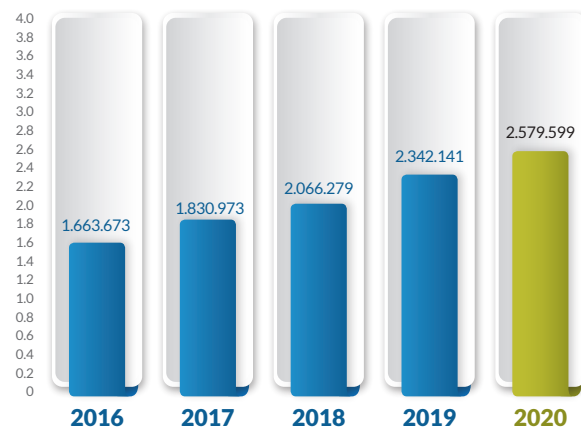
Total Liabilities

dalam juta Rupiah/ in million Rupiah

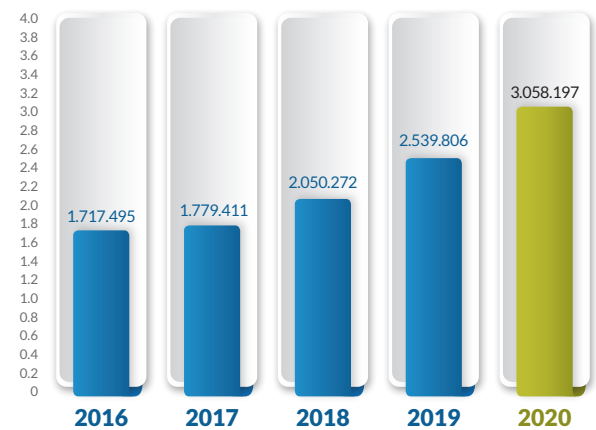


EKUITAS**Equity**

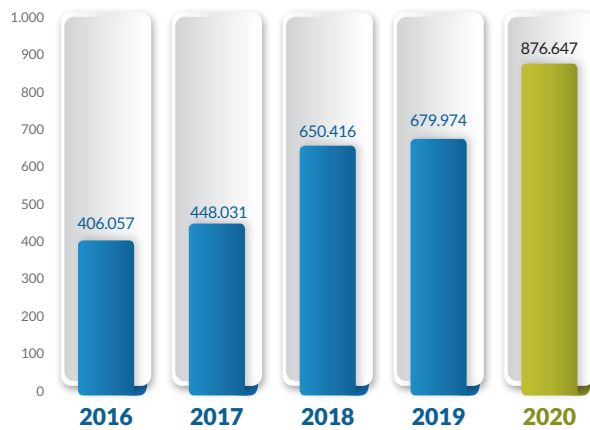
dalam juta Rupiah/ in million Rupiah

**PENDAPATAN USAHA****Total Revenue**

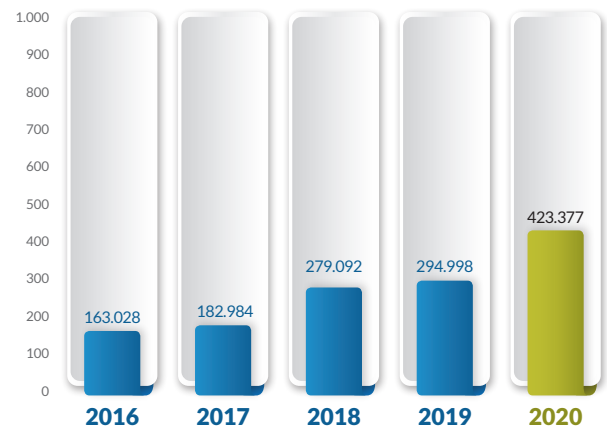
dalam juta Rupiah/ in million Rupiah

**LABA BRUTO****Gross Profit**

dalam juta Rupiah/ in million Rupiah

**LABA TAHUN BERJALAN****Profit for the Year**

dalam juta Rupiah/ in million Rupiah



Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Operasional

Business and Operational Performance Highlight

Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Operasional

Business and Operational Performance Highlight

Uraian Description	Satuan Unit	2020	2019	2018	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease	
							%	SELISIH Difference
NOA NOA	Kejadian Case	-	-	-	-	-	-	-
Fatalitas Fatalities	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumpahan Minyak Oil Spills	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIR Total Recordable Incident Rate	-	0,14	-	0,34	-	0,99	-	-
Jam Kerja Selamat Safe Working Hours	-	7.178.840	6.271.064	5.905.976	5.333.160	3.012.032	14,48	907.776
Sumber Daya Manusia Human Resource								
Pekerja <i>Permanent</i> Permanent Employee	Orang People	376	346	367	366	367	8,67	30
Pekerja <i>Temporary</i> Temporary Employee	Orang People	44	40	84	55	88	10,00	4
Pekerja <i>Outsourcing</i> Outsourced Employees	Orang People	478	282	222	188	190	69,50	196
Eksplorasi Kapal Ship Exploitation Activities								
Jumlah Armada Kapal Milik Amount of Owned Ships	Unit Unit	125	84	67	54	44	48,81	41
Jumlah <i>Operation Days</i> Kapal Milik dan <i>Brokerage</i> Total Operation Days of Own Vessels and Brokerage	Hari Days	43.907	29.476	21.694	16.275	8.320	48,9	14.431
<i>Commission Days</i> Kapal Milik Commission Days of Own Vessels	Hari Days	36.646	23.015	19.559	13.604	11.037	59,23	13.631
Volume Angkut COA COA Freight Volume	kl	721.546	754.003	780.511	834.363	804.853	(4,30)	(32.457)

Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Operasional

Business and Operational Performance Highlight

Uraian Description	Satuan Unit	2020	2019	2018	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease	
							%	SELISIH Difference
Jasa Maritim Marine Service								
Jumlah Call Keagenan Tanker Pusat dan Cabang Total Tanker Agency Call Head and Branch Offices	call	16.163	2.364	1.669	2.163	1.913	583,71	13.799
Jumlah Call Administrasi Pelabuhan Khusus Total Administration Call of Specific Port	call	-	-	24	278	350	-	-
Jasa Operasi Kepelabuhanan – Deiversifikasi Usaha (Rp juta) Port Operations Service – Business Diversification (Rp million)								
Pendapatan Segmen Jasa Operasi Kepelabuhanan Port Operations Service Segment Income	Rp juta Rp million	1.742.349	1.382.443	766.970	735.995	-	26,03	359.906

Ikhtisar Saham dan Obligasi

Stocks and Bonds Highlights

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, PTK tidak melakukan aksi korporasi terkait penawaran saham umum maupun penerbitan efek lainnya. Oleh karena itu, PTK tidak memiliki informasi terkait ikhtisar saham dan/atau efek lainnya.

As of December 31, 2020, PTK has not executed any corporate action related to shares public offering or other securities issuance. Therefore, PTK does not disclose any information related to shares and/or other securities highlights.

Ikhtisar Dividen

Dividend Summary

Berdasarkan hasil RUPS yang dilaksanakan tahun 2020 untuk tahun buku 2019, PTK memberikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp176,99 miliar atas laba Perusahaan tahun 2019.

Pursuant to the results of the GMS held in 2020 for the 2019 financial year, PTK will provide dividends to shareholders amounting to Rp176.99 billion for the Company's 2019 profits.

Ikhtisar Kinerja Lainnya

Other Performance Summary

Kinerja Lainnya

Other Performance

Uraian Description	2020	2019	2018
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's Soundness Level	90,00 (AA) SEHAT HEALTHY	91,00 (AA) SEHAT HEALTHY	94,37 (AA) SEHAT HEALTHY
Skor GCG GCG Score	81,94 BAIK GOOD	77,73 BAIK GOOD	80,06 BAIK GOOD



2

LAPORAN MANAJEMEN Management Report



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena Pertamina Trans Kontinental telah berhasil melalui tahun 2020 dengan pencapaian kinerja secara keseluruhan dengan baik. Suatu kehormatan bagi kami selaku Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan selama tahun 2020 kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai wujud transparansi, Dewan Komisaris melakukan proses pengawasan dan pengendalian Perusahaan sepanjang tahun 2020 sesuai peran dan fungsinya untuk menjawab tantangan, kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui penelaahan dan evaluasi terhadap kinerja dan jalannya Perusahaan baik kinerja

Dewan Komisaris dapat memahami tantangan yang dihadapi Perusahaan di tahun 2020. Untuk itu, Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai inisiatif strategis yang diambil Direksi dalam menghadapi kondisi yang sulit tersebut.

The Board of Commissioners understands the challenges encountered by the Company in 2020. Therefore, the Board of Commissioners appreciates various strategic initiatives taken by the Board of Directors in dealing with these difficult conditions.

IVAN AIRLANGGA EP

Komisaris
Commisioner

Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise to Almighty God for the grace of God Almighty because Pertamina Trans Kontinental successfully passed 2020 with good performance achievements. It is an honour for us as the Board of Commissioners to present an accountability report on implementation of supervisory duties upon the management of the Company throughout 2020 to Shareholders and other stakeholders.

As a manifestation of transparency, the Board of Commissioners has performed the monitoring and controlling process over the Company throughout 2020 according to its role and function to respond to the challenges, needs and expectations of stakeholders through review and evaluation of the company's performance and operations, both operational and financial performance. The Board of

operasional maupun keuangan. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk terus menerus melakukan inovasi guna memastikan tercapainya program kerja beserta target kinerja yang telah ditetapkan.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Tahun 2020, Pertamina Trans Kontinental telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp423,3 milyar atau 12,2% di atas RKAP 2020 Revisi. Dewan Komisaris dapat memahami tantangan yang dihadapi Perusahaan di tahun 2020 khususnya Pandemi COVID-19 tidak mudah. Secara berkesinambungan Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta Dewan Komisaris mengapresiasi keberhasilan Direksi atas pencapaian kinerja melalui berbagai inisiatif strategis yang diambil dalam menghadapi kondisi sulit. Dewan Komisaris menilai langkah tersebut merupakan strategi yang tepat, terlebih kondisi bisnis tengah mengalami penurunan.

Dewan Komisaris menilai kebijakan Direksi dalam memperoleh alternatif sumber pendanaan yang dapat menunjang pengembangan usaha Perusahaan merupakan langkah yang tepat dengan tetap memperhatikan *cost of fund* sehingga tidak menjadi beban bagi Perusahaan.

Kebijakan lain yang juga tidak kalah penting adalah upaya Direksi untuk terus melakukan efisiensi biaya di segala lini dengan meningkatkan *cost-consciousness* dengan tetap menjaga kualitas dari layanan yang diberikan.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan di tahun buku 2020 dengan baik dan terus mengupayakan penyempurnaan dan perbaikan di 2021.

Commissioners also encourages the Board of Directors to continuously innovate in order to ensure the achievement of designated work programs and performance targets.

Assessment on Performance of the Board of Directors

In 2020, Pertamina Trans Kontinental has successfully booked a net profit of Rp423.3 billion or 12.2% exceeding the 2020 Revised RKAP. The Board of Commissioners understood the challenges faced by the Company in 2020, especially the difficulties caused by the COVID-19 Pandemic. On an ongoing basis, the Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors through the mechanism stipulated in the Articles of Association of the Company and the Board of Commissioners appreciates the success of the Board of Directors in achieving performance through various strategic initiatives taken in the face of difficult conditions. The Board of Commissioners considers that the initiatives become the right strategy, especially as domestic and foreign market conditions are experiencing a downturn.

The Board of Commissioners also appreciates the Board of Directors' policy to acquire alternative sources of funding that can support development of the Company's business while still concerning the cost of funds thereby not being an expense to the Company.

Another policy that is no less important is the Board of Directors' efforts to continue to carry out cost efficiency in all lines by increasing cost-consciousness while maintaining the quality of the services provided.

Considering this achievement, the Board of Commissioners assessed that the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in managing the Company throughout the fiscal year 2020 appropriately and continues to strive for improvements in 2021.

Langkah Pengembangan Usaha yang Dilakukan Manajemen

Sesuai dengan visi Perusahaan untuk “Menjadi Perusahaan Jasa Maritim yang terintegrasi dengan skala global pada tahun 2026”, Pertamina Trans Kontinental pada tahun 2020 ini berada dalam tahap pertumbuhan, dimana Perusahaan mulai menuai hasil dari aksi-aksi korporasi yang telah dilakukan dan melakukan upaya peningkatannya. Dalam perkembangannya, sampai dengan akhir tahun 2026 pelaksanaan tahapan ini masih terus berjalan dan sejalan dengan rencana restrukturisasi bisnis Marine dan Logistik. Hal yang dilakukan Perusahaan telah kelihatan yaitu kegiatan restrukturisasi yang diarahkan untuk membangun skala usaha yang besar dan kuat, membangun sinergi untuk optimalisasi sumber daya, serta penambahan aset untuk menangkap peluang pengembangan bisnis yang ada.

Pandangan atas Prospek Bisnis yang disusun Direksi

Dewan Komisaris memberikan tanggapan positif atas prospek usaha tahun 2020 yang telah disusun oleh Direksi. Prospek usaha tersebut telah disusun berdasarkan asumsi yang valid dan realistis, dengan mempertimbangkan kondisi makro perekonomian, lingkungan bisnis, serta asumsi internal Perusahaan. Dengan demikian, pertimbangan yang dilakukan Direksi dalam menyusun prospek usaha menjadi lebih presisi. Bahkan kajian prospek usaha tersebut juga telah disesuaikan dengan Aspirasi Pemegang Saham.

Untuk mendukung pengembangan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan, Direksi telah menargetkan peningkatan investasi dalam jumlah yang signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Dewan Komisaris melihat bahwa beberapa kegiatan pengembangan

Business Development Initiative by the Management

Based on the Company's vision to "Become a Maritime Services Company integrated with a global scale by 2026", in 2020, Pertamina Trans Kontinental is at growth stage, where the company begins to reap results of the corporate actions that have been carried out and conducts several initiatives for improvement. In its development, as end of 2026, implementation of this stage will remain ongoing. Several matters which the company has done started to appear, which includes restructuring activities aimed to build great and strong business scale, building synergy to optimize resources, and acquire assets to seize existing business development opportunities.

View on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Board of Commissioners has responded positively to the business prospects for 2020 that have been prepared by the Board of Directors. These business prospects have been prepared based on valid and realistic assumptions, considering the macroeconomic conditions, business environment, and the Company's internal assumptions. Therefore, the consideration taken by the Board of Directors in preparing the business prospects becomes more precise. In fact, a review on of the business prospects has also been adjusted to the Shareholders' Aspirations of Shareholders.

To support development of the Company's performance in a sustainable manner, the Board of Directors has targeted a significant increase in investment compared to the previous year's realization. However, the Board of Commissioners views that some business development activities, such

usaha seperti kegiatan investasi masih lebih rendah dari perencanaan yang dianggarkan Perusahaan. Untuk itu, Dewan Komisaris mengarahkan agar dilakukan *root cause - problem solving* baik dari sisi *process*, *procedure*, dan *people* sebagai bentuk perbaikan untuk di tahun mendatang. Perusahaan perlu mendorong kegiatan investasi terutama pada aset produktif pengembangan usaha. Hal ini disebabkan karena aset-aset ini merupakan investasi pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, kondisi SDM Perusahaan yang memerlukan perhatian khusus sehingga setiap SDM mampu untuk menduduki jabatan sesuai dengan tugas dan posisi serta kompetensi yang dibutuhkan. Untuk itu, Dewan Komisaris mendukung penuh rencana pelaksanaan investasi tersebut dan mendorong Direksi untuk dapat mempercepat realisasinya.

Dewan Komisaris memandang prospek bisnis ini sebagai sebuah peluang bagi Perusahaan untuk mengembangkan kegiatan usahanya melalui peningkatan produksi dan pemasaran sehingga pada akhirnya dapat memberikan laba bagi Perusahaan.

Dewan Komisaris menilai bahwa Perusahaan akan mampu memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya di tahun 2021 melalui langkah-langkah pengendalian biaya dan memperhatikan perkembangan perekonomian serta kebijakan atas rencana restrukturisasi bisnis Marine dan Logistik sebagai bagian dari rencana besar *Subholding Shipping*.

Dewan Komisaris berharap, pengembangan usaha pada masa mendatang harus dilakukan melalui *intense communication* sehingga ada *alignment* dan keselarasan kebutuhan pelanggan dengan tetap memperhatikan tata kelola dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kesinambungan usaha Perusahaan dapat terjaga dan mendatangkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

as investment activities, are still below the budget targeted by the company. Therefore, the Company shall encourage investment activities, especially in productive assets for business development. This is due to these assets are investment in the company's future earnings. In addition, the Company's human resources condition also requires special concern thereby each human resource will be able to occupy a position based on the duties and positions as well as the required competencies. Therefore, the Board of Commissioners fully supports the investment implementation plan and encourages the Board of Directors to speed-up the realization.

The Board of Commissioners views this business prospect as an opportunity for the Company to develop its business activities through enhancement of the production and marketing that will eventually generate company profits.

The Board of Commissioners considers that the Company will be able to improve its performance in 2021 through cost control measures and taking into account economic developments and policies for Marine and Logistics business restructuring plan as part of Subholding Shipping's grand plan.

The Board of Commissioners expects that future business development must be carried out *intense communication* so that there is an alignment of customer needs while still paying attention to governance and implementation of social and environmental responsibility. Thus, the Company's business continuity can be maintained and bring benefits to all stakeholders.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan WBS

Pertamina Trans Kontinental melaksanakan kebijakan-kebijakan GCG yang terintegrasi dan dirancang untuk memastikan terlaksananya Pengelolaan Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal. Berbagai upaya telah ditempuh guna melengkapi Perusahaan dengan pengetahuan dan kapabilitas yang diperlukan untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang sejalan dengan kinerja bisnisnya serta mampu mengantarkan Perusahaan mencapai kinerja jangka panjang yang berkesinambungan.

Untuk dapat mengelola risiko secara efektif, Perusahaan harus memiliki kompetensi, serta mampu mengidentifikasi risiko industri dan risiko organisasi secara akurat dan cermat. Hal ini termasuk kemampuan Perusahaan dalam membangun budaya sadar risiko yang kuat di seluruh Perusahaan. Manajemen risiko berperan penting dalam Tata Kelola Pertamina Trans Kontinental, meliputi proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta organisasi, pelaksanaan dan pemantauan risiko.

Kepatuhan pada GCG juga tercermin pada *Code of Conduct* (Kode Etik) yang secara detail memberikan panduan dan pedoman tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan pekerja. Kode Etik tersebut juga berperan dalam menciptakan Budaya Kerja Perusahaan berdasarkan prestasi dan pencapaian. Kesadaran ini didukung penuh oleh Dewan Komisaris yang dibantu dengan Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha untuk melakukan pengawasan kegiatan terhadap pelaksanaan GCG. Tahun 2020, PTK telah melakukan asesmen secara mandiri (*self-assessment*) dengan skor mencapai 81,94 (dengan kualifikasi/kategori "Baik"). Maka itu, Pertamina Trans Kontinental berkomitmen untuk terus berupaya mengokohkan serta memperkuat implementasi kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

Views on Corporate Governance and WBS Implementation

Pertamina Trans Kontinental implements integrated GCG policies designed to ensure implementation of Compliance Management, Risk Management and Internal Control. Various efforts have been made to equip the Company with the knowledge and capabilities needed to implement Good Corporate Governance that is in line with the business performance and being capable to lead the Company to achieve sustainable long-term performance.

In order to manage the risk effectively, a company must have the competence and be able to identify industry risk and organizational risk accurately and carefully. This includes the Company's ability to build a strong risk awareness culture throughout the Company. Risk management plays an important role in the Governance of Pertamina Trans Kontinental, including the planning process, decision making, as well as organization, implementation and risk monitoring.

Compliance with GCG is also reflected in the Code of Conduct, which provides detailed guidelines and guidelines for the actions that all management and employees allowed or not allowed. The Code of Ethics also plays a role in creating a Company Work Culture based on achievements and achievements. This awareness is fully supported by the Board of Commissioners who is assisted by the Audit Committee and the Business Risk and Investment Committee to supervise activities on the implementation of GCG. In 2020, PTK has carried out an independent assessment /self assessment with a score of 81.94 (with the qualification / category "Good"). Therefore, Pertamina Trans Kontinental is committed to continuously strengthen and enhance policy implementation by applying the principles of Good Corporate Governance, namely Transparency,

yang Baik yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Kemandirian dan Kewajaran di seluruh lini bisnis Pertamina Trans Kontinental.

Dalam hal Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* - WBS), Pertamina Trans Kontinental menjaga sistem tata kelola di lingkungan Perusahaan dari praktik pelanggaran yang dapat merugikan Perusahaan secara material maupun dampak negatif berupa turunnya kepercayaan pemangku kepentingan. Perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis yang transparan dan proses deteksi dini yang kompatibel melalui sistem pengendalian intern. Untuk itu, WBS berperan dalam menjadi sistem pelapis atas kelemahan atau potensi celah dari sistem pengendalian yang ada.

Keterlibatan Dewan Komisaris adalah memastikan bahwa perangkat yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan WBS secara efektif telah tersedia, baik prosedur, sistem informasi, maupun pekerja yang melaksanakan fungsi tersebut.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit, turut melakukan pengawasan terhadap penerapan dan pengelolaan WBS di Perusahaan. Agar penerapan WBS di Perusahaan dapat lebih efektif, Dewan Komisaris menyarankan kepada manajemen untuk terus melakukan sosialisasi kepada semua lini organisasi terkait keberadaan dan mekanisme *whistleblowing system* yang ada di Perusahaan serta secara aktif melalui Internal Audit melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihat, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite yang terdiri dari Komite Audit serta Komite Investasi

Accountability, Responsibility, Independence and Fairness in all Pertamina Trans Kontinental business lines.

In the case of the Whistleblowing System (WBS), Pertamina Trans Kontinental maintains the governance system within the Company from any case of violation that could materially harm the Company as well as negative impacts in the form of decreased stakeholder trust. The company always strives to improve the effectiveness of transparent business processes and a competent early detection process through its internal control system. For this reason, WBS plays a role in being a coating system for weaknesses or potential gaps in the existing control system.

Involvement of the Board of Commissioners is to ensure that the tools required to perform the WBS activities effectively are available, both procedures, information systems, and employees who carry out these functions.

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, also supervises the implementation and management of WBS in the Company. In order for the implementation of WBS in the Company to be more effective, the Board of Commissioners advises the management to continue to disseminate information to all organizational lines regarding the existence and mechanism of the whistleblowing system in the Company as well as actively reporting it through Internal Audit to the Board of Commissioners.

Performance Appraisal of the Supporting Committees of the Board of Commissioners

In carrying out the supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners is assisted by a Committee consisting of the Audit Committee

dan Risiko Usaha. Komite-komite tersebut telah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan baik serta memberikan dukungan yang positif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Komite Audit

Komite Audit berperan membantu memberikan pendapat terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Pada tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan sejumlah kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, antara lain :

1. Komite Audit telah melakukan rapat dan pertemuan dengan pihak terkait sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran anggota yang cukup baik.
2. Komite Audit telah melakukan pertemuan dan review atas hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit.
3. Komite Audit telah menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Investasi dan Risiko Usaha

Bertugas membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan investasi dan penerapan manajemen risiko yang efektif di Pertamina Trans Kontinental.

Selama tahun 2020, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melaksanakan program kerjanya dan melaksanakan penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, antara lain :

1. Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melakukan rapat dan pertemuan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tingkat kehadiran anggota yang cukup baik.
2. Komite Investasi dan Risiko Usaha memberikan sejumlah rekomendasi kepada Dewan Komisaris

and the Investment and Business Risk Committee. These committees have carried out their respective roles and responsibilities as well as provided positive support for the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners.

Audit Committee

The Audit Committee plays a role in assisting to provide opinions on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners.

In 2020, the Audit Committee has carried out a number of activities in accordance with the work plan that has been prepared and the assignments given by the Board of Commissioners, including:

1. The Audit Committee has held meetings and meetings with related parties for 4 (four) times with a fairly good level of attendance by members.
2. The Audit Committee has met and reviewed the results of the audit conducted by the Internal Audit
3. The Audit Committee has carried out the duties assigned by the Board of Commissioners.

Investment and Business Risk Committee

In charge of assisting the Board of Commissioners to supervise implementation of investments and the implementation of effective risk management in Pertamina Trans Kontinental.

In 2020, the Investment and Business Risk Committee has carried out its work program and carried out other assignments delegated by the Board of Commissioners, including:

1. The Investment and Business Risk Committee has held 10 (ten) meetings and meetings with a fairly good level of attendance by members.
2. The Investment and Business Risk Committee provides a number of recommendations to the Board of Commissioners regarding investment

terkait investasi dan implementasi Manajemen Risiko di Pertamina Trans Kontinental.

3. Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melakukan *review* dan evaluasi penanganan risiko di Perusahaan.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dewan Komisaris berpendapat bahwa pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 secara tidak langsung telah memberikan dampak bagi kinerja dan reputasi Pertamina Trans Kontinental. Melalui penyaluran CSR yang tepat sasaran, akan terjalin hubungan yang harmonis antara Pertamina Trans Kontinental dengan para Pemangku Kepentingan, terutama masyarakat yang tinggal dan bekerja di wilayah sekitar daerah operasional Perusahaan.

Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menjalankan kegiatan CSR dan penyalurannya telah berjalan dengan efektif. Hal itu, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan program-program terkait dengan pengembangan masyarakat, lingkungan hidup, bantuan sosial, pekerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Dengan semakin besarnya program investasi yang dijalankan Perusahaan, serta meningkatnya kinerja, maka penyaluran CSR akan membawa dampak yang positif dan membangun. Pertamina Trans Kontinental akan tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan.

Penutup

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris sebelumnya yang telah melaksanakan tugas dan memberikan sumbangsihnya untuk peningkatan kinerja Perusahaan.

and implementation of Risk Management in Pertamina Trans Kontinental.

3. The Investment and Business Risk Committee has reviewed and evaluated risk management in the Company.

Supervision of The Implementation of Corporate Social Responsibility

The Board of Commissioners suggests that implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) which has been implemented in 2020 has indirectly contributed to performance and reputation of Pertamina Trans Kontinental. Through targeted CSR distribution, a harmonious relationship will be established between Pertamina Trans Kontinental and its stakeholders, especially the society who live and work in the areas surrounding the Company's operational areas.

The Board of Commissioners views that the Board of Directors has carried out CSR activities and their distribution has been effective. This, among others, is done through the implementation of programs related to community development, the environment, social assistance, employees, and occupational health and safety.

With the increasing size of the investment program implemented by the Company, as well as increased performance, the distribution of CSR will have a positive and constructive impact. Pertamina Trans Kontinental will grow and develop together with the community and all stakeholders.

Closing Remarks

On this occasion, the Board of Commissioners would like to utter gratitude and highest appreciation to the previous Board of Commissioners who have carried out their duties and contributed to improving the Company's performance.

Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi beserta seluruh jajarannya telah bekerja keras dan berdedikasi dalam menjalankan operasional Perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Untuk itu, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja Pertamina Trans Kontinental selama tahun 2020. Semoga pencapaian kinerja tahun 2020 menjadi pemacu semangat seluruh pemangku kepentingan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi pada tahun 2021.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors and all personnel have worked hard and are dedicated in carrying out company operations to realize the company's vision and mission. Therefore, the Board of Commissioners would thank everyone who contributed to the achievement of Pertamina Trans Kontinental's performance throughout 2020. We wish the performance achievement in 2020 will drive enthusiasm of all stakeholders to achieve better performance in 2021.

Jakarta, April 2021

Atas Nama Dewan Komisaris **On behalf of Board of Commissioners**
PT Pertamina Trans Kontinental



IVAN AIRLANGGA EP
Komisaris
Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Pertama-tama, ijinkan kami untuk menyampaikan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pertamina Trans Kontinental dapat melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan kinerja yang cukup baik. Selanjutnya, perkenankan kami melaporkan kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan memperoleh opini wajar dalam setiap aspek yang material. Laporan ini juga merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sepanjang tahun 2020, Pertamina Trans Kontinental telah menjalankan berbagai program sesuai dengan arahan dari Dewan Komisaris untuk senantiasa meningkatkan kinerja Perusahaan. Tahun 2020 menjadi titik tolak bagi Perusahaan untuk meraih

Meskipun kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia tercatat minus diberbagai sektor, Pertamina Trans Kontinental mampu membukukan pertumbuhan positif baik dari sisi aset maupun laba Perusahaan.

Despite the negative growth experienced by Indonesia's macro and microeconomic in various sectors, Pertamina Trans Kontinental managed to record positive growth both in terms of both assets and profits.

Nepos MT Pakpahan

Direktur Utama
President Director

Dear Shareholders and Stakeholders,

First of all, allow us to express praise and gratitude upon the presence of God Almighty for the endless grace and blessings that brought Pertamina Trans Kontinental to pass 2020 which was full of challenges with a fairly good performance. Furthermore, allow us to report the Company's performance for the fiscal year ended December 31, 2020 which as audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) and obtained an unqualified opinion in every material respect. This report is also part of the Good Corporate Governance principles implementation.

Throughout 2020, Pertamina Trans Kontinental has carried out various programs based on direction of the Board of Commissioners to continuously improve the Company's performance. The year 2020 becomes the starting point for the

pertumbuhan berkelanjutan. Kinerja positif yang dibukukan Perusahaan selama tahun 2020 menjadi modal yang sangat baik untuk meraih pertumbuhan usaha yang lebih baik lagi dikemudian hari, mengingat tantangan yang tidak sedikit selama tahun ini.

Kondisi Makro Ekonomi dan Inisiatif Strategis Pertamina Trans Kontinental

Laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2020 semakin melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia berkontraksi 0,42%, melambat -2,19% periode yang sama tahun lalu. Dampak pandemi COVID-19 sebagai faktor utama perlambatan ekonomi pada sepanjang 2020. Akibatnya, realisasi pertumbuhan ekonomi jauh meleset dari target pemerintah dalam APBN 2020. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sebesar -2,07%.

Beberapa indikator menunjukkan kontraksi pada tahun 2020 dan mengalami pertumbuhan minus. Penurunan investasi bisa dilihat di penjualan semen domestik yang tumbuh minus 10,38% yoy.

Tak hanya itu, volume penjualan kendaraan untuk barang modal juga terpantau minus 41,83% yoy serta nilai impor barang-barang modal yang tumbuh negatif 16,73% yoy. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh minus 2,63% yoy. Kontraksi komponen ini didorong oleh masih rendahnya daya beli masyarakat. Demikian juga dari sisi ekspor, sepanjang tahun 2020 ekspor terpantau tumbuh negatif 7,70% yoy. Sementara impor di sepanjang tahun 2020 tumbuh negatif 14,71% yoy. Satu-satunya yang tumbuh positif dari sisi pengeluaran adalah konsumsi pemerintah. BPS mencatat, konsumsi pemerintah tumbuh 1,94% yoy. Namun, nampak melambat bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 3,26% yoy.

Meskipun kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia tercatat minus diberbagai sektor, Pertamina Trans Kontinental mampu membukukan pertumbuhan positif baik dari sisi aset maupun laba Perusahaan.

Company to achieve sustainable growth. The positive performance recorded by the Company in 2020 is also an excellent asset to achieve higher business growth in the future, considering significant challenges occurred this year.

Macroeconomic Conditions and Pertamina Trans Kontinental Strategic Initiatives

The pace of economic growth at the fourth quarter of 2020 had been slower. The Central Statistics Agency (BPS) reported that Indonesia's economy contracted 0.42%, weakening by -2.19% from the same period last year. The impact of the COVID-19 pandemic as the main factor for the economic slowdown throughout 2020. Consequently, realization of economic growth was quite below the government's target as stipulated in the 2020 State Budget. Indonesia's economic growth in 2020 stood at -2.07%.

Several indicators indicated contraction in 2020 and minus growth. The fall in investment was presented in domestic cement sales which grew by minus 10.38% yoy.

Moreover, the volume of vehicles sales for capital goods was also saw a minus 41.83% yoy and the value of capital goods imports grew negatively by 16.73% yoy. Household consumption grew by minus 2.63% yoy. The component contraction was driven by the profound purchasing public power. Similarly in the export side, throughout 2020, exports were seen experiencing a negative growth of 7.70% yoy. Meanwhile, throughout 2020, imports grew negatively by 14.71% yoy. The only sector with positive growth in terms of expenditure was the government consumption. BPS reported that government consumption grew 1.94% yoy. However, the figure appeared to be slowing down if compared to 2019 at 3.26% yoy.

Despite negative growth experienced by Indonesia's macro and microeconomic conditions in various sectors, Pertamina Trans Kontinental managed to record positive growth both in terms of assets and profits.

Realisasi total aset tahun 2020 sebesar Rp5,99 triliun atau tercapai 104,53% dari RKAP tahun 2020. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 4,73 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp1,26 triliun atau naik 26,68%. Realisasi pendapatan usaha tahun 2020 sebesar Rp3,06 triliun atau tercapai 103,63% dari target RKAP tahun 2020 sebesar Rp2,95 triliun. Bila dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp2,54 triliun maka mengalami kenaikan sebesar 20,41%. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya jasa diversifikasi usaha yang tumbuh 26,42% atau setara dengan Rp364,10 miliar dari Rp1,38 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1,74 triliun pada tahun 2020.

Realisasi beban pokok penjualan tahun 2020 sebesar Rp2,18 triliun mencapai 105,20% dari RKAP tahun 2020 sebesar Rp2,95 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1,86 triliun maka mengalami peningkatan sebesar 17,30% atau setara Rp321,72 miliar. Laba Perusahaan tahun 2020 sebesar Rp423,38 miliar atau 112,16% dari RKAP tahun 2020 sebesar Rp377,49 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp294,99 miliar maka mengalami peningkatan sebesar 43,52% atau Rp128,38 miliar. Kenaikan ini tidak lepas dari meningkatnya nilai pendapatan usaha selama tahun 2020.

Prospek Usaha

Pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada seluruh perekonomian negara di dunia tanpa terkecuali. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 akan mengalami kontraksi dan mencapai nilai negatif. Situasi ini dinilai berpotensi lebih buruk dari tahun 2020.

Dampak dari resesi global, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dan terancam kehilangan sumber pendapatannya. Pada kuartal I 2020, berbagai negara telah mengalami pertumbuhan negatif, China -6,8%, Perancis -5,4%, dan Singapura -2,2%, tak terkecuali Indonesia yang mencapai 3,7%, meski ini juga merupakan koreksi yang cukup tajam. Seluruh dunia mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan manusia dan perekonomian. Stimulus fiskal dalam jumlah yang sangat besar disiapkan. Kementerian

Realization of total assets in 2020 achieved Rp5,99 trillion or 104,53% of the 2020 RKAP. If compared to 2019 which was 4.73 trillion, there was an increase of Rp1.26 trillion or 26,68%. Realization of operating revenues in 2020 achieved Rp3.06 trillion or 103.63% of the 2020 RKAP target of Rp2.95 trillion. If compared to 2019 that was Rp2.54 trillion, the figure grew by 20.41%. This increase was due to the increase in business diversification services that grew 26.42% or equal to Rp364.10 billion from Rp1.38 trillion in 2019 to Rp1.74 trillion in 2020.

Realization of cost of goods sold in 2020 achieved Rp2.18 trillion, or 105.20% of the 2020 RKAP of Rp2,95 trillion. If compared with 2019 amounting to Rp1.86 trillion, grew by 17.30% or equal to Rp321.72 billion. The Company's 2020 profit achieved Rp423.38 billion or 112.16% of the 2020 RKAP of Rp377.49 billion. If compared to 2019 with the realization of Rp294.99 billion, the figure grew by 43.52% or Rp128.38 billion. The increment was contributed from the revenues growth throughout 2020.

Business Prospect

The COVID-19 pandemic since early 2020 has affected all economies worldwide without exception. The International Monetary Fund (IMF) estimated that global economic growth in 2021 will contract and reach a negative value. This situation is considered to be potentially worse than in 2020.

As a result of the global recession, many people went unemployed and are threatened to lose their sources of income. By the first quarter of 2020, various countries experienced negative growth, China -6.8%, France -5.4%, and Singapore -2.2%, including Indonesia which reached 3.7%, despite was also a sharp correction. At international level, many countries were implementing extraordinary measures to save people and the economy. The Ministry of Finance has prepared a huge fiscal stimulus, which states that there are three

Kuangan menyatakan ada tiga langkah yang bisa dijalankan Pemerintah dan otoritas terkait dalam mendorong pemulihan ekonomi selama dan pasca COVID-19. Pertama, bantuan sosial perlu ditingkatkan penyalurannya untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Kedua, investasi harus didorong melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna mempercepat pemulihan di sisi dunia usaha. Terakhir, dukungan kebijakan bagi eksportir untuk bertahan dan pulih dari kondisi krisis. Seperti diketahui, ekspor menghadapi tekanan dari sisi permintaan global.

Perusahaan menyadari akan tantangan yang timbul dari kejadian ini dan dampak potensial untuk sektor bisnis. Perusahaan akan meninjau situasi secara berkelanjutan, bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk mendukung upaya menahan penyebaran COVID-19, dan berusaha untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis. Dinamika dan fluktuasi lingkungan makro ekonomi dan industri menjadi salah satu faktor yang dicermati sekaligus asumsi yang mempengaruhi pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan serta menyusun rencana strategis pada awal tahun. Guna mengantisipasi dampak yang dihasilkan, penetapan dan penerapan kebijakan strategis Perusahaan senantiasa diiringi dengan upaya untuk meningkatkan kecermatan dan kehati-hatian dalam setiap keputusan yang diambil.

Langkah dan kebijakan strategis dalam menggapai profitabilitas yang lebih kuat didukung oleh penerapan inovasi berbasis teknologi dalam proses dan kegiatan usaha yang dijalankan. Tidak hanya mendukung efisiensi biaya, inisiatif strategis ini turut memperkuat daya saing operasional Pertamina Trans Kontinental pada aspek kemutakhiran sistem informasi hingga proses dan model bisnis yang efektif dan efisien.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertamina Trans Kontinental terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui sistem pengelolaan SDM terpadu. Sistem pengelolaan SDM Perusahaan meliputi program rekrutmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang keahlian pekerja serta evaluasi kinerja

initiatives that can be taken by the Government and related authorities in promoting economic recovery during and post COVID-19. First, the distribution of social assistance needs to be increased to boost household consumption. Second, investment must be encouraged through the National Economic Recovery (PEN) program in order to accelerate recovery on the business side. Finally, policy support for exporters to survive and recover from the crisis. As broadly acknowledged, exports were contracted from the global demand side.

The Company realized the challenges arising from this incident and the potential impact on the business sector. The Company will review the situation on an ongoing basis, cooperate with the authorities to support efforts to restrain the COVID-19 transmission, and seek to minimize the impact against the businesses. The dynamics and fluctuations of the macroeconomic and industrial environment are one of the factors that are examined as well as assumptions that influence management judgment in making decisions and preparing strategic plans at the beginning of the year. In order to anticipate the resulting impact, the establishment and implementation of strategic policies of the Company are always accompanied by efforts to improve accuracy and prudence in every decision taken.

The strategic initiatives and policies to achieve stronger profitability are supported by the implementation of technology-based innovations in the processes and business activities carried out. Not only supporting cost efficiency, this strategic initiative also strengthens the operational competitiveness of Pertamina Trans Kontinental in updating information system aspect into effective and efficient business processes and models.

Human Resource Development

Pertamina Trans Kontinental seeks to develop quality of human resources in a sustainable manner through an integrated HR management system. The Company's HR management system includes a recruitment program that is carried out according to the needs, training and competency development in accordance with the employee's area of expertise and fair and objective

yang adil dan objektif. Dengan memiliki SDM yang profesional dan berintegritas, Perusahaan dapat memperkuat sumber daya dan menambah daya saing.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Untuk mewujudkan komitmen Direksi dan Komisaris dalam melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan, Perusahaan menindaklanjuti Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN dengan melakukan kegiatan penilaian GCG setiap tahun. Perusahaan melakukan asesmen GCG periode 2020 secara mandiri (*self assessment*)

Dalam melakukan penilaian ini, Pertamina Trans Kontinental berpedoman pada SK Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Setelah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil *assesmen* sebelumnya, Pertamina Trans Kontinental berhasil mendapatkan kategori Baik dengan nilai 81,944.

Demi mewujudkan GCG, Pertamina Trans Kontinental juga konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha dan risiko finansial, termasuk pengelolaan risiko investasi yang tengah giat dilaksanakan. Pertamina Trans Kontinental terus berupaya mengembangkan dan mengintensifkan implementasi *Integrated Enterprise Risk Management* (IERM) berbasis ISO 31000, sesuai kaidah dan standar internasional di seluruh lingkup kegiatan Perusahaan.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pelaksanaan serta pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Trans Kontinental telah mengaplikasi standar yang ditetapkan dalam ISO 26000: *Social responsibility*. Standar ISO

performance evaluation. By recruiting professional human resources with integrity, the Company managed to strengthen its resources and increase competitiveness.

Implementation of Good Corporate Governance

To achieve the Board of Directors and Board of Commissioners commitment in improving governance in a sustainable manner, the Company has followed-up the Minister of SOEs Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of GCG in BUMN by conducting GCG assessment activities every year. The Company conducted a GCG assessment for the 2020 by self assessment

In conducting this assessment, Pertamina Trans Kontinental refers to the Secretary to the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation in SOEs. After following up on the recommendations of the previous assessment results, Pertamina Trans Kontinental managed to achieve Good category with a score of 81.944.

In order to realize the GCG, Pertamina Trans Kontinental also consistently improves quality of the management over several risks encountered in carrying out business activities and financial risks, including the currently and actively implemented investment risk management. Pertamina Trans Kontinental strives to develop and intensify implementation of Integrated Enterprise Risk Management (IERM) based on ISO 31000, in accordance with international rules and standards within the Company's activity scope.

Implementation of Social and Environmental Responsibility

Implementation and reporting of Social and Environmental Responsibility (TJSL) Pertamina Trans Kontinental has applied the standards as stipulated in ISO 26000: *Social Responsibility*. The

tersebut membidik 7 (tujuh) aspek keberlanjutan, yaitu tata kelola, hak asasi manusia, operasi yang adil, ketenagakerjaan dan K3, lingkungan hidup, pengembangan sosial kemasyarakatan, dan pelanggan. Pertamina Trans Kontinental turut menerapkan upaya pemetaan (*mapping*) terhadap seluruh pemangku kepentingan beserta dampak yang dihasilkan, baik dampak yang dihasilkan kepada Perusahaan maupun dampak yang dihasilkan dari aktivitas Perusahaan. Hasil *due diligence* ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pertamina Trans Kontinental untuk menentukan isu-isu relevan terkait sosial, ekonomi, dan lingkungan, menetapkan keterlibatan, serta menyusun strategi untuk membidik isu-isu tersebut.

Pertamina Trans Kontinental menyadari bahwa di balik upaya meraih keuntungan sebesar-besarnya, kehadiran Perusahaan juga harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan. Di sinilah, Pertamina Trans Kontinental dituntut komitmennya untuk bisa menyelaraskan berbagai kepentingan itu agar tidak ada yang dirugikan. Komitmen Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang dituangkan dalam TJSL diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Dalam penyusunan program, Perusahaan senantiasa melibatkan wakil masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Hal itu dilakukan agar program-program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak ada program yang mubazir. Dengan pelibatan seperti ini, maka angka keberhasilan pelaksanaan program niscaya bisa ditingkatkan. Sebab, masyarakat merasa memiliki program-program tersebut sehingga terdorong untuk mewujudkannya sebaik mungkin.

Hingga akhir tahun 2020, dana yang disalurkan mencapai Rp1.605.880.341. Bantuan dana program ini disalurkan ke sejumlah bidang, yakni pendidikan, sosial budaya, kesehatan, infrastruktur, keagamaan, dan pengentasan kemiskinan.

Pertamina Trans Kontinental juga mengedepankan tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan

ISO standard targets 7 (seven) sustainability aspects, such as governance, human rights, fair operations, labor and HSE, environment, social development, and customers. Pertamina Trans Kontinental participate in implementing the stakeholders and potential impacts mapping, both the impact on the Company and the impact from the company's activities. The results of this due diligence will be further used as a reference for Pertamina Trans Kontinental to determine relevant social, economic and environmental issues, determine involvement, and formulate strategies to capture these issues.

Pertamina Trans Kontinental realizes that behind the efforts to achieve maximum profit, existence of the Company shall also bring maximum benefits to the community and environment. In this regards, Pertamina Trans Kontinental is required for its commitment to align various interests not to threat anyone. The Company's commitment to the society and the environment as outlined in TJSL is manifested through various community empowerment and environmental preservation programs.

In the program preparation, the Company always involves representatives of the community and other relevant stakeholders. This was done to assure the programs are arranged really fit the needs of the community and to prevent redundancy. Through this kind of involvement, success rate of program implementation can undoubtedly be increased. This is because the community embraced that they have these programs and motivated to realize best as possible.

As end of 2020, the proceeds distributed reached Rp1,605,880,341. The program budget assistance is disbursed into several sectors, such as education, socio-culture, health, infrastructure, religion, and poverty alleviation.

Pertamina Trans Kontinental also prioritizes responsibility for health and safety of each employee

kerja serta kesejahteraan setiap pekerjaannya dengan senantiasa mematuhi setiap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi setiap pekerjaannya. Berbagai program kesehatan, peningkatan profesionalisme, dan evaluasi kinerja dan kesejahteraan dilakukan secara rutin sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya.

Apresiasi

Izinkan kami menutup laporan ini dengan menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi, saran, dan nasihat yang diberikan demi mendukung penerapan *good corporate governance* yang optimal dan menyeluruh. Terima kasih kami juga sampaikan kepada seluruh pekerja Pertamina Trans Kontinental atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusinya dalam menggerakkan produktivitas Perusahaan demi meraih visi dan misi yang ingin dicapai.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN yang telah melakukan fungsi pengawasan dan mendukung ketahanan bisnis Pertamina Trans Kontinental di sepanjang tahun 2020. Pertamina Trans Kontinental berkomitmen dalam memberikan nilai dan manfaat yang berkelanjutan kepada konsumen dan pemangku kepentingan pada umumnya.

as well as welfare of each of its employees by always complying with all prevailing labor regulations and upholding the human rights of its employees. Various health programs, increased professionalism, and performance and welfare evaluations were carried out regularly as in previous years.

Appreciation

We would close this report by expressing our gratitude to the Board of Commissioners for the recommendations, suggestions and advice in supporting optimal and comprehensive implementation of good corporate governance. Our gratitude is also addressed to all employees of Pertamina Trans Kontinental for their dedication, hard work, and contribution in driving the Company's productivity in order to achieve the designated vision and mission.

We also express our gratitude to the Ministry of State-Owned Enterprises for carrying out a supervisory function and supporting Pertamina Trans Kontinental's business sustainability throughout 2020. Pertamina Trans Kontinental is committed to providing sustainable value and benefits broadly to the customers and stakeholders.

Jakarta, April 2021

Atas Nama Direksi **On behalf of Board of Directors**

PT Pertamina Trans Kontinental



NEPOS MT PAKPAHAN

Direktur Utama

President Director

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk Laporan Tahunan 2020

Statement of Responsibility from Board of Commissioners for 2020 Annual Report

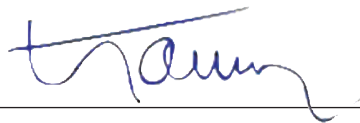
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Jakarta, April 2021

We, the undersigned, hereby declare that all information in PT Pertamina Trans Kontinental 2020 Annual Report have been fully disclosed and being solely responsible upon the accountability of the Annual Report Contents altogether with the Financial Statements.

Jakarta, April 2021

DEWAN KOMISARIS PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL PT Pertamina Trans Kontinental Board of Commissioners



IGNATIUS TALLULEMBANG

Komisaris Utama
President Commissioner

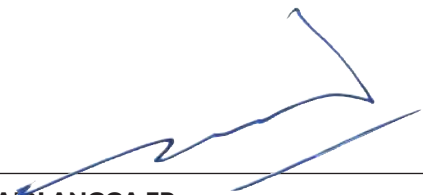
1 Januari 2020 - 13 Maret 2020
January 1, 2020 - March 13, 2020



ACHMAD FACHRUDDIN

Komisaris
Commissioner

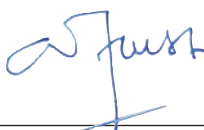
1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
January 1, 2020 - December 31, 2020



IVAN AIRLANGGA EP

Komisaris
Commissioner

1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
January 1, 2020 - December 31, 2020



ALFIAN NASUTION

Komisaris
Commissioner

1 Januari 2020 - 13 Maret 2020
January 1, 2020 - March 13, 2020



ANDI SAIFU HAQ

Komisaris
Commissioner

11 September 2020 - 31 Desember 2020
September 11, 2020 - December 31, 2020

Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2020

Statement of Responsibility from Board of Directors for 2020 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Jakarta, April 2021

We, the undersigned, hereby declare that all information in PT Pertamina Trans Kontinental 2020 Annual Report have been fully disclosed and being solely responsible upon the accountability of the Annual Report Contents altogether with the Financial Statements.

Jakarta, April 2021

DIREKSI PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL PT Pertamina Trans Kontinental Board of Directors



NEPOS MT PAKPAHAN

Direktur Utama
President Director

1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
January 1, 2020 - December 31, 2020



HADI PURNOMO

Direktur Operasi
Director of Operation

1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
January 1, 2020 - December 31, 2020



ARSONO KUSWARDANU

Direktur Pemasaran
Director of Marketing

1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
January 1, 2020 - December 31, 2020



NEPOS MT PAKPAHAN

PLT Direktur Keuangan
Act. Director of Finance

1 Januari 2020 - 31 Mei 2020
January 1, 2020 - May 31, 2020



AZWANI

Direktur Keuangan
Director of Finance

1 Juni 2020 - 31 Desember 2020
June 1, 2020 - December 31, 2020



3

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Identitas Perusahaan

Corporate Identity



Nama Perusahaan Company Name	PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL	
Nama Singkat Common Name	PTK	
Alamat Kantor Office Address	Jl. Kramat Raya No. 29 Jakarta Pusat 10450	
Telepon Phone	(+6221) 31923005	
Faksimili	(+6221) 3106804	
E-mail	ptkpusat@ptk-shipping.com	
Website	www.ptk-shipping.com	
Bidang Usaha Line of Business	Jasa pelayaran, jasa maritim dan jasa logistik	Shipping, maritime and logistic services
Status Perusahaan Company Status	Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Subsidiary of State-Owned Enterprise (SOEs)
Tanggal Berdiri Establishment Date	9 September 1969	September 9, 1969
Tanggal Beroperasi Operations Date	9 September 1969	September 9, 1969
Dasar Hukum Pendirian Usaha Legal Business of Establishment	- Akta No 3 Tanggal 9 September 1969 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Tan Thong Kie, di Jakarta. - Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA yang disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, nama PT Pertamina Tongkang berubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. - Deed No. 3 dated September 9, 1969 drafted by and before Notary Tan Thong Kie in Jakarta. - Deed No. 012 dated October 26, 2011 by Notary Dewantari Handayani, MPA approved under the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Decree No: AHU-58581.AH.01.01 Year 2011 dated November 29, 2011, the name alteration of PT Pertamina Tongkang into PT Pertamina Trans Kontinental.	
Modal Dasar Authorized Capital	Rp2.000.000.819.000,- Terbagi atas 2.000.000 lembar saham seri A dengan masing-masing bernilai Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,-	Rp2,000,000,819,000,- Divided into 2,000,000 Series A shares with par value of Rp1,000,000 and 819 Series B Shares with par value of Rp1,000.



MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH Subscribed and Fully Paid-in Capital	Rp693.708.819.000,- Terbagi atas 693.708 lembar saham seri A dengan nominal masing-masing Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,-	Rp693,708,819,000,- Divided into 2,000,000 Series A shares with par value of Rp1,000,000 and 819 Series B shares with par value of Rp1,000.
NPWP	01.000.501-5.051.000	
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) Business Registry	8120110071176	
SKDP	78/27.1BU.1/31.71.04.1004/07 1.562/e/2017 (Berlaku sampai dengan 06 September 2022)	78/27.1BU.1/31.71.04.1004/071. 562/e/2017 (Valid until September 6, 2022)
SIUPAL	BXXV-1203/AL 58	
SKPP	PEM-00094/WPJ.07/KP.01032005	
KANTOR LAYANAN Office Network	• 1 Kantor Pusat • 11 Kantor Cabang • 25 Kantor Sub-cabang	• 1 Head Office • 11 Branch Office • 25 Sub-Branch Offices
JUMLAH PEKERJA Total Employees	• 898 Pekerja di tahun 2020 • 668 Pekerja di tahun 2019 • 673 Pekerja di tahun 2018 • 609 Pekerja di tahun 2017	• 898 Employees in 2020 • 668 Employees in 2019 • 673 Employees in 2018 • 609 Employees in 2017
PEMEGANG SAHAM Shareholder	• PT Pertamina (Persero) 99,999% • PT Pertamina Pedeve Indonesia 0,001%	• PT Pertamina (Persero) 99,999% • PT Pertamina Pedeve Indonesia 0,001%
SERIKAT PEKERJA Trade Union	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Pertamina Trans Kontinental (SPSI PTK)	



Perubahan Nama Perusahaan

Name Alteration

Perusahaan ini semula bernama PT Pertamina Tongkang yang berdiri pada 9 September 1969. Pada tahun 2011, Perusahaan mengalami perubahan nama menjadi PT Pertamina Trans Kontinental sesuai Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA. Akta tersebut disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

The Company was formerly named PT Pertamina Tongkang and established on September 9, 1969. In 2011, the Company had its name altered into PT Pertamina Trans Kontinental according to Deed No. 012 dated October 26, 2011 by Notary Dewantari Handayani, MPA. The Deed was approved under Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia Decree No. AHU-58581.AH.01.02 year 2011 dated November 29, 2011.

Sejarah Singkat Perusahaan

Corporate Brief History



Perusahaan ini semula bernama PT Pertamina Tongkang yang berdiri pada 9 September 1969 di Jakarta yang menjalankan usaha di bidang industri jasa maritim.

This company was originally named PT Pertamina Tongkang which was established on September 9, 1969 in Jakarta, which runs a business in the maritime service industry.

Selain mengoptimalkan sumber daya yang ada, PTK sebagai bagian dari Grup Pertamina juga senantiasa memanfaatkan peluang dan sinergi yang terjalin di dalamnya saat menjalankan aktivitas bisnis dan operasional sehari-hari.

Perusahaan ini semula bernama PT Pertamina Tongkang yang berdiri pada 9 September 1969 di Jakarta yang menjalankan usaha di bidang industri jasa maritim. Perusahaan ini berfungsi memberikan dukungan bagi aktivitas PT Pertamina (Persero) dengan tiga kegiatan strategis yaitu:

- Pengadaan distribusi bahan bakar ke semua pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang tidak dapat terjangkau oleh kapal tanker;
- Pengadaan transportasi maritim bagi Pertamina Logistik untuk pengembangan proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
- Bertindak sebagai *General Agent* dan *Handling Agent* bagi kapal – kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) yang disewakan.

Besides optimizing available resources, PTK as part of Pertamina Group continues to utilize opportunities and synergies interwoven in it while running business activity and daily operation.

The Company was formerly named PT Pertamina Tongkang and established on September 9, 1969 in Jakarta engaging maritime service industry. The Company is functioned to support activities of PT Pertamina (Persero) in three strategic activities, as follows:

- Provision of fuel distribution to all ports in the Indonesian territory that cannot be reached by tanker ship;
- Provision of maritime transport for Pertamina Logistik for the development of projects spread across the Indonesian territory;
- Acting as a *General Agent* and *Handling Agent* for chartered-out tanker ships owned by PT Pertamina (Persero).

Pada awalnya peranan PTK masih sebagai sebatas unit bisnis yang diperbantukan pada aktivitas pengembangan PT Pertamina (Persero). Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1974 Perusahaan menerima tambahan armada kapal sejenis *supply vessel*. Hal ini untuk melayani dan mendukung pelaksanaan eksplorasi pengeboran minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai dan juga keperluan produksi.

Empat tahun kemudian Perusahaan memperluas layanan jasa pada Perusahaan lain, menyusul selesainya program konstruksi depot bahan bakar baru di belahan timur dan tengah Indonesia. Selanjutnya, Perusahaan mengubah model bisnisnya untuk tujuan mencari keuntungan dan fokus kepada aktivitas lepas pantai dengan menyediakan layanan:

- Membantu eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai.
- Menjadi *Handling Agent* dari penyewa kapal milik PT Pertamina (Persero) dan kapal pihak ketiga.

Pada tahun 1988 Perusahaan melakukan penyesuaian izin dari semula izin bisnis sebagai Perusahaan pelayaran yang spesifik di bidang lepas pantai sesuai Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 (Penataan Ulang dan Pengusaha dari Transportasi Laut), menjadi Perusahaan pelayaran dengan SIUPP No.3.XXX-256/AL.58. Penyesuaian perizinan diikuti penerbitan SIUPAL BXXV- 1203/AL 58 pada tanggal 26 Maret 2002 oleh Direktorat Umum Komunikasi Kelautan Departemen Perhubungan.

Kian luasnya pelayanan dan jasa yang diberikan, menjadikan Perusahaan melakukan beberapa perubahan. Salah satunya perubahan nama dari PT Pertamina Tongkang menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. Perubahan nama berlaku efektif 29 November 2011 sesuai dengan Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA, yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU- 58581. AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

In the beginning, PTK under the name of PT Pertamina Tongkang was assisted to the development activities of PT Pertamina (Persero). To support operations, in 1974 the Company received additional fleet of supply vessel-type ships to serve and support the implementation of offshore oil and gas drilling exploration and also production requirements.

Four years later, the Company expanded its services to other companies, following the completion of the new fuel depot construction program in the eastern and central regions of Indonesia. The Company altered its business model with the purpose of gaining profit and focusing on offshore activities by providing the following services:

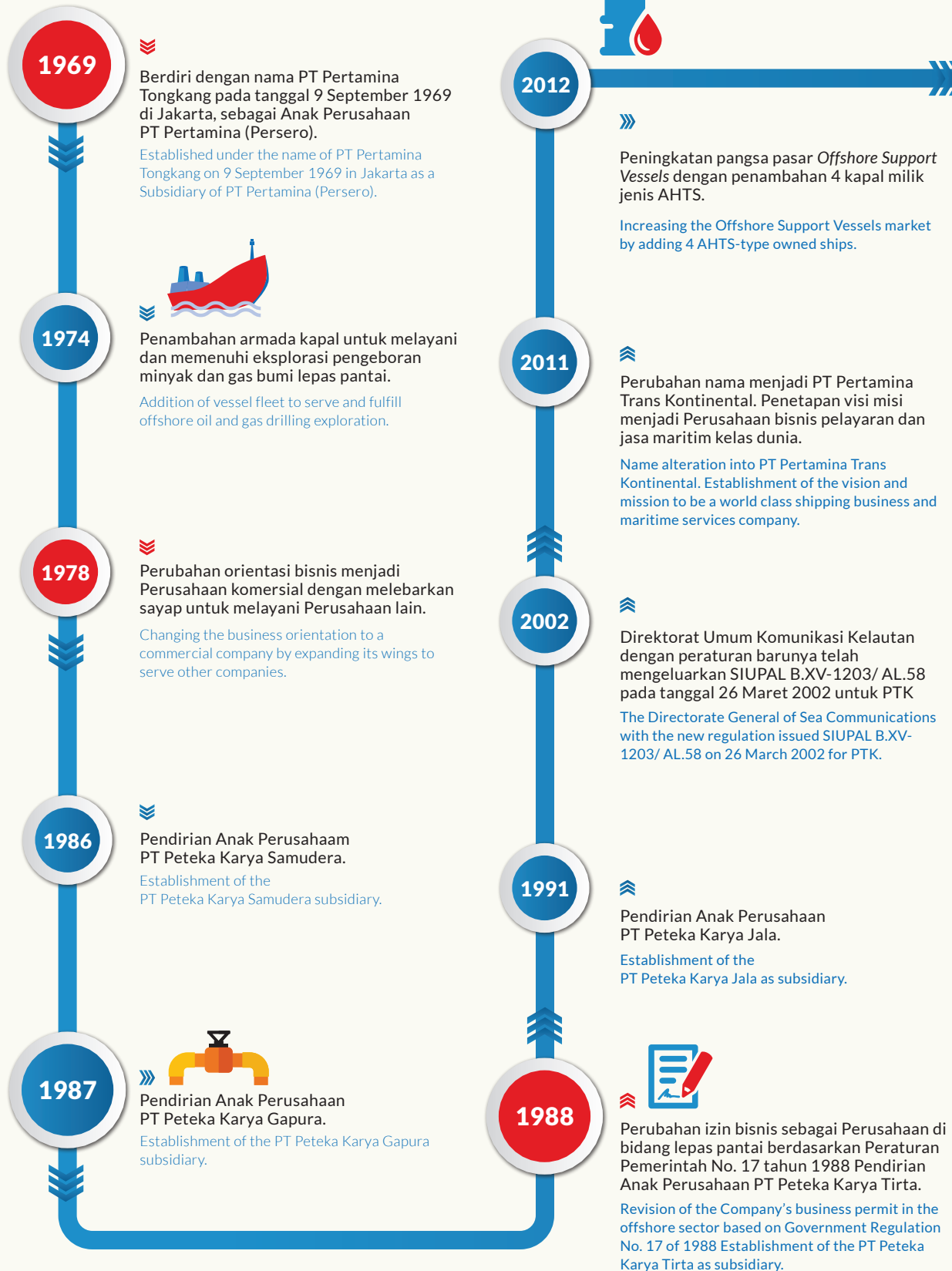
- Assisting offshore oil and gas exploration.
- Becoming a Handling Agent for charterers of vessels owned by PT Pertamina (Persero) and third parties.

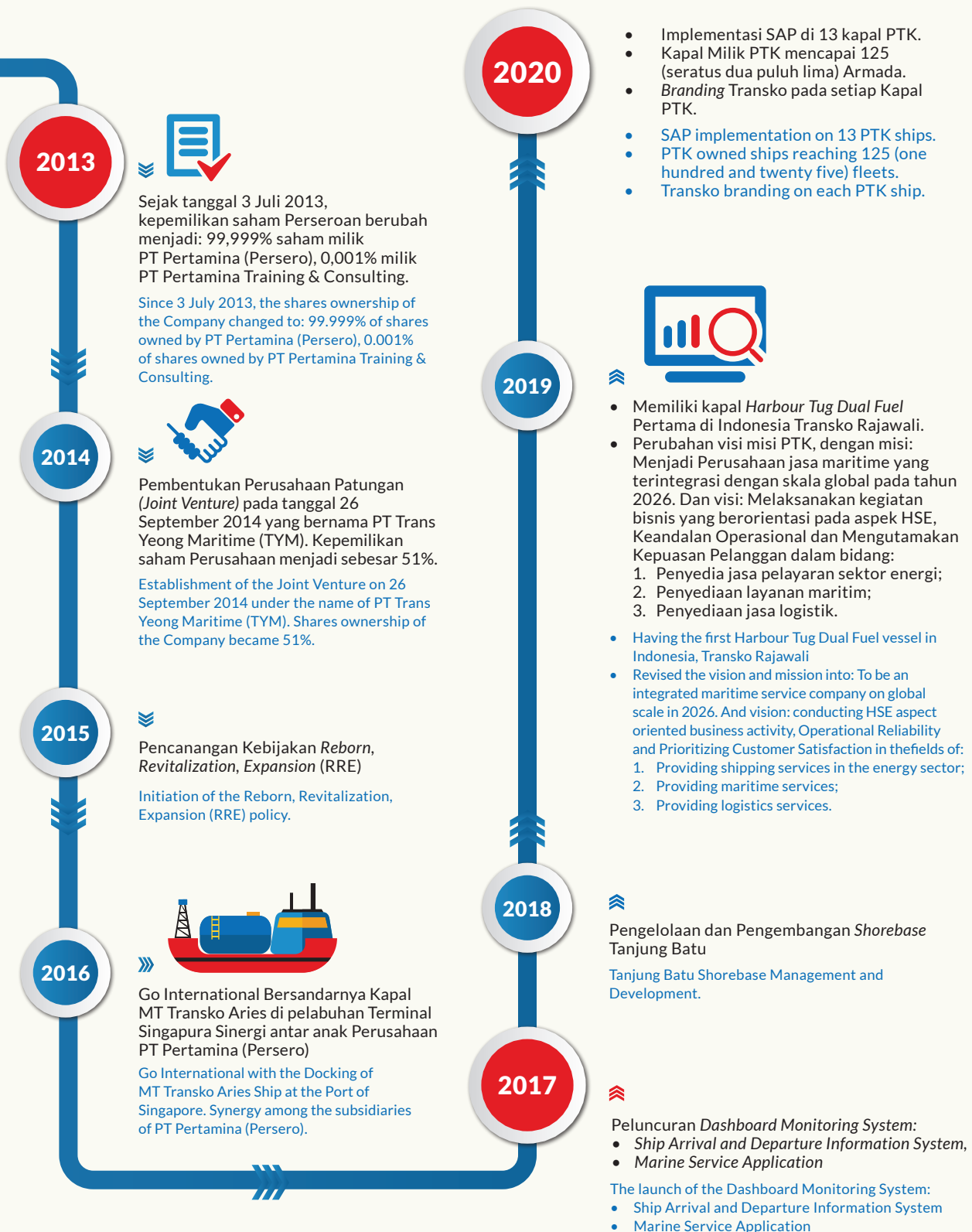
In 1988, the Company aligned its licensing from the business license as a shipping company with specification in the offshore sector in accordance with Government Regulation No. 17 of 1988 (Sea Transport Organization and Business) to a shipping Company with SIUPP No. 3.XXX-256/AL.58. The licensing alignment was followed by the issuance of SIUPAL No. BXXV-1203/AL 58 on 26 March 2002 by the General Directorate of Sea Communications of the Department of Transportation.

The expanding provided services urged the Company to make several changes. Including the name change from PT Pertamina Tongkang to PT Pertamina Trans Kontinental. The name change was effective from 29 November 2011 in accordance with Deed No. 012 of 26 October 2011 by Notary Dewantari Handayani, MPA, which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree No: AHU-58581.AH.01.02 of 2011 of 29 November 2011.

Jejak Langkah Perusahaan

Corporate Milestone





Bidang Usaha

Line of Business

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan No. 7 tanggal 3 Juli 2013, Pasal 3 disebutkan bahwa PTK menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa pelayaran, jasa maritim dan jasa logistik baik di dalam maupun luar negeri, serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang jasa pelayaran, jasa maritim dan jasa logistik tersebut.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association No. 7 of 3 July 2013, PTK runs business activities in the shipping services, maritime services, and logistics services line of business, whether domestic or overseas, as well as other business activities relevant to or supporting said business activities in the shipping services, maritime services, and logistics services line of business.



Jasa Pelayaran

Kegiatan usaha PTK dibidang jasa pelayaran adalah sebagai berikut:

- Usaha-usaha dalam bidang pengangkutan hasil industri pertambangan dan umum;
- Usaha dalam bidang pengangkutan laut antar pelabuhan serta jasa penunjangnya, baik dalam maupun luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal serta jasa penunjangnya;
- Usaha di bidang pelayaran/pengangkutan khusus peralatan dan kebutuhan pengeboran migas, muatan batubara, muatan cair dan gas serta kargo umum lainnya;
- Menjalankan usaha penunjang bidang pelayaran;
- Usaha di bidang jasa manajemen kapal/ship management services (ship crewing, ship operator, ship maintenance);

Shipping Service

PTK business activities in shipping service are:

- Business in the transport of mining and general industry products sector;
- Business in the inter-port sea transport as well as supporting services, whether domestic or overseas, performed permanently and regularly and/or impermanent and irregular shipping using all types of vessels and supporting services sector;
- Business in the specific shipping/freight of oil and gas drilling equipment and needs, coal cargo, liquid and gas cargo, as well as other general cargo;
- Conducting the shipping sector supporting business;
- Business in the ship management services sector (ship crewing, ship operator, ship maintenance);

- Menjalankan usaha penyewaan kapal (*ship chartering & brokerage*);
- Menjalankan usaha keagenan kapal (*ship agencies*);
- Usaha *salvage* dan penundaan kapal;
- Jasa pemeliharaan peralatan pelayaran (navigasi).

- Conducting the ship charter business (*ship chartering & brokerage*);
- Conducting the ship agency business (*ship agencies*);
- Ship salvaging and delaying business;
- Navigation equipment maintenance services (*navigation*).



Jasa Maritim

Kegiatan usaha PTK dibidang jasa maritim adalah sebagai berikut:

- Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistik termasuk suku cadangnya, tapi tidak terbatas pada kapal tanker, *supply vessel*, tongkang, kapal tunda dan RIB;
- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan *general cargo*;
- Melaksanakan *bunker service* berupa pengisian dan/ atau pendistribusian BBM untuk kapal baik di laut maupun di darat;
- Melakukan jasa pengolahan dan penyediaan air untuk keperluan kapal dan industri;
- Melaksanakan kegiatan distribusi dan *supply* bahan bakar dan air untuk kebutuhan kapal-kapal, depot-depot dan industri;
- Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal serta penyediaan suku cadang kapal dan alat transportasi lainnya;

Maritime Service

PTK Business activities in maritime service are:

- Purchasing and selling of transportation and/or logistic equipment including spare-parts but are not limited in tankers, supply vessels, barge, tug boat, and RIB
- Liquid, gas and general cargo transport and storing business
- Providing bunker services including fuel oil refilling and/or distribution for vessels, whether on or offshore
- Conducting water processing and supply services for vessels and industry needs
- Conducting fuel and water distribution and supply activities for vessels, depots, and industry needs
- Conducting the ship manufacturing and repair business as well as provision of spare parts for ships and other means of transportation

- Melakukan jasa perencanaan, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung dan konstruksi-konstruksi bangunan di lepas pantai dan di bawah air beserta peralatannya;
- Jasa *tank cleaning* dan pengelolaan limbah (*sludge*);
- Melakukan usaha jasa bongkar muat barang di kapal;
- Melakukan usaha bidang kepelabuhanan dan administrasi pelabuhan khusus;
- Jasa pemeliharaan fasilitas pelabuhan;
- Jasa *Recognize Security Organization* (RSO);
- Survei kelautan mengenai arus dan kedalaman laut (*Hydrografi Oceanography* dan Pemetaan/HOP);
- Konstruksi bawah air berupa pemasangan dan pemeliharaan pipa dan kabel bawah laut dan lain-lain;
- Jasa pengerukan dan reklamasi pantai;
- Jasa perawatan pekerjaan minyak dan gas bawah air;
- Jasa penyelaman dan pekerjaan bawah air.
- Conducting the business of planning, construction, repair, and maintenance services for vessels, flotation devices, and construction of offshore and underwater constructs and their equipment;
- Tank cleaning and waste management (*sludge*) services;
- Ship loading and unloading services;
- Port Activities and Special Port Administration;
- Ports and Special Ports Administration services;
- Recognized Security Organization (RSO) services;
- Maritime Survey on Ocean Stream and depth (*Hydrographic and Oceanographic Prediction/HOP*);
- Underwater construction service as submarine pipe and cable installation and maintenance and other services;
- Beach dredging and reclamation services;
- Subsea oil and gas project maintenance service;
- Subsea diving and project services.



Jasa Logistik

Kegiatan usaha PTK dibidang jasa logistik adalah sebagai berikut:

- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan general cargo;
- Jasa ekspor impor barang dan jasa pengurusan dokumen ekspor impor (*customs clearance*);
- Conducting the liquid, gas, and general cargo transportation and storing business;
- Export, import, and customs clearance services;

Logistic Service

PTK Business activities in logistic service are:

- Mengadakan usaha di bidang *International Freight Forwarding*, tidak terbatas pada jasa pengangkutan, pengiriman, dan pendistribusian barang;
- Penyewaan alat-alat berat dan atau peralatan kerja serta produksi;
- Melakukan kegiatan usaha penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang serta usaha lainnya (*logistic base*);
- Jasa penyewaan dan pengelolaan gedung dan perkantoran.

- *International Freight Forwarding business, not limited to logistics, delivery, and distribution services*
- *Heavy equipment and/or production equipment rental*
- *Storage, warehouse, logistics and distribution services of various commodities and other services (logistics base)*
- *Building and office rental and management services*



Bisnis Utama dan Produk Usaha

Penyediaan Kapal

PTK memiliki bisnis inti penyedia kapal sebagai armada operasional, yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan penyewa guna mendukung kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai dan darat seperti PT Pertamina (Persero), perusahaan migas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan lainnya.

Charter & Brokerage

Aktivitas bisnis melalui *charter and brokerage* dilakukan atas permintaan pelanggan, untuk memenuhi kebutuhan jenis kapal yang tidak dimiliki oleh PTK. *Charter and Brokerage* dilakukan dengan cara menyewa kapal sesuai dengan permintaan.

Core Business and Business Products

Vessel provider

PTK has the core business as a provider of vessels as an operational fleet, used in fulfilling the needs of charterers to support the offshore and onshore oil exploration activities, such as PT Pertamina (Persero), Contractors of Cooperation Contract (KKKS) oil and gas companies, and others.

Charter & Brokerage

Business activities through *charter and brokerage* are conducted on the basis of customer demand to meet the needs for types of vessels not owned by PTK. *Charter and Brokerage* is performed by chartering vessels according to demand.

Keagenan Kapal

PTK menyediakan layanan keagenan kapal sebagai Agen Umum (*General Agent*) atau Agen Penanganan (*Handling Agent*) untuk kapal yang berlabuh di semua pelabuhan di Indonesia. Sebagai keagenan kapal, maka tugas utama Perusahaan adalah mewakili pemilik/*principal* dalam memenuhi persyaratan atau kewajiban bagi kapal yang tiba di Indonesia. Selama periode pelaporan PTK telah melaksanakan keagenan kapal yang meliputi Agen Umum atau Agen Penanganan. Perusahaan menjadi Agen Penanganan di semua pelabuhan di Indonesia serta pelabuhan umum atau *port* tertentu. Jasa yang diberikan mencakup penyediaan *crew*, penanganan bunker, penyediaan air dan kegiatan lain yang berhubungan dengan agen.

Jasa *shipping agent* yang diberikan PTK melayani:

- *In/out clearance* kapal di pelabuhan;
- Mengurus perizinan yang berkaitan dengan keimigrasian atau perhubungan laut;
- Menyiapkan fasilitas darat maupun laut;
- Layanan untuk awak dan kapal;
- Penyelesaian kewajiban keuangan (pencairan).

Tanggung jawab PTK sebagai *shipping agent*:

- Memastikan kelancaran kapal operasional di pelabuhan;
- Menyelesaikan kewajiban finansial;
- Menyampaikan laporan realisasi kunjungan kapal-kapal di pelabuhan Indonesia.

Pemanduan Kapal

Dalam bidang usaha ini telah melaksanakan Jasa Pelayanan Pemanduan Kapal di Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Pertamina.

Pengelolaan Pelabuhan

PTK melalui Anak Perusahaan PT Peteka Karya Samudera melaksanakan jasa Administrasi Pelabuhan Khusus (Pelsus) di enam belas lokasi Terminal Khusus (Tersus) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas.

Vessel Agency

PTK provides the ship agency services as a General Agent (GA) or Handling Agent (HA) for ships docking at all ports in Indonesia. As a ship agency, then the main duty of the Company is to represent the owner/*principal* in meeting the requirements or obligations for ships arriving in Indonesia. In the reporting period, PTK has performed ship agency which included General Agency and Handling Agency. The Company acts as a Handling Agent in all ports in Indonesia, whether general ports or special ports. The services provided include crew supply, bunker management, water provision, and agent-relevant activities

The shipping agent services provided by PTK:

- *In / out clearance* of ships at the port;
- Managing permits relating to immigration or sea transportation;
- Preparing onshore and/offshore facility;
- Services for crew and vessel;
- Financial liability settlement (disbursement)

PTK responsibilities as a shipping agent:

- Ensuring the ease of operational ships at the port;
- Settling financial liability;
- Submitting the report for the visits of ships at Indonesian ports.

Pilotage Services

In this business field, the Company has carried out ship scout services at Pertamina's Special Purposes Terminal (Tersus) and Private Interest Terminal (TUKS).

Port Management

PTK through its subsidiary PT Peteka Karya Samudera implements Special Port (Pelsus) Administration services in sixteen locations of Special Purposes Terminal (Tersus) Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK) Migas - Contractors of Cooperation Contract (KKKS).



Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Perseroan di bidang ini meliputi:

- Pelaksanaan administrasi pada layanan pelabuhan yang meliputi labuh, tambat, pandu, tunda (di luar wilayah kerja PT Pelindo) sebagai delegasi PT Pertamina (Persero), dimana pekerjaan Perseroan atas nama PT Pertamina (Persero);
- Membuat laporan secara periodik terkait penyelesaian pekerjaannya, Perusahaan bertanggung jawab kepada PT Pertamina (Persero);
- Mengurus perizinan;
- Mengelola administrasi pelabuhan khusus. Dalam hal ini Perseroan hanya mengelola pelabuhan khusus KKKS dan JOB;
- Melakukan penagihan jasa pelabuhan kepada Agen;
- Melakukan penyetoran jasa pelabuhan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah;
- Membuat laporan kegiatan kepelabuhanan kepada PT Pertamina (Persero), BP Migas, Kantor Pelabuhan/ Administrasi Pelabuhan;
- Membantu pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kepelabuhanan di Pelabuhan Khusus KKKS dan JOB.

The scope of the Company's duties and responsibilities in this sector includes:

- Conducting the administration of port services, which include anchoring, mooring, guidance, delay (outside the PT Pelindo operational areas) as a delegate of PT Pertamina (Persero) where the Company acts on behalf of PT Pertamina (Persero);
- Preparing periodic reports relevant to job completion, the Company is responsible to PT Pertamina (Persero);
- Permits handling;
- Managing special port administration. In this case, the Company only manages KKKS and JOB special ports;
- Conducting the collection for port services to the Agent;
- Conducting the Port Services deposit to PT Pertamina (Persero) and the Government;
- Composing reports of port activities to PT Pertamina (Persero), BP Migas, Port/Port Administration Office;
- Assisting management relevant to port administration at KKKS and JOB Special Ports.



Bunker Agent

Bunker agent merupakan fasilitas yang disediakan PTK untuk jasa pengiriman bahan bakar minyak untuk kapal atau tanker.

Bunker Agent

Bunker agent is a facility provided by PTK for the transport of fuel oil for vessels or tankers services.

Offshore & Onshore Logistic Base

PTK menawarkan jasa pelayanan yang terintegrasi dalam *offshore & onshore logistic base*, meliputi:

Offshore & Onshore Logistic Base

The Company provides integrated services in *offshore & onshore Logistics Base*, including:

- Gudang penyimpanan seluas 45,28 hektar;
- Pengiriman kargo dan jasa kargo administrasi;
- Perbaikan dan pembersihan kargo dengan fasilitas lengkap;
- Menyediakan layanan pasokan air bersih, pasokan bahan bakar gas dan jasa lainnya;
- Persewaan gedung kantor di Batam di Jalan Yos Sudarso Batu Ampar–Pulau Batam terdiri dari tiga

- A 45.28 ha² storage warehouse;
- Cargo shipping and cargo administration services;
- Cargo repair and cleaning with full facilities;
- Providing clean water supply, gas fuel supply, and other services;
- Office building rental located at Yos Sudarso Street, Batu Ampar–Batam Island comprising of 3 floors for office needs, equipped with facilities

lantai untuk kebutuhan kantor, dengan fasilitas pendingin ruangan/AC, area parkir, keamanan 24 jam, 50 saluran telepon dan dilengkapi dengan sistem PABX. Selain itu, memiliki 350 KVA generator listrik dengan lokasi strategis di kargo jalur utama dan pelabuhan Batu Ampa.

- Dukungan peralatan dan infrastruktur meliputi:
 - » Lalu lintas dermaga;
 - » Peralatan derek (*crane*) dengan kapasitas 50 tons ph, American *crane* kapasitas 75 ton, *crane* Todano kapasitas 20 ton, derek petty bone, *carrylift* kapasitas 20 ton, *forklift* kapasitas 3 dan 5 ton, *prime over* setinggi 40 feet, dan *trailer caps* setinggi 40 feet.

Recognized Security Organization (RSO)

PTK ditunjuk sebagai RSO sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. Kl. 93/1/15-04 yang telah diperbaharui sampai dengan saat ini. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Direksi RSO untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi ISPS Code di Indonesia.

RSO merupakan konsultan dalam bidang keamanan yang memberikan saran atau menyediakan bantuan dalam bidang operasional kapal dan fasilitas pelabuhan, meliputi:

- Melaksanakan Kegiatan Sertifikasi ISPS Code untuk kapal (ISSC) dan Fasilitas Pelabuhan (SoCPF).
- Melaksanakan atau menyelesaikan Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSA).
- Membantu dalam menyiapkan rencana keamanan fasilitas pelabuhan (PFSP).

of Air Conditioner (AC), parking lot, 24 hours security, 50 phone lines, and PABX system facilities. Additionally, the building also has a 350 KVA electricity generator with a strategic location at primary cargo route and Batu Ambar port.

- Equipment and infrastructure support includes:
 - » Harbor traffic
 - » Crane with 50 tons ph capacity, American Crane with 75 tons capacity, Todano Crane with 20 tons capacity, petty bone crane, *carrylift* with 20 tons capacity, *forklift* with 3 and 5 tons capacity, 40-feet *prime over*, and 40-feet *trailer caps*.

Recognized Security Organization (RSO)

The Company was appointed as RSO since 2004 based on the Director General of Sea Transportation Decree No. Kl. 93/1/15-04 which has been updated until now. This is the realization of the commitment of the RSO Board of Directors to participate in ISPS Code implementation in Indonesia.

RSO is a security sector consultant that provides suggestion or assistance in vessel operations and ports facilities, including:

- Organizing activities of ISPS Code Certification for vessels (ISSC) and Ports Facilities (SoCPF).
- Conducting and completing the Ports Facilities Security Assessment (PFSA).
- Assisting in the preparation of the Ports Facilities Security Plan (PFSP).

Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Value

Penetapan Visi dan Misi yang kini berlaku telah mendapatkan persetujuan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pertamina Trans Kontinental secara sirkuler tanggal 18 November 2019 tentang Perubahan Visi dan Misi dan Persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2019. Maka berlaku efektif sejak keputusan tersebut, Visi dan Misi Perusahaan kami adalah sebagai berikut:

Stipulation of current Vision and Mission has been ratified by the Board of Directors under PT Pertamina Trans Kontinental Circular Decree of the Board of Directors of PT Pertamina Trans Kontinental dated 18 November 2019 concerning Changes in Vision and Mission and Approval of the Board of Commissioners on 27 November 2019. The change is effective since date of the decree, thereby, the Vision and Mission are as follows:



VISI
Vision

Menjadi Perusahaan Jasa Maritim yang Terintegrasi Dengan Skala Global pada Tahun 2026.

To be an Integrated Maritime Service Company on Global Scale in 2026.



MISI
Mission

Melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE, Kehandalan Operasional dan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan dalam bidang:

1. **Penyediaan jasa pelayaran sektor energi;**
2. **Penyediaan layanan maritim;**
3. **Penyediaan jasa logistik.**

Carrying out business activities oriented to HSE aspects, operational reliability and prioritizing customer satisfaction in the fields of:

1. Providing shipping services in the energy sector;
2. Providing maritime services;
3. Providing logistics services.

Perubahan visi tersebut merupakan tonggak Perusahaan yang harus ditegakkan segenap Insan PTK. Maka untuk mewujudkan PTK sebagai Perusahaan Jasa Maritim yang Terintegrasi dengan Skala Global pada Tahun 2026 diperlukan langkah-langkah strategis yaitu:

The change of vision has become a milestone of the Company to be uphold by all of PTK's people. To realize PTK as an Integrated Maritime Service Company on Global Scale in 2026, the strategic initiatives have been prepared, as follows:

1. Melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE;
2. Meningkatkan kehandalan operasional;
3. Mengutamakan kepuasan pelanggan dalam Penyediaan jasa pelayaran *sector energy*, layanan maritim dan jasa logistik.

1. Carrying out business activities oriented to HSE aspects;
2. Increasing operational reliability;
3. Prioritizing customer satisfaction in shipping service provision for energy sector, maritime services and logistics services.

NILAI-NILAI UTAMA PERUSAHAAN

Dalam rangka mewujudkan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial (*social welfare*), penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta, dibutuhkan transformasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dimana salah satunya melalui penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, Pertamina Trans Kontinental mengadopsi dan mengoptimalkan nilai-nilai Perusahaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip AKHLAK yang telah disahkan melalui SK Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. KPTS-33/C00000/2020-S0.

CORPORATE VALUES

To actualize the role of State-Owned Enterprises as economic growth engines, social welfare accelerators, job providers, and talent providers, it is necessary to transform the Human Resources of State-Owned Enterprises, through the determination of Core Values of the Human Resources as identity and the glue of work culture that supports sustainable performance improvement.

Therefore, Pertamina Trans Kontinental adopts and optimizes company values based on the AKHLAK principles that have been ratified through the President Director of PT Pertamina (Persero) Decree No. KPTS-33/C00000/2020-S0.



AMANAH (Trustworthy)

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Uphold the trust given.



KOMPETEN (Competent)

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continues learning and capability improvement.



HARMONIS (Harmonious)

Saling peduli dan menghargai perbedaan
Mutual care and value diversity.



LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Dedicated and prioritize the interest of the National and Country.



ADAPTIF (Adaptive)

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Continuously innovating and enthusiast in driving and facing the change.



KOLABORATIF (Collaborative)

Membangun kerja sama yang sinergis
Build synergistic cooperation.

Logo dan Filosofinya

Logo and The Philosophy



Logo Perusahaan telah disahkan berdasarkan PEDOMAN STANDARISASI IDENTITAS PERUSAHAAN, NOMOR: REVISI: PDM-001/G0000/2011- S0 dan berlaku sejak 22 Desember 2011.

The company logo has been ratified based on the COMPANY IDENTITY STANDARDIZATION GUIDELINES, NUMBER: REVISION: PDM-001/G0000/2011-S0 valid since 22 December 2011.

Warna Merah

Mencerminkan insan Pertamina Trans Kontinental yang pekerja keras, berani, dan rajin serta mampu melawan tantangan.

Red Color

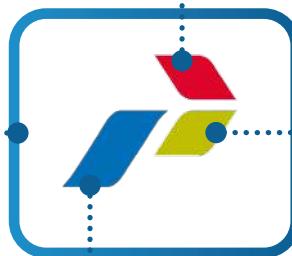
Reflects the Pertamina Trans Kontinental personnel who are hard workers, courageous, and diligent as well as capable of facing challenges.

Simbol Anak Panah

Melambangkan aspirasi organisasi Perusahaan untuk senantiasa bergerak ke depan, maju dan progresif. Ketiga elemen melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk Negara Indonesia. Simbol tersebut terlihat seperti monogram huruf "P" yang merupakan huruf pertama "PERTAMINA".

"Arrow" Symbol

The "Arrow" symbol represents the Company's organizational aspiration to continuously move forward, be advanced and progressive. The three elements symbolize islands in various scales, which the shape of the Republic of Indonesia. The Symbol appears as a monogram of the letter "P", which is the first letter in "PERTAMINA".



Warna Hijau

Mencerminkan sumber energi yang ramah lingkungan dan sebuah organisasi yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

Green Color

Reflects environmentally-friendly energy source and an organization with concern for its surrounding environment.

Warna Biru

Mencerminkan sisi organisasi yang andal, dapat dipercaya, serta bertanggung jawab. Penekanannya lebih kepada kekuatan dan kewibawaan Perusahaan.

Blue Color

Reflects an organizational aspect that is reliable, trustworthy, and responsible. The emphasis is on corporate strength and charisma.

Kata “PERTAMINA”

Merupakan nama dari PT Pertamina (Persero) dan bukan merupakan singkatan atau akronim dan tulisannya harus berwarna hitam kecuali ditentukan lain.

“PERTAMINA” Terms

The name of PT Pertamina (Persero) and not an abbreviation or acronym and the fonttype shall be black unless stated otherwise.



Kata “TRANS” dan “KONTINENTAL”

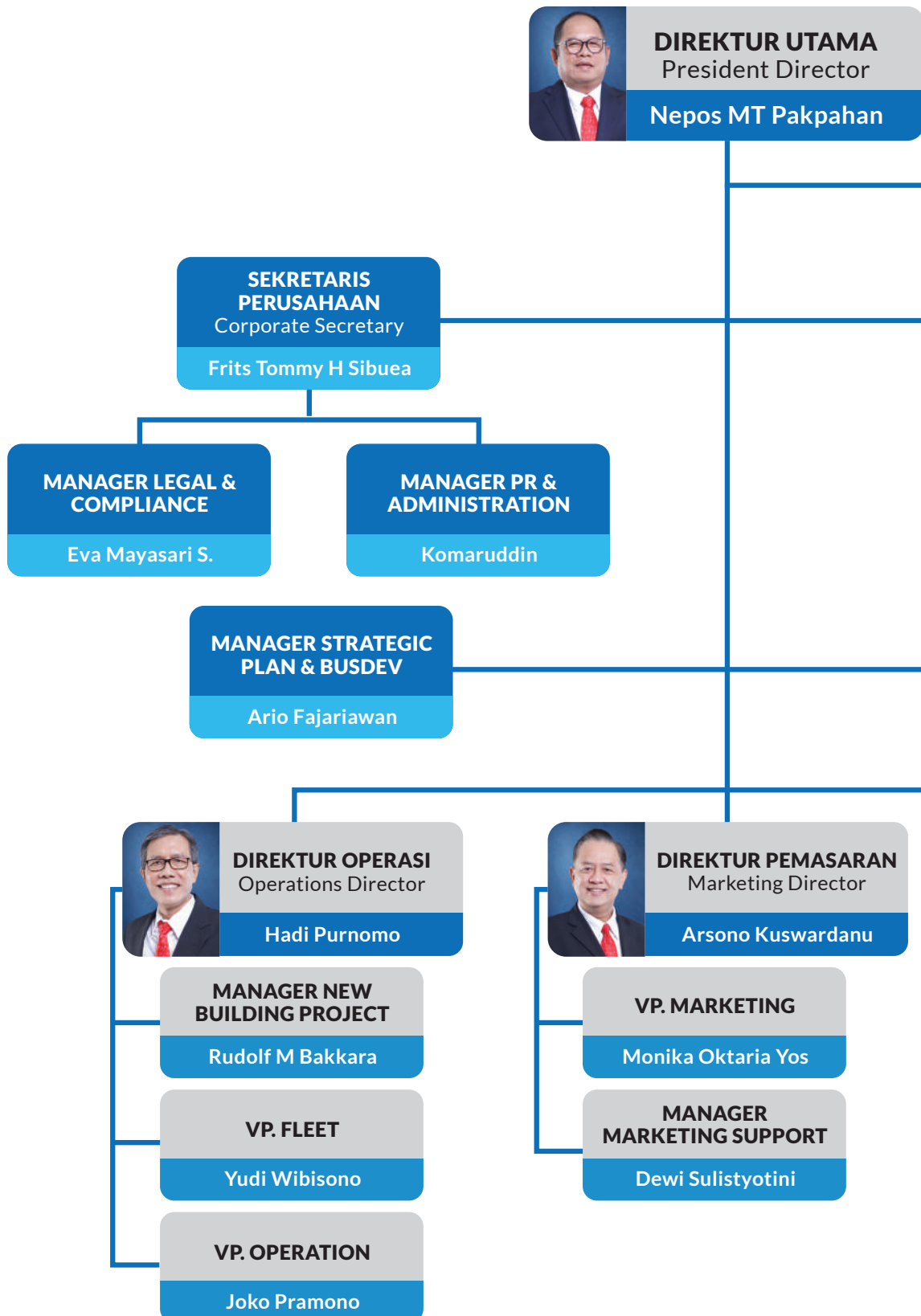
Berdasarkan kamus berarti melalui, melewati. KONTINENTAL berdasarkan kamus berarti benua. Jadi Pertamina Trans Kontinental adalah Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang *core* bisnisnya menunjang kegiatan usaha induknya di bidang *oil & gas* dimana siap untuk menjadi Perusahaan Bisnis Pelayaran dan Jasa Maritim Kelas Dunia.

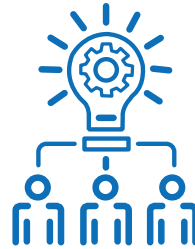
“TRANS” and “KONTINENTAL” Terms

Based on the dictionary, means pass through. Meaning of KONTINENTAL, based on the dictionary is a continent. Pertamina Trans Kontinental is a Subsidiary of PT Pertamina (Persero) with core business to support business activity of the parent company in oil & gas sector and ready to become a world-class Shipping and Marine Service Company.

Struktur Organisasi

Organizational Structure





Struktur organisasi berikut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTK No. Kpts-019/C0000/2016-S0 tanggal 1 Desember 2016.

The following organization structure refers to PTK Board of Directors Decree No. Kpts-019/C0000/2016-S0 dated 1 December 2016.

SECRETARY Secretary

Dewi Camelia R

HEAD OF INTERNAL AUDIT

Triana Aria Rini

SENIOR AUDITOR

Euis Resmawati
Ginik Windaryati
Indra Putera

MANAGER SMR

Sapto Benarimo

DIREKTUR KEUANGAN & SDM Finance & HR Director

Azwani

VP. FINANCE

Baheramsyah

VP. HR & GA

Eka Permana Sidik

Daftar Nama Pengurus dan Pejabat Perusahaan

List of Management and Executives of the Company

Komisaris & Direksi Perusahaan per 31 Desember 2020

Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Decree	Periode Masa Jabatan Terms of Office
DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners			
Ignatius Tallulembang	Komisaris Utama President Commissioner	Akta No.5 tanggal 7 Oktober 2019 Deed No. 5 dated October 7, 2019	1 Januari 2020 – 13 Maret 2020 January 1 – March 13, 2020
Alfian Nasution	Komisaris Commissioner	Akta No.7 tanggal 20 November 2019 Deed No. 7 dated November 20, 2019	1 Januari 2020 – 13 Maret 2020 January 1 – March 13, 2020
Achmad Fachruddin	Komisaris Commissioner	Akta No. 15 tanggal 14 Februari 2018 Deed No. 15 dated February 14, 2018	1 Januari 2020 – 31 Desember 2020 January 1 – December 31, 2020
Ivan Airlangga EP	Komisaris Commissioner	Akta No. 1 tanggal 14 Desember 2018 Deed No. 1 dated December 14, 2018	1 Januari 2020 – 31 Desember 2020 January 1 – December 31, 2020
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	Akta No.15 tanggal 23 September 2020 Deed No. 15 dated December 23, 2020	11 September 2020 – 31 Desember 2020 September 11, 2020 – December 31, 2020
DIREKSI Board of Directors			
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	Akta No. 5 tanggal 17 Juli 2019 Deed No. 5 dated July 17, 2019	15 Juli 2019 – 31 Desember 2020 July 15, 2019 – December 31, 2020
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	Akta No. 4 tanggal 12 Juli 2019 Deed No. 4 dated July 12, 2019	20 Juni 2019 – 31 Desember 2020 June 20, 2019 – December 31, 2020
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operations Director	Akta No. 9 tanggal 24 April 2019 Deed No. 9 dated July 24, 2019	2 April 2019 – 31 Desember 2020 April 2, 2019 – December 31, 2020
Nepos MT Pakpahan	PLT Direktur Keuangan dan SDM Act. Finance and HR Director	Surat Penunjukan Pelaksana Tugas No.SPPLT-056/DEKOM.PTK/2019 Letter of Appointment No. SPPLT-056/DEKOM.PTK/2019	25 November 2019 – 31 Mei 2020 November 25, 2019 – May 31, 2020
Azwani	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Akta No. 6 tanggal 9 Juni 2020 Deed No. 6 dated June 9, 2020	1 Juni 2020 - 31 Desember 2020 June 1, 2020 – December 31, 2020

Pejabat Perusahaan per 31 Desember 2020

Company's Executives as of December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Periode Masa Jabatan Terms of Office
Eka Permana Sidik	VP HR & GA	1 Mei 2020- sekarang May 1, 2020 – now
Baheramsyah	VP Finance	1 November 2019 - sekarang November 1, 2019 – now
Monika Oktaria Yos	VP Marketing	1 Januari 2019 - sekarang January 1, 2019 – now
Yudi Wibisono	VP Fleet	1 Juli 2020 - sekarang July 1, 2020 – now
Joko Pramono	VP Operation	1 Desember 2017 - sekarang December 1, 2017 – now
Triana Aria Rini	Head of Internal Audit	1 Desember 2017 - sekarang December 1, 2017 – now
Frits Tommy H Sibuea	Corporate Secretary	1 Desember 2020 - sekarang December 1, 2020 – now

Profil Dewan Komisaris

Profile of Board of Commissioners



Ivan Airlangga EP

Komisaris
Commissioner

Berusia 57 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor. Lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1963.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 22 November 2018, berdasarkan Akta No. 1 tanggal 14 Desember 2018.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Teknik Kimia di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya pada tahun 1988.

Perjalanan Karir

- *Operation Excellence Manager* PT Pertamina (Persero) periode 2012 – 2013.
- Sebagai *Direktur Operasi Produksi* PT Pertamina (Persero) periode 2013 – 2017.
- *VP Process & Facility* PT Pertamina (Persero) periode 2017 – 2018.
- *SVP Business Development & Perform Excellence* PT Pertamina (Persero) sejak 2018 – 31 Desember 2019 (Pensiun).

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

57 years. Indonesian Citizen domiciled in Bogor. Born in Surabaya on December 31, 1963.

Position and Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since November 22, 2018 according to Deed No. 1 dated December 14, 2018.

Education

Earned Bachelor's degree of Chemical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya in 1988.

Career Experience

- *Operation Excellence Manager* PT Pertamina (Persero) for 2012 – 2013 period.
- *Production Operations Director* PT Pertamina (Persero) for 2013 – 2017 period.
- *VP Process & Facility* PT Pertamina (Persero) for 2017 – 2018 period.
- *SVP Business Development & Perform Excellence* PT Pertamina (Persero) since 2018 – 31 December 2019 (retired).

Concurrent Position

Currently, he does not serve in concurrent position in any Company.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Achmad Fachruddin
Komisaris
Commissioner

Berusia 45 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor. Lahir di Jakarta pada 10 Mei 1975.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 31 Januari 2018, berdasarkan Akta No. 15 tanggal 14 Februari 2018.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Sosial dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada tahun 2002.

Perjalanan Karir

- Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Washthex Indonesia periode 2009-2017,
- Sebagai analis PT Media Track periode 2010-2015,
- Sebagai Direktur PT Media Fakta Nusantara periode 2014-2017

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

45 years. Indonesian Citizen domiciled in Bogor. Born in Jakarta on May 10, 1975.

Position and Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since January 31, 2018 according to Deed No. 15 dated February 14, 2018.

Education

Earned Bachelor's degree of Social Science from Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) in 2002.

Career Experience

- Previously was appointed as Commissioner at PT Washthex Indonesia for 2009-2017 period,
- Analyst at PT Media Track for 2010-2015 period,
- Director at PT Media Fakta Nusantara for 2014-2017 period.

Concurrent Position

Currently, he does not serve in concurrent position in any Company.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Andi Saiful Haq

Komisaris
Commissioner

Berusia 45 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan pada 12 Mei 1975.

45 years. Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta. Born in Soppeng, South Sulawesi on May 12, 1975.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 11 September 2020, berdasarkan Akta No.23 tanggal 23 September 2020.

Position and Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since September 11, 2020 according to Deed No. 15 dated September 23, 2020.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Teknik Sipil di Universitas Hasanuddin Makassar, Pasca Sarjana Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung dan Cranfield University Inggris tahun 2007, serta Pasca Sarjana Hubungan Internasional di Departemen Ilmu Politik Justus Liebig University Giessen, Jerman tahun 2008.

Education

Graduated Bachelor's degree of Civil Engineering in Universitas Hasanuddin, Makassar. Master's degree of Defense Study Institut Teknologi Bandung and Cranfield University, United Kingdom on 2007. Master's degree of International Relations in Faculty of Political Study, Justus Liebig University Giessen, German on 2008.

Perjalanan Karir

- 2008 – 2011 Konsultan Program untuk Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh
- 2008- 2011 Program Officer untuk Perdamaian dan Demokratisasi Aceh di *Friedrich Ebert Stiftung* (FES) Indonesia.
- 2011 – 2013 Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta

Career Experience

- 2008 - 2011 Program Consultant for the Commission for Missing Person and Violence (KontraS) Aceh
- 2008- 2011 Program Officer for Aceh Peace and Democratization in *Friedrich Ebert Stiftung* (FES) Indonesia.
- 2011 – 2013 Lecturer at the Department of International Relations, Paramadina University, Jakarta

- 2013 – Sekarang Direktur di Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta.

Rangkap Jabatan

Merangkap jabatan sebagai Direktur Institute for Transformation Studies (INTRANS) yang dijabat sejak tahun 2013 hingga sekarang.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

- 2013 – Now Director at the Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta.

Concurrent Position

Concurrently serving as Director of the Institute for Transformation Studies (INTRANS) which has been held since 2013 until now.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.

Profil Dewan Komisaris (1 Januari 2020 - 13 Maret 2020)

Profile of Board of Commissioners (January 1, 2020 - March 13, 2020)



Berusia 57 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Rantepao, Sulawesi Selatan pada 21 Maret 1963.

57 years, Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta. Born in Rantepao, South Sulawesi on March 21, 1963.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental sejak 19 September 2019, berdasarkan Akta No.5 tanggal 7 Oktober 2019.

Position and Appointment Decree

Appointed as President Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since September 19, 2019 according to Deed No. 5 dated October 7, 2019.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Teknik Kimia di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1988.

Education

Graduated Bachelor's degree of Chemical Engineering in Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta in 1988.

Perjalanan Karir

- VP Engineering Services PT Pertamina (Persero) periode Juli 2017 – September 2017
- SVP Project Engineering & Services PT Pertamina (Persero) periode September 2017 – Oktober 2017

Career Experience

- VP Engineering Services PT Pertamina (Persero) for July 2017 – September 2017 period
- SVP Project Engineering & Services PT Pertamina (Persero) for September 2017 – October 2017 period

Rangkap Jabatan

Merangkap jabatan sebagai Direktur Megaprojek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero) sejak September 2018 sampai Oktober 2020 dan dilanjutkan sebagai Direktur Utama PT Kilang Pertamina International SubHolding Refinery & Petrochemical sampai Februari 2021.

Concurrent Position

Serving in concurrent position as Director of Manufacturing Megaproject and Petrochemicals at PT Pertamina (Persero) since September 2018 until October 2020 and continued as President Director at PT Kilang Pertamina International Refinery & Petrochemical Sub-Holding until February 2021.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Alfian Nasution
Komisaris
Commissioner

Berusia 53 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Pekanbaru pada 14 Februari 1967.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 1 November 2019, berdasarkan Akta No.7 tanggal 20 November 2019.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Teknik Mesin di Universitas Indonesia pada tahun 1992.

Perjalanan Karir

- VP Supply & Distribution PT Pertamina (Persero) periode 2013 – 2016.
- VP Supply & Export Operation PT Pertamina (Persero) periode 2016 – 2017.

Rangkap Jabatan

Merangkap jabatan sebagai Senior Vice President Gas & LNG PT Pertamina (Persero) sejak Oktober 2019 dan dilanjutkan sebagai Director of Commercial PT Pertamina International Shipping Sub-Holding Shipping sejak Oktober 2020 sampai sekarang.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

53 years. Indonesian Citizen domiciled in Jakarta. Born in Pekanbaru on February 14, 1967.

Position and Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since September 19, 2019 according to Deed No. 7 dated November 20, 2019.

Education

Graduated Bachelor's degree of Mechanical Engineering in Universitas Indonesia in 1992.

Career Experience

- VP Supply & Distribution PT Pertamina (Persero) for 2013 – 2016 period.
- VP Supply & Export Operation PT Pertamina (Persero) for 2016 – 2017 period.

Concurrent Position

Serving in concurrent position as Gas & LNG Senior Vice President at PT Pertamina (Persero) since October 2019 and continued as Director of Commercial at PT Pertamina International Shipping, Shipping Sub-Holding since October 2020 until now.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.

Profil Direksi

Profile of Board of Directors



Nepos MT Pakpahan

Direktur Utama
President Director

Berusia 57 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Laguboti, Sumatera Utara pada 8 November 1963.

57 years. Indonesian Citizen domiciled in Jakarta. Born in Laguboti, North Sumatera on November 8, 1963.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental sejak tanggal 15 Juli 2019, berdasarkan Akta No.5 tanggal 17 Juli 2019.

Position and Appointment Decree

Appointed as President Director since July 15, 2019 according to Deed No. 5 dated July 17, 2019.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya pada tahun 1989 dan gelar Master-MBA Teknik dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2001.

Education

Earned Bachelor's degree of Mechanical Engineering from Universitas Brawijaya in 1989 and Master - MBA of Engineering from Universitas Jenderal Soedirman in 2001.

Perjalanan Karir

Pernah menjabat sebagai VP HSSE Upstream PT Pertamina (Persero) periode 2017 - 2019.

Career Experience

Previously, he was assigned as VP HSSE Upstream at PT Pertamina (Persero) for 2017 - 2019 period.

Rangkap Jabatan

Beliau merangkap jabatan sebagai PLT Direktur Keuangan dan SDM PT Pertamina Trans Kontinental berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksana Tugas No.SPPLT-056/DEKOM. PTK/2019 sejak 25 November 2019 - Mei 2020.

Concurrent Position

Concurrently holds the position of PLT Director of Finance and Human Resources of PT Pertamina Trans Kontinental based on the Letter of Appointment as Acting Officer No. SPPLT-056 / DEKOM. PTK / 2019 since 25 November 2019 - May 2020.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Berusia 55 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi, Lahir di Surakarta, Pada tanggal 31 Agustus 1965.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Operasi sejak tanggal 2 April 2019, berdasarkan Akta No.9 tanggal 24 April 2019.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991 dan gelar Sarjana Manajemen Transport dari STIE Kampus Ungu pada tahun 2007.

Perjalanan Karir

- Manager Strategic Planning PT Pertamina (Persero) periode Januari 2013 - Mei 2017.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) periode Mei 2017 - April 2019.

Rangkap Jabatan

Merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Peteka Karya Tirta.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

55 years. Indonesian Citizen domiciled in Bekasi. Born in Surakarta on August 31, 1965.

Position and Appointment Decree

Appointed as Operations Director since April 12, 2019 according to Deed No. 9 dated April 24, 2019.

Education

Earned Bachelor's degree of Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1991 and Bachelor's degree of Transport Management from STIE Kampus Ungu in 2007.

Career Experience

- Manager Strategic Planning PT Pertamina (Persero) for January 2013 - May 2017 period.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) for May 2017 - April 2019.

Concurrent Position

He serves in concurrent position as Commissioner PT Peteka Karya Tirta

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Arsono Kuswardanu

Direktur Pemasaran
Marketing Director

Berusia 54 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Surabaya pada 1 November 1966.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pertamina Trans Kontinental sejak tanggal 20 Juni 2019, berdasarkan Akta No. 4 tanggal 12 Juli 2019.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Indonesia pada tahun 1996.

Perjalanan Karir

- Product Services Account Division Head PT Pertamina Patra Niaga periode Maret 2017 - Maret 2019.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) periode April 2019 - Juni 2019.

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

54 years. Indonesian Citizen domiciled in Jakarta. Born in Surabaya on November 1, 1966.

Position and Appointment Decree

Appointed as Marketing Director of PT Pertamina Trans Kontinental since June 20, 2019 according to Deed No. 4 dated July 12, 2019.

Education

Earned Bachelor's degree of Architectural Engineering from Institut Teknologi Indonesia in 1996.

Career Experience

- Product Services Account Division Head PT Pertamina Patra Niaga for March 2017 - March 2019 period.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) for April 2019 - June 2019 period.

Concurrent Position

Currently, he does not serve in concurrent position in any Company.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Azwani

Direktur Keuangan dan SDM
Finance and HR Director

Berusia 55 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Sigli, Aceh pada 30 April 1965.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM PT Pertamina Trans Kontinental sejak 1 Juni 2020, berdasarkan keputusan RUPS secara sirkuler tanggal 29 Mei 2020.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 1989 dan gelar Magister Ilmu Manajemen dari Universitas Sumatera Utara tahun 1999.

Perjalanan Karir

- Quantity Accounting Manager PT Pertamina (Persero) periode 2013-2014
- Direktur Keuangan dan Umum PT Pertamina Retail periode 2014-2018
- Direktur Kuangan dan Bisnis PT Pertamina Retail periode 2018-2020

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

55 years. Indonesian Citizen domiciled in Jakarta. Born in Sigli, Aceh on April 30, 1965.

Position and Appointment Decree

Appointed as Finance & HR Director of PT Pertamina Trans Kontinental since June 1, 2020, pursuant to circular GMS resolutions dated May 29, 2020.

Education

Bachelor's degree of Economic Accounting from Syiah Kuala Banda Aceh University in 1989 and Master of Management Study degree from Universitas Sumatera Utara in 1999.

Career Experience

- Quantity Accounting Manager PT Pertamina (Persero) for 2013 – 2014 period.
- Finance and General Director PT Pertamina (Persero) for 2014 – 2018 period.
- Finance and Business Director PT Pertamina Retail for 2018 – 2020 period.

Concurrent Position

Currently, he does not serve in concurrent position in any Company.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.

Profil Pejabat Perusahaan

Executives Profile



Eka Permana Sidik
VP HR & GA

Lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Juli 1976 dan berdomisili di Bekasi. Beliau meraih gelar Magister Manajemen Pemasaran dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta pada tahun 2010. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Manager HR Operations PIEP Indonesia.

Born in Jakarta on July 27, 1976 and domiciled in Bekasi. He earned Master's degree in Marketing Management from Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta in 2010. Previously, he was assigned as HR Operations Manager PIEP Indonesia.



Baheramsyah
VP Finance

Lahir di Lampung Utara, pada 28 Maret 1968 dan berdomisili di Bogor. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akutansi dari STIE Insan Cendekia pada tahun 2005. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Manager Portofolio & Investasi PT Pertamina (Persero).

Born in Lampung Utara on March 28, 1968 and domiciled in Bogor. He earned Bachelor's degree of Accounting Economics from STIE Insan Cendekia in 2005. Previously, he was assigned as Portfolio & Investment Manager at PT Pertamina (Persero).



Monika Oktaria Yos
VP Marketing

Lahir di Jakarta, pada 23 Oktober 1976 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akutansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2000 dan Magister Manajemen Transport dari Universitas Trisakti pada tahun 2013. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Manager Cabang Tanjung Priok

Born in Jakarta on October 23, 1976 and domiciled in Jakarta. She earned Bachelor's degree of Accounting Economics from Universitas Trisakti in 2000 and Master's degree of Transport Management in 2013. Previously, she was assigned as Manager at Tanjung Priok Branch.



Yudi Wibisono
VP Fleet

Lahir di Bandung, pada 11 Juli 1982 dan berdomisili di Bandung. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 2006 dan S2 Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Manager Asset Management PT Pertamina (Persero).

Born in Bandung on July 11, 1982 and domiciled in Bandung. He earned Bachelor's degree of Mechanical Engineering from Institut Teknologi Bandung in 2006 and Master's degree of Chemical Engineering from Institut Teknologi Bandung in 2013. Previously, he was assigned as Asset Management Manager PT Pertamina (Persero).



Joko Pramono
VP Operation

Lahir di Banyuwangi, pada 27 September 1971 dan berdomisili di Bekasi. Beliau meraih gelar Advance Diploma in Maritime Transportation dan Ahli Nautika Tingkat II dari Singapore Polytechnic.

Born in Banyuwangi on September 27, 1971 and domiciled in Bekasi. He earned Advance Diploma in Maritime Transportation and Expert in Nautical Science Level II from Singapore Polytechnic.



Triana Aria Rini
Head of Internal Audit

Lahir di Jakarta, pada 23 Januari 1968 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta, pada tahun 1996. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai VP Operation.

Born in Jakarta on January 23, 1968 and domiciled in Jakarta. She earned Bachelor's degree of Management Economics from Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta in 1996. Previously, she was assigned as VP Operation.



Frits Tommy H Sibuea
Corporate Secretary

Lahir di Pekanbaru, pada 2 Juni 1968 dan berdomisili di Tangerang Selatan. Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung, pada tahun 1993 dan Magister dari Bond University Australia, pada tahun 1999. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Manager Relations di PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur

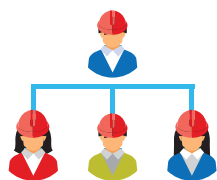
Born in Pekanbaru on June 2, 1968 and domiciled in Tangerang Selatan. He earned Bachelor's degree of Communication Study from Universitas Padjadjaran Bandung in 1993 and Master's degree from Bond University Australia in 1999. Previously, he was assigned as Manager Relations PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur.

Sumber Daya Manusia

Human Resource

JUMLAH PEKERJA

Total Employee



↑ 2020

898

↓ 2019

668

↑ 2018

673

Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition by Education Level

Pendidikan Education	2020	2019	2018
Pasca Sarjana Post Graduates	57	56	69
Sarjana Bachelor's degree	328	346	330
Diploma	133	113	125
SMA* Senior High School	319	142	140
Lain-lain (Ijasah Laut) Others (Marine Diploma)	61	11	9

* Termasuk Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Including the Head Office and Branch Office Support Service Workers

Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia

Employee Composition by Age

Usia Age	2020	2019	2018
<20 tahun / years	7	3	1
21-30 tahun/ years	257	174	155
31-40 tahun/ years	303	203	206
41-50 tahun/ years	239	189	191
51-55 tahun/ years	76	81	99
>55 tahun/ years	16	18	21

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

Employee Composition by Organization Level

Level Organisasi Organization Level	2020	2019	2018
Non-Staff	478	282	223
Staff	258	228	308
Asisten Manager Manager Assistant	94	95	77
Manager	52	47	47
Eksekutif Executive	16	16	18

Komposisi Pekerja Berdasarkan Gender

Employee Composition by Gender

Gender	2020	2019	2018
Laki-laki Male	733	519	538
Perempuan Female	165	149	135

Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

Status	2020	2019	2018
Pekerja Tetap Permanent Employees	376	346	367
Pekerja Tidak Tetap Non-Permanent Employees	522	322	306

Program Pengembangan Pekerja

Employee Development Program

Program Pengembangan Pekerja

Employee Development Program

Deskripsi Description	2020	2019	2018
Jumlah Pelatihan Number of Trainings	42	65	52
Peserta Participants	1.029	613	575
Biaya Cost	Rp2.276.909.689	Rp2.391.594.795	Rp3.048.484.853

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan *leadership skill*, berikut adalah program pelatihan yang diikuti oleh pekerja di tingkat managerial:

In order to develop competency and leadership skill, the following is a training programs participated managerial level employees:

Training untuk Jabatan Managerial

Training for Managerial Position

Nama Program/Training/ Seminar Name of Program/ Training/Seminar	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Jabatan Position	Jumlah Peserta Total Participants	Pelaksana Provider	Lokasi Location
Risk Management & Knowledge	17-19 Februari 2020 February 17 - 19, 2020	Manager Strategic Plan and Business Development (SPBD)	37	Fungsi SPBD	Jakarta
Excellent Business Plan Development	19-20 Maret 2020 March 19 - 20, 2020	Direktur AP PTK (Direktur PT PKG dan Direktur PT PKS)	2	Hotel Santika TMI	Jakarta / Online
Meningkatkan kinerja Pekerja dengan positive Reinforcement di PTK	3 April 2020 April 3, 2020	VP, Manager dan Ast. Manager	65	Fungsi SMR	Jakarta / Online
5S/5R untuk peningkatan kinerja HSE dan Produktivitas di tempat kerja	16 April 2020 April 16, 2020	VP, Manager dan Ast. Manager	127	Fungsi SMR	Jakarta / Online
ISPS Code	29 Juni - 01 Juli 2020 June 29 - July 01, 2020	Manager Vessel Operation	1	BKI Academy	Jakarta



Training untuk Jabatan Managerial

Training for Managerial Position

Nama Program/Training/ Seminar Name of Program/ Training/Seminar	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Jabatan Position	Jumlah Peserta Total Participants	Pelaksana Provider	Lokasi Location
Internal Auditor ISM Code	01 September 2020 September 1, 2020	Manager SMR	1	BKI Academy	Jakarta
Supply Chain Management For Maritime Sector	15, 28 dan 30 November 2020 15, 28 and 30 November 2020	Manager Marketing Support, Manager Procurement dan Manager SPBD	3	Myshipgo dan Ruang Logistic (Supply chain Indonesia)	Jakarta / Online)

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

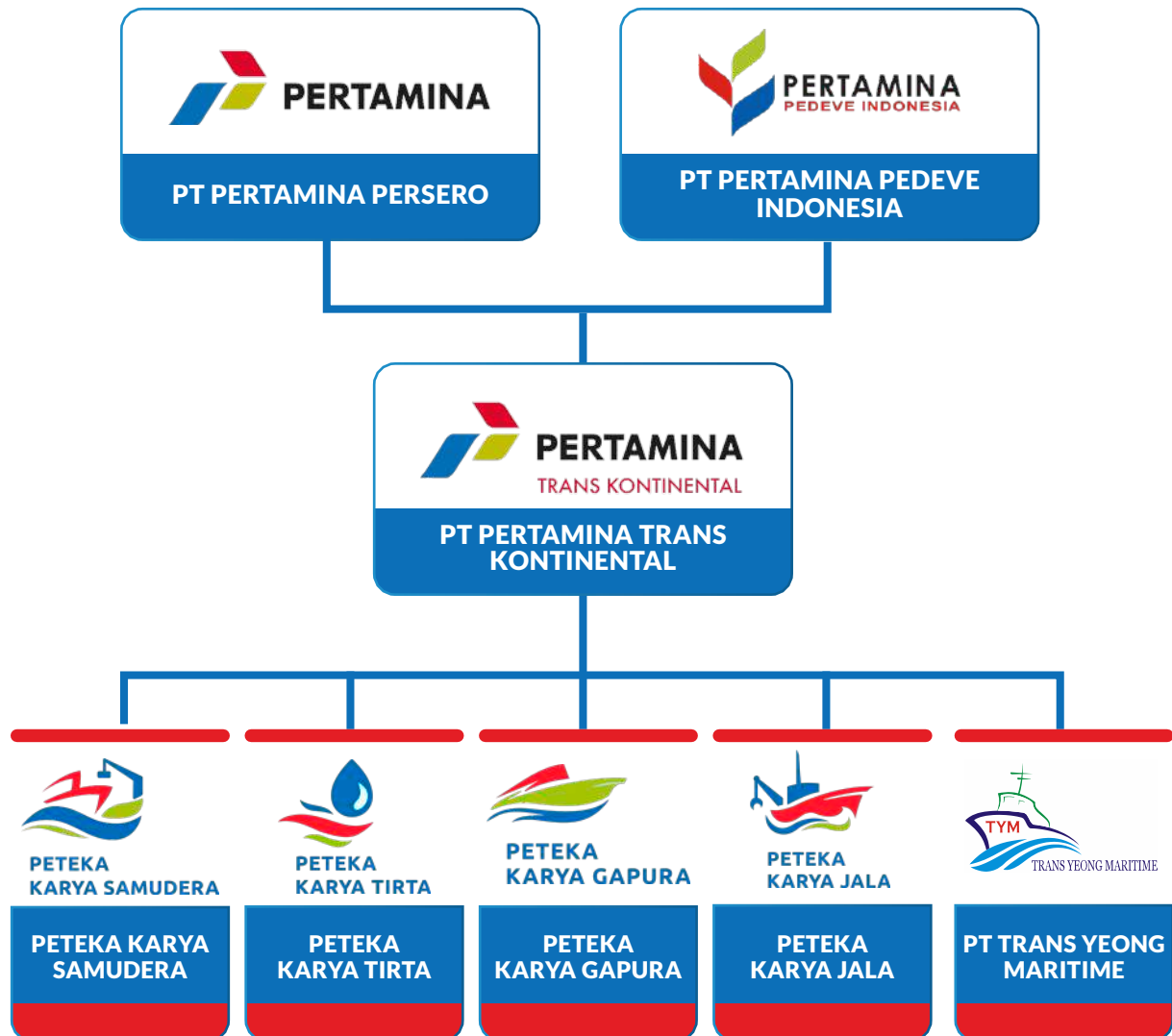
Informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan & Unit Audit Internal di sepanjang tahun 2020, dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan ini.

Education and/or Training of The Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Information on the education and/or training of members of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary & Internal Audit Unit throughout 2020, can be seen in the Good Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure



Entitas Anak dan/ atau Entitas Asosiasi

Subsidiary and/or Associated Company



PT PETEKA KARYA SAMUDERA

TAHUN PENDIRIAN Establishment Year	10 Februari 1986 Akta pendirian No. 48 tanggal 10 Februari 1986 dibuat dihadapan NY Yetty Taher S.H	February 10, 1986 Deed No. 48 of February 10, 1986 drafted before Mrs. Yetty Taher, S.H.,
KEGIATAN USAHA Business Activity	- Badan usaha pelabuhan meliputi port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water - Logistic service meliputi crane warehouse & open storage - Pilotage service and port management	- Port business entities include port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water - Logistic service includes crane warehouse & open storage - Pilotage service and port management
KEPEMILIKAN Ownership	Pertamina Trans Kontinental 99,753% Peteka Karya Gapura 0,247%	Pertamina Trans Kontinental 99.753% Peteka Karya Gapura 0.247%
JUMLAH ASET (Rp juta) Total Assets (Rp million)	Rp224.792,-	Rp224,792,-
STATUS OPERASIONAL Operational Status	Beroperasi sejak 10 Februari 1986	Operating since February 10, 1986
ALAMAT Address	Jl. Raya Pelabuhan, Kabil Batam – Kepri Telepon: +62 - 778 - 711543, 711126 Faksimili: +62 - 778 - 711842 Homepage: www.pekaes-bup.com	Jl. Raya Pelabuhan, Kabil Batam – Kepri Telepon: +62 - 778 - 711543, 711126 Faksimili: +62 - 778 - 711842 Homepage: www.pekaes-bup.com



PT PETEKA KARYA TIRTA

TAHUN PENDIRIAN Establishment Year	21 Januari 1988 Akta pendirian No. 69 tanggal 21 Januari 1988 dibuat dihadapan Ny. Yetty Taher, SH.	January 21, 1988 Deed No. 69 of January 21, 1988 drafted before Mrs. Yetty Taher, SH.
KEGIATAN USAHA Business Activity	- Pengelolaan dan penyediaan air - Perdagangan bahan kimia cair	- Water management and supply. - Liquid chemicals trading.
KEPEMILIKAN Ownership	Pertamina Trans Kontinental 99,94% Peteka Karya Samudera 0,06%	Pertamina Trans Kontinental 99.94% Peteka Karya Samudera 0.06%
JUMLAH ASET (Rp juta) Total Assets (Rp million)	Rp91.351,-	Rp91,351,-
STATUS OPERASIONAL Operational Status	Beroperasi sejak 21 Januari 1988	Operating since January 21, 1988
ALAMAT Address	Jl. Raya Anyer KM 119 Ciwandan - Cilegon – Banten Telepon: +62 - 254 - 601147 Faksimili: +62 - 254 - 601148 Homepage: www.petekakaryatirta.com	Jl. Raya Anyer KM 119 Ciwandan - Cilegon – Banten Telepon: +62 - 254 - 601147 Faksimili: +62 - 254 - 601148 Homepage: www.petekakaryatirta.com



PT PETEKA KARYA JALA

TAHUN PENDIRIAN Establishment Year	6 November 1991 Akta Pendirian No. 62 tanggal 6 November 1991, dibuat dihadapan Sinta Susikto, SH.	November 6, 1991 Deed No. 62 of November 6, 1991, drafted before Sinta Susikto, SH.
KEGIATAN USAHA Business Activity	Jasa dan Perdagangan	Services and Trading
KEPEMILIKAN Ownership	Pertamina Trans Kontinental 99,17% Peteka Karya Tirta 0,83%	Pertamina Trans Kontinental 99.17% Peteka Karya Tirta 0.83%
JUMLAH ASET (Rp juta) Total Assets (Rp million)	Rp232.465,-	Rp232,465,-
STATUS OPERASIONAL Operational Status	Beroperasi sejak 6 November 1991	Operating since November 6, 1991
ALAMAT Address	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok - Jakarta Utara Telepon: +62 - 21 - 29615165 Faksimili: +62 - 21 - 29615166	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok - Jakarta Utara Telepon: +62 - 21 - 29615165 Faksimili: +62 - 21 - 29615166



PT PETEKA KARYA GAPURA

TAHUN PENDIRIAN Establishment Year	5 Juni 1987 Akta Pendirian No. 20 tanggal 5 Juni 1987, dibuat dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH dengan nama awal "PT Peteka Karya Samudera" dan diubah berdasarkan risalah rapat yang telah diaktakan dengan No. 68 pada 21 Januari 1988 menjadi PT Peteka Karya Gapura.	June 5, 1987 Deed No. 20 of 5 June 1987, drafted before Notary Yudo Paripurno, SH, with the initial name "PT Peteka Karya Samudera" and had its name altered under minutes of meeting enactment in Deed no. 68 dated January 21, 1988 into PT Peteka Karya Gapura.
KEGIATAN USAHA Business Activity	Jasa Angkutan, Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Jasa Perdagangan dan Kegiatan Usaha yang terkait dan/atau menunjang kegiatan usaha dibidang Jasa Pelayaran, Jasa Angkutan dan Jasa Logistic.	Transportation Services, Manpower Supply Services, Trade Services, and Business Activities relevant to and/or supporting the activities in Shipping Services, Transportation Services, and Logistics Services sectors.
KEPEMILIKAN Ownership	Pertamina Trans Kontinental 99,98% Peteka Karya Jala 0,02%	Pertamina Trans Kontinental 99.98% Peteka Karya Jala 0.02%
JUMLAH ASET (Rp juta) Total Assets (Rp million)	Rp179.639,-	Rp179,639,-
STATUS OPERASIONAL Operational Status	Beroperasi sejak 5 Juni 1987	Operating since June 5, 1987

ALAMAT Address	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok - Jakarta Utara Telepon: +62 - 21 - 65307030 Faksimili: +62 - 21 - 6510030 Homepage: www.pekage.com	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok - Jakarta Utara Telepon: +62 - 21 - 65307030 Faksimili: +62 - 21 - 6510030 Homepage: www.pekage.com



PT TRANS YEONG MARITIME

TAHUN PENDIRIAN Establishment Year	16 September 2014 Akta Pendirian No. 41 tanggal 16 September 2014, dibuat dihadapan Dewantari Handayani, SH, MPA	September 16, 2014 Deed No. 41 of 16 September 2014, drafted before Dewantari Handayani, SH, MPA.
KEGIATAN USAHA Business Activity	Jasa pelayanan kepelabuhan laut	Sea port services
KEPEMILIKAN Ownership	Pertamina Trans Kontinental 51,00% Tong Yeong Tug, Co. Ltd 49,00%	Pertamina Trans Kontinental 51.00% Tong Yeong Tug, Co. Ltd 49.00%
JUMLAH ASET (Rp juta) Total Assets (Rp million)	Rp346.311,-	Rp346.311,-
STATUS OPERASIONAL Operational Status	Beroperasi sejak 16 September 2014	Operating since September 16, 2014
ALAMAT Address	Gedung Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Armada Perkapalan It. 2 Jl. Yos Sudarso Kav 2015 Sunter, Jakarta Utara, 14350 Telepon: +62 21 6530 7032 Faksimili: +62 21 651 6375 Homepage: www.tym-shipping.com	Gedung Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Armada Perkapalan It. 2 Jl. Yos Sudarso Kav 2015 Sunter, Jakarta Utara, 14350 Telepon: +62 21 6530 7032 Faksimili: +62 21 651 6375 Homepage: www.tym-shipping.com

Pemegang Saham & Informasi Kepemilikan Saham

Shareholders and Shares Ownership Information

Pemegang saham Perusahaan per 31 Desember 2020 adalah PT Pertamina (Persero) dengan jumlah kepemilikan saham 99,999% dan PT Pertamina Pedeve Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham 0,001%.

PT Pertamina Pedeve Indonesia menjadi pemegang saham PT Pertamina Trans Kontinental, berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 13 Desember 2017 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat PT Pertamina Trans Kontinental No. 4 tanggal 8 Januari 2018. PT Pertamina Pedeve Indonesia menjadi pemegang saham PT Pertamina Trans Kontinental setelah rapat menyetujui pengambilalihan saham dari PT Pertamina Training & Consulting.

The Company's Shareholders as of December 31, 2020 are PT Pertamina (Persero) with ownership of 99,999% and PT Pertamina Pedeve Indonesia with ownership of 0,001%.

PT Pertamina Pedeve Indonesia becomes the shareholder of PT Pertamina Trans Kontinental, based on The Circular GMS Resolution dated December 13, 2017, which has been stated in the Deed of Decision of the Decree outside the Meeting of PT Pertamina Trans Kontinental No. 4 dated January 8, 2018. PT Pertamina Pedeve Indonesia becomes a shareholder of PT Pertamina Trans Kontinental after the meeting approved the takeover of shares from PT Pertamina Training & Consulting.

Kepemilikan Saham Pertamina Trans Kontinental Per 31 Desember 2020

Pertamina Trans Kontinental Shares Ownership as of December 31, 2020

Keterangan Description	Jumlah Lembar Number of sheets	%	Jumlah (Rp) Total (Rp)
PT Pertamina (Persero) Tbk			
Saham Seri A/ Series A Shares	693.698	99,999	693.698.000.000
Saham Seri B/ Series B Shares	819		819.000
PT Pertamina Pedeve Indonesia Tbk			
Saham Seri A/ Series A Shares	10	0,001	10.000.000
Jumlah / Total	694.527	100,00	693.708.819.000

20 Pemegang Saham Terbesar dan Persentase Kepemilikannya

Pertamina Trans Kontinental memiliki 2 pemegang saham yakni PT Pertamina (Persero) dengan kepemilikan 99,999% dan PT Pertamina Pedeve Indonesia dengan kepemilikan 0,001%.

Top 20 Shareholders and Ownership Percentage

Pertamina Trans Kontinental has 2 shareholders, which are PT Pertamina (Persero) with 99.999% ownership and PT Pertamina Pedeve Indonesia with 0.001% ownership.

Struktur Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemegang saham pengendali PT Pertamina Trans Kontinental adalah PT Pertamina (Persero), yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN.

Majority and Controlling Shareholders

The controlling shareholder of PT Pertamina Trans Kontinental is PT Pertamina (Persero), whose shares are owned entirely by the Government of Indonesia through the Ministry of SOE.

100% Pemerintah (Kementerian BUMN)
Government (Ministry of SOE)



Pemegang Saham Yang Memiliki 5% Atau Lebih Saham

PT Pertamina (Persero) dengan komposisi sebesar 99,999%.

Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Saham Masing-masing Kurang dari 5%

PT Pertamina Trans Kontinental belum mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia sehingga tidak memiliki Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

Shareholders with 5% or Higher Shares

PT Pertamina (Persero) with 99.999% composition.

Board of Directors and Board of Commissioners Ownership

The Board of Commissioners and Board of Directors do not have direct and non-direct ownership in the Company.

Public Shareholders with Less Than 5% Ownership

PT Pertamina Trans Kontinental has not listed its shares at Indonesia Stock Exchange, therefore, the Company does not have any public shareholders with less than 5% ownership.

Kronologi Pencatatan Saham

Shares Listing Chronology

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham. Laporan ini tidak menyertakan informasi terkait kronologi penerbitan saham (termasuk *private placement*) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku, tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*) jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*) dan nama bursa di mana saham Perusahaan dicatatkan maupun didaftarkan.

As end of December 31, 2020, the Company did not have a chronology for the listing of shares. This report does not include information relevant to shares listing chronology (including private placement) and/or shares listing from the beginning of the issuance until the end of the fiscal year, shares listing year, total shares, shares par value, and shares offering price for each corporate action, total shares outstanding after the corporate action, and name of stock exchange where the Company's shares are listed.

Kronologi Pencatatan Efek dan Obligasi

Securities and Bonds Listing Chronology

Selama periode pelaporan, PTK tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya. Laporan ini tidak menyajikan informasi terkait kronologi pencatatan efek lainnya, meliputi nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan dan peringkat efek.

During the reporting period, PTK did not have any share listing chronology. This report does not present information related to other share listing chronology, including the name, year of listing, interest rate/yield, maturity date, value, or name of other stock exchanges where securities are listed, and securities ratings.

Nama & Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Name & Address of Supporting Institution and/or Profession

Jasa Service	Nama & Alamat Name & Address
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 - INDONESIA Telp: 021 50992901 Faks : 021 52905555 Website : www.pwc.com/id
Penasehat Hukum Legal Advisor	Verry Sitorus & Partners Gedung KOPI Lantai 1, Jl. R.P Soeroso No.20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330 Telp: 021-31907457 Fax: 021-31907248 Email: law@vsp.co.id Website: www.vsp.co.id
Notaris Notary	Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn. Menara Rajawali Lot 5.1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: +6221 579 505 87 Fax: - e-mail: info@fessyalwi.com

Jaringan Wilayah Operasi

Operational Area



11 WILAYAH LOKASI KERJA

11 Site of Operational Region

- 1
MEDAN
 - Belawan Medan
 - Arun
 - Lhokseumawe
- 2
MAKASSAR
 - Bitung
 - Bau-bau
 - Kolonodale
- 3
PLAJU
 - Plaju-Palembang
 - Jambi
- 4
BALIKPAPAN
 - Kota Baru
 - Kuala Semboja
 - Samarinda
 - Tanjung Santan
 - Tarakan
- 5
BATAM
 - Pulau Sambu
 - Tarempa
 - Tanjung Uban
- 6
TANJUNG PRIOK
 - Merak
 - Cirebon
 - Balongan



Daftar Alamat Kantor

Office Address



KANTOR PUSAT/ HEAD OFFICE

Jl. Kramat Raya No. 29 Jakarta Pusat 10450

Phone : (021) 31923005

Fax : (021) 3106804

KANTOR CABANG/ BRANCH OFFICE

Balikpapan

Jl. Yos Sudarso No.1 Komp. Pertamina PO BOX 432

Balikpapan

Phone : (0542) 734693, 515663

Fax : (0542) 423766

Email : ptkbpp@ptk-shipping.com

Makassar

Jl. Ahmad Saleh No. 4 Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang

Makassar-Sulawesi Selatan

Phone : (0411) 873683

Fax : (0411) 873683

Email : ptkmakassar@ptk-shipping.com

Surabaya

Jl. Perak Timur 260 Perak Surabaya

Phone : (031) 3282057, 3299112

Fax : (031) 3299113

Email : ptksurabaya@ptk-shipping.com

Batam

Jl. Raya Pelabuhan Kabil

Batam 29435

Phone : (0778) 711741 – 42

Fax : (0778) 711263, 711136

Email : ptkbatam@ptk-shipping.com

Plaju-Palembang

Jl. Beringin No. 70 Plaju Palembang, Sumatra Selatan

Phone : (0711) 595473, 595376, 595475, 596474

Fax : (0711) 542367, 542377

Email : ptkplaju@ptk-shipping.com

Belawan

Jl. Minyak No. 1 Lingkungan I Kel. Belawan I,

Kec. Medan. Belawan Medan

Phone : (061) 6943464

Fax : (061) 694241-45

Email : ptkmedan@ptk-shipping.com

Dumai

Jl. Sultan Syarif Kasim No. 262. Kode Pos 28811

Dumai-Riau

Phone : (0765) 443981, 38370

Fax : (0765) 35173

Email : ptkdumai@ptk-shipping.com



Bontang-Kalimantan Timur

Jl. Selat Bone No.29 RT.21
Tanjung Laut Bontang Selatan 75321
Phone : (0548) 26182, 26165
Fax : (0548) 551573, 21265
Email : ptkbontang@ptk-shipping.com

Cilacap

Jl. Tongkol No.20 Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah 53211
Phone : (0282) 521852
Fax : (0282) 521852
Email : ptkcilacap@ptk-shipping.com

Sorong-Papua

Jl. Yos Sudarso No. 78 Komperta Lido Sorong – Papua
Phone : (0951) 322294, 329502, 329503
Fax : (0951) 322729
Email : ptkorong@ptk-shipping.com

Tanjung Priok

Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area
Logistic Pertamina
Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara
Phone : (021) 65307028, 65307026, 65307029
Fax : (021) 65307035
Email : ptkpriok@ptk-shipping.com

KANTOR SUB-CABANG/ SUB-BRANCH OFFICES

Sub Cabang Balikpapan

- Kota Baru**
Gedung PT Pertamina (Persero) UPMS V
Jl. Pertamina RT.21
Ds. Semayap Kec Pulau Laut Utara
Kab. Kotabaru – Kalimantan Selatan
Phone : (0518) 23256
- Kuala Sembaja**
Kuala Sembaja RT.003 Kel. Senipah, Kec. Samboja
Kab. Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
Phone : (0542) 535137
- Samarinda**
Jl. Dr. Sutomo 40 Kel. Sanga-Sanga Dalam
Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur
Phone : (0541) 671300
Fax : (0541) 671487
- Tanjung Santan**
Komp. Chevron Santan Terminal RT. XI
Desa Semangko, Kec. Marang Kayu
Kab. Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
Phone : (0542) 548275
Fax : (0542) 548278

- **Tarakan**

Jl. Kesuma Bangsa RT.04 RW.03
Kel. Lungkas Ujung
Kec. Tarakan Timur
Tarakan – Kalimantan Timur

Sub Cabang Batam

- **Pulau Sambu**

Pertamina Pulau sambu RT. 01 /RW. 06
Kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang
Batam

- **Tarempa**

Ds. Payamaran RT.07 RW 01 Kec. Palmatak
Kab. Kepri Anabas – Kepri

- **Tanjung Uban**

Jl. Hang Tuah No.24
RT. 001/RW.007, Kel. Tanjung Uban
Kec. Bintan Utara
Kab. Bintan – Kepri

Sub Cabang Makassar

- **Bau-Bau**

Jl. Dayanu Ikhsanuddin Km. 8 Kel. Sulla,
Kec. Betoambari Bau-Bau, Sulawesi Utara

- **Kolonodale**

Jl. Wolter Mongonsidi No. 25
Kolonodale – Sulawesi Tengah
Phone : (0518) 21624

Sub Cabang Belawan

- **Arun Lhokseumawe**

2nd Floor Marine Offline PT. Arun NGL
Blang Lancang,
Lhokseumawe NAD
Phone : (0645) 654248
Fax : (0645) 654165
Email : ptkarun@ptk-shipping.com

Sub Cabang Dumai

- **Sei Pakning**

Gd. Marine Jasra Pertamina (Persero)
UPMS II Jl. Jend. Sudirman Sei Pakning 28761
Phone : (0766) 91112
Fax : (0766) 91112
Email : ptkdumai@ptk-shipping.com

Sub Cabang Cilacap

- **Semarang**

Mangunharjo RT. 002 RW 003
Kel. Mangunharjo,
Kec. Tugu Semarang

Sub Cabang Sorong

- **Bintuni**

Bintuni – Babo.
Irian Jaya Barat

- **Bula – Seram Timur**

Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Bula
Jl. Lumba – Lumba RT. 002/01
Kel. Bula, Seram Timur

- **Wayame**

Jl. Ir. M Putuhena Rt.006/RW.03
Ds. Wayame Kec. Teluk Ambon
Ambon –Maluku
Phone : (0911) 310087
Fax : (0911) 346155

Sub Cabang Tanjung Priok

- **Merak**

Jl. Pulorida Kav. M 90-92 Tanjung Sekong
Merak, Banten
Phone : (0254) 571617, 571178
Fax : (0254) 571617

- **Balongan**

Jl. Kerang A8 Komplek Pertamina EP
Balongan – Indramayu
Phone : (0234) 4288888
Email : ptkbalongan@ptk-shipping.com

- **Cirebon**

Jl. Sawo 1 C No. 46A
Komperta Klayon – Cirebon
Phone : (0231) 211691
Fax : (0231) 211691
Email : ptkcirebon@ptk-shipping.com

Sub Cabang Surabaya

- **Tuban**

Jl. Tanjung Awar – awar No 10 RT.02 RT.01
Dusun Boro, Ds Tasik Harjo
Kec. Jenu, Tuban

- **Gresik**

Jl. Yos Sudarso No.01 RT.002 RW.004
Kel. Bedilan Gresik Jawa Timur
Phone : (031) 3282057

- **Telaga Biru**

Jl. Raya Pelabuhan No. 60
Bangkalan, Madura
Phone : (031) 3071229

- **Situbondo**

Jl. Raya Pelabuhan No. 1
Kalbut, Situbondo
Phone : (0338) 675141

- **Tanjung Wangi**

Jl. Raya Situbondo No 8A
Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi
Phone : (031)3282057
Fax : (031)3299113

Sub Cabang Plaju-Palembang

- **Jambi**

Jl. Yos Sudarso No. 36 Kasang, Jambi
Phone : (0741) 31623
Fax : (0741) 7552186
Email : ptkjambi@ptk-shipping.com

Informasi pada Website Perusahaan

Information on Official Website



Informasi terkait PTK yang dimuat pada website Perusahaan (<http://www.ptk-shipping.com/id/>) antara lain sebagai berikut:

Information related to PTK are presented on our official website (<http://www.ptk-shipping.com/id/>) as follows:

PTK SHIPPING

- Tentang PTK Shipping
- Visi dan Misi
- Manajemen
- Tata Nilai
- Penghargaan dan Sertifikasi
- *Health, Safety, Security and Environment*
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- We-Care

ARMADA*

- Anchor Handling Tug Supply
- Gas Carrier
- Tanker
- Tug Boat & Oil Barges
- Harbour Tug
- SPOB
- Utility Vessel
- Mooring Boat
- Aluminium Boat
- Small Craft

* Sesuai dengan website tahun 2020

BISNIS UTAMA

- *Ship Operator*
- *Charter & Broker*
- *Shipping Agent*
- *Port Management*
- *Bunker Agent*
- *Offshore & Onshore Logistic Base*
- *Recognized Security Organization*
- *Hydro-Oceanography & Mapping*
- *Procurement Planning*

BERITA

- Berita dan Agenda
- Video dan Televisi
- Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

PTK SHIPPING

- About PTK Shipping
- Vision and Mission
- Management
- Values
- Awards and Certifications
- Health, Safety, Security and Environment
- Corporate Social Responsibility
- We-Care

FLEET*

- Anchor Handling Tug Supply
- Gas Carrier
- Tanker
- Tug Boat & Oil Barges
- Harbour Tug
- SPOB
- Utility Vessel
- Mooring Boat
- Aluminium Boat
- Small Craft

* In accordance with the 2020 website

BUSINESS ACTIVITY

- *Ship Operator*
- *Charter & Broker*
- *Shipping Agent*
- *Port Management*
- *Bunker Agent*
- *Offshore & Onshore Logistic Base*
- *Recognized Security Organization*
- *Hydro-Oceanography & Mapping*
- *Procurement Planning*

NEWS

- Event and News
- Video and Television
- Procurement Guidelines of Goods / Services

INVESTOR

- Our Shareholder
- Annual & Sustainability Report
- Laporan Keuangan

PTK CLEAN

- Tentang PKT Clean
- Apa yang Perlu Dilaporkan
- Pembuatan Laporan

PTK CLEAN

- Board Manual
- Pedoman Code of Conduct
- Pedoman Code of Corporate Governance
- Pedoman Gratifikasi
- Pedoman Conflict of Interest
- Pedoman Gratifikasi Fungsi Pengendalian Gratifikasi
- Pedoman Whistleblowing System

KONTAK

- Kontak Kami
- Cabang
- Anak Perusahaan

INVESTOR

- Our Shareholder
- Annual & Sustainability Report
- Financial Report

PTK CLEAN

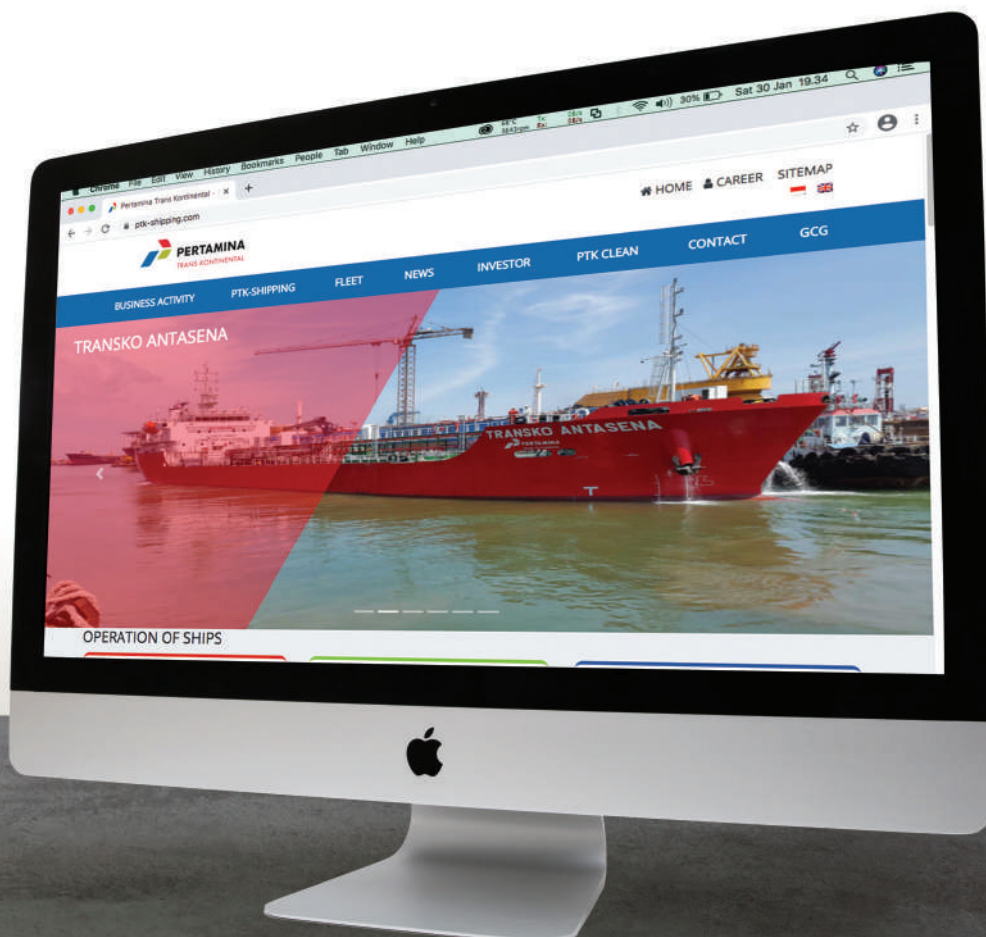
- About PTK Clean
- What Should be Reported
- Create Report

PTK CLEAN

- Board Manual
- Code of Conduct
- Code of Corporate Governance
- Gratifikasi
- Conflict of Interest
- Gratification Guideline Anti-Gratification Function
- Whistleblowing System Guideline

KONTAK

- Contact Us
- Branches
- Subsidiary



Penghargaan dan Sertifikasi Tahun 2020

Awards and Certification in 2020

Penghargaan Awards



21 JANUARI 2020

PT Donggi-Senoro LNG on National Occupational Health and Safety Month (K3) 2019 Without Lost Time Incident.



21 JANUARI 2020

Work Case PT Donggi-Senoro LNG 28.356.348 Man Hours without Days Away.



22 JANUARI 2020

In Appreciation of your ships calls contribution at Port of Banten on year 2019 The Best Shipping Agent.

JANUARY 21, 2020

PT Donggi-Senoro LNG on National Occupational Health and Safety Month (OHS) 2019 Without Lost Time Incident.

JANUARY 21, 2020

Work Case PT Donggi-Senoro LNG 28.356.348 Man Hours without Days Away.

22 JANUARI 2020

In Appreciation of your ships calls contribution at Port of Banten on year 2019 The Best Shipping Agent.



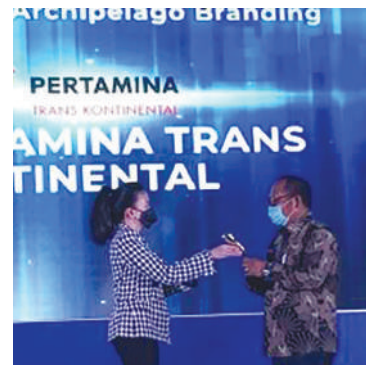
10 JULI 2020

9th Anugerah BUMN 2020 kategori Transformasi Organisasi Anak Perusahaan BUMN.



16 SEPTEMBER 2020

BUMN Marketeers Award 2020 predikat Bronze Winner The Most Promising Company in Strategic Marketing kategori Anak Perusahaan.



11 NOVEMBER 2020

BUMN Branding & Marketing Award 2020 untuk Anak Perusahaan BUMN kategori Trans Archipelago Branding.

JULY 10, 2020

9th Anugerah BUMN 2020 category SOE Subsidiary Organization Transformation.

SEPTEMBER 16, 2020

SOE Marketers Award 2020 Bronze predicate Winner The Most Promising Company in Strategic Marketing, Subsidiary category.

NOVEMBER 11, 2020

BUMN Branding & Marketing Award 2020 for SOE Subsidiary, category Trans Archipelago Branding.

**11 NOVEMBER 2020**

BUMN Branding & Marketing Award 2020 untuk Anak Perusahaan BUMN The Best CMO kategori Marketing Teamwork.

NOVEMBER 11, 2020

BUMN Branding & Marketing Award 2020 for SOE Subsidiary The Best CMO category Marketing Teamwork.

**17-19 NOVEMBER 2020**

Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 untuk PC Prove mendapat 4 Gold, 7 Silver dan 5 Bronze.

NOVEMBER 17 - 19, 2020

Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 for PC Prove awarded with 4 Gold, 7 Silver and 5 Bronze.

**2 JULI 2020**

Annual Pertamina Quality Award (APQ) 2020 untuk PC Prove Angguk-angguk Mantul predikat Platinum.

JULY 2, 2020

Annual Pertamina Quality Award (APQ) 2020 for PC Prove Angguk-angguk Mantul Platinum predicate.

**2 JULI 2020**

Annual Pertamina Quality Award (APQ) 2020 untuk PC Prove Pesut predikat Gold.

JULY 2, 2020

Annual Pertamina Quality Award (APQ) 2020 untuk PC Prove Pesut Gold predicate.

17-19 NOVEMBER 2020

Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 untuk FT Prove mendapat 1 Gold dan 1 Silver.

NOVEMBER 17 - 19, 2020

Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 for FT Prove awarded with 1 Gold and 1 Silver.

17-19 NOVEMBER 2020

Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 untuk RT Prove mendapat 1 Gold dan 1 Silver.

NOVEMBER 17 - 19, 2020

Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 for RT Prove awarded with 1 Gold and 1 Silver.

17-19 NOVEMBER 2020

Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 untuk I Prove mendapat 1 Silver.

NOVEMBER 17 - 19, 2020

Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 for I Prove awarded with 1 Silver.



23 OKTOBER 2020

Penghargaan dari LANAL Lhokseumawe terhadap crew kapal Transko Rajawali atas upaya Penyelamatan KRI Surik 645 di Perairan Tanjung Jambo Aye.

OCTOBER 23, 2020

Award from LANAL Lhokseumawe to Transko Rajawali ship crew for KRI Surik 645 rescue at Tanjung Jambo Aye Teritorial Waters.

23 OKTOBER 2020

Penghargaan dari LANAL Lhokseumawe terhadap Nakhoda Transko Cempala atas partisipasi membantu Lanal Lhokseumawe dalam pelaksanaan evakuasi kapal akibat cuaca buruk.

OCTOBER 23, 2020

Award from LANAL Lhokseumawe to Transko Cempala Master for participating in helping Lanal Lhokseumawe in ship evacuation due to bad weather.

Sertifikasi Certification



**7 NOVEMBER 2014 –
6 NOVEMBER 2020**

Environmental Management System ISO 14001:2015. RINA Services Sp.A

**NOVEMBER 7, 2014 –
NOVEMBER 6, 2020**

Environmental Management System ISO 14001:2015. RINA Services Sp.A



**NOVEMBER 2014 –
12 NOVEMBER 2020**

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001 : 2018. RINA Services Sp.A213

**NOVEMBER 13, 2014 –
NOVEMBER 12, 2020**

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001 : 2018. RINA Services Sp.A213

**1 JANUARI 2018 - 30
DESEMBER 2019**

Sertifikat KADIN
Certificate from Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN).

**JANUARY 1, 2018 –
DECEMBER 30, 2019**

Certificate from Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN).

Certificate Pertamina Safety Gas Patra 2 tanggal 12 April 2020.

Certificate Pertamina Safety Gas Patra 2 tanggal 12 April 2020.

Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bulan November 2020.

Ratification of the Establishment of the Occupational Safety and Health Committee. November 2020

Sertifikat Demo Room tanggal 21 September 2020.

Demo Room Certificate. September 21, 2020



Certificate ISO 9001:2015
tanggal 04.12.2019 - 18.12.2022.

Certificate ISO 9001:2015
tanggal 04.12.2019 - 18.12.2022.



Certificate ISO 14001:2015
tanggal 20.11.2017 - 06.11.2020.

Certificate ISO 14001:2015
tanggal 20.11.2017 - 06.11.2020.



Certificate ISO 45001:2018
tanggal 03.11.2019 - 12.11.2020.

Certificate ISO 45001:2018
tanggal 03.11.2019 - 12.11.2020.

Peristiwa Penting Tahun 2020

Significant Events 2020

29
07

Jakarta, 29 Juli 2020

Jakarta, July 29, 2020

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) dengan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menandatangani MoU Pelaksanaan Project Konversi bahan bakar *High Speed Diesel* (HSD) menjadi Kapal berbahan bakar Ganda Dual Fuel.

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) and PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) signed MOU on Implementation of High Speed Diesel (HSD) fuel Conversion to Dual Fuel Vessels.

19
08

Jakarta, 19 Agustus 2020

Jakarta, August 19, 2020

Penandatanganan Kerjasama Pembiayaan Investasi & MoU Payroll Pekerja PT Pertamina Trans Kontinental & PT Bank Syariah Mandiri.

Signing of PT Pertamina Trans Kontinental & PT Bank Syariah Mandiri Employee Payroll MO & Investment Financing Cooperation.

03
08

Jakarta, 03 Agustus 2020

Jakarta, August 03, 2020

CSR : Pemberian Bantuan Hewan Qurban, Kramat.

CSR: Qurban Animal Donation, Kramat.

07
09

Jakarta, 07 September 2020

Jakarta, September 07, 2020

CSR : Pemberian Bantuan Anak Yatim, Kramat.

CSR: Donation for Orphans, Kramat.

07
09

Jakarta, 07 September 2020

Jakarta, September 07, 2020

CSR : Pemberian Bantuan Pendidikan

CSR: Educational Assistance



09
09

Jakarta, 09 September 2020

Jakarta, September 09, 2020

HUT : PTK ke 51
PTK 51st Anniversary



01
10

Jakarta, 01 Oktober 2020

Jakarta, October 19, 2020

Penandatanganan Akad *Plafond* Pembiayaan Investasi 2 Unit Kapal HT 3200 HP antara PTK dan PT BNI Syariah.
Signing of Investment Financing *Plafond* Agreement for 2 Units HT 3200 HP Vessels between PTK and PT BNI Syariah.



07
10

Jakarta, 07 Oktober 2020

Jakarta, October 07, 2020

Perjanjian Konsorsium Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 di wilayah Lingkungan Pertamina Group antara PT Pertamina Trans Kontinental, Peteka Karya Tirta dan PT Multi Hanna Kreasiondo

B3 and Non-B3 Wastes Treatment Consortium Agreement in Pertamina Group Circumstances among PT Pertamina Trans Kontinental, Peteka Karya Tirta and PT Multi Hanna Kreasiondo.



16
10

Cilegon, 16 Oktober 2020

Cilegon, October 16, 2020

CSR : Pelatihan Urban Farming KWT Maju Makmur Kel. Randakari.

CSR: KWT Maju Makmu Urban Farming Training, Randakari Village.

19
10**Jakarta, 19 Oktober 2020**

Jakarta, October 19, 2020

CSR : Terminal WiFi Kel. Paseban.
 CSR: Terminal WiFi, Paseban Village.

05
11**Jakarta, 05 November 2020**

Jakarta, November 05, 2020

Awarding : 8th BUMN Brand & Marketing Award 2020
 Awarding : 8th BUMN Brand & Marketing Award 2020

16
11**Jakarta, 16 November 2020**

Jakarta, November 16, 2020

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PTK dan PPT Energy Trading Co;Ltd.: Kerja sama Bisnis dan Fasilitas Pinjaman.

Signing of Memorandum of Understanding between PTK and PPT Energy Trading Co. Ltd.: Business Cooperation and Loan Facilities.

24
11**Jakarta, 24 November 2020**

Jakarta, November 24, 2020

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Tersus TPPI antara PT Pertamina Trans Kontinental, PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, Peteka Karya Samudera.

Signing of Operations Cooperation Agreement (KSO) in TPPI Tersus Vessels Pilotage and Mooring Services among PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, Peteka Karya Samudera



WORKSHOP 2



PERTAMINA

PERTAMINA
TRANS KONTINENTAL

4

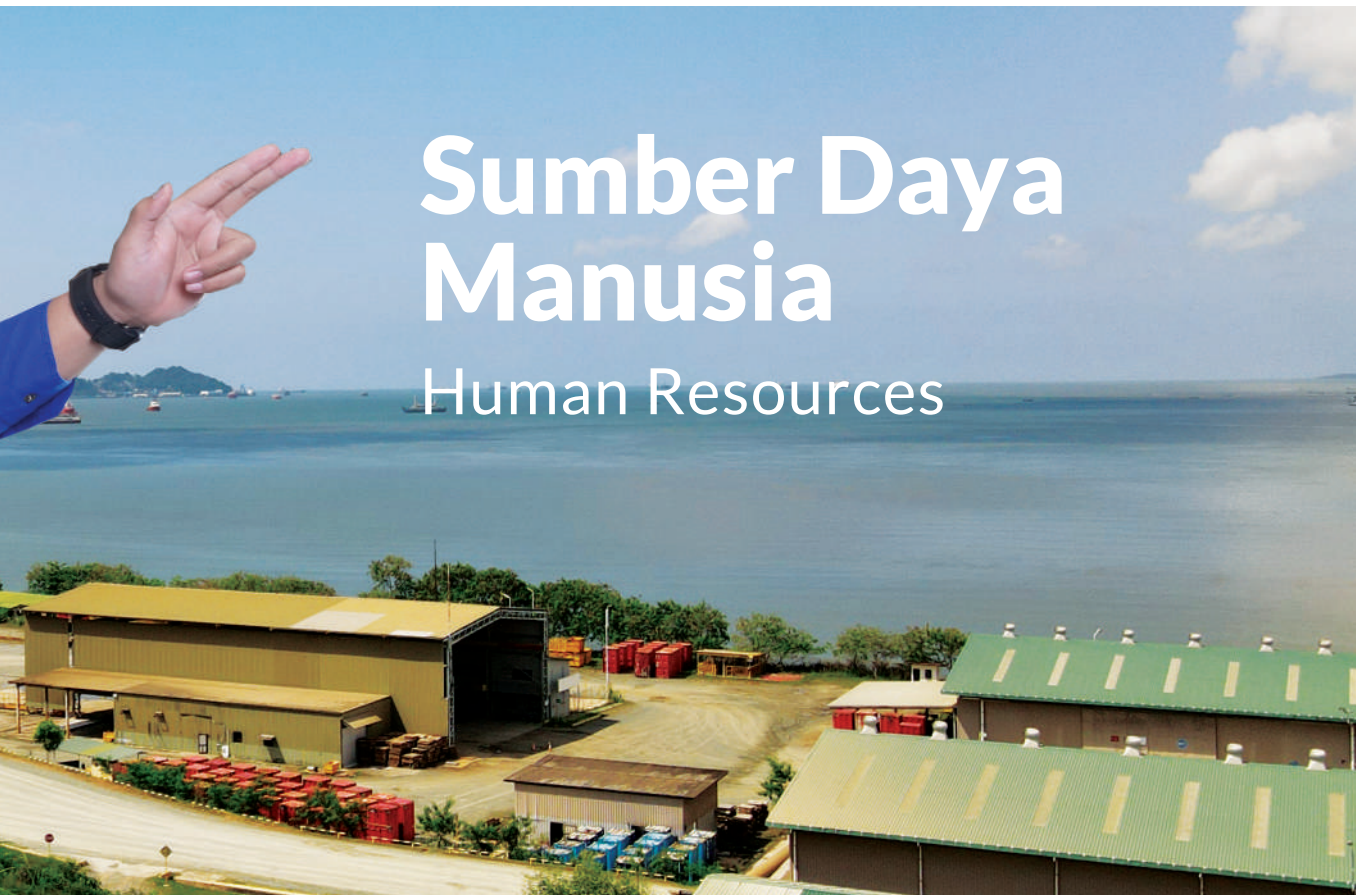
FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Business Function
Support



Sejalan dengan upaya untuk mencapai target bisnis yang sudah ditetapkan maka PTK perlu untuk memastikan adanya pemenuhan SDM yang dibutuhkan secara efektif. Pemenuhan ini terutama untuk mengisi posisi-posisi kritis dengan tetap mengacu kepada arahan yang diberikan dan memperhatikan komposisi pekerja secara fungsional sesuai kebutuhan organisasi.

In line with initiatives to achieve the designated business targets, PTK shall ensure effective fulfillment of human resources requirement. This fulfillment is primarily aimed to assign critical positions while still referring to the directions and considering composition of employees functionally according to organizational needs.



Sumber Daya Manusia

Human Resources

PROFIL DAN KOMPOSISI PEKERJA

Hingga 31 Desember 2020, jumlah pekerja PTK mencapai 898 orang, tumbuh 34,43% dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 668 orang. Peningkatan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Berikut adalah komposisi pekerja berdasarkan level jabatan, pendidikan, tingkat usia, status kepegawaian dan jenis kelamin.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Jabatan

Dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi kerja, pekerja PTK telah dibagi menjadi beberapa jenjang jabatan mulai dari *Non-Staf*, *Staff*, *Asisten Manager*, *Manager* dan

EMPLOYEE PROFILE AND COMPOSITION

As of December 31, 2020, total employees of PTK reached 898 people, increased by 34.43% compared to 668 people in 2019. The increase has been adjusted to business needs both in terms of quality and quantity. The composition of employees based on position level, education, age level, employment status and gender are as follows.

Employee Composition Based on Position Level

In creating effectiveness and efficiency of the implementation of work functions, PTK employees have been divided into several position level starting from *Non-Staff*, *Staff*, *Assistant Manager*, *Manager*,

Eksekutif. Adapun komposisi pekerja berdasarkan kelompok jabatan dapat terlihat dari tabel berikut:

Executive. The employee based on position groups is tabulated below:

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Jabatan

Employee Composition Based on Position Level

JABATAN Position		2020	2019	2018
Eksekutif	Executive	16	16	18
Manager	Manager	52	47	47
Asisten Manager	Assistant Manager	94	95	77
Staff + Crew Laut	Staff + Sea crew	258	228	308
Non Staf	Non Staff	478	282	223

Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan komposisi pekerja Pertamina Trans Kontinental terbesar adalah Sarjana S1 sebanyak 328 orang. Disusul kemudian adalah pekerja dengan latar belakang pendidikan Diploma sebanyak 133 orang.

Employess Composition by Education Level

Based on educational level, the highest composition of PT Pertamina Trans Kontinental's employees has Bachelor's degree of 328 employees. Followed by 133 workers with a Diploma educational background.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employess Composition by Education Level

PENDIDIKAN Education		2020	2019	2018
Pasca Sarjana	Post Graduate	57	56	69
Sarjana	Bachelor's degree	328	346	330
Diploma	Diploma	133	113	125
SMA*	Senior High School	319	142	140
Lain-lain (Ijasah Laut)	Other (Marine Diploma)	61	11	9

* Termasuk Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Including the Head Office and Branch Office Support Service Workers

Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia komposisi pekerja Pertamina Trans Kontinental terbesar adalah berusia 31-40 tahun sebanyak 303 orang. Disusul kemudian adalah pekerja berusia 41-50 tahun sebanyak 239 orang.

Employee Composition based on Age

Based on age, the highest composition of Pertamina Trans Kontinental is on 31 – 40 years with 303 employees followed by 239 employees on 41 – 50 years group.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia Employee Composition based on Age

USIA Age		2020	2019	2018
<20 tahun	<20 years	7	3	1
21-30 tahun	21-30 years	257	174	155
31-40 tahun	31-40 years	303	203	206
41-50 tahun	41-50 years	239	189	191
51-55 tahun	51-55 years	76	81	99
>55 Tahun	>55 years	16	18	21

Komposisi Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin pekerja Pertamina Trans Kontinental didominasi oleh pekerja laki-laki dengan jumlah 733 orang dan perempuan 165 orang.

Composition of Workers by Gender

Based on gender, Pertamina Trans Kontinental employees are dominated by male workers with a total of 733 and women with a total of 165.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Jenis kelamin Employee Composition based on Gender

JENIS KELAMIN Gender		2020	2019	2018
Laki-laki	Male	733	519	538
Perempuan	Female	165	149	135

Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian komposisi karyawan Pertamina Trans Kontinental dibagi menjadi Pekerja Tetap dan Pekerja Tidak Tetap. Jumlah Pekerja Tetap pada tahun 2019 sebanyak 346 orang, sedangkan pekerja tidak tetap sebanyak 322 orang, untuk tahun 2020 Jumlah Pekerja Tetap sebanyak 376 Orang, sedangkan pekerja tidak tetap sebanyak 522 orang.

Employee Composition based on Employment Status

Based on employment status, employee composition in Pertamina Trans Kontinental is divided into Permanent and Non-Permanent Employees. In 2019, Total Permanent Employee is 346 people and non-permanent employees is 322 people, for 2020 Total Permanent Employees is 376 people and non-permanent employees is 522 people.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition based on Employment Status

STATUS Status		2020	2019	2018
Pekerja Tetap / PWTT	Permanent Employee	376	346	367
Pekerja Kontrak / PWT	Contract Employee	44	40	84
Pekerja Tidak Tetap	Non-Permanent Employee	478	282	222

REKRUTMEN PEKERJA

Rekrutmen pekerja baru berfungsi untuk melakukan regenerasi serta memberikan keseimbangan komposisi pekerja. PTK menyusun program rekrutmen yang komprehensif serta memerhatikan faktor lainnya agar jumlah pekerja yang ada dapat memengaruhi efisiensi kinerja Perseroan.

PTK menjunjung tinggi asas kesetaraan kesempatan dalam proses rekrutmen tanpa adanya unsur diskriminasi. Oleh karenanya, rekrutmen pekerja PTK dilakukan secara terbuka bagi siapapun. Untuk mendapatkan calon pekerja yang berkualitas terbaik, PTK melakukan rekrutmen secara internal dan eksternal.

EMPLOYEE RECRUITMENT

New employee recruitment functions to regenerate and provide a balance of employee composition. PTK compiles a comprehensive recruitment program and considering other factors so that the number of existing employees can affect the efficiency of the Company's performance.

PTK upholds equal opportunity principle in the recruitment process without any element of discrimination. Therefore, employee recruitment in PTK is available to anyone. To recruit prospective employees with high quality, PTK conducts recruitment internally and externally.

Komposisi Pekerja Baru PT Pertamina Trans Kontinental

Composition of New Employees of PT Pertamina Trans Kontinental

GENDER Gender		2020	2019	2018
Laki-laki	Male	36	5	34
Perempuan	Female	14	2	1
Total	Total	50	7	35

TINGKAT TURNOVER PEKERJA

Sepanjang tahun 2020, tingkat *turnover* sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pekerja sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap jalannya operasi Perusahaan. Berikut ini kami sajikan statistik komparatif dalam tiga tahun terakhir:

Jumlah *Turnover* Pekerja

Employee Turnover Rate

KETERANGAN Description		2020	2019	2018
Jumlah Pekerja	Total Employees	898	668	673
Pekerja Mengundurkan Diri	Resigned Employees	5	3	3
Turnover Pekerja (%)	Employees Turnover (%)	0,56%	0,45%	0,45%

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJA

Pemetaan Kebutuhan Pengembangan SDM

Dalam Pengembangan kompetensi, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh manajemen dan pekerja berdasarkan kebutuhan jenjang jabatan. Selama tahun 2020, beragam pelatihan dan sertifikasi telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan keterampilan tertentu, sesuai kompetensi yang diperlukan masing-masing pekerja.

EMPLOYEE TURN OVER RATE

Throughout 2020, turn over rate remains very low compared to total employees thereby not causing any significant impact on the Company's operations. The comparative statistical turn over rate within 3 recent years are as follows:

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Mapping Human Resources Development Needs

In competency development, the company provides equal opportunities to all management and employees based on the needs of job levels. During 2020, various trainings and certifications have been carried out to meet specific skill needs, according to the competencies required by each employee.

Berikut adalah pemetaan kebutuhan training berdasarkan level jabatan dan realisasi selama tahun 2020:

The following is a mapping of training needs based on position level and realization during 2020:

Training Berdasarkan Level Jabatan dan Realisasi Selama Tahun 2020

Training Based on Position Level and Realization During 2020

LEVEL Level	RENCANA Plan	REALISASI Realization	TUJUAN Objection
Eksekutif Executive	5 pelatihan Training	12 pelatihan Training	Meningkatkan Knowledge dan Kompetensi Develop Knowledge and Competence
Manajer Manager	24 pelatihan Training	34 pelatihan Training	Meningkatkan Knowledge dan Kompetensi Develop Knowledge and Competence
Asisten Manager Assistant Manager	24 pelatihan Training	35 pelatihan Training	Meningkatkan Knowledge dan Kompetensi Develop Knowledge and Competence
Staf Staff	26 pelatihan Training	48 pelatihan Training	Meningkatkan Knowledge dan Kompetensi Develop Knowledge and Competence
Non Staf Non Staff	-	-	Meningkatkan Knowledge dan Kompetensi Develop Knowledge and Competence

Pelatihan dan Pengembangan

Secara berkesinambungan Perusahaan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pekerja. Perseroan mewujudkannya dengan menyelenggarakan pelatihan bagi para pekerja. Perusahaan menyelenggarakan 2 jenis program pengembangan pekerja yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pekerja yang memiliki kompetensi, kemampuan serta *know-how* untuk menampilkan kinerja yang mendukung pencapaian strategi perusahaan.

1. Program Pengembangan General (General Program)

Program ini ditujukan kepada seluruh Pekerja PTK dan berfokus pada pengembangan kompetensi dan keahlian pekerja guna memenuhi gap kompetensi pekerja di jabatannya saat ini.

2. Program Pengembangan Talent (Talent Development)

Program ini ditujukan kepada para *Talent/Successor* dan pekerja baru PTK dengan tujuan:

Training and development

On an ongoing basis, the Company continues to improve the competence and capabilities of employees. The company makes this happen by organizing training for workers. The company organizes 2 types of worker development programs that aim to ensure the availability of workers who have the competence, ability and know-how to display performance that supports the achievement of the company's strategy.

1. General Development Program

The program is aimed at all CAR workers and focuses on developing employee competencies and expertise to meet the competency gap of workers in their current positions.

2. Talent Development Program

This program is aimed at *Talent/Successor* and new PTK employees with the aim of:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pada *talent/successor* dalam rangka menyiapkan pada *talent/successor* agar dapat menampilkan kinerja yang optimal pada jabatan yang lebih tinggi (*Talent Readiness*).
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pekerja baru agar menjadi *early professional* di bidangnya serta mengidentifikasi pekerja potensial yang akan dimasukan ke dalam *talent acceleration pool*.

Technical Training Program

Pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan dengan scope kegiatan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya *crew* secara jumlah dan sertifikasi (COC, COP) sesuai dengan regulasi serta ketepatan waktu pemenuhannya.
 - Pemberdayaan *crew* PWTT
 - Sourcing melalui *crew* Agent dengan mengutamakan sinergi bersama Anak Perusahaan yang bergerak dalam bisnis *crew agent*. Merekrut pelaut-pelaut dengan mensyaratkan terpenuhinya sertifikasi sesuai regulasi serta kecakapan yang dibutuhkan dengan dituangkan ke dalam kontrak *crew agent*.
2. Penyiapan kader-kader pelaut yang terbaik untuk operasional kapal dan pemenuhan *talent management* darat dengan background *shipping* sesuai *core* bisnis perusahaan di masa yang akan datang.
3. Mempertahankan pelaut dengan memberikan sistem remunerasi menarik yang bersaing dengan industri pelayaran sejenis.
 - Pemberian Bonus *Performance Crew*
 - Pemberian kompensasi *overstay* awak kapal akibat kebijakan pencegahan COVID-19

Training Lainnya/ Realisasi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan *leadership skill*, jabatan managerial telah mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan, di antaranya:

- a. Develop and enhance competencies in *talent/ successors* in order to prepare *talent/ successors* in order to display optimal performance in higher positions (*Talent Readiness*).
- b. Develop and improve the competence of new workers to become *early professionals* in their fields and identify potential workers who will be included in the *talent acceleration pool*.

Technical Training Program

Technical competency development is carried out with scope of activities as follows:

1. Fulfillment of *crew* in number and certification (COC, COP) in accordance with regulations and timeliness of fulfillment.
 - Empowerment of the PWTT crew
 - Sourcing through *Crew Agents* by prioritizing synergies with subsidiaries engaged in the *crew agent* business. Recruiting seafarers by requiring the fulfillment of certification in accordance with the regulations and the skills needed by disclosing in a *crew agent* contract.
2. Preparation of the best Seaman cadres for ship operations and fulfillment of ground *talent management* with *Shipping* background in accordance with the company's *core* business in the future.
3. Retain sailors with provide an attractive remuneration system that competes with similar shipping industries.
 - Payment of *Crew Performance Bonus*
 - Disbursement of *overstay* compensation for the vessels crew following the COVID-19 prevention policy.

Other Trainings

In order to develop competency and leadership skill, the managerial position has been participated in several trainings and educations, among others:

Training untuk Jabatan Managerial

Training for Managerial Position

NAMA PROGRAM/ TRAINING/ SEMINAR Name of Program/Training	JABATAN PESERTA Level of The Participant	JUMLAH PESERTA Total	PELAKSANA Provicer	LOKASI Location	WAKTU Time
<i>Risk Management & Knowledge</i>	Manager Strategic Plan and Business Development (SPBD)	37	Fungsi SPBD	Jakarta	17-19 Februari 2020
<i>Excellent Business Plan Development</i>	Direktur AP PTK (Direktur PT PKG) Director of AP PTK (PT.PKG Director)	1	Hotel Santika TMI	Jakarta / Online	19-20 Maret 2020
Meningkatkan kinerja Pekerja dengan <i>positive Reinforcement</i> di PTK/ <i>Improve employee performance with positive reinforcement at PTK</i>	VP, Manager dan Ast. Manager	65	Fungsi SMR	Jakarta / Online	3 April 2020
5S/5R untuk peningkatan kinerja HSE dan Produktivitas di tempat kerja./ <i>5S/5R for enhanced HSE performance and productivity in the workplace</i>	VP, Manager dan Ast. Manager	127	Fungsi SMR	Jakarta / Online	16 April 2020
<i>ISPS Code</i>	Manager Vessel Operation	1	BKI Academy	Jakarta	29 Juni - 01 Juli 2020
<i>Internal Auditor ISM Code</i>	Manager SMR	1	BKI Academy	Jakarta	01 September 2020
<i>Suplly Chain Management For Maritime Sector</i>	Manager Marketing Support, Manager Procurement dan Manager SPBD	3	Myshipgo dan Ruang Logistic (Supply chain Indonesia)	Jakarta / Online	15, 28 dan 30 November 2020

Biaya Program Pengembangan Pekerja 2020

Berikut adalah jumlah pelatihan, peserta serta biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan hingga akhir tahun 2020:

2020 Worker Development Program Costs

The following is the number of training, participants and costs incurred by the Company until the end of 2020:

Program Pengembangan Pekerja

Employee Development Program

URAIAN Description	2020	2019	2018
Jumlah Pelatihan/ <i>Number of Trainings</i>	42	65	52
Peserta/ <i>Participant</i>	1029	613	575
Biaya/ <i>Budget</i>	Rp2.276.909.689	Rp2.391.594.795	Rp3.048.484.853

Sistem Program Pengembangan Pekerja

Pengelolaan atau pembinaan SDM PTK menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki SDM yang andal. Dalam hal pembinaan SDM, perusahaan telah menyiapkan:

1. Sistem *career path* pekerja, pembuatan *career path* tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pencarian dan pemilihan kandidat dalam proses *Succession Planning* serta tersedianya pemimpin dan pekerja berkualitas;
2. Sistem *talent pool* sebagai salah satu alat pembinaan;
3. *Talent Management System*, merupakan Strategic Initiative fungsi HR. PTK telah mempersiapkan pembuatan penyusunan *Talent Management System*.

Career Path

Dalam rangka mendorong tercapainya *high performance organization*, Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap jabatan telah diisi oleh pekerja yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai. Evaluasi penempatan pekerja (*placement*) pada prinsipnya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen pekerja melalui proses *Job Person Mapping* (JPM) serta PRL Pribadi yang merupakan refleksi dari *exposure*, pengalaman dan kapasitas pekerja.

Perusahaan menyadari bahwa mengingat besarnya organisasi, jumlah jabatan dan populasi pekerja, serta mempertimbangkan bahwa penempatan pekerja dalam implementasi RPSDM merupakan perubahan yang sangat mendasar dibandingkan proses penempatan sebelumnya. Dengan demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kondisi yang belum ideal, dimana tidak semua jabatan dapat diisi oleh pekerja yang sesuai/tidak ada gap dalam kapasitas dan kapabilitas.

Workers Development Program System

Management or coaching of PTK human resources is a form of long-term investment for the Company. This aims to ensure that the company has reliable HR. In terms of HR development, the company has prepared:

1. Employee career path system, the creation of career paths aims to accelerate the process of searching and selecting candidates in the Succession Planning process as well as the availability of qualified leaders and workers;
2. The talent pool system as a coaching tool;
3. Talent Management System, a Strategic Initiative for HR function. PTK has prepared the preparation of the Talent Management System.

Career Path

In order to encourage the achievement of higher performance organizations, the Company conducts evaluations to ensure that every position has been filled by workers who have the appropriate capacity and capabilities. Evaluation of placement of workers (*placement*) in principle is done by considering the results of the assessment of workers through the process of *Job Person Mapping* (JPM) as well as Personal PRL which is a reflection of the exposure, experience and capacity of workers.

The company realizes that given the size of the organization, the number of positions and the worker's population, and considers that the placement of workers in the implementation of RPSDM becomes a very fundamental change compared to the previous assignment process. Thus in practice there are still conditions that are not yet ideal, where not all positions can be filled by workers who are suitable/ there are no gaps in their capacity and capabilities.

Talent Pool

Sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap implementasi *talent management*, maka salah satu langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan memetakan pekerja yang masuk sebagai *Talent Pool*. *Talent Pool* adalah kelompok pekerja yang diidentifikasi sebagai talenta terbaik yang memenuhi kriteria *performance*/nilai kinerja dan potensi/kompetensi yang dipersyaratkan Perusahaan.

Pada prinsipnya *Talent Pool* digunakan perubahan untuk dasar penetapan *successor list* jabatan di PTK dan AP serta dasar penetapan program pengembangan pekerja. Saat ini kami sedang membuat *system talent pool* bekerja sama dengan Fungsi Information Technology. Tujuan system tersebut agar alat bantu baik Tim Management dan Direksi dalam program pengembangan pekerja dan mempercepat keputusan dalam pergerakan pekerja secara tepat (kompetensi).

Talent Pool

As a manifestation of the company's commitment to the implementation of talent management, one of the first steps taken is to identify and map workers who enter the Talent Pool. Talent Pool is a group of workers who are identified as the best talent that meets the performance criteria/performance values and potential/competencies required by the Company.

In principle, Talent Pool is used to change the basis for determining the successor list of positions in CAR and the AP and the basis for establishing employee development programs. Currently we are making a talent pool system in collaboration with the Information Technology Function. Purpose of the system is to assist both the Management Team and Directors in the employee development program and speed-up the decisions in the accurate workers (competence) movement.

PENILAIAN KINERJA PEKERJA

Untuk mengukur program pengembangan SDM, PTK melakukan penilaian kinerja pekerja yang dilakukan 1 kali pada akhir tahun. Penilaian tersebut dilakukan melalui Forum *People Review* dengan target kurva distribusi rating/hasil penilaian. Proses pelaksanaan penilaian kinerja terbagi dua kelompok yaitu:

1. Penilaian kinerja pekerja menggunakan KPI yang ditujukan untuk jenjang jabatan *manager* ke atas;
2. Penilaian kinerja pekerja menggunakan SMK yang ditujukan untuk jenjang jabatan *assistant manager* ke bawah.

Dalam penilaian tersebut, dilakukan dengan kaidah sebagai berikut:

1. Jenis kelompok kalibrasi dilakukan berdasarkan kelompok layer dan proses di lingkungan masing-masing (*supporting* dan *operation*).
2. Hasil penilaian akhir adalah hasil penilaian awal yang telah dikalibrasi, baik yang menggunakan

EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT

To measure the HR development program, PTK conducts an employee performance assessment conducted once every end of the year. The assessment is carried out through People Review Forum with a target distribution rating curve/ rating results. The performance evaluation implementation process is divided into two groups, as follows:

1. Employee performance assessment using KPIs aimed at managerial levels and above;
2. Employee performance assessment using SMK which is provided for assistant manager level and below.

The assessment, carried out with the following rules:

1. The type of calibration group is done based on the layer group and the process in each environment (supporting and operation).
2. The results of the final assessment are the results of the initial assessment that has been calibrated, both those using KPIs and those using SMKs; a)

KPI maupun yang menggunakan SMK; a) metoda kalibrasi KPI adalah diskusi kalibrasi, b) metoda kalibrasi SMK adalah *anchoring*. *Anchoring* adalah suatu mekanisme proses kalibrasi, biasanya dilakukan untuk jumlah *evaluee* yang banyak, dimana yang dilakukan adalah menentukan *evaluee* yang menjadi *anchor*/patokan di setiap rating kinerja, misalnya dimulai dengan menentukan *evaluee* sebagai *best performance*, *lowest performance* dan seterusnya.

3. Target distribusi yang digunakan sebagai pedoman rating ditetapkan Perusahaan.

Hasil penilaian kinerja pekerja pada tahun 2020 dengan jumlah pekerja yang dinilai sebanyak 378 pekerja, adalah sebagai berikut:

URAIAN Description	JUMLAH PEKERJA Total Employee	PERSENTASE Percentage
Nilai kinerja 6-7/ Performance scores 6-7	139	37%
Nilai kinerja 5/ Performance scores 5	195	52%
Nilai kinerja 3-4/ Performance scores 3-4	43	11%
Nilai kinerja 2/ Performance scores 2	1	0%
Total Pekerja/ Total Employee	378	100%

PROGRAM KESEJAHTERAAN DAN REMUNERASI

Program kesejahteraan dan sistem remunerasi diberikan dan dievaluasi secara berkala oleh Fungsi *Human Resource* PTK. Program tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan persaingan industri sejenis dan regulasi yang berlaku.

Selain itu pemberian program kesejahteraan dan remunerasi yang kompetitif diharapkan untuk dapat meningkatkan performa kinerja pekerja dan perusahaan secara menyeluruh. PTK berkomitmen untuk melaksanakan program kesejahteraan dan sistem remunerasi secara adil dan merata. Berikut adalah rincian komponen remunerasi yang diterima oleh pekerja:

KPI calibration method is a calibration discussion, b) SMK calibration method is *anchoring*. *Anchoring* is a calibration process mechanism, usually done for a large number of *evaluees*, where what is done is to determine the *evaluee* that becomes the anchor/benchmark in each performance rating, for example starting with determining the *evaluee* as best performance, lowest performance and more.

3. Distribution targets that are applied as rating guidelines are set by the Company

Results of the employee performance appraisal in 2020 with the number of workers assessed as 378 workers, are as follows:

WELFARE PROGRAM AND REMUNERATION

Welfare program and remuneration system are provided and evaluated regularly by Human Resources Function at PTK. The program is done by considering competition with similar industry and prevailing regulation.

In addition, the provision of competitive welfare program and remuneration is expected to increase performance of the workers and Company comprehensively. PTK is committed to perform the welfare program and remuneration system fairly and equally. Detail remuneration component received by the employees are as follows:

Komponen Remunerasi Pekerja PTK

PTK Employees Remuneration Component

KOMPONEN REMUNERASI & BENEFIT Benefit Remuneration & Benefit Component	STATUS PEKERJA Employee Status		PERIODE KALKULASI Calculation Period			TIPE Type	
	STAF Staff	NON-STAF Non-Staff	HARIAN Daily	BULANAN Monthly	TAHUNAN Annually	FIX Fix	VARIABEL Variabel
REMUNERASI / REMUNERATION							
Gaji Pokok/ Basic Salary	✓	✓	-	✓	-	✓	-
Tunjangan/ Allowance	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Lembur/ Overtime	✓	✓	✓	-	-	-	✓
BENEFIT LAINNYA / OTHER BENEFITS							
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Fas. Istirahat Tahunan Annual Leave Facility	✓	-	-	-	✓	✓	-
Bonus/ Bonus	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Insentif / Incentive	✓	✓	-	-	✓	-	✓
BPJS							
BPJS Ketenagakerjaan	✓	✓	-	✓	-	✓	-
BPJS Kesehatan	✓	✓	-	✓	-	✓	-
BPJS Pensiun	✓	✓	-	✓	-	✓	-

Anggaran Biaya

Berikut rincian biaya yang dikeluarkan Perusahaan untuk kesejahteraan pekerjaanya:

Budget Allocation

Detail budget allocated by the Company for employee welfare is as follows:

Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan untuk Kesejahteraan Pekerja (dalam Rupiah Penuh)

Budget Allocation of the Company for Employee Welfare (in Full Rupiah)

URAIAN Description		2020	2019	2018
Gaji Pekerja	Employee Salary	59.146.551.189	60.553.049.650	60.438.545.908
Tunjangan pekerja	Employee Allowance	38.564.891.670	17.888.737.151	18.193.804.719
Program Pensiun Pekerja	Employee Retirement Program	6.784.788.901	1.620.788.382	1.812.697.111
Bonus & Penghargaan	Bonus & Awards	28.592.037.887	30.312.027.549	18.334.590.660
Jumlah	Totak	133.088.269.647	110.374.602.732	98.779.638.398

Program Pensiun

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja yang telah mendedikasikan diri kepada Perusahaan, PTK memberikan program pensiun. Program pensiun tersebut terdiri dari dua program, yaitu:

1. Program pensiun diberikan kepada para pekerja yang diangkat pada usia minimum 18 (delapan belas) tahun dengan diikutsertakan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kepada para pekerja dengan status Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) yang telah mencapai usia minimum 46 (empat puluh enam) tahun pada tahun anggaran berjalan dengan masa kerja minimal 15 (lima belas) tahun dapat diberikan uang panjar Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) sebesar 10% yang akan diperhitungkan pada saat PHK atau mencapai usia MPPK (55 tahun). PAP 10% dapat dibayarkan kepada pekerja jika hasil perhitungan PAP 10% lebih kecil atau sama dengan perhitungan penghargaan Masa Kerja. Tabel kecil terhitung pada saat pengajuan panjar PAP 10% setelah dikurangi hutang-hutangnya (jika ada).
2. Program pelatihan persiapan masa purna karya diberikan sebagai persiapan pengelolaan mental pekerja dalam menghadapi masa-masa pensiun. Selain itu pada program pelatihan tersebut juga diberikan pengarahan mengenai kegiatan wirausaha, sehingga para pekerja pensiun yang ingin melanjutkan berkarya di bidang lain mendapatkan modal dasar yang tepat.

Untuk pekerja yang pensiun, Perusahaan menyiapkan dua program, yaitu Dana Pensiun Pertamina (DPP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri (DPLK Tugu Mandiri). Adapun besaran iuran/persentase Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri adalah sebesar 5% kontribusi dari Perusahaan, dan sebesar 5% kontribusi dari pekerja. Besaran manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina dengan iuran per bulan 7,5% dari PHDP (Penghasilan Dana Pensiun) terdiri dari Perusahaan 5,5% dan Pekerja 2%.

Retirement Program

As manifestation of responsibility to employees who have dedicated themselves to the Company, PTK provides a pension program. The pension program comprising of two programs, as follows:

1. The pension program is given to workers who are appointed at the minimum age of 18 (eighteen) years and are included in the Financial Institution Pension Fund (DPLK) program. To workers with an Unspecified Time Worker (PWTT) status who have reached the minimum age of 46 (forty-six) years old in the current fiscal year with a minimum service period of 15 (fifteen) years, an up-to-date reward for service (PAP) of 10% can be given which will be calculated at the time of layoff or reaching the age of MPPK (55 years). 10% PAP can be paid to workers if the 10% PAP calculation results are less than or equal to the calculation of service tenure. Small table calculated at the time of submission of a 10% PAP deposit after deducting the debts (if any).
2. Retirement preparation training programs are provided as preparation for the mental management of workers in facing retirement. In addition, the training program is also given guidance on entrepreneurial activities there by the retired workers who seek to continue working in other fields will acquire the appropriate capital.

For retired workers, the Company prepares two programs, namely the Pertamina Pension Fund (DPP) and the Tugu Mandiri Financial Institution Pension Fund (DPLK Tugu Mandiri). The amount of contribution/percentage of the Tugu Mandiri Financial Institution Pension Fund is 5% of the contribution from the Company, and 5% of the contribution from the employees. The amount of defined benefits managed by the Pertamina Pension Fund with a monthly contribution of 7.5% of PHDP (Pension Fund Income) consists of 5.5% Companies and 2% Workers.

Program Penghargaan

PTK memiliki program penghargaan khusus bagi pekerja yang telah menempuh masa kerja selama 10, 15, 20, 25, 30, 35 tahun. Program penghargaan merupakan pengakuan dan ungkapan terima kasih kepada pekerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atas pengabdian dan prestasi yang telah dicapai. Perusahaan memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) dengan beberapa jenjang waktu pengabdian sebagai berikut:

Reward Program

PTK has a special rewards program for employees who have worked for 10, 15, 20, 25, 30, 35 years. The award program is an acknowledgment and expression of appreciation to the workers based on the designated criteria for their dedication and achievements. The company awards the Service Anniversary (UTD) award with several service levels as follows:

Program Penghargaan Pekerja Tahun 2020

Employee Reward Program 2020

MASA KERJA Years of Service	PENGHARGAAN YANG DITERIMA Reward Received		JUMLAH PEKERJA PENERIMA PENGHARGAAN LENCANA/ PENITI Number of Workers Recipient of Badges/Safety Pins
	BADGE/PIN (emas murni/ pure gold)	UANG PENGHARGAAN Award Money	
10 tahun/ years	2,5 gram	0,5 x Basic Salary	15 Pekerja/ Employee
15 tahun/ years	5,0 gram	1,0 x Basic Salary	22 Pekerja/ Employee
20 tahun/ years	7,5 gram	1,5 x Basic Salary	26 Pekerja/ Employee
25 tahun/ years	10,0 gram	2,0 x Basic Salary	2 Pekerja/ Employee
30 tahun/ years	12,5 gram	2,5 x Basic Salary	5 Pekerja/ Employee
35 tahun/ years	15,0 gram	3,0 x Basic Salary	-

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pekerja. Oleh karena itu PTK berupaya memperhatikan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bagi seluruh pekerja. Diantaranya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai. Fasilitas yang diberikan oleh PTK kepada pekerja adalah sebagai berikut:

Working environment becomes a factor that influence performance of an employees. Therefore PTK seeks to concern on a comfortable and conducive work environment for all employees. Among them by providing adequate supporting facilities. The facilities provided by PTK to employees are as follows:

1. Pembentukan Koperasi Pertamina Trans Kontinental sebagai sarana usaha yang menyediakan tidak hanya kegiatan koperasi konvensional namun juga mencakup penyediaan barang dan jasa umum yang dibutuhkan oleh Perusahaan;

1. Establishment of Pertamina Trans Kontinental Cooperative as a business facility that provides not only conventional cooperative activities but also includes the provision of general goods and services required by the Company;

2. Penyediaan ruang menyusui bagi para pekerja perempuan di lantai 2. Penyediaan ruang ini diharapkan untuk membantu para pekerja perempuan dalam menyediakan nutrisi terbaik kepada anaknya;
3. Pembentukan komunitas olahraga, seperti bulutangkis, voli, futsal, tenis meja, dan basket. Komunitas ini diharapkan dapat menyalurkan hobi dari para pekerja setelah selesainya jam kerja.

SURVEI KEPUASAN PEKERJA

PTK secara rutin melakukan survei setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat kepuasan pekerja terhadap kebijakan yang secara langsung mengatur hak dan kewajibannya didalam perusahaan. Survei Kepuasan Pekerja (SKP) dilakukan dengan menggunakan metode penyebaran kuisioner secara online melalui *broadcast* Pertamina Trans Kontinental.

Berdasarkan *Internal Customer Satisfaction* (ICS) Survey Fungsi HR & GA yang telah dilakukan, nilai kepuasan pekerja Fungsi HR & GA pada Tahun 2020 adalah sebesar 3.5 (dari target 3,8). Yang menjadi catatan utama kepada Fungsi HR & GA yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan informasi terkait ketentuan dan prosedur tentang program pengembangan pekerja.
2. Layanan Fungsi HRO & GA kepada pekerja belum optimal sehingga tingkat kepuasan pekerja terhadap fungsi HRO & GA belum optimal.

Kedua catatan utama tersebut secara bertahap ditindaklanjuti untuk perbaikan sebagai berikut:

1. Fungsi HR Strategic merencanakan skema pengembangan jenjang karir pekerja dalam bentuk kebijakan.
2. Fungsi HRO & GA akan memperbaiki kualitas layanan ditahun 2021.

2. Provision of nursery room for female employees on the second floor. Provision of this space is expected to assist women workers in providing the best nutrition for their children;
3. The establishment of sports communities, such as badminton, volleyball, futsal, table tennis and basketball. This community is expected to channel the hobbies of the workers after the end of the working hours.

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

PTK conducts an annual survey to measure the employee satisfaction level to the policies that directly governs their rights and obligations within the company. The Employee Satisfaction Survey (SKK) was conducted using the online questionnaire distribution method via the Pertamina Trans Kontinental broadcast.

Based on *Internal Customer Satisfaction* (ICS), the HR & GA Function Survey has been conducted, the employee satisfaction score in HR & GA Function in 2020 achieved 3.5 (from target of 3.8). The main concern to HR & GA Function is as follows:

1. Clarity of information related to provisions and procedures about worker development programs.
2. HRO & GA function services to workers was less optimal so that the level of worker satisfaction the HRO & GA function was less optimal.

The two main concerns have been gradually followed up for improvement as follows:

1. The strategic HR function plans a schema development of career paths for employees form of policy.
2. HRO & GA function will improve quality service in 2021.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Langkah-langkah inovatif yang diambil dalam upaya penguatan SDM di tahun 2020, tetap sejalan dengan kebijakan Perusahaan di bidang pengelolaan SDM. Kami memandang bahwa SDM merupakan salah satu elemen terpenting yang akan memutar roda perusahaan terus berjalan karena manusialah penggerak utama suatu organisasi.

Keberhasilan atau kesuksesan Perusahaan dalam menjalankan bisnis sangat erat kaitannya dengan peran SDM yang secara terus-menerus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mendorong serta meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan yang senantiasa melakukan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang memadai dan kompetensi organisasi yang sejalan dengan kegiatan bisnis akan memungkinkan pertumbuhan pada bisnis Perusahaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Guna memenuhi tuntutan tersebut, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) secara konsisten dan kontinu dari tahun ke tahun menyiapkan kader-kader yang berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan. Kami bersyukur bahwa berbagai upaya yang kami lakukan di tahun 2020 telah ikut memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menciptakan kinerja positif serta berbagai prestasi yang telah diraih.

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan dan peningkatan SDM membentuk manusia yang berkualitas dengan keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kepada Perusahaan akan berpengaruh kepada kinerja Perusahaan. Berdasarkan visi, misi dan tata nilai, PTK menetapkan sasaran yang ingin dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang dimilikinya dan berbagai kegiatan yang dilakukannya. PTK dalam

HR MANAGEMENT POLICY

The innovative plans taken to strengthen HR in 2020 remain in line with the Company's policies in the field of HR management. We view that HR is one of the most important elements that will keep the wheels of the company going as people are engines of an organization.

The success or achievement of the Company in running its business is closely related to the role of human resources, whose capacity is continuously enhanced in order to be able to encourage and improve company performance. Therefore, the Company, which continues to improve the quality and competence of adequate human resources and organizational competence that is in line with business activities, will enable growth in the Company's business in a sustainable and sustainable manner.

In order to meet these demands, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) has consistently and continuously prepared qualified cadres from year to year to fulfill needs. We are grateful that the various efforts we made in 2020 have contributed very significantly in creating positive performance and various achievements that have been achieved.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGY

Development and improvement of human resources to develop qualified people with skills, work abilities and loyalty to the Company will affect the Company's performance. Based on the vision, mission and values, PTK has set the desirable goals through managing its resources and various activities done. In prioritizing for workers amidst the uncertain economic situation, PTK immediately formulates a human

memperjuangkan pekerja di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini PTK segera membuat strategi pengelolaan dan pengembangan SDM melalui peningkatan *skill* dan daya saing dalam bidang pekerjaan yang digeluti.

SDM yang unggul dan berkualitas akan membantu Perusahaan agar menjadi lebih berkembang dan dapat mencapai tujuan Perusahaan. Setiap jajaran Manajemen SDM harus menciptakan manusia yang handal dengan melakukan *training*, *coaching* dan *motivation* pada setiap pekerja agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kemampuan inilah yang akan menjadi salah satu kunci kemajuan dan keberhasilan dari sebuah perusahaan. Bahkan daya saing tinggi akan membuat pekerja siap dengan tantangan arus globalisasi dan membuat perusahaan mampu memanfaatkan peluang sebaik-baiknya.

Dalam jangka panjang, Perusahaan melalui manajemen sumber daya manusia akan diarahkan untuk:

1. Memberikan kesempatan sumber daya manusia untuk berkembang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain untuk kebaikan Perusahaan juga untuk kebaikan perorangan itu sendiri;
2. Memperkuat produk unggulan di setiap unit kerja untuk menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam Perusahaan;
3. Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan;
4. Dapat membangun peralatan produksi yang maju dan canggih.

resource management and development strategy by developing skills and competitiveness in their field of work.

Superior and qualified human resources will help the Company to be more developed and achieve the Company's goals. Every level of human resource management shall create reliable people by conducting training, coaching and motivation for each employee so that they are able to carry out their duties properly. This capability will become a key to the progress and success of a company. Despite high competitiveness will encourage the workers to be ready for the challenges of globalization and enable companies to create the best of opportunities.

In the long term, through human resource management, the Company will lead to:

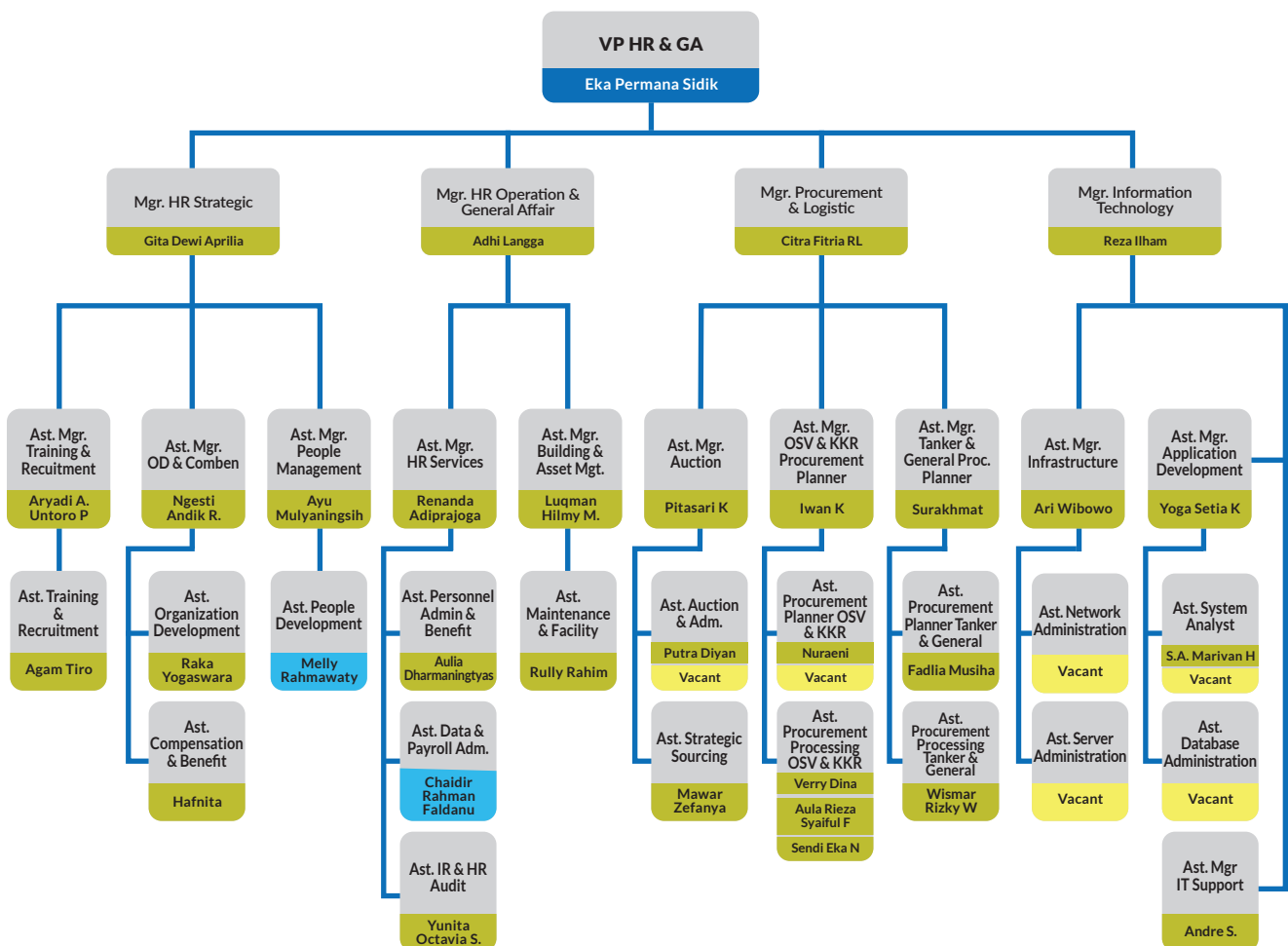
1. Provide opportunities for human resources to develop into individuals of high quality and competitiveness. Apart from being for the good of the company it is also for benefit of the employee individually;
2. Strengthening superior products in each work unit towards a competitive advantage by building linkages in production, distribution and service systems within the Company;
3. Develop mastery, utilization and creation of knowledge;
4. Opportunity to build advanced and sophisticated production equipment.

STRUKTUR ORGANISASI SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen SDM di Perusahaan kami dibangun mulai dari penataan struktur organisasi yang ramping dan kokoh. Berikut ini kami sajikan Struktur Organisasi Divisi Sumber Daya Manusia PT Pertamina Trans Kontinental:

HUMAN RESOURCES ORGANIZATIONAL STRUCTURE

HR management in our company is built from structuring a lean and strong organizational structure. Here we present the Organizational Structure of the Human Resources Division in PT Pertamina Trans Kontinental:



FUNGSI DAN RUANG LINGKUP DIVISI HUMAN RESOURCE

Divisi *Human Resource* (HR) merupakan pelaku utama dalam kegiatan pengelolaan SDM yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, yang dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan fungsi-fungsi yang ada. Pada prinsipnya, penetapan kebijakan pengelolaan SDM merupakan tanggung jawab Divisi HR. Namun mengingat operasional Perusahaan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, dinilai perlu untuk mendelegasikan tugas dan tanggung jawab tersebut secara berjenjang berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku.

Berikut dibawah ini merupakan Fungsi dan ruang lingkup tugas Divisi HR PT Pertamina Trans Kontinental:

Analisis Organisasi

Analisis/kajian organisasi dilakukan berdasarkan strategi dan tujuan organisasi yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Lingkup kajian meliputi wewenang dalam penyusunan struktur organisasi, uraian jabatan, jumlah formasi, kompetensi dan golongan jabatan. Perusahaan bertanggung jawab dalam menetapkan pedoman dan sistem penyusunan organisasi dan kelengkapannya, melakukan kajian organisasi, formasi maksimal, dan golongan jabatan serta menetapkan struktur organisasi dan kelengkapannya untuk seluruh level.

Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Tenaga Kerja

Lingkup perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga kerja adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga kerja di setiap tingkat yang meliputi identifikasi kebutuhan dan inventarisasi ketersediaan tenagakerja, identifikasi permanen dan non-permanen (*seasonal*), identifikasi kegiatan *core*

FUNCTIONS AND SCOPE OF HUMAN RESOURCE DIVISION

Human Resource (HR) Division is the main actor in HR management activities which is responsible for carrying out its duties optimally. The goal is to create quality human resources capable of providing added value to the Company, who in practice always coordinate with existing functions. In principle, the establishment of HR management policies is the responsibility of the HR Division. However, considering that the company's operations are spread across almost all parts of Indonesia, it is deemed necessary to delegate these tasks and responsibilities in stages based on the prevailing organizational regulation.

Function and scope of duties of the HR Division in PT Pertamina Trans Kontinental are as follows:

Organizational Analysis

Organizational analysis/study is carried out based on the organization's strategy and objectives as outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP). The scope of the study includes the authority in the preparation of the organization structure, job descriptions, number of formations, competencies and class positions. The company is responsible to formulate the guidelines and organizational structure system and its completeness, conducting organizational studies, optimum formation, and class positions as well as determining the organizational structure and completeness for all levels.

Manpower Planning and Procurement

The scope of planning for manpower requirements and procurement is to regulate authority and responsibility for planning the needs and procurement of manpower at each level which includes identification of needs and inventory of labor availability, identification of permanent and non-permanent (*seasonal*), identification of core activities and non-core, employment status, recruitment,

dan *non-core*, status hubungan kerja, penyelenggaraan rekrutmen, serta seleksi dan pengisian jabatan.

Pengelolaan Kinerja Pekerja

Lingkup pengelolaan kinerja pekerja adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab penetapan pedoman dan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang digunakan. Kantor Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan pedoman SMK, sementara Cabang bertanggung jawab dalam menjabarkan SMK agar dapat diimplementasikan di lingkungannya. Anak Perusahaan bersama-sama melaksanakan pedoman SMK sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pengembangan Karir

Lingkup pengembangan karier pekerja yang diatur dalam pedoman ini meliputi wewenang dan tanggung jawab dalam penetapan pedoman dan sistem pengembangan karier, pelaksanaan promosi, mutasi, rotasi dan suksesi serta penugasan pekerja dalam rangka perbantuan dan *assessment center*.

Pembelajaran

Lingkup pembelajaran adalah mengatur kewenangan dan tanggung jawab penetapan pedoman, *Training Need Analysis* (TNA), pelaksanaan program pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta internalisasi dan pengembangan budaya Perusahaan.

Pengupahan dan Benefit

Lingkup pengupahan dan benefit adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab dalam penetapan pedoman, kebijakan serta program pengupahan dan benefit, pelaksanaan pemberian upah, tunjangan dan kompensasi, penghargaan, fasilitas, pemberian benefit kesehatan, dan jaminan hari tua.

Pengelolaan Hubungan Industrial

Lingkup pengelolaan hubungan industrial adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan hubungan industrial, hubungan dengan instansi terkait bidang ketenagakerjaan, hubungan dengan Serikat Pekerja, penyelesaian masalah hubungan industrial.

selection and filling of positions.

Employee Performance Management

Scope of employee performance management is to regulate authority and responsibility for setting guidelines and the Performance Management System (SMK) used. The Head Office has the authority and responsibility in setting the SMK guidelines, while the Branch Office is responsible for describing SMK to be implemented in its environment. Subsidiaries then altogether implement the SMK guidelines according to the stipulated provisions.

Career Development

Scope of employee career development as stipulated in this guideline includes authority and responsibility in establishing career development guidelines and systems, implementing promotions, transfers, rotations and successions as well as the assignment of workers in the context of assistance and assessment centers.

Learning

The scope of learning is to regulate authority and responsibility for setting guidelines, Training Need Analysis (TNA), implementing learning programs, evaluating learning, and internalizing and developing corporate culture.

Wages and Benefits

Scope of wages and benefits is to regulate authority and responsibility in determining wage and benefit guidelines, policies and programs, the implementation of wages, allowances and compensation, awards, facilities, provision of health benefits, and old age security.

Industrial Relations Management

Scope of industrial relations management is to regulate authority and responsibility in establishing industrial relations policies, relations with related agencies in manpower aspect, relations with trade unions, and to solve industrial relations problems.

PROFIL KEPALA UNIT SDM

Profil kepala Unit SDM telah disajikan pada Profil Pejabat, bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

REKRUTMEN PEKERJA

Di Tahun 2020 berdasarkan Surat Resmi dari PT Pertamina (Persero) yang mempertimbangkan kinerja keuangan Perusahaan yang terdampak oleh *triple Shock*, (penurunan harga minyak dunia, volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah, dan penurunan *demand*) serta efek dari pandemi COVID-19 semua rencana rekrutment pada tahun 2020 di tunda /*freeze* sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, kecuali untuk rekrutmen kebutuhan proyek strategis nasional yang tidak dapat ditunda karena sudah menjadi bagian dari tahapan / *timeline* proyek.

ROADMAP DAN RENCANA KE DEPAN

- Periode 2021 – 2022, PTK berada dalam tahapan *People Analytics* untuk mengevaluasi kompetensi SDM mulai dari pemetaan kompetensi, pengisian formasi jabatan sesuai yang diharapkan pada jabatannya melalui *upskilling* yaitu *training* secara online maupun *offline* serta mempersiapkan *tools-tools* untuk pengembangan aplikasi yang mengarah ke *Human Capital Information System*, serta mempersiapkan *Talent Pool Management System*.
- Selain dengan sistem *talent pool management*, PTK dalam mempersiapkan *Leader/successor* memiliki program akselerasi diantaranya *Talent Development Acceleration (TDA)*, *Advance Leadership Program (ALP)*, *GM Academy*, *CFO Academy* dan pengembangan SDM lainnya.
- Salah satu upaya peningkatan *engagement* pekerja ke perusahaan melalui pembangunan budaya berbasis AKHLAK sebagai perwujudan dalam mendukung program tata nilai BUMN.

PROFILE OF HR UNIT HEAD

Profile of the HR Unit has head been presented in the Executive Officers Profile, Company Profile chapter, this Annual Report.

WORKERS RECRUITMENT

In 2020, based on Official Letter from PT Pertamina (Persero) which considers the Company's financial performance, which is affected by the triple shock, (decline in world oil prices, volatility in the IDR currency exchange rate, and decreased demand) and the effects of the COVID-19 pandemic on all recruitment plans on 2020 is postponed/frozen until further notice, except for the recruitment of national strategic project needs that cannot be postponed as it has become part of the project timeline.

ROADMAP AND FUTURE PLANS

- In 2021 – 2022 period, PTK is in the *People Analytics* stage to evaluate HR competencies starting from competency mapping, filling in job formations as expected in their positions through *upskilling*, including online and offline training and preparing tools for application development leading to *Human Capital Information System*, as well as preparing a *Talent Pool Management System*.
- In addition to the *talent pool management* system, in preparing *Leaders/successors*, PTK has accelerated programs including *Talent Development Acceleration (TDA)*, *Advance Leadership Program (ALP)*, *GM Academy*, *CFO Academy* and other HR development.
- One of the efforts to increase employee engagement with companies is through the development of a culture based on AKHLAK as a manifestation of supporting the SOEs values program.



PTK memandang bahwa penggunaan Teknologi Informasi (TI) merupakan aspek penting dalam menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, akurat, dan berorientasi pada sistematisasi cepat tanggap (*Quick Response System*). Penggunaan TI tidak hanya menjadi suatu pemacu pada prosedur-prosedur bisnis, tetapi juga menjadi suatu agen inovatif yang memungkinkan Perusahaan untuk mencari alternatif-alternatif baru dalam pemecahan masalah atas proses dan prosedur operasional kerja

PTK views that Information Technology (IT) application has become an important aspect to create a more efficient, accurate, and systematically responsive business process (*Quick Response System*). The IT implementation is not only a booster for business procedures, but also an innovative agent that allows the company to seek new alternatives in problem solving of work operational processes and procedures.

Teknologi Informasi

Information Technology

KINERJA TI TAHUN 2020

Kinerja TI PTK dapat dilihat melalui berbagai pencapaian program strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, kinerja pengembangan TI PTK tahun 2020 sesuai dengan program strategis Perusahaan. Berikut ini adalah daftar aplikasi yang dikembangkan di tahun 2020:

IT PERFORMANCE IN 2020

IT performance of PTK can be seen through various strategic program achievements that have been set. In general, the PTK IT development performance in 2020 is in accordance with the Company's strategic program. The list of applications developed in 2020 is as follows:

Daftar Aplikasi yang Dikembangkan di Tahun 2020

List of Applications Developed in 2020

NAMA APLIKASI Application Name	FUNGSI Function	DESKRIPSI Description	STATUS Function	DASAR PEMBUATAN APLIKASI Basic Application Development
Obit Online	SMR (HSSE)	Aplikasi Observasi dan Intervensi untuk melaporkan terkait perilaku selamat, kesalahan manusia, kondisi yang selamat, perilaku yang berisiko, perilaku liar dan kondisi yang tidak selamat. Observation and Intervention Application to report on safe behavior, human error, survivor conditions, risk behavior, wild behavior and unsafe conditions.	Running	Surat permohonan aplikasi fungsi terkait. / Request letter for application of the related function.
New Website	PR & Admin	Re-Design Website PT PTK	Running	Surat permohonan aplikasi fungsi terkait. / Request letter for application of the related function.
PTK Flash News	PR & Admin	Aplikasi berita Online eksternal PTK PTK external online news application	Running	Surat permohonan aplikasi fungsi terkait. / Request letter for application of the related function.
PORT (Pelaporan Terintegrasi)	New Building Project	Aplikasi untuk monitoring pembangunan progress fisik pembangunan kapal. Application for monitoring the physical progress of ship building.	Running	Surat permohonan aplikasi fungsi terkait. / Request letter for application of the related function
Vendor Management dan Prakualifikasi CSMS (Extra)	Procurement	Aplikasi pendaftaran vendor dan proses Contractor Safety Management System (CSMS) . Vendor registration application and Contractor Safety Management System (CSMS) process.	Running	Surat permohonan aplikasi fungsi terkait. / Request letter for application of the related function.
Crew Management System V2.0	Manning	Aplikasi untuk monitoring crew kapal (Crew Change) dan Penilaian Online terhadap Crew dan Kapten. Application for ship crew monitoring (Crew Change) and Online Assessment of Crew and Captain.	Running	Surat permohonan aplikasi fungsi terkait. / Request letter for application of the related function.
BOS (Bunker Operation System) Kapal Milik PTK	Vessel Operation	Aplikasi untuk monitoring bunker kapal milik PTK. Application for monitoring of ship bunkers belonging to PTK.	Running	Surat permohonan aplikasi fungsi terkait. / Request letter for application of the related function.
Wecare (Aplikasi Keluhan Pelanggan)	Marketing Support	Aplikasi monitoring keluhan pelanggan/ Customer complaint monitoring application / customer.	Running	Surat permohonan aplikasi fungsi terkait. / Request letter for application of the related function.

Daftar Aplikasi yang Dikembangkan di Tahun 2020

List of Applications Developed in 2020

NAMA APLIKASI Application Name	FUNGSI Function	DESKRIPSI Description	STATUS Function	DASAR PEMBUATAN APLIKASI Basic Application Development
Dashboard Datalenta	HR Strategic	Aplikasi <i>dashboard</i> demografi pekerja PTK <i>PTK employee demographic dashboard application.</i>	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. / <i>Request letter for application of the related function.</i>
HR Management System V2.0	HR Operation & GA	Aplikasi untuk monitoring absensi online, cuti, ijin, <i>payslip</i> , sewa mobil, <i>upload SPPD</i> secara online. <i>Application for monitoring online attendance, leave, permits, payslip, car rental, uploading SPPD online.</i>	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. / <i>Request letter for application of the related function.</i>
Aplikasi Meeting Online	HR Operation & GA	Aplikasi daftar hadir rapat secara online. <i>Online meeting attendance application.</i>	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. / <i>Request letter for application of the related function.</i>
Aplikasi Absensi Online	HR Operation & GA	Aplikasi absensi online harian selama pandemi. <i>Daily online attendance application during the pandemic.</i>	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. / <i>Request letter for application of the related function.</i>
Aplikasi SMS Broadcast PTK	IT	Aplikasi <i>Broadcast SMS</i> terkait berita, pengumuman perusahaan, dll. <i>Broadcast SMS application regarding news, company announcements, etc.</i>	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. / <i>Request letter for application of the related function.</i>
Aplikasi Survey Online	IT	Aplikasi survey online untuk pengisian GCG, CSI, dll <i>Online survey application for filling in GCG, CSI, etc</i>	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. / <i>Request letter for application of the related function.</i>

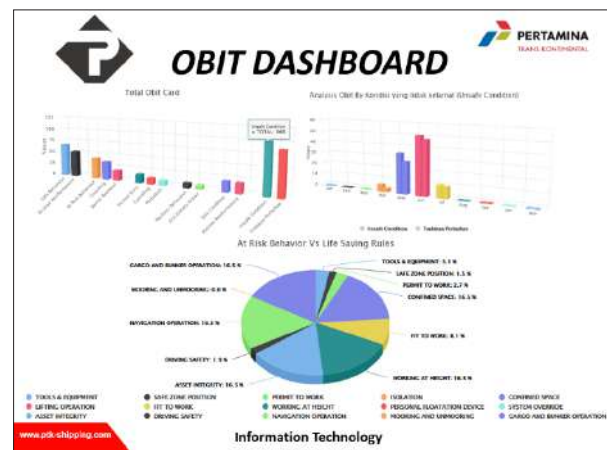
Pada tahun 2020, fokus di bidang TI PTK adalah pada proses digitalisasi secara menyeluruh di hampir semua fungsi atau unit bisnis khususnya adalah pada fungsi HSSE atau SMR. Berikut ini adalah beberapa kegiatan dan pencapaian fungsi IT pada fungsi HSSE/ SMR PT PTK tahun 2020

In 2020, the focus in PTK IT field will be on the overall digitalization process in almost all functions or business units, especially in the HSSE or SMR function. The following are some of the activities and achievements of the IT function in the PT PTK HSSE/ SMR function in 2020



Penyelesaian Pembuatan
Crisis Room di PT PTK.
Completion of the Crisis
Room at PT PTK.

Go Live Aplikasi Obit Card Online



TATA KELOLA TI

Kami memiliki tata kelola IT pada 5 (lima) bidang terkait, yaitu *IT Policy*, *IT Architecture*, *IT Infrastructure*, *IT Business Application Needs* dan *IT Investment & Prioritisasi*. Adapun kelima bidang tersebut dikelola oleh pihak-pihak yang melakukan perancangan, pengesahan, pengembangan, *monitoring*, *enforcement*.

Pada tahun 2020, prioritas *Agile Business Process* merupakan tugas Fungsi IT, setelah pada tahun sebelumnya menitikberatkan pada prioritas *Data Classification Preparation*. Target Akhir dari tag line *Agile Business Process* adalah "Accelerating the Complete Visibility and Insight of Business Process for Transforming Rapid Organization".

IT GOVERNANCE

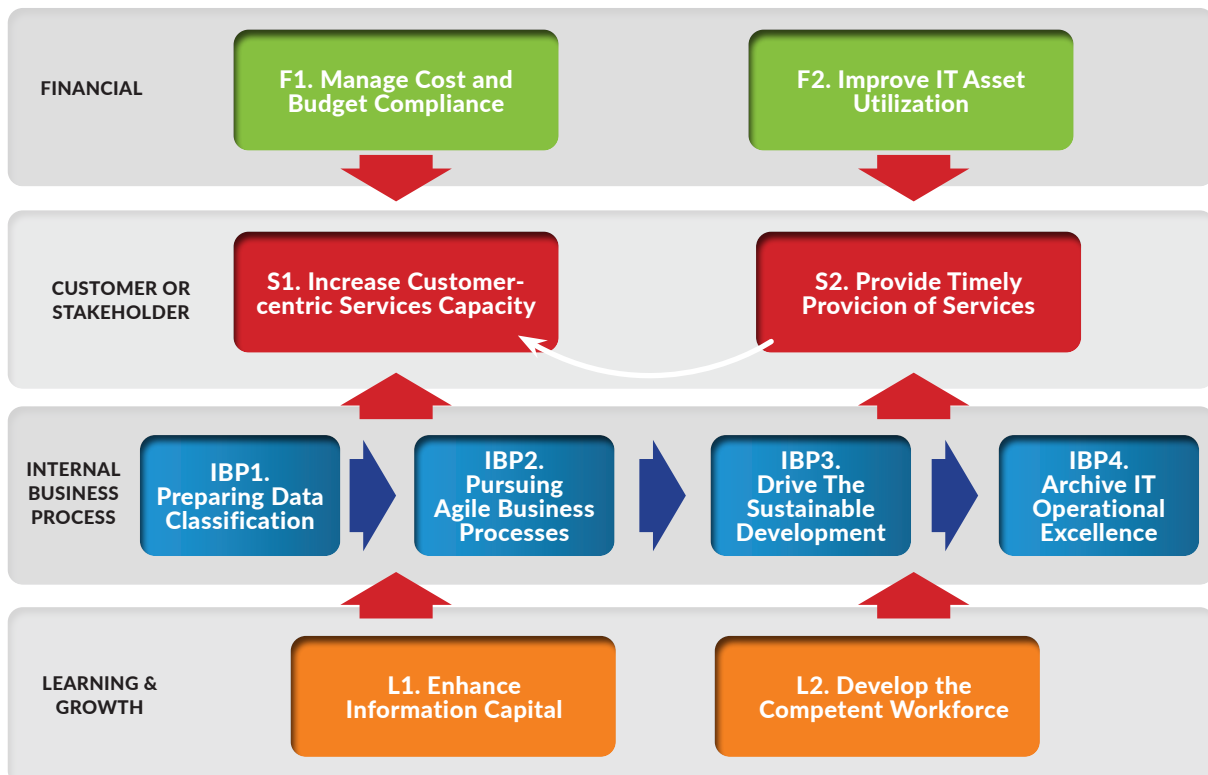
We have designed IT governance in 5 (five) related fields, such as the *IT Policy*, *IT Architecture*, *IT Infrastructure*, *IT Business Application Needs* and *IT Investment & Priority*. These five fields are managed by parties who carry out the design, endorsement, development, monitoring and enforcement.

In 2020, priority of *Agile Business Process* is under responsibility of the IT function, after prioritizing *Data Classification Preparation* in the previous year. The final target of the *Agile Business Process* tag line is "Accelerating the Complete Visibility and Insight of Business Process for Transforming Rapid Organizations".

Gambaran IT Strategy Maps 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

An overview of the 2020 IT Strategy Maps can be seen in the following image:

IT STRATEGY MAP PTK 2020



Pada gambar tersebut, untuk perspektif *Financial*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu :

- F.1. *Manage Cost and Budget Compliance*
- F.2. *Improve IT Asset Utilization*

Pada perspektif *Customer or Stakeholders*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu:

- S.1. *Increase Customer-Centric Services Capacity*
- S.2. *Provide Timely Provision of Services*

Pada perspektif *Internal Business Process*, terdapat 4 (empat) *Strategic Objectives*, diantaranya adalah:

- IBP.1. *Resource Consolidation*
- IBP.2. *Sustainable Development*
- IBP.3. *IT Data Classification Preparation*
- IBP.4. *Archive IT Operational Excellence*

In this figure, based on *Financial* perspective, there are 2 (two) *Strategic Objectives*, as follows:

- F.1. *Manage Cost and Budget Compliance*
- F.2. *Improve IT Asset Utilization*

From *Customer or Stakeholders* perspective, there are 2 (two) *Strategic Objectives*, as follows:

- S.1. *Increase Customer-Centric Services Capacity*
- S.2. *Provide Timely Provision of Services*

From *Internal Business Process* perspective, there are 4 (four) *Strategic Objectives*, as follows:

- IBP.1. *Resource Consolidation*
- IBP.2. *Sustainable Development*
- IBP. 3. *IT Data Classification Preparation*
- IBP. 4. *Archive IT Operational Excellence*

Pada perspektif *Learning and Growth*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, diantaranya adalah:

- L.1. *Enhance Informational Capital*
- L.2. *Develop the Competence Workforce*

Keempat perspektif organisasi tersebut untuk selanjutnya dapat didefinisikan dalam rangka membentuk suatu *linkage* antara *Strategic Objectives* pada IT Strategy Maps PTK 2020.

Sebagai contoh, kondisi pada tahun sebelumnya memberikan porsi kepada Fungsi IT sebagai *knowledge workforce unit* untuk mendukung kegiatan bisnis PTK, sehingga *Financial Perspective* diletakkan pada posisi teratas dari susunan 4 *Organizational Perspectives*. Beberapa faktor *Financial* seperti *Cost*, *Budget* and *Assets* merupakan obyek yang perlu dikelola dengan baik demi keberlangsungan layanan IT bagi organisasi atau perusahaan.

Pengelolaan faktor-faktor financial yang baik, memberikan jaminan bagi fungsi IT untuk memberikan layanan terbaiknya bagi *Customer or Stakeholders*. Fungsi IT berupaya untuk memberikan layanan kepada para pengguna jasanya, yaitu pekerja pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Anak Perusahaan, dengan sebaik-baiknya. Fungsi IT memiliki pandangan untuk dapat memberikan kapasitas layanan yang terukur, terkontrol dan terencana dengan orientasi kepada *Customer or Stakeholders*.

Dalam rangka memberikan layanan kepada *Customer or Stakeholders*, Fungsi IT melaksanakan proses bisnis internal (*Internal Business Process*), yang tertuang dalam 5 (lima) area kerja Fungsi IT, yaitu Infrastruktur TI, Manajemen Proses Bisnis, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Aplikasi dan Layanan TI. Untuk memastikan proses bisnis internal dapat berjalan dengan baik, maka Fungsi IT memerlukan kemampuan literasi untuk adaptif terhadap perkembangan zaman dan perubahan bisnis terkait bidang usaha PTK. Fungsi IT memerlukan sumber daya manusia yang kompeten pada bidang

From Learning and Growth perspective, there are 2 (two) *Strategic Objectives*, as follows:

- L.1. *Enhance Informational Capital*
- L.2. *Develop the Competence Workforce*

The four organizational perspectives can then be defined in order to form a linkage between *Strategic Objectives* in the PTK 2020 IT Strategy Maps.

For example, the condition in the previous year provided a portion to the IT function as a *knowledge workforce unit* to support PTK business activities, so that the *Financial Perspective* was placed at the top of the 4 *Organizational Perspectives* list. Several financial factors such as *Cost*, *Budget* and *Assets* are objects that need to be managed properly for the sustainability of IT services for an organization or company.

Good management of financial factors provides assurance for the IT function to provide the best service for customers or stakeholders. The IT function strives to provide services to its service users, namely employees at the Head Office, Branch Offices and Subsidiaries, as best as possible. The IT function has the view to be able to provide measurable, controlled and planned service capacity with an orientation to the *Customer or Stakeholders*.

In order to provide services to Customers or Stakeholders, the IT function carries out an internal business process (*Internal Business Process*), which is contained in 5 (five) work areas of the IT Function, namely IT Infrastructure, Business Process Management, Knowledge Management, Application Management and IT Services. To ensure that internal business processes can run well, the IT function requires literacy skills to be adaptive to current developments and business changes related to the PTK business field. The IT function requires human resources who are competent in their fields

kerjanya dan mampu melakukan eksploitasi informasi yang dimiliki sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi atau perusahaan serta dalam rangka mencapai pertumbuhan (*Growth*) dan pembelajaran (*Learning*) yang positif.

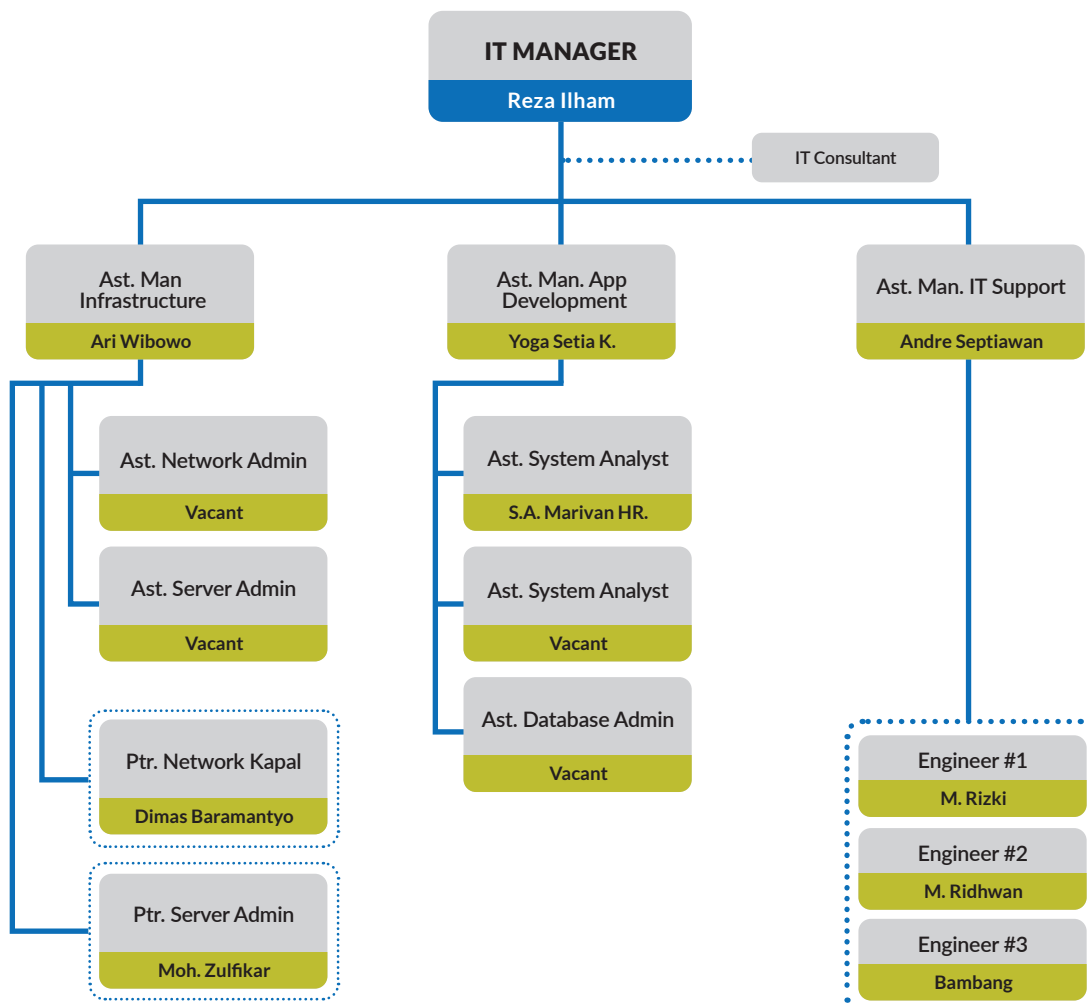
of work and are able to exploit information as much as possible for the benefit of the organization or company and in order to achieve positive growth and learning.

STRUKTUR ORGANISASI TI

Struktur Organisasi TI di PTK terbagi menjadi tiga lapisan: *Operational Level*, *Knowledge Level* dan *Strategic Level*. Tingkatan dalam tiga lapisan tersebut menunjukkan peran dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi guna mendukung proses bisnis sebagaimana dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

IT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The IT organization structure in PTK is divided into three layers: *Operational Level*, *Knowledge Level* and *Strategic Level*. The levels in the three layers indicate the roles and responsibilities of each function to support business processes as can be seen in the chart below:



TUGAS POKOK TI

1. Mengelola perencanaan, pemilihan teknologi, pengembangan infrastruktur jaringan sesuai dengan strategi Perusahaan.
2. Mengelola perencanaan, pemilihan teknologi, pengembangan infrastruktur sarana pendukung operasi Perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan standar industri;
3. Menetapkan kebijakan pengelolaan sekaligus melaksanakan operasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan serta sarana pendukungnya;
4. Menetapkan kebijakan peningkatan kinerja, kapasitas maupun kapabilitas infrastruktur jaringan dan sarana pendukungnya untuk mendukung kelangsungan produk layanan dan untuk kesiapan meraih potensi pasar;
5. Mengelola penyediaan layanan produk jaringan telekomunikasi baru sesuai komitmen kepada pelanggan, baik kualitas maupun waktu pemenuhan;
6. Memastikan koordinasi kerja antara bidang di bawah Unit Bisnis maupun lintas bidang berjalan secara efektif sesuai proses bisnis Perusahaan serta sistem dan prosedur (Sisdur) yang ditetapkan;
7. Mengkoordinasikan hasil kerja setiap bidang organisasi di lingkungan bidang infrastruktur dan data center serta menetapkan tindak lanjut pembinaan yang diperlukan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi unit organisasi terakit;

MAIN IT DUTIES

1. Manage planning, technology selection, network infrastructure development in accordance with the Company's strategy.
2. Manage the planning, technology selection, infrastructure development for supporting the Company's operations as a whole in accordance with industry standards;
3. To establish management policies as well as to carry out operation and maintenance of network infrastructure and supporting facilities;
4. Establish policies to improve the performance, capacity and capability of network infrastructure and supporting facilities to support the continuity of service products and readiness to reach market potential;
5. Manage the provision of new telecommunication network product services according to commitments to customers, both quality and fulfillment time;
6. Ensure that work coordination between the fields under the Business Unit and across fields runs effectively in accordance with the Company's business processes and established systems and procedures (Sisdur);
7. Coordinating the work results of each field of the organization in the infrastructure and data center fields and determining the follow-up guidance needed to help solve problems faced by the related organizational unit;

BELANJA TI TAHUN 2020

Manajemen menetapkan kebijakan belanja TI tahun 2020 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan strategis dari rencana kerja perusahaan jangka pendek. Untuk itu sasaran kebutuhan belanja TI dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

IT EXPENDITURES FOR 2020

The Management has stipulated IT Expenditure policy in 2020 that is adjusted based on needs and strategic planning of the company's short-term work plan. Therefore, the IT spending targets are divided into three parts, namely as follows:

a. IT Support

Pembelanaan dibidang operasional bisnis TI meliputi CAPEX dan OPEX yaitu sewa peralatan TI melalui *seat management*, pengadaan perangkat pendukung TI, perbaikan perangkat TI dan lisensi *enterprise agreement* dengan total nilai sebesar 7,5 miliar rupiah.

b. IT Development

Pembelanaan bidang IT *application development* meliputi pengadaan layanan SMS gateway, lisensi developer, UID SAP, template aplikasi, *tools development*, dsb. dengan total nilai sebesar 1,9 miliar rupiah.

c. IT Infrastructure

Pembelanaan bidang IT *infrastructure* meliputi CAPEX dan OPEX yaitu pengadaan *cloud storage*, UPS *Managable*, *Cyber Security network*, *Managed service network* dan SAP dengan total nilai sebesar 5,9 miliar rupiah.

a. IT Support

Expenditures in IT business operations include CAPEX and OPEX, including leasing IT equipment through *seat management*, procuring IT support devices, repairing IT equipment and licensing enterprise agreements with a total value of Rp7.5 billion.

b. IT Development

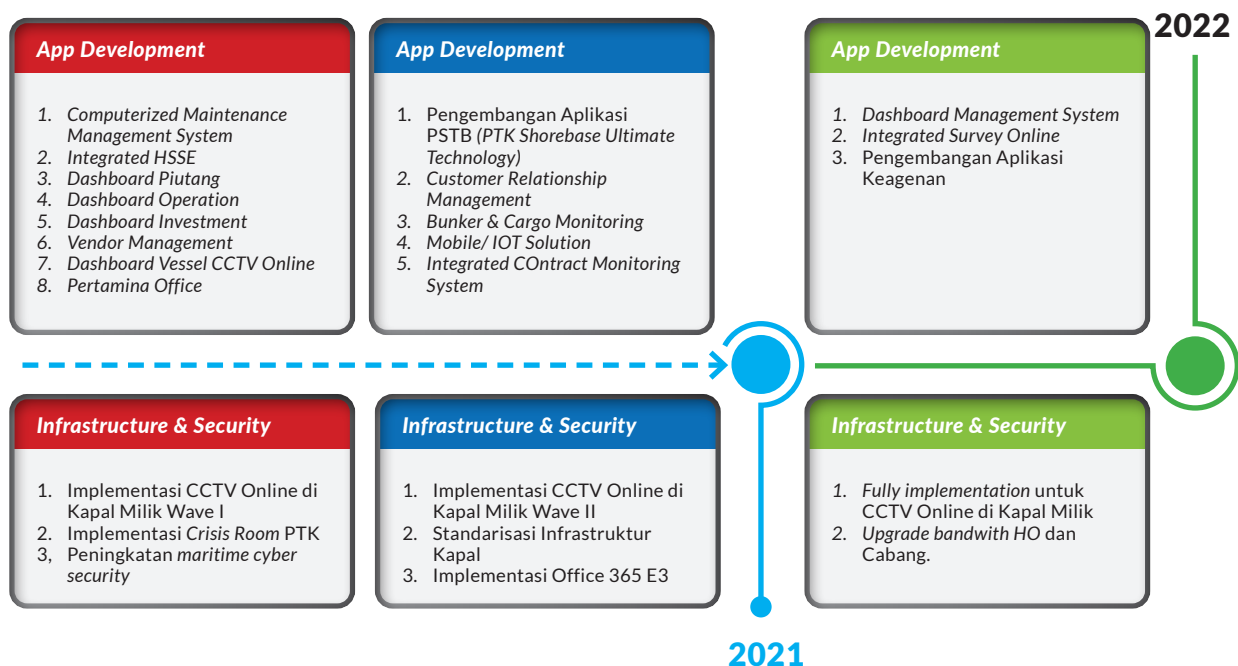
IT application development expenditures include the provision of SMS gateway services, developer licenses, SAP UIDs, application templates, development tools, etc. with a total value of 1.9 billion rupiah.

c. IT Infrastructure

IT infrastructure spending includes CAPEX and OPEX, namely the provision of cloud storage, UPS *Manageable*, *Cyber Security networks*, *Managed service networks* and SAP with a total value of 5.9 billion rupiah.

ROAD MAP DIGITALISASI TI

IT DIGITALIZATION ROAD MAP

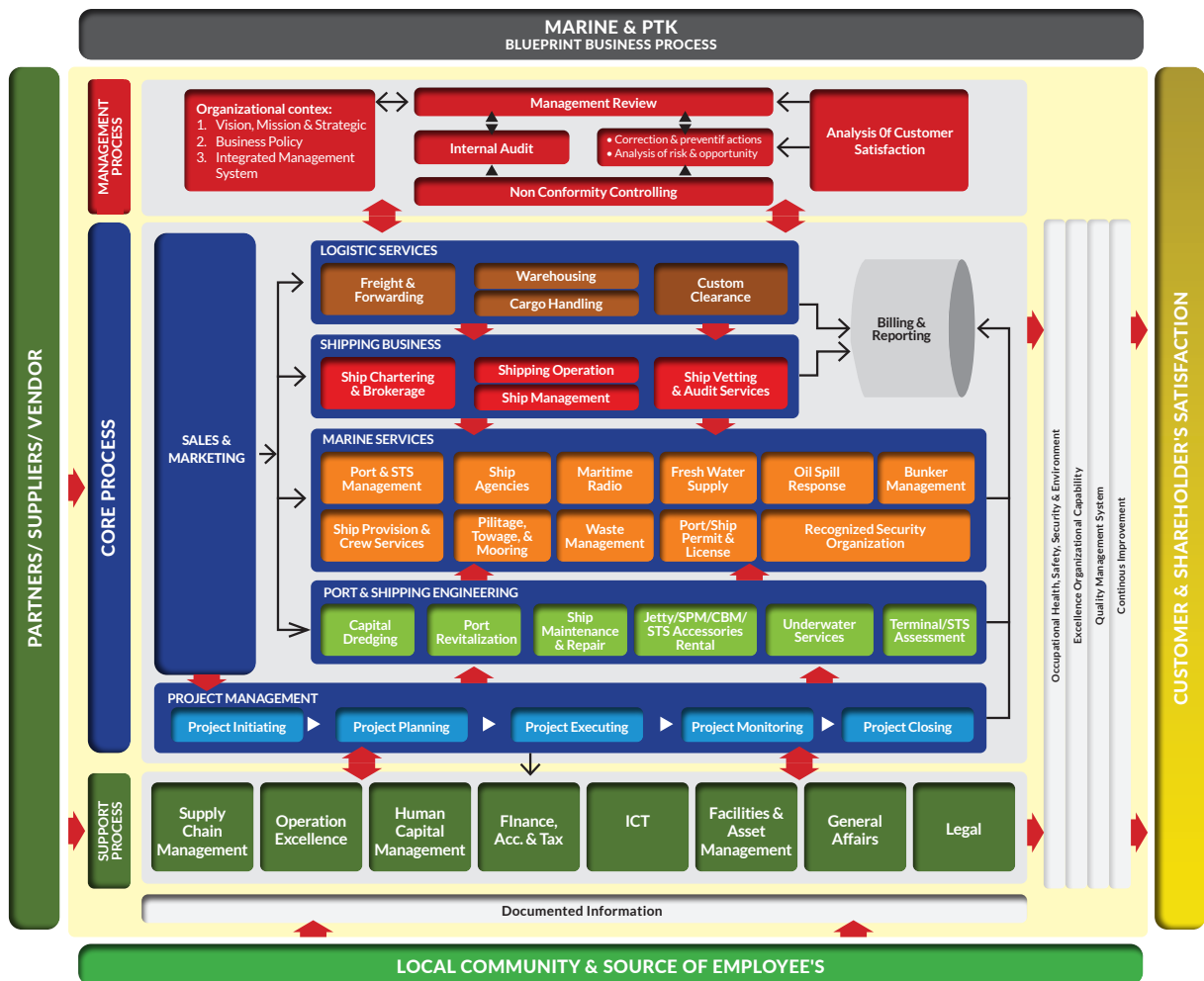


STRATEGI TI KE DEPAN

Berdasarkan *blueprint* proses bisnis Perusahaan dan *Road Map* Digitalisasi Teknologi Informasi *multi years* bahwa untuk tahun 2021 program pengembangan TI akan berfokus kepada:

IT STRATEGY OUTLOOK

Based on the company's business process Blueprint and the Multi-year Information Technology Digitalization Road Map, for 2021 the IT development program will focus on:



PROGRAM PENGEMBANGAN TI TAHUN 2021

IT DEVELOPMENT PROGRAM IN 2021

Program Pengembangan TI Tahun 2021

IT Development Program in 2021

PROGRAM Program	KETERANGAN Description		TARGET PELAKSANAAN Implementation Target
Dashboard Operation	Monitoring Commission day dan Operation Day	Monitoring Commission day dan Operation Day	TW 1
Dashboard CCTV Online	Monitoring CCTV di kapal milik	CCTV monitoring on owned vessels	TW 1
Implementasi Crisis Room	Penggunaan Crisis Room yang sudah selesai sebagai sarana untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan	The use of the finished Crisis Room as a means to facilitate decision making	TW 1
Dashboard Piutang	Monitoring status piutang	Accounts receivable status monitoring	TW 2
Dashboard Investasi	Monitoring seluruh kegiatan Investasi	Monitoring all investment activities	TW 2
Integrated Contract Monitoring	Monitoring kegiatan Request, Pembuatan dan Persetujuan Contract	Monitoring activity requests, making and contract approval	TW 2
Marine Service Application	Monitoring seluruh kegiatan keagenan di semua cabang	Monitoring all agency activities in all branches	TW 3
Dashboard Management	Monitoring seluruh laporan kinerja perusahaan yang dapat dikonsumsi kapan pun dan dimanapun secara <i>real time</i> oleh Tim Management dan Direksi	Monitoring all company performance reports that can be consumed anytime and anywhere in real time by the Management Team and Board of Directors	TW 3
Research for New Technology	Kegiatan pelatihan, tutorial dan pendidikan untuk teknologi terbaru yang sedang berkembang kepada seluruh anggota tim	Training activities, tutorials and education for the latest technology that is developing for all team members	TW 4



5

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management
Discussion & Analysis

Tinjauan Ekonomi Global

Global Economic Overview



Perekonomian global sepanjang tahun 2020 tertekan setelah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merebak dan WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Optimisme berubah di seluruh perekonomian negara di dunia tanpa terkecuali. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 akan mengalami kontraksi dan mencapai nilai negatif. Situasi ini dinilai berpotensi lebih buruk dari tahun 2008.

Dampak dari resesi global, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dan terancam kehilangan sumber pendapatannya. Pada kuartal I 2020, berbagai negara telah mengalami pertumbuhan *negative*, China -6,8%, Perancis -5,4%, dan Singapura -2,2%. Indonesia masih tumbuh positif 2,97%, meski ini juga merupakan koreksi yang cukup tajam. Seluruh dunia mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan manusia dan perekonomian. Stimulus fiskal dalam jumlah yang sangat besar disiapkan.

Amerika Serikat menyusun rencana stimulus senilai 1 triliun USD untuk membantu ekonomi dan sektor keuangan. Sementara itu, Uni Eropa menggelontorkan

In 2020, the global economy was contracted following the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) broke out and WHO declared COVID-19 a pandemic on March 9, 2020. The optimism was changing in all state economies worldwide without exception. *International Monetary Fund* (IMF) estimated that global economic growth in 2020 would be contracted and reached a negative value. This situation was considered to be potentially worse than in 2008.

As a result of the global recession, many people went unemployed and threatened to lose their sources of income. In the first quarter of 2020, various countries experienced negative growth, such as China -6.8%, France -5.4%, and Singapore -2.2%. Indonesia was still growing positively by 2.97%, despite was fairly sharp correction. The whole world was taking extraordinary initiatives to save the people and the economy. A huge amount of fiscal stimulus was prepared.

The United States is drawing up a USD 1 trillion stimulus plan to help both the economy and the financial sector. Meanwhile, the European Union provided a stimulus



stimulus senilai 1,5% dari PDB dan 10% dari PDB untuk membantu likuiditas. Hal ini untuk mengantisipasi resesi akibat *lockdown* yang terjadi di sejumlah negara.

Berbagai indikator pada triwulan IV-2019 dan Januari 2020 mengindikasikan optimisme pelaku ekonomi dunia terhadap perbaikan ekonomi global. Indikator di pasar barang menunjukkan kegiatan ekonomi domestik di berbagai negara meningkat. Keyakinan pelaku ekonomi dalam tren meningkat dan diikuti kenaikan *Purchasing Manager Index* (PMI) di banyak negara. Perkembangan ini juga diikuti peningkatan pesanan ekspor serta kegiatan ekspor dan impor yang membaik pada Desember 2019-Januari 2020. Kondisi ini diperkuat dengan gambaran rilis data sementara CPB yang mengonfirmasi perbaikan volume perdagangan dunia pada triwulan IV 2019, yang didukung oleh perbaikan ekspor, terutama di Kawasan Eropa. Perkembangan ini kemudian mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas dunia, yang juga sempat meningkat akibat kenaikan permintaan dan eskalasi risiko geopolitik. Harga minyak dan komoditas dunia meningkat di awal tahun 2020 seiring dengan optimisme pemulihan perekonomian global.

of 1.5 percent of GDP and 10 percent of GDP to assist liquidity. This is to anticipate a recession due to lockdowns applied in several countries.

By the fourth quarter of 2019 and January 2020 couple of indicators indicated optimism of the global economic players towards the global economics recovery. Indicators in the commodity market showed that domestic economic activity in various countries has increased. Economic assurance in the trend was increasing and followed by the increasing *Purchasing Manager Index* (PMI) in many countries. This development was also followed by an increase in export orders as well as improved export and import activities in December 2019-January 2020. This condition was reinforced by an illustration of temporary CPB release data that confirmed the global trading volume recovery by the fourth quarter of 2019, which was supported by stronger exports, especially in the European region, this condition further encouraged the rising global oil and commodity price, which also had increased due to higher demand and geopolitical risk escalation. The increasing global oil and commodity prices in early 2020 was in line with optimism towards the global economic recovery.

Pertumbuhan Ekonomi Global

Global Economics Growth

PDB	2018	WEO (IMF)						CONSENSUS FORECAST (CF)						BANK INDONESIA					
		OCT			JAN			DEC			JAN			NOV		FEB			
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2019	2020	2021	
Dunia/ World	3,6	3	3,4	3,6	2,9	3,3	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3,2	2,9	3	3,4	
Negara Maju Developed Country	2,3	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	1,4	1,6	1,5	1,5	1,7	1,5	1,7	
Amerika Serikat/ USA	2,9	2,4	2,1	1,7	2,3	2	1,7	2,3	1,8	1,8	2,3	1,9	1,9	2	2	2,3	2,1	2	
Kawasan Euro/ EURO Area	1,8	1,2	1,4	1,4	1,2	1,3	1,4	1,1	1	1,3	1,1	1	1,2	1	1,1	1,2	1,1	1,3	
Jepang/ Japan	0,8	0,9	0,5	0,5	1	0,7	0,5	1	0,2	0,8	1	0,4	0,8	0,5	0,6	0,8	0,4	0,7	
Negara Berkembang/ Developing Country	4,5	3,9	4,6	4,6	3,7	4,4	4,6	4,3	4,6	4,9	4,3	4,6	4,7	4,1	4,3	3,7	3,9	4,4	
Tiongkok	6,6	6,1	5,8	5,9	6,1	6	5,8	6,1	5,8	5,8	6,1	5,9	5,7	6	6	6,1	5,6	6,2	
India	7,1	6,1	7	7	4,8	5,8	6,5	5,8	6,7	7	5,2	5,8	6,7	6,6	6,8	5,1	5,5	6,2	
ASEAN-5	5,2	4,8	4,9	4,9	4,7	4,8	5,1	4,3	4,4	4,7	4,3	4,4	4,7	4,9	5	4,7	4,8	5,2	
Amerika Latin	1	0,2	1,8	1,8	0,1	1,6	2,3	1	1,6	2,4	0,7	1,6	2,4	1,8	2	0,1	1,8	2	
Emerging Europe	3,6	1,8	2,5	2,5	1,8	2,6	2,5	1,3	2,2	2,5	1,3	2,2	2,5	2,1	2,2	1,8	2,2	2,3	
MENA, Afghanistan & Pakistan	1,8	0,1	2,7	2,7										2	2,1	0,1	2	2,1	

Sumber: IMF, Consensus Forecast, Bank Indonesia

* Perhitungan Volume Perdagangan Dunia WEO (IMF) memperhitungkan goods & Services, Perhitungan Perdagangan Dunia Bank Indonesia hanya memperhitungkan goods.

Source: IMF, Consensus Forecast, Bank Indonesia

* WEO (IMF) World Trade Volume calculation considers goods & services, the Bank Indonesia World Trade Calculation only calculating goods

Optimisme pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi global berdampak positif pada menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kesepakatan dagang tahap I AS-Tiongkok juga memberikan sentimen positif terhadap pasar keuangan global. Berbagai indikator risiko seperti *Economic Policy Uncertainty* (EPU) menurun sejak Oktober 2019. Sejalan dengan itu, risiko pasar keuangan negara berkembang pada awal Januari 2020 juga menurun ke level terendah sepanjang 5 tahun terakhir. Berbagai perkembangan positif ini kemudian mendorong peningkatan aliran modal ke negara berkembang dan memicu apresiasi mata uang negara berkembang.

Optimism of economic players towards the global economic recovery prospect has a positive impact to reduce uncertainty in global financial markets. The US-China 1st phase trade agreement also gave positive sentiment to the global financial markets. Various risk indicators such as the *Economic Policy Uncertainty* (EPU) have declined since October 2019. Consequently, the financial market risk in developing countries also declined in early January 2020 to the lowest level in the past 5 years. These positive developments have further led to increase capital flows to developing countries and triggered appreciation of the developing country currencies.

Beberapa faktor mempengaruhi optimisme pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi global. Faktor pertama terkait dengan dampak positif respon kebijakan yang ditempuh banyak negara dalam memitigasi risiko perlambatan ekonomi, termasuk melalui pelonggaran kebijakan moneter. Dalam kaitan ini, berbagai bank sentral tetap menempuh kebijakan

Several factors that affected optimism of the economic actors towards the global economic recovery prospect. The first factor related to positive impact of the policy response adopted by many countries in mitigating the economic slowdown risk, including through easing monetary policy. In this regard, various central banks continue to take accommodative policies to

akomodatif guna mendukung upaya pemulihan ekonomi di negara masing-masing.

Namun demikian, Optimisme terhadap perekonomian berubah saat COVID-19 mulai merebak di Tiongkok. COVID-19 berawal dari daerah Wuhan yang terjadi pada akhir Desember 2019. COVID-19 memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan dengan wabah SARS. Tingkat penyebarannya lebih cepat karena terjadi menjelang Tahun Baru Lunar ketika lalu lintas penduduk yang tinggi ke berbagai wilayah di Tiongkok. Selain itu, masa inkubasi COVID-19 yang lebih panjang menyebabkan penanganan penyakit secara dini menjadi terhambat.

Penurunan ekonomi Tiongkok tersebut menahan pemulihan ekonomi dunia, baik melalui dampak langsung penurunan Tiongkok maupun dampak rambatan (*spillover effect*) ke negara lain. Kondisi ini disebabkan peran Tiongkok yang cukup besar dalam perdagangan dan konsumsi komoditas dunia. Penurunan permintaan Tiongkok memberikan dampak rambatan ke negara lain melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi. Pariwisata diperkirakan akan menurun sejalan dengan berbagai pembatalan kunjungan turis ke berbagai negara, dan kemudian diikuti penurunan perdagangan dan investasi sejalan penurunan permintaan dunia.

COVID-19 juga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini memicu berkurangnya penempatan aliran dana global ke negara berkembang dan mendorong kenaikan penempatan kepada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman. Dalam beberapa hari pada awal Februari 2020, imbal hasil T-Bond US menurun sejalan dengan peningkatan permintaan. Saat bersamaan, harga emas juga meningkat sering dengan penyesuaian portofolio penempatan dana di tengah kenaikan ketidakpastian di pasar keuangan global. Dalam perkembangannya pada minggu selanjutnya, sentimen di pasar keuangan global mulai membaik seiring dengan respon penanganan yang cepat di berbagai negara termasuk pemerintah Tiongkok untuk menahan penyebaran COVID-19 lebih luas.

support economic recovery efforts in their respective countries.

However, optimism towards the economy was changed during the outbreak COVID-19 in China. The COVID-19 was originated in Wuhan area, which occurred by end of December 2019. The COVID-19 has slightly different characteristics compared to the SARS outbreak. The transmission was faster approaching the Lunar New Year when the population traffic high to various regions in China was high. In addition, a longer incubation period of the COVID-19 resulted several constraints to perform early disease management.

The decline in the Chinese economy had constrained the global economic recovery, both through the direct impact of China's was weakening as well as the impact of the propagation (*spillover effect*) to other countries. This condition was due to fairly significant role of China in global commodity trade and consumption. The weakening in Chinese demand has had a propagating effect on other countries through tourism, trade and investment. Tourism was predicted to decline in line with various cancellations of tourist visits to various countries and followed by a decline in trade and investment in line with the global demand slow down.

COVID-19 also resulted to uncertainty in the global financial markets. This condition triggered a reduction in the global funds investment flow to developing countries and encouraged an increase in investment in financial assets and commodities, which were considered safe. Within a few days in early February 2020, US T-Bond yields declined in line with increased demand. At the same time, gold prices have also risen frequently with adjustments to portfolio placement of funds in the middle of rising uncertainty in the global financial market. In its development the following week, the sentiment in the global financial markets started to improve in line with the rapid response in various countries including the Chinese government to restrain the broader COVID-19 transmission.

Tinjauan Perekonomian Nasional dan Industri

Overview of the National Economy and Industry

Perekonomian Indonesia pun tidak luput dari tekanan yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Kegiatan ekspor dan impor terhambat akibat kebijakan *lockdown* sejumlah negara yang berimbas pada neraca perdagangan. Pelemahan tersebut kemudian juga diikuti oleh berkurangnya aliran masuk modal asing dari pasar keuangan domestik selama kuartal I dan II 2020 sejalan dengan penyesuaian penempatan dana asing ke negara berkembang dan sempat memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Pada kuartal I 2020, Indonesia masih tumbuh positif 2,97%, meski ini juga merupakan koreksi yang cukup tajam. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 menurun. Pada akhir tahun 2020 perekonomian nasional berada pada kisaran 0,9 persen sampai 1,9 persen pada 2020. Kondisi ekspor menurun sejalan dengan kontraksi perekonomian global. Selain itu, konsumsi rumah tangga dan investasi juga menurun akibat pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi aktivitas ekonomi.

Kementerian Keuangan menyatakan ada tiga langkah yang bisa dijalankan Pemerintah dan otoritas terkait dalam mendorong pemulihan ekonomi selama dan pasca COVID-19. Pertama, bantuan sosial perlu ditingkatkan penyalurannya untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga. Kedua, investasi harus didorong melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) guna mempercepat pemulihan di sisi dunia usaha. Terakhir, dukungan kebijakan bagi eksportir untuk bertahan dan pulih dari kondisi krisis. Seperti diketahui, ekspor menghadapi tekanan dari sisi permintaan global.

The Indonesian economy has not been spared from the pressures caused by the COVID-19 pandemic. Export and import activities were hampered by lockdown policies in a number of countries which had an impact on the trade balance. This weakening was also followed by reduced foreign capital inflows from the domestic financial market during the first and second quarters of 2020 in line with adjustments to foreign fund placements in developing countries which put pressure on the Rupiah exchange rate.

In the first quarter of 2020, Indonesia still grew positively 2.97%, despite this was also a fairly sharp correction. Bank Indonesia projected that the Indonesia's economic growth in 2020 will decline. As end of 2020, the national economy was in around 0.9 percent to 1.9 percent in 2020. Export conditions declined in line with the global economic contraction. In addition, household consumption and investment also decreased as a result of implementation of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy which slowed-down the economic activity.

The Ministry of Finance explained that there were three initiatives that the Government and related authorities possible to implement in promoting economic recovery during and post COVID-19. First, distribution of social assistance needs to be increased to boost household consumption. Second, the investment shall be encouraged through the national economic recovery program (PEN) in order to accelerate recovery on the business side. Finally, policy support for exporters to survive and recover from crisis conditions. As acknowledged, exports were contracted from the global demand side.

Sinergi Bisnis Perusahaan - Group Pertamina

Company Business Synergy – Pertamina Group

Salah satu langkah strategis yang dilakukan PTK adalah membangun sinergi dengan anak Perusahaan PT Pertamina (Persero). Sinergi dimaksudkan untuk memberikan peluang bekerja sama sehingga dapat meningkatkan kinerja masing-masing Anak Perusahaan dan memperkuat bisnis Pertamina Group.

Sinergi yang terbangun akan mendorong PTK dan seluruh AP Pertamina dapat memanfaatkan fasilitas yang sama sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Efisiensi mendorong kinerja PTK dan AP Pertamina lain menjadi lebih baik, sehingga akan mengoptimalkan pencapaian Pendapatan maupun Laba Usaha, serta mendukung pengembangan usaha. Selama tahun 2020 PTK telah membangun sinergi dengan sejumlah AP Pertamina.

One of the strategic steps taken by PTK is to build synergies with subsidiary PT Pertamina (Persero). The synergy is intended to provide an opportunity to cooperate and improve performance of each Subsidiary as well as strengthen the Pertamina Group business.

The developed synergy will encourage PTK and all subsidiaries of Pertamina in using the same facilities to improve efficiency. The efficiency will encourage performance of PTK and other subsidiaries of Pertamina to be better, to optimize Revenues and Operating Profit achievement, as well as support business development. In 2020, PTK has build synergy with some subsidiaries of Pertamina.

Proyeksi Sinergi antar Pertamina Group

Projection of Synergy among Pertamina Group

PROJECT Project	MITRA SINERGI Synergy Partner	VOLUME BISNIS Business Volume	PERIODE PROYEK Project Period	
Penyediaan 2 unit WO tanker Small II 6500DWT	Provision of 2 units WO Small II 6500 DWT Tanker	PT Pertamina (Persero)	Rp849,87 miliar /billion	Feb 2019 - Feb 2027
Provision of Logistics Offshore Supply Base Service	Provision of Logistics Offshore Supply Base Service	PT Pertamina Hulu Indonesia	Rp109,70 miliar /billion	Jan 2019 - Ags 2020
Penyediaan 3 unit mooring boat	Provision of 3 units mooring boat	PT Pertamina (Persero)	Rp69,23 miliar / billion	Feb 2019 - Feb 2027
Rental of 1 (one) unit AHTS	Rental of 1 (one) unit AHTS	PT Pertamina Hulu Energi	Rp55,91 miliar / billion	Apr 2019 - Apr 2021
To Provide: two (2) unit AHTS and one (1) unit AHT to support 1st Drilling Rig (Soehanah)	To Provide: two (2) unit AHTS and one (1) unit AHT to support 1st Drilling Rig (Soehanah)	PT Pertamina Hulu Energi	Rp39,33 miliar / billion	Jan-Des 2019
Pengadaan Jasa Recognized Security Organization (RSO), keagenan kapal & administrasi dokumen kepelabuhan, dan pengurusan perijinan kemaritiman	Procurement of Recognized Security Organization (RSO), ship agency & port documents administration and maritime permit processing services	PT Nusantara Regas	Rp22,35 miliar / billion	Jan-Des 2019
Provision of 9 units LCT	Provision of 9 units LCT	PT Pertamina Hulu Indonesia	Rp14,01 miliar / billion	Jan-Jun 2019

Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha

Operational Review Per Business Segment



PT Pertamina Trans Kontinental awalnya didirikan dengan nama PT Pertamina Tongkang. PT Pertamina Tongkang bergerak di bidang pelayaran khusus industri (*industrial carrier*) dengan jasa:

1. Melaksanakan angkutan BBM ke daerah-daerah yang tidak dapat atau tidak ekonomis dilayani oleh kapal tanker;
2. Melaksanakan angkutan logistik keperluan proyek Pertamina; dan
3. Sebagai general agent/*handling agent* terhadap kapal-kapal *tanker/charter* Pertamina.

PT Pertamina Trans Kontinental was initially established under the name PT Pertamina Tongkang. PT Pertamina Tongkang engaged in the industrial carrier sector with the following:

1. Conducting fuel oil freight to areas which are unavailable to or uneconomical for tanker ship service;
2. Conducting the logistics freight for Pertamina project requirements;
3. Acting as general agent/*handling agent* of Pertamina tanker/*charter* ships.



Nama Perusahaan berubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental pada tanggal 14 September 2011 berdasarkan Akta No. 012 Tanggal 26 Oktober 2011 Tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Pertamina Tongkang, Notaris Dewantari Handayani, S.H.MPA, dengan bernafaskan *new brand, new vessels, new spirit* untuk bertransformasi dan mencapai visi menjadi perusahaan pelayaran dan jasa maritim kelas dunia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan No.7 tanggal 3 Juli 2013 pasal 3, Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang jasa pelayaran, jasa maritim, dan jasa logistik, baik di dalam maupun luar negeri. Jasa Perseroan juga termasuk kegiatan usaha lain terkait usaha di ketiga bidang tersebut.

Name of the Company was changed to PT Pertamina Trans Kontinental on 14 September 2011 based on Deed No. 012 of 26 October 2011 on PT Pertamina Tongkang Statement of Decision Outside of the Meeting, Notary Dewantari Handayani, S. H. MPA., with the themes of *new brand, new vessels, new spirit, to transform and achieve the vision to be a world class shipping and maritime services company.*

Based on the Articles of Association of the Company No. 7 of 3 July 2013 article 3, the Company runs business activities in the sectors of shipping services, maritime services, and logistics services, whether domestic or overseas. Company services also include other business activities relevant to the business in the three sectors.

Seiring pergantian nama Perusahaan, jumlah kapal yang dimiliki PTK terus bertambah. Pada tahun 2020 Perusahaan memiliki 125 armada kapal dari semula 84 kapal pada tahun 2019.

Kinerja Operasional Per Segmen Usaha

Secara umum, perusahaan memiliki tiga segmen usaha, yaitu: 1) Kegiatan pengangkutan, 2) Jasa maritim, dan 3) Jasa operasi kepelabuhan.

Segmen Kegiatan Pengangkutan

Perusahaan memiliki *core business* sebagai penyedia kapal dan memberikan jasa operasional kapal, baik kapal milik maupun *brokerage*, dengan sistem sewa berjangka (*time charter*) dengan durasi sewa minimal antara 2-10 tahun, sewa jangka pendek (*spot charter*) berdurasi kurang dari 1 tahun, dan sistem muatan (*cost of affreightment*), yaitu sistem sewa berdasarkan pada volume muatan.

Perusahaan melakukan sewa-menyewa kapal bekerja sama dengan Pihak ke-tiga untuk berbagai jenis kapal penunjang kegiatan migas dan kapal sarana pelabuhan. Kegiatan Charter Brokerage (*Back-to-Back*) terdiri dari *Back-to-Back Charter Non-COA (time charter)* dan *Back-to-Back Charter COA*.

Produktivitas Segmen Eksploitasi Kapal

Pada tahun 2020, realisasi commission days kapal milik PTK meningkat 59,23% menjadi 36.646 hari dari 23.015 hari pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan armada kapal milik yang sudah siap beroperasi. Pada tahun 2020, jumlah kapal milik bertambah sebanyak 40 kapal menjadi 125 kapal atau meningkat 48,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Operation days kapal tahun 2020 turut meningkat 48,95% menjadi 43.907 hari dari 29.476 hari pada

Following the Company's name alteration, the number of 2020 owned by PTK continued to increase. In 2018, the Company was supported by 125 vessels from previously 84 vessels in 2019.

Operational Performance Per Business Segment

In general, the Company has three business segments, as follows: 1) Ship Exploitation, 2) Maritime Service, and 3) Port operations service – business diversification.

Ship Exploitation Segment

The Company's core business is ship provider and ship operations services, whether owned or brokerage, with a time charter system and a minimum charter duration of 2-10 years, spot charter with the duration of less than 1 year, and a cost of affreightment system, which is a charter system based on cargo volume.

The Company commences a ship leasing in cooperation with third parties for various supporting vessels for oil and gas activity and port facility vessels. The Charter Brokerage (*Back-to-Back*) activity consists of *Back-to-Back Charter Non-COA (time charter)* and *Back-to-Back Charter COA*.

Productivity of the Ship Exploitation Segment

In 2020, realization of commission days for PTK-owned vessels increased 59,23% to 36.646 days from 23,015 days in the previous year. This increase was mainly due to addition of a fleet of owned vessels that were ready to operate. In 2020, the number of owned vessels will increase by 40 vessels to 125 vessels or an increase of 48,81% compared to the previous year.

In 2020, ship operation days also increased by 48.95% to 43,907 days from 29,476 days in the previous

tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya jumlah *operation days* baik kapal *back-to-back* maupun kapal milik yang masing-masing tumbuh sebesar 18,29% dan 61,02% atau setara dengan 1.522 dan 12.909 hari. Meningkatnya *operation days* kapal *back-to-back* tak lepas dari peningkatan tajam pada cabang Balikpapan yang tercapai sebesar 202,50% menjadi 243 call pada tahun 2020.

year. This increase was driven by the increase in the number of operation days, both back-to-back and owned vessels, which grew by 18.29% and 61.02%, respectively, or the equivalent of 1,522 and 12,909 days. The increase in back-to-back vessel operation days cannot be separated from the sharp increase in the Balikpapan branch which grew 202.50% or to 243 call in 2020.

Produktivitas Segmen Eksploitasi Kapal

Productivity of Ship Exploitation Segment

URAIAN Description	SATUAN Units	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
ARMADA KAPAL MILIK / OWNED SHIPS						
Jumlah Armada Kapal Milik Amount of Owned Ships	Unit	48,81	41	125	84	67
Commisson Days Kapal Milik Commission Days of Owned Ships	Hari Days	59,23	13.631	36.646	23.015	19.559
Kapal Milik Existing Existing Vessels	Hari Days	36,50	8.272	30.935	22.663	19.423
New Vessels	Hari Days	1.522,44	5.359	5,711	352	136
Operation Days Kapal Milik Operation Days of Owned Ships	Hari Days	61,02	12.909	34.065	21.156	17.789
Kapal Milik Existing Existing Vessels	Hari Days	39,64	8.261	29.101	20.840	11.558
New Vessels	Hari Days	1.370,89	4.332	4.648	316	6.231
Muatan Diangkut (Kapal Milik) Loads Transported (Owned Ship)	KL	(2,96)	(12.533)	410.809	423.342	469.164
KAPAL BACK-TO-BACK/ BACK-TO-BACK CHARTERED SHIPS						
Jumlah Kapal Back-to-Back Total Back-to-Back Ships	Unit	32,14	9	37	28	12
Operation Days Back-to-Back	Hari Days	18,29	1.522	9.842	8.320	3.904
Kantor Pusat Head Office	Hari Days	(26,62)	(552)	1.522	2.074	1.202
Cabang Branch Office	Hari Days	33,21	2.074	8.320	6.246	2.702

Produktivitas Segmen Eksploitasi Kapal

Productivity of Ship Exploitation Segment

URAIAN Description	SATUAN Units	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
Muatan Diangkut (<i>Back-to-Back</i>) <i>Loads Transported (Back-to-Back)</i>	KL	(6,03)	(19.924)	310.737	330.661	311.347
Jumlah Operation Days Kapal Milik dan <i>Back-to-Back</i> <i>Number of Operation Days of</i> <i>Owned ships and Back-to-back</i>	Hari Days	50,62	14.756	43.907	29.151	21.694
Volume Angkut COA <i>COA Freight Volume</i>	KL	(4,30)	(32.457)	721.546	754.003	780.511

Sementara itu volume angkut *Contract of Affreightment* (COA) juga mengalami penurunan sebesar 4,30% atau setara dengan 32.457 KL menjadi 721.546 KL pada tahun 2020. Penurunan ini diakibatkan oleh menurunnya muatan yang diangkut kapal back-to-back sebesar 6,03% atau setara dengan 19.924 KL menjadi 310.737 KL pada tahun 2020. Demikian pula yang terjadi dengan Volume Angkut *Contract of Affreightment* (COA) yang diangkut kapal milik terjadi penurunan sebesar 2,96% atau 12.533 KL menjadi 410.809 KL pada tahun 2020.

Meanwhile, the transport volume of *Contract of Affair* (COA) also decreased by 4.30% or equivalent to 32,457 KL to 721,546 KL in 2020. This decrease was caused by a decrease in cargo carried by back-to-back vessels by 6.03% or it is equivalent to 19,924 KL to 310,737 KL in 2020. Likewise, what happened to the Transport Volume of *Contract of Affair* (COA) carried by ships owned by a decrease of 2.96% or 12,533 KL to 410,809 KL in 2020.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Eksploitasi Kapal

Pada tahun 2020, pendapatan dari jasa Kapal Milik mengalami kenaikan 11,33% atau setara dengan Rp102,78 miliar dari Rp906,83 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.009,61 miliar pada tahun 2020. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya jumlah kapal Perseroan menjadi 125 unit pada tahun 2020 dari semula 84 unit.

Vessel Exploitation Segment Revenue and Profitability

In 2020, revenue from owned vessels increased by 11.33% or equivalent to Rp102.78 billion from Rp906.83 billion in 2019 to Rp1,009.61 billion in 2020. This increase was in line with the increase in the number of the Company's vessels to 125 units in 2020 from the original 84 units.

Naiknya pendapatan usaha selain disebabkan oleh kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan mutu layanan sehingga dapat menjaga kepercayaan pelanggan, terdapat juga faktor utama yaitu peningkatan kapasitas penggunaan Kapal Milik (Segmen Eksploitasi

The increase in operating revenues is not only due to the Company's ability to maintain service quality so as to maintain customer trust, there is also a major factor, namely an increase in the capacity to use Owned Vessels (Ship Exploitation Segment). This increase

Kapal). Kenaikan ini mengakibatkan laba operasi Kapal Milik mengalami kenaikan sebesar 36,10% atau setara dengan Rp102,63 miliar. Peningkatan penggunaan kapal milik ini menyebabkan penggunaan Kapal Sewa (*Back-to-Back Charter*) mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 16,17% dari Rp20,44 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp17,14 miliar.

resulted in the operating profit of owned vessels increased by 36.10% or equivalent to Rp102.63 billion. The increase in the use of owned vessels has caused the use of chartered vessels (*Back-to-Back Charter*) to decrease in 2020 by 16.17% from Rp20.44 billion in 2019 to Rp17.14 billion.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Eksploitasi Kapal (dalam jutaan Rupiah)

Revenue and Profitability of Ship Exploitation (in million Rupiah)

URAIAN Description		KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
Pendapatan Kapal Milik	Own-Vessels Revenue	11,33	102.779	1.009.611	906.832	854.541
Pendapatan <i>Back-to-back Charter</i>	Back-to-back Charter Revenue	(16,17)	(3.306)	17.136	20.442	188.721
Jumlah Pendapatan Segmen Eksploitasi kapal	Total Revenues from Ships Exploitation Segment	10,73	99.473	1.026.747	927.274	1.043.262
Beban Pokok Kapal Milik	Cost of Revenue Own-Vessels	0,02	145	622.661	622.516	540.579
Beban Pokok <i>Back-to-back Charter</i>	Back-to-Back Charter Cost of Revenue	100,00	2.957	2.957	-	170.071
Jumlah Beban Pokok Segmen Eksploitasi Kapal	Total Cost of Revenues from Ships Exploitation Segment	0,50	3.102	625.618	622.516	710.650
Laba Operasi Kapal Milik	Own-Vessels Operating Income	36,10	102.634	386.950	284.316	313.962
Laba Operasi <i>Charter & Brokerage dan Contract of Affreightment (COA)</i>	Charter & Broekrage and Contract of Affreightment (COA) Operating Income	(30,64)	(6.263)	14.179	20.442	12.850
Profitabilitas Segmen Eksploitasi Kapal	Profitability of Ships Exploitation Segment	31,62	96.371	401.129	304.758	332.612

Profitabilitas segmen eksploitasi kapal mengalami kenaikan 31,62% dari Rp304,76 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp401,13 miliar pada tahun 2020.

Profitability of the ship exploitation segment has increased by 31.62% from Rp304.76 billion in 2019 to Rp401.13 billion in 2020.

Jasa Maritim

PT Pertamina Trans Kontinental menyediakan layanan jasa maritim atau keagenan di seluruh pelabuhan di Indonesia, baik sebagai pelabuhan umum (keagenan umum) maupun di pelabuhan khusus Pertamina (keagenan kapal-kapal tanker charter/milik Pertamina).

Layanan yang disediakan mencakup: (1) pengurusan perizinan: *inout clearance (formality)*; (2) menyiapkan kebutuhan kapal dan crew (*crew supply, bunker handling, water supply*), (3) menyiapkan kebutuhan kapal dan crew, membuat perhitungan dan mempertanggungjawabkan jasa layanan kapal, dan (4) pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Produktivitas Segmen Jasa Maritim

Segmen jasa maritim terdiri atas keagenan tanker dan umum. Pada tahun 2020, layanan keagenan tanker mengalami kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah call keagenan tanker yang meningkat 583,71% pada tahun 2020 menjadi 16.163 call dari 2.364 call pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah call keagenan tanker baik pusat dan cabang masing-masing sebesar 17,07% dan 594,22%.

Layanan keagenan umum juga menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2020. Adapun rincian dari kinerja keagenan tanker dan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Maritime Services

PT Pertamina Trans Kontinental provides agency services at all Indonesian ports, whether as general ports (general agency) or Pertamina special ports (agency of Pertamina charter/owned tanker ships).

The provided services include: (1) permit administration: *in-out clearance (formality)*, (2) preparing the needs of ship and crew (*crew supply, bunker handling, water supply*), (3) preparing the needs of ship and crew, making ship service calculations and accountability, and (4) preparing Import Declaration (PIB) and Export Declaration (PEB) documents.

Productivity of Maritime Services Segment

The maritime services segment consists of tanker and general agencies. In 2020, tanker agency services experienced better performance than the previous year. This indicated from the number of tanker agency calls, which increased by 583.71% in 2020 to 16,163 calls from 2,364 calls in 2019. This increase was due to the increase in the number of tanker agency calls, both central and branch offices, by 17.07% and 594.22%, respectively.

General agency services also demonstrated good performance in 2020. Details information on tanker and general agency performance can be seen in the following table:

Produktivitas Segmen Jasa Maritim

Productivity of Maritime Services Segment

URAIAN Description		SATUAN Units	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019
			%	SELISIH Difference		
KEAGENAN TANKER / TANKER AGENCY						
Keagenan Tanker Kantor Pusat	Head Office Tanker Agency	call	17,07	7	48	41
Jumlah Call Charter Out Pertamina	Total Call of Pertamina Charter	call	-	-	-	-
Jumlah Call Keagenan Tanker Charter Out Pertamina	Total Agency Call of Pertamina Charter Out	call	-	-	-	-
Jumlah Call Keagenan Kapal Luar Negeri	Total Agency Call of Foreign Ships	call	(100,00)	2	-	2
Charter Call Bosowa	Bosowa Charter Call	call	23,08	9	48	39
Charter Milik Pertamina	Pertamina-owned Charter		-	-	-	-
Keagenan Tanker Cabang	Branch Office Tanker Agency	call	594,22	13.786	16.106	2.320
Jumlah Call Keagenan Kapal C M Pertamina	Total Agency Call of C M Pertamina Ship	call	28,08	435	1.984	1.549
Jumlah Call Keagenan Kapal C M Pertamina di Pel. Pertamina	Total Agency Call of Pertamina C M Ship	call	5249,24	13.858	14.122	264
Jumlah Call Keagenan Tanker Pusat dan Cabang	Number of Agency Call for Central and Branch Tankers	call	584,20	13.793	16.154	2.361
Administrasi Pelabuhan Khusus RSO & HOP	Administration of Specific (Special) Ports RSO & HOP	bandar	200,00	6	9	3
Jumlah Call Administrasi Pelabuhan Khusus	Total Administration Call of Specific Port	call	-	-	-	-
Jumlah lokasi Pelabuhan yang di-assess	Total Assessed Port Location (Port)	bandar	200,00	6	9	3
Jumlah Call Keagenan Tanker	Number of Tanker Agency Call	call	583,71	13.799	16.163	2.364

Produktivitas Segmen Jasa Maritim

Productivity of Maritime Services Segment

URAIAN Description		SATUAN Units	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019
			%	SELISIH Difference		
KEAGENAN UMUM / GENERAL AGENCY						
In Out Clearance	In Out Clearance	call	(12,64)	(381)	2.633	3.014
Izin Olah Gerak	Izin Olah Gerak	call	50,00	18	54	36
Bunker Service	Bunker Service	call	100,00	12.868	12.868	-
Crew Expenses/Crew Service/Attending Fee	Crew Expenses/Crew Service/Attending Fee	call	48,54	50	153	103
Keagenan Lain Non-tanker (Lumpsum)	Other Non-tanker Agency (Lumpsum)	call	2,02	2	101	99
Port Charges/Agency Fee	Port Charges/Agency Fee	call	45,34	793	2.542	1.749
Custom Clearance	Custom Clearance	set	(69,90)	(72)	31	103
Handling Fee	Handling Fee	kru	1.633,33	196	208	12
Boat Service/Crew Boat	Boat Service/Crew Boat	call	100,00	(441)	-	441
Ship Expenses	Ship Expenses	call	100,00	(82)	-	82
Water Service	Water Service	metric ton	-	-	-	-
Perpanjangan Dahsuskim/Sertifikat	Perpanjangan Dahsuskim/Sertifikat	kegiatan	-	-	-	-

Pendapatan Segmen Jasa Maritim

Perusahaan mencatat pendapatan dari jasa maritim atau keagenan naik sebesar 25,65% dari Rp230,09 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp289,10 miliar pada tahun 2020, penurunan ini disebabkan oleh kinerja pusat yang hanya terealisasi 48 call dari target yang ditetapkan 2.274 call atau hanya tercapai 2,11%. Meskipun demikian, kinerja cabang tercatat melebihi target yakni 16.163 call dari target yang ditetapkan sebesar 5.545 call atau tercapai 291,49%.

Maritime Services Segment Revenue

The Company booked revenue from maritime or agency services increased by 25.65% from Rp 230.09 billion in 2019 to Rp 289.10 billion in 2020, the decline was due to the headquarter performance which only realized 48 calls from the target set of 2,274 calls, or only reached 2.11%. Therefore, performance of the branch offices was recorded exceeding the target, achieving 16,163 calls, from the 5,545 calls targeted or reached 291.49%.

Profitabilitas Segmen Jasa Maritim (dalam jutaan Rupiah)

Profitability of Maritime Service Segment (in millions of Rupiah)

URAIAN Description		KENAIKAN/PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
Jumlah Pendapatan Segmen Jasa Maritim	Total Revenues from Maritime Service Segment	25,65	59.011	289.100	230.089	238.040
Jumlah Beban Pokok Segmen Jasa Maritim	Total Cost of Revenues from Maritime Service Segment	34,13	38.556	151.525	112.969	103.776
Profitabilitas Segmen Jasa Maritim	Profitability of Maritime Service Segment	17,46	20.455	137.575	117.120	134.263

Profitabilitas segmen jasa maritim mengalami kenaikan 17,46% atau sebesar Rp20,46 miliar dari Rp117,12 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp137,58 miliar pada tahun 2020.

The profitability of the maritime services segment increased by 17,46% or Rp20,46 billion from Rp117.12 billion in 2019 to Rp137.58 billion in 2020.

Jasa Operasi Kepelabuhanan - Diversifikasi Usaha

Kegiatan operasi kepelabuhanan meliputi kegiatan; (1) Administrasi Pelabuhan Khusus, (2) *Recognized Security Organization* (RSO), dan (3) Hydrography, Oceanography dan Pemetaan (HOP), meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Labour supply/crewing agent
2. Layanan *bunker service agency*, yaitu berupa pengisian dan/atau pendistribusian BBM untuk kapal, baik di laut maupun di darat.
3. Melakukan jasa pengolahan dan penyediaan air (*fresh water supply*) untuk keperluan kapal dan industri
4. Melakukan usaha jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal
5. Jasa pengerukan dan reklamasi pantai
6. Jasa ekspor import barang dan jasa pengurusan dokumen ekspor import (*customs clearance*).

Port Operation Services - Business Diversification

Port operation activities includes following activities; (1) Special Port Administration, (2) *Recognized Security Organization* (RSO), and (3) Hydrography, Oceanography and Mapping (HOP). Performance of port operation services is as follows:

1. Labour Supply/Crewing Agent.
2. Bunker Service Agency, providing Fuel recharge and/or distribution for ships onshore and offshore.
3. Fresh water supply and management service for ship and industrial needs.
4. Ships loading and unloading business activities.
5. Beach excavation and reclamation services.
6. Good and service export and import services including export import custom clearance

7. Mengadakan usaha di bidang *international freight forwarding*, termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa pengangkutan, pengiriman dan pendistribusian barang.
8. Pengelolaan pelabuhan umum dan *logistic base*
9. Jasa penyewaan dan pengelolaan gedung dan perkantoran.
10. Layanan inspeksi pipa bawah laut dimana pekerjaan survei untuk memeriksa kondisi existing pipa bawah laut meliputi bentangan, posisi, tekanan dan parameter teknis lainnya sesuai dengan desain yang ditetapkan.
11. Trading yang meliputi kegiatan pengadaan barang kebutuhan APD, PRF (*Pneumatic Rubber Render*), *freight forwarding*.

7. Business in international freight forwarding, including but not limited on cargo transportation, delivery and distribution.
8. General Port and Logistic base management.
9. Building and office rental and management services.
10. Submarine pipeline inspection service where the survey project supports submarine pipeline existing condition including spread, position, pressure and other technical parameters based on stipulated design.
11. Trading activities including APD, PRF (*Pneumatic Rubber Vender*), *Freight Forwarding supply*.

Produktivitas Diversifikasi Usaha – Cabang

Kegiatan serta kinerja diversifikasi usaha yang dilaksanakan oleh cabang selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Branch Business Diversification Productivity Business

Diversification activity and performance done by the branch office throughout 2020 are as follows:

Diversifikasi Usaha oleh Cabang Branch Business Diversification Activity

URAIAN Description		SATUAN Units	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019
			%	SELISIH Difference		
PEB	PEB	set	(28,80)	(53)	131	184
PPFTZ - Pertamina KSO Kabil	PPFTZ - Pertamina KSO Kabil	set	(3,57)	(17)	459	476
GAS Additional Charges Premier Oil	GAS Additional Charges Premier Oil	set	-	-	-	30
Fee MOU (Management Fee)	Fee MOU (Management Fee)	KL	(50,00)	(12)	12	24
Sewa Gedung/ Kantor/Housing	Building/Office/Housing Rent	bulan month	(7,14)	(1)	13	14
Logistik Base/ Sewa Lahan Logistik	Logistic Base/Sewa Lahan/Land Rent	hectare	12,47	2.713	24.466	21.753
Japom	Japom	personel	-	-	-	-
Ships Management kapal Pertamina	Marine (AKK) Pertamina Marine Ships Management (AKK)	bulan month	(95,95)	(923)	39	962

Diversifikasi Usaha oleh Cabang

Branch Business Diversification Activity

URAIAN Description		SATUAN Units	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019
			%	SELISIH Difference		
Handling Crew, Certificate, Oli, Cargo & PNBP	Handling Crew, Certificate, Oli, Cargo & PNBP	kegiatan activity	(83,33)	(10)	2	12
Fresh Water	Fresh Water	ton	19,30	20.509	126.773	106.264
Project PAG Blang Lancang - Lhokseumawe "Rutin"	Project PAG Blang Lancang - Lhokseumawe "Rutin"	kegiatan activity	-	-	12	12
Project PAG Blang Lancang - Lhokseumawe "Non- Rutin"	Project PAG Blang Lancang - Lhokseumawe "Non- Rutin"	kegiatan activity	-	-	-	-
Monthly Fee (Sei Pakning)	Monthly Fee (Sei Pakning)	bulan month	-	-	-	-
Perawatan Kapal Ringan Pertamina	Pertamina Light Vessel Maintenance	unit	-	-	-	-
ISPS – CODE	ISPS – CODE	kegiatan activity	200,00	2	3	1
Bongkar Muat	Loading	kegiatan activity	(99,98)	(47.991)	10	48.001
Jasa Angkut BBM	BBM Fuel Transportation	kegiatan activity	-	-	-	-
Jasa Pandu	Guiding Service	call	(50,00)	(12)	12	24
Lain-lain	Others	bulan month	100,00	25	25	-
Bunker Service	Bunker Service	metric ton	100,00	32.316.393	32.316.393	-

Produktivitas Diversifikasi Usaha - Anak Perusahaan

Sampai dengan akhir periode pelaporan Perusahaan memiliki empat anak perusahaan:

1. Peteka Karya Gapura
2. Peteka Karya Tirta
3. Peteka Karya Samudera
4. Peteka Karya Jala

Selain anak perusahaan tersebut, Perusahaan juga memiliki satu perusahaan patungan (*joint venture*), yaitu PT Trans Yeong Maritime yang kepemilikan

Productivity of Business Diversification - Subsidiaries

As end of the reporting period, the Company has four subsidiaries, as follos:

1. Peteka Karya Gapura
2. Peteka Karya Tirta
3. Peteka Karya Samudera
4. Peteka Karya Jala

In addition to these subsidiaries, the Company also has a joint venture company, namely PT Trans Yeong Maritime, whose share ownership is divided between

sahamnya terbagi antara PT Pertamina Trans Kontinental sebesar 51% dan Tong Yeong Tug, Co., Ltd. sebesar 49%.

PT Pertamina Trans Kontinental at 51% and Tong Yeong Tug, Co., Ltd. at 49%.

Kinerja bisnis kegiatan diversifikasi anak perusahaan selama 2020 adalah sebagai berikut:

Business performance of the subsidiary diversification activities in 2020 is as follows:

URAIAN Description	SATUAN Units	KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019	2018	
		%	SELISIH Difference				
PT PETEKA KARYA TIRTA							
Penjualan Air	Water Sales	m³/ton	(15,88)	(631.832)	3.346.406	3.978.238	5.060.977
PT PETEKA KARYA SAMUDERA							
Cover Storage - Lease	Cover Storage - Lease	m²	1,89	154	8.283	8.129	7.847
Open Storage - Lease	Open Storage - Lease	m²	(61,56)	(13.360)	8.343	21.703	23.953
Cargo Handling	Cargo Handling	R/T	(13,25)	(232.290)	1.520.565	1.752.854	1.636.354
Fasilitas Dermaga	Dock Facilities	hari days	(5,89)	(97)	1.551	1.648	788
Jumlah Call Kapal	Ship Call	call	(11,11)	(221)	1.768	1.989	1.403
Jumlah Supply Air ke Kapal	Water Supply to the Ship	ton	(22,21)	(5.062)	17.727	22.789	21.271
PT PETEKA KARYA GAPURA							
SDM yang Dikelola	Managed HR	crew	28,91	1.441	6.296	4.984	5.119
PT PETEKA KARYA JALA							
General Trading	General Trading	PO	14,00	49	12.777	350	502
Pengerukan	Dredging	ports	33,33	1	4	3	2
PT TRANS YEONG MARITIME							
Jumlah Kapal Operasi	Operating Vesels	unit	-	-	8	8	8
Operation Days of Owned Fleet	Operation Days of Owned Fleet	hari days	(11,62)	(337)	2563	2900	2.920

PT Peteka Karya Tirta

PT Peteka Karya Tirta ("PKT") bergerak di bidang *fresh water supply* ke industri dan kapal-kapal, pengoperasian *Water Treatment Plant* (WTP) dan *Sewage Treatment Plant* (STP), Pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) PAtraqua. Pada tahun 2020 PKT memasok air bersih sebanyak 3.346.406 m³ ke berbagai industri dan ke kapal-kapal milik Pertamina, PTK & kapal *Charter*. Nilai ini mengalami penurunan 15,88% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan karena pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap produksi industri-industri yang ada di Ciwandan, diantaranya dikarenakan kehabisan bahan baku impor sehingga mereka melakukan stop produksi, selain itu terdapat beberapa perusahaan yang sedang melakukan *maintenance* sehingga penggunaan air tidak maksimal, seperti PT Sentra Usahatama Jaya sedang melakukan perbaikan line proses, PT Jawa Manis Rafinasi sedang melakukan perbaikan *turbine* dan PT Lautan Otsuka Chemical sedang melakukan perbaikan *boiler*. Serta berkurangnya kapal yang sandar di Dermaga Pellindo yang menyebabkan penggunaan air berkurang. Selain itu terjadi kekeruhan yang pekat pada kolam penampungan air di Batam sehingga *customer* mengurangi permintaan air. Serta adanya karantina kapal di beberapa wilayah akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterlambatan kapal sandar untuk melakukan pengisian air di PKT.

PT Peteka Karya Samudra

PT Peteka Karya Samudra ("PKS") bergerak di bidang kepelabuhanan yang meliputi kegiatan bongkar muat dan sewa pergudangan serta *cargo handling*.

Pada 2020 jumlah pergudangan yang disewakan adalah seluas 8.283 m², meningkat 1,89% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 8.129 m². Peningkatan ini disebabkan karena disewakannya gudang *ex. workshop (generator set)*.

Jumlah *cargo handling* telah tertangani sebesar 1.520.565 R/T, mengalami penurunan 13,25%

PT Peteka Karya Tirta

PT Peteka Karya Tirta ("PKT") is engaged in *fresh water supply* to industry and ships, operation of *Water Treatment Plant* (WTP) and *Sewage Treatment Plant* (STP), Management of B3 and Non B3 waste, and production of Bottled Drinking Water. (AMDK) PAtraqua. In 2020, PKT supplied 3,346,406 m³ of clean water to various industries and to ships owned by Pertamina, PTK & Charter ships. This value has decreased by 15.88% when compared to the previous year. This decline was mainly due to the COVID-19 pandemic having a major effect on the production of industries in Ciwandan, including due to running out of imported raw materials so that they stopped production, besides that there were several companies that were carrying out maintenance so that water use was less optimal, such as PT Sentra Usahatama Jaya is currently repairing the process line, PT Jawa Manis Rafinasi is currently doing turbine repairs and PT Lautan Otsuka Chemical is doing boiler repairs. As well as the reduced number of ships docked at the Pellindo Pier, which has resulted in reduced water use. In addition, there is dense turbidity in the water storage pool in Batam so that customers reduce water demand. As well as the existence of ship quarantine in several areas due to the COVID-19 pandemic which caused delays in docking ships to fill water in the PKT.

PT Peteka Karya Samudra

PT Peteka Karya Samudra ("PKS") is engaged in the port sector, which includes loading and unloading activities and warehousing leases as well as *cargo handling*.

In 2020, the number of warehouses for lease is 8,283 m², increased by 1,89% compared to 2019 which covered 8,129 m². The increase was due to the leasing of the *ex. workshop (generator set)*.

Total *cargo handling* that was handled achieved 1,520,565 R/T, decreased by 13,25% compared to

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1.752.854,72 R/T. Penurunan ini didorong oleh tidak berlanjutnya kontrak kegiatan bongkar batu bara PT Ecogreen Oleochemical dikarenakan telah memakai TUKS mereka yang telah dapat beroperasi.

Jumlah pemakaian fasilitas dermaga pada 2020 mencapai 1.551 hari, atau mengalami penurunan 5,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1.648 hari. Penurunan ini didorong oleh terdampak dari tidak diperpanjangnya kontrak kegiatan bongkar batu bara milik PT Ecogreen Oleochemicals dan menurunnya kunjungan kapal untuk kegiatan bunker BBM dan Air.

Jumlah call pemanduan kapal mencapai 1.768 call, mengalami penurunan 11,11% dari tahun 2019. Penurunan ini karena menurunnya wilayah kerja kegiatan pemanduan kapal di wilayah TBBM Luwuk dan SPM Tuban.

Adapun jumlah *supply* air ke kapal pada tahun 2020 tercatat sebesar 17.727 ton atau turun 22,21%. Penurunan ini disebabkan menurunnya kunjungan kapal untuk bunker BBM dan Air

PT Peteka Karya Gapura

PT Peteka Karya Gapura ("PKG") bergerak di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari crew Kapal PTK dan JAPOM Pertamina. Pada tahun 2020, pasokan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 28,91% atau setara dengan personil menjadi 6.425 personil dari semula 4.984 personil pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat penambahan kapal di PTK sehingga PKG pemenuhan *crew* untuk kapal-kapal *small craft* PTK, kemudian adanya pengelolaan TKJP Marine Dockyard Sorong dan TKJP Marine di MOR III yang sebelumnya tidak dikelola oleh PKG serta pengelolaan Keagenan Charter Kapal Domestik (KCKD) PTK di Seluruh lokasi *Marine Region*.

PT Peteka Karya Jala

PT Peteka Karya Jala ("PKJ") bergerak di bidang pengerukan (*dredging*) dan *general trading*. Perusahaan

the previous year of 1,752,854.72 R/T. This decrease was driven by the discontinuation of PT Ecogreen Oleochemical's coal unloading activity contract due to the use of their TUKS which were already operational.

The number of use of dock facilities in 2020 reached 1551 days, or decreased by 5.89% compared to the previous year of 1,648 days. This decline was driven by the impact of PT Ecogreen Oleochemicals' coal unloading contract and the decline in ship visits for fuel and water bunker activities.

The number of ship guidance calls reached 1,768 calls, a decrease of 11,11% from 2019. This decrease was due to the decrease in the work area for ship guidance activities in the TBBM Luwuk and SPM Tuban areas.

In 2020, water supply to ships achieved 17,727 tonnes, decreased by 22,21%. The decrease was due to the decrease in ship visits for the BBM and water bunkers.

PT Peteka Karya Gapura

PT Peteka Karya Gapura ("PKG") is engaged in the manpower sector, which consists of PTK Ship Crew and JAPOM Pertamina. In 2020, the labor supply has increased by 28.91% or the equivalent of personnel to 6.425 personnel from the original 4.984 personnel in 2019. This increase is due to the addition of ships in PTK so that PKG crew fulfillment for small craft PTK vessels, then there is the management of TKJP Marine Dockyard Sorong and TKJP Marine at MOR III which were not previously managed by PKG as well as management of the PTK Domestic Ship Charter Agency (KCKD) in all Marine Region locations.

PT Peteka Karya Jala

PT Peteka Karya Jala ("PKJ") is engaged in dredging and general trading. The Company has carried out 4 (four)

telah melakukan pengerukan pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat) spot pekerjaan pengerukan, yaitu Pengerukan Cilacap Area 70 dan CIB, Pengerukan RDMP RU V Balikpapan, Pengerukan Terminal BBM Bula dan Pengerukan di area PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

Sementara itu general trading Realisasi Perolehan PO tahun 2020 adalah 399, dimana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan oleh peningkatan jumlah kapal user baik itu PT Pertamina Trans Kontinental maupun PT Pertamina – Shipping.

PT Trans Yeong Maritime

PT Trans Yeong Maritime ("TYM") merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara PT Pertamina Trans Kontinental dengan Tong Yeong Tug, Co., Ltd., dari Korea. TYM bergerak dibidang perkapalan. Pada tahun 2020 jumlah own fleet Perusahaan sebanyak 8 unit.

Adapun *operation days of owned fleet* pada tahun 2020 sebesar 2.563 menurun 11,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 2.900 hari. Penurunan ini disebabkan karena :

1. TB Kosak;

- Kerusakan rel digalangan saat pelaksanaan *docking* selama 4 hari.
- Kerusakan mesin setelah berangkat dari galangan selama 2 hari.
- 1 crew terpapar COVID-19 sehingga sesuai rekomendasi DSLNG kapal harus kembali ke posisi akhir (Bitung). saat dibiutang crew dan kapal harus menjalankan prosedur karantina COVID yang memakan waktu 14 hari.
- Belum tersedianya kapal pengganti, sehingga atas permasalahan diatas kapal *off hire* dengan total 62 hari.

2. TB Kardinal

- Keterlambatan pelaksanaan *docking* terkait izin.
- 1 crew terpapar COVID-19 dan diperlukan waktu untuk memastikan crew *negative* selama 14 hari.

dredging work spots dredging in 2020, such as Cilacap Area 70 and CIB Dredging, RU V Balikpapan RDMP Dredging, Bula Fuel Terminal Dredging and Dredging in the PT Pertamina Hulu East Kalimantan (PHKT) area.

Meanwhile, the general trading realization of PO acquisition in 2020 achieved 399, which has increased from the previous year due to an increase in the number of user vessels, both PT Pertamina Trans Kontinental and PT Pertamina - Shipping.

PT Trans Yeong Maritime

PT Trans Yeong Maritime ("TYM") is a joint venture between PT Pertamina Trans Kontinental with Tong Yeong Tug, Co., Ltd. from Korea. TYM is engaged in shipping. In 2020, the number of the Company's own fleets is 8 units.

Operation days of the owned fleets in 2020 achieved 2.563, decreased by 11,62% compared to 2,900 days in previous year. The decrease was driven by:

1. TB Kosak;

- Damage to rails at the shipyard during the docking for 4 days.
- Engine failure after leaving the shipyard for 2 days.
- 1 crew is exposed to COVID-19 thereby according to the DSLNG recommendation the ship shall be returned to its final position (Bitung). when calculated, the crew and the ship must carry out the COVID quarantine procedure which takes 14 days.
- Replacement of the vessel is not yet available, thereby, regarding the problems mentioned above, the off charter ships with recorded the total of 62 days.

2. Cardinal TB

- Delay in carrying out docking related to permits.
- 1 crew as exposed to COVID-19 and required 14 days to confirm the crew is negative.

3. TB Kembang mengalami kendala dalam persetujuan izin gerak setelah uji coba laut.
4. Penurunan *performance Ship Manager* dalam melakukan *monitoring Plan Maintenance System* (PMS) sehingga adanya *finding marine observation* pada kapal *Pilot Boat* (PB) dan *Mooring Boat* (MB) dari DSLNG sebanyak 26 temuan yang terdiri dari:
 - a. AIS is out of Order (PB)
 - b. Hot Engine diatas 21 Knots, 2100 RPM (PB)
 - c. Echo Sounder need to calibration (PB)
 - d. No Critical Sparepart (PB & MB)
 - e. Hard Steering gear, couple Issu (MB)
 - f. GPS & Radar error (MB cobia)
5. Adanya *Incident* pada *Bollard Pull* di kapal PB. Dorang sehingga diharuskan untuk melakukan perbaikan dan modifikasi sejak 9 November 2020.
6. Adanya temuan tambahan terkait *Bollard Pull* pada kapal MB dikarenakan tidak adanya hasil pengujian selama 5 tahun.
7. Adanya *lockdown* dan ketatnya *protocol* COVID di DSLNG.

Pendapatan Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan – Diversifikasi Usaha

Pendapatan dari jasa operasi kepelabuhan mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan segmen lainnya. Pada tahun 2019, jasa operasi kepelabuhan menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,38 triliun atau tumbuh 80,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong oleh pengalihan kegiatan bisnis jasa *Port Operation Service* kepada anak usaha PTK yakni PT Peteka Karya Samudra.

Selain itu, pertumbuhan ini juga tak lepas dari penambahan bisnis baru STS FAME di Balikpapan. PT Pertamina Trans Kontinental mendapatkan penugasan dari PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan Jasa Pengelolaan *Floating Storage FAME* di Balikpapan. FAME (Fatty, Acid, Methyl, Ester) merupakan salah satu varian bahan bakar terbarukan berbahan baku lemak hewani maupun nabati. Pemerintah melalui Pertamina memiliki program untuk mulai mendistribusikan bahan bakar FAME tersebut.

3. TB Kembang experienced problems in approving the motion permit after sea trials.
4. TB Kembang in the performance of the Ship Manager in monitoring the Plan Maintenance System (PMS), there were 26 finding marine observations on the Pilot Boat (PB) and Mooring Boat (MB) from DSLNG, consisting of:
 - a. AIS is out of Order (PB)
 - b. Hot Engine above 21 Knots, 2100 RPM (PB)
 - c. Echo Sounder need to calibration (PB)
 - d. No Critical Spare Parts (PB & MB)
 - e. Hard Steering gear, couple Issu (MB)
 - f. GPS & Radar error (MB cobia)
5. There was an incident on the Bollard Pull on the PB. Dorang vessels so that it is required to make repairs and modifications since November 9, 2020
6. There are additional findings related to Bollard Pull on the MB ship due to the absence of test results for 5 years
7. There is a lockdown and the tightness of the COVID protocol in DSLNG

Port Operations Services Segment Income - Business Diversification

Revenues from port operation services recorded the highest growth compared to other segments. In 2019, port operation services generated revenue of Rp1.38 trillion or grew 80.25% compared to the previous year. This increase was mainly driven by the transfer of Port Operation Service business activities to PT Peteka Karya Samudra, a subsidiary of PTK.

In addition, this growth is also related to the addition of the new STS FAME business in Balikpapan. PT Pertamina Trans Kontinental received an assignment from PT Pertamina (Persero) to carry out Floating Storage FAME Management Services in Balikpapan. FAME (Fatty, Acid, Methyl, Ester) is a renewable fuel variant made from animal and vegetable fats as raw material. The government through Pertamina has a program to start distributing the FAME fuel.

Profitabilitas Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan – Diversifikasi Usaha

Profitabilitas segmen jasa kepelabuhan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan dari segmen jasa ini.

Profitability of Port Operations Services Segment - Business Diversification

Profitability of the port services segment increases with the increase in revenue from this service segment.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan – Diversifikasi (jutaan Rupiah) Profitability of Port operation Service Segment – Business Diversification (in million Rupiah)

URAIAN Description		KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
Pendapatan Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan	Revenues from Port Operations Service Segment	26,03	359.906	1.742.349	1.382.443	766.970
Beban Pokok Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan	Cost of Revenues from Port Operations Service Segment	25,43	285.971	1.410.319	1.124.348	584.484
Profitabilitas Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan	Profitability of Port Operations Service Segment	28,65	73.935	332.030	258.095	183.541

Seiring dengan meningkatnya pendapatan yang diterima segmen jasa operasi kepelabuhan, profitabilitas atau laba kotor segmen ini turut mengalami peningkatan sebesar 28,65% atau setara dengan Rp73,94 miliar menjadi Rp332,03 miliar pada tahun 2020.

Along with the increase in revenue recorded by the port operation services segment, the profitability or gross profit of this segment also increased by 28.65% or equivalent to Rp73,94 billion to Rp332,03 billion in 2020.

Profitabilitas Perusahaan per segmen usaha pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

The Company's profitability per business segment in 2020 is presented in the following table:

Tabel Profitabilitas Perusahaan Per Segmen Tahun 2020 Table of Company's Profitability by Segment in 2020

SEGMENT USAHA Business Segment	REALISASI PENDAPATAN Revenue Realization (Rp juta/ Rp million)	PROFITABILITAS Profitability (%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN USAHA (%) Contribution to Operating Income (%)
Shipping Activities	1.300.466	433.464	42,52
Marine Services	1.373.431	354.049	44,91
Logistic Services	384.299	100.562	12,57
Total	3.058.197	888.075	100,00

Rencana Strategis 2021-2026

Strategic Plan 2021-2026

Adanya pandemi COVID-19 berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja perusahaan pada sektor energi, termasuk Perusahaan dengan bidang usaha industri pelayaran dan jasa maritim. Beberapa *key issues* tren global dan tren domestik akibat Pandemi COVID-19 yang akan mempengaruhi industri pelayaran dan jasa maritim, diantaranya:

- Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak negara menerapkan berbagai macam pembatasan terkait lepas sandar kapal ataupun proses pergantian awak kapal.
- Diperkirakan permintaan minyak akan turun 6-12% dibandingkan tahun 2019 dan diperkirakan akan kembali normal pertengahan tahun 2021.
- Di Indonesia, pandemi COVID-19 telah menurunkan proyeksi kebutuhan energi untuk tahun 2020-2021 dan diperkirakan kebutuhan energi akan kembali normal di tahun 2022. Kebutuhan bahan bakar minyak diproyeksikan akan tetap tumbuh meskipun dengan rata-rata pertumbuhan yang lebih lambat.

Selain pandemi, meningkatnya *issue* terkait energi terbarukan juga turut mempengaruhi industri pelayaran dan jasa maritim. Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain yang disertai dengan rencana peraturan terkait pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) menggunakan perusahaan pelayaran dan asuransi Indonesia mempengaruhi jasa keagenan kapal. Hal ini disebabkan industri perkapalan domestik belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kenaikan permintaan yang timbul akibat peraturan baru tersebut, sehingga keagenan kapal impor mengalami penurunan.

Sasaran Strategis Perusahaan Secara Umum

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang selaras dengan tema strategis perusahaan yaitu pertumbuhan agresif dengan layanan dan operasional terbaik, maka ditetapkan sasaran strategis perusahaan secara umum adalah sebagai berikut:

The COVID-19 pandemic outbreak has a direct and indirect impact on the performance of companies in the energy sector, including companies in the shipping and maritime services industry. Several key issues are global trends and domestic trends due to the COVID-19 pandemic which will affect the shipping and maritime services industry, including:

- The COVID-19 pandemic has caused many countries to impose various kinds of restrictions regarding ship docking or the process of changing crew members.
- It is estimated that oil demand will decrease by 6-12% compared to 2019 and is expected to return to normal by mid-2021.
- In Indonesia, the COVID-19 pandemic has lowered the projected energy demand for 2020-2021 and it is estimated that energy demand will return to normal in 2022. Demand for fuel oil is projected to continue to grow even at a slower rate of growth.

Apart from the pandemic, the increasing issues related to renewable energy also affected the shipping industry and maritime services. Government policies related to the use of biofuels as other fuels accompanied by regulatory plans related to the transportation of CPO (*Crude Palm Oil*) using Indonesian shipping and insurance companies affect ship agency services. This is because the domestic shipping industry does not yet have sufficient capacity to handle the increase in demand arising from the new regulation, thereby the agency for imported vessels has decreased.

General Strategic Objectives of the Company

In order to realize the vision, mission and strategic objectives that are in line with the company's strategic theme, namely aggressive growth with the best service and operations, the company's general strategic goals are set as follows:

1. Pendapatan: tren pertumbuhan 20% sepanjang tahun 2021-2026 (tahun 2020 diabaikan karena pandemi COVID-19), dengan proyeksi pencapaian pada tahun 2026 senilai Rp10,218 triliun.
2. EBITDA: tren pertumbuhan 19% sepanjang tahun 2021-2026 (tahun 2020 diabaikan karena pandemi COVID-19), dengan proyeksi pencapaian pada tahun 2026 senilai Rp2,22 triliun.
3. Laba Bersih: tren pertumbuhan 26% pada tahun 2021-2026 (tahun 2020 diabaikan karena pandemi COVID-19), dengan proyeksi pencapaian pada Tahun 2026 mencapai Rp1,32 triliun.

Strategi Perusahaan

Demi mewujudkan sasaran strategis di atas, maka pengembangan strategi korporat Perusahaan diarahkan sebagai berikut:

1. Jasa Pelayaran

- a. Meningkatkan *operational excellence* yang mengutamakan aspek K3LL, kompetensi awak kapal, dan *standard Service Level Agreement* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- b. Penambahan jenis dan jumlah armada kapal milik untuk melayani segmen industri minyak & gas melalui sinergi grup Pertamina dan kemitraan strategis.
- c. Diversifikasi basis pelanggan dalam lingkup grup Pertamina, KKKS, dan pasar potensial di sektor migas dan maritim.
- d. Efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan kapal melalui program perawatan armada kapal secara terintegrasi antara pengawas kapal (*superintendent*), awak kapal, galangan kapal, dan vendor dengan optimalisasi sistem informasi digital *Planned Maintenance System*.
- e. Pemantauan dan pembaruan sertifikat laik laut kapal (*seaworthiness*) untuk menjaga serta mencapai target hari operasi kapal.
- f. Divestasi kapal milik yang sudah tidak produktif dan fokus pada operasional kapal dengan prospektus pasar yang lebih menguntungkan.

1. Income: 20% growth trend throughout 2021-2026 (ignored 2020 due to the COVID-19 pandemic), with a projected achievement in 2026 of Rp10.218 trillion.
2. EBITDA: 19% growth trend throughout 2021-2026 (ignored 2020 due to the COVID-19 pandemic), with a projected achievement in 2026 of Rp2.22 trillion.
3. Net Profit: 26% growth trend in 2021-2026 (ignored 2020 due to the COVID-19 pandemic), with the projected achievement in 2026 reaching Rp1.32 trillion.

Company Strategy

In order to realize the above strategic objectives, Development of the company's corporate strategy is directed as follows:

1. Shipping Services

- a. Increasing operational excellence that prioritizes K3LL aspects, crew competence, and standard Service Level Agreements to meet customer needs.
- b. Adding the types and numbers of owned vessels to serve the oil & gas industry segment through the Pertamina group synergy and strategic partnerships.
- c. Diversification of the customer base within the Pertamina group, KKKS, and potential markets in the oil and gas and maritime sectors.
- d. Efficiency of ship operation and maintenance costs through an integrated fleet maintenance program between supervisors (*superintendents*), ship crews, shipyards, and vendors by optimizing the *Planned Maintenance System* digital information system.
- e. Monitoring and renewing the ship's seaworthiness certificate to maintain and achieve the target day of the ship's operation.
- f. Divestment of unproductive owned vessels and focus on ship operations with a more profitable market prospectus.

2. Jasa Maritim

- a. Meningkatkan kualitas jasa keagenan kapal agar lebih cepat, efektif, dan efisien dengan tarif kompetitif melalui optimalisasi sistem informasi pada aspek pelayanan administrasi, suplai kebutuhan logistik kapal, serta penyelesaian *disbursement*.
- b. Mengembangkan kompetensi SDM dan menambah aset produksi dalam bisnis jasa maritim seperti pengerukan alur pelayaran, pemeliharaan sarfas pelabuhan, teknik bawah air, suplai air baku untuk kapal & industri, penyediaan awak kapal, *ship management*, *waste management*, dan *bunker handling*.
- c. Menambah jumlah pelabuhan dalam bisnis *port operation services* melalui kegiatan *Recognized Security Organization* dan penerapan ISPS Code.

3. Jasa Logistik

- a. Menambah area kerja bidang kepelabuhanan melalui kemitraan dengan pemilik pelabuhan, khususnya pelabuhan strategis dengan aktivitas pelayaran yang sibuk dan frekuensi bongkar-muat yang tinggi.
- b. Membangun *logistic shorebase* yang berdekatan dengan wilayah eksplorasi blok migas lepas pantai Pertamina dan KKKS sebagai *one-stop services logistic shorebase* berstandar internasional.
- c. Menambah infrastruktur, aset produksi, dan peningkatan kompetensi SDM untuk kegiatan badan usaha pelabuhan (*freight forwarding*, *cargodoring*, *stevedoring*).

4. Digitalisasi

- a. Digitalisasi di seluruh mata rantai bisnis (*end to end*) untuk menunjang produktivitas dan kecepatan pengambilan keputusan.
- b. Meningkatkan *maritime cyber security awareness* pada awak kapal dan operator untuk keamanan pertukaran informasi elektronik.

2. Maritime Services

- a. Improve quality of ship agency services to be faster, more effective, and efficient at competitive rates through optimization of information systems on aspects of administrative services, supply of ship logistics needs, and settlement of disbursements.
- b. Developing HR competencies and adding production assets in the maritime service business such as dredging shipping lanes, maintaining port infrastructure, underwater engineering, raw water supply for ships & industry, provision of ship crews, ship management, waste management, and bunker handling.
- c. Increase the number of ports in the port operation services business through the activities of the Recognized Security Organization and the application of the ISPS Code.

3. Logistics Services

- a. Increase the work area in the port sector through partnerships with port owners, especially strategic ports with busy shipping activities and a high loading and unloading frequency.
- b. Build a logistics shorebase adjacent to the exploration area of Pertamina and KKKS offshore oil and gas blocks as a one-stop logistics shorebase service with international standard.
- c. Adding infrastructure, production assets, and increasing the competence of human resources for port business entity activities (*freight forwarding*, *cargodoring*, *stevedoring*).

4. Digitalisasi

- a. Digitalization throughout the business chain (*end to end*) to support productivity and speed of decision making.
- b. Increase maritime cyber security awareness among crew members and operators for the security of electronic information exchange.

5. Finansial

- a. Meningkatkan kelancaran arus kas perusahaan melalui restrukturisasi skema pinjaman dari eksternal.
- b. Mendapatkan sumber pendanaan melalui mitra strategis untuk investasi kapal dan proyek lainnya melalui skema pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tingkat suku bunga pinjaman yang terjangkau.
- c. Percepatan perolehan piutang macet untuk menjaga arus kas perusahaan.

6. Organisasi dan Manajemen Portofolio

- a. Transformasi budaya organisasi yang *agile* dan kompetitif guna menghadapi dunia persaingan yang VUCA.
- b. Mengembangkan organisasi serta *workforce planning* yang mendukung perkembangan bisnis yang selaras dengan arah bisnis induk perusahaan.
- c. Meningkatkan *Strategic People Development & Management*.
- d. Optimalisasi portofolio Anak Perusahaan.

7. Citra Perusahaan

- a. Penerapan GCG seluruh pekerja untuk komitmen integritas, kepatuhan terhadap hukum, hubungan & lingkungan kerja, serta konflik kepentingan sesuai Tata Nilai 6C & AKHLAK.
- b. Memperluas *customer referral & social awareness* melalui penggunaan *brand* "Transko" sebagai identitas perusahaan dalam kegiatan bisnis korporat dan sosial perusahaan pada platform multimedia.
- c. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat dan komunitas melalui program CSR dan edukasi.

5. Financial

- a. Improve the smooth flow of company cash flow through restructuring of external loan schemes.
- b. Obtain funding sources through strategic partners for ship investment and other projects through short-term, medium-term, and long-term financing schemes with affordable loan interest rates.
- c. Accelerate the acquisition of bad debts to maintain the company's cash flow.

6. Organization and Portfolio Management

- a. Agile and competitive organizational culture transformation in order to face the competitive world that is VUCA.
- b. Developing an organization and workforce planning that supports business development in line with the direction of the parent company business.
- c. Improve Strategic People Development & Management.
- d. Optimization of the portfolio of the Subsidiaries.

7. Corporate Image

- a. Implementation of GCG for all employees for commitment to integrity, compliance with law, relationships & work environment, as well as conflicts of interest in accordance with the 6C & AKHLAK Values
- b. Expanding customer referrals & social awareness through the use of the "Transko" brand as a corporate identity in corporate and corporate social business activities on a multimedia platform.
- c. Take an active role in community and community development activities through CSR and education programs.

Tinjauan Keuangan

Financial Review



Pembahasan kinerja keuangan komprehensif disampaikan dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)

The following discussion of comprehensive financial performance is presented with a reference to the Consolidated Financial Statements of PT Pertamina Trans Kontinental which ended on 31 December 2020 and 2019 and was audited by a Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)



Hasil audit Laporan Keuangan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2020 menghasilkan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, posisi keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.

The audit process of the PT Pertamina Trans Kontinental Financial Statements 2020 generated an opinion that the accompanying consolidated financial statements has been presented fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The Financial Statements is prepared according to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) applied in Indonesia.

ANALISIS POSISI KEUANGAN

Jumlah aset Perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp5,99 triliun atau meningkat 26,68% dari tahun sebelumnya. Jumlah liabilitas Perseroan turut naik 42,88% menjadi Rp3,42triliun pada tahun 2019.

FINANCIAL POSITION ANALYSIS

In 2020, the Company booked total assets of Rp5.99 trillion or increased by 26.68% from the previous year. The total liabilities of the Company also increased 42.88% to Rp3.42 trillion in 2019.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (jutaan Rupiah)

Consolidated Statement of Financial Position (in millions of Rp)

URAIAN Description		KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
Aset Lancar	Current Assets	21,44	381.389	2.160.035	1.778.646	1.513.600
Aset Tidak Lancar	Non-Current Assets	29,83	881.438	3.836.315	2.954.877	2.939.580
Jumlah Aset	Total Assets	26,68	1.262.827	5.996.350	4.733.523	4.453.180
Liabilitas Jangka Pendek	Short Term Liabilities	71,67	968.858	2.320.665	1.351.807	1.266.095
Liabilitas Jangka Panjang	Long Term Liabilities	5,44	56.511	1.096.086	1.039.575	1.120.806
Jumlah Liabilitas	Total Liability	42,88	1.025.369	3.416.751	2.391.382	2.386.901
Ekuitas	Equity	10,14	237.458	2.579.599	2.342.141	2.066.279
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Total Liabilities & Equity	26,68	1.262.827	5.996.350	4.733.523	4.453.180
Kurs Nilai Tukar Akhir Tahun Per 1 USD	Exchange Rate per 1 USD	1,47	204	14.105,01	13.901,01	14.481,00

Aset

Jumlah aset Perusahaan per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5,99 triliun, meningkat 26,68% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,73 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tidak lancar Perusahaan sebesar 29,83% atau setara dengan Rp881,44 miliar.

Asset

As of December 31, 2020 the Company recorded total assets Rp5.99 trillion, increased by 26.68% if compared to the previous year which amounted to Rp4.73 trillion. This increase was mainly due to the increase in the Company's non-current assets by 29.83% or equivalent to Rp881.44 billion.

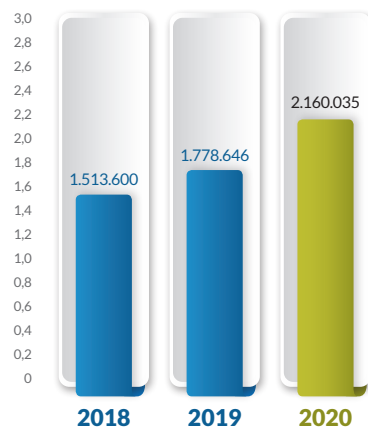
Aset (jutaan Rupiah)

Assets (in millions of Rp)

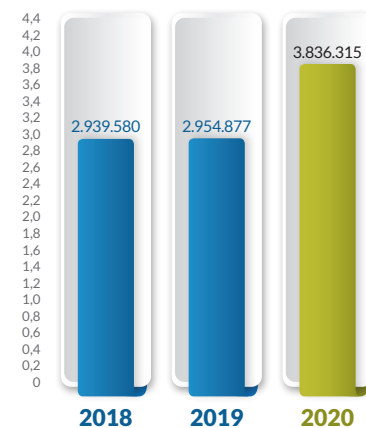
URAIAN Description		KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
Kas dan setara kas	Cash and cash equivalents	(8,68)	(62.015)	652.483	714.498	560.808
Kas yang dibatasi penggunaannya	Restricted cash	-	-	588	588	938
Piutang usaha	Trade receivables	65,87	204.926	516.040	311.114	299.905
Pihak berelasi	Related parties	26,84	23.214	109.718	86.504	126.133
Pihak ketiga	Third parties	52,68	215.676	625.121	409.445	265.085
Piutang usaha yang belum difakturkan	Unbilled receivables	5,11	8.626	177.323	168.697	186.744
Piutang sewa pembiayaan	Finance lease receivables	1,47	299	20.624	20.325	18.511
Persediaan	Inventories	13,64	81	675	594	23.320
Pajak dibayar di muka - pajak lain-lain	Prepaid taxes - other taxes	(62,48)	(26.328)	15.808	42.136	18.511
Uang muka dan biaya dibayar di muka	Advances and prepayments	68,34	16.910	41.655	24.745	23.320
Aset Lancar	Current Assets	21,44	381.389	2.160.035	1.778.646	1.513.600
Aset Tetap	Fixed Assets	28,00	769.946	3.520.066	2.750.120	2.727.150
Aset hak-guna	Useful Assets	100,00	56.332	56.332		
Aset pajak tangguhan	Finance lease receivables	28,46%	9.551	43.115	33.564	37.260
Piutang sewa pembiayaan	Finance lease receivables	(23,90)	(19.430)	61.871	81.301	95.280
Penyertaan saham	Investment in shares	1254,18	7.500	8.098	598	598
Investasi pada ventura bersama	Investment in a joint venture	1,84	1.342	74.425	73.083	55.066
Taksiran pengembalian pajak	Estimated tax refund	422,68	55.629	68.790	13.161	22.320
Aset lain-lain	Other assets	18,62	568	3.618	3.050	1.906
Aset Tidak Lancar	Non-current Assets	29,83	881.438	3.836.315	2.954.877	2.939.580
Jumlah Aset	Total Assets	26,68	1.262.827	5.996.350	4.733.523	4.453.180

ASET LANCAR**Current Assets**

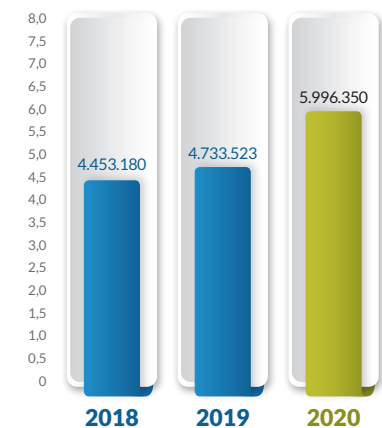
dalam juta Rupiah/ in millions of Rupiah

**ASET TIDAK LANCAR****Non-current Assets**

dalam juta Rupiah/ in millions of Rupiah

**ASET****Assets**

dalam juta Rupiah/ in millions of Rupiah

**Aset Lancar**

Aset lancar PTK tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 21,44% menjadi Rp2,16 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp1,78 triliun. Peningkatan ini didorong oleh naiknya kas dan setara kas serta naiknya piutang usaha khususnya dari pihak berelasi.

Current assets

In 2020, total assets of PTK increased by 21.44% to Rp2.16 trillion compared to 2019 which amounted to Rp1.78 trillion. This increase was driven by an increase in cash and cash equivalents and an increase in trade receivables, especially from related parties.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar perusahaan meningkat 29,83% atau sebesar Rp881,44 miliar dari Rp2,95 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp3,84 triliun pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tetap PTK serta adanya implementasi PSAK 73 untuk mencatat aset hak guna.

Non-Current Assets

The company's non-current assets increased by 29.83% or Rp881.44 billion from Rp2.95 trillion in 2019 to Rp3.84 trillion in 2020. This increase was mainly due to the implementation of PSAK 73 to record use rights assets.

Liabilitas

Hingga 31 Desember 2020, jumlah liabilitas Perusahaan mengalami kenaikan 42,88% menjadi Rp3,42 triliun. Liabilitas jangka pendek Perusahaan meningkat sebesar Rp968,86 miliar menjadi Rp2,32 triliun. Adapun liabilitas jangka panjang Perusahaan meningkat sebesar Rp56,51 miliar menjadi Rp1,10 triliun.

Liabilities

As of December 31, 2020, total liabilities increased by 42.88% to Rp3.42 trillion. The short-term liabilities increased by Rp968.86 billion to Rp2.32 trillion. Meanwhile, the long-term liabilities increased by Rp56.51 billion to Rp1.10 trillion.

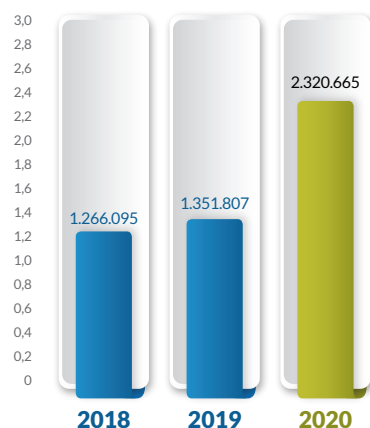
Liabilitas (jutaan Rupiah)

Liabilities (in million Rupiah)

URAIAN Description		KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
Utang usaha	Trade payables	32,90	159.928	645.969	486.041	336.986
Pihak berelasi	Related parties	49,03	150.280	456.758	306.478	201.231
Pihak ketiga	Third parties	5,37	9.648	189.211	179.563	135.755
Biaya masih harus dibayar	Accrued expenses	103,97	584.686	1.147.039	562.353	617.763
Liabilitas kontrak	Contract Liabilities	77,71	50.363	115.171	64.808	27.786
Pihak berelasi	Related parties	100,00	105	105	-	4.144
Pihak ketiga	Third parties	77,55	50.258	115.066	64.808	23.642
Utang pajak	Taxes payable	3243,34	417.223	430.087	12.864	12.632
Pajak penghasilan	Income tax	(5,20)	(347)	6.320	6.667	8.679
Pajak lain-lain	Other taxes	127,77	7.918	14.115	6.197	3.953
Bagian jangka pendek atas liabilitas sewa	The current portion of the lease obligations	100,00	27.123	27.123	-	-
Pinjaman jangka pendek	Short-term loan	(100,00)	(25.516)	-	25.516	-
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	The short term portion of the long term loan	82,26%	164.703	364.928	200.225	270.928
Liabilitas Jangka Pendek	Short-term Liabilities	71,67	968.858	2.320.665	1.351.807	1.266.095
Liabilitas Sewa	Lease Liabilities	100,00	33.794	33.794	-	-
Pinjaman jangka panjang	Long term loan	0,64	5.618	883.886	878.268	983.803
Liabilitas imbalan pasca kerja	Post-employment benefits liability	10,60	17.095	178.402	161.307	137.003
Liabilitas pajak tangguhan	Deferred tax liability	100,00	4	4	-	-
Liabilitas Jangka Panjang	Deferred Tax Liability	5,44	56.511	1.096.086	1.039.575	1.120.806
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	42,88	1.025.369	3.416.751	2.391.382	2.386.901

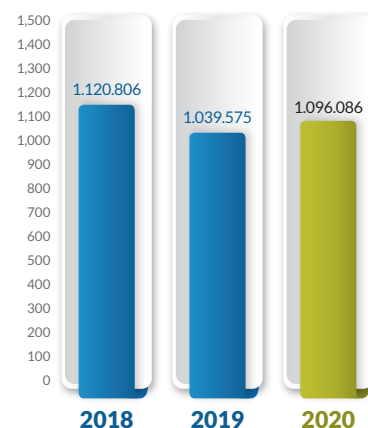
LIABILITAS JANGKA PENDEK Current Liabilities

dalam juta Rupiah/ in millions of Rupiah



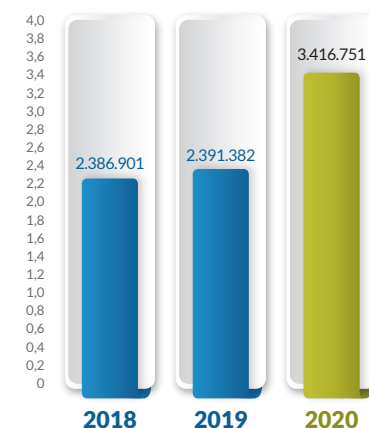
LIABILITAS JANGKA PANJANG Non-Current Liabilities

dalam juta Rupiah/ in millions of Rupiah



LIABILITAS Liabilities

dalam juta Rupiah/ in millions of Rupiah



Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perusahaan pada akhir tahun 2020 sebesar Rp2,32 triliun, meningkat 71,67% atau sebesar Rp968,86 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan karena naiknya biaya yang masih harus dibayar yang cukup signifikan sebesar Rp584,69 miliar dan utang usaha khususnya terhadap pihak berelasi sebesar 49,03% menjadi Rp456,76 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan 5,44% dari Rp1,04 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1,10 triliun pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan karena bertambahnya liabilitas sewa Perseroan menjadi Rp33,79 miliar.

Current Liabilities

As end of 2020, the Company's short-term liabilities amounted to Rp2.32 trillion, increased by 71.67% or Rp968.86 billion. This increase was mainly due to the significant increase in accrued expenses of Rp584.69 billion and trade payables, especially to related parties, by 49.03% to Rp.456.76 billion.

Non-Current Liabilities

The Company's long-term liabilities increased by 5.44% from Rp1.04 trillion in 2019 to Rp1.10 trillion in 2020. This increase was mainly due to the increase in the Company's lease liabilities to Rp33.79 billion.

Ekuitas

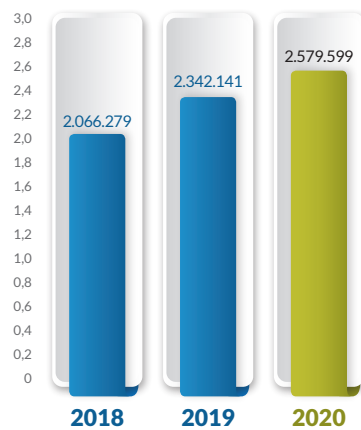
Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2,58 triliun atau naik 10,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya saldo laba Perusahaan tahun lalu dan tahun berjalan.

Equity

As of 31 December 2020 the Company booked total equity of Rp2.58 trillion, increased by 10.14% compared to the previous year. This increase was driven by the increase in the Company's retained earnings last year and current year.

EKUITAS**Equity**

dalam juta Rupiah/ in millions of Rupiah

**Ekuitas (jutaan Rupiah)**

Equity (in million Rupiah)

URAIAN Description		KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
Modal saham	Share capital	-	-	693.709	693.709	693.709
Tambahan modal disetor	Additional paid in capital	-	-	3.000	3.000	3.000
Penghasilan komprehensif lain	Other comprehensive income	8,76	(9.426)	(117.082)	(107.656)	(88.520)
Saldo laba	Retained earnings	11,43	200.306	1.953.176	1.752.870	1.457.872
Ditentukan penggunaannya	Appropriated	-	-	75.943	75.943	75.943
Belum ditentukan penggunaannya	Unappropriated	14,74	247.102	1.924.029	1.676.927	1.381.929
Jumlah Ekuitas	Total Equity	10,14	237.458	2.579.599	2.342.141	2.066.279

ANALISIS LABA RUGI

Perseroan mencatat kenaikan pendapatan sebesar 20,41% menjadi Rp3,06 triliun pada tahun 2020. Seiring dengan hal tersebut, laba tahun berjalan mengalami kenaikan 43,52% dari Rp294 miliar pada tahun 2019, menjadi Rp423,37 miliar pada tahun 2020. Adapun jumlah penghasilan komprehensif Perseroan turut tumbuh 49,98% menjadi Rp413,73 miliar pada tahun 2020.

PROFIT AND LOSS ANALYSIS

The Company recorded an increase in revenue of 20.41% to Rp3.06 trillion in 2020. In line with the increment, profit for the year increased by 43.52% from Rp294 billion in 2019 to Rp423.37 billion in 2020. Total comprehensive income also grew 49.98% to Rp413.73 billion in 2020.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (jutaan Rupiah) Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

URAIAN Description		KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
Pendapatan usaha	Revenue	20,41	518.391	3.058.197	2.539.806	2.050.272
Beban pokok pendapatan	Cost of revenue	17,30	321.718	(2.181.550)	(1.859.832)	(1.399.856)
Laba bruto	Gross profit	28,92	196.673	876.647	679.974	650.416
Beban umum dan administrasi	General and administrative expenses	10,39	29.952	(318.096)	(288.144)	(228.763)
(Beban)/keuntungan lain-lain, bersih	Other income/ (expenses), net	(176,35)	(62.258)	(26.955)	35.303	(41.196)
Pendapatan keuangan	Finance income	79,34	6.669	15.075	8.406	5.151
Beban keuangan	Finance costs	(19,33)	(14.105)	(58.860)	(72.965)	(57.600)
Bagian atas laba bersih ventura bersama	Share in profit of a joint venture	(26,71)	(8.119)	22.283	30.402	15.483
Beban pajak final	Final tax expenses	39,05	7.348	(26.164)	(18.816)	(16.716)
Laba sebelum pajak penghasilan	Profit before income tax	29,34	109.769	483.930	374.161	326.775
Pajak Kini	Current Tax	(7,40)	(5.395)	(67.505)	(72.900)	(52.775)
Pajak Tangguhan	Deferred Tax	239,21	14.618	8.507	(6.111)	6.642
Penyesuaian tahun lalu	Adjustment in respect of prior years	923,03	1.403	(1.555)	(152)	(1.550)
Beban pajak penghasilan	Income tax expenses	(23,51)	(18.610)	(60.553)	(79.163)	(47.683)
Laba tahun berjalan	Profit for the year	43,52	128.379	423.377	294.998	279.092

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (jutaan Rupiah)

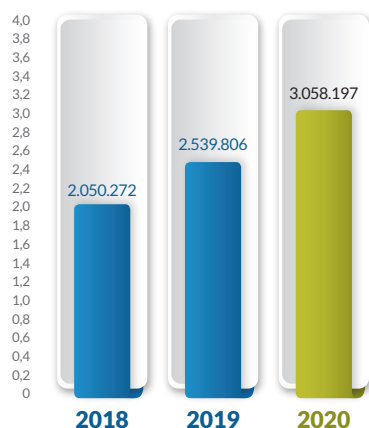
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

URAIAN Description		KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/ Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	Remeasurement of liabilities defined benefit plan	(51,03)	(11.196)	(10.746)	(21.942)	(44.675)
Pajak penghasilan terkait	Related income tax	(60,48)	(1.697)	1.109	2.806	889
Jumlah rugi komprehensif lain setelah pajak	Total other comprehensive loss net of tax	(49,64)	(9.499)	(9.637)	(19.136)	(43.786)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	Total comprehensive income for the year	49,98	137.871	413.733	275.862	235.306
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:	Profit for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk	Owners of the parent entity	43,52	128.379	423.377	294.998	279.092
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:	Total comprehensive income attributable to:					
Pemilik entitas induk	Owners of the parent entity	49,98	137.871	413.733	275.862	235.306

PENDAPATAN USAHA

Revenue

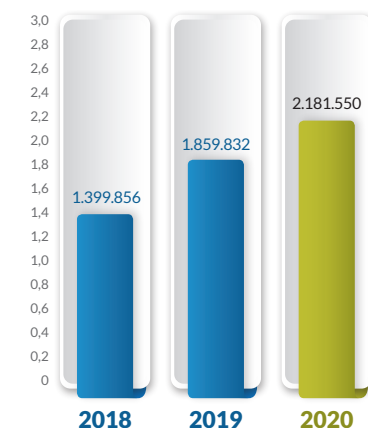
dalam juta Rupiah/ in millions of Rupiah



BEBAN POKOK PENDAPATAN

Cost of Revenue

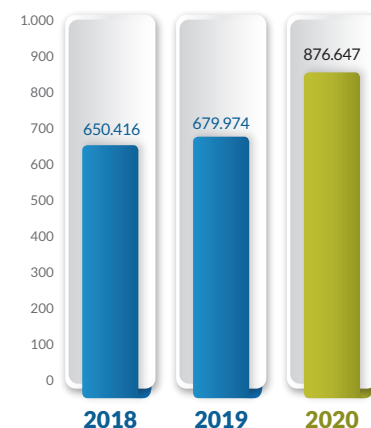
dalam juta Rupiah/ in millions of Rupiah



LABA KOTOR

Gross Profit

dalam juta Rupiah/ in millions of Rupiah



Pendapatan Usaha

Pada tahun 2020, pendapatan usaha Perusahaan tercatat sebesar Rp3,06 triliun. Jumlah tersebut meningkat 20,41% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp2,54 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya jasa diversifikasi usaha yang tumbuh 26,42% atau setara dengan Rp364,10 miliar dari Rp1,38 triliun miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1,74 triliun pada tahun 2020.

Laba Kotor dan Beban Pokok Pendapatan

Perusahaan mencatat kenaikan laba kotor sebesar 28,92% atau setara dengan Rp196,67 miliar dari Rp679,97 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp876,65 miliar pada tahun 2020. Peningkatan ini tak lepas dari tumbuhnya pendapatan usaha Perseroan.

Beriringan dengan hal tersebut, beban pokok pendapatan turut meningkat 17,30% atau setara dengan Rp321,72 miliar menjadi Rp2,18 triliun pada tahun 2020.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha Perusahaan. Perusahaan mencatatkan kenaikan laba tahun berjalan sebesar 43,52% dari Rp294,99 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp423,38 miliar pada tahun 2020.

Operating Revenues

In 2020, the Company's operating revenues were recorded at Rp3.06 trillion. The figure increased by 20.41% compared to Rp2.54 trillion booked in 2019. This increment was mainly driven by an increase in business diversification services that grew 26.42% or equivalent to Rp364.10 billion from Rp1.38 trillion in 2019 to Rp1.74 trillion in 2020.

Gross Profit and Cost of Revenues

The Company recorded an increase in gross profit of 28.92% or equivalent to Rp196.67 billion from Rp679.97 billion in 2019 to Rp876.65 billion in 2020. This increase was related to the growth in the Company's operating revenues.

Consequently, cost of revenue also increased by 17.30% or equivalent to Rp321.72 billion to Rp2.18 trillion in 2020.

Current Year Profit

The Company's profit for the year increased in line with the increase in the Company's operating revenues. The Company recorded an increase in profit for the year of 43.52% from Rp294.99 billion in 2019 to Rp423.38 billion in 2020.

ANALISIS ARUS KAS

Kas dan setara kas PTK pada akhir tahun 2020 menurun 8,68% dari Rp714,50 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp652,48 miliar. Penurunan ini terutama didorong oleh arus kas dari aktivitas investasi Perusahaan yang dilakukan untuk bertahan sekaligus meningkatkan bisnis Perusahaan.

CASH FLOW ANALYSIS

As end of 2020, cash and cash equivalents of PTK decreased by 8.68% from Rp714.50 billion in 2019 to Rp652.48 billion. The decline was mainly driven by cash flow from investing activities to sustain and improve the Company's business.

Laporan Arus Kas Konsolidasian (jutaan Rupiah) Consolidated Statement of Cash Flows (in million Rupiah)

URAIAN Description		KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Diference			
Penerimaan kas dari pelanggan	Cash receipts from customers	(8,99)	(223.736)	2.487.482	2.711.218	1.786.018
Pembayaran kas kepada pemasok untuk beban operasi	Cash paid to suppliers for operating expenses	(20,92)	(419.597)	(1.585.982)	(2.005.579)	(1.251.187)
Pembayaran kepada pekerja	Cash payments to employees	10,34	21.140	(225.633)	(204.493)	(261.593)
Pembayaran atas beban pajak penghasilan badan	Payment of corporate income tax	(3,72)	(2.753)	(71.198)	(73.951)	(62.592)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	Net cash flows provided from operating activities	29,35	177.474	604.669	427.195	210.646
Penerimaan dividen dari ventura bersama	Dividends received from joint venture	40,85	8.555	20.941	12.386	27.558
Penerimaan piutang pembiayaan	Received from lease receivables	(54,39)	(10.406)	19.131	29.537	53.707
Perolehan aset tetap	Acquisition of fixed assets	347,68	600.509	(773.228)	(172.719)	(366.589)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	Net cash flows used for investing activities	460,53	602.360	(733.156)	(130.796)	(285.324)
Penerimaan pinjaman	Proceeds from borrowings	40,79	156.861	384.514	227.653	587.764
Pembayaran pinjaman	Payment of borrowings	(30,57)	(109.415)	(248.520)	(357.935)	(369.211)

Laporan Arus Kas Konsolidasian (jutaan Rupiah)*Consolidated Statement of Cash Flows (in million Rupiah)*

URAIAN Description		KENAIKAN/ PENURUNAN Increase/Decrease		2020	2019	2018
		%	SELISIH Difference			
Pembayaran dividen	Dividend Payments	100,00	2	(2)	-	-
Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa	Payment for lease liability interest expense	100,00	6.021	(6.021)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	Payment of lease obligations	100,00	74.437	(74.437)	-	-
Arus kas bersih (digunakan)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	Net cash flows (used)/provided from financing activities	142,63	185.816	55.534	(130.282)	218.553
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(11,98)	(1.489)	(10.938)	(12.427)	25.977
Kenaikan neto kas dan setara kas	Net increase in cash and cash equivalents	(140,35)	(215.705)	(62.015)	153.690	169.852
Kas dan setara kas awal tahun	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	27,41%	153.690	714.498	560.808	390.956
Kas dan setara kas akhir tahun	Cash and cash equivalents at the end of the year	(9,50)	(62.015)	652.483	714.498	560.808

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2020 sebesar Rp604,67 miliar atau meningkat 41,54% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp427,20 miliar. Peningkatan ini didorong oleh menurunnya pembayaran kas kepada pemasok untuk beban operasi.

Cash Flows from Operating Activities

Net cash flows acquired from operating activities in 2020 achieved Rp604.67 billion or increased 41.54% compared to Rp427.20 billion in 2019. The increment was driven by decreasing cash payments to suppliers for operating expenses.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar 460,53% dari Rp130,80 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp733,16 miliar pada tahun 2020. Peningkatan ini dikarenakan pengeluaran untuk akuisisi aset tetap yang dilakukan oleh Perusahaan tahun 2020 lebih besar dari tahun sebelumnya.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, perusahaan memperoleh kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp55,53 miliar. Sedangkan tahun 2019 perusahaan menggunakan kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp130,28 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pembayaran terutama pembayaran liabilitas sewa jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash flows used in investing activities increased by 460.53% from Rp130.80 billion in 2019 to Rp733.16 billion in 2020. This increase was due to the expenditures for acquisition of fixed assets carried out by the Company in 2020 that was higher than in previous year.

Cash Flows from Financing Activities

Net cash flow from financing activities in 2020 increased compared to 2019. In 2020, the Company received net cash for financing activities of Rp55.53 billion. Meanwhile, in 2019 the Company used net cash from financing activities of Rp130.28 billion. The decrease was mainly due to an increase in payments, especially payments for lease liabilities, if compared to last year.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Berikut adalah rasio keuangan Perusahaan dalam tiga tahun terakhir:

FINANCIAL RATIO ANALYSIS

The Company's financial ratio for the last three years is as follows:

Rasio Keuangan Financial Ratios

URAIAN Description		SATUAN Units	2020	2019	2018	2017	2016
Rasio Likuiditas	Liquidity Ratios						
Rasio Kas	Cash Ratio	%	28,12	52,90	44,36	31,25	37,68
Rasio Lancar	Current Ratio	%	95,92	131,58	119,55	91,39	104,23
Rasio Solvabilitas	Solvability Ratios						
Rasio Jumlah Modal Sendiri terhadap Total Aset	Total Aset Equity to Total Assets	%	43,02	49,48	46,40	47,09	48,70
Kolektibilitas Piutang	Collection Period						
Rata-rata Periode Penagihan Piutang	Average Collection Periods (ACP)	hari days	117,69	84,59	93,89	98,44	130,61
Rasio Profitabilitas	Profitability Ratios						
Ratios Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)	Return on Equity	%	19,64	14,41	15,62	11,10	10,89
Imbalan Investasi (ROI)	Return on Investment	%	13,73	13,57	13,42	10,85	12,13
Marjin Laba Operasi (OPM)	Operating Profit Marjin (OPM)	%	18,26	14,13	20,57	13,54	14,30
Marjin Laba Bersih (NPM)	Net Profit Marjin (NPM)	%	13,84	10,64	13,61	10,28	9,00
Rasio Aktivitas	Activity Ratios						
Ratios Perputaran Persediaan	Inventory Turn Over (ITO)	hari days	-	-	-	0,07	0,03
Perputaran Jumlah Aset	Total Assets Turn Over (TATO)	%	50,98	60,14	46,98	48,92	56,31

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek pada tahun 2020 Perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat rasio lancar dan rasio kas. Tingkat likuiditas yang baik mencerminkan perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Hal ini juga mencerminkan perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan operasional harian dengan baik.

Kemampuan Perusahaan membayar utang jangka pendek dapat dilihat antara lain dari rasio lancar yang turun dari 131,58% pada tahun 2019 menjadi 95,92% pada tahun 2020. Kemudian rasio kas yang menurun dari 52,90% pada tahun 2019 menjadi 28,12% pada tahun 2020. Hal ini tak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi *cashflow* perusahaan namun manajemen telah melaksanakan strategi dalam menjaga stabilitas utang jangka pendek melalui pengelolaan aset lancar maupun kas Perusahaan untuk memastikan terjaminnya pembayaran utang yang akan jatuh tempo 12 bulan ke depan.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Kemampuan Perusahaan membayar utang jangka panjang tercermin pada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas Perusahaan terdiri dari rasio total modal sendiri terhadap total aset. Pada tahun 2020 rasio jumlah modal sendiri terhadap total aset Perusahaan menurun dari 49,48% pada tahun 2019 menjadi 43,02%. Penurunan rasio ini disebabkan karena penambahan aset yang dibiayai utang jangka Panjang untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Ability to Pay Debt and Accounts Receivable Collectability Level

in 2020, the Company's ability to Pay Short-Term Debt has a fairly good level of liquidity. This can be seen from the current ratio and cash ratio. A good liquidity level reflects that the company has no difficulty in paying off its short-term obligations. This also reflects that the company can carry out daily operational activities well.

The Company's ability to pay short-term debt can be seen, among others, from the current ratio, which fell from 131.58% in 2019 to 95.92% in 2020. Then the cash ratio increased from 52.90% in 2019 to 28.12% in 2020. This is related from impact of the COVID-19 pandemic which affects the company's cash flow, but the management has implemented a strategy to maintain short-term debt stability through managing the Company's current assets and cash to ensure guaranteed debt repayments that will mature in the next 12 months.

Ability to Pay Long-Term Debt

The Company's ability to pay long-term debt is reflected in the solvency ratio. The Company's solvency ratio consists of the ratio of total equity to total assets. In 2020, the Company's total equity to total assets ratio decreased from 49.48% in 2019 to 43.02%. The decrease in this ratio was due to the addition of assets backed by long-term debt to increase the company's operational efficiency.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang digunakan untuk mengukur periode waktu yang diperlukan Perusahaan untuk menagih piutang menjadi kas sejak selesainya pekerjaan/jasa dilakukan. Tingkat kolektibilitas piutang terdiri dari *average collection* periode (rata-rata periode penagihan). Rata-rata periode penagihan piutang Perusahaan pada tahun 2020 adalah sebanyak 117,69 hari, lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 84,59 hari. Hal ini dikarenakan pengguna jasa *shipping* juga menyesuaikan pembayaran untuk mempertahankan *cashflow*-nya.

Accounts Receivable Collectability Level

Accounts receivable collectability is used to measure the time period required by the Company to collect receivables into cash since completion of the work/services. Accounts receivable collectability consists of the average collection period (average collection period). The Company's average receivables collection period in 2020 was 117.69 days, slower than 2019 which was 84.59 days. This is because shipping service users also adjust payments to maintain cash flow.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur Modal menggambarkan pembiayaan permanen yang terdiri atas utang dan modal sendiri. Perusahaan harus berupaya memiliki alternatif pendanaan yang efisien, salah satunya dengan memiliki struktur modal yang optimal.

Struktur modal Perusahaan pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICIES

Capital Structure illustrates permanent financing consists of debts and equity portion. The Company should strive for having alternative efficient financing, one of which is through optimized capital structure.

The Company's capital structure for the last 3 (three) years is presented in table below:

Struktur Modal (dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Capital Structure (in millions of Rupiah, unless stated otherwise)

URAIAN Description		2020	%	2019	%	2018	%
Liabilitas	Liabilities	3.416.751	56,98%	2.391.382	50,52%	2.386.901	53,60%
Ekuitas	Equity	2.579.599	43,02%	2.342.141	49,48%	2.066.279	46,40%
Aset	Assets	5.996.350	100,00%	4.733.523	100,00%	4.453.180	100,00%

Struktur modal perusahaan sedikit mengalami perubahan seiring dengan peningkatan aset yang dibiayai oleh liabilitas. Hingga akhir tahun 2020 komposisi aset Perusahaan yang dibiayai oleh ekuitas sebesar 43,02%, menurun dari semula 49,48% pada tahun 2019.

The Company's capital structure has slightly changed in line with the increase in assets financed by liabilities. As end of 2020, composition of the Company's assets financed by equity was 43.02%, a decrease from formerly was 49.48% in 2019.

Kebijakan Struktur Modal

Perusahaan terus berupaya mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis, profitabilitas, serta mempertahankan kepercayaan investor, deposan, pelanggan, dan pasar.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan pencerminan kenegaraan di bidang perpajakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, PTK berkomitmen dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak.

Tahun 2020, PTK sebagai Wajib Pajak telah memberikan kontribusi Perusahaan dalam pemenuhan kewajiban PPh Badan. Jumlah setoran PPh Badan di tahun 2020 sebesar Rp67,51 miliar atau menurun 7,40% dibandingkan dengan tahun 2019.

Kontribusi Pajak PTK (jutaan Rupiah)

PTK Tax Contribution (Corporate Income Tax)

URAIAN Description	KENAIKAN/PENURUNAN Increase/Decrease		2020	2019	2018
	%	SELISIH Difference			
Pajak Kini Current Tax	(7,40)	(5.395)	(67.505)	(72.900)	(52.775)

Capital Structure Policy

The Company continued to maintain solid capital position to support business growth, profitability, as well as to uphold the trust from investors, depositors, customers, and market.

CONTRIBUTIONS TO THE COUNTRY

Responsibility on tax payment obligation becomes a reflection of nationalism in taxation field for the national development. Therefore, PTK is committed to fulfill the obligation to pay taxes, as a taxpayer and as a tax collector.

In 2020, PTK as a Taxpayer has contributed to the Company in fulfilling the Corporate Income Tax obligations. Total corporate income tax deposits in 2020 amounted to Rp.67.51 billion or decreased by 7.40% compared to 2019.

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Key Performance Indikator (KPI) PTK sesuai Kontrak Manajemen antara Direksi dan Komisaris Perusahaan dengan Pemegang Saham menetapkan 4 Perspektif sebagai berikut:

Group KPI

1. EBITDA Subholding Shipping

Division KPI

1. Financial
2. Operational Excellence
3. Growth & Governance

Realisasi KPI tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Realisasi KPI tahun 2020

KPI Realization in 2020

KPI	TOTAL
Group KPI	12
1. EBITDA Subholding Shipping	120
Division KPIs	97
1. Financial	10,01
2. Operational Excellence	61,92
3. Growth & Governance	28,96
Total	102,81

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) AND COMPANY SOUNDNESS LEVEL

Key Performance Indicators (KPI) of PTK in accordance with the Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and the Shareholders set 4 perspectives as follows:

Group KPI

1. EBITDA Subholding Shipping

Division KPI

1. Financial
2. Operational Excellence
3. Growth & Governance

KPI Realization in 2020 is as follows:

Nama KPI	Bobot	Satuan	Target KPI 2020	Realisasi KPI 2020	% Realisasi terhadap Target KPI 2020	Adjusted Performance (%)	Weighted Performance (%)
Group KPIs	10						12,00
1 EBITDA Subholding Shipping	100	Juta USD	117,10	645,5	551,20	120,00	120,00
	100						
Division KPIs	90						90,81
Financial	10						10,01
1 EBITDA	45	Juta USD	48,90	56,51	115,58	115,58	52,01
2 Cost Per Commission Day	25	USD	1950	1180	139,49	120,00	30,00
3 Collection Period							
a) Pertamina	15	Hari	75	149	0,83	0,83	0,12
b) Non-Pertamina	15	Hari	75	50	132,78	120,00	18,00
	100						
Operational Excellence	60						61,92
1 Average Commission Days Kapal Milik	30	Hari	355	355,82	100,23	100,23	30,07
2 % Realisasi Commercial per Commision Days	30	%	97	95,83	98,79	98,79	29,64
3 Transportation Losses (R2)	20	%	0,07	0	200,00	105,00	21,00
4 Management Walkthrough	10	#	10	16	160,00	105,00	10,50
5 HSSE Excellence - LTIR Pertamina Group	10	Rate	0,1	0,02	180,00	120,00	12,00
	100						
Growth & Governance	30						28,96
1 Strategic Initiatives	10	%	100	100	105,00	105,00	10,50
2 Customer Satisfaction Index	10	Skala Likert	3,92	3,72	94,90	94,90	9,49
3 Realisasi Investasi							
a) Anggaran Biaya Investasi	20	%	85	76,58	90,09	90,09	18,02
b) Progress Fisik	20	%	90	76,10	84,55	84,55	16,91
4 KSI (Knowledge, Standardization, & Innovation)	10	%	95	100	105,26	105,00	10,50
5 Risk Management Implementation	10	%	100	100	105,00	105,00	10,50
6 GCG Score	10	%	81	81,94	101,17	101,17	10,12
7 Follow-up HSSE Assessment Recommendation	10	%	100	100	105,00	105,00	10,50
	100						
TOTAL KPI PERFORMANCE							102,81

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Total Nilai Kinerja Perusahaan pada tahun 2020 sebesar 90,00 dengan klasifikasi SEHAT (AA) lebih rendah dari RKAP yang sebesar 91,00 (AA). Hal ini terutama disebabkan karena nilai kinerja pertumbuhan dan operasi tahun 2020 yang tercatat lebih rendah dibandingkan dengan RKAP.

Berikut gambaran penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dari aspek yang dinilai:

Company Soundness Level

The total Company Performance Value in 2020 is 90.00 with the HEALTHY (AA) classification lower than the RKAP of 91.00 (AA). This was mainly due to the lower value of growth and operating performance in 2020 compared to the RKAP.

The overview on assessment of the Company's Soundness Level from the assessed aspects is presented below:

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Soundness Level

URAIAN Description		2020		2019	
		PENCAPAIAN Achievement	NILAI Value	PENCAPAIAN Achievement	NILAI Value
I. Kinerja Keuangan / Financial Performance					
Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)	Return on Equity (ROE)	19,64%	20,00	14,41%	20,00
Imbalan Investasi (ROI)	Return on Investment (ROI)	13,73%	15,00	13,57%	15,00
Marjin Laba Operasi (OPM)	Operating Profit Margin (OPM)	18,26%	2,00	14,13%	3,00
Marjin Laba Bersih (NPM)	Net Profit Margin (NPM)	13,84%	2,00	10,64%	3,00
Rasio Kas	Cash Ratio	28,12%	5,00	52,90%	5,00
Rasio Lancar	Current Ratio	95,92%	3,00	131,58%	5,00
Periode Penagihan Piutang	Collection Period (CP)	117,67 hari	1,00	84,59 hari	2,00
Perputaran Persediaan	Inventory Turn Over	0,00 hari	0,00	0,00 hari	0,00
Perputaran Total Aset	Total Assets Turn Over	50,98%	2,00	60,14%	1,50
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset	Ratio of Total Equity of Acompany to Total Assets	43,02%	7,00	49,48%	7,00
Time Interest Earned Ratio (TIER)	Time Interest Earned Ratio (TIER)	15,59	3,00	8,69	3,00
Nilai Kinerja Keuangan (NKK)	Value of Financial Performance (NKK)	63,00		72,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Keuangan	Classification of Financial Performance	Sehat Healthy		Sehat Healthy	
II. Kinerja Pertumbuhan/ Growth Performance					
Aset Productivity Growth (ASPG)	Aset Productivity Growth (ASPG)	2,69%	1,00	(15,91%)	0,00
Sales Growth (SALG)	Sales Growth (SALG)	10,32%	2,00	35,21%	2,00
Net Profit Margin Growth (NPMG)	Net Profit Margin Growth (NPMG)	12,909	2,00	(21,83%)	0,00
Sales to Total Assets Growth (STAG)	Sales to Total Assets Growth (STAG)	(12,92%)	0,00	27,20	0,00
Net Profit Growth (NPG)	Net Profit Growth (NPG)	43,52%	2,00	5,70%	2,00
Nilai Kinerja Pertumbuhan (NKP)	Value of Growth Performance	7,00		5,00	

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Soundness Level

URAIAN Description		2020		2019	
		PENCAPAIAN Achievement	NILAI Value	PENCAPAIAN Achievement	NILAI Value
Klasifikasi Tingkat Kinerja Pertumbuhan	Classifiaction Level of Growth Performance	Tumbuh Sedang Medium Growth		Tumbuh Sedang Medium Growth	
III. Kinerja Operasi / Operational Performance					
Commission Days	Commission Days	104,04%	5,00	97,03%	1,00
HSSE	HSSE	105,00%	5,00	100,00%	3,00
Nilai Kinerja Operasi (NKO)	Value of Operational Performance	10,00		4,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Operasi	Classifiaction Level of Operational Performance	Tumbuh Tinggi High Growth		Baik Good	
IV. Kinerja Administrasi / Administrative Performance					
Laporan Keuangan Perusahaan Bulanan	Company's Monthly Financial Reports	7 hari kalender/ Calender Days	2,00	7 hari kalender/ Calender Days	2,00
Laporan Manajemen Perusahaan Bulanan	Company's Monthly Management Report	≤16 hari kalender/ Calender Days	2,00	≤16 hari kalender/ Calender Days	2,00
Laporan Keuangan Tahunan Audited	Audited Annual Financial Report	Januari	3,00	Januari	3,00
Rancangan RKAP	RKAP Draft	Juli	3,00	Juli	3,00
Nilai Kinerja Administrasi (NKA)	Value of Administrative Performance	10,00		10,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Administrasi	Classifiaction Level of Administrative Performance	Tertib Orderly		Tertib Orderly	
IV. Penilaian Tingkat Kinerja Perusahaan/ Assessment of Company's Performance Level					
Kinerja Keuangan	Financial Performance	63,00		72,00	
Kinerja Pertumbuhan	Growth Performance	7,00		5,00	
Kinerja Operasional	Operational Performance	10,00		4,00	
Kinerja Administrasi	Administration Performance	10,00		10,00	
Total Nilai Kinerja Perusahaan	Total value of Company Performance	90,00		91,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Perusahaan	Classifiaction Level of Company Performance	AA SEHAT AA HEALTHY		AA SEHAT AA HEALTHY	

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020 SERTA PROYEKSI TAHUN 2021

Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Operasional

Beberapa indikator operasional menunjukkan pencapaian melampaui target 2020 seperti jumlah *operation days*, *Contract Of Affreightment* (COA), serta diversifikasi usaha. Adapun indikator yang belum tercapai adalah jumlah *commission days*, *operation days*, COA, serta *charter & brokerage*. Perusahaan juga telah menetapkan target untuk tahun mendatang sebagai berikut:

COMPARISON BETWEEN 2020 TARGET AND REALIZATION AND THE 2021 PROJECTION

Comparison between Target, Realization and Operational Projection

Several operational indicators show the achievement of exceeding the 2020 target, such as the number of operation days, Contract of Affair (COA), and business diversification. The indicators that have not been reached are the number of commission days, operation days, COA, as well as charters & brokerage. The company has also set targets for the following year:

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Operasional (dalam Ribuan Rp)

Comparisons between Target, Realization, and Operational Projections (in Rp thousand)

URAIAN Description	SATUAN Unit	TARGET Target 2020	REALISASI 2020 Realization	PENCAPAIAN 2020 Achievement	PROYEKSI Proyeksi 2021
Commission days	hari/ days	44.196	36.646	82,92%	67.425
Operation days	hari/ days	43.146	34.065	78,95%	66.395
Call Keagenan/ Agency Call	call	5.545	16.163	291,49%	22.370
Charter & Brokerage	hari/ days	12.460	9.842	78,99%	10.063
Contract of Affreightment (COA)	KL	400.000	310.737	77,68%	1.000.000
Diversifikasi Usaha Business Diversivication	miliar/ billion	1.444,83	1.742,35	120,59%	2.287,50

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Keuangan

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan

Pada tahun 2020 jumlah aset Perseroan terealisasi sebesar Rp5,99 triliun atau 104,53% terhadap target

Comparison between Financial Targets, Realizations and Projections

Comparison between Target, Realization and Projection of Financial Position

In 2020, the total realized assets of the Company amounted to Rp5.99 trillion or 104.53% of the target

yang telah ditetapkan sebesar Rp5,74 triliun. Jumlah liabilitas Perseroan sebesar Rp 3,42 triliun atau 188,47% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1,81 triliun. Adapun jumlah ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp2,58 triliun atau 94,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,72 triliun. Adapun Perusahaan telah menetapkan target untuk satu tahun mendatang sebagai berikut:

set at Rp5.74 trillion. The total liabilities of the Company amounted to Rp3.42 trillion or 188.47% of the set target of Rp1.81 trillion. The total equity of the Company was recorded at Rp2.58 trillion or 94.83% of the set target of Rp2.72 trillion. The Company has set targets for the following year:

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan (ribuan Rupiah) Comparisons between Target, Realization, and financial Projections (in thousand Rp)

URAIAN Description	TARGET Target 2020	REALISASI Realization 2020	PENCAPAIAN Achievement 2020	PROYEKSI Proyeksi 2021
Jumlah Aset / <i>Total Assets</i>	5.736.530	5.996.349	104,53%	6.527.512
Jumlah Liabilitas / <i>Total Liabilities</i>	1.812.858	3.416.751	188,47%	3.650.208
Jumlah Ekuitas / <i>Total Equity</i>	2.720.247	2.579.599	94,83%	2.877.304

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Laba Rugi

Pada tahun 2020, pendapatan usaha Perseroan tercapai 103,63% atau terealisasi Rp3,06 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp2,95 triliun. Sedangkan laba tahun berjalan tercapai 112,16% atau terealisasi Rp423,38 miliar. Adapun Perseroan telah menetapkan target satu tahun mendatang untuk pendapatan usaha sebesar Rp4,16 triliun dan laba tahun berjalan sebesar Rp416,42 miliar.

Comparison between Target, Realization, and Projection of Profit and Loss

In 2020, the Company's operating revenues reached 103,63% or realized Rp3.06 trillion from the targeted Rp2,95 trillion. Meanwhile, the current year's profit reached 112.16% or achieved Rp423.38 billion. The Company has set a target for the next year for an operating income of Rp4,16 trillion and a profit for the year of Rp416,42 billion.

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Laba Rugi (juta Rupiah) Comparisons between Target, Realization, and Profit or Loss Projections (in million Rupiah)

URAIAN Description	TARGET Target 2020	REALISASI Realization 2020	PENCAPAIAN Achievement 2020	PROYEKSI Proyeksi 2021
Pendapatan usaha <i>Revenue</i>	2.951.008	3.058.197	103,63%	4.176.436
Beban pokok pendapatan <i>Cost of revenue</i>	(2.073.803)	(2.181.549)	105,20%	(2.939.244)
Laba kotor <i>Gross profit</i>	877.206	876.647	103,63%	1.237.192
Laba sebelum pajak penghasilan <i>Profit before income tax</i>	517.657	483.929	93,48%	725.054
Beban pajak penghasilan <i>Income tax expenses</i>	(77.318)	(60.552)	78,32%	124.384
Laba tahun berjalan <i>Profit for the year</i>	377.492	423.377	112,16%	416.417

Realisasi Pemasaran

PT Pertamina Trans Kontinental merupakan Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang Pelayaran dan Jasa Maritim. PT Pertamina Trans Kontinental memiliki 11 (sebelas) cabang, 25 (dua puluh lima) sub cabang, 4 (empat) Anak Perusahaan dan 1 (satu) Perusahaan Patungan serta 1 (satu) proyek khusus *shorebase*, dengan kegiatan usaha meliputi :

Marketing Realization

PT Pertamina Trans Kontinental is a subsidiary of PT. Pertamina (Persero) which is engaged in Shipping and Maritime Services. PT Pertamina Trans Kontinental has 11 (eleven) branches, 25 (twenty five) sub-branches, 4 (four) Subsidiaries and 1 (one) Joint Venture Company and 1 (one) special shorebase project, with business activities including:

SEGMENT BISNIS Business Segment	LINGKUP BISNIS Business Scope	DESKRIPSI Deskripsi
<i>Shipping Activities</i>	Utilisasi Kapal Milik <i>Utilization of Owned Vessels</i>	Mencakup kegiatan: a. Transportir BBM, produk olahan kimia dan gas cair menggunakan kapal tanker, <i>tug & barge</i> dan SPOB. Kegiatan bisnis ini dilakukan menggunakan skema kontrak sewa kapal (<i>time charter</i> dan <i>spot charter</i>) dan <i>contract of affreightment</i> (COA). b. Kapal <i>harbour tug</i>, <i>mooring boat</i> dan <i>small marine craft</i> untuk menunjang operasional sarana pelabuhan, membantu masuk-keluar kapal tanker di area pelabuhan/TBBM dan navigasi di area marine. c. <i>Offshore supply vessel</i> (AHTS, <i>Utility vessel</i>/MPV) untuk mendukung kegiatan transportasi logistik di area lepas pantai. Includes activities: a. Transport fuel, chemical processed products and liquefied gas using tankers, tug & barges and SPOB. This business activity is carried out using a ship charter contract scheme (time charter and spot charter) and a contract of affreightment (COA). b. Harbor tugs, mooring boats and small marine craft to support the operation of port facilities, assisting the entry and exit of tankers in the port area / TBBM and navigation in the marine area. c. Offshore supply vessel (AHTS, Utility vessel / MPV) to support logistics transportation activities in offshore areas.
	Utilisasi kapal <i>back-to-back</i> <i>Back-to-back vessel utilization</i>	PTK menyewa dan memasarkan kapal milik pihak ketiga kepada pelanggan PTK/ pemberi kerja, dengan perhitungan margin pendapatan sebagai jasa perantara (<i>ship brokerage</i>). PTK leases and markets ships belonging to third parties to PTK customers / employers, by calculating the income margin as a ship brokerage.
	Jasa transportir BBM dengan sistem COA <i>Jasa transportir BBM dengan sistem COA</i>	Jasa pengangkut muatan BBM yang menggunakan basis perhitungan tarif angkut per jumlah muatan melalui pengoperasian kapal milik PTK dan/ atau kapal milik pihak ketiga secara <i>back-to-back</i>. Fuel carrier services that use the basis of calculating freight rates per total cargo through the back-to-back operation of ships owned by PTK and / or vessels owned by third parties.
	Pengelolaan kapal non-milik <i>Management of non-owned vessels</i>	PTK melalui Cabang dan Anak Perusahaan (PT Peteka Karya gapura) mengelola kapal milik Pertamina dari sisi pengoperasian kapal (<i>ship management</i>) termasuk <i>maintenance</i> dan <i>repair</i>. PTK through its Branch and Subsidiary (PT Peteka Karya Gapura) manages Pertamina's ships from the ship operation side (<i>ship management</i>) including maintenance and repair.

SEGMENT Business Segment	LINGKUP BISNIS Business Scope	DESKRIPSI Deskripsi
Marine Services	Jasa keagenan kapal Ship agency services	Mencakup kegiatan: - Keagenan kapal tanker milik PTK dan tanker charter milik Pertamina. - Pengurusan perizinan masuk dan keluar kapal di pelabuhan (<i>inward & outward clearance</i>) - Pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor & Ekspor barang (PIB & PEB) - Menyiapkan kebutuhan kapal dan <i>handling crew</i> - Mempertanggungjawabkan jasa layanan kapal. Includes activities: - PTK's tanker agency and Pertamina's tanker charter. - Management of ship entry and exit permits at the port (<i>inward & outward clearance</i>) - Processing of Import & Export Declaration documents (PIB & PEB) - Prepare ship and handling crew needs - Account for ship services.
	Port Operation Services Port Operation Services	Mencakup kegiatan: - Pengurusan administrasi Pelabuhan Khusus - Kegiatan <i>Recognized Security organization</i> dan ISPS Code di pelabuhan Includes activities: - Special Port administration - Recognized Security organization and ISPS Code activities at the port
	Pengelolaan kapal non-milik Management of non-owned vessels	PTK melalui Cabang dan Anak Perusahaan (PT Peteka Karya Gapura) mengelola kapal milik Pertamina dari sisi penyediaan awak kapal (<i>Crewing</i>) PTK through its Branch and Subsidiary (PT Peteka Karya Gapura) manages Pertamina's ships from the <i>crewing</i> side.
	Bisnis jasa marine lain yang dijalankan oleh Cabang & Anak Perusahaan PTK Other marine service businesses run by PTK Branch & Subsidiaries	- Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Marine (JAPOM) dan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) di lingkungan Pertamina oleh PT Peteka Karya Gapura (AP PTK) - Revitalisasi sarana tambat milik Pertamina oleh PT Peteka Karya Jala (AR PTK) - Pengelolaan Limbah di Pelabuhan melalui AP PT Peteka Karya Tirta (AR PTK) - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal oleh AP PT Peteka Karya Samudera (AP PTK) - Provision of marine operational support services (JAPOM) and labor (<i>labor supply</i>) within Pertamina by PT Peteka Karya Gapura (AP PTK) - Revitalization of Pertamina's mooring facilities by PT Peteka Karya Jala (AR PTK) - Waste Management at Ports through AP PT Peteka Karya Tirta (AR PTK) - Provision and / or ship delay services by AP PT Peteka Karya Samudera (AP PTK)

SEGMENT BISNIS Business Segment	LINGKUP BISNIS Business Scope	DESKRIPSI Deskripsi
Logistics	Badan usaha Pelabuhan Port business entities	- Jasa keagenan yang mengurus penerimaan, penyimpanan, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterima ke tangan penerima (<i>freight forwarding</i>) oleh PT Peteka Karya Samudera (AP PTK) - Agency services that take care of receiving, storing, packing, measuring, weighing, handling document completion, issuing transportation documents, calculating transportation costs, insurance claims by sending these goods until they are received into the hands of the recipient (<i>freight forwarding</i>) by PT Peteka Karya Samudera (AP PTK) - Jasa membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/ truk ke dalam kapal (<i>stavedoring</i>) oleh PT Peteka Karya Samudera (AP PTK) - Services of unloading goods from the ship to the dock / barge / truck or loading goods from the dock / barge / truck onto the ship (<i>stavedoring</i>) by PT Peteka Karya Samudera (AP PTK) - Jasa pemindahan barang setelah di bongkar dari kapal di dermaga ke gudang atau tempat penumpukan (<i>cargodoring</i>) oleh PT Peteka Karya Samudera (AP PTK) - Services for moving goods after being unloaded from ships at the dock to warehouses or <i>cargodoring</i> by PT Peteka Karya Samudera (AP PTK) - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk labuh-tambat kapal, bongkar-muat barang & peti kemas - Provision and / or jetty services for mooring, loading / unloading goods & containers - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal - Provision and / or ship delay services
	Pengelolaan Logistik Logistics Management	- Pengelolaan air baku untuk kebutuhan kapal dan industri oleh PT Peteka Karya Tirta (APPTK). - Provision of raw water for ship and industrial needs by PT Peteka Karya Tirta (APPTK). - Penyediaan Tenaga Kerja (Man Power) untuk kebutuhan di lingkungan PTK Group dan di luar PTK Group. - Provision of Manpower (Man Power) for the needs of the PTK Group and outside the PTK Group. - Bunker agent & bunker handling. - Bunker agent & bunker handling. - Pengelolaan Logistic Base terpadu - Integrated Logistic Base Management

Sejalan dengan target PT Pertamina (Persero) sebagai *Parent Company* untuk menjadi *Asian Energy Champion* di tahun 2025, PTK juga menetapkan target untuk menjadi Perusahaan Jasa Maritim yang Terintegrasi dengan Skala Global pada Tahun 2026. Sebagai bagian dalam mencapai target tersebut dalam menjalankan bisnisnya PTK menerapkan prinsip

In line with target of PT Pertamina (Persero) as the *Parent Company* to become an *Asian Energy Champion* in 2025, PTK also has set the target to become a *Global Integrated Maritime Services Company* by 2026. As part of the target achievement in running its business, PTK applies the principles *Good Corporate Governance* which includes Transparency,

tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang meliputi *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence* dan *Fairness* (TARIF) serta prinsip kehati-hatian (*prudent*) berdasarkan analisis manajemen risiko.

Dengan tema strategisnya "*Committed to Deliver World Class Service Excellence*" komitmen bersama seluruh jajaran di PTK untuk secara berkelanjutan melakukan perbaikan kinerja dan semangat memberikan layanan terbaik secara berkelas dunia kepada *stakeholder*-nya, akan memberikan energi positif bagi Perusahaan dalam menghadapi tantangan dan pencapaian target tahun 2020. Program kerja utama Tahun 2020 yaitu melakukan penambahan jumlah armada dan pengembangan diversifikasi usaha (*dredging, logistic base, fresh water supply, crewing agent* dan keagenan) dengan target Laba Bersih Tahun 2020 (RKAP Revisi) sebesar Rp377,49 miliar melalui pencapaian *Revenue* yang diperkirakan sebesar Rp3,11 triliun.

1. PTK telah berhasil membangun *Harbour Tug* Pertama di Indonesia yaitu Transko Rajawali yang menggunakan bahan bakar *Dual Fuel* yaitu solar dan LNG yang ramah lingkungan dan dioperasikan di PT Perta Arun Gas dengan kontrak selama 12 tahun.
2. Tahun 2019 PTK telah berhasil menambah armada kapal milik untuk mensupport Armada kapal sarana pelabuhan *Harbour Tug* dan *Mooring Boat Phase 1* dan 2 untuk memenuhi kebutuhan Marine Pertamina: 10 unit *Harbour Tug* dan 29 unit *Mooring Boat*.
3. Kapal milik jenis tanker telah terutilisasi di Pertamina Shipping sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) unit kapal dan 1 (satu) unit kapal terutilisasi di PT Pertamina International Shipping: Pertamina Shipping
 - a. Small I (1500 – 3500 KL) sebanyak 4 (empat) unit kapal;
 - b. Small II (6500 KL) sebanyak 3 (tiga) unit kapal;
 - c. Asphalt Tanker sebanyak 1 (satu) unit kapal. PT Pertamina International Shipping: Small I (3500 KL) sebanyak 1 (satu) unit

Accountability, Responsibility, Independence and Fairness (TARIF) and prudent principles based on risk management analysis.

With its strategic theme "*Committed to Deliver World Class Service Excellence*", the joint commitment of all employees at PTK to continuously improve performance and the spirit of providing the best world-class service to its stakeholders will provide positive energy for the Company in facing challenges and achieving the target 2020. The main work program for 2020 is to increase the number of fleets and develop business diversification (*dredging, logistic base, fresh water supply, crewing agent and agency*) with a target of 2020 Net Profit (Revised RKAP) of Rp377.49 billion through the achievement of *Revenue* which is estimated at Rp3.11 Trillion.

1. PTK has succeeded in building the first Harbor Tug in Indonesia, such as Transko Rajawali which uses Dual Fuel, namely diesel and LNG which are environment-friendly and is operated at PT Perta Arun Gas with a 12-year contract.
2. In 2019, PTK has succeeded in increasing its own fleet of vessels to support the Harbor Tug and Mooring Boat Phase 1 and 2 port facilities to meet Pertamina's Marine needs: 10 Harbor Tug units and 29 Mooring Boat units.
3. Vessels belonging to this type of tanker have been utilized at Pertamina Shipping up to 2019, as many as 8 (eight) units of vessels and 1 (one) unit of fully utilized vessels at PT Pertamina International Shipping: Pertamina Shipping
 - a. Small I (1500 - 3500 KL), 4 (four) ships;
 - b. Small II (6500 KL), 3 (three) ships; and
 - c. Asphalt Tanker, as many as 1 (one) unit ship. PT Pertamina International Shipping: Small I (3500 KL) of 1 (one) unit

4. Penggunaan *Plan Maintenance System & Fleet Management* Peningkatan performance kapal dengan peningkatan.
5. Pencapaian Pemasaran kapal dengan target *operation days /commission days* sebesar 95%.

4. Use of *Plan Maintenance System & Fleet Management* Increasing ship performance with improvements.
5. Achievement of ship marketing with a target *operation days/commission days* of 95%.

INVESTASI BARANG MODAL

Realisasi investasi tahun 2020 tercapai sebesar USD52.497 (ribu), atau 76,58% dari RKAP tahun 2020 yang ditargetkan sebesar USD68.554 (ribu).

Realisasi Investasi Tahun 2020

Total Investasi pada RKAP 2020 adalah USD68.554 (ribu) yang terdiri dari Investasi *Business Development* sebesar USD67.407 (ribu) dan *Non Business Development* sebesar USD1.147 (ribu).

Realisasi Pembayaran Proyek Investasi Tahun 2020:

- Bulan Januari 2020 pembayaran 5 HT 3200 HP sebesar USD795 ribu dan pembayaran 18 MB sebesar USD1.424 ribu
- Bulan Pebruari 2020 pembayaran 5 HT 3200 HP sebesar USD795 ribu dan pembayaran 18 MB sebesar USD4.294 ribu
- Bulan Maret 2020 Pembayaran 20 MB sebesar USD530 ribu dan Pembayaran 2 MB PAG USD 99 Ribu dengan total Maret USD629 ribu.
- Bulan April 2020 pembayaran 4 HT 3200 HP sebesar USD2.818 ribu dan pembayaran 1 MB sebesar USD39 ribu.
- Bulan Mei 2020 pembayaran 2 HT 3200 HP sebesar USD1.489 ribu dan pembayaran 4 MB sebesar USD121 ribu.
- Bulan Juni 2020 pembayaran 8 HT 3200 HP sebesar USD6.213 ribu dan 5 *Aluminium Boat* sebesar USD 250 ribu serta 14 MB sebesar USD870 ribu.
- Bulan Juli 2020 pembayaran 4 HT 3200 HP sebesar USD 3.045 ribu, 5 MB sebesar USD233 ribu dan 7 MB sebesar USD415 ribu serta

CAPITAL GOODS INVESTMENT

Investment realization in 2020 was reached USD52.497 thousand, or 76.58% of the 2020 RKAP which is targeted at USD68,554 (thousand).

Realization of Investment in 2020

The total investment in the 2020 RKAP is USD68,554 (thousand) consisting of *Business Development* Investment of USD67,407 (thousand) and *Non Business Development* investment of USD1,147 (thousand).

Realization of Investment Project Payments in 2020:

- In January 2020, payment for 5 HT 3200 HP amounted USD 795 thousand and 18 MB payment amounted USD 1,424 thousanda
- In February 2020 payment of 5 HT 3200 HP in the amounted USD 795 thousand and a payment amounted 18 MB of USD 4,294 thousand
- In March 2020 20 MB payment of USD 530 thousand and payment of 2 MB PAG USD 99 thousand for a total March of USD 629 thousand.
- In April 2020, payment for 4 HT 3200 HP amounted USD 2,818 thousand and payment for 1 MB is USD 39 thousand.
- In May 2020, the payment for 2 HT 3200 HP amounted USD 1,489 thousand and a payment for 4 MB is USD 121 thousand.
- In June 2020, the payment of 8 HT 3200 HP in the amount of USD 6,213 thousand and 5 Aluminum Boat in the amount of USD 250 thousand and 14 MB in the amount of USD 870 thousand.
- In July 2020, payment of 4 HT 3200 HP amounting to USD 3,045 thousand, 5 MB of USD

- pembayaran 2 *forklift* sebesar USD315 ribu.
- Bulan Agustus 2020 pembayaran 10 *Fighting Craft Big* sebesar USD182 ribu, 6 MB sebesar USD395 ribu dan 5 *Fighting Craft Small* sebesar USD82 ribu, 41 RBB *Oil Combat* sebesar USD1.495 ribu, serta pembayaran 3 RBB *Passenger* sebesar USD59 ribu.
 - Bulan September 2020 pembayaran 1 Pilot *Boat* sebesar USD360 ribu dan 1 lot *Heavy Equipment* sebesar USD483 ribu.
 - Bulan Oktober 2020 pembayaran 4 HT 3200 HP sebesar USD 2.926 ribu, *Aluminium Boat Delivery* USD46 ribu, *Crew Boat* USD373 ribu, *Mooring Boat* USD4 ribu, 1 Lot *Heavy Equipment* USD143 ribu.
 - Bulan Nopember 2020 pembayaran 7 HT 3200 HP sebesar USD6.323 ribu, *Crew Boat* USD444 ribu, *Mooring Boat* USD63 ribu.
 - Bulan Desember 2020 pembayaran 4 HT 3200 HP sebesar USD4.403 ribu, 8 HT 3200 KTU sebesar USD8.201, 7 *Aluminium Boat* sebesar USD97 ribu, *LDPE Boat* sebesar USD 51 ribu, 14 RBB *Passenger* dan *Oil Combat* sebesar USD545 ribu, *Crew Boat* USD19 ribu, dan pembuatan sertifikat tanah (HGB) Kantor Pusat PTK sebesar USD373 ribu.

Kegiatan Investasi Pengembangan

Investasi *Business Development* sebesar USD67.407 (ribu) (*equivalen* Rp1.011,12 miliar) dan *Non Business Development* sebesar USD1.147 (ribu) (*equivalen* Rp16,13 miliar). Total Investasi pada RKAP 2020 adalah USD68.554 (ribu) (*equivalen* Rp1.027,25 miliar).

233 thousand and 7 MB of USD 415 thousand and payment of 2 forklifts of USD 315 thousand.

- In August 2020, the payment of 10 *Fighting Craft Big* amounting to USD 182 thousand, 6 MB of USD 395 thousand and 5 *Fighting Craft Small* of USD 82 thousand, 41 RBB *Oil Combat* of USD 1,495 thousand, and payment of 3 RBB *Passenger* of USD 59 thousand.
- In September 2020, the payment of 1 Pilot *Boat* in the amount of USD 360 thousand and 1 lot of *Heavy Equipment* amounting to USD 483 thousand.
- In October 2020 payment of 4 HT 3200 HP in the amount of USD 2,926 thousand, *Aluminum Boat Delivery* USD 46 thousand, *Crew Boat* USD 373 thousand, *Mooring Boat* USD 4 thousand, 1 Lot *Heavy Equipment* USD 143 thousand.
- November 2020 payment of 7 HT 3200 HP in the amount of USD 6.323 thousand, *Crew Boat* USD 444 thousand, *Mooring Boat* USD 63 thousand.
- In December 2020 payment of 4 HT 3200 HP in the amount of USD 4,403 thousand, 8 HT 3200 KTU of USD 8,201, 7 *Aluminum Boat* of USD 97 thousand, *LDPE Boat* of USD 51 thousand, 14 RBB *Passenger* and *Oil Combat* of USD 545 thousand, *Crew Boat* USD 19 thousand, and the issuance of land certificates (HGB) at the PTK Head Office amounting to USD 373 thousand.

Development Investment Activities

Investment in *Business Development* amounted USD67,407 (thousand) (*equivalent* to Rp1,011.12 billion) and *Non Business Development* amounting to USD1,147 (thousand) (*equivalent* to Rp16.13 billion). The total investment in the 2020 RKAP is USD68,554 (thousand) (*equivalent* to Rp1,027.25 billion).

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment On Capital Expenditure Investment

Sepanjang 2020, Perusahaan tidak melakukan ikatan material atas investasi barang modal. Dengan demikian, pembahasan ini tidak dapat mengungkapkan nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi & langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Throughout 2020, the Company did not engage in any material commitment on capital expenditure. Therefore, this discussion does not disclose name of the party in the commitment, purpose of the commitment, source of funds expected to fulfil the commitment, denominated currency & the hedging plan.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Subsequent Material Information and Facts After The Date of The Accountant's Report

Setelah tanggal 31 Desember 2020, pandemi COVID-19 masih berlangsung. Pandemi tersebut mempengaruhi, antara lain, permintaan global untuk produk dan layanan dan rantai pasokan hingga tahun 2021. Manajemen telah menilai dampak yang mungkin timbul dari peristiwa ini terhadap operasi Grup dan percaya bahwa tidak ada dampak negatif yang signifikan pada tanggal penandatanganan laporan keuangan. Namun, manajemen akan terus memantau situasi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait di masa depan.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang kebijakan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Salah satu pasal yang perlu diperhatikan adalah adanya penurunan tarif pajak penghasilan badan dari tarif saat ini sebesar 25% menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 sampai dengan 2021, dan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022.

After 31 December 2020, the COVID-19 pandemic is still ongoing. The pandemic is affecting, among other things, global demand for products and services and supply chains until 2021. Management has assessed the possible impact of these events on the Group's operations and believes that there will be no significant negative impacts as of the signing date of the financial statements. However, management will continue to monitor this situation and take the necessary actions to address the associated risks in the future.

On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 concerning financial system stability policies for handling the COVID-19 epidemic in the context of facing threats that endanger the national economy and financial system stability. One of the articles that needs to be paid attention to is the decrease in the corporate income tax rate from the current rate of 25% to 22% which is valid for the 2020 to 2021 tax year, and to 20% for the 2022 tax year.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

PTK berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan bisnis dengan terus tumbuh dan meningkatkan kinerja operasi dan layanan. Dengan menganalisa daya tarik pasar dan daya saing industri, Pertamina Trans Kontinental telah melakukan analisa *five forces of porter* dengan hasil sebagai berikut:

PTK is committed to maintain our business continuity by continuously growing and improving our operational and service performance. By analysing market appetite and industry competitiveness, Pertamina Trans Kontinental has done Five Forces of Porter analysis, as follows:

Hambatan Bagi Pendetang Baru

Beberapa aspek yang diperlukan dalam menentukan kekuatan suatu produk untuk dapat bersaing dalam bisnis jasa pelayaran dan kegiatan maritim yaitu modal yang besar, SDM dengan keahlian khusus serta ketatnya persyaratan keselamatan dan keamanan yang diregulasi dan ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga internasional yang terkait. Bagi pendatang baru dalam bisnis ini tentunya aspek diatas menjadi hambatan yang cukup besar sehingga tidak banyak perusahaan sejenis yang muncul sebagai pendatang baru. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak ada penambahan secara signifikan dalam jumlah perusahaan pesaing baru sehingga persaingan tetap bersifat moderat.

Barriers For New Entrants

Some aspects that are required in determining the strength of a product to be able to compete in the shipping service business and maritime activities are large capital, human resources with special expertise and strict safety and security requirements that are regulated and determined by the government and related international institutions. For newcomers in this business, of course, the above aspects become a significant issues thereby only few similar companies emerge as new entrants. 2020 shows that there is no significant increase in the number of new competitor companies resulting a fairly moderate competition.

Daya Tawar Pembeli

Pemasok yang menunjang kegiatan operasional Perusahaan antara lain adalah penyedia/mitra kapal *back-to-back* untuk kegiatan *charter brokerage*, galangan kapal/ *shipyard*, pemasok BBM dan oli kapal, penyedia *sparepart*, penyedia *crew* kapal. Daya tawar pemasok relatif moderat hal ini disebabkan antara lain:

Bargaining Power of Consumers

Suppliers who support the Company's operational activities including the back-to-back vessels/partners for brokerage charter activities, dock yard/shipyards, fuel and ship oil suppliers, spare parts providers, ship crew providers. The bargaining power of suppliers is relatively moderate due to:

Daya tawar mitra penyedia kapal *back-to-back* relatif moderat, Perusahaan menjalin jaringan kerjasama dengan perusahaan pelayaran dengan prinsip saling menguntungkan.

Terdapat beberapa *sparepart* kapal yang memiliki spesifikasi khusus yang hanya diproduksi oleh pemasok tertentu namun terdapat barang sejenis sebagai substitusi.

Kebutuhan rutin kapal seperti bahan bakar, *material deck*, oli, cat, dan lain-lain jumlah pemasok besar dengan harga bersaing.

Untuk penyedia galangan kapal, reputasi, pengalaman kerja, kemampuan teknis, memiliki nilai lebih namun sehubungan jumlah penyedia galangan mencukupi, harga yang ditawarkan cukup kompetitif. Penyedia *crew* kapal, dalam hal ini perusahaan melakukan perekrutan sendiri untuk level perwira, sementara untuk level *crew* lainnya perusahaan menunjuk PKG sebagai penyedia jasanya. Daya tawar PKG dalam hal ini moderat, walaupun perusahaan tidak menunjuk perusahaan lain dalam penyediaan *crew* akan tetapi perusahaan juga melakukan perekrutan *crew* secara mandiri.

Hambatan Produk/Jasa Pengganti

Dalam bisnis pelayaran dan maritim secara umum, PTK memiliki keunggulan dimana produk dan jasa yang ditawarkan bersifat khusus dan hal ini menjadikan tingkat persaingan pada tahun 2020 berlangsung secara moderat.

Daya Tawar Pemasok

Berkaitan dengan daya tawar pembeli, tentunya jika jumlah pemasok yang menyediakan bahan baku yang perusahaan butuhkan hanya sedikit, maka pemasok akan memonopoli bahan baku dan mematok harga

The bargaining power of back-to-back ship providers is relatively moderate, the Company has established a network of cooperation with shipping companies on the principle of mutual benefit.

There are some ship spare parts that have special specifications which are only produced by certain suppliers but there are similar goods as substitutes.

The routine needs of ships such as fuel, deck material, oil, paint, etc. a large number of suppliers at competitive prices.

For the dock yard providers, reputation, work experience, technical ability, has more value, but with respect to the number of shipyard providers, the price offered is quite competitive. Providers of ship crews, in this case the Company conducted self-recruitment for officer level, while for other crew levels the Company has appointed PKG as the service provider. The bargaining power of PKG in this case is moderate, although the Company does not appoint other companies to hire crew, whilst the company also recruits the crew independently.

Threat of Substitute Products/ Services

In the general shipping line and maritime service, PTK holds competitive advantages where the offered products and services are specific and this also bring a moderate competition level throughout 2020.

Bargaining Power of Suppliers

Related to the buyers' bargaining power, only few suppliers provide the raw materials required by small companies, where the suppliers will monopolize the raw materials and set high prices that may threat

tinggi yang dapat merugikan perusahaan. Pada tahun 2020 pemasok yang menunjang kegiatan operasional perusahaan adalah penyedia/mitra kapal *back-to-back* untuk kegiatan *charter brokerage*; galangan kapal/*shipyard*; pemasok BBM dan oli kapal; penyedia *sparepart*, penyedia *crew* kapal.

Pemasok untuk tahun 2020 bersifat moderat dikarenakan perusahaan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pelayaran yang dapat menyediakan kapal untuk kebutuhan *back-to-back*. Pemasok suku cadang untuk kapal masih memiliki spesifikasi khusus yang hanya diproduksi pemasok tertentu sehingga PTK masih berusaha untuk mendapatkan barang sejenis sehingga mendapat harga yang lebih efektif dari sebelumnya.

Sedangkan untuk kebutuhan rutin kapal seperti bahan bakar, material deck, oli, cat dan yang lainnya bersifat moderatif karena PTK memiliki banyak pilihan pemasok untuk barang tersebut. Dalam hal galangan, pemasok masih bersifat moderat karena jumlah penyedia galangan kapal dalam negeri masih mencukupi sehingga PTK mengacu pada kemampuan teknis dan harga dalam memilih galangan untuk bekerja sama. Dan terkait penyediaan awak kapal, PTK melakukan perekrutan secara mandiri untuk level perwira dan untuk level *crew* lainnya PTK menunjuk anak perusahaan PKG sebagai penyedia jasanya. Tetapi daya tawar PKG bersifat moderat karena PTK juga melakukan perekrutan *crew* secara mandiri.

Persaingan Pasar dengan Kompetitor

Bisnis kapal penunjang kegiatan *offshore*, angkutan migas dan kegiatan maritim. Karakteristik pasar untuk produk dan jasa perusahaan yaitu penunjang kegiatan *offshore*, angkutan migas dan kapal penunjang kegiatan maritim adalah oligopoli ditandai dengan terbatasnya jumlah perusahaan sejenis yang beraktivitas dalam industri minyak dan gas. Persaingan dalam industri ini ditentukan

the Company. In 2020, the suppliers who support the company's operations are back-to-back vessels/ship suppliers for brokerage charter activities; dock yard/shipyard; oil fuel and vessels oil suppliers; parts provider, ship crew provider.

In 2020, the suppliers will have a moderate impact as the Company will engage in cooperation with shipping companies with capability to supply the vessels for back-to-back needs. The vessels spare parts suppliers will still have special specifications that are only manufactured for special suppliers where PTK still attempts to acquire similar items to have more effective price than before.

In terms of regular vessels requirements such as fuel, deck material, oil, paint and others, there are moderate as PTK has range of suppliers' preference for these items. With regards to the dock yard, the suppliers are also moderate as number of domestic dock yard providers is considered still sufficient thereby PTK considers technical and price requirements in selecting the partner dock yards. Next, related to the ship crew supply, PTK has conducted an autonomous recruitment for officers' level and PTK has appointed PKG, our subsidiary, as service providers for other crew levels recurrently. However, bargaining power of PKG is moderate as PTK also recruits its crew independently.

Market Competition with Competitors

The business of supporting vessels for offshore activities, oil and gas transportation and maritime activities. The characteristics of the market for company products and services, namely those that support offshore activities, oil and gas transportation and ships supporting maritime activities, are oligopoly marked by the limited number of similar companies engaged in the oil and gas industry. Competition in

oleh penggunaan teknologi diatas kapal, kesesuaian dengan standar keselamatan, kesehatan dan lindung lingkungan terbaik, kehandalan dan efisiensi bahan bakar pada kapal, kesesuaian spesifikasi kapal dengan kebutuhan *customer* dan ditentukan jumlah permintaan dan ketersediaan kapal pada saat dibutuhkan. Sehingga tingkat persaingan bersifat moderat.

Persaingan Pasar Industri Jasa Maritim

Keagenan tanker dan pengelolaan administrasi pelabuhan khusus. Karakteristik pasar bersifat monopoli karena adanya penunjukan khusus dari Pertamina selaku induk Perusahaan. Kegiatan jasa maritim lainnya yaitu keagenan umum, *freight forwarding*, *custom clearance*, *bunker agent*, pengelolaan pelabuhan dan pergudangan, penyedia air bersih untuk kapal dan industri dan pengerukan bersifat pasar bebas dengan jumlah pemain yang besar sehingga tingkat persaingan tinggi.

Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan

Selama tahun 2020, segmentasi pasar PTK terbagi menjadi Pertamina dan Non-Pertamina. Dengan segmentasi pasar utama PTK adalah PT Pertamina (Persero) maupun Pertamina Group. Pemasaran Pertamina dilakukan dengan menjaga hubungan dengan *customer existing*, serta memastikan kebutuhan Kapal di Pertamina dan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara pengadaan kapal baru, pembelian kapal *second hand* dan pemenuhan kebutuhan kapal dengan sementara memenuhi dengan kapal B2B.

Posisi PTK di mata *customer* adalah sebagai perusahaan jasa pelayaran yang fokus kepada pelayanan jasa/kapal penunjang sarana pelabuhan / *Harbour Tug* dan spesialisasi kapal muatan dengan *shallow draft* /aliran sungai.

this industry is determined by the use of onboard technology, compliance with standards the best occupational safety, health and environmental protection, reliability and fuel efficiency on the ship, conformity to ship specifications with customer needs and the number of requests and availability of ships is determined when needed. So that the level of competition is moderate.

Maritime Service Industry Market Competition

Tanker agency and special port administration management. Characteristics of the market are monopolistic due to the special appointment of Pertamina as the parent company. Other maritime service activities include general agency, freight forwarding, custom clearance, bunker agents, port and warehousing management, supply of clean water for ships and industry and dredging is a free market with a large number of players so that the level of competition is high.

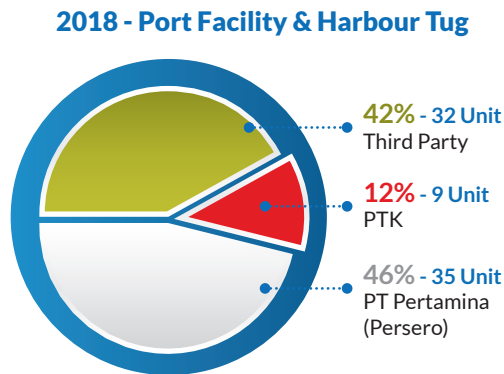
Market Segments and Competitive Conditions

In 2020, the PTK market segmentation is divided into Pertamina and Non-Pertamina. With the main market segmentation of PTK is PT Pertamina (Persero) and Pertamina Group. Pertamina's marketing is carried out by maintaining relationships with existing customers, as well as ensuring the needs of ships in Pertamina and trying to meet their needs by procuring new vessels, purchasing secondhand vessels and fulfilling ship needs while temporarily fulfilling B2B vessels.

The position of PTK in the eyes of the customer is as a shipping service company that focuses on services/supporting vessels for port facilities/Harbor Tug and specializes in cargo ships with shallow draft/river flow.

Pangsa Pasar

Pangsa pasar PTK di Pertamina Shipping untuk *port facility and Harbour Tug* adalah sebagai berikut:



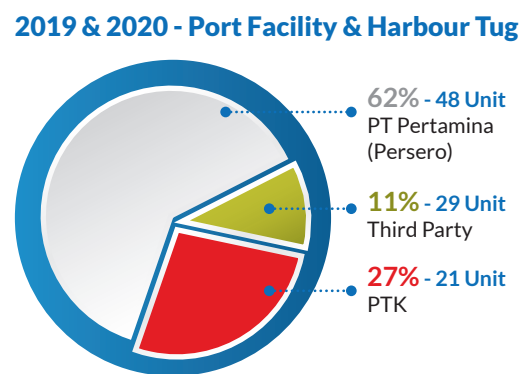
Sumber/ Source: PT Pertamina (Persero)

Pada tahun 2020 Kapal *Harbour Tug* PTK yang terutilisasi di Pertamina Shipping masih sama seperti pada tahun 2019 yaitu sebanyak 21 unit kapal dan PT Pertamina (Persero) sendiri mengoperasikan 48 unit kapal *Harbour Tug* dan Perusahaan *competitor* mengoperasikan sebanyak 29 unit kapal *Harbour Tug* di Pertamina Shipping.

Pangsa pasar PTK di Pertamina Shipping untuk *Small I* dan *Small II* adalah sebagai berikut:

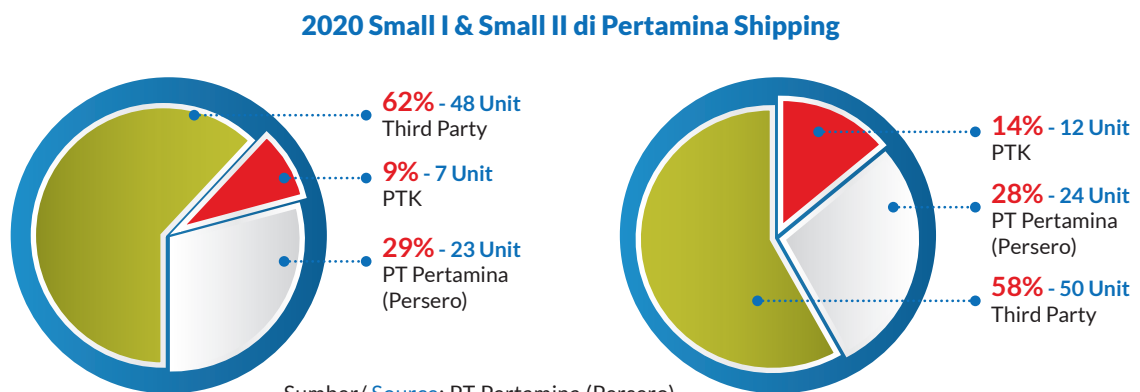
Market share

Market share of PTK at Pertamina Shipping for port facility and Harbor Tug is as follows:



In 2020 the Harbor Tug PTK ships that were utilized at Pertamina Shipping were still the same as in 2019, namely as many as 21 vessels and PT Pertamina (Persero) itself operated 48 units of Harbor Tug vessels and competitor companies operated 29 units of Harbor Tug vessels at Pertamina Shipping.

PTK market share in Pertamina shipping for Small I and Small II is as follows:



Sumber/ Source: PT Pertamina (Persero)

Pangsa Pasar PTK dalam bisnis penyedia angkutan oil dan gas jenis *small tanker* yang digunakan di Pertamina tahun 2020 PTK sebagai anak perusahaan

PTK Market Share in the Business of Providing Small Tanker Types of Oil and Gas Transportation Used at Pertamina in 2020 PTK as a subsidiary of PT Pertamina

PT Pertamina (Persero) telah menyediakan 4 unit kapal tanker Small I (1500DWT sd 3500 DWT), 3 unit *Lube Oil Tanker*, 1 unit *Asphalt Tanker*, 2 unit *Tanker White Oil* (6500 DWT) untuk pasar Pertamina Perkapalan. Untuk kapal LPG Carrier 3500 CUM PTK memiliki 3 unit kapal. PT Pertamina (Persero) sendiri saat ini mengoperasikan 11 unit kapal milik jenis *tanker Small I* (1500DWT sd 3500 DWT) dan 13 unit *tanker Small II* (6500DWT – 6800DWT). Perusahaan kompetitor menyewakan 50 unit kapal *Small I* & *Small II* Di Pertamina Shipping.

Strategi Pemasaran

Mengacu kepada visi dan misi perusahaan untuk pengembangan bisnis jangka panjang dalam menghadapi persaingan di sektor bisnis pelayaran dan maritim, PTK telah menyusun strategi untuk pencapaian target pertumbuhan perusahaan yaitu sebagai berikut:

- Menjadi perusahaan pelayaran dan jasa maritim yang memberikan keandalan operasi dan standar layanan tinggi kepada pelanggan dengan target:
 - Memprioritaskan aspek kesehatan, keselamatan dan lindung lingkungan (*health, safety, security and environment* – HSSE) dalam Operasional Perusahaan dengan target *zero number of accident & zero oil spill*.
 - Keandalan armada dengan target *average commission days* (kapal siap beroperasi) sebesar 352 hari.
 - Peningkatan *performance* kapal dengan peningkatan *Plan Maintenance System & Fleet Management*.
 - Pemasaran kapal dengan target *operation days / commission days* sebesar 95%.
- Penambahan jumlah armada antara lain untuk memenuhi kebutuhan di Pertamina Shipping dan kebutuhan kapal AP Pertamina Hulu dengan keterangan.

(Persero) has provided 4 units of Small I tankers (1500DWT to 3500 DWT), 3 units of Lube Oil Tanker, 1 Asphalt Tanker units, 2 units of Tanker White Oil (6500 DWT) for Pertamina Perkapalan market. For the LPG Carrier 3500 CUM PTK ships have 3 units of kappa. PT Pertamina (Persero) itself currently operates 11 units of vessels belonging to the Small I tanker type (1500DWT to 3500 DWT) and 13 Small II tankers (6500DWT - 6800DWT). Competitor companies lease 50 Small I & Small II vessels from Pertamina Shipping.

Marketing strategy

Referring to the Company's vision and mission for long-term business development in facing competition in the shipping and maritime business sector, PTK has compiled a strategy to achieve the company's growth targets, which are as follows:

- To become a shipping and maritime services company that provides reliable operations and high service standards to customers with the following targets:
 - Prioritizing the aspects of health, safety and environmental protection (*health, safety, security and environment* - HSSE) in the Company's operations with a target of zero number of accidents & zero oil spill.
 - Fleet reliability with a target average commission days (the ship is ready to operate) of 352 days.
 - Improved ship performance by increasing the Plan Maintenance System & Fleet Management.
 - Ship marketing with target operation days/ commission days of 95%.
- Increase in the number of fleets, among others, to meet the needs of Pertamina Shipping and the needs of the Pertamina Hulu AP ships with information.

a. Armada kapal sarana pelabuhan <i>Harbour Tug</i> dan <i>Mooring Boat Phase 2</i> dan 3 untuk memenuhi kebutuhan Marine Pertamina: 23 unit <i>Harbour Tug</i> dan 38 unit <i>Mooring Boat</i> di tahun 2019 dan 2020. b. Armada tanker untuk Pertamina Shipping yaitu 6 unit kapal small I dan 8 unit kapal small II di tahun 2019 – 2026. c. Pembangunan/pengadaan 1 lot kapal keruk. d. Peluang penyediaan kapal-kapal pendukung kegiatan <i>upstream</i>.	a. Harbor Tug and Mooring Boat Phase 2 and 3 port facilities to meet Pertamina Marine needs: 23 Harbor Tug units and 38 Mooring Boat units in 2019 and 2020. b. The tanker fleet for Pertamina Shipping is 6 units of small I vessels and 8 units of small vessels II in 2019 - 2026. c. Procurement of 1 unit of dredger for AP PKJ d. Opportunity to supply vessels to support upstream activities.
3. PTK ditunjuk oleh Pertamina sebagai pelaksana kegiatan STS FAME di Balikpapan.	3. PTK is appointed by Pertamina as the executor of the STS FAME activities in Balikpapan.
4. Peremajaan 4 (empat) unit Armada Harbour Tug 3,200 – 4,000 HP, 3 (tiga) unit LPG Carrier di 2019 s.d 2025 untuk meningkatkan Operasional ekselen.	4. Rejuvenation of 4 (four) units of the Harbor Tug Fleet 3,200 - 4,000 HP, 3 (three) units of LPG Carriers in 2019 to 2025 to improve excellent Operations.
5. Mempertahankan pasar eksisting dengan meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan operasi terbaik dengan layanan andal dan terpercaya dengan target <i>customer satisfaction index</i> dengan target 4,0 skala linkert di 2020.	5. Maintain the existing market by increasing customer loyalty and satisfaction by providing the best operational services with reliable and trusted services with a target customer satisfaction index with a target of 4.0 on the Linkert scale in 2020.
6. Optimalisasi sinergi Pertamina dan Pertamina Group untuk peningkatan bisnis kapal.	6. Optimizing the synergy between Pertamina and Pertamina Group to increase the ship business

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

- Berdasarkan hasil RUPS yang dilaksanakan tahun 2020 untuk tahun buku 2019, PTK memberikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp176,99 miliar atas laba Perusahaan tahun 2019.
- Pursuant to the results of the GMS held in 2020 for the 2019 financial year, PTK provide dividends to shareholders amounting to Rp176.99 billion for the Company's 2019 profits.

Program Kepemilikan Saham Bagi Manajemen (MSOP) dan Pekerja (ESOP)

Management and Employee Stock Option Plan

- Selama tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) dan/atau *Employee Stock Option Program* (ESOP).
- Throughout 2020, the Company does not offer any management and or employee stock option plan (MSOP/ ESOP).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

PT Pertamina Trans Kontinental adalah perseroan terbatas tertutup dan sampai dengan akhir tahun 2020 tidak pernah mencatatkan saham di bursa manapun. Oleh karena itu, laporan ini tidak menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

PT Pertamina Trans Kontinental is a closed limited liability company and as end of 2020 it has never listed shares on any stock exchange. Therefore, this report does not convey information related to the actual use of proceeds from the public offering.

Buy Back Saham dan Buy Back Obligasi

Buy Back Shares and Buy Back Bonds

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham maupun obligasi dari pihak lain. Dengan demikian Laporan ini tidak menampilkan informasi terkait tujuan pembelian kembali saham maupun obligasi, dan sumber dana yang digunakan untuk membeli kembali saham maupun obligasi.

As end of 2020, the Company did not buy back shares or bonds from other parties. Therefore, this report does not display information related to the purpose of buying back shares or bonds, and the source of funds used to buy back stocks and bonds.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Material Information Containing Conflict of Interest and/or Affiliated Party Transaction

Berdasarkan Peraturan OJK No. IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi yang mengandung benturan kepentingan ditentukan oleh pemegang saham independen. Sesuai ketentuan tersebut Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu. Sampai dengan akhir tahun 2020 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris maupun Direksi.

Dalam operasionalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (catatan) seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hubungan, sifat, serta saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pursuant to OJK Regulation No. IX.E.I regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest Specific Transactions, transactions containing conflicts of interest are determined by independent shareholders. Pursuant to these provisions Independent Shareholders are shareholders who do not have a Conflict of Interest in connection with a particular transaction and /or are not an Affiliate of a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or a major shareholder who has a Conflict of Interest over a particular Transaction. Until the end of 2020 there were no transactions that contained conflicts of interest with the Board of Commissioners and Board of Directors.

In its operations, the Company conducts transactions with related parties. All transactions with related parties have been disclosed in the Annual Report and Financial Statements (notes) as defined in PSAK 7: Disclosure of Related Parties. Relationship, nature, and account/transaction balance with related parties are as follows:

Pihak Berelasi, Sifat Hubungan dan Transaksi Related Parties, Nature of Relationship and Transaction

URAIAN Description	SIFAT HUBUNGAN Nature of Relationship		SIFAT TRANSAKSI Nature of Transaction	
PT Pertamina (Persero)	Induk dengan Anak Perusahaan	Parent and Subsidiary	Kapal Milik, Keagenan & Diversifikasi Usaha	Milik Ship, Agency & Business Diversification
PT Pertamina Hulu Indonesia	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Kapal Milik	Owned Ship
PT Pertamina Hulu Energi	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Kapal Milik & Keagenan	Ship Owned & Agency
PT Pertamina Retail	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	BBM Operasional	Operational BBM
PT Pertamina Gas	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Kapal Milik, Back-to-Back TC & Diversifikasi Usaha	Milik Ship, Back-to-Back TC & Business Diversification

Pihak Berelasi, Sifat Hubungan dan Transaksi*Related Parties, Nature of Relationship and Transaction*

URAIAN Description	SIFAT HUBUNGAN Nature of Relationship		SIFAT TRANSAKSI Nature of Transaction	
PT Pertamina Shipping	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Kapal Milik	Milik Ship
PT Nusantara Regas	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Keagenan	Agency
PT Elnusa	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Kapal Milik & Charter Broker	Owned Ship & Charter Broker
PT Pertamina Patra Niaga	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Keagenan Umum & Diversifikasi Usaha	General Agency & Business Diversification
PT Tugu Pratama Indonesia	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Asuransi dan Sewa Kendaraan	Insurance and Vehicle Rental
PT Pertamina Lubricant	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Diversifikasi Usaha, Back-to-Back TC, Pelumas Umum	Business Diversification, Back-to-Back TC, General Lubricants
PT Pertamina EP	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Keagenan Umum, Back-to-Back TC & Diversifikasi Usaha	General Agency, Back-to-Back TC & Business Diversification
PT Pertamina Drilling Service Indonesia	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Keagenan Umum	General Agency
PT Patra Jasa	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Perjalanan Dinas / Travel	Official Travel/Travel
PT Pertamina Bina Medika	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Kesehatan	Health
PT Pertamina Training & Consulting	Sesama Anak Perusahaan	Entity Under Common Control	Pelatihan & Rekrutmen	Training & Recruitment

Berikut ini adalah saldo dan transaksi dengan pihak berelasi:

The following are balances and transactions with related parties

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (dalam juta Rupiah)*Balances and Transactions with Related Parties (in million Rupiah)*

URAIAN Description	2020	2019
PENDAPATAN USAHA / REVENUES		
PT Pertamina (Persero)	1.829.994	1.302.955
PT Pertamina Hulu Mahakam	179.778	150.270
PT Pertamina Gas	192.068	2.689
PT Pertamina Retail	156.243	109.870

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (dalam juta Rupiah)

Balances and Transactions with Related Parties (in million Rupiah)

URAIAN Description	2020	2019
PT Pertamina International Shipping	108.769	72.700
PT Pertamina Hulu Energi OSES	76.064	18.153
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	52.629	89.168
PT Nusantara Regas	14.085	19.511
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	9.603	1.811
PT Pertamina Hulu Energi NSO	6.619	3.661
PT Pertamina Hulu Energi JM	5.535	3.701
PT Elnusa Tbk.	5.520	2.646
PT Pertamina Hulu Energi WMO	3.899	3.960
PT Pertamina EP	3.754	688
PT Pertamina Patra Niaga	1.050	7.360
PT Perta Arun Gas	-	89.168
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	-	22.491
PT Elnusa Trans Samudera	-	6.087
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	-	4.294
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000) Others (each under Rp2,000)	2.047	3.379
Jumlah / Total	2.647.657	1.914.562
Persentase dari Jumlah Pendapatan Percentage from Total Revenues	86,58%	75,38%
BEBAN POKOK PENDAPATAN/ COST OF REVENUES		
PT Pertamina (Persero)	188.371	181.029
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	27.759	16.167
PT Perta Arun Gas	11.724	24.243
PT Pertamina Lubricants	9.569	9.096
PT Pertamina Patra Niaga	4.478	0
PT Pertamina Patra Niaga	2.143	1.667
PT Mitra Tours and Travel	-	2.111
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000) Others (each under Rp2,000)	1.324	237
Jumlah / Total	245.368	234.550
Persentase dari Jumlah beban pokok pendapatan Percentage from Total Cost of Revenues	11,25%	12,61%

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary Event

Selama tahun 2020, tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

There is no financial information with extraordinary event throughout 2020.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Changes in Accounting Policies Implemented by the Company in the Current Fiscal Year

Standar dan interpretasi baru/revisi lain yang berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;

Other new/revised standards and interpretations that apply for the financial year beginning on or after January 1, 2020 are as follows:

- Amendments to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements";
- Amendments to PSAK 15 "Investments in Associates and Joint Ventures";
- Amendments to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Annual adjustments to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements";
- Amendments to PSAK 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement", PSAK 60 "Financial Instruments: Disclosures" and PSAK 71 "Financial Instruments" concerning reform of interest rate references;
- Amendments to PSAK 71 "Financial Instruments: Concerning Early Repayment Features with Negative Compensation;
- Amendments to PSAK 73 "Leases" regarding lease concessions related to COVID-19;

- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba"; dan
- ISAK 36 "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2021:

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis"
- Amandemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi IBOR Tahap 2)";
- Amandemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi IBOR Tahap 2)";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan (Reformasi IBOR Tahap 2)"; dan
- Amandemen PSAK 73 "Sewa (Reformasi IBOR Tahap 2)".

Efektif 1 Januari 2022:

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis (Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan)";
- Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa".

- ISAK 35 "Presentation of Financial Statements for Non-Profit Oriented Entities"; and
- ISAK 36 "Interpretation of the Interaction between Provisions on Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases."

The implementation of these standards has not resulted in any substantial changes to the Group's accounting policies and has no material impact on the consolidated financial statements in the current or prior years.

The new standards, amendments and interpretations that have been published but are effective for the financial year starting January 1, 2021 are as follows:

Effective January 1, 2021:

- Amendments to PSAK 22 "Business Combinations"
- Amendments to PSAK 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement (IBOR Reform Phase 2)";
- Amendments to PSAK 60 "Financial Instruments: Disclosures (IBOR Reform Phase 2)";
- Amendments to PSAK 71 "Financial Instruments (IBOR Reform Phase 2)"; and
- Amendments to PSAK 73 "Leases (IBOR Reform Phase 2)".

Effective January 1, 2022:

- Amendments to PSAK 22 "Business Combinations (Reference to Conceptual Framework for Financial Reporting)";
- Amendments to PSAK 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Aggravating Contracts - Contract fulfillment costs";
- Annual adjustments to PSAK 71 "Financial Instruments"; and
- Annual adjustment to PSAK 73 "Leases".

Efektif 1 Januari 2023:

Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan (Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Panjang)".

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mengevaluasi dampak dari penerapan standar dan interpretasi diatas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Effective January 1, 2023:

Amendments to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements (Classification of Liabilities as Short or Long Term)".

As of the date of consolidated financial statements completion, the Group is still evaluating the impact of the application of the above standards and interpretations on the Group's consolidated financial statements.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Changes In Laws And Regulations That are Significant To The Company

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan pada tahun 2020.

There is no change in laws and regulation with significant impact to the Company in 2020.

Prospek Usaha

Business Prospects

Bisnis pelayaran diprediksi masih memiliki prospek yang baik pada tahun 2020. Sejumlah faktor seperti ketidakpastian ekonomi global memang menjadi tantangan tersendiri. Namun tidak berarti sama sekali tidak ada peluang bagi industri pelayaran di tahun 2020.

Shipping business is projected to have a promising prospects in 2020. Several factors including the global economics uncertainty have indeed become its own challenges. However, this does not mean there is zero opportunity for the shipping industry in 2020.

Hal ini didorong oleh sejumlah katalis positif yang berpotensi mengerek permintaan jasa pelayaran pada sejumlah sektor. Pada sektor infrastruktur, berlanjutnya berbagai pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung hingga setidaknya lima tahun ke depan juga diyakini akan akan mendorong pergerakan muatan dalam negeri. Hal ini pada gilirannya akan memunculkan kebutuhan akan jasa pengangkutan oleh angkutan laut. kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan salah satu katalis di sektor infrastruktur yang diduga akan mengerek kebutuhan akan angkutan material secara signifikan.

Kekayaan hulu Indonesia diproyeksikan oleh Fitch Solutions akan terus menurun dalam 10 tahun ke depan, di tengah-tengah penurunan alami dan penurunan investasi terhadap proyek-proyek baru. Reformasi pro bisnis yang dilakukan hingga saat ini, dengan tujuan untuk menarik lebih banyak *Foreign Direct Investment* (FDI), terkendala oleh risiko non teknis dan persaingan dari pasar hulu lainnya. Pertumbuhan industri hilir diprediksi tetap konstruktif, didukung oleh kondisi lingkungan makro yang positif dan sektor fundamental. Prospek produksi minyak mentah dalam negeri diprediksi akan menurun menjadi rata-rata 755.000 b/d pada tahun 2019 dan 734.000 b/d pada tahun 2020, keduanya turun dari 776.000 b/d yang diproduksi pada tahun 2018. Tabel di bawah menunjukkan produksi minyak yang menurun selama satu dekade terakhir.

This is driven by some positive catalysts that may potentially drive the shipping service demand in several sectors. In the infrastructure sector, the continued infrastructure development for at least the next five years is also believed drive the movement of domestic cargo. In turn, this condition will trigger the demand of freight services via shipping line. Government's policy to relocate the Capital to East Kalimantan will become one of the catalysts in the infrastructure sector which is analysed will boost the material transportation demands significantly.

Fitch Solutions projected Indonesia's upstream wealth will continue to decline in the next 10 years, amidst a natural decline and declining investment in the new projects. Pro-business reforms that is currently implemented with the purpose to attract more Foreign Direct Investment (FDI) encountered several non-technical risks and competition from other upstream markets. The growth of downstream industry is predicted to remain constructive, supported by positive macroeconomic conditions and the fundamental sectors. The domestic crude oil production prospect is estimated to decline to an average of 755,000 b/d in 2019 and 734,000 b/d in 2020, both decreased from 776,000 b/d produced in 2018. The following table presented the decreasing oil production over the past decade.

Produksi dan Konsumsi Minyak dan Gas di Indonesia

Oil and Gas Production and Consumption in Indonesia

INDIKATOR Indicator	2017e	2018e	2019e	2020e	2021F
Crude, NGPL & other liquids prod, 000b/d	897,0	871,0	848,5	830,4	807,4
Refined products production, 000b/d	1.060	1.054,7	1.049,4	1.044,2	1.033,7
Refined products consumption & ethanol, 000b/d	1.767	1.784,7	1.836,5	1.889,9	1.945,0
Dry natural gas production, bcm	67,0	65,0	59,2	57,4	54,5
Dry natural gas consumption, bcm	38,7	36,0	36,7	37,5	38,6
Brent, USD/bbl	54,75	71,69	67,00	65,00	61,00

e/f = Fitch Solution estimate/forecast. Source: EIA, SKK Migas, JODI, Fitch Solutions

e/f = Fitch Solution estimate/forecast. Source: EIA, SKK Migas, JODI, Fitch Solutions

Dari tabel di atas terlihat bahwa konsumsi domestik produk minyak dan olahannya yang diprediksi terus meningkat tidak diimbangi dengan produksi minyak dalam negeri yang terus menurun, hal ini menyebabkan pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan impor minyak demi memenuhi kebutuhan domestik yang telah dilakukan sejak tahun 2004. Selain itu tahun 2019 sampai dengan 2026 terdapat beberapa blok migas akan habis ijin operasionalnya baik yang dikelola Pertamina, swasta nasional, asing, maupun kerja sama BUMN dengan asing.

Based on the table above, the domestic consumption of oil and refined products, which is predicted to continue to increase, is not followed by the continuing decline in domestic oil production, this has led the government to make the decision to import oil to meet domestic needs, which has been done since 2004. In addition, from 2019 to 2026, several oil and gas blocks will run out of operational permits, both those managed by Pertamina, the national private sector, foreign companies, as well as BUMN cooperation with foreign companies.

Prospek pertumbuhan konsumsi bahan bakar olahan di Indonesia diprediksi tetap positif, hal ini didukung oleh kondisi makro yang menguntungkan dan sektor fundamental, terutama dalam transportasi dan infrastruktur.

The prospect of growth in consumption of refined fuels in Indonesia is predicted to remain positive, supported by favorable macro conditions and fundamental sectors, particularly in transportation and infrastructure.

Selain itu, pada tahun 2020 juga terdapat mandat untuk penyaluran biodiesel B30 sebagai salah satu cara untuk mengurangi impor minyak mentah, sembari mengelola kelebihan pasokan minyak sawit

In addition, in 2020 there is also a mandate for the distribution of B30 biodiesel as a way to reduce crude oil imports, while managing the excess supply of domestic palm oil. The distribution of B30 is mostly

dalam negeri. Penyaluran B30 ini sebagian besar dilaksanakan melalui Pertamina, hal ini tentu saja membuka peluang usaha baru untuk PTK terutama dalam distribusi biodiesel *Fatty Acid Methyl Ester* (B30 FAME) melalui jalur perairan. Sejak bulan Januari tahun 2019, PTK sendiri telah melakukan pengelolaan Ship to Ship FAME di wilayah Balikpapan. Hal ini diharapkan dapat menambah kompetensi PTK selain kompetensi lain yang harus dipersiapkan baik dari proses bisnis maupun kompetensi operasional untuk masuk lebih jauh lagi ke dalam bisnis distribusi FAME.

Pada bulan Juli 2019, pemerintah mengumumkan penundaan implementasi peraturan IMO 2020 di perairan domestik hingga 1 Januari 2020, dengan pertimbangan kepentingan nasional. Meskipun demikian, kapal-kapal Indonesia dalam pelayaran internasional masih akan diminta untuk mematuhi peraturan IMO 2020. Terkait hal tersebut, PTK juga perlu mulai mengantisipasi kemungkinan kenaikan biaya operasional terkait penerapan IMO 2020 di armada milik PTK. Penerapan peraturan baru yang berorientasi K3LL, seperti penerapan *ballast water management*, pembatasan kadar sulfur dalam *bunker* kapal (*global sulphur cap*) dan penggunaan biodiesel B30 akan sedikit banyak berimbas pada kemungkinan kenaikan biaya operasional kapal yang pada akhirnya memungkinkan penyesuaian *freight*. Kemudian, pada sektor *offshore* dan angkutan curah cair (*bulk carrier*) terutama BBM diperkirakan stabil cenderung lebih baik dari sebelumnya.

Peluang untuk angkutan laut atau industri pelayaran domestik diperkirakan lebih baik di semua segmen, dilihat dari sisi pasar sepanjang mampu mengatasi tantangan dari sisi pembaruan regulasi baik yang berasal dari IMO maupun kebijakan dalam negeri.

carried out through Pertamina, this of course opens up new business opportunities for PTK, especially in the distribution of Fatty Acid Methyl Ester (B30 FAME) biodiesel by water. Since January 2019, PTK itself has managed Ship to Ship FAME in the Balikpapan area. It is hoped that this can add to the competence of PTK in addition to other competencies that must be prepared both from business processes and operational competencies to enter further into the FAME distribution business.

In July 2019, the government announced a postponement of the implementation of the 2020 IMO regulations in domestic waters until January 1, 2020, in consideration of national interests. Even so, Indonesian ships on international shipping will still be required to comply with the IMO 2020 regulations. In this regard, PTK also needs to start anticipating possible increases in operational costs related to IMO 2020 implementation in PTK's fleets. The implementation of new K3LL-oriented regulations, such as the application of ballast water management, limitation of sulfur levels in ship bunkers (global sulfur cap) and the use of B30 biodiesel will more or less have an impact on the possibility of an increase in ship operating costs which in turn allows for freight adjustments. Then, in the offshore sector and bulk carrier, especially fuel, it is estimated that it is stable, which tends to be better than before.

Opportunities for sea transportation or the domestic shipping industry are predicted to be better in all segments, seen from the market side as long as they are able to overcome challenges in terms of regulatory reform, both from the IMO and domestic policies.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Kelangsungan usaha PTK secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perusahaan telah melakukan tinjauan untuk menetapkan asumsi-asumsi yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha berdasarkan kinerja historis dan analisis kemampuan Perseroan

The continuity of the PTK business is generally influenced by various factors, both internal and external. The Company has conducted reviews to determine assumptions that may affect the going concern of its business based on historical performance and analysis of the Company's capabilities.

Sepanjang tahun 2020, PTK memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan PTK yang SEHAT dan kinerja positif sepanjang tahun. Adapun kendala yang timbul hingga memengaruhi pencapaian target Perusahaan tidak sampai mengganggu kinerja operasional dan kinerja keuangan sehingga PTK dapat melaksanakan seluruh kewajibannya.

Throughout 2020, PTK ensures that nothing has a significant effect on the Company's business continuity. This can be seen from the HEALTHY PTK financial condition and positive performance throughout the year. As for the obstacles that arise, which affect the achievement of the Company's targets, do not interfere with operational performance and financial performance so that the PTK can carry out all of its obligations.

Asesmen Manajemen Atas Hal-hal Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Manajemen menilai bahwa PTK memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelangsungan usaha Perusahaan akan dapat terjamin dengan baik dan berkelanjutan. Manajemen menilai dengan kinerja keuangan yang positif dari tahun ke tahun memberikan prospek dan jaminan positif terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan kedepan.

Selain itu, Perusahaan juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),

Management's Assessment on Issues with Potential Significant Impacts on the Company's Business Continuity

Management considers that PTK has better growth potential. The condition indicates that the Company's business continuity will be good and sustainable. The management assesses that positive financial performance every year provides positive prospects and guarantees for the company's business sustainability going forward.

In addition, the Company also continues to improve the quality of Human Resources (HR), operational

aktivitas operasional serta fungsi pendukung bisnis lainnya. Dengan berbagai strategi dan upaya yang dilakukan, PTK berkeyakinan dapat terus menjaga kelangsungan usaha serta meningkatkan kontribusi kepada PT Pertamina (Persero).

Asumsi yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan Asesmen

Asumsi yang menjadi dasar manajemen dalam meyakini kelangsungan usaha PTK di antaranya adalah kinerja dan kondisi keuangan PTK yang sehat; kepuasan pelanggan masih dipertahankan; terkait perkara pengadilan, gugatan hukum, atau masalah serupa dikelola dapat diselesaikan dengan baik; serta opini audit dari auditor yang memiliki reputasi.

activities and other business support functions. With various strategies and efforts made, PTK believes it can continue to maintain business continuity and increase its contribution to PT Pertamina (Persero).

Assumptions Applied by Management in The Assessment

The assumptions as basis of the management in ensuring continuity of the PTK business include PTK's healthy performance and financial condition; well-maintained customer satisfaction; related to legal cases, lawsuits, or similar matters managed can be resolved properly; as well as the audit opinion from a reputable auditor.



6

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate
Governance

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

- Tata Kelola Perusahaan merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang (*Sustainable*) dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Corporate Governance refers to a process and structure used by the Company's organs to increase the Company's business success and accountability in order to realize long-term Shareholders value in long term (*Sustainable*) manners while keep concerning interests of other stakeholders, based on laws and regulations as well as ethical values.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Kami menegaskan komitmen implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang harus selalu dipegang teguh oleh setiap insan PTK. Sebab GCG merupakan mekanisme yang mengatur pengelolaan Perusahaan yang baik serta mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan Perusahaan. Komitmen GCG ini dijalankan dalam seluruh aspek proses bisnis baik aktivitas operasional dan finansial guna mewujudkan pertumbuhan dan keberlangsungan usaha Perusahaan ke depan.

Dalam pelaksanaannya, komitmen GCG senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG yang merupakan salah satu upaya PTK untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien. Selain memegang prinsip-prinsip dasar GCG, PTK juga melandasi seluruh kegiatan bisnisnya dengan Tata Nilai Perusahaan serta Etika Bisnis dalam menjalankan tugas dan fungsi Perusahaan. Di antara bentuk komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan pernyataan bersama, yang direpresentasikan oleh tiga organ penting Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Commitment on Corporate Governance Implementation

We emphasize the commitment to implement Good Corporate Governance (GCG) shall always be upheld by every employee of PTK. This considers GCG as a mechanism that governs good company management and is able to meet the expectations of company stakeholders. This GCG commitment is carried out in all aspects of business processes, both operational and financial activities in order to realize the growth and sustainability of the company's business in the future.

In its implementation, the GCG commitment always concerns the GCG principles of as one of PTK's initiative to encourage the management of the Company in a professional, transparent and efficient manner. In addition to holding the basic principles of GCG, PTK also underpins all of its business activities with the Corporate Values and Business Ethics in carrying out the duties and functions of the Company. From all of the commitment manifested by the signing of a joint statement, represented by three important structures of the Company, such as the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

Dasar Hukum Penerapan GCG

Secara umum implementasi GCG PTK mengacu kepada kaidah dan praktik yang dianut secara universal oleh korporasi global. Secara khusus penerapan GCG PTK mengacu pada ketentuan hukum-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan internal Perusahaan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
- Peraturan Menteri BUMN No. 01 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2014.
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 07 tanggal 3 Juli 2013.
- Pedoman *Code of Conduct*, No.A-002/F1000/2019-S0 Revisi Ke 00.
- Tata Kerja Organisasi Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) No. B-008/F1000/2019-S0.
- Pedoman *Code of Corporate Governance* Pertamina Trans Kontinental No.A-003/F1000/2019-S0 Revisi Ke 00.
- Pedoman Gratifikasi, Penolakan & Penerimaan Hadiah/ Cinderamata, Hiburan (*Entertainment*), No. PDM-005/ F0000/2015-S0 Revisi - 1.
- Pedoman Konflik Kepentingan/ *Conflict of Interest*, No. PDM-004/F0000/2015-S0 Revisi -1.
- Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), No. 007/ M00000/2017-S0 Revisi Ke 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

GCG Regulatory Framework

In general, the implementation of PTK GCG refers to the universal rules of practice that are universally adopted by global corporations. Specifically the implementation of PTK GCG refers to the provisions of applicable laws and internal company regulations as follows:

- Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
- Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Information Disclosure
- Minister of SOEs Regulation No. 01 of 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs which has been amended by SOE Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/2014.
- Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SK-16 / S.MBU / 2012 concerning Indicators / Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
- Articles of Association Number 07 dated July 3, 2013
- Code of Conduct Guidelines, No. A-002/F1000/2019-S0 00 Revision
- Pertamina Trans Kontinental Code of Corporate Governance Guideline No. A-003/F1000/2019-S0 Revision 00
- Gratification, Refusal & Acceptance of Gift/ Souvenir, Entertainment Guidelines, No. PDM-005/ F0000/2015-S0 1st Revision
- Conflict of Interest, No. PDM-004/ F0000/2015-S0 1st Revision
- \Guidelines on the Obligation to Submit State Officials Assets Report (LHKPN), No. 007/ M00000/2017-S0 2nd Revision
- Whistleblowing System (WBS) Management Organization SOP No. B-008/F1000/2019-S0
- The Republic of Indonesia Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets
- The Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption

- Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006.
- OECD *Principles of Corporate Governance* Tahun 2004.
- *The Asean Corporate Governance Scorecard* Tahun 2012.

Melalui penerapan *best practice* GCG, PTK berupaya memberikan nilai lebih kepada pemangku kepentingan diantaranya melalui sikap dan perilaku yang sejalan dengan budaya Perusahaan, memberikan pelayanan yang *excellent*, menjamin akuntabilitas melalui sistem pengendalian internal serta menciptakan iklim usaha yang sehat demi keberlanjutan bisnis Perusahaan.

- Indonesia General GCG Guidelines 2006
- OECD Principles of Corporate Governance 2004
- ASEAN Corporate Governance Scorecard 2012

Through the implementation of GCG best practices, PTK seeks to provide added value to stakeholders including attitudes and behaviors that are in line with company culture, provide excellent services, ensure accountability through internal control systems and create a healthy business climate in the company's business sustainability.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, PTK berpedoman pada 5 (lima) prinsip yang meliputi Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Kemandirian dan Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*Sustainable Growth*), seperti yang digambarkan dalam bagan berikut ini :

GCG Principles

In implementing Good Corporate Governance, PTK refers to 5 (five) principles which include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. Implementation of these principles aims to achieve sustainable growth, as illustrated in the following chart:



Bentuk penerapan Tata Kelola Perusahaan di PTK untuk masing-masing prinsip dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Manifestation of Corporate Governance implementation in PTK for each principle is explained in the following table:

KETERBUKAAN	TRANSPARENCY
 Prinsip ini diadopsi sebagai Budaya Perusahaan yang mengedepankan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan akan menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada seluruh <i>Stakeholders</i>, sehingga pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Perusahaan, seperti Pemegang Saham, Pekerja, Pelanggan, Pemasok dan <i>Stakeholders</i> lainnya, mengetahui risiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam melakukan transaksi dengan Perusahaan, sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya Perusahaan. Bentuk Implementasi • Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perusahaan. • Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan pertemuan baik <i>Internal</i> maupun rapat gabungan sebagai upaya pengawasan maupun pengelolaan Perusahaan. • Mempublikasikan Laporan Keuangan • Kebijakan-kebijakan Perusahaan telah dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media komunikasi. • Dewan Komisaris dan Direksi mengungkapkan keberadaannya dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara transparan. • Menginformasikan tentang Perusahaan di Website Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan.	This principle is adopted as a corporate culture that promotes transparency in implementing the decision-making process. Transparency in implementing decision making as well as transparency in presenting material and relevant information about the Company. The Company will provide sufficient, accurate and timely information to all Stakeholders therefore everyone related to the Company, including the Shareholders, Employees, Customers, Suppliers and other Stakeholders, know the risks that may occur and the benefits that can be obtained in doing so. transactions with the Company, as well as participating in the supervisory mechanism over the Company's operations Implemenetation • The Company holds a General Meeting of Shareholders (GMS) to fulfill requirements as disclosed in the Articles of Association. • Board of Commissioners and Board of Directors have arranged both internal and joint meetings as the initiatives to supervise and manage the Company. • Publish Financial Reports • The Company's policies have been communicated to all stakeholders through various communication media. • The Board of Commissioners and Board of Directors have disclosed their existence in the Good Corporate Governance report transparently. • Publish information about the Company at Official Website based on provisions as stipulated in the regulations.

- Mempublikasikan informasi Perusahaan di Website dan Media Sosial Perusahaan.
- Perusahaan membuat Laporan Annual Report.

- Publish Company information on the Official Website and Social Media.
- The company prepares Annual Report.

AKUNTABILITAS



Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ-organ Perusahaan sehingga pengelolaan dan pengawasan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistem *Internal Control* yang mencakup praktik-praktik yang sehat. Direksi bertanggung jawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dan Dewan Komisaris mewakili Pemegang Saham dalam pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perusahaan.

ACCOUNTABILITY

Refer to clarity of functions, implementation and accountability of the Company's organs thereby the Company's management and supervision are carried out effectively. Accountability reflects the application of the Internal Control system mechanism which includes healthy practices. The Board of Directors is responsible for day-to-day operations and the Board of Commissioners represents the Shareholders in the supervisory activity over the Company's operations.

Bentuk Implementasi

- Perusahaan telah memiliki berbagai perangkat atau kebijakan seperti Struktur Organisasi, *Job Description* untuk tiap-tiap jabatan dan penilaian secara eksternal atau *Self-Assessment* tiap-tiap Direksi.
- Perusahaan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris.
- Manajemen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan memberikan pertanggungjawaban setiap bulan.
- Auditor Eksternal telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perusahaan dengan opini wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Tahunan Perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban Perusahaan dan telah mendapat persetujuan oleh RUPS.
- Perusahaan memberikan penghargaan bagi pekerja berprestasi namun juga tegas memberikan sanksi kepada pekerja yang melakukan pelanggaran.

Implementation

- The company has various tools or policies such as Organizational Structure, Job Description for each position and external assessment or Self-Assessment for Board of Directors individually.
- The company has a Corporate Work Plan and Budget which has been approved by the Board of Commissioners.
- Management carries out its duties and responsibilities properly and provides an accountability every month.
- The External Auditor has carried out an examination of the Company's Financial Statements with the Independent Auditor's opinion is unqualified.
- The Company's Annual Report becomes manifestation of the Company accountability and has been approved by the GMS.
- The Company provides awards for excellent employees but also firmly imposes sanctions over the employees who committed violations.

- Fungsi *Legal & Compliance* bersama Konsultan Eksternal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") telah melaksanakan *Assessment* terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) tahun 2019 dengan capaian skor 77,730 (kategori "Baik").
- Untuk Tahun Buku 2020, *assessment* terhadap penerapan GCG dilakukan secara internal (*self-assessment*) dengan capaian skor 81,944 (kategori "Baik").
- Legal & Compliance function together with External Consultants, the Financial and Development Supervisory Agency ("BPKP") has conducted the Good Corporate Governance (GCG) assessment in 2019 with a score of 77,730 ("Good" predicate).
- For the 2020 Fiscal Year, the GCG assessment was carried out internally (*self-assessment*) with a score of 81,944 ("Good" predicate).

TANGGUNG JAWAB**RESPONSIBLE**

Merupakan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Perusahaan dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak *Stakeholders*, keselamatan dan kesehatan kerja serta penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat.

Refer to conformity of the Company's managerial practice to prevailing regulations as well as sound corporate principles including fulfillment of the stakeholders' rights, occupational health and safety as well as avoidance of unhealthy business practices.

Bentuk Implementasi**Implementation**

- Memiliki perangkat GCG, Anggaran Dasar serta kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- Seluruh SDM Perusahaan senantiasa memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kepada peraturan yang berlaku.
- Melakukan proses audit oleh Audit Eksternal dan hasilnya tidak adanya temuan material dari hasil Laporan Keuangan tersebut.
- Penerapan Pedoman Perilaku Perusahaan.

- Already supported by GCG tools, Articles of Association and Corporate Social Responsibility (CSR) policies.
- All of the Company's personnel always ensure implementation of their duties and responsibilities based on the prevailing regulations.
- Conducted an audit process by External Audit and the result confirmed that there were no material findings from the Financial Statements audit result.
- Implementation of the Company's Code of Conduct.

KEMANDIRIAN**INDEPENDENCY**

Merupakan suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat.

Refer to a condition in which the Company is managed professionally without any conflict of interest and intervention from any party that is against the prevailing laws and regulations and the principles of a healthy company.

Direksi dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan peran pengawasan atas jalannya Perusahaan bebas dari intervensi pihak luar.

The Board of Directors in carrying out management duties of the Company and the Board of Commissioners in carrying out a supervisory role in the running of the Company free from intervention by external party.

Bentuk Implementasi

- Manajemen serta pekerja telah menandatangani pakta integritas. Hal ini mendukung kebijakan mengenai benturan kepentingan (*Conflict of Interest*).
- Setiap organ GCG Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing tanpa adanya intervensi dan dominasi pihak lainnya.
- Perusahaan melakukan *Assessment* GCG, baik kepada Pemegang Saham maupun kepada Dewan Komisaris dan Direksi, yang hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
- Para Pemegang Saham tidak mengintervensi Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengelola Perusahaan secara Profesional dan Independen.
- Penyelenggaraan pertemuan secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bentuk implementasi *Check and Balances*.

Implementation

- Management and employees have signed an integrity pact. This supports a policy on Conflict of Interest.
- Every of Company's GCG organ, including the General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors have carried out their respective duties and responsibilities without intervention and domination of other parties.
- The Company has conducted GCG Assessment, both to Shareholders and to the Board of Commissioners and Board of Directors, which results show an increase every year.
- Shareholders do not intervene in the Board of Commissioners and Board of Directors to manage the Company in a Professionally and Independently.
- Organizing regular meetings by the Board of Commissioners and Board of Directors as a form of implementation of Checks and Balances.

KEWAJARAN



Merupakan prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap *Stakeholders* tersebut diberikan perlindungan, kesempatan dan perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

FAIRNESS

A principle of justice and equality in fulfilling the stakeholders' rights that arise based on agreements and prevailing laws and regulations. The stakeholders are provided with protection, opportunity and fair treatment to file any claim in case of violation of their rights.

Bentuk Implementasi

- Perusahaan memiliki peraturan yang mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Implementation

- The Company has formulated regulations to arrange rights and obligations related to all stakeholders.

- Perusahaan memberikan perlakuan yang adil dan proporsional kepada seluruh pekerja, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya.
- Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media elektronik (*Website*), saluran pelayanan *Call Centre* dan saluran Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
- The Company provides fair and equal treatment to all employees, work partners and other stakeholders.
- The Company has provided opportunities to all stakeholders via electronic media (*Website*), *Call Center* service channels and *Whistleblowing System* channels.

Tujuan Penerapan GCG

Dalam penerapan GCG PTK memiliki tujuan yaitu memaksimalkan nilai Perusahaan dan terlaksananya pengelolaan secara profesional serta mandiri, menciptakan proses pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap seluruh pemangku kepentingan.

GCG Implementation Objectives

The GCG implementation has objectives of maximizing the Corporate values and realizing professional as well as independent management. Other objectives are focused in creating a decision making process by all of the Company's structures based on high moral value, compliance to laws and regulations, as well as in supporting the embodiment of corporate social responsibility (CSR) in all stakeholders.

PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS



Memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham

- Pertamina Trans Kontinental dituntut memberikan dukungan pelayanan kepada aktivitas usaha PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham.
- Pertamina Trans Kontinental dituntut senantiasa memiliki kinerja yang baik, sehat dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan laba dan memberikan kontribusi berupa dividen kepada Pemegang Saham.

Providing added value to Shareholders

- Pertamina Trans Kontinental is expected to support any services to business activities of PT Pertamina (Persero) as a Shareholder.
- Pertamina Trans Kontinental is expected to continuously achieve good, sound, and sustainable performance, as well as generate profit and contribute in the form of dividend to the Shareholders.

PELANGGAN & MITRA KERJA CUSTOMER AND BUSINESS PARTNER



Menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra kerja

- Pertamina Trans Kontinental dituntut memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan guna menjaga kepercayaan pelanggan.

Maintaining trust from the customers and business partners

- Pertamina Trans Kontinental is expected to provide the best services to customers to uphold the customers' trust.

	- Pertamina Trans Kontinental dituntut menjaga hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan para mitra kerja guna menjaga kepercayaan para mitra kerja - Pertamina Trans Kontinental is expected to maintain mutually-benefitted cooperations with business partners to uphold the customers' trust.
PEKERJA EMPLOYEES 	Menjadi Tempat Kerja Terpercaya Dimata Pekerja. Pertamina Trans Kontinental memiliki tanggung jawab membangun hubungan kemitraan dengan pekerja, dengan menjadi tempat kerja yang ideal bagi profesional yang berinvestasi untuk pengembangan karir, dan memastikan lingkungan kerja yang kondusif bagi pekerja. Becoming a Trustworthy Workplace for Employees Pertamina Trans Kontinental is responsible for building partnerships with employees, by being an ideal workplace for professional who are investing in career development, and ensuring a conducive environment for employees.
PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN/ OTHER STAKEHOLDERS 	Menjaga Keseimbangan Kepentingan dari Pemangku Kepentingan Lainnya Pertamina Trans Kontinental harus menjaga keseimbangan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan praktik pengelolaan yang sehat. Keeping Balance of Interest from other Stakeholders Pertamina Trans Kontinental should maintain the balance of interest from various other stakeholders. This is carried out by complying with the prevailing regulations and sound management practices.
OTORITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP / ENVIRONMENT MANAGEMENT AUTHORITY 	Aktivitas Usaha yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup Sebagai Perusahaan jasa yang memiliki kegiatan usaha di bidang pelayaran, maritim dan logistik, Pertamina Trans Kontinental harus menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh kesadaran untuk mengelola dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Environment-Related Business Activities As a service company with business activities in shipping, maritime, and logistic, Pertamina Trans Kontinental should perform its business activities with extreme awareness in managing the impacts from the implemented business activities to environment..

Sosialisasi Penerapan GCG

PTK secara berkesinambungan terus melakukan sosialisasi penerapan GCG, kepada seluruh pekerja, pejabat Perusahaan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, serta para pemangku kepentingan lain.

Socialization on GCG Implementation

PTK continuously performs socialization of the GCG implementation to all employees, company executives including the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as other stakeholders. In 2020,

Selama tahun 2020 ada beberapa program/kegiatan sosialisasi GCG yang telah dilaksanakan, antara lain melalui media buletin, *wallpaper desktop* komputer Pekerja, *banner*, *broadcast*, serta acara Vendor Day.

Roadmap dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan

Pada tahun 2020, PTK telah melakukan peningkatan dalam pengembangan prinsip-prinsip GCG. Berikut adalah peningkatan atau penguatan yang dilakukan oleh Perusahaan:

1. Pelaksanaan *Assessment* GCG oleh *external assessor* setiap 2 (dua) tahun sekali;
2. Sosialisasi GCG melalui media digital seperti siaran TV Internal, *Broadcast* dan pembuatan Video Sosialisasi;
3. *Compliance Awareness Programme* melalui *Broadcast*, *Desktop Wallpaper* dan *Banner*;
4. Pembuatan Pedoman Penanganan Pelaporan Pidana dan Pemberian Bantuan Hukum No. A-001/F1000/2019-SO Revisi Ke-00 Juli 2019;
5. Pembaruan standar penulisan *soft structure* GCG:
 - Pedoman *Code of Conduct* No. A-002/F1000/2019-SO Revisi Ke-00
 - Pedoman *Code of Corporate Governance* No. A-003/F1000/2019-SO Revisi Ke-00
 - Pedoman Gratifikasi No. Pdm-003/F0000/2016-SO Revisi Ke-01
 - Pedoman *Conflict of Interest* No. Pdm-004/F0000/2016-SO Revisi Ke-01
 - SK Ratifikasi Pedoman PT Pertamina (Persero) Nomor 007/M00000/2017-SO Revisi Ke-0 Mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
 - TKO Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) No. B-008/F1000/2019-SO Revisi Ke-00
 - TKO Penyampaian Laporan-Laporan Atas Program Kepatuhan Melalui *Compliance Online System* No. B-007/F1000/2019-SO Revisi Ke-00

several GCG socialization programs/activities that has been implemented, such as via newsletter media, computer desktop wallpaper Workers, banners, broadcasts, and Vendor Day events.

Corporate Governance Roadmap and Enforcement

In 2020, PTK has conducted improvements in GCG principles development. The improvement or enforcement done by the Company are as follows:

1. Implementation of GCG Assessment by external assessor, the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP);
2. GCG socialization through digital media, such as Internal TV publication, Broadcast and Socialization Video making;
3. Compliance Awareness Programme through Broadcast, Desktop Wallpaper and Banner;
4. Preparation of Criminal Act Reporting Process and Legal Assistance Support Policy No. A-001/F1000/2019-SO 00 Revision July 2019;
5. Update of the GCG soft-structure standards, as follows:
 - Code of Conduct Policy No. A-002/F1000/2019-SO 00 Revision
 - Code of Corporate Governance No. A-003/F1000/2019-SO Revisi Ke-00
 - Gratification Policy No. Pdm-003/F0000/2016-SO 1st Revision
 - CoI Guideline No. Pdm-004/F0000/2016-SO -01st Revision
 - PT Pertamina (Persero) Manual Ratification Decree Number 007/M00000/2017-SO 0 Revision concerning Obligation to Submit State Officials Assets Report (LHKPN)
 - Whistleblowing System (WBS) TKO No. B-008/F1000/2019-SO 00 Revision
 - Reports Submission TKO on Compliance Program via Compliance Online System No. B-007/F1000/2019-SO 00 Revision

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

PTK melakukan *assessment* penerapan GCG secara berkala yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Indikator/ parameter penilaian merujuk pada Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, seperti yang digunakan PT Pertamina (Persero) sebagai induk Perusahaan dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penilaian dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG di PTK terhadap praktik-praktik terbaik GCG serta mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Pada tahun 2020, PTK melakukan asesmen GCG secara mandiri (*Self Assessment*).

Prosedur Penilaian

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG pada prinsipnya bisa dilakukan sendiri oleh Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, penilaian sendiri dapat meminta bantuan (asistensi) dari penilai independen.

Penilaian juga dapat dilaksanakan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk Dewan Komisaris, melalui proses sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

GCG Implementation Assessment

PTK regularly carries out assessment on GCG implementation. The assessment is held in accordance with Minister of SOE Regulation Number PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise. Indicators/parameters of assessment refers to Secretary of Ministry of SOE Decree Number SK-16/S.MBU/2012 of 1 October 2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation in State Owned Enterprise, as administered by PT Pertamina (Persero) as Parent Company and a State-Owned Enterprise (SOE).

The assessment is carried out in order to obtain an overview regarding the conditions for implementing GCG in the PTK best practices of GCG as well as identifying areas that require more continuous improvement continue. In 2020, PTK will conduct an Independent GCG assessment (Self Assessment).

Assessment Procedure

In principle, the assessment on GCG implementation is could be self-conducted by the Company. Self-assessment could use of assistance from an independent assessor.

The assessment could also be accomplished by an independent assessor appointed by the Board of Commissioners through a process, in accordance with the provisions in goods and services procurement. In a more effective and efficient point of view, the assessment could be performed by using Government institutions' service with competence in GCG, directly appointed by the Board of Directors. Results of the assessment and evaluation are then reported to GMS along with Annual Report submission.

Kriteria Penilaian

Ruang lingkup penilaian GCG meliputi pengujian atas semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG, yaitu:

- Komitmen terhadap penerapan GCG secara berkelanjutan
- Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Pengungkapan informasi dan transparansi
- Aspek lainnya

Hasil Penilaian

Untuk tahun buku 2020, *assessment* GCG di PTK dilakukan secara mandiri (*self assessment*) dengan hasil skor GCG mencapai 81,944 (masuk dalam kategori “Baik”). Hasil ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan skor GCG tahun buku 2019 yang dilakukan oleh BPKP, di mana saat itu PTK mendapatkan skor 77,730.

Penilaian *assessment* GCG Perusahaan berdasarkan beberapa aspek pengujian/ indikator/ parameter yang memiliki bobot masing-masing sesuai indikatornya dan menghasilkan nilai atau skor penilaian tersebut. Berikut ringkasan hasil penilaian/ evaluasi atas penerapan GCG pada Perusahaan:

Assessment Criteria

The scope of GCG assessment includes examining all aspects supporting the GCG, which are:

- Commitment on sustainable GCG implementation Shareholders and GMS/Capital Owners
- Board of Commissioners
- Board of Directors
- Information disclosure and transparency
- Other aspects

Assessment Results

For the 2020 fiscal year, the GCG assessment in CAR is carried out by self assessment with the GCG score result achieved 81.944 (classified in the “Good” category). This result experienced a significant improvement compared to the GCG score for the 2019 fiscal year, which was carried out by BPKP, where PTK achieved a score of 77.730.

The GCG assessment is based on several assessment/ indicators/parameters aspects, which have their respective weights according to the indicators and produce the value or score of the assessment. The following is summary of the GCG assessment evaluation results on GCG implementation in the Company:

Komparasi Hasil Penilaian Assessment GCG Perusahaan 2018-2020

Komparasi Hasil Penilaian Assessment GCG Perusahaan 2018-2020

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Capaian Tahun 2020 Achievement in 2020		Capaian Tahun 2019 Achievement in 2019		Capaian Tahun 2018 Achievement in 2018	
		Skor Score	Capaian (%) Achievement	Skor Score	Capaian (%) Achievement	Skor Score	Capaian (%) Achievement
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan <i>Good Corporate Governance Implementation</i>	7,000	6,924	98,91	6,671	95,30	7,000	100
Pemegang Saham dan RUPS <i>Shareholders/ capital Owners</i>	9,000	7,190	79,89	7,060	78,44	7,273	80,81
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>	35,000	28,850	82,43	26,652	76,15	29,572	84,49
Direksi <i>Board of Director</i>	35,000	31,587	90,25	29,971	85,63	29,604	84,58
Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information disclosure and</i>	9,000	7,394	82,16	7,376	81,96	6,611	73,46
Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Nilai rata-rata <i>Average Score</i>	100,00	81,944		77,730		80,060	80,06
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG <i>Classification of GCG Implementation Quality</i>		"Baik"		"Baik"		"Baik"	

Dari penilaian yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi guna peningkatan penerapan dan pelaksanaan GCG di lingkungan PTK. Diperoleh setidaknya 5 (lima) rekomendasi yang menjadi *area of improvement* dari 6 (enam) parameter terukur.

Based on the assessment, as the assessor team, BPKP has provided several recommendations to improve GCG implementation at PTK. There are 5 (five) recommendations that became the area of improvement from 6 (six) measured parameters.

Tindak Lanjut atas Hasil Penilaian GCG

Berdasarkan hasil penilaian diperoleh rekomendasi guna meningkatkan penerapan dan pelaksanaan GCG di PTK. Adapun rekomendasi *assessment* 2020 tersebut adalah sebagai berikut:

Follow Up of GCG Assessment Results

Based on results of the assessment, several recommendations were obtained to improve the GCG implementation at PTK. The 2020 assessment recommendations are as follows:

Rekomendasi Assessment 2020

Recommendation and Follow-Up

Parameter Penilaian Assessment Parameter	Rekomendasi dan Tindak Lanjut Recommendation and Follow-Up	
Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan <i>Commitment to sustainable GCG implementation</i>	- Evaluasi dan tindak lanjut hasil rekomendasi <i>assessment</i> GCG sebelumnya; - Peninjauan berkala terhadap perangkat pendukung Pengendalian Gratifikasi.	- Evaluation and follow up on the results of previous GCG assessment recommendations; - Periodic review on the Anti-Gratification supporting infrastructures
Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS / Owners of Capital</i>	- Menetapkan Komisaris Independen; - Pengesahan/Persetujuan RKAP tepat waktu (sebelum tahun anggaran berjalan).	- To appoint an Independent Commissioner; - The RKAP ratification/approval shall be on time (before the current fiscal year).
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>	- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dimasukkan sebagai bagian dari RKAP dan disetujui oleh Pemegang Saham; - Menyusun rencana kerja dan melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham.	- Board of Commissioners' Annual Work Plan and Budget is included as part of the RKAP and approved by the Shareholders; - Prepare a work plan and carry out external auditors candidate appointment process and submit to shareholders.
Direksi <i>Board of Director</i>	- Sistem pengukuran kinerja pekerja didukung dengan aplikasi komputer; - Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum ke Pemegang Saham (tidak berbarengan); - Terdapat penyelesaian atas keluhan <i>stakeholders</i> secara tuntas.	- Employee performance assessment system shall be supported by computerized applications; - Quarterly and Annual Management Reports shall be submitted to the Board of Commissioners before presented to Shareholders (not simultaneously); - There shall be a complete resolution for the stakeholder complaints.
Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information disclosure and transparency</i>	Terdapat rencana dan pelaksanaan <i>gathering</i> dengan <i>stakeholder</i>	There is a plan and implementation of gathering with stakeholders
Faktor lainnya <i>Other Factors</i>	Tidak ada	None

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

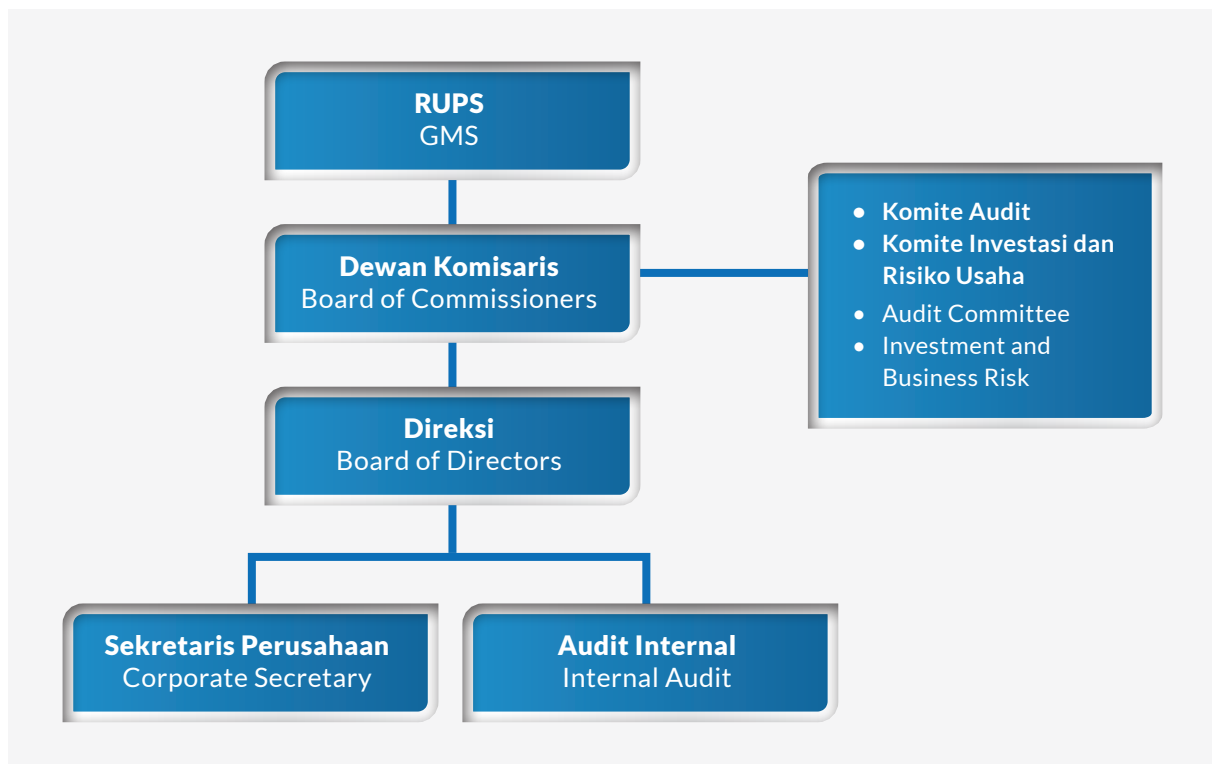
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola perusahaan tergambarkan pada organ utama tata kelola Pertamina Trans Kontinental terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk komite dan fungsi berikut ini:

- Komite Audit
- Komite Investasi dan Risiko Usaha
- Fungsi Corporate Secretary
- Fungsi Internal Audit

Structure and Infrastructure of Corporate Governance

In accordance to the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the corporate governance structure is reflected in the main governance structure of Pertamina Trans Kontinental including the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors. In carrying out their duties, the Board of Commissioners and Board of Directors have established the following committees and functions:

- Audit Committee
- Investment and Business Risk Committee
- Corporate Secretary Function
- Internal Audit Function



Organ Utama Tata Kelola Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan. Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan yang penting terkait dengan pengelolaan PTK, baik untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terkait pelaksanaan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Dewan Komisaris bertugas memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi dalam menentukan arah dan tujuan pencapaian kinerja Perusahaan. Segala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Pertamina Trans Kontinental serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki *Board Manual* yang mengatur tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Direksi

Direksi memiliki fungsi utama dalam pengelolaan Perusahaan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja setiap tahunnya. Pelaksanaan tugas Direksi mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada tata tertib kerja (*Board Manual*) yang mengatur tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Main Corporate Governance Structure

General Meeting of Shareholders

According to the Limited Liability Companies Law and the Company's Articles of Association, General Meeting of Shareholders (GMS) assumes the highest position in the corporate governance structure and undertakes authorities that are not granted to Board of Directors or Board of Commissioners under the set limit. Shareholders perform important decision making related to PTK management, both for short- and long-term interests in the GMS, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Board of Commissioners

Board of Commissioners has supervisory function related to Company management by the Board of Directors. The Board of Commissioners has the duty of directing and advising the Board of Directors in determining the Company's objectives and performance target. In performing the duties and responsibilities, the Board of Commissioners adheres the Articles of Association of Pertamina Trans Kontinental, as well as the prevailing laws and regulations. Moreover, the Board of Commissioners has Board Manual that regulates the work procedure of Board of Commissioners and Board of Directors. The Commissioners also should implement corporate governance principles in every activity performed.

Board of Directors

Board of Directors hold key function in Company management to achieve the determined targets and increase performance every year. The implementation of duties by the Board of Directors refers to the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations, and adheres the Board Manual which regulates the work procedure of the Board of Commissioners and Board of Directors. The Board of Directors also should implement corporate governance principles in every activity performed.

Organ Pendukung Tata Kelola

Komite-Komite

PTK memiliki Komite Audit yang mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengendalian internal, Komite Investasi & Risiko Usaha yang mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengendalian risiko khususnya atas investasi usaha yang dilakukan.

Corporate Secretary

Corporate Secretary diangkat oleh Direksi dan bertugas membantu Direksi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya utamanya, yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan juga memiliki peran mengelola dan menjaga komunikasi antara pihak internal dengan pihak eksternal termasuk pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Audit Internal

Audit Internal berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama yang bertugas untuk memberikan masukan yang independen dan obyektif terkait pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan.

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

Infrastruktur tata kelola perusahaan PTK terdiri dari berbagai pedoman dan kebijakan tata kelola perusahaan atau yang disebut sebagai *soft structure* GCG.

Kebijakan tersebut meliputi *Code of Good Corporate Governance*, *Board Manual*, *Code of Conduct*, Piagam Komite, Pedoman *Conflict of Interest*, Pedoman Fungsi Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Gratifikasi, dan Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pedoman dan Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh manajemen dan pekerja yang secara berkala dilakukan sosialisasi dan evaluasi.

Corporate Governance Supporting Structure

Committees

PTK has Audit Committee that supports the Board of Commissioners in realizing internal control function, as well as Investment & Business Risk Committee that backs the Board of Commissioners in performing risk control function, especially in business investment.

Corporate Secretary

Corporate Secretary is appointed by and in charge of assisting the Board of Directors in performing its main duties and responsibilities, related to information disclosure implementation. The Corporate Secretary also actively manages and maintain communication between internal and external parties, including shareholders and stakeholders.

Internal audit

Internal Audit operates under the direct supervision of President Director which in charge of giving independent and objective inputs related to internal control and corporate governance process of the Company.

Corporate Governance Infrastructure

Pertamina Trans Kontinental has corporate governance infrastructure, comprising various guidelines and policies of corporate governance, or known as GCG soft structure.

Corporate governance policies cover *Code of Good Corporate Governance*, *Board Manual*, *Code of Conduct*, *Committee Charter*, *Conflict of Interest Guidelines*, *Gratification Control Function Guidelines*, *Gratification Guidelines*, and *Submission Obligation of State Official Assets Report (LHKPN) Guidelines*. The Corporate Governance Guidelines and Policies prevail for all management and employees, on which periodical socialization and evaluation are performed.

Kebijakan Tata Kelola PTK

PTK's Corporate Governance Policies

PARAMETER PENILAIAN

Assessment Parameter

Code of Corporate Governance ditetapkan berdasarkan No. A-003/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00. Pedoman mengatur mengenai:

- Referensi penerapan tata kelola perusahaan;
- Struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari organ utama (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dan organ pendukung (*Corporate Secretary*, Internal Audit, Biro Sekretariat Komisaris dan Komite Audit);
- Proses tata kelola perusahaan yang terdiri dari pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, RJPP dan RKAP, mekanisme rapat, benturan kepentingan, pengelolaan operasional, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya;
- Hubungan antara Pertamina Trans Kontinental dengan Induk dan Anak Perusahaan;
- Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan.

The *Code of Corporate Governance* is stipulated based on Board of Directors Decree No. A-003/F1000/ 2019-S0 Revision-00. The guidelines regulates:

- References of corporate governance implementation.
- Corporate governance structure, consisting of the main structures (GMS, Board of Commissioners and Board of Directors), and supporting structures (*Corporate Secretary*, Internal Audit, Commissioner Secretariat Bureau, and Audit Committee).
- Corporate governance process, consisting of appointing and dismissing the Board of Commissioners and Board of Directors, RJPP and RKAP, meeting mechanism, conflict of interest, operational management, financial management, and others.
- Relationship between Pertamina Trans Kontinental the Parent Company, as well as the Subsidiaries.
- Relationship with stakeholders.

BOARD MANUAL

Board Manual

Mengatur mengenai tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Regulate the procedures for working relationships between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

PEDOMAN KOMITE

Committee Guidelines

Kebijakan mengenai tata cara kerja Komite, meliputi:

- Piagam Komite Audit
- Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha

Policies on the Committee's work procedure include:

- Audit Committee Charter
- Investment and Business Risk Committee Charter

PEDOMAN ETIKA USAHA & TATA PERILAKU

Code of Conduct

Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ditetapkan berdasarkan No. A-002/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00, dan menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Pertamina Trans Kontinental dalam mengelola Perusahaan.

The *Code of Conduct* is stipulated based on Board of Directors Decree No. A-002/F1000/2019-S0 Revision-00, and became a reference of conduct to the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees of Pertamina Trans Kontinental in managing the company.

Kebijakan Tata Kelola PTK

PTK's Corporate Governance Policies

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Conflict of Interest

Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) ditetapkan berdasarkan No. Pdm-004/F0000/2016-S0 Revisi-01. Pedoman mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam benturan kepentingan dan mekanisme pelaporan benturan kepentingan.

The Conflict of Interest Guidelines is stipulated based on Board of Directors Decree No. Pdm-004/F0000/2016-S0 Revision-01. The Guidelines regulate issues related to ethics in conflict of interest and reporting mechanism on conflict of interest.

PEDOMAN FUNGSI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratification Control Function Guidelines

Pedoman Fungsi Pengendali Gratifikasi ditetapkan berdasarkan No. Pdm-005/F0000/2016-S0 Revisi-1. Pedoman mengatur prinsip dasar pengendalian gratifikasi, parameter tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi, serta mekanisme pelaporan gratifikasi.

The Gratification Control Function Guidelines is stipulated based on Board of Directors Decree No. Pdm-005/F0000/2016-S0 Revision-1. The Guidelines regulated basic principles of gratification control, follow-up parameter on gratification reporting management, as well as gratification reporting mechanism.

PEDOMAN GRATIFIKASI

Gratification Guidelines

Pedoman Gratifikasi, Penolakan & Penerimaan Hadiah/ Cenderamata, Hiburan (*Entertainment*) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. Pdm-003/F0000/2016-S0 (Revisi-1). Pedoman mengatur mengenai gratifikasi. Pedoman tersebut mengatur prinsip dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pemberian dan pemberian atas permintaan pihak ketiga.

The Gratification, Rejection & Receiving Reward/ Souvenir, Entertainment Guidelines is stipulated based on Board of Directors Decree No. Pdm-003 / F0000 / 2016-S0 (Revision-1). The Guidelines regulate basic principles, provisions in laws and regulations that organize gratification classification, as well as boundaries of receivment, provision of gift, and gift upon request from a third party.

PROSEDUR WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System Procedure

Prosedur Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. B-008/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00 yang mengatur mengenai pengelolaan penanganan pengaduan dan penyingkapan *whistleblowing system*.

The Whistleblowing System (WBS) Management Procedure is stipulated based on Board of Directors Decree No. B-008 /F1000/2019-S0 Revision-00 that regulates complaint management and whistleblowing system disclosure.

Memperkuat Implementasi GCG PTK

Dalam memaknai tata kelola perusahaan yang baik, PTK memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu mendorong GCG sebagai bagian dari pengelolaan Perusahaan melalui penerapan suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, kesetaraan dan tanggung jawab.

PTK telah melakukan berbagai inisiatif implementasi GCG, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak independen dalam mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable governance*).

Dalam rangka memperkuat implementasi GCG tahun 2020, PTK telah melakukan beberapa program yang meliputi:

1. Penguatan Komitmen Implementasi GCG.

Kegiatan yang dilakukan adalah penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Insan PTK.

2. Sosialisasi dan Internalisasi GCG.

Kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan GCG bagi pekerja baru, penyegaran GCG bagi seluruh pekerja, pemberian materi GCG dan sosialisasi GCG dalam berbagai media Perusahaan.

3. Implementasi Pengendalian Gratifikasi.

PTK melaksanakan implementasi pengendalian Gratifikasi serta melakukan sosialisasi Gratifikasi.

4. Pengelolaan *Whistleblowing System*.

Pengelolaan *Whistleblowing System* dilakukan oleh Fungsi Legal & Compliance dan dipantau langsung oleh *Chief Compliance Officer* dan dapat pula bekerja sama dengan Fungsi Internal Audit untuk menindaklanjuti laporan. Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* melakukan evaluasi atas pengelolaan *Whistleblowing System* di Perusahaan.

Strengthening GCG Implementation in PTK

In interpreting good corporate governance, PTK has basic principles, including to encourage GCG as part of the management of the Company through the implementation of a system that reflects the principles of information disclosure, accountability, equality and responsibility.

PTK has carried out various GCG implementation initiatives, either independently or assisted by independent parties in achieving sustainable corporate governance.

In order to strengthen the implementation of GCG in 2020, PTK has carried out several programs including:

1. Strengthening Commitment to GCG Implementation.

The activities carried out were the signing of the Integrity Pact by all PTK personnel.

2. Socialization and Internalization of GCG.

Activities carried out include the introduction of GCG for new employees, refreshing GCG for all employees, providing GCG materials and socializing GCG in various Company media.

3. Implementation of Gratification Control.

PTK carries out the implementation of Gratification control and conducts Gratification socialization

4. Management of the *Whistleblowing System*.

Management of the *Whistleblowing System* is carried out by the Legal & Compliance Function and directly monitored by the Chief Compliance Officer and can also work together with the Internal Audit Function to follow up on reports. The *Whistleblowing System* Management Team evaluates the management of the *Whistleblowing System* in the Company.

**5. Partisipasi Aktif dalam Berbagai Perlombaan/
Award Terkait GCG.**

Keikutsertaan dalam ajang APSA dan ARA.

6. Pengukuran Implementasi GCG.

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan *assessment* GCG tahun 2020, dengan pencapaian *score* pada tahun 2020 berdasarkan penilaian parameter Kementerian BUMN meningkat menjadi 81,944 atau BAIK.

7. Penerapan ISO dan SMK3

Dalam rangka melindungi pekerjaannya, PTK menerapkan OHSAS 18001:2007, sedangkan untuk menjaga mutu kepada para pelanggan, Perusahaan menerapkan ISO 9001:2008.

8. Pengukuran Kinerja

Untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan meningkatkan kinerja bisnis, PTK mengikuti Quality Management Assessment (QMA) berdasarkan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP). *Assessment* dilakukan secara menyeluruh meliputi proses dan hasil kinerja operasional dan manajerial, dan akan diberikan umpan balik berupa feedback report agar Perusahaan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus-menerus dan berkesinambungan. KKEP dilaksanakan berdasarkan Keputusan Keputusan Direktur Utama No. Kpts-62/C0000/2017-S0, tanggal 3 November 2017 tentang Penilaian dan Pencapaian Kinerja Ekselen Perusahaan Berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) dan Surat Perintah Direktur Utama No. Kpts-61/C0000/2015-S0 tanggal 3 November 2017 tentang Tim Pelaksana Quality Management Assessment (QMA) Berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP).

**5. Active participation in various competitions/
awards related to GCG.**

Participation in the APSA and ARA events.

6. Measurement of GCG Implementation.

The activity carried out was to carry out a GCG *assessment* in 2020, with the achievement of the *score* in 2020 based on the *assessment* of the parameters of the Ministry of SOEs increasing to 81,944 or GOOD.

7. ISO and SMK Implementation

In order to protect its employees, PTK applies OHSAS 18001: 2007, while to maintain quality for customers, the Company implements ISO 9001: 2008.

8. Performance Measurement

To make improvements on an ongoing basis and improve business performance, PTK follows Quality Management Assessment (QMA) based on Pertamina's Excellent Performance Criteria (KKEP). The *assessment* is carried out thoroughly includes processes and operational performance results and managerial, and will be given feedback in the form of a feedback report for the company to make improvements and performance improvements continuously and continuously. KKEP is implemented based on Decree President Director Decree No. Kpts-62/C0000/2017-S0, dated November 3, 2017 regarding Appraisal and Achievement of Performance Performance Criteria-Based Pertamina's Excellent Criteria (KKEP) and a Letter of Order President Director No. Kpts-61/C0000/2015-S0 November 3, 2017 concerning the Implementation Team Quality Management Assessment (QMA) Based on Pertamina's Excellent Performance Criteria (KKEP).

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholder

- Sebagai perwujudan dari tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menjamin untuk memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan kepada RUPS, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- As a manifestation of good corporate governance, the Company guarantees to provide all information relating to the Company to the GMS, as long as it does not conflict with laws and regulations.

RUPS merupakan forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. RUPS berwenang mengambil seluruh keputusan yang berkaitan dengan kepentingan usaha PTK dan Anak Perusahaan dan memiliki kekuatan hukum yang sah serta mengikat dalam mengambil keputusan.

Sesuai dengan *Code of Corporate Governance* (CoCG), RUPS terdiri atas:

RUPS Tahunan, untuk mengesahkan:

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), diselenggarakan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah periode akuntansi yang baru dimulai.
- Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan, selambat-lambatnya dalam enam bulan setelah tahun buku berakhir.

RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Komisaris dan/atau Direksi.

Selain itu Pemegang Saham juga dapat menyelenggarakan pengambilan Keputusan Sirkuler (RUPS Sirkuler), yakni pengambilan keputusan di

GMS acts as company structure assuming the highest power in the corporate governance structure. GMS has the authority to make all decisions related to the business interest of PTK and Subsidiaries. As the highest authority in PTK corporate governance structure, GMS has the rightful and binding power in making decisions.

In accordance with the *Code of Corporate Governance* (CoCG), the GMS consists of:

Annual GMS, to ratify:

- Company Work Plan and Budget (RKAP), which is held at the latest thirty days after the commencement of new accounting period.
- Annual Report and Annual Calculation, which are started at the latest six months after the last fiscal year.

Extraordinary GMS which could be held anytime if it is deemed necessary by Shareholders or based on the proposal of Board of Commissioners and/or Board of Directors

In addition, Shareholders also could organize a Circular Decision-Making (Circular GMS), which is a decision making outside the GMS (without physical

luar RUPS (tanpa kehadiran fisik). Ketentuan tentang Keputusan Sirkuler diatur dalam Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai Pasal 91 UU Perseroan Terbatas, Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik, dengan syarat seluruh Pemegang Saham dengan hak suara memberikan persetujuan tertulis atas usul RUPS yang akan diputuskan.

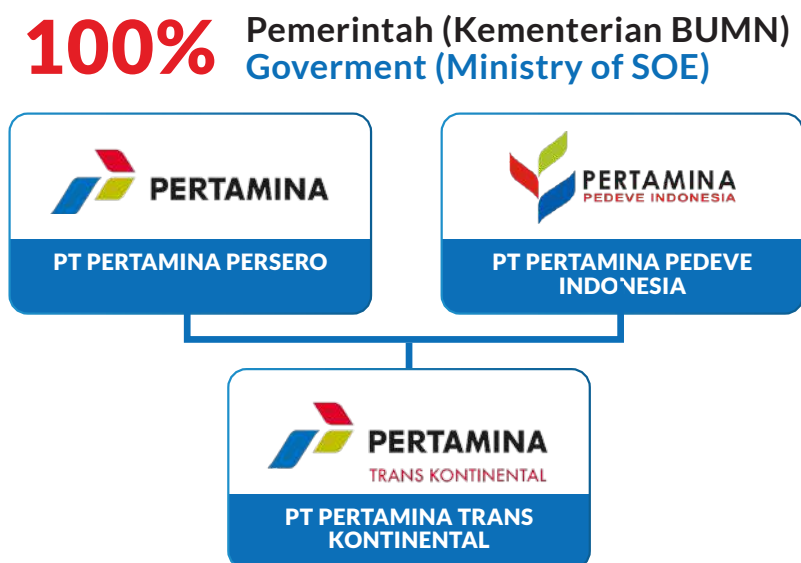
Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Berikut adalah informasi mengenai struktur dan komposisi pemegang saham, serta persentase kepemilikan saham PTK per 31 Desember 2020.

attendance). Stipulation on Circular Resolutions is regulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. As per Article 91 of Limited Liability Companies Law, Shareholders are allowed to make binding decisions outside the GMS with the same legal force as when GMS Resolution is made physically, provided all Shareholders with voting rights gives a written approval to GMS proposal that will be decided.

Majority and Controlling Shareholders

The following information illustrated the structure and composition of shareholders, as well as PTK shares ownership per December 31, 2020.



Hak Pemegang Saham

Berdasarkan CoCG, hak pemegang saham antara lain:

- Menghadiri dan memberikan suara dalam pada RUPS;
- Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik kepada Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat

Shareholders' rights

In accordance with the CoCG, Shareholders have the rights in:

- Attending and voting in GMS;
- Obtaining material information (including the right to ask) from the Board of Commissioners and Board of Directors on financial and other issues relating to the Company in a thorough,

waktu dan teratur agar memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan penanaman modal berdasarkan informasi yang diterimanya;

- Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktunya RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan;
- Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG.

Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang RUPS

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan jangka panjang Perusahaan dan dilakukan secara wajar dan transparan. Wewenang RUPS adalah sebagai berikut:

- RUPS dapat mendelegasikan kepada Kuasa RUPS sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga independensi antar-organ Perusahaan. Kuasa RUPS bukan Komisaris Perusahaan;
- Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;
- Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun masing-masing Direksi dan Komisaris;

prompt, and orderly manner, so that it allows the Shareholders to make capital investment decision based on the information received;

- Holding GMS in case the Board of Directors and/or Board of Commissioners are negligent to hold Annual GMS and incidentally Extraordinary GMS if deemed necessary, for example if the Company encounters significant performance;
- Acquiring explanation on GCG implementation.

The Shareholders do not perform intervention to the duties, functions, and authorities of Board of Commissioners and Board of Directors by not eliminating the authority of GMS in exercising its rights in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

The Shareholders through GMS holds the authority to perform its rights as per the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

GMS Authority

Decisions made by the GMS are based on long-term interest of the Company. The GMS and/or GMS decision-making are fairly and transparently conducted. It holds authority, such as follows:

- Having the capacity to delegate to GMS attorney in accordance with the provisions stated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. Maintaining independence among Company structures. The GMS Attorney is not the Company's Commissioner.
- Appointing and dismissing Directors and Commissioners.
- Ratifying Company Long-Term Plan (RJPP) and Company Work Plan and Budget (RKAP).
- Performing performance assessment collectively and individually on the Directors and Commissioners.

- Menetapkan Auditor Eksternal untuk melakukan Audit keuangan atas laporan keuangan berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris;
- Menetapkan Remunerasi bagi Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja;
- Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik yang terkait dengan Komisaris;
- Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Komisaris dan Direksi;
- Mendelegasikan kepada Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
- Menetapkan maksimum masa jabatan Pemangku Jabatan (PJ) bagi Komisaris dan Direksi;
- Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan untuk Laba yang Ditahan dan Cadangan; Dividen kepada Pemegang Saham; Bonus Direksi, Komisaris dan Pekerja.
- Appointing External Auditor to perform financial Audit on the financial statement based on proposals received from the Board of Commissioners.
- Stipulating remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors by considering performance achievement.
- Stipulating policies on the possibilities of conflict related to the Board of Commissioners.
- Determining maximum number of concurrent positions allowed for a Commissioner and a Director.
- Delegating duties and authority of the Board of Directors to the Board of Commissioners.
- Stipulating maximum tenure for the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Formulating allocation of Profit for Retained Earnings and Reserves; Dividend to Shareholders; Bonus for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees..

Mekanisme Pelaksanaan RUPS

Ketentuan pelaksanaan RUPS PTK, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun sedangkan RUPS Luar Biasa diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - » RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat-tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya dan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia;
 - » RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham, menggunakan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar dengan peredaran nasional;
 - » Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;

Mechanism of GMS Implementation

The provisions of the PTK GMS, both the Annual GMS and the Extraordinary GMS are as follows:

- Annual GMS is held annually while Extraordinary GMS is organized incidentally based on an as-needed basis, with provisions as follows:
 - » GMS is held at the Company's domicile or locations where the Company performs its business activities, and must be within the territory of the Republic of Indonesia.
 - » GMS is organized by firstly inviting the shareholders through an official letter and/or advertisement placed in national newspapers.
 - » The invitation should be disseminated at the latest 14 (fourteen) days prior to the GMS by excluding the invitation and GMS date.

- » Dalam pemanggilan harus dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS;
- » Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat;
- » RUPS dipimpin Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Rapat;
- » Dalam hal semua Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir dalam Rapat RUPS.

Ketentuan Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Dalam penentuan kuorum serta pengambilan keputusan pada RUPS Tahunan, Perusahaan mengacu pada Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007. Sesuai ketentuan tersebut, RUPS Tahunan (RUPST) dinyatakan kuorum apabila RUPST lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- » The invitation should state the event, date, time, and venue of where the GMS is going to be held.
- » The GMS invitation is deemed unnecessary if all shareholders approve the meeting agenda and resolutions are agreed to unanimously.
- » GMS is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is not present or absent due to any reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by one of the members of Board of Commissioners who is present and appointed by the GMS. In a case where all members of the Board of Commissioners are not present or absent due to reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by the President Director. If the President Director is not present or absent due to reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by one of the other members of Board of Directors who are present and appointed by the GMS.
- » In the event that all of the Board of Directors are not present or absent due to any reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by one of the selected by and those who attend the GMS.

Provisions on Quorum and Decision Making

Provisions on quorum in regards to attendance in Annual GMS is regulated in in the Act No. PT. 40 of 2007. In accordance with the provisions, the Annual GMS (AGMS) has constituted a quorum if the AGM is more than $\frac{1}{2}$ (half) part of the total shares with voting rights present or represented, except the Law and/or articles of association determine a larger quorum.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sesuai peraturan yang berlaku melalui prosedur yang transparan dan adil. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang berlaku mensyaratkan jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan.

Hasil RUPS didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan, dan Notaris membuat Risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS. Penandatanganan Risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris. Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

Decision making in the GMS is carried out based on negotiation for consensus, as per the prevailing regulations through transparent and fair procedures. In the event of failed to reach decisions based on negotiation for consensus, the accepted decision making is based on the most votes, requiring a larger number of agreed votes.

Shareholders could also make legitimate decisions without holding a GMS physically, provided that all Shareholders have been notified in written and they are in agreement toward the proposed recommendation.

Results of GMS are documented by the Corporate Secretary, and Notary develops GMS Minutes of Meeting in each GMS. The signing of GMS Minutes of Meeting is not necessary if the minutes of meeting is included in the Notary Minutes of Meeting. The GMS Minutes of Meeting should be documented and kept by the Corporate Secretary.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, PTK menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2019 melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 tertanggal 29 Juni 2020.

Implementation of the 2020 Annual GMS

In connection with the COVID-19 pandemic, the PTK held an Annual GMS for the 2019 Financial Year through Circular Shareholder Decisions Regarding the Annual General Meeting of Shareholders for the 2019 Financial Year dated 29 June 2020.

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 diselenggarakan berdasarkan Surat Direktur Utama PTK No. 447/C0000/2020-S0 tanggal 17 April 2020 perihal Permohonan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Sirkuler

Attendance of the Board of Commissioners, Directors, Capital Market Supporting Institutions & Professionals

The implementation of the 2019 Annual GMS was held based on the Letter of the President Director of PTK No. 447/C0000/2020-S0 dated 17 April 2020 regarding the Request for Approval of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) PT Pertamina Trans Kontinental

PT Pertamina Trans Kontinental Tahun Buku 2019 dan Surat Dewan Komisaris PTK No.006/DEKOM. PTK/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Telaah Atas Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental Tahun Buku 2019.

Circular for the 2019 Financial Year and the Letter of the PTK Board of Commissioners No.006/DEKOM. PTK/2020 dated April 30, 2020 regarding the Review of the Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental for the Fiscal Year 2019.

Adapun keputusan dan realisasi RUPS Tahunan 2020 adalah sebagai berikut:

The resolutions and realization of the 2020 Annual GMS are as follows:

Realisasi Keputusan RUPST 2020 untuk Tahun Buku 2019 PT Pertamina Trans Kontinental Realization of Resolution of the 2020 AGMS for the 2019 Financial Year of PT Pertamina Trans Kontinental

Agenda RUPS RUPS Agenda	Keputusan Decision	Realisasi dan Tindak Lanjut/ Realization and Follow Up
Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Presentation of Annual Report 2019	Menerima Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku Accepting the Company's Annual Report for 2019 Fiscal Year	Telah diresalisasikan Realized
Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Approval on Annual Report, including Report Ratification Company finance accompanied by Full Payment and Liability Release (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surya (EY) disertai pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang: 1. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019. 2. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan yang melawan hukum.	Telah diresalisasikan Realized

Realisasi Keputusan RUPST 2020 untuk Tahun Buku 2019 PT Pertamina Trans Kontinental
 Realization of Resolution of the 2020 AGMS for the 2019 Financial Year of PT Pertamina Trans Kontinental

Agenda RUPS RUPS Agenda	Keputusan Decision	Realisasi dan Tindak Lanjut/ Realization and Follow Up
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2019 Stipulation of the Use of the Company's Profit for 2019 Fiscal Year	Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp294.998 juta sebagai berikut: a. Rp176.999 juta (60%) sebagai dividen ke Pemegang Saham, di mana dividen sebesar Rp176.997 juta di-offset dengan piutang usaha PT Pertamina (Persero), sedangkan dividen sebesar Rp 2 juta dibayarkan secara tunai; b. Sebesar Rp62.799 juta (21,29%) sebagai cadangan wajib; c. Sisanya sebesar Rp55.200 juta (18,71%) sebagai cadangan	Pertamina Trans Kontinental telah menyalurkan Dividen sebesar Rp176,99 miliar atas laba Perusahaan tahun 2019. Pertamina Trans Kontinental has distributed dividends amounting to Rp176.99 billion for the Company's profit in 2019.
Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 Stipulation of the Public Accountant Office as the Auditor for Financial	Memberikan Kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan dikonsultasikan/ dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PT Pertamina (Persero).	Dewan Komisaris telah menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) berdasarkan RUPS Tahunan PTK Tahun Buku 2020 The Board of Commissioners has stipulated Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers) according to the Annual GMS for the 2020 Fiscal Year

Realisasi Keputusan RUPST 2020 untuk Tahun Buku 2019 PT Pertamina Trans Kontinental

Realization of Resolution of the 2020 AGMS for the 2019 Financial Year of PT Pertamina Trans Kontinental

Agenda RUPS RUPS Agenda	Keputusan Decision	Realisasi dan Tindak Lanjut/ Realization and Follow Up
Pengusulan dan Penetapan Penghargaan atas Kinerja (<i>Tantiem</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun buku 2019. Proposal and Determination Board of Directors and Board of Commissioners of Performance Reward (Incentive) for the 2019 fiscal year	Menyetujui penetapan penghargaan atas kinerja (<i>tantiem</i>) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.	Approved stipulation of the Board of Directors and Board of Commissioners performance reward will be determined later and will be held in a separate circular GMS.
Pengusulan dan Penetapan Remunerasi untuk atas Kinerja (<i>Tantiem</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun buku 2020 Proposal & Determination of the Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration for Performance (Incentives) for the 2020 fiscal year.	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2020 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.	Approved determination Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration for the 2020 fiscal year to be submitted in a sealed envelope.

Pelaksanaan RUPS Secara Sirkuler Tahun 2020

Selama tahun 2020, PTK telah menyelenggarakan RUPS Secara Sirkuler.

Implementation of Circular General Meetings of Shareholders in 2020

In 2020, PTK held GMS through Circular GMS.

Ringkasan RUPS dan Akta PT Pertamina Trans Kontinental 2020

Summary of GMS and Deed of PT Pertamina Trans Kontinental 2020

Tanggal RUPS Date of GMS	Ringkasan Hasil Keputusan RUPS / RUPS-LB Summary of GMS/EGMS Resolutions		Akta Notaris Notarial Deed
31 Januari 2020	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020	Work Plan and Budget (RKAP) 2020	Akta Notaris No. 50 tanggal 12 Februari 2020 oleh Notaris Irma Bonita, SH. Notary Deed No. 50 dated February 12, 2020 by Notary Irma Bonita, SH
21 Februari 2020	Penetapan Pejabat Definitif Direktur Operasi	Determination of Definitive Operations Director	Akta Notaris No. 39 tanggal 12 Maret 2020 oleh Notaris Irma Bonita, SH dan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0152349 tanggal 19 Maret 2020. Notary Deed No. 39 dated March 12, 2020 by Notary Irma Bonita, SH and Receipt of Notification No. AHU-AH.01.03-0152349 dated March 19, 2020
13 Maret 2020	Pemberhentian Dewan Komisaris	Board of Commissioners Dismissal	Akta Notaris No. 59 tanggal 19 Maret 2020 oleh Notaris Irma Bonita, SH dan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0171710 tanggal 02 April 2020. Notary Deed No. 59 dated March 19, 2020 by Notary Irma Bonita, SH and Receipt of Notification No. AHU-AH.01.03-0171710 dated April 2, 2020
24 Maret 2020	Perubahan Faktor Jabatan, Besaran tunjangan Perumahan, dan Aturan Rangkap Jabatan	Changes in Job position, Amount of Housing Allowances, and Concurrent Position Policy	Akta Notaris No. 02 tanggal 01 April 2020 oleh Notaris Irma Bonita, SH. Notary Deed No. 02 dated April 1, 2020 by Notary Irma Bonita, SH
29 Mei 2020	Pengangkatan Direktur Keuangan & SDM	Appointment of Finance & HR Director	Akta Notaris No. 06 tanggal 9 Juni 2020 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn dan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0244850 tanggal 11 Juni 2020. Notary Deed No. 06 dated June 9, 2020 by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn and Receipt of Notification No. AHU-AH.01.03-0244850 dated 11 June 2020
29 Juni 2020	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019	Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2019	Akta Notaris No. 05 tanggal 09 Juli 2020 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn. Notary Deed No. 05 dated July 9, 2020 by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn

Ringkasan RUPS dan Akta PT Pertamina Trans Kontinental 2020

Summary of GMS and Deed of PT Pertamina Trans Kontinental 2020

Tanggal RUPS Date of GMS	Ringkasan Hasil Keputusan RUPS / RUPS-LB Summary of GMS/EGMS Resolutions		Akta Notaris Notarial Deed
19 Agustus 2020	Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan (<i>Tantiem</i>) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 serta Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020	Annual Performance (Incentives) for Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2019 and Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2020	Akta Notaris No. 05 tanggal 09 Juli 2020 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn. Notary Deed No. 05 dated July 9, 2020 by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn
11 September 2020	Pengangkatan Komisaris	Appointment of Commissioners	Akta Notaris No. 15 tanggal 23 September 2020 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn dan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0392279 tanggal 29 September 2020. Notary Deed No. 15 dated September 23, 2020 by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn and Receipt of Notification No. AHU-AH.01.03-0392279 dated September 29, 2020
18 November 2020	Revisi RKAP Tahun 2020	RKAP 2020 Revision	Akta Notaris No.06 tanggal 30 November 2020 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn. Notary Deed No.06 dated November 30, 2020 by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn

Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara bahwa untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 PTK semua peserta setuju dengan pengambilan keputusan.

Decision Making in The Meetings

The Meeting resolutions is taken through a collective consensus. If the collective consensus is not achieved, a voting will be conducted. Results of decision making conducted through voting declared that all participants of the 2020 Fiscal Year Annual GMS PTK agreed with the decision making.

Keputusan RUPS Tahun Buku 2019 dan Alasan dalam Hal Terdapat Keputusan RUPS yang Belum Direalisasikan

Hasil Keputusan RUPS Tahun Buku 2019 atas seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2018, telah seluruhnya dilaksanakan pada tahun 2020. Tidak terdapat keputusan RUPS Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2019. Tindak lanjut atas Keputusan RUPS Tahun Buku 2019 tersebut telah tercantum dalam Annual Report tahun Buku 2020.

GMS Resolutions for Fiscal Year 2019 and the Reasons for Any Pending GMS Resolution

Resolutions of GMS for the Fiscal Year 2019 on all resolutions of the GMS for the 2018 Fiscal Year, have all been implemented in 2020. There is no GMS resolutions for Fiscal Year 2019 which was carried out in 2019. Follow-up to the resolutions of the GMS for Fiscal Year 2019 has been listed in Annual Report for the Fiscal Year 2020.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

- Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas penerapan GCG dan mengawasi Direksi untuk memastikan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip dan praktik-praktik terbaik GCG.

The Board of Commissioners is a corporate organ that has the duty and collective responsibility to supervise and provide advice to the Directors. The Board of Commissioners is responsible for implementing GCG and supervises the Directors to ensure that the management of the Company is in accordance with GCG principles and best practices.

Kriteria Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang saham dan memenuhi kualifikasi pedoman serta kebijakan *Corporate Governance Policy* dan *Board Manual*. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, dedikasi dan itikad baik serta rasa tanggung jawab;
2. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
3. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
4. Memiliki kemampuan melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perusahaan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
5. Memiliki hubungan yang luas dan bermanfaat bagi Perusahaan;
6. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

Board of Commissioners Criteria

The Board of Commissioners appointment is carried out by the shareholders and fulfils the qualifications of the guidelines as well as Corporate Governance Policy and the Board Manual. All of the Board of Commissioners members have fulfilled the criteria or requirements, as follows:

1. Have integrity, dedication and good faith as well as a sense of responsibility;
2. Have adequate knowledge in the company business field;
3. Have sufficient time to carry out their duties;
4. Have the ability to perform legal actions and have never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors or Commissioner who was found guilty, caused a company to go bankrupt or been convicted of a criminal offense that harmed state finances within five years before the appointment;
5. Has a broad and beneficial relationship for the Company;
6. Do not represent the interests of certain political parties.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PTK saat ini telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh PT Pertamina (Persero) sebagai induk Perusahaan dan Pemegang Saham Utama. Dengan demikian, seluruh Dewan Komisaris Perseroan merupakan anggota yang memiliki integritas (kepatutan) dan kompetensi (kelayakan) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban terkait fungsi pengawasan Direksi.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

RUPS memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan aspek integritas serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

Sedangkan dalam proses pemberhentian, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS. Hal tersebut terjadi jika terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi memberikan kerugian bagi Perusahaan atau melalaikan kewajibannya. RUPS juga memiliki wewenang untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang terbukti melanggar.

Komposisi dan Masa Jabatan

Sepanjang tahun 2020, terdapat 2 (dua) kali perubahan susunan Dewan Komisaris PTK melalui RUPS Sirkuler yang memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Ignatius Tallulembang selaku Komisaris Utama. RUPS Sirkuler juga memberhentikan dengan hormat Alfian Nasution selaku Komisaris Alasan perubahan komposisi Dewan Komisaris ini dilakukan karena penugasan lain.

Fit and Proper Test for The Board of Commissioners

The board of commissioners of ptk currently has met the requirements and declared pass the fit and proper test by PT Pertamina (Persero), as the parent company and controlling shareholder. As such, all members of the company's Board of Commissioners are members with integrity (proper) and competence (fit) in performing the duties and responsibilities related to the supervisory function on the Board of Directors.

Board of Commissioners Appointment and Dismissal

The GMS holds the authority to appoint and dismiss the Board of Commissioners members. The Board of Commissioners appointment and dismissal have considered aspects of integrity and competence that are in line with the company's business needs.

Meanwhile, in the dismissal process, the Board of Commissioners members may be temporarily dismissed by the GMS. This will happen if the member is proven committing action against the Articles of Association or there is any indication of causing a loss to the Company or neglecting its obligations. The GMS also holds the authority to dismiss the Board of Commissioners members who are proven guilty.

Composition and Terms of Office

During 2020, there were 2 (two) changes in the PTK Board of Commissioners members through the Circular RUPS which decided to honorably dismiss Dharmawan H. Samsu as President Commissioner. The Sikular GMS also appointed and stipulated Ignatius Tallulembang as President Commissioner. The reason for the change in composition of the Board of Commissioners was due to another assignment.

Berikut adalah komposisi dan masa jabatan Dewan Komisaris:

Board of Commissioners composition and terms of office are as follows:

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris Board of Commissioners Composition and Terms of Office

01 Januari 2020 – 13 Maret 2020 January 1, 2020 – March 13, 2020	13 Maret 2020 – 11 September 2020 March 13, 2020 – September 11, 2020	11 September 2020 – 31 Desember 2020 September 11, 2020 – December 31, 2020	Keterangan Description
Ignatius Tallulembang Komisaris Utama President Commissioner	-	-	Tidak menjabat karena rangkap jabatan Sesuai Kpts PS. tanggal 13 Maret 2020 Did not serving in concurrent position in accordance with Shareholders Decree dated March 13, 2020
Ivan Airlangga EP. Komisaris Commissioner	Ivan Airlangga EP. Komisaris Commissioner	Ivan Airlangga EP. Komisaris Commissioner	Menjabat s.d. 21 November 2021 sesuai Akta No.1 tanggal 14 Desember 2018 Serving up to November 21, 2021 according to Deed No.1 dated December 14, 2018
Achmad Fachruddin Komisaris Commissioner	Achmad Fachruddin Komisaris Commissioner	Achmad Fachruddin Komisaris Commissioner	Menjabat s.d. 30 Januari 2021 sesuai Akta No.15 tanggal 14 Februari 2018 Serving up to January 30, 2021 according to Deed No.15 dated February 14 2018
Alfian Nasution Komisaris Commissioner	-	-	Tidak menjabat karena rangkap jabatan Sesuai Kpts PS. tanggal 13 Maret 2020 Did not serving in concurrent positions in accordance with Shareholders Resolutions dated March 13, 2020
-	-	Andi Saiful Haq Komisaris Commissioner	Menjabat s.d. 10 September 2023 sesuai Akta No. 15 tanggal 23 September 2020 Serving up to September 10, 2023 according to Deed No. 15 dated 23 September 2020

Program Pengenalan Dewan Komisaris

Perseroan melaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dengan tujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Perusahaan ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Pelaksanaan Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru menjabat diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Program Pengenalan Direksi dan Dewan Komisaris Baru Perseroan.

Board of Commissioners Introduction Program

The Company implements an introduction program for new members of the Board of Commissioners with the aim of providing an overview of business activities, future company plans, work guidelines and other matters that are the responsibility of the Board of Commissioners. The implementation of the Introductory Program for the new Board of Commissioners is regulated in the Decree of the Board of Directors concerning Guidelines for the Introduction Program for the New Directors and Board of Commissioners of the Company.

Materi pengenalan diberikan oleh *Corporate Secretary* kepada anggota Dewan Komisaris. Selain pemaparan atas Perusahaan, dalam program pengenalan Perusahaan juga disampaikan dokumen-dokumen penunjang, diantaranya Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perseroan, *Board Manual*, Pedoman GCG, Standar Etika Perusahaan, Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, *Charter* Dewan Komisaris, *Charter* Direksi dan *Charter* Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selain itu, guna memahami secara langsung proses bisnis Perusahaan, program pengenalan Perusahaan juga meliputi kunjungan langsung ke Unit/Unit Bisnis Perusahaan.

Pada tahun 2020 PTK melaksanakan program pengenalan Komisaris baru yaitu bapak Andi Saiful Haq pada tanggal 5 Oktober 2020.

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan. *Code of Corporate Governance* telah mengatur ketentuan mengenai Komisaris Independen PTK yaitu sekurang-kurangnya 20% dari Anggota Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan. Syarat-syarat untuk jabatan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan terafiliasi;
2. Tidak bekerja pada departemen/lembaga atau badan lainnya di lingkungan Pemerintahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;

Introductory material is given by the *Corporate Secretary* to members of the Board of Commissioners. In addition to the presentation of the Company, the Company introduction program also provides supporting documents, including the Annual Report, the Company Work Plan and Budget (RKAP), the Company Long Term Plan (RJPP), the Company's Articles of Association, the Board Manual, GCG Guidelines, Company Ethical Standards, Work Program for the Board of Commissioners and the Supporting Committee for the Board of Commissioners, Charter for the Board of Commissioners, Charter for the Board of Directors and Charter for the Supporting Committee for the Board of Commissioners, as well as regulations related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners. In addition, in order to understand firsthand the Company's business processes, the Company introduction program also includes direct visits to the Company's Business Units / Units.

In 2020 PTK implemented a program to introduce a new Commissioner, Mr. Andi Saiful Haq on October 5, 2020.

Independent Commissioner

An independent commissioner is a member of a Commissioner who is not affiliated with the Board of Directors, other members and controlling shareholders, and is free from business relationships or other relationships that can affect his ability to act independently or act solely in the interests of the company. Provisions on Independent Commissioner is regulated in the Code of Corporate Governance, stating at least 20% of the Board of Commissioners' Members should be appointed from outside the Company's circles with below requirements:

1. Not serving as a Director in an affiliated company;
2. Not working in a governmental department/ institution or other agencies in the last three years;

3. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
4. Tidak mempunyai keterikatan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produksi kepada Perusahaan dan afiliasinya;
5. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

Pada tahun 2020, seluruh Komisaris PTK merupakan Komisaris Independen dari total 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris. Untuk Komisaris Utama per 31 Desember 2020 belum ada.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

PTK telah memenuhi ketentuan yang diatur regulator pasar modal terkait kriteria Komisaris Independen. Untuk menjadi Komisaris Independen, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - o Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - o Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - o Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - o Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai

3. Not working at the Company or its affiliations in the last three years;
4. Not having any financial affiliation, directly and indirectly with the Company and other Companies providing services and production for the Company and its affiliations;
5. Free from conflict of interest and business activities or other relationships which could constaint or reduce capability of the concerned Commissioners to act or think independently in the Company.

In 2020, all PTK commissioners were Independent Commissioners from a total of 3 (three) members of the Board of Commissioners. There is no President Commissioner as of 31 December 2020.

Stipulation of Independent Commissioners Criteria

PTK has fulfilled the regulations stipulated by the capital market regulators in relation to the Independent Commissioners criteria. The provisions are as follows:

- Having good character, morals, and integrity;
- Competent in carrying out legal actions;
- Within 5 (five) years before appointment and during his tenure:
 - o Never declared bankrupt;
 - o Never been a member of the Board of Directors and/or a Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt;
 - o Never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector; and
 - o Never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who during his tenure::
 - a. Never held an annual GMS;
 - b. Accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memegang prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam memberikan keputusan strategis terkait Perusahaan yang bebas dari tekanan atau kepentingan pihak tertentu. Dewan Komisaris juga senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang saham pengendali maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan.

Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan pada Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai Pasal 13 ayat 3 Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011, Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi ketentuan yang mengatur kriteria independensi sebagai berikut:

accepted by the GMS or did not provide accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and

- c. Has caused any company that obtained licenses, approvals, or registrations from the Financial Services Authority not to fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority.
- d. Having a commitment to comply with the laws and regulations; and
- e. Having knowledge and / or expertise in the fields required by Issuers or Public Companies.

Independency of The Board of Commissioners

The Board of Commissioners upholds the independency principle in carrying out its duties including in providing strategic decisions related to companies that are free from pressure or interests of certain parties. The Board of Commissioners also always avoids conflicts of interest in form of financial and family affiliations with other members of the Board of Commissioners, Board Directors, controlling shareholders as well as external parties who have business affiliation with the Company.

This complies with the regulations in the copy of the Minister of State Owned Enterprises Regulation No. Per-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.

In accordance with Article 13 paragraph 3, a copy of the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011, Members of the Board of Commissioners must meet the provisions governing the following criteria for independence:

- Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
- Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan Perusahaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
- Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
- Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Hubungan keuangan hanya sebatas status sebagai Anggota Dewan Komisaris yang mewakili Pemegang Saham dan anggota Direksi, merupakan pekerja PT Pertamina (Persero) yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk ditempatkan di Perusahaan sesuai penugasan dari PT Pertamina (Persero).

- Not having any financial affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholder.
- Board of Commissioners does not have any managerial affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder;
- Board of Commissioners does not have any ownership affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder;
- Board of Commissioners does not have any family affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder.

Financial relations are only limited to the status of members of the Board of Commissioners representing Shareholders and members of the Board of Directors, who are employees of PT Pertamina (Persero) who have passed the fit and proper test to be placed in the Company as assigned by PT Pertamina (Persero).

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan pada umumnya yang dilaksanakan Direksi; memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap Anggota Dewan Komisaris harus:

Board of Commissioners Duties, Responsibilities, Authority, and Obligations

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Articles of Association and the Board Manual, which is to supervise the management policies, generally the management of the Company carried out by the Directors; provide advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of The Company's Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, provisions of the Articles of Association and GMS, and decree, as well as the prevailing law and regulations, on behalf of the Company's interest and in accordance with the aims and objectives of the Company.

In performing its duties, each Member of the Board of Commissioners should:

- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab kepada Persero dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil kepentingan Perseroan selain honorarium dan fasilitas yang ditentukan oleh RUPS;

Sehubungan dengan posisi Komisaris Utama yang *vacant* sejak 13 Maret 2020 s.d. 31 Desember 2020, maka seluruh keputusan Dewan Komisaris tetap diputuskan dengan kolektif sesuai dengan Anggaran Dasar. Sementara untuk pelaksanaan kepemimpinan rapat Dewan Komisaris ataupun yang dengan mengundang Direksi, sesuai pasal 17 Ayat 16 & 17 Anggaran Dasar, maka Bapak Ivan Airlangga EP yang ditunjuk sebagai pemimpin rapat/pembahasan Dewan Komisaris.

Kewenangan

Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris;
- Memberhentikan sementara anggota Direksi

- Abide by the Articles of Association, laws, regulations, as well as principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, as well as fairness;
- Demonstrates goodwill, prudence, and responsibility toward the Company by being represented by GMS in performing the supervisory duties and giving advice to the Board of Directors for the interest and objectives of the Company;
- Prohibited from performing transactions with conflict of interest and take interest of the Company aside from honorarium and facilities established by the GMS.

In terms of vacant President Commissioner position since March 13, 2020 until December 31, 2020, all of the Board of Commissioners resolutions shall be decided collectively in accordance with the Articles of Association. Meanwhile, for the implementation of leadership in the Board of Commissioners meeting or by inviting the Board of Directors, in accordance with Article 17 Paragraph 16 & 17 of the Articles of Association, Mr. Ivan Airlangga EP was appointed as the chairman of the Board of Commissioners meeting/discussion.

Authority

The authority of the Board of Commissioners is as follows:

- To access to books, correspondences, as well as other documents, inspect cash for verification and other needs, and audit the Company's assets;
- To enter properties, buildings, and offices used by the Company;
- To request explanation from the Board of Directors and/ or other officials on issues relating to the Company's management;
- To acknowledge all policies and actions that have and will be conducted by the Board of Directors;
- To request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners' meeting;
- To appoint Secretary of the Board of

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas;

- Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
- Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
- Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki kewajiban antara lain:

- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapatan dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;
- Mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Induk Perusahaan Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan dan/atau ketentuanketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

Commissioners;

- To temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with provisions of the Limited Liability Companies Law;
- To establish other Committees aside from Audit Committee if deemed necessary by taking account the Company's capability;
- To hire experts for specific issues and within a certain period of time at the expense of the Company, when necessary;
- To perform managerial affairs of the Company in specific circumstances for a specific period of time in accordance with the Articles of Association;
- To attend the Board of Directors meeting and provide insights toward the discussed issues;
- To perform other supervisory authority as long as it is not conflicted with the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolution.

Board of Commissioners Obligations

Board of Commissioners has obligations, among others:

- Giving inputs and advice to the GMS on The Company's Long-Term Plan and Company Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors;
- Following the Company's activities development, giving inputs and advice to the GMS on each important issue for the Company's management;
- Reporting immediately to the GMS if there is an indication of the Company's decreasing performance;
- Investigation and analyzing periodical and annual reports prepared by the Board of Directors, as well as signing annual report;
- Carrying out other obligations for supervisory duties and advice provision as long as it is not conflicted to the legislations, Articles of Association, and/or GMS Resolution;
- Complying with other prevailing provisions at the Company's Parent Company and those which are prevailed at the Company and/or other provisions stipulated and approved by the GMS.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2020

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan serta memberikan nasihat untuk melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Kegiatan Rutin

- Pelaksanaan Rapat Internal Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Menyetujui Laporan Manajemen Triwulanan.
- Melakukan telaah atas Laporan Tahunan PTK.
- Menyetujui penetapan perangkat Dewan Komisaris.

Persetujuan Strategic

Revisi Anggaran Biaya Investasi (ABI) PTK Tahun 2020.

Arahan Strategic

- Tanggapan, Arahan & Usulan RKAP ABI PTK Tahun 2021 dimana Dewan Komisaris menyampaikan untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku maupun ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Tanggapan Laporan Manajemen dimana Dewan Komisaris memberikan tanggapan serius terkait performa beberapa Item KPI yang dalam beberapa bulan tidak memberikan hasil sesuai target.
- Tanggapan Rekomendasi untuk menempatkan Perwakilan Peseroan di AP Perusahaan dimana Dewan Komisaris sesuai perannya memberikan pengawasan memberikan arahan untuk melaksanakan proses Administrasi secara *Good Corporate Governance*.
- Tanggapan Revisi KPI Direktur Utama PTK Tahun 2020 dimana Dewan Komisaris melihat perlu adanya kesesuaian *cascading* dan kewajaran pembobotan ke bawah.
- Tanggapan Atas Usulan Calon *Corporate Secretary*.

Board of Commissioners Duty Implementation Report 2020

The Board of Commissioners has carried out supervision and provided advice to implement the strategic steps, as follows:

Regular Activities

- Implementation of Board of Commissioners Internal Meetings and Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings.
- Approved the Quarter Management Report.
- Reviewing the PTK Annual Report.
- Approved Board of Commissioners appointment.

Strategic Agreement

Revised PTK Investment Budget (ABI) for 2020.

Strategic Direction

- Responses, Directions & Recommendations for the 2021 ABI PTK RKAP in which the Board of Commissioners submits to pay attention to the applicable provisions and the provisions of the Company's Articles of Association.
- Response to the Management Report where the Board of Commissioners gave serious responses regarding the performance of several KPI Items which in several months did not deliver results according to target.
- Recommendations to place a representative of the Company in the Company's subsidiaries where the Board of Commissioners in accordance with its role provides supervision to provide direction to carry out the Administration process according to *Good Corporate Governance*.
- Response to the Revised KPI of the President Director of PTK in 2020 where the Board of Commissioners sees the need for suitability of cascading and fairness of downward weighting.
- Responses to the Corporate Secretary candidate recommendation.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam hal pengawasan kinerja Direksi, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penetapan Perwakilan Perseroan di Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan
 - a. Dewan Komisaris mengingatkan Direksi dan pejabat wakil Perseroan yang ditempatkan menjadi Komisaris di Anak Perusahaan PTK agar dapat menjalankan tugas dan peran sebaik-baiknya khususnya dalam mengarahkan dan mengawasi bisnis Anak Perusahaan PTK agar sesuai dengan bidang usahanya masing-masing, tidak saling tumpang tindih, melainkan bersinergi sehingga tujuan perseroan sesuai Anggaran Dasar dapat tercapai.
 - b. Sebagai bentuk perbaikan kedepannya maka untuk proses permohonan penempatan perwakilan tersebut, agar diusulkan 2-3 bulan sebelum *due date* sehingga kegiatan operasional Anak Perusahaan PTK tetap berjalan optimal dan meminimalisir penunjukan Pelaksana Tugas (Plt).
 - c. Dewan Komisaris meminta agar pada rapat pembahasan BoC – BoD berikutnya pada Januari 2021, calon terpilih tersebut dapat memaparkan secara komprehensif target rencana kerja / *roadmap* dan komitmen yang akan diraih dalam jangka waktu Semester-I 2021.
2. Penyelesaian Piutang
 - a. Setiap kendala penyelesaian outstanding piutang, Dewan Komisaris menyarankan selain pembentukan tim agar membentuk juga *Steering Committee* yang melakukan review dan memutuskan opsi yang akan ditempuh oleh tim antara lain namun tidak terbatas pada litigasi/ keringanan pembayaran/ pemutihan, dll yang dapat sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Dewan Komisaris meminta agar adanya monitoring system secara real-time dalam

Recommendation from The Board of Commissioners

In terms of monitoring the performance of the Board of Directors, the Board Commissioners provide recommendations in the year 2020 as follows:

1. Appointment of Company Representation in Subsidiaries Companies and Joint Ventures
 - a. The Board of Commissioners reminds the Board of Directors and a stationed deputy in the Company's Executives to be appointed as a Commissioner in the PTK subsidiary in order to carry out their duties and roles particularly well in directing and supervises the business of PTK Subsidiaries to suit their respective business fields, not overlapping each other, but rather synergize so that the company's goals are in line Articles of Association can be achieved.
 - b. As a form of improvement in the future for the placement application process representatives, to be proposed 2-3 months before the due date so that operational activities PTK subsidiaries continue to run optimally and minimizing the appointment of the Acting (Plt.) Task Force.
 - c. The Board of Commissioners requested that at the meeting discussion of the next BoC - BoD on January 2021, the elected candidate can describe comprehensively the target work plan/roadmap and commitments will be achieved within 1st half of 2021.
2. Accounts Receivable Settlement
 - a. Any problem solving is outstanding accounts receivable, the Board of Commissioners advises in addition to forming a team to form as well Steering Committee that conducts reviews and decide which options to pursue by the team, among others, but not limited to litigation/payment waive/write-off, etc. which can be in accordance with the procedure and accountable.
 - b. The Board of Commissioners requested that there be real-time monitoring system

upaya perbaikan permasalahan Piutang kedepannya (*long term*) sehingga dapat memonitor proses settlement pembayaran (dari mulainya diselesaikannya jasa/pekerjaan oleh PTK s.d. *due date* pembayaran termasuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan). Hal ini karena dibutuhkan standar yang sama setiap cabang dan dapat diakses dari pusat untuk keperluan monitoring.

- c. Menanggapi kendala *outstanding* piutang yang dihadapi saat ini (*quick term*), Dewan Komisaris perlu adanya upaya yang lebih serius dan seksama antara lain:

- Kendala yang penyelesaian permasalahannya ada di dalam control PTK. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi dan dilakukan dengan lebih sigap dengan pelaksanaan prosedur. Pelaksanaan War Room yang dilakukan baik namun juga perlu ada mekanisme *consequences* atas kelalaian dan reward atas keberhasilan penyelesaian piutang.

Khusus untuk kendala Piutang karena migrasi sistem SAP, Dewan Komisaris meminta secara khusus untuk meneliti kembali dengan melibatkan Internal Audit, Legal & Compliance dan kemudian melaporkan kembali hal tersebut kepada Dewan Komisaris dengan dilengkapi dengan opsi/ usulan penyelesaian permasalahan. Hal ini agar permasalahan ini dapat terselesaikan dan tidak berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.

- Kendala yang di luar kontrol PTK
Agar dilakukan upaya jalur hukum dengan pelaksanaan yang penuh kehati-hatian dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Dewan Komisaris meminta detail pelaporan terkait Piutang dimasukkan dalam setiap Laporan Manajemen yang menggambarkan kondisi piutang akhir bulan sebelumnya persetiap *aging* (1 bulan, 2 bulan, dst) dan kondisi piutang akhir bulan persetiap *aging* sehingga terlihat upaya penyelesaian piutang sebelumnya dan penambahan piutang baru.

in an effort to improve future Receivables problems (*long term*) to monitor the payment settlement process (from the completion of services/project by PTK until the payment due date including completeness of the required documents). This is because it takes the same standard every branch and can be accessed from the center for monitoring purposes.

- c. Responding to the problem of outstanding receivables faced today (*quick term*), the Board of Commissioners there needs to be a more serious effort and carefully include:

- Issues that refer to the completion the problem is within the control of the PTK This should be anticipated and done more readily with implementation of procedures. Implementation of War The rooms are done well but are also necessary There is a mechanism for the consequences of negligence and reward for successful completion accounts receivable.

Especially for the Accounts Receivable constraint due SAP system migration, the Board of Commissioners asked specifically to research return by involving Internal Audit, Legal & Compliance and then report back on the matter to Board of Commissioners, equipped with problem solving options/ proposals. This is so that this problem can be resolved and did not continue into the years next.

- Constraints beyond the control of the PTK So that legal remedies should be made with implementation carefully and in accordance with the applicable rules.

- d. The Board of Commissioners asked for detailed reporting related Receivables are included in each Management reports that illustrate the condition of the accounts at the end of the previous month per *aging* (1 month, 2 months, and more) and Accounts receivable condition at the end of each *aging* month so that the efforts to settle accounts receivable are seen previous accounts and the addition of new accounts receivable.

Kunjungan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja guna mendapatkan masukan-masukan di lapangan terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kunjungan kerja yang telah dilakukan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

Board of Commissioners' Official Visit in 2020

Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Agenda
17 Januari 2020	- Rapat BoD-BoC - MWT BoD-BoC ke PTK Cabang Batam & Group
	- BoD-BoC meeting - MWT BoD-BoC to PTK Batam & Group Branch

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah dilengkapi dengan pedoman kerja (*Board Manual*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Komisaris yang dapat menjadi acuan bagi Komisaris dalam melaksanakan tugas untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. *Board Manual* disusun berdasarkan POJK 33/2014 serta GCG *Assessment Report* No.0061-01 (IA) yang dilakukan oleh unit Audit Internal pada tanggal 29 Mei 2015.

Berikut adalah isi pedoman Dewan Komisaris dalam *Board Manual*:

Board of Commissioners' Official

Throughout 2020, the Board of Commissioners has conducted work visits to obtain input in the field related to the implementation of supervisory duties and providing advice to the Board of Directors. The work visits conducted by the Board of Commissioners are as follows:

Board Manual for Board of Commissioners

The Board of Commissioners has been equipped with work guidelines (*Board Manual*) in carrying out its duties and responsibilities. The *Board Manual* contains instructions on the work procedures of the Commissioners that can become a reference for Commissioners in carrying out their duties to achieve the Company's vision and mission, so that standards are expected to be achieved in accordance with GCG principles. The *Board Manual* is based on POJK 33/2014 and GCG *Assessment Report* No. 0061-01 (IA) conducted by the Internal Audit unit on May 29, 2015.

Contents of the *Board Manual* for Board of Commissioners' are as follows:

Pedoman Dewan Komisaris**Board Manual for Board of Commissioners**

Pendahuluan Introduction	Mencakup maksud dan tujuan, ruang lingkup dan referensi yang menjadi acuan.	Covers objectives, scope and references which serve as a direction.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris, pengaturan Rapat Dewan Komisaris dan organ pendukung Dewan Komisaris.	Covers duties, authority, and obligations of the Board of Commissioners, organization of Meeting of the Board of Commissioners, and supporting organs of the Board of Commissioners.
Direksi Board of Directors	Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, pengaturan Rapat Direksi dan organ pendukung Direksi.	Covers duties, authority, and obligations of the Board of Directors, organization of Meeting of the Board of Directors, and supporting organs of the Board of Directors.
Struktur Organisasi dan Prinsip Dasar Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Organizational Structure and Basic Principle of Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors	Mencakup struktur organisasi, benturan kepentingan dan etika jabatan, serta prinsip dasar hubungan Dewan Komisaris dan Direksi.	Covers duties, authority, and obligations of the Board of Directors, organization of Meeting of the Board of Directors, and supporting organs of the Board of Directors
Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors	Mencakup kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris, kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan.	Includes attendance of the Board of Directors at Board of Commissioners Meetings, attendance of the Board of Commissioners at Board of Directors Meetings and holding of Joint Board Meetings.
Management of Work	Komisaris - Direksi dan program pengenalan Perseroan kepada pejabat baru pada organ Perseroan serta komunikasi formal.	Commissioners - Directors and the Company's orientation program to new officials in the Company's organs as well as formal communication.
Kegiatan Antar-organ Perseroan Activities of the Company's Inter-Organs	Mencakup mengenai penyelenggaraan RUPS, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan RKAP, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan Laporan Tahunan, penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan perbuatan Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris.	Covers the implementation of GMS for ratifying RKAP and Annual Report; Annual GMS for ratifying Company Long-Term Plan (RJPP), and the Board of Directors' action requiring a Written Approval from the Board of Commissioners.
Lain-lain Others	Mencakup penggunaan waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup penggunaan waktu Direksi dan Dewan Komisaris; sarana dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris; perjalanan dinas dan cuti.	Covers allocation of time, facilities and infrastructure, including allocation of the Board of Directors and Board of Commissioners' time; allocation of time of the Board of Directors and Board of Commissioners; business trips and leaves.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai rapat Dewan Komisaris PTK adalah sebagai berikut:

1. Rapat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. Rapat Dewan Komisaris yang bersifat rutin/ terjadwal terdiri dari:
 - Rapat internal Dewan Komisaris, dilaksanakan setiap bulan;
 - Rapat gabungan dengan Direksi dilaksanakan sekali dalam satu bulan dengan agenda tetap konsultasi;
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, dan/atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris;
3. Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis;
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang tertua masa jabatannya.
6. Keputusan rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa. Apabila melalui jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pimpinan rapat, kecuali mengenai diri orang pengambilan keputusan dilakukan dengan pemilihan secara tertutup;
7. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara dan ditambah satu suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakili dengan disertai surat kuasa. Suara blanko

Board of Commissioners Meeting Policy

Board of Commissioners meeting policy in PTK are as follows:

1. Meetings are held at least once a month. Board of Commissioners meetings regular/scheduled consist of:
 - Board of Commissioners Internal meetings, held every month;
 - Joint meetings with the Directors are held once a month with a fixed agenda of consultations;
2. The Board of Commissioners meetings can be held outside the regular schedule, if deemed necessary by one or more Members of the Board of Commissioners, and/or written requests from one or more Members of the Board of Commissioners;
3. This Board of Commissioners Meeting is an immediate and strategic meeting;
4. Meetings of the Board of Commissioners can be held through teleconferencing media, video conferences, or other electronic facilities that allow all participants of the Board of Commissioners' meeting to see and hear each other directly and participate in meetings;
5. The Board of Commissioners meeting is chaired by President Commissioner. In this case where the President Commissioner is not attending, the meeting will be chaired by the oldest Board of Commissioners members with the longest serving period.
6. The Board of Commissioners' meeting Resolutions shall be determined by collective consensus, if no agreement is reached then the decision will be taken by voting. If the number of agree and not agree votes are equal, the meeting resolutions will be taken the same as the Chairman of the meeting, except in the event where the decision-making is taken through closed voting;
7. Each of the Board of Commissioners member is entitled the to cast one vote and another additional vote for the Board of Commissioners member who are represented with a power of

(abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat. Lembar keputusan rapat harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat yang hadir;

8. Dewan Komisaris mengakui bentuk rapat tanpa melalui kehadiran fisik, atau disebut rapat sirkuler, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam bentuk rapat sirkuler bukanlah keputusan yang bersifat strategis, bukan merupakan sebuah keputusan atas sebuah tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/RUPS, permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas, dan keputusan yang diambil disetujui secara tertulis oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

attorney. A blank vote (abstained) is considered to approve the proposal submitted at the meeting and is responsible for the results of the meeting's decision. The meeting decision sheet must be signed by the meeting Chairman and all attending participants;

8. The Board of Commissioners acknowledges a meeting without physical presence, or known as circular meeting, provided the decision taken in the form of a circular meeting is not a strategic decision, it is not a decision on the actions of the Board of Directors that requires the approval of the Board of Commissioners/ GMS, the problem has been known before/discussed, and decisions taken were agreed in writing by all members of the Board of Commissioners.

Rapat Internal Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran Rapat Dewan Komisaris sepanjang 2020:

Board of Commissioners Internal Meeting

In carrying out the duties, the Board of Commissioners held 6 (enam) meetings. The frequency and attendance of the Board of Commissioners meetings throughout 2020 are as follows:

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2020

Board of Commissioners Attendance in the Board of Commissioners Internal Meeting in 2020

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of office	Jumlah Kehadiran/ Jumlah Rapat Total Attendance/ Number of Meetings	% Kehadiran % Attendance
Ivan Airlangga EP	Komisaris Commissioner	01 Januari 2020 – 31 Desember 2020	6	100%
Achmad Fachruddin	Komisaris Commissioner	01 Januari 2020 – 31 Desember 2020	6	100%
Andi Saiful Haq*	Komisaris Commissioner	11 September 2020 – 31 Desember 2020	4	100%

*Mulai menjabat 11 September 2020

*Starting September 11, 2020

Agenda rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners meeting agenda are as follows:

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

Board of Commissioners Meeting Agenda in 2020

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meetings Agenda	Peserta Rapat Participants
1.	22 April 2020	- Kinerja TW I – 2020 - Revisi ABI - Lain-lain - Performance as of 1st Q - 2020 - Revised ABI - Others	1. Bpk. Ivan Airlangga EP. 2. Bpk. Achmad Facruddin 3. Bpk. Budiarto 4. Bpk. Budi Prahoro 5. Bpk. M. Irfan Zainul F. 6. Bpk. Hendry. 7. Bpk. Sudarlindo
2.	28 Juli 2020	- Laporan Keuangan Yd. Juni 2020 - Pengembangan SDM - Piutang - KPI - Financial Report as of June 2020 - Human resource development - Receivables - KPIs	1. Bpk. Ivan Airlangga EP. 2. Bpk. Achmad Facruddin 3. Bpk. Budiarto 4. Bpk. Budi Prahoro 5. Bpk. M. Irfan Zainul F. 6. Bpk. Hendry. 7. Bpk. Sudarlindo
3.	29 September 2020	Kinerja PTK Ytd. Agustus 2020. Performance of PTK Ytd. August 2020.	1. Bpk. Ivan Airlangga EP. 2. Bpk. Achmad Facruddin 3. Bpk. Budiarto 4. Bpk. M. Irfan Zainul F. 5. Bpk. Hendry. 6. Bpk. Sudarlindo
4.	06 Oktober 2020	- Interview Kandidat Sekretaris Dekom - Penetapan Ketua Komite Investasi & Risiko Usaha - Pembahasan Anggota Komite Audit - Pembahasan Permohonan Pengisian Jabatan Komisaris Utama - Persetujuan ABI 2021 - Interview Secretary to the Board of Commissioners Candidate - Determination of the Chairman of the Investment & Business Risk Committee - Discussion of members of the Audit Committee - Discussion on Applications for Filling the Position of President Commissioner - Approval on ABI 2021	1. Bpk. Ivan Airlangga EP. 2. Bpk. Achmad Facruddin 3. Bpk. Andi Saiful Haq 4. Bpk. Sudarlindo
5.	26 Oktober 2020	- Kinerja Keuangan & Operasi PTK - Diskusi dan Arahan - PTK Financial & Operational Performance - Discussion and Direction	1. Bpk. Ivan Airlangga EP. 2. Bpk. Achmad Facruddin 3. Bpk. Andi Saiful Haq 4. Bpk. Budiarto 5. Bpk. M. Irfan Zainul F. 6. Bpk. Aldo Maudy Gantirta 7. Bpk. Sudarlindo

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

Board of Commissioners Meeting Agenda in 2020

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meetings Agenda	Peserta Rapat Participants
6.	27 November 2020	- Kinerja Keuangan & Operasional Ytd. Oktober 2020 - Financial & Operational Performance as of October 2020	- Bpk. Ivan Airlangga EP. - Bpk. Achmad Facruddin - Bpk. Andi Saiful Haq - Bpk. Budiarto - Bpk. Edward Situmorang - Bpk. M. Irfan Zainul F. - Bpk. Aldo Maudy Gantirta - Bpk. Sudarlindo

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris

Sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, maka pada setiap rapat dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Begitu pula dengan risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir.

Risalah rapat-rapat tersebut dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris di tempat kedudukan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut. Salinan risalah rapat gabungan diberikan juga kepada Direksi.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya melalui program

Board of Commissioners Meeting Resolutions Monitoring and Follow-Up Evaluation

As a form of monitoring and evaluation of the resolutions of the Board of Commissioners' meetings, each meeting minutes are signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Commissioners present. Likewise with the minutes of the joint meeting of the Board of Commissioners and Directors, signed by the Chair of the Meeting and all members of the Board of Commissioners and Directors present.

Minutes of internal and joint meeting is developed and administered by Secretary of the Board of Commissioners at the Company's domicile. Each member of the Board of Commissioners is entitled to receive a copy of the minutes meeting, regardless members of the Board of Commissioners present or not present in the meeting. The copy of joint minutes meeting is also provided to the Board of Directors.

Board of Commissioners Competency Development and Training

The Board of Commissioners continues to increase its knowledge and competence through competency

pengembangan kompetensi, antara lain pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya. Pada tahun 2020, Dewan Komisaris mengikuti beberapa program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

development programs, including training, seminars, and other activities. However, this can be adjusted to the needs and priorities of the Company. In 2020, there was no training attended by the Board of Commissioners:

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2020

Board of Commissioners Competency Development and Training

Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Jumlah Peserta Total Participant	Tanggal Date
Komisaris Commissioner	Optimalisasi Peran Komite Audit dalam Pengawasan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik	1 orang/ Person (Bpk. Achmad Fachruddin)	12 Oktober 2020
Komisaris Commissioner	Directorship Program	1 orang/ Person (Bpk. Achmad Fachruddin)	15-18 Desember 2020
Komisaris Commissioner	Corporate Law for Executive Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Korporasi BUMN	1 orang/ Person (Bpk. Andi Saiful Haq)	15-18 Desember 2020

Penilaian Atas Kinerja Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Investasi & Risiko Usaha.

Penilaian kinerja dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris meliputi Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite, Tingkat Kehadiran dalam Rapat Internal Dewan Komisaris, Tingkat Kontribusi Tertulis bagi Komite, Akurasi Rekomendasi Tertulis, Akurasi Rekomendasi Lisan, Peran Aktif (Inisiatif) dan Inovasi. Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan setiap Triwulan. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja Komite Audit selaku kelompok maupun anggotanya selaku individu.

Assessment on Performance of Committees Under Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Board of commissioners is assisted by committees that are directly responsible to the Board of Commissioners, such as the Audit Committee, the Investment & Business Risk Committee.

Performance assessment is conducted by the Board of Commissioners with performance appraisal indicators as determined by the Board of Commissioners including Attendance Level at Committee Meetings, Attendance Level at Internal Meetings of the Board of Commissioners, Level of Written Contribution to the Committee, Accuracy of Written Recommendations, Accuracy of Verbal Recommendations, Active Role (Initiative) and Innovation. The Audit Committee performance assessment is carried out every quarter. Performance appraisal is carried out to assess the performance of the Audit Committee as a group and its members as individuals.

Penilaian kinerja Komite Audit tahun 2020 dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang audit, kecukupan proses pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Penilaian Kinerja Komite Investasi & Risiko Usaha Tahun 2020

Penilaian kinerja dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris meliputi Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite, Tingkat Kehadiran dalam Rapat Internal Dewan Komisaris, Tingkat Kontribusi Tertulis bagi Komite, Akurasi Rekomendasi Tertulis, Akurasi Rekomendasi Lisan, Peran Aktif (Inisiatif) dan Inovasi. Penilaian kinerja Komite Investasi & Risiko Usaha dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja Komite Investasi & Risiko Usaha selaku kelompok maupun anggotanya selaku individu.

Selain itu, penilaian kinerja Komite Investasi & Risiko Usaha tahun 2020 dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Investasi & Risiko Usaha yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang manajemen risiko. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Investasi & Risiko Usaha untuk periode jabatan berikutnya.

Assessment on performance of Audit Committee in 2020 is carried out based on the realization and completion of the work programs listed in the Audit Committee Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee report which includes the implementation of committee duties in the audit sector, the adequacy of the internal control process and the preparation of financial reports. The results of the assessment become a consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Audit Committee for the next term of office.

Assessment on Performance of Investment & Business Risk Committee in 2020

Performance appraisal is carried out by the Board of Commissioners with performance appraisal indicators as determined by the Board of Commissioners including Attendance Level in the Committee Meetings, Attendance Level in Board of Commissioners Internal Meetings, Level of Written Contribution to the Committee, Accuracy of Written Recommendations, Accuracy of Oral Recommendations, Active Role (Initiative) and Innovation. Performance assessment of the Investment & Business Risk Committee is carried out every 3 (three) months. Performance appraisal is carried out to assess the performance of the Investment & Business Risk Committee as a group and its members as individuals.

In addition, the assessment of the performance of the Investment & Business Risk Committee in 2020 is carried out based on the realization and completion of the work programs listed in the Risk Management Committee Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the Investment & Business Risk Committee report which covers implementation of committee duties in risk management. The results of the assessment become material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Investment & Business Risk Committee for the next term of office.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* untuk kemajuan dan kesehatan Persahaan. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Hal yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga dapat dicapai kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:

- Terlaksananya dengan baik *internal control* dan manajemen risiko;
- Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham;
- Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
- Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengadakan rapat gabungan sebagai bentuk kerjasama dan koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat gabungan diselenggarakan dalam rangka pembahasan terkait rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Working Relationship Between Board of Commissioners and Board of Directors

The working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is a check and balance relationship for the progress and health of the Company. The Board of Commissioners and Directors in accordance with their respective functions are responsible for the long-term sustainability of the Company's business. What must be done by the Board of Commissioners and Board of Directors together in accordance with their respective functions, so that the long-term sustainability of the company's business can be achieved reflected in:

- Proper implementation of internal control and risk management;
- Achieve a reasonable return for Shareholders;
- Properly protected interests of stakeholders;
- Implementation of leadership and management succession in all lines of the organization;
- The fulfillment of GCG implementation.
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
- Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

The Board of Commissioners and Board of Directors regularly hold joint meetings as a form of cooperation and coordination between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The joint meeting was held in the context of discussion related to work plans, operations, business opportunities, and strategic issues that require the approval of the Board of Commissioners.

Throughout 2020, the Board of Commissioners and Board of Directors held 11 (eleven) joint meetings with attendance level as follows:

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Pengurus Tahun 2020*Attendance of The Board of Commissioners and Directors at Join Meeting In 2020*

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Jumlah Kehadiran/ Jumlah Rapat Total Attendance / Total Meetings	% Kehadiran Attendance
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners				
Ignatius Tallulembang	Komisaris Utama President Commissioner	01 Januari 2020 – 13 Maret 2020	2 / 2	100%
Ivan Airlangga EP	Komisaris Commissioner	01 Januari 2020 – 31 Desember 2020	11 / 11	100%
Achmad Fachrudin	Komisaris Commissioner	01 Januari 2020 – 31 Desember 2020	9 / 10	90%
Alfian Nasution	Komisaris Commissioner	01 Januari 2020 – 13 Maret 2020	2 / 2	100%
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	11 September 2020 – 31 Desember 2020	5 / 5	100%
Direksi/ Board of Directors				
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	1 Januari 2020 – 31 Desember 2020	11/11	100%
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operations Director	1 Januari 2020 – 31 Desember 2020	11/11	100%
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	1 Januari 2020 – 31 Desember 2020	11/11	100%
Demi Aswan	Direktur Keuangan & SDM Finance & HR Director	1 Januari 2020 – 31 Mei 2020	3/3	100%
Azwani	Direktur Keuangan & SDM Finance & HR Director	1 Juni 2020 – 31 Desember 2020	8/8	100%

Adapun agenda rapat gabungan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

Board of Directors and Board of Commissioners joint meeting agenda are as follows:

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020*Board of Commissioners and Directors Meeting Agenda 2020*

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meetings Agenda	Peserta Rapat Participants
1.	17 Januari 2020	- Kinerja Tahun 2020 - Realisasi KPI Desember 2019 - RKAP 2020	BoC, BoD, Komite-komite, Corsec, SPBD, Set. Dekom. BoC, BoD, Committees, Corsec, SPBD, Secretary to Board of Commissioners

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Board of Commissioners and Directors Meeting Agenda 2020

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meetings Agenda		Peserta Rapat Participants
2	17 Januari 2020	MWT BoD-BoC PTK bersama MWT BoD-BoC PTK with PTK Pekerja PTK Cabang Batam & Workers in Batam Branch & Group		BoC, BoD, Komite-komite, Corsec, Team PTK Group Cab. Batam, SPBD, Dir. PKT, Dir. PKS, Set. Dekom. BoC, BoD, Committee, Corsec, Team PTK Group. Batam Branch Office, SPBD, Dir. PKT, Dir. PKS, Set. BoC.
3.	23 April 2020	- Review Kinerja Operasional & Keuangan - Review Kinerja Investasi - Revisi ABI 2020 - Temuan Audit	HSSE - Review of HSSE Operational & Financial Performance - Review of Investment Performance - Revised ABI 2020 - Audit Findings	BoC, BoD, Komite-komite, Corsec, SPBD, HSSE, Set. Dekom. BoC, BoD, Committees, Corsec, SPBD, HSSE, Secretary to Board of Commissioners
4.	22 Juni 2020	- Kinerja PTK Ytd. Mei 2020 - Realisasi Anggaran Biaya Investasi Ytd. Mei 2020 - Rencana Revisi ABI 2020 - Proposal ABI RKAP 2021 - Tindak Lanjut Temuan Audit Ytd. Mei 2020 - Tindak Lanjut Kinerja Kapal Negatif Ytd. Mei 2020	- Performance of PTK as of May 2020 - Realization of Investment Cost Budget as of May 2020 - Revised ABI 2020 Plan - Proposal ABI RKAP 2021 - Follow-up to Audit Findings as of May 2020 - Follow-up on the Negative Ship Performance as of May 2020	BoC, BoD, Komite-komite, Corsec, SPBD, HSSE, Set. Dekom. BoC, BoD, Committees, Corsec, HSSE, Secretary to Board of Commissioners
5.	28 Juli 2020	- Laporan Keuangan Ytd. Juni 2020 - Pengembangan SDM - Piutang - KPI	- Financial Report as of June 2020 - Human resource development - Receivables - KPIs	BoC, BoD, Komite-komite, Corsec, SPBD, HSSE, Set. Dekom. BoC, BoD, Committees, Corsec, HSSE, Secretary to Board of Commissioners
6.	02 September 2020	- Laporan Kinerja PTK Ytd. Juli 2020 dan Prognosa Kinerja Keuangan akhir tahun - Paparan Kinerja AP PTK Ytd. Juli 2020 highlight pada kinerja PKT dan PKS. - Progres Tindak Lanjut terkait kapal yang memiliki kinerja negative (summary perubahan laporan kerugian perbulan dari 3 bulan sebelumnya)	- PTK Performance Report as of July 2020 and Year-end Financial Performance Prognosis - Exposure to the Performance of PTK as of July 2020 highlights on PKT and PKS performance. - Follow-up progress related to ships with negative work performance (summary of changes to monthly loss reports from the previous 3 months)	BoC, BoD, Komite-komite, Corsec, SPBD, HSSE, Set. Dekom. BoC, BoD, Committees, Corsec, SPBD, HSSE, Secretary to Board of Commissioners

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020**Board of Commissioners and Directors Meeting Agenda 2020**

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meetings Agenda		Peserta Rapat Participants
7.	29 September 2020	- Laporan Kinerja PTK Ytd. Agustus 2020 - Realisasi ABI Ytd. Agustus 2020 - RKAP 2021 (termasuk ABI 2021)	- PTK Performance Report as of August 2020 - Realization of ABI as of August 2020 - RKAP 2021 (including ABI 2021)	BoC, BoD, Komite-komite, Corsec, SPBD, HSSE, Set. Dekom. BoC, BoD, Committees, Corsec, SPBD, HSSE, Secretary to Board of Commissioners
8.	26 Oktober 2020	- Tindak Lanjut Rapat BoD-BoC tanggal 29 September 2020 - Kinerja Yts. September 2020 - Pencapaian KPI Triwulan III - Lain-lain	- Follow-up to the BoD-BoC Meeting on 29 September 2020 - Performance as of September 2020 - Achievement of KPI as of 3rd Quarter - Others	BoC, BoD, Komite-komite, Corsec, Team Mgt PTK, Set. Dekom. BoC, BoD, Committees, Corsec, PTK Management Team, Secretary to Board of Commissioners
9.	27 November 2020	- Tindak Lanjut dari Hasil Rapat BoD-BoC tanggal 26 Oktober 2020 - Kierja Ytd. Oktober 2020 - Pencapaian KPI Ytd. Oktober 2020	- Follow-up to the results of the BoD-BoC Meeting on October 26, 2020 - Performance as of October 2020 - Achievement of KPI as of October 2020	BoC, BoD, Komite-komite, Corsec, SPBD, HSSE. Head of Internal Audit, Set. Dekom.
10.	07 Desember 2020	Presentasi RJPP PTK Tahun 2021-2026	PTK RJPP Presentation for 2021-2026	BoC, BoD, Komite-komite, Corsec, SPBD, HSSE. Head of Internal Audit, VP. Fleet, Set. Dekom.
11.	21 Desember 2020	- Tindak Lanjut rapat BoD-BoC tanggal 27 November 2020 - Kinerja Ytd. November 2020 - Pencapaian KPI Ytd. 2020	- Follow-up to the BoD-BoC meeting on 27 November 2020 - Performance as of November 2020 - KPI Achievement as of 2020	BoC, BoD, Komite-komite, Corsec, SPBD, HSSE. Head of Internal Audit, Set. Dekom.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2020, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Board of Commissioner and Board of Directors Concurrent Position

In 2020, Board of Commissioners and Board of Directors served in concurrent position at other companies as explained in table below:

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioner and Board of Directors Concurrent Position

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan di Perusahaan Lain Positon in Other Company	Nama Perusahaan Name of Company
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners			
Ivan Airlangga EP	Komisaris/ Commissioner	Pensiun/ Pension	-
Achmad Fachrudin	Komisaris/ Commissioner	Tidak menjabat di perusahaan lain Not serving in another company	-
Andi Saiful Haq	Komisaris/ Commissioner	Direktur/ Director	Institute for Transformation Studies (INTRANS)
Direksi/ Board of Directors			
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	Tidak menjabat di perusahaan lain Not serving in another company	-
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operations Director	Komisaris Commissioner	PT Peteka Karya Tirta
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	Tidak menjabat di perusahaan lain Not serving in another company	-
Azwani	Direktur Keuangan & SDM Finance & HR Director	Tidak menjabat di perusahaan lain Not serving in another company	-

Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Dewan Komisaris dan Direksi PTK tidak memiliki hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham secara langsung maupun tidak langsung.

Affiliation Among Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders

PTK Board of Commissioners and Directors do not have any direct or indirect affiliation among the Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi telah disajikan di bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Board of Commissioners and Directors Share Ownership

Information on Board of Commissioners and Board of Directors share ownership is presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Direksi

Board of Directors

- **Direksi secara umum bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS serta mempertanggungjawabkannya kepada RUPS.**

- **In general, the Board of Directors is in charge to take all actions related to the Company's management with restrictions as stipulated in the laws and regulations, the Articles of Association and/or GMS resolutions and accountable to the GMS.**

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Direksi memiliki tanggung jawab dalam pengawasan internal secara efektif dan efisien, memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik, mengelola pekerja dan melaporkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan kepada Pemegang Saham dalam RUPS.

Board of Directors is a corporate organ with responsibility upon management of the Company. In carrying out its duties, the Board of Directors is responsible to the GMS. The responsibility of the Board of Directors to the GMS is a manifestation of the accountability of the Company's management in accordance with the principles of GCG

The Board of Directors has the responsibility for internal control effectively and efficiently, monitoring risks and managing them, maintaining a conducive working climate so that productivity and professionalism are better, managing employees and reporting the overall performance of the Company to Shareholders at the GMS.

Kriteria Direksi

Anggota Direksi PTK wajib memenuhi seluruh persyaratan kemampuan dan kepatutan, yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, *Board Manual* dan CoCG Perusahaan, yaitu:

- Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur dan perilaku yang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit serta tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris

Board of Directors Criteria

PTK Board of Directors members are required to meet all the requirements of suitability and compliance, which have been regulated in the Company's Board Manual and CoCG, namely:

- Having expertise, integrity, leadership, experience, honesty, goodwill, and high dedication to advance and develop the Company.
- Capable to perform legal actions and have never been declared bankruptcy, as well as have never been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was guilty of

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;

- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
- Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga antara Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris;
- Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Direksi mengacu pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan Perusahaan. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian tersebut meliputi:

- Tahap pertama adalah pengajuan usulan calon Direksi Anak Perusahaan oleh Direksi PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham dengan meminta persetujuan tertulis dari Direksi PT Pertamina (Persero) dan disetujui oleh RUPS PT Pertamina (Persero) sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan;
- Prosedur pengangkatan calon anggota Direksi Perusahaan melalui tahap evaluasi, proses penjurian, proses penilaian melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) serta dan ketentuan-ketentuan perihal formulasi penilaian, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau pedoman yang berlaku di PT Pertamina (Persero);
- Sebelum meminta Persetujuan RUPS, Direksi PT Pertamina (Persero) akan meminta persetujuan dan pendapat Direksi PT Pertamina (Persero) terkait rekomendasi calon Direksi Anak Perusahaan. Prosedur permintaan persetujuan tersebut, meliputi:
 - » Direksi Pertamina menyampaikan calon Direksi Anak Perusahaan kepada Menteri BUMN setelah memperoleh persetujuan Direksi.

causing the Company bankruptcy.

- Have never been punished due to criminal action that brings loss to the state finance in five years prior to the appointment.
- Not allowed having familial relationship among Members of the Board of Directors and between Members of the Board of Directors with Members of the Board of Commissioners.
- Not representing the interest of a political party.

Board of Directors Appointment and Dismissal

The terms of appointment and dismissal of the Directors refer to the Articles of Association and the provisions of the company's laws and regulations. The appointment and dismissal procedures include:

- First stage is to propose candidates for Subsidiaries' Board of Directors by PT Pertamina (Persero) Board of Directors as Shareholder by requesting a written approval from the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) and approved by PT Pertamina (Persero) GMS prior to being stipulated in the Subsidiaries'GMS.
- The appointment procedure for candidates of the Company's Board of Directors undergoes evaluation, election process, assessment process through fit and proper test as well as provisions on assessment formulation by continuously referring to the prevailing laws and regulations and/or guidelines at PT Pertamina (Persero).
- Prior to requesting GMS Approval, the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) will request an approval and recommendation of the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) regarding the recommendation of candidates for Subsidiaries' Board of Directors. The procedure of approval request includes:
 - » The Board of Directors of Pertamina to submit the candidates for Subsidiaries' Board of Directors to Minister of SOE after acquiring the Board of Directors' approval.

- » RUPS Pertamina memberikan penetapan tertulis.
- » Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak Manajemen.

RUPS memiliki kewenangan dalam pemberhentian Direksi yang disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemberhentian tersebut dapat disebabkan antara lain:

- Masa jabatannya berakhir;
- Mengundurkan diri;
- Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- Meninggal dunia;
- Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Direksi

Sebelum diangkat menjadi anggota Direksi PTK, calon anggota Direksi harus mengikuti mekanisme nominasi yaitu lulus *fit and proper test* serta memperoleh persetujuan dari pemegang saham. Pada tahun 2020, Direksi PTK telah memenuhi persyaratan dan lulus *fit and proper test* yang diselenggarakan PT Pertamina (Persero). Dengan demikian, seluruh Direksi Perseroan telah terbukti merupakan anggota yang memiliki integritas (kepatutan), kompetensi (kelayakan), reputasi, dan pengalaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Komposisi Direksi PTK hingga 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- » Pertamina GMS to provide written stipulation.
- » The selected Board of Directors to sign Management contract.

The authority of dismissing the Board of Directors belongs to GMS, in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association. The discharge of Members of the Board of Directors may occur due to:

- End of term of office;
- Resignation;
- Losing the Indonesian citizenship;
- Passed away;
- Discharge based on GMS Resolution

Board of Directors Fit and Proper Test

Prior appointed as a member of the PTK Board of Directors, prospective members of the Board of Directors must follow the nomination mechanism, namely passing the fit and proper test and obtaining approval from shareholders. In 2019, the Directors of PTK have fulfilled the requirements and passed the fit and proper test conducted by PT Pertamina (Persero). As such, all the Directors of the Company have been proven to be members who have integrity (propriety), competence (worthiness), reputation, and experience in carrying out their duties and responsibilities.

Board of Directors Composition And Terms of Office

The composition of the PTK Board of Directors as of December 31, 2020 is as follows:

Komposisi Direksi PTK hingga 31 Desember 2020

Board of Directors Composition and Terms of Office

Nama Name	Jabatan Jabatan	Dasar Pengangkatan Dasar Pengangkatan	Periode Masa Jabatan Periode Masa Jabatan
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama <i>President Director</i>	Akta No. 5 tanggal 17 Juli 2019	15 Juli 2019 – 31 Desember 2020
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran <i>Marketing Director</i>	Akta No. 4 tanggal 12 Juli 2019	20 Juni 2019 – 31 Desember 2020
Hadi Purnomo	Direktur Operasi <i>Operational Director</i>	Akta No. 9 tanggal 24 April 2019	2 April 2019 – 31 Desember 2020
Nepos MT Pakpahan	PLT Direktur Keuangan dan SDM <i>PLT Finance and HR Director</i>	Surat Penunjukan Pelaksana Tugas No. SPPLT-056/ DEKOM.PTK/2019	25 November 2019 – 31 Mei 2020
Azwani	Direktur Keuangan dan SDM <i>Finance and Resource Director</i>	Akta No. 6 tanggal 9 Juni 2020	1 Juni 2020 – 31 Desember 2020

Pedoman dan Tata Tertib Direksi

Board Manual merupakan bagian dari *soft structure* GCG sekaligus merupakan perwujudan komitmen Direksi terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Selain itu, *Board Manual* juga merupakan wujud komitmen Direksi terhadap pemenuhan ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, serta standar etika yang berlaku di Perusahaan.

Penyusunan dan penerapan *Board Manual* diharapkan dapat mendorong terwujudnya hal-hal terkait fungsi Direksi, sebagai berikut:

- Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta organ-organ lain Perusahaan.

Board of Directors Charter

Board Manual is part of the GCG *soft structure* as well as a manifestation of the Board of Directors' commitment to the implementation of GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. In addition, the *Board Manual* is also a manifestation of the Board of Directors' commitment to compliance with the provisions of the prevailing laws/regulations, the Company's Articles of Association, and the ethical standards applicable in the Company.

Preparation and implementation of the *Board Manual* are expected to encourage realization of any conditions related to the functions of the Board of Directors, as follows:

- Clearer duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors;
- Ease organs under the Board of Directors to understand their duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as other Company's organs.

Board Manual PTK bersifat dinamis, yaitu disesuaikan dengan perkembangan industri dan usaha yang dijalankan Perusahaan. Selain itu penyempurnaan terhadap *Board Manual* juga dilaksanakan sesuai kebutuhan Direksi. *Board Manual* akan dievaluasi secara berkala untuk kemudian direvisi.

Perincian isi *Board Manual* adalah sebagai berikut:

- **Pendahuluan**
Mencakup maksud dan tujuan, ruang lingkup dan referensi yang menjadi acuan.
- **Dewan Komisaris**
Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris, pengaturan Rapat Dewan Komisaris dan organ pendukung Dewan Komisaris.
- **Direksi**
Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, pengaturan Rapat Direksi dan organ pendukung Direksi.
- **Struktur Organisasi dan Prinsip Dasar Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi**
Mencakup struktur organisasi, benturan kepentingan dan etika jabatan, serta prinsip dasar hubungan Dewan Komisaris dan Direksi.
- **Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi**
Mencakup kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris, kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi dan program pengenalan Perseroan kepada pejabat baru pada organ Perseroan serta komunikasi formal.
- **Kegiatan antar organ Perseroan**
Mencakup mengenai penyelenggaraan RUPS, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan RKAP, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan Laporan Tahunan, penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan perbuatan Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris.

PTK *Board Manual* is dynamic, which is adjusted to the industry development and the business the Company is running. In addition, improvements to the *Board Manual* were also carried out according to the needs of the Board of Directors. The *Board Manual* will be evaluated periodically for later revision.

Details of the contents of the *Board Manual* are as follows:

- **Introduction**
Covers objectives, scope and references which serve as a direction.
- **Board of Commissioners**
Covers duties, authority, and obligations of the Board of Commissioners, organization of Meeting of the Board of Commissioners, and supporting organs of the Board of Commissioners.
- **Board of Directors**
Covers duties, authority, and obligations of the Board of Directors, organization of Meeting of the Board of Directors, and supporting organs of the Board of Directors.
- **Organizational Structure and Basic Principle of Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors**
Covers organizational structure, conflict of interest, and position ethics, as well as basic principles of relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.
- **Management of Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors**
Covers attendance of the Board of Directors in the Meeting of Board of Commissioners, attendance of the Board of Commissioners in the Meeting of Board of Directors, and Joint Meeting of the Board of Commissioners – Board of Directors, as well as the Company's orientation program to new officials in the Company's organ, including formal communication.
- **Inter-Organs Activities of the Company**
Covers the implementation of GMS for ratifying RKAP and Annual Report; Annual GMS for ratifying Company Long- Term Plan (RJPP), and the Board of Directors' action requiring a Written Approval from the Board of Commissioners.

- **Lain-lain**

Mencakup penggunaan waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup penggunaan waktu Direksi dan Dewan Komisaris; sarana dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris; perjalanan dinas dan cuti.

- **Others**

Covers allocation of time, facilities and infrastructure, including allocation of the Board of Directors and Board of Commissioners' time; allocation of time of the Board of Directors and Board of Commissioners; business trips and leaves.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* antara lain sebagai berikut:

- Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan;
- Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
- Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non-keuangan;
- Memenuhi ukuran kinerja yang jelas lengkap dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perusahaan;
- Menyelenggarakan sistem pengendalian *intern* yang efektif dan memberikan asersi mengenai pengendalian *intern*;
- Melaksanakan manajemen risiko;
- Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi;
- Menindaklanjuti temuan-temuan audit Internal Audit dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Komisaris;
- Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/ mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, penanganan HSSE dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;
- Menyelenggarakan RUPS dan membuat risalah RUPS;
- Memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Directors Duty and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Directors are set out in the Articles of Association and the Board Manual, as follows:

- Leading and managing the Company in accordance with the interest and objectives of the Company;
- Controlling, maintaining, and managing the Company's assets.
- Implementing RJPP and RKAP, including financial and non-financial target achievement;
- Fulfilling clear, complete, and balanced performance indicators, either from financial or non-financial aspects to determine the Company's mission and objectives achievement;
- Implementing effective internal control system and providing assertion on internal control;
- Performing risk management;
- Establishing and utilizing information technology;
- Following up audit findings of Internal Audit and External Audit, as well as reporting to the Board of Commissioners;
- Reporting relevant information to the Board of Commissioners, among which on keymanager succession/ mutation/promotion, HR development program, risk management accountability, HSSE management, and information technology utilization performance;
- Organizing GMS and preparing GMS Minutes Meeting;
- Taking into account the interest of stakeholders in accordance with ethical values and the prevailing laws and regulations.

Pembagian Tugas Direksi

Dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan membagi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Direktur Utama

Bertindak atas nama Direksi dalam menentukan, memutuskan dan menetapkan penyusunan strategi, perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan pengoperasian kapal-kapal milik Perusahaan pelayaran dan pihak-pihak pengguna jasa yang membutuhkan/ mempergunakan jasa Perusahaan, baik yang bergerak di bidang pencarian minyak lepas pantai maupun sektor lain yang bersifat khusus dalam bidang angkutan laut maupun jasa kepelabuhan, agar memperoleh profit optimal dan mengembangkan pangsa pasar dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan.

Direktur Operasi

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan penyusunan strategi serta pengembangan usaha terkait pelaksanaan operasional Perusahaan khususnya meningkatkan keandalan operasi kapal sehingga *commission days* dapat tercapai. Melalui penguatan operasional, diharapkan pelaksanaan Bisnis Perusahaan dapat memperoleh profit optimal dengan tetap memperhatikan etika Bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan.

Direktur Pemasaran

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan dalam penyusunan strategi dan pengembangan usaha serta mengidentifikasi kegiatan komersial baru (*new venture*) yang mendorong pertumbuhan bisnis PTK melalui pemasaran dan penjualan (*marketing & sales*) jasa sewa kapal dan jasa maritim kepada pelanggan dari segmen perusahaan oil & gas dan perusahaan non oil & gas, untuk tujuan peningkatan pendapatan dan memperoleh profit optimal bagi perusahaan melalui kegiatan komunikasi pemasaran yang profesional, dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Perusahaan

Board of Directors Division of Duty

In carrying out its activities, members of the Company's Board of Directors divide their duties and responsibilities as follows:

President Director

Acting on behalf of the Board of Directors in determining, deciding, and stipulating the strategies, planning, as well as implementation of all operating activities of ships owned by the Shipping Company and other service users, requiring/utilizing services of the Company, either offshore oil exploration as well as other sectors specialized in marine transportation or port service in order to gain optimal profit and expand market share by taking into account business ethics and upholding the policies established by the Company's Board of Commissioners.

Operation Director

Deciding, controlling, and directing the preparation of strategies as well as business development related to the Company's operational, specifically in increasing the reliability of ship operation up to the achievement of commission days. Through operational enforcement, the Company's Business is expected to gain optimal profit by continuously considering Business ethics and upholding the policies established by the Company's Board of Commissioners.

Marketing Director

Deciding, controlling, and directing the preparation of strategies and business development, as well as identifying new commercial activities (*new venture*) which promote business growth in PTK through marketing and sales in ships rental and maritime services to the customers from oil and gas and non- oil and gas segments, aiming to increase revenue and gain optimal profit for the company through professional marketing communication activities, by continuously considering business ethics and upholding the policies established by the company.

Direktur Keuangan & SDM

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan kelancaran dalam pengelolaan dana Perusahaan sehingga dapat menjamin likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam menetapkan kebijakan dengan management akuntansi dan perbendaharaan serta penyiapan laporan/data keuangan yang akurat dan tepat waktu serta kegiatan *Human Resources & General Affair* untuk seluruh pekerja Perusahaan untuk menjadikan pekerja PT Pertamina Trans Kontinental sebagai sumber daya unggul, strategis yang mampu mengelola Perusahaan secara profesional.

Hak, Kewajiban, dan Wewenang Direksi

Dalam melakukan tindakan pengurusan Perusahaan, Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
- Mengangkat dan memberhentikan pekerja berdasarkan aturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Mengidentifikasi peluang bisnis;
- Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Menyelenggarakan program pengenalan bagi Direksi baru yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/ mutasi/ promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban Manajemen Risiko, pelaksanaan L2K3, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS
- Memperhatikan kepentingan *Stakeholders* sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Director of Finance and Human Resource

Deciding, controlling, and directing the simplicity in managing the Company's funds in order to guarantee liquidity, solvency, and rentability in stipulating policies with accounting and treasure management, accurate and prompt financial report/data preparation, as well as Human Resources & General Affair activities for all employees of the Company to shape the employees of PT Pertamina Trans Kontinental into excellent and strategic resources with the capability to manage the Company professionally.

Board of Directors' Rights, Obligations and Authorities

In carrying out the Company management actions, the Board of Directors has the following authority:

- Stipulating policies relate to the Company's management, including manpower policies.
- Appointing and discharging employees based on the Company's internal regulations and the prevailing laws and regulations;
- Managing delegation of authority/power of attorney of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court. Preparing Company Long-Term Plan and Company Work Plan and Budget;
- Identifying business opportunities
- Composing and implementing proper accounting system with the Financial Accounting Standards
- Holding an orientation program for new relevant Directors to the Board of Commissioners, among which on the succession/mutation/promotion of key manager (senior), HR development program, Risk Management accountability, L2K3 implementation, and information technology utilization performance;
- Organizing General Meeting of Shareholders (GMS) and preparing GMS minutes of meeting
- Taking into account the interest of Stakeholders in accordance with ethical values and the prevailing laws and regulations;

- Menyusun dan menyelenggarakan program pembelajaran (*knowledge skill*) bagi Direksi;
- Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan;
- Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan;
- Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab dan wewenang Manajemen serta ukuran kinerja pada setiap tingkatan/ level;
- Menandatangani kontrak Manajemen setiap tahun yang memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang telah ditetapkan;
- Menyusun dan mempublikasikan Laporan Tahunan Perusahaan;
- Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perusahaan lain, dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Program Pengenalan untuk Direksi yang Baru Ditunjuk/ Menjabat

Sejalan dengan kebijakan di Dewan Komisaris, PTK juga telah memiliki kebijakan dan mekanisme bagi anggota Direksi yang baru ditunjuk/menjabat diberikan informasi terkait Perusahaan secara komprehensif dan representatif. Informasi yang diberikan ini merupakan bentuk pengenalan dari Perusahaan kepada anggota Direksi terpilih. Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Sekretaris Dewan Komisaris bila ada anggota Dewan Komisaris yang terpilih juga baru dilantik.

Program pengenalan bagi Anggota Direksi baru, mencakup beberapa hal:

- Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan Visi dan Misi, nilai dan budaya Perusahaan, tujuan dan strategi Perusahaan, unit

- Preparing and organizing learning program (*knowledge skill*) for the Board of Directors;
- Demonstrating accountability and providing all information on the Company's state of condition and operation;
- Signing a Conflict of Interest Integrity Pact;
- Determining the duties, responsibilities, and authority of the Management, as well as performance indicators in a clear manner to each level;
- Signing a Management contract every year that states the Board of Directors' statement/ commitment to meet all stipulated targets;
- Preparing and publishing the Company's Annual Report;
- Disclosing the Company's shares ownership and/ or families in other Companies in the Company's Annual Report.

Orientation Program for New Directors

In line with the policies in the Board of Commissioners, the PTK also has policies and mechanisms for newly appointed/serving members of the Board of Directors to be provided with comprehensive and representative information related to the Company. The information provided is a form of introduction from the Company to selected members of the Board of Directors. This activity is carried out in coordination with the Corporate Secretary in collaboration with the Secretary of the Board of Commissioners if a newly elected member of the Board of Commissioners is also appointed.

The introduction program for new members of the Board of Directors includes:

- An overview of the Company in relation to the Vision and Mission, corporate values and culture, corporate objectives and strategies, business

usaha dan anak perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, Manajemen Risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah strategis lainnya;

- Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta pendelegasian wewenang;
- Penjelasan mengenai *stakeholders* utama Perseroan dan tanggung jawab sosial Perusahaan;
- Pengenalan operasi Perusahaan;
- Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan;
- Aspek *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan

Pada pelaksanaannya, program pengenalan Direksi PTK dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/ Anak Perusahaan, pengkajian dokumen, atau kegiatan lain yang dianggap sesuai. Pada tahun 2020 terjadi pergantian susunan Direksi, yakni pada komposisi Direktorat Keuangan & SDM.

units and subsidiaries, financial and operating performance, short and long-term business plans, information technology applications, risk management, business competition conditions, and other strategic issues;

- Description of the duties and responsibilities of the Board of Directors as well as delegation of authority;
- Description of the main stakeholders of the Company and corporate social responsibility;
- Introduction to the Company's operations;
- Legislation related to the Company's business activities;
- Aspects of Good Corporate Governance within the Company

In practice, the PTK Board of Directors introduction program may take the form of presentations, meetings, visits to the Company/Subsidiaries, document review, or other activities deemed appropriate. In 2020, there was a change in the composition of the Board of Directors, namely the composition of the Director of Finance & HR.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Sepanjang tahun 2020 anggota Direksi PTK telah mengikuti pelatihan, seminar ataupun *workshop*, seperti yang tertera di bawah ini:

Board of Directors Competency Development and Training

Throughout 2020 PTK Directors have participated in training, seminars or workshops, as follows:

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Board of Directors Competency Development and Training

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Time of Implementation
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	Global Leadership eSummit	ITD World	Singapura
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Director of Operation	Digital Supply Chain	Aia Anti Fraud Bandung	Bandung

Realisasi Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Direksi Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut:

1. Menyusun Program Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
2. Menyusun Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2021.
3. Memaksimalkan pencapaian Kinerja Perusahaan tahun 2020 dari sisi penjualan sehingga mencapai Rp3,06 triliun dengan peningkatan 20,41%.
4. Memaksimalkan pencapaian Kinerja Perusahaan tahun 2020 dari sisi laba bersih sehingga mencapai Rp423,37 miliar meningkat 43,52%.
5. Memaksimalkan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2020 mendapat skor 90,00.
6. Memaksimalkan Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) memperoleh nilai 102,81 dari total nilai 100%.
7. Pemenuhan target kinerja Perusahaan.

Keputusan-Keputusan Strategis

Keputusan-keputusan strategis yang diberlakukan Direksi pada tahun 2020 antara lain terkait RJPP, RKAP, KPI, kebijakan keuangan, rencana investasi, pengangkatan Komisaris Anak Perusahaan, pembukaan sub cabang.

Kriteria Penunjukan dan Independensi Direksi

Penunjukan anggota Direksi Perusahaan harus memenuhi kriteria antara lain: tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; tidak pernah melakukan tindakan tercela, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan sejenis, dan atau lembaga lain; dan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota

Board of Directors Duty Implementation in 2020

Throughout 2020, the Board of Directors has carried out duty and responsibility according to the Articles of Association, as follows:

1. Prepare Corporate Long-Term Plan (RJPP).
2. Prepare Corporate Budget Plan 2021.
3. Optimize the achievement of the Company's 2020 performance in terms of sales to reach IDR 3.06 trillion with an increase of 20.41%.
4. Optimize achievement of the Company's performance in 2020 from net profit side 423.37 billion increases 20.41%.
5. Optimize Score of Soundness Index in 2020 achieving 90.00.
6. Optimize achievement of Key Performance Indicators (KPI) achieving score of 102.81 from total score 100%.
7. Achievement of the Company's performance target.

Strategic Decisions

Strategic decisions adopted by the Board of Directors in 2020 include among others RJPP, RKAP, KPI, financial policies, investment plans, appointment of Commissioners in subsidiaries, sub-branches opening.

Board of Directors Appointment and Independency Criteria

Appointment of the Company's Board of Directors member shall fulfill the following criteria: have never been declared bankrupt or were guilty of causing a company to go bankrupt; have never committed a disgraceful act, have never been convicted of a criminal act, have never held concurrent positions as Commissioner, Director or Executive Officer at similar companies and/or other institutions; and has no financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members

Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

of the Board of Directors and/or the Company's Shareholders.

Hubungan Afiliasi Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Direksi Perusahaan menjalankan tanggung jawabnya secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak manapun lainnya. Direksi dalam menyelesaikan masalah dalam Perusahaan selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.

Terkait hal tersebut, hubungan keluarga dan/atau keuangan antara anggota Direksi dan sesama anggota Direksi, dengan anggota Dewan Komisaris, dan dengan Pemegang Saham PTK; serta hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Direksi PTK di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Affiliation Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners and Major/Controlling Shareholders

The Board of Directors of the Company carries out its responsibilities independently and does not receive intervention from shareholders or any other party. In resolving problems within the Company, the Board of Directors always puts personal interests aside and avoids conflicts of interest.

In this regard, family and/or financial relationships between members of the Board of Directors and fellow members of the Board of Directors, with members of the Board of Commissioners, and with PTK shareholders; as well as management relationships and share ownership in other companies by the PTK Board of Directors in 2020 can be seen in the following table:

Hubungan Afiliasi Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Affiliation Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners and Major/Controlling Shareholders

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Affiliation with			Hubungan Keuangan Dengan Financial Affiliation with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholder	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholder
Nepos MT Pakpahan	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
Arsono Kuswardanu	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
Hadi Purnomo	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
Azwani	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No

Rangkap Jabatan dan Kepemilikan Saham

Concurrent Position and Shares Ownership

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain Concurrent Position and Shares Ownership		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholder
Nepos MT Pakpahan	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
Arsono Kuswardanu	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
Hadi Purnomo	Komisaris Utama/ President Commissioner PT Peteka Karya Tirta	Tidak/ No	Tidak/ No
Azwani	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi untuk membahas permasalahan operasional atau untuk mengambil keputusan atas kebijakan-kebijakan Perseroan. Berdasarkan *Board Manual* Perusahaan, Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri seluruh anggota Direksi secara fisik.

Ketentuan pelaksanaan Rapat Direksi berdasarkan *Board Manual*:

1. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala minimum satu kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila:
 - a. Dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. Pemegang saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili

Board of Directors Meeting Policy And Implementation

Policies of Meeting

Meeting of the Board of Directors is a meeting conducted by the Board of Directors to exchange views on operational issues or to make decisions on the Company's policies. According to the Company's Board Manual, Meeting of the Board of Directors should be held periodically and attended by all members of the Board of Directors physically.

Provisions on the implementation of Meeting of the Board of Directors are based on the Board Manual:

1. Board of Directors meetings are held regularly at least once in 1 (one) month.
2. Directors' meetings can be held at any time if:
 - a. Considered necessary by one or more members of the Board of Directors.
 - b. By written request of one or more members of the Board of Commissioners.
 - c. Shareholders who have the largest number of shares by mentioning the matters that will be discussed.
3. Notice to Board of Directors meetings are conducted in writing by members of the Board of Directors who are entitled to represent the

- Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan;
- Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
 - Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi;
 - Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat;
 - Rapat Direksi dapat diadakan dengan cara konferensi antara para Anggota Direksi yang berada di tempat yang berbeda, melalui telepon konferensi, video konferensi atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap Anggota Direksi dapat saling mendengar/berkomunikasi dan berpartisipasi dalam Rapat;
 - Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Perseroan. Materi rapat dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.

Company and submitted within a period of no later than 3 (three) days before the meeting is held.

- The meeting call must include the event, date, time and place of the meeting.
- Directors' meetings are held at the Company's place of domicile or at the place of business activities of the Company or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.
- Prior meeting notice are not required if all members of the Board of Directors are present at the meeting.
- Board of Directors meetings can be held by conference between Directors who are in different places, through conference calls, video conferences or other communication equipment that enable each member of the Board of Directors to listen/ communicate with each other and participate in the Meeting.
- Meeting materials are prepared by the Corporate Secretary. Meeting material can be delivered together with the invitation.

Rapat Direksi

Dalam Melaksanakan tugasnya, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran Rapat Direksi sepanjang 2020:

Bord of Directors Meeting

In implementing the duties, the Board of Directors held 12 meetings. The Board of Directors frequency and attendance in 2020 are as follows:

Kehadiran pada Rapat Direksi 2020

Board of Directors Meeting Attendance in 2020

Nama Name	Inisial Initial	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Nepos MT Pakpahan*	NP	Direktur Utama President Director	15 Juli 2019 - sekarang	12	12	100%
Hadi Purnomo	HP	Direktur Operasi Marketing Director	2 April 2019 - sekarang	12	12	100%
Arsono Kuswardanu	AK	Direktur Pemasaran Operational Director	20 Juni 2019 - sekarang	12	12	100%
Azwani	DA	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	1 Juni 2020 - sekarang	4	4	100%

* Merangkap sebagai Direktur Keuangan hingga 31 Mei 2020.

* Concurrently serving as Finance Director until 31 May 2020.

Agenda rapat Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Directors meeting agenda are as follows:

Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
06-Jan-20	1. Progres Tindak lanjut Notulen Rapat tgl 31 Des 2019 2. Pembangunan Budaya <i>safety</i> di masing-masing unit kerja 3. Rencana kerja tahun 2020 dan RJPP 2020-2026 Anak Perusahaan 1. Progress of Follow-up to Meeting Minutes on 31 Dec 2019 2. Safety culture development in each work unit 3. Work plans for 2020 and RJPP 2020-2026 for Subsidiaries	- Direktur Utama, - Direktur Operasi, - Direktur Pemasaran, - Direktur Keuangan & SDM, - Head of Internal Audit, - VP Fleet, - VP Marketing, - VP Operation, - VP Finance, - VP HR & GA, - Direktur AP, - GM PSTB, - Manager SMR, - Manager SPBD, - Manager IT, - Manager New Building Project, - Manager Cabang
13-Jan-20	Progres Tindak Lanjut Notulen Rapat tanggal 6 Januari 2020 Progress of Follow-up to Meeting Minutes on January 6, 2020	- Direktur Utama, - Direktur Operasi, - Direktur Pemasaran, - Direktur Keuangan & SDM, - Head of Internal Audit, - VP Fleet, - VP Marketing, - VP Operation, - VP Finance, - VP HR & GA, - Manager SMR, - Manager SPBD, - Manager IT, - Manager New Building Project, - Ketua Tim Pengadaan Kapal
28-Jan-20	Progres Tindak Lanjut Notulen Rapat tanggal 13 Januari 2020 Progress of Follow-up to Meeting Minutes on January 13, 2020	- Direktur Utama, - Direktur Operasi, - Direktur Pemasaran, - Direktur Keuangan & SDM, - Head of Internal Audit, - VP Finance, - Manager SMR, - Manager SPBD
04-Feb-20	Progres Tindak Lanjut Notulen Rapat tanggal 28 Januari 2020 Progress of Follow-up to Meeting Minutes on 28 January 2020	- Direktur Utama, - Direktur Operasi, - Direktur Pemasaran, - Direktur Keuangan & SDM, - Head of Internal Audit, - VP Finance, - Manager SMR, - Manager SPBD

Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant	
10-Feb-20	Progres Tindak Lanjut Notulen Rapat tanggal 4 Februari 2020 Progress of Follow-up on Meeting Minutes on February 4, 2020	• Direktur Utama, • Direktur Operasi, • Direktur Pemasaran, • Direktur Keuangan & SDM, • Head of Internal Audit, • VP Finance, • Manager SMR, • Manager SPBD, • Manager Procurement	• President Director, • Operations Director, • Marketing Director, • Finance & HR Director, • Head of Internal Audit, • VP Finance, • SMR Manager, • SPBD Manager, • Procurement Manager
17-Feb-20	Progres Tindak Lanjut Notulen Rapat tanggal 10 Februari 2020 Progress of Follow-up on Meeting Minutes on February 10, 2020	• Direktur Utama, • Direktur Operasi, • Direktur Pemasaran, • Head of Internal Audit, • VP Finance, • Manager SMR, • Manager SPBD, • Manager Procurement	• President Director, • Operations Director, • Marketing Director, • Head of Internal Audit, • VP Finance, • SMR Manager, • SPBD Manager, • Procurement Manager
24-Feb-20	Progres Tindak Lanjut Notulen Rapat tanggal 17 Februari 2020 Progress of Follow-up on Meeting Minutes on February 17, 2020	• Direktur Utama, • Direktur Operasi, • Direktur Pemasaran, • Direktur Keuangan & SDM, • Head of Internal Audit, • VP Finance, • Manager SMR, • Manager SPBD, • Manager Procurement	• President Director, • Operations Director, • Marketing Director, • Finance & HR Director, • Head of Internal Audit, • VP Finance, • SMR Manager, • SPBD Manager, • Procurement Manager
11-Mar-20	Progres Tindak Lanjut Notulen Rapat tanggal 24 Februari 2020 Progress of Follow-up on Meeting Minutes on February 24, 2020	• Direktur Utama, • Direktur Operasi, • Direktur Pemasaran, • Direktur Keuangan & SDM, • Corporate Secretary, • Manager SMR, • Manager SPBD	• President Director, • Operations Director, • Marketing Director, • Finance & HR Director, • Corporate Secretary, • SMR Manager, • SPBD Manager,
23-Jul-20	1. Strategi Investasi, 2. Perencanaan SDM, 3. Jasa Keagenan & efisiensi agency cost, 4. Lain-lain 1. Investment Strategy, 2. HR Planning, 3. Agency services & agency cost efficiency, 4. Others	• Direktur Utama, • Direktur Operasi, • Direktur Pemasaran, • Direktur Keuangan & SDM, • Corporate Secretary, • Manager SMR, • Manager SPBD	• President Director, • Operations Director, • Marketing Director, • Finance & HR Director, • Corporate Secretary, • SMR Manager, • SPBD Manager
22-Sep-20	1. Kinerja Operasi & keuangan, 2. Inisiatif Project (MIP & digitalisasi) 1. Operations & financial performance, 2. Project Initiatives (MIP & digitization)	• Direktur Utama, • Direktur Operasi, • Direktur Pemasaran, • Direktur Keuangan & SDM, • Corporate Secretary, • Head of Internal Audit, • Manager SMR, • Manager SPBD, • Manager Legal & Compliance	• President Director, • Operations Director, • Marketing Director, • Finance & HR Director, • Corporate Secretary, • Head of Internal Audit, • SMR Manager, • SPBD Manager, • Legal & Compliance Manager

Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
22-Oct-20	1. Paparan kinerja September 2020 2. Program efisiensi Tahap 2 1. Overview of performance for September 2020 2. Efficiency program Phase 2	- Direktur Utama, - Direktur Operasi, - Direktur Pemasaran, - Direktur Keuangan & SDM, - Head of Internal Audit, - VP Finance, - VP HR & GA, - Manager SMR, - Manager SPBD. - President Director, - Operations Director, - Marketing Director, Finance & HR Director, - Head of Internal Audit, - VP Finance, - VP HR & GA, - Manager SMR, - Manager SPBD.
18-Dec-20	1. Tindak Lanjut notulen rapat BoD BoC tanggal 27 November 2020, 2. Pembahasan materi BoD BoC tanggal 21 Desember 2020 1. Follow up on the minutes of the BoD BoC meeting on November 27, 2020, 2. Discussion on the BoD BoC material on December 21, 2020	- Direktur Utama, - Direktur Operasi, - Direktur Pemasaran, - Direktur Keuangan & SDM, - Corporate Secretary, - Head of Internal Audit, - VP Fleet, - Manager SMR, - Manager Legal, - Ast. Man Strategic Planning, - Ast. Man Bussiness Development - President Director, - Operations Director, - Marketing Director, - Finance & HR Director, - Corporate Secretary, - Head of Internal Audit, - VP Fleet, - Manager SMR, - Legal Manager, - Ast. Man Strategic Planning, - Ast. Man Business Development

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi kepemimpinan PTK mengacu pada kebijakan induk Perusahaan yaitu PT Pertamina (Persero). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suksesi kepemimpinan Perusahaan berasal dari internal PTK dan eksternal PTK yaitu PT Pertamina (Persero) maupun anak Perusahaan Pertamina yang lainnya.

Dalam mekanisme suksesi Direksi, PTK mengadakan pelatihan baik internal maupun eksternal serta pengembangan kompetensi khususnya kompetensi *leadership* dan kompetensi pejabat perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk dipromosikan. Hal tersebut guna mempersiapkan bakal calon anggota Direksi yang selanjutnya akan diajukan kepada pemegang saham dalam RUPS serta mengikuti *fit and proper test*.

Board of Directors Succession Policy

The PTK leadership succession policy refers to the policy of the parent company, PT Pertamina (Persero). Based on these provisions, the succession of company leadership comes from internal PTK and external PTK namely PT Pertamina (Persero) and other Pertamina subsidiaries.

In the Board of Directors succession mechanism, PTK conducts training both internally and externally as well as developing competencies, especially leadership competencies and competencies of company officials who meet the requirements to be promoted. This is in order to prepare prospective members of the Board of Directors which will further be submitted to shareholders at the GMS as well as following the *fit and proper test*.

Penilaian Atas Kinerja Masing-Masing Komite yang Berada di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Per 31 Desember 2020, PTK tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi. Dengan demikian PTK tidak menyajikan informasi tentang penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Direksi dan dasar penilaiannya.

Assessment of the Performance of Each Committee Under the Board of Directors and the Basis of Assessment

As of December 31, 2020, the PTK has not yet established any Committee under the Board of Directors. Therefore, the PTK does not provide information about the assessment of the performance of each committee under the Board of Directors and the basis for the assessment.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Komisaris, Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual Dewan Komisaris, anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif dikarenakan keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang.

Board of Commissioners and Board of Directors Diversity

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is the desired combination of characteristics, both in terms of the organs of the Commissioners, Directors and members of the Board of Directors individually, according to the needs of the Company. This combination is determined by taking into account the expertise, knowledge and experience appropriate to the division of duties and functions of the Board of Directors in achieving the Company's goals. However, consideration on combination of characteristics referred to will have an impact on the accuracy of the nomination process and the appointment of individual members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the Board of Directors collegially.

The diverse composition of the Board of Commissioners and Directors will encourage more objective and comprehensive decision making because decisions are

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment

- PTK melakukan penilaian atas pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara periodik, baik dilakukan secara mandiri maupun oleh pihak eksternal.
- PTK assesses the Board of Commissioners and Board of Directors achievement periodically, both independently and by external parties.

Kriteria Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Kriteria/parameter dan pencapaian penilaian atas kinerja anggota Dewan Komisaris berdasarkan parameter yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan keputusan Sekretaris Menteri BUMN nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Asesmen Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris bertanggungjawabkan pencapaian kinerjanya untuk periode 2020 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Untuk menentukan kinerja Dewan Komisaris, Perseroan menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris yang tertuang dalam rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. Adapun KPI Dewan Komisaris mencakup:

Kriteria Penilaian

Berdasarkan *Board Charter* Dewan Komisaris, penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat berdasarkan kriteria umum, antara lain:

Performance Criteria for the Board of Commissioners and Directors Performance Assessment

Criteria/parameters and achievement of the assessment of the performance of the Komisaris Council members based on the parameters developed by the Ministry of BUMN in accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Governance Implementation Good company.

Assessment of the Board of Commissioners

The assessment of the performance of the Board of Commissioners is carried out by the General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Commissioners is accountable for its performance achievements for the 2020 period in the GMS which will be held in 2021.

To determine the performance of the Board of Commissioners, the Company establishes *Key Performance Indicators* (KPI) for the Board of Commissioners which are contained in the Work plan and Budget of the Board of Commissioners. The KPI for the Board of Commissioners includes:

Assessment Criteria

Based on the Board Charter of the Board of Commissioners, the performance assessment of the Board of Commissioners can be based on general criteria, including:

- Kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan pemegang saham;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris atau Komite dengan unit kerja lainnya.

Selain itu, kinerja Dewan Komisaris dapat dinilai menurut faktor lainnya baik secara individual maupun kolektif sebagai berikut:

- Integritas (misalnya benturan kepentingan yang muncul);
- Pengetahuan dan pemahaman Dewan Komisaris atas nilai-nilai misi, rencana jangka panjang Perusahaan, dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun;
- Partisipasi Dewan Komisaris dalam rapat-rapat, termasuk kemampuan mereka untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perusahaan;
- Kemampuan Dewan Komisaris dalam mengikuti isu-isu dan tren yang berpengaruh terhadap Perusahaan dan menggunakan informasi tersebut untuk menilai dan mengarahkan kinerja Perusahaan, bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang;
- Hubungan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Komisaris, dengan Direksi, dan pihak-pihak lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.

Hasil Penilaian

Perihal penilaian kinerja Dewan Komisaris Umum diatur dalam *Board Manual* Perusahaan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keberhasilan memenuhi target pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan Pemegang Saham. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris telah dapat memenuhi target pencapaian KPI kinerja selama tahun 2020.

- Attendance at Board of Commissioners internal meetings;
- Attendance at Board of Commissioners' and Board of Directors Joint Meetings;
- Attendance at the Board of Commissioners' meeting with shareholders;
- Attendance at Board of Commissioners or Committee meetings with other work units.

In addition, the performance of the Board of Commissioners can be assessed according to other factors both individually and collectively as follows:

- Integrity (eg conflicts of interest that arise);
- The Board of Commissioners' knowledge and understanding of the mission values, the company's long-term plans, and reflects this understanding on important issues throughout the year;
- Participation of the Board of Commissioners in meetings, including their ability to present, provide arguments and provide solutions on corporate strategic issues;
- The ability of the Board of Commissioners to follow issues and trends affecting the company and use this information to assess and direct the company's performance, not only from year to year, but also in the long term;
- Relationships between members of the Board of Commissioners and fellow members of the Board of Commissioners, with the Board of Directors, and other parties as stipulated in the Articles of Association and laws and regulations.

Assessment Result

Considering the Board of Commissioners performance assessment as regulated in the Company's Board Manual. Performance assessment of the Board of Commissioners is carried out based on Key Performance Indicators (KPI) target achievement set by Shareholders. Overall, the Board of Commissioners has been able to meet the KPI achievement target for 2020.

Realisasi Kinerja Dewan Komisaris

Actual Performance of the Board of Commissioners

Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Bobot Weight	Satuan Unit	KPI 2020		Bobot Pencapaian Weight Achievement
			Target	Realisasi Realization	
Internal Dewan Komisaris / Board of Commissioners Internal					
Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	5%	Frekuensi Frequency	12	11	4,58%
Pelatihan/Pembelajaran Anggota Dewan Komisaris Training/Learning for the Board of Commissioners Members			2	3	5,00%
Kunjungan anggota Dewan Komisaris ke lapangan Official Visit by the Board of Commissioners members	5%		3	1	1,67%
Dewan Komisaris Dengan Direksi/ Board of Commissioners and Board of Directors					
Rancangan RKAP RKAP Draft	10%	Hari Days	25	14	10,00%
Rancangan RJPP RJPP Draft	10%		50	NA	10,00%
Keputusan Atas Permintaan Dari Direksi Decisions on Requests submitted by the Board of Directors	20%		18	12	20,00%
Tanggapan Atas Permintaan Dari Direksi Responses to requests from the Board of Directors	20%		18	12	20,00%
Dewan Komisaris Dengan RUPS/ Board of Commissioners With the GMS					
Kehadiran Dewan Komisaris Dalam RUPS/LB Attendance of the Board of Commissioners at the AGMS/EGMS	10%	Frekuensi Frequency	1	1	10,00%
Pembuatan Laporan Tahunan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of the Annual Board of Supervisory Duty Implementation Report	10%		1	1	10,00%
Pengusulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kepada RUPS Proposing the Appointment of a Public Accounting Firm to the GMS	5%		1	sesuai PTM	5,00%
Jumlah/ Total	100%				96,25%

Aspek Kinerja Komisaris Berdasarkan GCG

Berdasarkan Assessment GCG yang dilakukan pada aspek Dewan Komisaris Skor yang dicapai adalah 26,65 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan *Presentase* pencapaian sebesar 76,15% yang berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik, berikut penjelasan hasil *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris :

Board of Commissioners Performance Aspects based on GCG

Based on the GCG Assessment carried out on the Board of Commissioners aspect, the score achieved was 26.65 out of a weight of 35,000 or equivalent to a percentage of achievement of 76.15% which means that in general the implementation of GCG for the Board of Commissioners aspect has gone well, along with an explanation of the results of the assessment. for the performance of the Board of Commissioners:

Aspek Kinerja Komisaris Berdasarkan GCG

Company's Performance Aspects based on GCG

No	Apek Pengujian/Indikator/Parameter Apek Tests/Indicators/Parameters	Jumlah Parameter Number Of Parameters	Bobot Weight	Capaian tahun 2020 2020 Achievements	
				Skor Score	%
1	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan. <i>Board of Commissioners/Supervisory Board carry out training/learning programs on an ongoing basis.</i>	2	1,348	1,236	91,67
2	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. <i>Board of Commissioners/Supervisory Board divides the duties, authorities and responsibilities clearly and determines the factors needed to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board.</i>	4	2,127	1,661	78,09
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. <i>Board of Commissioners/Supervisory Board approves the RJPP and RKAP plans submitted by the Board of Directors.</i>	2	2,904	2,323	80,00
4	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencanadan kebijakan Perusahaan. <i>Board of Commissioners/Supervisory Board provides direction to the Board of Directors on the Company's plans and policies implementation.</i>	9	9,593	6,897	71,89
5	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan. <i>Board of Commissioners/Supervisory Board supervises the Board of Directors on the Company's plans and policies implementation.</i>	6	6,479	5,898	91,03

Aspek Kinerja Komisaris Berdasarkan GCG

Company's Performance Aspects based on GCG

No	Apek Pengujian/Indikator/Parameter Apek Tests/Indicators/Parameters	Jumlah Parameter Number Of Parameters	Bobot Weight	Capaian tahun 2020 2020 Achievements	
				Skor Score	%
6	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak Perusahaan/ Perusahaan patungan. Board of Commissioners/Supervisory Board supervises the policies for managing the subsidiary/joint venture company.	2	1,504	1,504	100,00
7	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. The Board of Commissioners/Supervisory Board plays a role in nominating members of the Board of Directors, assessing the Board of Directors (individual and collegial) performance and proposing performance bonuses/incentives in accordance with prevailing regulations and considering the Board of Directors performance.	3	2,437	1,657	67,97
8	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. Board of Commissioners/Supervisory Board takes action against any related conflicts of interest potential.	1	0,571	0,571	100,00
9	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan keberlanjutan. Board of Commissioners/Supervisory Board monitors and ensures that good corporate governance practices are implemented effective and sustainable manner.	2	1,659	1,121	67,58
10	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/ Dewan. Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Board of Commissioners/Supervisory Board organizes the Board of Commissioners/Board meetings.	3	1,348	1,348	100
11	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Board of Commissioners/Sueprvisory Board has appointed Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board to support Secretarial duty of the Board of Commissioners/Supervisory Board.	4	2,593	2,593	100
12	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif. Board of Commissioners/Supervisory Board has established effective Committive Committees under the Board of Commissioners/Supervisory Board.	5	2,437	2,042	84
Total		43	35,000	28,850	82,43

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Dewan Komisaris mengacu pada Indikator KPI Direksi. Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya selama periode tahun 2020 didalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Perusahaan menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan Tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2019.
3. Penilaian tingkat kesehatan Perseroan yang mencakup 3 Aspek utama yaitu:
 - a. Aspek Keuangan
 - b. Aspek Operasional
 - c. Aspek Administrasi
4. Indikator Kinerja Pendukung Lainnya

Berdasarkan *Assessment* GCG yang dilakukan pada aspek Direksi, skor yang dicapai adalah 31,587 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan *Presentase* pencapaian sebesar 90,25% yang berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk aspek Direksi telah berjalan dengan baik, berikut penjelasan hasil *assessment* atas kinerja Direksi :

Board of Directors Performance Assessment

Assessment on Board of Directors performance is carried out by the Board of Commissioners and the GMS. The Board of Commissioners refers to the Board of Directors KPI Indicators. The Board of Directors is accountable for its performance during the 2020 period in the GMS which will be held in 2021.

In assessing the performance of the Board of Directors, the Company sets the Board of Directors Key Performance Indicator (KPI) which consists of:

1. Implementation of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association of the Company.
2. Implementation of the resolutions of the 2019 Annual GMS
3. Assessment of the Company's health level which includes 3 main aspects, namely:
 - a. Financial aspect
 - b. Operational Aspects
 - c. Administrative Aspects
4. Other Supporting Performance Indicators

Based on the GCG Assessment carried out on Board of Directors aspect, the achieved score was 31.587 of weight of 35,000 or equivalent to the percentage of achievement of 90.25% which means that in general the implementation of GCG for the aspects of the Board of Directors has gone well, along with an explanation of the results of the assessment on the performance of the Board of Directors :

Aspek Kinerja Direksi Berdasarkan GCG

Board of Directors Performance Aspects based on GCG

No	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Assessment Aspects/Indicators/Parameters	Jumlah Parameter Number of Parameters	Bobot Weight	Capaian tahun 2020 2020 Achievements	
				Skor Score	%
1	Direksi melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan. Board of Directors performs carry out training/learning programs on an ongoing basis	2	1,089	0,985	90,48
2	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas Board of Directors divides the duties/functions, authorities and responsibilities clearly	3	1,867	1,672	89,58
3	Direksi menyusun perencanaan Perusahaan Board of Directors prepares corporate planning	5	4,044	3,476	85,96
4	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan Board of Directors contribute in achieving the Company's performance targets	11	8,089	7,279	89,98
5	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencanadan kebijakan Perusahaan. Board of Directors exercises operational and financial controls on the implementation of company plans and policies	4	3,266	2,955	90,47
6	Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Board of Directors runs management of the company in accordance with the prevailing laws and regulations and the articles of association	2	0,778	0,778	100
7	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan Stakeholders Board of Directors engages in value-added relationships for the Company and Stakeholders	8	6,689	6,196	92,64
8	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen dibawah Direksi Board of Directors monitors and manages conflicts of interest potential among the Board of Directors members and management under the Board of Directors	2	1,089	1,089	100
9	Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pemegang saham tepat waktu Board of Directors ensures that the company carries out disclosure of information and communication in accordance with prevailing laws and regulations and submits information to the Board of Commissioners/Supervisory Board and shareholders on time	2	1,089	1,027	94,29

Aspek Kinerja Direksi Berdasarkan GCG

Board of Directors Performance Aspects based on GCG

No	Apek Pengujian/Indikator/Parameter Assessment Aspects/Indicators/Parameters	Jumlah Parameter Number of Parameters	Bobot Weight	Capaian tahun 2020 2020 Achievements	
				Skor Score	%
10	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Board of Directors holds the Board of Directors meeting and attends the Board of Commissioners/Supervisory Board meeting in accordance with the provisions of the law	5	1,556	1,517	97,49
11	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif Board of Directors is required to perform quality and effective internal supervision	3	1,711	1,482	86,6
12	Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif Board of Directors performs quality and effective Corporate Secretary	3	1,711	1,672	97,73
13	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Board of Directors held Annual GMS and other GMS in accordance with laws and regulations	2	2,022	1,458	72,11
Total		52	35,000	31,587	90,25

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

- Dalam menetapkan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi, Perusahaan menjadikan indikator pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan kontrak manajemen sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, kemampuan keuangan Perusahaan juga dijadikan pertimbangan, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan.

In stipulating the Board of Commissioners and the Board of Directors remuneration, the Company applies the Key Performance Indicator (KPI) achievement indicators and the soundness level according to the management contract as the consideration. Moreover, the Company's financial capacity is considered, as well as other relevant factors.

Kebijakan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pencapaian kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi. Pertimbangan lain adalah ketentuan yang berlaku baik di internal PT Pertamina (Persero) maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- Undang-Undang PT Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 113;
- Peraturan Menteri No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/2014 Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Anggaran Dasar Perusahaan;
- Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 28 Juni 2018 perihal Penetapan Penghargaan Atas Kinerja Tahunan (Tantiem) Direksi dan Dewan Komisaris.

The remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors refers to the achievement of the performance of the Board of Commissioners and Directors. Another consideration is the provisions that apply both internally at PT Pertamina (Persero) and the laws and regulations in Indonesia

- PT Law Republic of Indonesia No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 113;
- Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/06/2016 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-04/MBU/2014 Determination of the Income of Directors, Board of Commissioners, and Board of Trustees of State-Owned Enterprises;
- Articles of association;
- Decision of the Circular General Meeting of Shareholders on 28 June 2018 concerning the Determination of Awards for the Annual Performance (Incentives) of the Directors and Board of Commissioners.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS secara sirkuler dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan dan pemegang saham. Mekanisme

The Board of Commissioners and the Board of Directors Remuneration Procedure

Amount of the Board of Commissioners and the Board of Directors amount is determined by a circular GMS with due observance of the results of studies conducted by the Company and shareholders.

penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PTK tergambar dalam skema sebagai berikut:

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan indikator Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PTK mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Direksi untuk Penetapan Remunerasi

Dalam menetapkan penghasilan Direksi PTK, Perusahaan menjadikan indikator pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan kontrak manajemen sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, kemampuan keuangan Perusahaan juga dijadikan pertimbangan, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan.

Mekanisme Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PTK

1. Manajemen mengajukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan industri, pencapaian kinerja Perusahaan yang signifikan, tantangan dan/ atau penugasan-penugasan spesifik yang diberikan. Pengajuan tersebut diberikan kepada pemegang saham

PTK's Board of Commissioners and Board of Directors remuneration mechanism is illustrated in the following:

Indicators of Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Stipulation

In determining the Remuneration indicator for the Board of Commissioners and Board of Directors in PTK, it refers to the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 Determination of the remuneration of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises; as follows:

1. Business scale factor
2. Business complexity factors
3. Inflation rate
4. The Company's financial condition and capability
5. Other factors that are relevant, and should not conflict with statutory regulations.

Board of Directors Performance Indicators for Remuneration Stipulation

In determining the salary for the Directors of PTK, the Company takes the Key Performance Indicator (KPI) achievement indicators and the company health level according to the management contract as a consideration. Apart from that, the company's financial capacity is also considered, as well as other relevant factors.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Mechanism

1. The management proposes remuneration for the Board of Commissioners and Directors by considering the complexity of the business and industry, the achievement of significant corporate performance, challenges and/or specific assignments given. The submission was given to shareholders through PT Pertamina

melalui *Vice President Subsidiary Joint Venture* (SJV) PT Pertamina (Persero).

2. VP SJV PT Pertamina (Persero) melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kepada *Human Resource* (HR) PT Pertamina (Persero) untuk menentukan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. (HR) PT Pertamina (Persero) melakukan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada Direksi PT Pertamina (Persero) dalam bentuk risalah rapat Direksi secara sirkuler.
4. Setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Pertamina (Persero), HR PT Pertamina Persero menyampaikan kepada SJV Pertamina (Persero) untuk menyelenggarakan RUPS secara sirkuler guna menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTK.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan besaran remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, mengingat PTK adalah Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang merupakan BUMN. Dalam penetapan tersebut, remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi antara lain gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Struktur dan komponen remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

(Persero) *Vice President Subsidiary Joint Venture* (SJV).

2. VPSJV PT Pertamina (Persero) conducted a study and prepared recommendations to PT Pertamina (Persero) Human Resources (HR) to determine the amount of remuneration for the members of the Board of Commissioners and Directors.
3. (HR) PT Pertamina (Persero) conducts studies and prepares recommendations to the Directors of PT Pertamina (Persero) in the form of minutes of the Board of Directors' circular meeting.
4. After obtaining approval from the Directors of PT Pertamina (Persero), HR PT Pertamina Persero conveyed to SJV Pertamina (Persero) to hold a RUPS in a circular manner to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors of PTK.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

Determination of remuneration amount refers to Minister of SOEs Regulation Number: PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, since PTK is a subsidiary of PT Pertamina (Persero) which is a SOE. In the stipulation process, the remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors includes salaries or honorariums, allowances and facilities that are fixed, considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, conditions and financial capabilities of the Company, and other factors which is relevant.

The structure and components of the remuneration received by the Board of Commissioners and Directors in 2020 are as follows :

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure 2020

No	Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration		Remunerasi Direksi Board of Directors's Remuneration	
1	Honorarium	Honorarium	Gaji	Salary
2	TUNJANGAN - Tunjangan Transportasi - Tunjangan Hari Raya Keagamaan - Asuransi Purna Jabatan	ALLOWANCE - Transportation Allowance - Religious Holiday Allowance - Post-Service Allowance	TUNJANGAN - Tunjangan Transportasi - Tunjangan Hari Raya Keagamaan - Asuransi Purna Jabatan	ALLOWANCE - Transportation Allowance - Religious Holiday Allowance - Post-Service Allowance
3	FASILITAS - Fasilitas Kesehatan - Fasilitas Bantuan Hukum	FACILITIES - Health Facilities - Legal Assistance Facilities	FASILITAS - Fasilitas Kendaraan Ringan - Fasilitas Kesehatan - Fasilitas Bantuan Hukum - Fasilitas komunikasi dan sarana teknologi informasi	FACILITIES - Light Vehicle Facilities - Health Facilities - Legal Assistance Facilities - Communication and information technology facilities and infrastructure
4	Tantiem	Incentive	Tantiem	Incentive

Struktur dan komponen remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The structure and components of the remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020 are as follows:

Tabel Penghitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Calculation for the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Struktur Remunerasi Structure of Remuneration	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors
1	Gaji/ Honorarium Salary/ Honorarium	Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama Honorarium for the President Director amounted to 45% of President Director's Honorarium Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama. Honorarium for Commissioner amounted to 90% of President Commissioner's	Gaji Direktur Utama Rp106.485.000,- Salary for President Director amounted to Rp106.485.000 Gaji Direktur sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama. Salary for Director amounted to 85% of President Director's Salary
2	Tunjangan Allowance	Tunjangan Transportasi Dewan Komisaris sebesar 20% Honorarium Komisaris Utama/Komisaris Transportation Allowance for the Board of Commissioners amounted to 20% of President Commissioner/Commissioner's Honorarium	- Tunjangan Perumahan (termasuk didalamnya Tunjangan Utilities) - Direktur Utama: Rp27.500.000. - Direksi: 85% dari Tunjangan Perumahan Direktur Utama - Housing Allowance (in which includes Utilities Allowance) - President Director: Rp27,500,000. - Board of Directors: 85% of Housing Facilities of President Director

Tabel Penghitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Calculation for the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Struktur Remunerasi Structure of Remuneration	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors
		Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali Honorarium. 1 (one) time Honorarium allowance Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat dengan premi yang ditanggung oleh Perseroan paling banyak (maksimum) 25% dari Honorarium dalam satu tahun. Post-Service Insurance is provided during the term of office with a premium that is borne by the Company at most (maximum) 25% of the Honorarium in one year.	Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali Gaji (terdapat pengalihan THRK menjadi CSR). Religious Holiday Allowance equivalent to 1 (one) time Salary (there was a THRK transfer to CSR) Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat dengan premi yang ditanggung oleh Perseroan paling banyak (maksimum) 25% dari Gaji dalam satu tahun. Post-Service Insurance is provided throughout the term of office with premium borne by the Company at 25% maximum of one-year Salary
3	Fasilitas Kesehatan Health Facilities	-	Fasilitas kesehatan Direksi dan keluarga dengan biaya pengobatan sesuai kemampuan Perusahaan. Health facilities provided for the Board of Directors and the family with medical treatment adjusted to the Company's capability
4	Fasilitas Kendaraan. Vehicle Facilities	-	- Direktur Utama : 1 (satu) unit kendaraan Sedan Kap 2400 cc, A/T Gasoline - Direktur : kendaraan SUV Kap. 2500 cc A/T Diesel, Kap 2700 cc A/T Gasoline atau Sedan Kap. 2000 cc A/T Gasoline - President Director: 1 (one) Sedan, 2400 cc Capacity, A/T Gasoline - Director: SUV with the Capacity of 2500 cc A/T Diesel, Capacity of 2700 cc A/T Gasoline or Sedan with Capacity of 2000 cc A/T Gasoline
5	Fasilitas komunikasi dan sarana teknologi informasi. Communication an Information technology facilities and infrastructure	Fasilitas komunikasi yang terdiri dari Data dan Voice dibayarkan oleh Perusahaan dengan batasan maksimum: - Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama; - Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama Diberikan alat komunikasi/alat kerja satu kali selama masa jabatan berupa: - Notebook + Modem (dan simcard data) - Tablet PC - Handphone Communication facilities, consisting of Data and Voice are paid by the Company with maximum limit as follows: - President Commissioner received 45% of President Director - Commissioner received 90% of President Commissioner	Fasilitas komunikasi yang terdiri dari Data dan Voice dibayarkan oleh Perusahaan dengan batasan maksimum: - Direktur Utama Rp2.000.000; - Direktur sebesar 90% dari Direktur Utama. Diberikan alat komunikasi/alat kerja satu kali selama masa jabatan berupa: - Notebook + Modem (dan simcard data) - Tablet PC - Handphone Communication facilities, consisting of Data and Voice are paid by the Company with maximum limit as follows: - President Director received Rp2,000,000 - Director received 90% of President Director

Tabel Penghitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Calculation for the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Struktur Remunerasi Structure of Remuneration	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors
		Communication/work instruments were provided one time throughout the term of office in the form of: • Notebook + Modem (including simcard data) • Tablet PC • Handphone	Communication/work instruments were provided one time throughout the term of office in the form of: • Notebook + Modem (including simcard data) • PC Tablet • Handphone
6	Tantiem Incentive	Komisaris Utama 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama. President Commissioner received 45% (forty-five percent) of President Director.	Direktur Utama Rp1.577.000.000 President Director Rp1.577.000.000
		Anggota Dewan Komisaris 90% dari Komisaris Utama. Members of the Board of Commissioners received 90% of President Director	Anggota Direksi 85% dari Direktur Utama. Members of the Board of Directors received 85% of President Director

Rincian remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The remuneration details received by the Board of Commissioners and Directors in 2020 are as follows:

Rincian Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

The Remuneration Details The Board of Commissioners and Directors

Jabatan Position	Take Home Pay (Rp/Net) Take Home Pay (Rp/Net)	Tunjangan Lain (Rp/Net) Other Benefit (Rp/Net)
Direksi Board of Directors	5.707.761.000	466.821.750
Dewan Komisaris Board of Commissioner	2.553.084.360	602.811.585

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diperoleh Dewan Komisaris dan Direksi*

Details of Total Remuneration Received by the Board of Commissioners and Board of Directors*

Uraian Description	2020	2019	2018
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners			
dias 2 miliar Rupiah above Rp2 billion	-	-	-
dias 1 miliar s.d 2 miliar Rupiah Rp1 billion to Rp2 billion	-	-	-
dias 500 juta s.d 1 miliar Rupiah above Rp500 million to Rp1 billion	4	4	4
dibawah 500 juta Rupiah Rp500 million and less	-	-	-

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diperoleh Dewan Komisaris dan Direksi***Details of Total Remuneration Received by the Board of Commissioners and Board of Directors***

Uraian Description		2020	2019	2018
Direksi/ Board of Directors				
diatas 2 miliar Rupiah	above Rp2 billion	4	4	4
diatas 1 miliar s.d 2 miliar Rupiah	above Rp1 billion to Rp2 billion	-	-	-
diatas 500 juta s.d 1 miliar Rupiah	above Rp500 million to Rp 1 billion	-	-	-
dibawah 500 juta Rupiah	Rp500 million and less			

*tidak termasuk tantiem | *excluded incentive

Tantiem

Ketentuan mengenai pemberian tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, mengacu pada Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan (Tantiem) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 serta Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020.

Pembayaran tantiem bagi anggota Dewan Komisaris PTK yang berasal dari Direksi dan Pekerja PT Pertamina (Persero) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Direksi PT Pertamina (Persero) tidak berhak menerima pembayaran Tantiem. Tantiem yang menjadi haknya akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai jasa manajemen;
- Pekerja PT Pertamina (Persero) berhak menerima Tantiem setelah dikurangi bonus yang diterima yang bersangkutan dari PT Pertamina (Persero) dengan formula perhitungan yaitu: besaran tantiem net - besaran bonus net;
- Dalam hal Pekerja PTK menerima Tantiem lebih kecil dari bonus yang diterima dari PT Pertamina (Persero), maka yang bersangkutan tidak berhak menerima Tantiem;

Incentive

The provisions regarding tantiem for the Board of Commissioners and Directors of the Company refer to the Resolution of the Circular GMS dated 19 August 2019 concerning the Determination of Awards for the Annual Performance (Tantiem) of the Company's Directors and Board of Commissioners for the 2019 Financial Year and Remuneration for the Company's Directors and Board of Commissioners for the 2020 Financial Year.

Tantiem payments for members of the PTK Board of Commissioners who come from the Board of Directors and Employees of PT Pertamina (Persero) are subject to the following conditions:

- The Board of Directors of PT Pertamina (Persero) has no rights over incentive. The incentive for which they are entitled for to be paid by the Company to PT Pertamina (Persero) as management service.
- Employees of PT Pertamina (Persero) are entitled for Incentive after being deducted with the bonus received by the concerned member from PT Pertamina (Persero) based on the following calculation formula: amount of net incentive - amount of net bonus;
- In the event Employees of PTK receive smaller Incentive than the bonus received from PT Pertamina (Persero), the concerned member has no rights over the Incentive;

d. Bagian Tantiem dari Komisaris yang merupakan pekerja PT Pertamina (Persero) yang tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan berdasarkan ketentuan poin b dan di atas akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai penghasilan lain-lain.

d. The Incentive portion from the Board of Commissioners, who are employees of PT Pertamina, which is not paid to the concerned member based on the provision point b and c above will be paid by the Company to PT Pertamina (Persero) as other income.

Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan (Tantiem) Tahun 2020

Determination for Reward for Performance (Incentive) of 2020

Uraian Description	Dewan Komisaris Dewan Komisaris	Direksi Direksi
Tantiem Incentive	Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama Rp709.650.000 President Commissioner received 45% of President Director, amounting to Rp709.650.000	Direktur Utama Rp1.577.000.000 President Director received Rp1.577.000.000
	Komisaris 90% dari Komisaris Utama Rp638.685.000 Commissioner received 90% of President Director, amounting to Rp638.685.000	Anggota Direksi 85% dari Direktur Utama Rp1.340.450.000 Members of the Board of Directors received 90% of President Director, amounting to Rp1.340.450.000

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to Board of Commissioners

Dewan Komisaris PTK membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang bertugas membantu dan mendukung kelancaran kegiatan dan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam melakukan pengelolaan Perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Sekretaris Dewan Komisaris berperan membantu Dewan Komisaris dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi serta mengkoordinasikan penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris



Hendry

Sekretaris Dewan Komisaris
Periode 1 Januari 2020 – 8 Oktober 2020
Secretary to Board of Commissioners'
Period 1 January 2020 - 8 October 2020

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1979. Saat ini berusia 41 tahun. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan SK-053/DEKOM.PTK/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

Board of Commissioners in PTK has established Secretariat of the Board of Commissioners which is in charge to assist and support smooth running of the activities and duties of the Board of Commissioners in supervising and providing advice to the Board of Directors in managing the company. This is in accordance with the Minister of SOEs Regulation No.PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Role of Secretary to Board of Commissioners is to assist the Board of Commissioners in carrying out administrative activities and coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of the Secretary of the Board of Commissioners is carried out by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners.

Profile of Secretary to Board of Commissioners'

Indonesian Citizen, lives in Jakarta. Born in Jakarta on October 26, 1979. He is currently 41 years old. He is serving as Secretary to Board of Commissioners according to SK-053/DEKOM.PTK/2018 dated October 12, 2018.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2004 dan gelar Magister Manajemen Risiko dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Sr. Expert I Project Management Office Downstream* PT Pertamina (Persero) sejak Oktober 2020 sampai saat ini.

He earned Bachelor's degree of Management Economics from Universitas Indonesia in 2004 and Master's degree of Risk Management from Universitas Indonesia in 2007. He is currently also serving as *Sr. Expert I Project Management Office Downstream* PT Pertamina (Persero) since October 2020 until now.



Aldo Maudy Gantirta

Sekretaris Dewan Komisaris
Periode 9 Oktober 2020 – Saat Ini
Board of Commissioners Secretary
9 October 2020 – current period

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1985. Saat ini berusia 35 tahun. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan SK-016/DEKOM. PTK/2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Indonesian citizen, lives in Jakarta. Born in Jakarta on May 25, 1985. Currently 35 years old. He is appointed as Secretary to the Board of Commissioners based on SK-016/DEKOM. PTK/2020 dated October 9, 2020.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Atma Jaya pada tahun 2006. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Advisor I Upstream, Gas, dan NRE *Government Assignment* PT Pertamina (Persero) sejak Oktober 2020 sampai saat ini.

He earned Bachelor's degree in Electrical Engineering from Atma Jaya University in 2006. Currently he is also serving as Advisor I Upstream, Gas, and NRE *Government Assignment* of PT Pertamina (Persero) since October 2020 until now

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;

Duties and Responsibilities of the Secretary to Board of Commissioners

The Duties and Responsibilities of the Secretary to Board of Commissioners are as follows:

1. The Secretary of the Board of Commissioners conducts activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties in the form of:
 - Preparing meetings including materials for the Board of Commissioners' briefing sheet;

- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
 - Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
 - Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
 - Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
 - Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
 - Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
 - Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
 4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2020

Selama tahun 2020 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui pemberian informasi, *review*, kajian, dan laporan kepada Dewan Komisaris agar fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan efektif, yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Prepare minutes of meetings of the BoC in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
 - Administer the Board of Commissioners' documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
 - Arranging the Board of Commissioners' Work Plan and Budget
 - Drafting the Reports of the Board of Commissioners;
 - Carry out other duties of the Board of Commissioners.
2. In addition to carrying out the duties referred to above, the Secretary of the Board of Commissioners as the leader of the Secretariat, carries out other tasks in the form of:
 - Ensuring that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and applies GCG principles;
 - Provide information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested;
 3. Coordinate Committee members, if needed in order to expedite the duties of the Board of Commissioners;
 4. As liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Implementation of the Duties of the Secretary of the Board of Commissioners in 2020

In 2020, Secretary to the Board of Commissioners has carried out his functions and duties to assist and support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in carrying out supervision of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors through providing information, reviews, studies and reports to the Board of Commissioners so that the supervisory function of the Board of Commissioners runs effectively, which generally includes the following:

1. Membantu menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020 dan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris 2019.
 2. Memantau, *mereview* dan menginformasikan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk pembuatan, pembaharuan/penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris serta piagam komite-komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut.
 4. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain: Melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran tugas komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan administrasi dokumen/surat menyurat Komisaris termasuk mempersiapkan surat-surat persetujuan serta masukan/saran Dewan komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi.
1. Assist in compiling the 2020 Board of Commissioners Work Plan and the 2019 Board of Commissioners Work Plan Realization.
 2. Monitor, review and inform developments of the latest laws and regulations to be submitted to the Board of Commissioners, including the preparation, renewal/adjustment of the Decree of the Board of Commissioners and the charters of the committees under the Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.
 3. Coordinating and holding Board of Commissioners meetings including preparing meeting schedules, meeting materials, compiling and administering the minutes of the Board of Commissioners 'meetings, submitting suggestions and opinions of the Board of Commissioners based on the results of the Board of Commissioners meeting to the Board of Directors and monitoring the follow-up of the Board of Commissioners' suggestions and opinions.
 4. Assisting and supporting the implementation of the duties of the Committees under the Board of Commissioners as part of the duties of the Board of Commissioners based on applicable regulations, including: Carrying out administrative duties related to the smoothness of the Commissioners 'duties, namely managing, storing and administering the Commissioners' documents/correspondence, including preparing approval letters as well as strategic input/suggestions from the Board of Commissioners to be submitted to the Board of Directors.

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan, terutama dalam masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tata kelola perseroan yang baik (GCG), kebijakan akuntansi perseroan, pengawasan internal, pemeriksaan oleh akuntan publik serta sistem pelaporan keuangan dan informasi lainnya.

Komite audit dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan tugas komite audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris harus memenuhi asas profesionalisme, objektivitas dan independen.

Komite audit dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite audit dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris selaku ketua merangkap anggota komite audit. Ketua komite audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite audit jika salah seorang dari anggota komite audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) anggota ahli yang bukan pekerja PTK serta diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.

Audit Committee was established to assist the Board of Commissioners in carrying out the supervisory function of the company's management, especially in matters related to Good Corporate Governance (GCG) implementation, corporate accounting policies, internal supervision, audits by public accountants and financial reporting systems and other information.

In carrying out its duties, the Audit Committee is under and reports to the Board of Commissioners. The Audit Committee duty implementation report submitted to the Board of Commissioners shall comply with professionalism, objectivity and independency principles. The audit committee is formed by the decision of the Board of Commissioners.

Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The audit committee is chaired by one of the members of the Board of Commissioners as chairman and concurrently a member of the Audit Committee. The Audit Committee Chairman has the right to propose a replacement for the members of the audit committee if one of the members of the audit committee ends his term of office, resigns or is dismissed.

Audit Committee Membership

The Audit Committee membership consists of at least 1 (one) Commissioner and 2 (two) expert members who are not PTK workers and are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Chairman of the Audit Committee is a Member of the Board of Commissioners who is an Independent Commissioner or Member of the Board of Commissioners who can act independently.

Penentuan anggota Komite Audit mengacu pada ketentuan Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan sebagai anggota Komite Audit, yaitu:

- Memiliki integritas yang baik, pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/ pemeriksaan;
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup.

Anggota Komite Audit terpilih yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan paling lama adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan sewaktu-waktu meskipun jabatannya belum berakhir, dengan syarat antara lain:

- Mengundurkan diri;
- Kehilangan kewarganegaraan;
- Meninggal dunia;
- Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan;
- Melanggar atau tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit;
- Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.

The appointment of members of the Audit Committee refers to the provisions of Per-12/MBU/2012 dated August 24, 2012. These provisions stipulate the requirements for membership of the Audit Committee, namely:

- Having good integrity, insights as well as sufficient work experience in the field of supervision/ inspection;
- Not having personal interest/involvement that may cause negative impacts and conflict of interest toward the Company;
- Having adequate insights to study and comprehend financial statements;
- Capable to communicate effectively and provide sufficient time.

The elected members of the Audit Committee who are not Members of the Board of Commissioners have a maximum term of office of three years and can be extended once for two years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Dismissal of members of the Audit Committee can be done at any time even though his position has not ended, with the following conditions:

- Resigns;
- Lost of the citizenship;
- Passed-away;
- Performs any actions that cause loss to the Company;
- Violates or unable to fulfil the requirements as a member of the Audit Committee, as regulated in the Audit Committee Charter;
- Is unable to perform its duties and responsibilities based on the statement given by the Board of Commissioner.

Komposisi Anggota Komite Audit

Pada tahun 2020, keanggotaan Komite Audit PTK sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari pihak profesional

Composition of Audit Committee Members

In 2020, the membership of the Audit Committee in PTK consists of 3 (three) members including 1 (one) chairman who also an Independent Commissioner and 2 (two) members from independent professionals.

yang independen. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada POJK 55 dan sesuai dengan ketentuan Piagam Komite Audit. Komposisi keanggotaan Komite Audit, PTK periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

This is in accordance with the applicable laws and regulations, including but not limited to POJK 55 and in accordance with the provisions of the Audit Committee Charter. The composition of the membership of the Audit Committee in PTK for the 2020 period is as follows:

Komposisi Keanggotaan Komite Audit PTK Periode Tahun 2020

Composition of PTK Audit Committee Members in 2020

01 Januari 2020 – 31 Juli 2020 January 1, 2020 – July 31, 2020	01 Agustus 2020 – 05 November 2020 August 1, 2020 – November 5, 2020	06 November 2020 – 31 Desember 2020 November 6, 2020 – December 31, 2020	Keterangan Dasar Penangkatan Basic Information of Appointment
Achmad Fachruddin Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	Achmad Fachruddin Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	Achmad Fachruddin Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	015/DEKOM.PTK/2018 tanggal 08 Maret 2018 015/DEKOM.PTK/2018 dated March 8, 2018
Budiarto Anggota/ Member	Budiarto Anggota/ Member	Budiarto Anggota/ Member	SK-009/DEKOM.PTK/ 2020 tanggal 11 Mei 2020
Budi Prahoro Anggota/ Member	-	-	SK-044/DEKOM PTK/ 2019 tanggal 31 Juli 2019
-	-	Edward Sitomorang Anggota/ Member	SK-028/DEKOM. PTK/2020 tanggal 02 November 2020

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile



Warga Negara Indonesia berdomisili di Bogor. Lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1975. Saat ini berusia 45 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana pada tahun 2002. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai komisaris PT Washtex Indonesia periode 2009

Indonesian citizen domiciled in Bogor. Born in Jakarta on May 10, 1975. He earned his Bachelor's degree in 2002. In his career, he was appointed as Commissioner of PT Washtex Indonesia in the period 2009 - 2017, as an analyst at PT Media Track in the

- 2017, sebagai analis PT Media Track periode 2010 - 2015, serta Direktur PT Media Fakta Nusantara periode 2014 - 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PTK sejak 2018 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PTK tanggal 31 Januari 2018.

period 2010 - 2015, and Director of PT Media Fakta Nusantara in the 2014-2017 period. Currently he is appointed as a PTK Commissioner since 2018 according to Circular PTK Shareholder resolutions as of January 31, 2018.



Budiarto

Anggota Komite Audit
Audit Committee Chairman

Warga negara Indonesia berdomisili di Bekasi. Lahir di Medan pada tanggal 04 Maret 1951. Saat ini berusia 69 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana pada tahun 1980. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Manager Internal Audit PT Pertamina (Persero) Daerah III Jawa Barat & DKI periode 2005 - 2006 dan telah memasuki masa pensiun.

Indonesian citizen domiciled in Bekasi. Born in Medan on March 4, 1951. He earned his Bachelor's degree in 1980. In his career, he was appointed as Manager of Internal Audit of PT Pertamina (Persero) Region III of West Java & DKI for the period 2005 - 2006 and has entered his retirement.



Edward Situmorang

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Bandung pada tanggal 12 April 1979. Saat ini berusia 41 tahun. Beliau meraih gelar S1 pada tahun 2001. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai West Area 1 Audit Asst. Man. di PHE ONWJ periode 2018. Saat ini beliau menjabat sebagai Manager Group Finance & ICoFR IA.

Indonesian citizen, lives in Jakarta. Born in Bandung on April 12, 1979. Currently 41 years old. He earned bachelor's degree in 2001. In his career, he was assigned as West Area 1 Audit Asst. Man for the period 2018. Currently he has served as Manager Group Finance & ICoFR IA.

Independensi Anggota Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit bersifat independen. Adapun seluruh anggota tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen Perseroan termasuk menjabat salah satu jabatan dalam struktur organisasi Perseroan maupun Anak Perusahaan.

Independency of Audit Committee Members

Audit Committee membership is independent. All members are not affiliated with the Company's management, including serving at any position in the organizational structure of the Company and its subsidiaries.

Kriteria Independensi Komite Audit

Independency Criteria Audit Committee

Kriteria Independensi Independency Criteria		Achmad Fachruddin	Budiarto	Edward Situmorang
Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya	Upholding integrity, professionalism and professional standards in carrying out their duties and responsibilities	✓	✓	✓
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.	Maintain the confidentiality of company documents, data and information obtained, both from internal and external parties.	✓	✓	✓
Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan, serta jabatannya untuk kepentingan Pribadi diluar ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku	Not using important assets and information relating to the Company, as well as their position for personal interests outside the provisions of the Laws and Regulations and applicable Company policies	✓	✓	✓
Tidak mengambil keuntungan Pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.	Do not take personal gain either directly or indirectly from the Company's activities other than legal income.	✓	✓	✓
Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta kebijakan-kebijakan Perseroan	Comply with applicable laws and regulations, Articles of Association, Code of Conduct, Guidelines for Corporate Governance and Company policies	✓	✓	✓

Piagam Komite

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan serta pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit PTK ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 013/DEKOM.PTK/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Piagam Komite Audit tersebut mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Tugas

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait fungsi pengawasan, meliputi:

1. Menjaga kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, Undang-Undang, dan ketentuan hukum serta kebijakan Perusahaan yang berlaku;
2. Menegakkan disiplin organisasi dan pengendalian internal untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dan penyimpangan (*abuse*);
3. Meningkatkan kualitas pengungkapan hal-hal yang bersifat pelaporan keuangan, sistem akuntansi dan kebijakan manajemen risiko;
4. Mempelajari ruang lingkup, keakuratan, kemandirian dan objektivitas Auditor Eksternal dan Audit Internal serta efektivitas biaya Audit Eksternal;
5. Komite Audit menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;

Committee Charter

The Audit Committee has an Audit Committee Charter as a work guideline in carrying out its duties and responsibilities in supervising and providing advice to the Board of Commissioners. PTK Audit Committee Charter was established based on the Decree of the Board of Commissioners No. 013/DEKOM.PTK/2020 dated August 28, 2020. The Audit Committee Charter regulates various matters related to the implementation of the duties, responsibilities and obligations of the Chair and Members of the Audit Committee.

Audit Committee Duty and Responsibility and Authority

Duties

Duties of the Audit Committee include to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities related to the supervisory function, including:

1. Maintain compliance with the Articles of Association, laws and applicable legal provisions and Company policies;
2. Uphold organizational discipline and internal control to prevent fraud and abuse;
3. Improve the quality of disclosure on matters of financial reporting, accounting systems and risk management policies;
4. Examine the scope, accuracy, independence and objectivity of the External Auditor and Internal Audit as well as the cost effectiveness of the External Audit;
5. The Audit Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations;
6. Reviewing financial information that will be published such as financial statements, projections and other financial information;

7. Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non-audit yang ditugaskan kepada Auditor Independen;
8. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan;
9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris perihal risiko yang dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menerima, menelaah dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
12. Melakukan *self-evaluation* terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Audit;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit juga berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang

Wewenang Komite Audit yaitu:

1. Komite Audit, jika diperlukan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, pekerja, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Audit Internal;
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

Tanggung Jawab

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pertanggungjawaban Komite Audit

7. Conduct an evaluation to provide pre-approval for non-audit services assigned to the Independent Auditor;
8. Reviewing the effectiveness of the Company's internal controls;
9. Reporting to the Board of Commissioners regarding the risks faced by the Company and the implementation of Risk Management by the Directors;
10. Examining any violation of errors in the decisions of the Board of Directors meetings or irregularities in the results of the decisions of the Board of Directors meetings;
11. Receive, examine and forward to interested parties and monitor the follow up of complaints relating to the Company;
12. Conduct self-evaluation of the effectiveness of the implementation of tasks and periodically update the Audit Committee Work Guidelines;
13. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners based on the provisions of the applicable laws and regulations;
14. In carrying out its duties, the Audit Committee is also guided by the applicable laws and regulations.

Authority

The Audit Committee's authority are:

1. When necessary, the Audit Committee has the authority to have full, free, and unlimited access to records, employees, funds, assets, as well as other company resources related to the implementation of its duties.
- 2 Upon implementing its authority, the Audit Committee commits to cooperate with Internal Audit.
- 3 When necessary, with a written approval from the Board of Commissioners, the Audit Committee has the capability to employ experts and/or consultants in assisting the Audit Committee.

Accountability

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners The accountability of

disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan pelaksanaan tugas kegiatan Komite Audit;
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang antara lain berisi fakta lapangan, analisa kesimpulan dan saran.

Lingkup Pekerjaan

Berdasarkan piagam Komite Audit, ini bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain meliputi:

1. Penelaahan atas informasi keuangan dilakukan mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan menjadi akurat, andal dan dapat dipercaya. Penelaahan dapat dilakukan melalui:
 - a. *Review* atas hasil pemeriksaan Auditor Independen atau Auditor Internal;
 - b. *Review* dalam atau selama proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.
2. Seleksi, penunjukan dan pengawasan pekerjaan Auditor Independen. Dalam rangka audit umum atas keuangan Perusahaan, Komite Audit berperan melaksanakan:
 - a. Seleksi dan penunjukkan Auditor Independen.
 - Komite Audit menyeleksi dan merekomendasikan calon Auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
 - Dalam proses seleksi Auditor independen, Komite Audit harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik.
 - b. Pengawasan pekerjaan Auditor independen. Dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan oleh Auditor Independen, Komite Audit harus memastikan bahwa Auditor Independen memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-prinsip Akutansi yang berlaku umum:

Audit Committee is conveyed to the Board of Commissioners in the form of reports as follows:

1. Annual Report, detailing the implementation of duties of the Audit Committee activities.
2. Report, containing each implementation of duties of the Audit Committee, such as facts from the field, conclusion and recommendation analysis.

Scope of Work

In order to perform its duties and responsibilities, scope of work of the Audit Committee covers the following:

1. Analysis on financial information is carried out in order to be published by the Company in an accurate, reliable, and trusted manner. The analysis may be performed by:
 - a. Reviewing the Independent Auditor or Internal Auditor findings;
 - b. Reviewing the preparation process of financial information that will be published.
2. Selection, appointment, and supervision of the Independent Auditor work. To carry out a general audit on the Company's finance, the Audit Committee has the role of:
 - a. Selecting and appointing an Independent Auditor.
 - Selecting and recommending candidates for Independent Auditor who will audit the Company's Financial Statements to the Board of Commissioners
 - Throughout the selection process, referring to the provisions on legality, competency, and independency of an public accountant.
 - b. Supervising the Independent Auditor Work
In the implementation general audit on the financial statements by an Independent Auditor, the Audit Committee should ensure the Independent Auditor has the competence and experience in administering the generally accepted Public Accountant Professional Standards and Accounting Principles:

- Melakukan tinjauan Audit *Planning* dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan;
- Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh Auditor dengan Manajemen. Jika terdapat perbedaan pendapat Auditor dengan manajemen dan hal lainnya yang perlu mendapat perhatian, maka harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis.

3. Memastikan agar Auditor Independen mengkomunikasikan hal-hal berikut ini sesuai standar audit:

- Tingkat tanggung jawab Auditor dalam mengevaluasi pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan;
- Pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi berikut pelaksanaannya;
- Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern;
- Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan;
- Salah saji yang tidak dikoreksi oleh Manajemen dalam Laporan Keuangan dengan alasan yang tidak material;
- Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan manajemen atau pekerja yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan;
- Pertimbangan manajemen yang dipakai sebagai dasar estimasi akuntansi;
- Koreksi Audit yang signifikan;
- Tanggung jawab Auditor dalam mengevaluasi informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, prosedur yang telah dilaksanakan untuk itu dan hasilnya;
- Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip-prinsip akuntansi, lingkup audit dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan Auditor dalam laporan auditnya;
- Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan

- Reviewing the Audit *Planning* and audit program adequacy as well as monitoring implementation of field audit activity.
- Monitoring the discussion of audit findings carried out by the Auditor and management. If there is any dissenting opinion between the Auditor and management, and other issues requiring attention, it is mandatory to report to the Board of Commissioners in written.

3. Ensuring the Independent Auditor to communicate the following as per the audit standards:

- Level of responsibility of an Auditor in evaluating internal control and presentation of financial statements.
- Selection and changes in accounting policies along with its implementation.
- Significant shortcoming in the design and implementation of internal control.
- Method of recording, reporting and significant impact from extraordinary transactions to the financial statements.
- Uncorrected misstatement by the Management in Financial Statements with immaterial reasons.
- Frauds toward the laws and regulations conducted by the management or employees causing uncorrected misstatement in the financial statements.
- Management consideration used as an estimation basis of accounting.
- Significant Audit Correction.
- Responsibilities of an Auditor in evaluating other information in documents containing audited financial statements, procedures conducted based on the audited information, and the results.
- Disagreement with the management on the implementation of accounting principles, scope of audit, disclosure in the financial statements and words used by the Auditor in its audit report.
- Consultation established by the management with other Public Accountant Firm and

pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut serta hambatan dalam pelaksanaan audit.

4. Memastikan konsep laporan keuangan audit diterima 10 hari sebelum diterbitkan oleh Perusahaan untuk dibicarakan dengan Auditor dan manajemen untuk menilai apakah Auditor sesuai dengan temuan Audit dan pengungkapannya telah memadai;
5. Memastikan bahwa Auditor menyampaikan representasi tertulis yang menyatakan penilaiannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan dan Manajemen terhadap peraturan perundangan dan efektivitas pengendalian internal;
6. Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan Auditor Independen kepada Dewan Komisaris, jika terbukti kuat bahwa independensi Auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa Auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar akuntan publik.

Pelaksanaan Tugas Khusus

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis;
2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
3. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:
 - a. Dilakukan melalui tinjauan (*review*) terhadap semua pencatatan, dokumen, dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Notulen Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani pihak terkait;
 - c. Jika dianggap perlu, melakukan Audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Auditor Internal.

opinion of the Auditor toward the consulted issues, as well as obstacles in the audit implementation.

4. Ensuring the concept of an audited financial statements to be received in 10 days prior to the publication by the Company in order to be discussed by the Auditor and management to evaluate whether the Auditor is in accordance with the findings and its disclosure is adequate.
5. Ensuring the Auditor submits a written representation, stating its evaluation on issues related to the Company and Management compliance to the laws and regulations, as well as the effectivity of internal control.
6. Having the capability to recommend termination of employment with the Independent Auditor to the Board of Commissioners, if strongly proven that the Auditor's independency could be disrupted or proven that the examination conducted by the Auditor is not in line with the public accountant standards.

Implementation of Specific Assignment

1. Distribution of special duties to the Audit Committee by the Board of Commissioners is conducted through a written order.
2. Special duties may include but not limited to investigation to the allegation of errors in the Board of Directors' meeting resolution or fraud in the implementation of the Board of Directors' meeting resolution.
3. Implementation of special duties of the Audit Committee, among which could be performed by:
 - a. Reviewing all records, documents, and other necessary information, including Minutes of Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners' Meeting.
 - b. Proposing questions to the Board of Directors and its staff, to which the results to be included in Question and Answer Minutes of Meeting, signed by related parties.
 - c. If deemed necessary, performing investigative Audit which is conducted by cooperating with Internal Auditor.

4. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada Anggota Komite Audit dan Anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota. Rapat Komite Audit dipimpin Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

Setiap pelaksanaan Rapat dituangkan dalam risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Rapat Kerja Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 4 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Kehadiran Rapat Komite Audit 2020
Audit Committee Meeting Attendance 2020

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Total	Total Total	% Kehadiran Attendance
Achmad Fachrudin	Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	2	2	100%
Budiarto	Anggota Komite Audit Audit Committee member	4	4	100%
Edward Situmorang	Anggota Komite Audit Audit Committee member	2	2	100%

4. The Audit Committee is obligated to submit special duties implementation report with maximum confidentiality level, limited to Members of the Audit Committee and Members of the Board of Commissioners.

Audit Committee Meeting Implementation Policy

In accordance with the Audit Committee Charter, the Audit Committee's Meeting is held at least once a month. The Meeting of Audit Committee has the capability to make decisions if the attendance amounts to 2/3 of the total members. The meeting is chaired by Chairman of Audit Committee or the most senior of the Members of Audit Committee if the Chairman is unable to attend. If deemed necessary, the Audit Committee is allowed to invite other parties related to the meeting material.

Description of the Meeting implementation is stated in minutes of meeting. The minutes of meeting is signed by the meeting chairman and distributed to all attending and non-attending members of the Audit Committee. Dissenting opinion that occurs in the meeting to be included in the minutes of meeting along with the underlying reasons.

Audit Committee Meeting

In 2019, the Audit Committee held 8 (eight) meetings with attendance level, as follows:

Adapun agenda rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

The agenda for the Audit Committee meeting is as follows:

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2020

Audit Committee Meeting Agenda in 2020

Tanggal Date	Agenda		Peserta Rapat Peserta Rapat
01 Juli 2020	- Laporan Laba/Rugi tahun 2019 dan Januari-Mei 2020 - Laporan Manajemen 2020	- Profit/Loss Statement 2019 and January-May 2020 2020 Management Report	KA, KIRU, VP. Finance, Corsec, Man. Consolidation Evaluation, Ops. Budget, Set. Dekom.
03 November 2020	Opening Meeting KAP	Opening Meeting KAP	KA, IA PTK, KAP
16 November 2020	Pemaparan dan Pembahasan Kinerja AP PK (PKT & PKS)	Exposure and Discussion of AP PK Performance (PKT & PKS)	KA, KIRU, Set Dekom, AI PTK, BoD PKT, BoD PKS, SPBD
14 Desember 2020	Pemaparan Annual Plan Tahun 2021	Presentation of Annual Plan 2021	KA, IA

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menjalankan tugas dan berbagai kegiatan, meliputi:

1. Rapat Kerja dengan Divisi Internal Audit.
2. Melakukan Penelaahan dan membahas Laporan Keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan yang akan dipublikasikan.
3. Turut serta dalam proses pemilihan Auditor Independen Tahun Buku 2020.
4. Membuat Tanggapan Laporan Kegiatan Perusahaan.
5. Melakukan evaluasi atas Rencana Kerja Divisi Internal Audit, Efektivitas fungsi Audit dan membahas Hasil Audit Divisi Internal Audit.
6. Memantau Tindak Lanjut Manajemen atas rekomendasi dari hasil Audit Internal dan Eksternal.
7. Melakukan Audit Khusus atas permintaan Dewan Komisaris.

Audit Committee's Brief Activity Implementation Report

Throughout 2020, the Audit Committee has carried out various tasks and activities, including:

1. Working Meeting with the Internal Audit Division.
2. Reviewing and discussing quarterly, semester and annual financial reports that will be published.
3. Participate in the process of selecting an Independent Auditor for the 2020 Financial Year.
4. Making Responses to Company Activity Reports.
5. Conduct an evaluation of the Internal Audit Division Work Plan, the effectiveness of the Audit function and discuss the Audit Results of the Internal Audit Division.
6. Monitor Management's follow-up on recommendations from the Internal and External Audit results.
7. Conducted a Special Audit at the request of the Board of Commissioners.

Penelaahan Informasi Keuangan dan Kinerja Keuangan

Untuk mendorong agar informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh Perseroan secara akurat, andal dan dapat dipercaya, Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Tahunan dan berdiskusi dengan manajemen dan Internal Audit mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian antara lain Laporan Rugi/Laba dan Pendanaan untuk investasi kapal.

Pengawasan atas Pekerjaan Auditor Eksternal

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pekerjaan Auditor Eksternal, Komite Audit melakukan beberapa aktivitas yaitu:

- Menelaah dan berdiskusi dengan auditor independen Perseroan mengenai rencana audit dan implementasinya.
- Melakukan monitoring terhadap proses pelaporan keuangan dengan mendiskusikan hasil audit atas Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan.
- Menelaah temuan-temuan penting dari auditor eksternal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal dan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi internal auditor melalui aktivitas sebagai berikut:

- Menelaah dan berdiskusi dengan Auditor Internal Perusahaan mengenai aktivitas audit selama tahun 2019 dan rencana Audit Internal tahun 2020.
- Mengevaluasi pelaksanaan Audit Internal dan menelaah temuan-temuan penting dari auditor internal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.
- Komite Audit bersama dengan Internal Auditor telah melakukan diskusi dan rapat terkait dengan hal temuan hasil Pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

Financial Information and Financial Performance Reviewing

To encourage financial information that is presented and published by the Company accurately, reliably and reliably, the Audit Committee has reviewed the Monthly, Quarterly and Annual Financial Statements and discussed with management and Internal Audit regarding matters that require attention including the Loss Report/Profit and Funding for ship investment.

Supervision of The Work of The External Auditor

In carrying out the oversight function of the work of the External Auditor, the Audit Committee carries out several activities, namely:

- Review and discuss with the Company's independent auditors the audit plan and its implementation;
- Monitor the financial reporting process by discussing the audit results of the Company's consolidated financial statements;
- Review important findings from external auditors and monitor the implementation of audit recommendations.

Evaluate The Effectiveness of Internal Control and The Implementation of the Internal Audit Function

The Audit Committee evaluates the effectiveness of internal control and the implementation of the main duties and functions of the internal auditor through the following activities:

- Review and discuss with the Company's Internal Auditors the audit activities during 2019 and the 2020 Internal Audit plan;
- Evaluate the implementation of Internal Audit and review important findings from internal auditors and monitor the implementation of audit recommendations;
- The Audit Committee together with the Internal Auditor has conducted discussions and meetings related to the findings of the Audit results and the follow-up;

- d. Internal Auditor telah menerbitkan 15 (lima belas) Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan yang direncanakan dan menyampaikan 158 Rekomendasi

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dengan Auditor Internal untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan serta hal-hal yang menjadi perhatian Perusahaan dan 1 (satu) kali dengan manajemen Keuangan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan

Komite Audit telah melakukan penelaahan dan pengawasan atas kepatuhan Perseroan pada hukum dan peraturan, termasuk melakukan pemantauan peraturan dan hukum yang terkait dengan bidang usaha Perseroan serta perkara/sengketa yang terkait dengan Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan.

Melakukan Identifikasi Hal-hal yang Memerlukan Perhatian Dewan Komisaris

Komite Audit menyampaikan masukan dalam bentuk Rekomendasi terkait dengan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris berdasarkan hasil analisa dan telaah atas Laporan *Management* maupun Laporan Keuangan yang diterbitkan setiap bulan.

Program Pengembangan

Sepanjang tahun 2020, program pengembangan kompetensi Komite Audit adalah sebagai berikut:

- d. The Internal Auditor has issued 15 (fifteen) Audit Reports (LHA) as planned and submitted 154 Recommendations.

In 2020, the Audit Committee held 3 (three) meetings with the Internal Auditor to discuss the Audit Report as well as other issues as concern of the Company and 1 (one) meeting with Financial Management.

Compliance with Regulations and Legislation

The Audit Committee has reviewed and supervised the Company's compliance with laws and regulations, including monitoring the regulations and laws related to the Company's business fields and cases/disputes related to the Company and the Company's business activities.

Identify Issues That Require the Attention of The Board of Commissioners

The Audit Committee submits input in the form of Recommendations related to matters that require the attention of the Board of Commissioners based on the results of the analysis and review of Management Reports and Financial Reports that are published every month.

Development Program

The Audit Committee competency development program throughout 2020 is as follows:

Pelatihan Komite Audit

Audit Committee Training

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Provider	Tempat & Waktu Pelaksanaan Time and Place of implementation
Budiarto	Anggota Komite Audit	Mengefektifkan Peran Auditor dan Pengawasan Untuk Mencegah Korupsi Dalam Pengamanan Keuangan Negara. <i>Encourage effective Role of Auditors and Supervision to Prevent Corruption in Safeguarding State Finance</i>	Fakultas Hukum Univ. Sebelas Maret	Virtual, 22 Agustus 2020
A. Fachruddin	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Committee Members</i>	Optimalisasi Peran Komite Audit dalam Pengawasan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik. <i>Optimizing Role of the Audit Committee in Supervision and Evaluation of the Provision of Audit Services by Public Accountants or Public Accounting Firms</i>	IKAI	Virtual, 12 Oktober 2020
Budiarto	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Members</i>			
A. Fachruddin	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Committee Members</i>	<i>Directorship Program</i> <i>Directorship Program</i>	PTC	Virtual, 15-18 Desember 2020

Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit dan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit menyampaikan laporan kinerja kepada Dewan Komisaris, yang antara lain berisi fakta lapangan, analisa kesimpulan dan saran secara berkala.

Hasil penilaian menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris Perusahaan untuk mengangkat kembali dan/ atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya. Secara umum Dewan Komisaris menilai, Komite Audit telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dengan baik dalam membantu Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan.

Audit Committee Performance Assessment

The Audit Committee's performance evaluation is based on the realization and completion of the work program listed in the Audit Committee's Work Plan and Budget and conducted by the Board of Commissioners. The Audit Committee submits performance reports to the Board of Commissioners, which include field facts, periodic analysis of conclusions and suggestions.

The assessment results become consideration of the Board of Commissioners of the Company to reappoint and/ or dismiss members of the Audit Committee for the next term. In general, the Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has carried out its duties, responsibilities and authority properly in assisting the Board of Commissioners in relation to the supervisory function.

Komite Investasi dan Risiko Usaha

Investment and Business Risk Committee

Komite Investasi dan Risiko Usaha berfungsi sebagai organ yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan risiko dan investasi di Perusahaan. Komite Investasi dan Risiko Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Investasi dan Risiko Usaha (IRU) berfungsi membantu Dewan Komisaris untuk memantau dan memberikan masukan atas kegiatan investasi yang dijalankan Perusahaan serta risiko-risiko yang dimiliki. Pembentukan komite tersebut berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.035/DEKOM.PTK/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Penetapan Ketua Komite investasi & Risiko Usaha dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK-039/ DEKOM.PTK/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Keanggotaan Komite Investasi dan Risiko Usaha

Komite IRU terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris sebagai Ketua dan 1 (satu) anggota ahli yang bukan pekerja PTK serta diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas persetujuan RUPS. Terkait dengan keanggotaan Komite IRU, maka persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi adalah:

- Memiliki integritas, objektivitas, dedikasi, dan standar etika yang tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam akan tugas dan tanggung jawab Komite Investasi & Risiko Usaha;

The Investment and Business Risk Committee functions as an organ that assists the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties over the planning and implementation of risks and investments in the Company. The Investment and Business Risk Committee reports directly to the Board of Commissioners.

The Investment and Business Risk Committee (IRU) functions to assist the Board of Commissioners in monitoring and providing input on investment activities carried out by the company and its risks. The establishment of the committee was based on the Board of Commissioners' Letter No.035/ DEKOM.PTK/2015 dated 30 November 2015 concerning the Determination of the Chairman of the Investment & Business Risk Committee and the Decree of the Board of Commissioners No.SK-039/DEKOM.PTK/2015 dated 28 December 2015 concerning Members Investment and Business Risk Committee.

Membership of The IRU Committee

Membership of the IRU Committee consists of at least one Commissioner as Chairman and one expert who is not an employee of PTK. Members of the IRU Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to GMS. Related to the IRU Committee membership, the requirements and qualifications that shall be fulfilled are as follows:

- Having integrity, objectivity, dedication, and high ethical standards as well as able to communicate well;
- In-depth insights and understanding to the duties and responsibilities of the Investment & Business Risk Committee;

- Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai antara lain pelaksanaan pengawasan investasi, dan manajemen risiko;
- Mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
- Mampu menyediakan waktu untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya.

Anggota Komite IRU terpilih yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan paling lama adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pemberhentian Anggota Komite Investasi dan Risiko usaha dapat dilakukan sewaktu-waktu meskipun jabatannya belum berakhir, apabila:

- Mengundurkan diri;
- Kehilangan kewarganegaraan;
- Meninggal dunia;
- Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan;
- Melanggar atau tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit;
- Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.

Komposisi Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha

Susunan Investasi dan Risiko Usaha PTK pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- Comprehensive understanding on the implementation of supervision in investment, and risk management;
- Capable in performing its service professionally and independently, for the interest of the Company without any influence from various parties with interest that may conflict with the interest of the Company;
- Able to provide time to perform and complete its duties.

The appointed IRU Committee members who are not Members of the Board of Commissioners have a maximum term of office of three years and can be extended once for two years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time. Dismissal of members of the Investment and Business Risk Committee can be done at any time even though his position has not ended, under following conditions:

- Resignation;
- Losing the citizenship;
- Passing away;
- Any actions that bring loss to the Company;
- Violating or not fulfilling the requirements as a member of the Audit Committee as regulated in the Audit Committee Charter; and
- Unable to perform its duties and responsibilities stipulated by the Board of Commissioners.

Investment and Business Risk Committee Member Composition

As of December 31, 2020, composition of PTK Investment and Business Risk Committee is as follows:

Komposisi Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha

Investment and Business Risk Committee Member Composition

01 Januari 2020 – 13 Maret 2020 01 January 2020 – 13 March 2020	14 Maret 2020 – 05 November 2020 14 March 2020 – 05 November 2020	11 September 2020 – 31 Desember 2020 11 September 2020 – 31 December 2020	Keterangan Dasar Penangkatan Basic Information of Appointment
Alfian Nasution Ketua Komite IRU Chair of the IRU Committee	-	-	SK-058/DEKOM. PTK/2019 tanggal 27 November 2019
-	-	Andi Saiful Haq Ketua Komite IRU Chair of the IRU Committee	021/DEKOM.PTK/2020 tanggal 09 Oktober 2020
Muhammad Irfan Zainul Fikri Anggota/ Member	Muhammad Irfan Zainul Fikri Anggota/ Member	Muhammad Irfan Zainul Fikri Anggota/ Member	SK-064/DEKOM. PTK/2020 tanggal 31 Desember 2019

Profil Komite Investasi dan Risiko Usaha

Profile of the Investment and Business Risk Committee



11 September 2020 - sekarang

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Soppeng – Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Mei 1975. Saat ini berusia 45 tahun. Beliau meraih gelar S2 pada tahun 2008. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta periode 2011 - 2013 Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur di Institute for Transformation Studies (INTRANS) sejak 2013 – saat ini.

11 September 2020 – now

Indonesian citizen, lives in Jakarta. Born in Soppeng - South Sulawesi on May 12, 1975. Currently 45 years old. He earned his Master's degree in 2008. During his career, he served as a Lecturer at the Department of International Relations, Paramadina University, Jakarta for the period 2011 - 2013 Currently he has served as Director at the Institute for Transformation Studies (INTRANS) since 2013 - present.



Warga negara Indonesia berdomisili di Bekasi. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1977. Saat ini berusia 43 tahun. Beliau meraih gelar S1 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000, dan menyelesaikan tugas belajar S2 Master Logistik & Transportasi di Universitas Indonesia pada tahun 2011. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai *Site Manager Project* Pembangunan Kapal periode 2014 - 2018. Saat ini beliau menjabat sebagai *Technical Service Coordinator* PT Pertamina International Shipping sejak 1 Juni 2019 berdasarkan SKMJ-00040/K20000/2019-S8 tanggal 27 Mei 2019 dan memiliki tugas sebagai penanggung jawab Proyek Investasi Pembangunan dua (2) kapal baru VLCC (*Very Large Crude Carrier*) di galangan JMU-Jepang.

Independensi Komite Investasi dan Risiko Usaha

Komite IRU berperan secara profesional dan independen dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil kerjanya. Komite IRU harus memenuhi kriteria independensi, integritas, objektivitas, antara lain:

1. Tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi independensi;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.

Indonesian citizen domiciled in Bekasi. Born in Yogyakarta on September 22, 1977. Currently 43 years old. He earned a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Gadjah Mada University in 2000, and completed his master's study in Logistics & Transportation at the University of Indonesia in 2011. During his career, he served as *Site Manager for Shipbuilding Projects* for the period 2014-2018. has served as *Technical Service Coordinator* of PT Pertamina International Shipping since June 1, 2019 based on SKMJ-00040/K20000/2019-S8 dated May 27, 2019 and has the task of being in charge of the Development Investment Project for two (2) new VLCC (*Very Large Crude Carrier*) vessels at the JMU-Japan shipyard.

Independency of IRU Committee Members

The IRU Committee has a professional and independent role in carrying out its duties and reporting on its work. The IRU Committee must meet the criteria of independence, integrity, objectivity, including:

1. Has no management, share ownership and/or family affiliations with the Board of Commissioners, Directors, Controlling Shareholders, which can affect independence;
2. Do not have personal interests/affiliation that can cause negative impacts and conflicts of interest on the Company.

Kode Etik Komite Investasi dan Risiko Usaha

Anggota komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati kode etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

1. Anggota komite yang masih aktif atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Piagam Komite

Komite IRU memiliki Piagam Komite IRU sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawabnya, dan kewajiban Ketua serta Anggota Komite. Piagam Komite. IRU ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.002/DEKOM. PTK/2014 tentang Pemberlakuan Piagam Komite Investasi & Risiko Usaha, tertanggal 24 Januari 2017.

Piagam mengatur tentang pedoman agar Komite dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya jawabnya secara profesional, transparan, independen, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan dalam Piagam Komite IRU antara lain: Definisi; visi dan misi; tujuan penyusunan piagam; pembentukan dan keanggotaan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang; tata cara kerja; kode etik, remunerasi, dan anggaran; serta pelaporan, evaluasi kinerja, pemberlakuan, dan penyempurnaan.

Code of Ethics for the Investment and Business Risk Committee

In carrying out their duties and responsibilities, committee members are required to comply with the Company's code of ethics and are prohibited from taking personal gain either directly from the Company's activities other than honorarium and other benefits and benefits.

1. Committee members who are still active or who no longer serve as committee members, are obliged to maintain the confidentiality of company documents, data and information obtained while serving as committee members, both from internal and external parties and only used for the purposes of carrying out their duties.
2. Committee members are prohibited from misusing important information relating to the Company for personal gain.

The IRU Committee's Charter

The IRU Committee has an IRU Committee Charter as a work guideline in carrying out the duties, responsibilities and obligations of the Chairman and Committee Members. The IRU Committee Charter was established based on Board of Commissioners Decree No.002/DEKOM.PTK/2014 concerning the Imposition of the Investment & Business Risk Committee Charter, dated 24 January 2017.

The Charter regulates guidelines so that the Committee can carry out its duties, responsibilities and authorities in a professional, transparent, independent, efficient, effective and accountable manner. The provisions in the IRU Committee Charter include: Definition; vision and mission; the purpose of the preparation of the charter; committee formation and membership; duties, responsibilities and authorities; working procedures; code of ethics, remuneration and budget; and reporting, performance evaluation, enforcement, and improvement.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Investasi dan Risiko Usaha

Komite IRU memiliki tugas dan tanggung jawab utama yaitu membantu melakukan pengawasan investasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengelolaan investasi Perusahaan termasuk Anak Perusahaan, termasuk realisasi dan implementasi RKAP dan RJPP.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite IRU adalah:

1. Melakukan evaluasi atas perencanaan investasi dan tingkat risiko PTK termasuk anak perusahaannya yang oleh Direksi dimintakan persetujuan atau tanggapan tertulis dari Komisaris
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan investasi dan analisa paska investasi
3. Melakukan *review* atas permohonan Direksi kepada Dewan Komisaris atas rencana Perusahaan, antara lain :
 - a. Investasi
 - b. Pembentukan Anak Perusahaan
 - c. Rencana Jangka Panjang Perusahaan
 - d. Kontrak kerja sama operasi
 - e. Pengelolaan Aset
 - f. Penjaminan Aset
4. Melakukan evaluasi kebijakan investasi dan strategi manajemen risiko baik operasional dan pengembangan Perusahaan
5. Memantau dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko dan mitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perusahaan
6. Melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris termasuk anak perusahaan dalam seluruh aktifitas Perusahaan.
7. Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris terkait pengelolaan Investasi dan Risiko Usaha apabila diminta

Duties, Responsibilities, and Authority of The IRU Committee

Main duties and responsibilities of the IRU Committee are to assist the supervision in investment activities as well as to provide recommendation to the Board of Commissioners on the Company's investment management, including the Subsidiaries along with the realization and implementation of RKAP and RJPP.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the IRU Committee are as follows:

1. Evaluating the investment planning and risk level of PTK including its subsidiaries for which the board of directors is asked for approval or written response from the Commissioner.
2. Monitor investment implementation and post investment analysis
3. Reviewing requests from the Board of Directors to the Board of Commissioners regarding the Company's plans, including:
 - a. Investation
 - b. Establishment of Subsidiaries
 - c. Long Term Company Plan
 - d. Joint operation contract
 - e. Asset Management
 - f. Asset Guarantee
4. Evaluating investment policies and risk management strategies for both the operations and development of the Company
5. Monitor and evaluate the implementation of risk management and mitigation on the Company's business and investment plans
6. Report and provide recommendations to the Board of Commissioners including subsidiaries in all company activities.
7. Provide reference material and information for the Board of Commissioners' needs related to Investment and Business Risk management when requested

8. Membuat rencana kerja tahunan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan atas kebijakan investasi Perseroan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan Investasi dan Risiko Usaha

Wewenang

Komite IRU memiliki wewenang antara lain:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang investasi, penggunaan dana terkait investasi, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
2. Meminta dan/atau mendapatkan kerja sama dari rekan kerja antara lain Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite lain, Tim Investasi, Panitia Lelang Investasi dan atau fungsi-fungsi operasional Perseroan, termasuk Anak Perusahaan;
3. Melakukan komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Tim Investasi;
4. Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan Piagam (*Charter*) termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Komite Investasi & Risiko Usaha, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
5. Mendapatkan saran dari narasumber, konsultan ataupun tenaga yang profesional apabila diperlukan, dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Rapat Kerja Komite Investasi dan Risiko Usaha

Sepanjang tahun 2020, komite memenuhi tugasnya mendampingi BoC dengan hadir penuh pada rapat bulanan BoD-BoC, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

8. Creating an annual work plan that is aligned with the annual work plan on the Company's investment policies
9. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners related to Investment and Business Risks

Authority

IRU Committee has authorities, as follows:

1. Access records or information regarding investments, use of investment-related funds, assets and other Company resources related to the implementation of duties;
2. Request and or obtain cooperation from colleagues, including the Secretariat of the Board of Commissioners and other Committees, the Investment Team, the Investment Auction Committee and / or the operational functions of the Company, including Subsidiaries;
3. Communicating directly with the Board of Commissioners and the Investment Team;
4. Compiling, evaluating, amending and implementing the Charter, including determining the procedures and scope of work for the Investment & Business Risk Committee, with the approval of the Board of Commissioners;
5. Obtain advice from resource persons, consultants or professional staff if necessary, by obtaining written approval from the Board of Commissioners.

Business Risk and Investment Committee Meeting

In 2020, the committee has fulfilled the duty to assist the BoC by attending the BoD-BoC monthly meeting, with attendance level, as follows:

Kehadiran Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha 2020

Investment and Business Risk Committee Meeting Attendance in 2020

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Rapat Frequency	% Kehadiran Attendance
Andi Saiful Haq	Ketua Komite Investasi & Risiko Usaha <i>Chairman of the Investment & Business Risk Committee</i>	11 September 2020 – 31 Desember 2020	-	-	0%
M. Irfan Zainul Fikri	Anggota Komite Investasi & Risiko Usaha <i>Member of the Investment & Business Risk Committee</i>	01 Januari 2020 – 31 Desember 2020	10	10	100%

Selain rapat rutin bulanan BoD BoC, Komite Investasi dan Risiko Usaha juga menyelenggarakan rapat dengan manajemen PTK sebanyak 2 (dua) kali dengan Agenda sebagai berikut:

In addition to the BoD BoC monthly regular meetings, the Investment and Business Risk Committee also held 2 (two) meetings with PTK management with agenda as follows:

Agenda Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha Tahun 2020

Investment and Business Risk Committee Meeting Agenda in 2019

Tanggal Date	Agenda		Peserta Rapat Meeting Participant
01 Juli 2020	1. Laporan Manajemen PTK YTD Q2 2020 2. KPI Collection Period	1. PTK YTD Q2 2020 Management Report 2. KPI Collection Period	1. VP Finance & Tim 2. Manager SPBD & Tim 3. Anggota Komite Audit Dekom
16 November 2020	1. Pemaparan dan Pembahasan Kinerja AP PK (PKT & PKS) 2. Diskusi utk perbaikan Kinerja	1. Exposure and Discussion of PK Subsidiaries (PKT & PKS) Performance 2. Discussions to improve performance	1. Direktur AP & Tim 2. Manager SPBD & Tim 3. Sekr Dekom 4. Anggota Komite Audit

Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2020, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2019 – 2026 untuk proyek *Business Development* (BD) kapal & non-kapal, dan proyek *non-business development* baik korporat PTK maupun grup anak Perusahaan;

Duty Implementation

Throughout 2020, the Investment and Business Risk Committee has reported the implementation of its duties to the Board of Commissioners as follows:

1. Evaluation of the 2019-2026 Company Long-Term Plan (RJPP) for ship & non-ship business development (BD) projects, and non-business development projects both PTK corporate and subsidiary groups;

2. Evaluasi dan memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Investasi 2020;
 3. Pembahasan dan evaluasi atas revisi RKAP Investasi 2020 yang diakibatkan berubahnya asumsi dan realisasi sampai dengan pertengahan tahun 2020;
 4. Komite IRU memberi masukan kepada Dewan Komisaris untuk dijadikan rekomendasi ke Dewan Direksi PTK perihal pelaksanaan investasi;
 5. Pembahasan dan Evaluasi Rencana kerja tahun 2021 (RKAP);
 6. Melakukan review dan memberikan masukan ke Dewan Komisaris atas usulan Penyertaan Modal Pertamina (PMP) untuk menunjang kebutuhan pendanaan Investasi tahun 2021 bersama Komite Audit.
2. Evaluate and approve the 2019 Investment Work Plan and Budget (RKAP);
 3. Discussion and evaluation of the revised 2019 Investment RKAP resulting from changes in assumptions and realization until mid-2019;
 4. The IRU Committee provides input to the Board of Commissioners to be made a recommendation to the PTK Board of Directors regarding investment implementation;
 5. Discussion and evaluation of the 2020 work plan (RKAP);
 6. Reviewing and providing input to the Board of Commissioners on the proposed Pertamina Capital Participation (PMP) to support the funding needs for investment in 2020 with the Audit Committee.

Program Pengembangan

Sepanjang tahun 2020, program pengembangan kompetensi Komite Investasi dan Risiko Usaha adalah sebagai berikut:

Development Program

Throughout 2020, Investment and Business Risk Committee development program is as follows:

Pelatihan Komite Investasi dan Risiko Usaha

Investment and Business Risk Committee Training

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Time and Place of Implementation
Andi Saiful Haq	Ketua Komite Investasi & Risiko Usaha Chairman of the Investment & Business Risk Committee	Corporate Law for Executive: Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive: Legal Aspects in Managing BUMN Corporations	PTC	Virtual, 15-18 Desember 2020

Penilaian Kinerja Komite IRU Tahun 2020

Penilaian kinerja dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris meliputi Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite, Tingkat Kehadiran dalam Rapat Internal Dewan Komisaris, Tingkat Kontribusi Tertulis bagi Komite, Akurasi Rekomendasi Tertulis, Akurasi Rekomendasi Lisan, Peran Aktif (Inisiatif) dan Inovasi. Penilaian kinerja Komite IRU dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja Komite IRU selaku kelompok maupun anggotanya selaku individu.

Penilaian kinerja Komite IRU tahun 2020 dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite IRU dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite IRU yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang manajemen risiko dan Investasi. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite IRU untuk periode jabatan berikutnya.

Investment and Business Risk Committee Performance Assessment in 2020

Performance appraisal is carried out by the Board of Commissioners with performance appraisal indicators as determined by the Board of Commissioners including Attendance Level at Committee Meetings, Attendance Level at Internal Meetings of the Board of Commissioners, Level of Written Contribution to the Committee, Accuracy of Written Recommendations, Accuracy of Oral Recommendations, Active Role (Initiative) and Innovation. IRU Committee performance appraisal is carried out every 3 (three) months. Performance appraisal is carried out to assess the performance of the IRU Committee as a group and its members as individuals.

The IRU Committee's 2020 performance assessment is carried out based on the realization and completion of the work programs listed in the IRU Committee's Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the IRU Committee's report which includes the implementation of committee duties in the field of risk management and investment. The results of the assessment become material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss IRU Committee members for the next term of office.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

Sampai dengan akhir periode pelaporan, PT Pertamina Trans Kontinental belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero), fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dijalankan oleh PT Pertamina (Persero).

Terkait dengan fungsi remunerasi yang mencakup struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, ditentukan PT Pertamina (Persero) sebagai induk Perusahaan berdasarkan rekomendasi dari *Vice President Downstream Business Development & Portfolio* PT Pertamina (Persero) dan *Subholding* PT Pertamina International Shipping, untuk kemudian ditetapkan berdasarkan RUPS secara sirkuler.

Terkait dengan fungsi nominasi yang mencakup kebijakan dan kriteria nominasi calon Dewan Komisaris dan Direksi, ditetapkan dalam mekanisme Sidang Dewan Pertimbangan Karir Pekerja PT Pertamina (Persero) dan kemudian ditetapkan Dewan Komisaris serta persetujuan Direksi PT Pertamina (Persero) untuk disahkan berdasarkan RUPS secara sirkuler.

As end of reporting period, PT Pertamina Trans Kontinental has yet to established a Remuneration and Nomination Committee. As a Subsidiary of PT Pertamina (Persero), the function of Remuneration and Nomination Committee is carried out by PT Pertamina (Persero).

Referring to the remuneration function covering the structure, policy, and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as performance evaluation on the Board of Commissioners and Board of Directors are determined by PT Pertamina (Persero) as the parent company, based on the recommendation of Vice President Subsidiary Joint Venture (SJV) of PT Pertamina (Persero), which then to be stipulated based on circular GMS.

Meanwhile, the nomination function covering policy and criteria of nomination of candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors are determined in the trial mechanism held by Employee Career Advisory Council of PT Pertamina (Persero), and to be stipulated by the Board of Commissioners as well as PT Pertamina (Persero) Board of Directors' approval for ratification in circular GMS.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

- **Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perundangan dan peraturan, serta aspek keterbukaan dari perusahaan.**
- **Corporate Secretary has an important role in facilitating communication between the Company and all stakeholders. The Corporate Secretary is also responsible to ensure the Company's compliance with laws and regulations, as well as the transparency aspect of the company.**

Kewajiban membentuk Sekretaris Perusahaan berlaku bagi Perusahaan sebagai anak perusahaan BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN berikut perubahannya. Fungsi tersebut adalah untuk menjamin bahwa penyelenggaraan administrasi dan tindakan korporasi yang dilakukan Perusahaan telah mematuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip GCG, melindungi Perusahaan dari sisi hukum, membina relasi dengan lembaga pemerintahan terkait serta memastikan pengelolaan dokumen perusahaan. Peranan dan tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi BUMN tetapi juga bagi seluruh entitas anaknya.

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemegang Saham, bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen dan notulen rapat, penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat serta menangani hubungan dengan para Pemangku Kepentingan, masyarakat, serta pihak-pihak internal.

Obligation to appoint a Corporate Secretary applies to the Company as a SOEs subsidiary as stipulated in the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN and its amendments. This function is to ensure that the administration and corporate actions carried out by the Company comply with prevailing laws and regulations and are in accordance with the principles of GCG, protect the Company from the legal side, maintain relationships with relevant government agencies and ensure the management of company documents. These roles and responsibilities do not only apply to SOEs but also to all of their subsidiary entities.

The Corporate Secretary acts as a representative of the Company in dealing with Shareholders, is responsible for document administration and meeting minutes, formulating policies, planning and controlling corporate communications as well as handling relationships with Stakeholders, the public, and internal parties.

Fungsi Jabatan

Sekretaris Perusahaan memiliki posisi strategis untuk memastikan kepatuhan dan administrasi pengambilan keputusan, melaksanakan komunikasi perusahaan dalam rangka membangun citra Perusahaan, mengelola hubungan PTK dengan media, investor, komunitas dan pemangku kepentingan lain, memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum (baik litigasi maupun non-litigasi) dan kehumasan, serta mengelola perencanaan dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Selain itu pelaksanaan fungsi jabatan tersebut juga termasuk dalam fungsi legal & compliance dan fungsi sebagai *Public Relations & Administration*, sebagai berikut:

Fungsi Legal & Compliance

- Memberikan pertimbangan hukum terhadap kebijakan yang diambil oleh Direksi dan atau pejabat manajemen lain di Perusahaan;
- Menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan dan/atau pekerja yang berhadapan dengan suatu proses hukum karena menjalankan tugasnya, baik didalam maupun diluar pengadilan;
- Memenuhi formalitas, legalitas, kepemilikan aset perusahaan dan kelengkapan dokumen perizinan yang mutakhir untuk kelangsungan bisnis dan kebutuhan perusahaan;
- Memberikan *legal opinion* dan *legal advice* dalam kebijakan Perusahaan;
- Melaksanakan kegiatan dan pelaporan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG, diantaranya penerapan program *Whistleblower System*.

Fungsi Public Relations & Administration

- Menjaga, meningkatkan, membangun citra, reputasi dan kredibilitas Perusahaan di mata *stakeholder*;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi, dan Dewan Komisaris/Komite secara

Position Function

The Corporate Secretary has a strategic position to ensure compliance and administrative decision making, carry out corporate communications in order to build the Company's image, manage PTK relationships with the media, investors, communities and other stakeholders, provide legal advice and assistance (both litigation and non-litigation) and public relations, as well as managing the planning and implementation of corporate social responsibility (CSR) programs

In addition, the implementation of the function of the office is also included in the legal & compliance function and functions as a Public Relations & Administration, as follows:

The Function as Legal & Compliance Officer

- Provide legal considerations on policies taken by the Directors and/or other management officials in the company.
- Resolve legal problems faced by companies and/or workers who are faced with a legal process in relation with carrying out their duties, both inside and outside the court.
- Fulfilling the formalities, legality, ownership of company assets and complete licensing documents for the continuity of business and company
- Provide legal opinions and legal advice in Company policies;
- Carrying out activities and reporting on the development, guidance, implementation and enforcement of GCG principles, including the implementation of the Whistleblower System program.

The Function as Public Relations & Administration

- Maintain, enhance, build the image, reputation and credibility of the Company in the eyes of stakeholders.
- Periodically provide information needed by the

- berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- Sebagai wakil Perusahaan dalam memberikan informasi yang diperlukan *stakeholder*;
- Menjalankan kewajiban Perusahaan dalam tanggung jawab sosial (CSR);
- Menatausahakan kearsipan serta penyimpanan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar Pemegang Saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Kriteria

Kriteria Sekretaris Perusahaan antara lain wajib memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan, hubungan masyarakat dan keterampilan administratif. Sekretaris Perusahaan juga harus memiliki pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

Persyaratan

Sebagai kualifikasi Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki pendidikan dan pengalaman yang mendukung.**
- Memiliki kompetensi teknis.**
Meliputi regulasi pelayaran, pengetahuan dan keterampilan hukum, pengelolaan risiko, perencanaan strategis dan kemampuan komunikasi.
- Memiliki kompetensi generik.**
Meliputi pengetahuan bisnis, anggaran, perencanaan tenaga kerja, pengelolaan kinerja, teknik pelatihan dan konseling.
- Memiliki kompetensi perilaku.**
Mencakup membangun kepercayaan, aksi inisiasi, membuat keputusan, standar kerja, fokus pelanggan, membangun kerja positif, membangun relasi, pelatihan, pendelegasian tanggung jawab, *entrepreneurial insight*, serta perencanaan dan organisasi.

Board of Directors, and the Board of Commissioners/ Committee and/or at any time when requested.

- As a representative of the Company in providing information needed by stakeholders.
- Carry out the Company's obligations in social responsibility (CSR).
- Administering and storing Company documents, including but not limited to the list of Shareholders, special lists and minutes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners Meetings and GMS.

Criteria

Criteria for the Corporate Secretary must include knowledge of regulations relating to the Company, public relations and administrative skills. The Corporate Secretary must also have experience that supports the implementation of his duties.

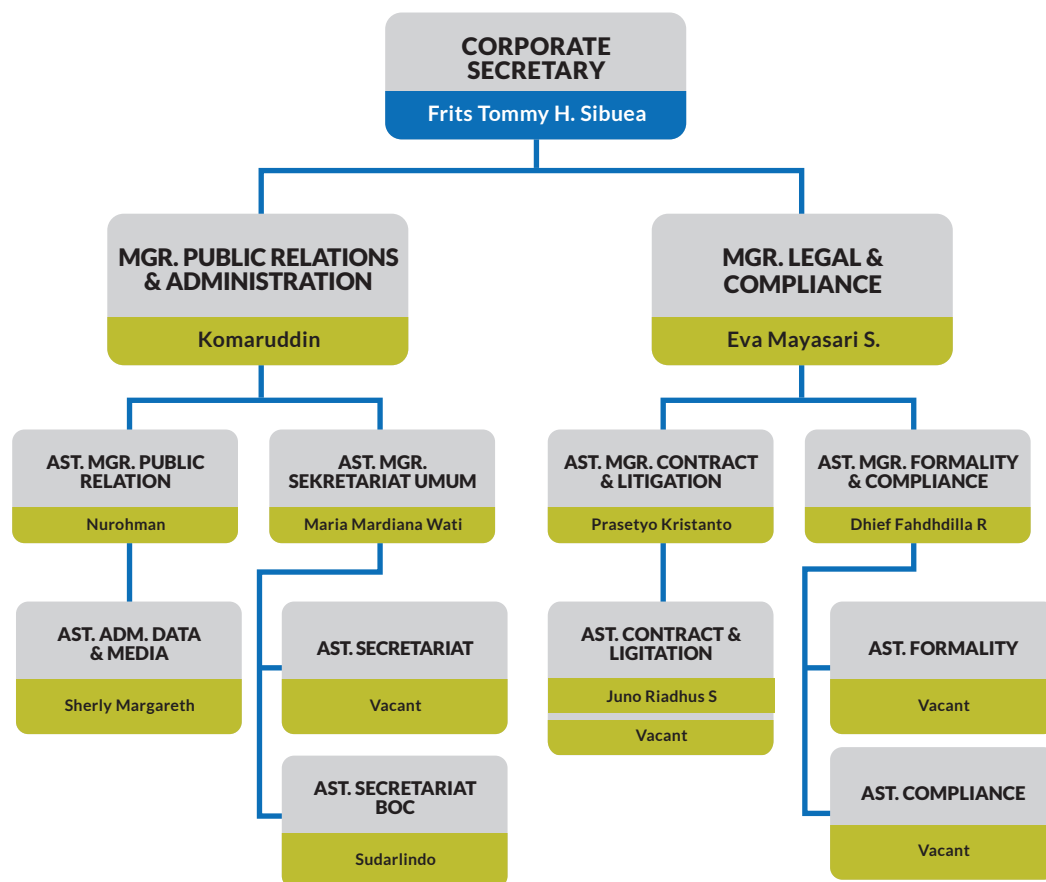
Requirements

As a qualification for the Corporate Secretary, the Corporate Secretary must meet the following requirements:

- Having supporting education and experience.
- Having technical competency Covering shipping regulations, knowledge and skills in law, risk management, strategic planning, and communication capability.
- Having generic competency. Inclusive of knowledge on business, budget, manpower planning, performance management, training and counselling techniques.
- Having behavior competence Inclusive of trust building, initiative action, decision making, work standards, customer-focused, positive work behavior, relations development, trainings, responsibility delegation, entrepreneurial insight, as well as planning and organization.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan PTK bertanggung jawab kepada Direksi atas pelaksanaan tugasnya. Adapun struktur organisasi struktur unit *Corporate Secretary* adalah sebagai berikut:



Corporate Secretary Organizational Structure

The PTK Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors for carrying out his duties. The organizational structure of the Corporate Secretary unit is as follows:

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Pejabat sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 dijabat oleh Rifky Rakhman Yusuf untuk periode hingga November 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: SKMJ-00064/K20300/2020-S8 tentang Mutasi Jabatan dari VP HCM Downstream PT Pertamina (Persero) menjadi Corporate Secretary PT Pertamina Trans Kontinental yang menjabat efektif sejak Juli 2020 dan Frits Tommy H. Sibuea dari November 2020 hingga saat ini berdasarkan

Corporate Secretary Executives

Pejabat sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 dijabat oleh Rifky Rakhman Yusuf untuk periode hingga November 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: SKMJ-00064/K20300/2020-S8 tentang Mutasi Jabatan dari VP HCM Downstream PT Pertamina (Persero) menjadi Corporate Secretary PT Pertamina Trans Kontinental yang menjabat efektif sejak Juli 2020 dan Frits Tommy H. Sibuea dari November 2020 hingga saat ini berdasarkan

Keputusan No.SKMJ-0003/K20500/2020-S8 tentang Mutasi Jabatan dari Manager Relations PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur menjadi Corporate Secretary PT Pertamina Trans Kontinental yang menjabat efektif sejak 1 Desember 2020. Berikut Profil Sekretaris Perusahaan PTK periode 2020.

Keputusan No.SKMJ-0003/K20500/2020-S8 tentang Mutasi Jabatan dari Manager Relations PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur menjadi Corporate Secretary PT Pertamina Trans Kontinental yang menjabat efektif sejak 1 Desember 2020. Berikut Profil Sekretaris Perusahaan PTK periode 2020.



Berusia 46 tahun, Warga negara Indonesia dan berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1974. Efektif diangkat menjadi Sekretaris Perusahaan pada Juli 2020. Memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Parahyangan Bandung tahun 1998. Sebelum menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina Trans Kontinental, pernah menjabat sebagai Region Manager Comm, Rel & CSR Sumbagsel PT Pertamina (Persero).

46 years old, Indonesian citizen and domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on October 18, 1974. Effectively appointed as Corporate Secretary in July 2020. Obtained a Bachelor's degree in International Relations from Parahyangan University Bandung in 1998. Previously as Region Manager Comm, Rel & CSR Sumbagsel PT. Pertamina (Persero) before assigned as Corporate Secretary Pertamina Trans Kontinental.



Berusia 52 tahun, Warga negara Indonesia dan berdomisili di Tangerang. Beliau lahir di Pekanbaru pada tanggal 2 Juni 1968. Beliau efektif diangkat

52 years old, Indonesian citizen and domiciled in Tangerang. He was born in Pekanbaru on June 2, 1968. He was effectively appointed as Corporate

menjadi *Corporate Secretary* pada 1 Desember 2020. Beliau memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 1993 dan Pasca Sarjana dari Bond University Australia tahun 1999. Sebelum menjabat sebagai *Corporate Secretary* Pertamina Trans Kontinental, pernah menjabat sebagai Manager Relations - PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Pedoman kerja Sekretaris Perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaannya, antara lain:

- *Code of Corporate Governance* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. Pdm-002/F0000/2016-SO.
- *Board Manual*.
- Uraian jabatan *Corporate Secretary* yang telah ditetapkan manajemen.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Merencanakan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi rencana kerja dan sistem tata kerja *Corporate Secretary*;
- Membangun, memelihara dan meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan, serta meminimalisir dan menghindarkan Perusahaan dari timbulnya citra negatif, permasalahan hukum baik litigasi dan non-litigasi serta kehumasan yang berdampak pada Perusahaan;
- Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan Perusahaan, pengelolaan arsip, dokumen asli, dan laporan-laporan Perusahaan;
- Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) serta membuat risalah rapat Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;

Secretary on December 1, 2020. He obtained a Bachelor of Communication degree from Padjajaran University Bandung in 1993 and a Postgraduate degree from Bond University Australia in 1999. Prior to serving as *Corporate Secretary* of Pertamina Trans Kontinental, previously served as Manager Relations - PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur.

Corporate Secretary Work Guideline

In performing its work, the *Corporate Secretary* refers to a number of work procedures, among which are:

- *Code of Corporate Governance* which was established based on the President Director Decision Number Pdm-002/F0000/2016-SO.
- *Board Manual*.
- Job description of *Corporate Secretary* determined by the management.

Duties, Responsibilities, and Authority of Corporate Secretary

Duties and responsibilities of the *Corporate Secretary* are as follows:

- Planning, directing, monitoring and evaluating the work plan and work procedure of *Corporate Secretary*;
- Building, maintaining, heightening the Company's positive image in the eyes of public and stakeholders, as well as minimizing and avoiding the Company from potential negative image, litigation and non-litigation law related issued, as well as public relations impacting the Company;
- Organizing administrative activities for the Company's secretariat affairs, documents, and reports of the Company;
- Prepare meetings including material for the meeting (*briefing sheet*) and make minutes of meetings of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company;

- Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan Pemerintah, baik secara internal maupun eksternal Perusahaan;
- Mengendalikan data dan informasi manajemen yang akurat dan valid bagi kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham secara periodik dan tahunan;
- Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program-program CSR secara efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, sebagai bagian dari kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat;
- Memastikan ter-updatenya peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan proses bisnis dan produk (*compliance issue*), serta perizinan dan aspek hukum lain bagi Perusahaan dan anak perusahaan secara tepat waktu;
- Memastikan laporan kegiatan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG.

Wewenang Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki kewenangan yaitu:

- Atas sepengetahuan Direksi mengadakan dan membina hubungan dengan para pihak sebagai upaya meningkatkan loyalitas para *stakeholder*;
- Memberikan keterangan pers (*press release*) mengenai kebijakan perusahaan;
- Memberikan pertimbangan hukum kepada Direksi dalam merumuskan suatu peraturan atas kebijakan;
- Merekomendasikan konsep perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh Direksi;
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulan perusahaan, Laporan Manajemen, Annual Report serta RJPP;
- Atas persetujuan Direksi mewakili perusahaan dalam rangka menyelesaikan perselisihan hukum dengan pihak lain di dalam maupun di luar pengadilan.

- Communicating policies of the Company and Government, either internal or external of the Company;
- Controlling accurate and valid management data and information for the interest of the Company and Shareholders periodically and annually;
- Evaluating and monitoring the implementation of CSR programs effectively, as per the established and on- target plans, as part of corporate compliance as well as elevating the Company's positive image in the public eyes;
- Ensuring on time updates of laws and regulations and other legislations related to business process and products (*compliance issue*), as well as license and other legal aspects for the Company and subsidiaries;
- Ensuring the GCG principles development, fostering, implementation and enforcement activities report.

Corporate Secretary Authority

The Corporate Secretary holds the authority, as follows:

- At the knowledge of the Board of Directors establishes and fosters relationships with parties in an effort to increase the loyalty of stakeholders.
- Provide a press statement (*press release*) regarding company policy.
- Provide legal considerations to the Board of Directors in formulating a regulation on policy.
- Recommend the concept of a cooperation agreement that will be signed by the Board of Directors
- Coordinate the preparation of company quarterly reports, Management Reports, Annual Reports and RJPP
- With the approval of the Board of Directors representing the company in order to resolve legal disputes with other parties inside and outside the court.

Pedoman Kerja dan Laporan Berkala Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memberikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta tugas lainnya dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi. Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi rencana kerja dan sistem tata kerja *Corporate Secretary*;
2. Membangun, memelihara dan meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan, serta meminimalisir dan menghindarkan Perusahaan dari timbulnya citra negatif, permasalahan hukum litigasi dan non-litigasi serta kehumasan yang berdampak pada Perusahaan;
3. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan Perusahaan, pengelolaan arsip, dokumen asli, dan laporan-laporan Perusahaan;
4. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) serta membuat risalah rapat Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
5. Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan Pemerintah, baik secara internal maupun eksternal Perusahaan;
6. Mengendalikan data dan informasi manajemen yang akurat dan valid bagi kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham secara periodik dan tahunan;
7. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program-program CSR secara efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, sebagai bagian dari kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat;
8. Memastikan ter-updatenya peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan proses bisnis dan produk

Work Guidelines and Periodic Reports of The Corporate Secretary

The Corporate Secretary provides periodic reports on the implementation of his duties and responsibilities as well as other duties in assisting the implementation of the duties of the Board of Directors. Throughout 2020, the Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities with the following details:

1. Planning, directing, monitoring and evaluating the work plan and work system of the Corporate Secretary;
2. Building, maintaining and enhancing the Company's positive image in the eyes of the public and stakeholders, as well as minimizing and avoiding the Company from the emergence of negative images, litigation and non-litigation legal issues and public relations that have an impact on the Company;
3. Carrying out corporate secretarial administration activities, managing archives, original documents, and company reports;
4. Prepare meetings including meeting materials (*briefing sheets*) and prepare minutes of meetings of the Directors in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
5. Communicating Company and Government policies, both internally and externally of the Company;
6. Control data and management information that is accurate and valid for the interests of the Company and the Shareholders periodically and annually;
7. Evaluate and monitor the implementation of CSR programs effectively, in accordance with pre determined plans and on target, as part of corporate compliance while enhancing the Company's positive image in the eyes of the public;
8. Ensuring the updating of laws and regulations relating to business processes and products (compliance issues), as well as licensing and

(compliance issue), serta perizinan dan aspek hukum lain bagi Perusahaan dan Anak Perusahaan secara tepat waktu;

9. Memastikan laporan kegiatan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG.

Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melakukan program kerja yang terdiri dari berbagai kegiatan dan penyampaian laporan. Realisasi program kerja Sekretaris Perusahaan tersebut antara lain :

1. Training/Pelatihan :

Mengikuti berbagai pelatihan/training dalam rangka Pengembangan Kompetensi Pelatihan/training Sekretaris Perusahaan tahun 2020.

2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) :

Selama tahun 2020, PTK telah melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan 9 (sembilan) keputusan RUPS secara sirkuler yang telah di jelaskan pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bagian Rapat Umum Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan ini.

3. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris :

Selama tahun 2020, Direksi telah mengadakan rapat internal Direksi sebanyak 12 kali rapat dan 11 kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. Adapun rincian penyelenggaraan Rapat Direksi telah diuraikan pada Bab Direksi Laporan Tahunan ini. Sedangkan Rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris telah diuraikan pada Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

4. Penyampaian laporan berkala :

Sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap tahunnya kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

other legal aspects for the Company and its subsidiaries in a timely manner;

9. Ensuring reports on the activities of developing, guiding, implementing and enforcing GCG principles.

In 2020, the Corporate Secretary has carried out a work program consisting of various activities and submission of reports. The realization of the work program for the Corporate Secretary includes:

1. Training :

Participating in various trainings in the context of Competency Development for Corporate Secretary Training in 2020.

2. The General Meeting of Shareholders (GMS):

During 2020, the PTK has held the Annual GMS for 1 (one) time and issued 9 (nine) resolutions of the GMS in a circular manner which has been described in the Chapter of Corporate Governance, Sub Division of General Meeting of Shareholders in this Annual Report.

3. Organizing and documenting the Board of Directors Meeting and Board of Directors Meeting with the Board of Commissioners:

During 2020, the Board of Directors held as many as 12 meetings and 11 joint meetings with the Board of Commissioners. The details of the implementation of the Board of Directors Meeting are described in the Board of Directors Chapter of this Annual Report. Meanwhile, the meeting with the Board of Directors and the Board of Commissioners is described in the Board of Commissioners Chapter in this Annual Report.

4. Submission of periodic reports:

As an accountability for the implementation of his duties, the Corporate Secretary has prepared and submitted a Periodic Report annually to the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders.

Penyampaian Laporan Berkala

Submission of Periodic Reports

Jenis Laporan Type of Report	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Pemegang Saham Shareholders
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2020 Management Report Quarter I 2020	✓	✓	✓
Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2020 2020 Quarterly Management Report II	✓	✓	✓
Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2020 Management Report 3rd Quarter 2020	✓	✓	✓
Laporan Manajemen tahun 2020 Management Report 2020	✓	✓	✓
Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 Annual Report 2020	✓	✓	✓
Laporan Sekretaris Perusahaan Semester I tahun 2020 Report of the Corporate Secretary Semester I of 2020	✓	✓	✓
Laporan Sekretaris Perusahaan Semester II tahun 2020 Report of the Corporate Secretary for Semester II 2020	✓	✓	✓

- Menyusun dan me-review pedoman Tata Laksana Surat dan Kearsipan PTK, serta mensosialisasikan dan memantau implementasinya.
- Pelaksanaan Program CSR :**
Selama tahun 2020 PTK telah melaksanakan berbagai program CSR sebagaimana disampaikan pada Bab Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam laporan tahunan ini.
- Menerbitkan Siaran Pers :**
Sekretaris Perusahaan selalu berupaya membangun komunikasi positif dan persepsi publik di antaranya melalui siaran pers.

- Compile and review the guidelines for the Procedure for Letters and Archives of PTK, as well as to socialize and monitor their implementation.
- Implementation of CSR Programs:**
During 2020 PTK has implemented various CSR programs as stated in the Chapter of the Corporate Social Responsibility Report in this annual report.
- Publish a Press Release:**
The Corporate Secretary always strives to build positive communication and public perception, among others, through press releases.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

SDM Sekretaris Perusahaan senantiasa melakukan *upgrade* pengetahuan maupun kemampuan pada setiap tahunnya, guna meningkatkan kualitas

Corporate Secretary Training

The Corporate Secretary personnel always upgrade their knowledge and abilities every year, in order to improve the quality of his role in helping the Board

perannya dalam membantu Direksi untuk mengembangkan roda bisnis Perusahaan.

of Directors to develop the Company's business operations.

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Throughout 2020, the Corporate Secretary participated in the competency development programs, as follows:

Program Kompetensi Sekretaris Perusahaan 2020 2020 Corporate Secretary Competency Program

No	Materi Pelatihan Materi Pelatihan	Peserta Peserta	Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan
1	Pelatihan Asesmen Slas Batch - II Knowledge Sharing - Transko.	Komaruddin	3 - 4 Desember
2	Knowledge Sharing - Transko Academy , Optimalisasi Pengawasan Perkembangan Pembangunan Kapal Dengan Implementasi Aplikasi Port Di PT Pertamina Trans Kontinental. Academy, Optimalisasi Pengawasan Perkembangan Pembangunan Kapal Dengan Implementasi Aplikasi Port Di PT Pertamina Trans Kontinental	Komaruddin	18 Desember
3	Pelatihan Asesmen Olas Batch - IV Pelatihan Asesmen Olas Batch - IV	Nurohman	23-24 Desember
4	5S/5R Untuk Peningkatan Kinerja HSE Dan Produktivitas Di Tempat Kerja. 5S/5R Untuk Peningkatan Kinerja HSE Dan Produktivitas Di Tempat Kerja	Sherly Margareth Eva Mayasari Saragi	2 April
5	IMS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Awareness & Internal Auditor. IMS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Awareness & Internal Auditor	Sherly Margareth Juno Riadhus Shalihin	14-18 September
6	Risk Management & Knowledge. Risk Management & Knowledge	Maria Mardiana Wati Andika Aditya	17 - 19 Februari
7	Knowledge Sharing - Transko Academy , Sinergi Seluruh Perwira PTK Untuk Mencapai Target <i>Safety</i> dan <i>Operational Excellent</i> Kapal Milik sebagai Kesatuan Profit Center. Knowledge Sharing - Transko Academy, Sinergi Seluruh Perwira PTK Untuk Mencapai Target Safety dan Operational Excellent Kapal Milik sebagai Kesatuan Profit Center	Maria Mardiana Wati	2 November
8	Pelatihan Asesmen Olas Batch - I Pelatihan Asesmen Olas Batch - I	Maria Mardiana Wati Prasetyo Kristanto	15-17 Desember
9	Quality Service Excellence Quality Service Excellence	Sudarlindo	20 - 21 Februari

Program Kompetensi Sekretaris Perusahaan 2020

2020 Corporate Secretary Competency Program

No	Materi Pelatihan Materi Pelatihan	Peserta Peserta	Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan
10	Pelatihan SUPREME (Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence) SUPREME Training (Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence)	Sherly Margareth Juno Riadhus Shalihin	22 - 24 Juli
11	Knowledge Sharing - Transko Academy, Meningkatkan Percepatan Proses Penyelesaian Piutang Usaha Melalui Monitoring Kualitas Pekerjaan Vendor, Ketepatan Waktu Penagihan, Serta Komitmen Pembayaran Vendor. Knowledge Sharing - Transko Academy, Meningkatkan Percepatan Proses Penyelesaian Piutang Usaha Melalui Monitoring Kualitas Pekerjaan Vendor, Ketepatan Waktu Penagihan, Serta Komitmen Pembayaran Vendor.	Eva Mayasari Saragi	9 Oktober
12	Pelatihan Asesmen Slas Batch - I Pelatihan Asesmen Slas Batch - I	Eva Mayasari Saragi	20 -23 November
14	Pemahaman TKDN Pemahaman TKDN	Dhief Fahdhilla Ramadhani	21-22 September
15	Pelatihan Asesmen Olas Batch - II Pelatihan Asesmen Olas Batch - II	Dhief Fahdhilla Ramadhani	17-21 Desember

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan strategi maupun rencana kerja terkait penyampaian informasi kepada publik. Dalam pelaksanaan internalisasi GCG, sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan secara berkesinambungan dalam upaya membudayakan penerapan GCG di seluruh lingkungan Pertamina Trans Kontinental. Evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan diukur dengan KPI Sekretaris Perusahaan.

Corporate Secretary Performance Assessment

The Corporate Secretary has implemented a strategy and work plan related to the public information disclosure. In the GCG internalization activity, the Corporate Secretary has carried out various activities on an ongoing basis in an effort to civilize the implementation of GCG throughout the Pertamina Trans Kontinental circumstances. Evaluation of the performance of the Corporate Secretary is measured by the KPI for the Corporate Secretary.

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Internal Audit merupakan salah satu bagian dari organisasi yang bertugas melakukan kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Internal Audit is one part of the organization that is tasked with providing independent and objective assurance and consulting activities, with the aim of increasing value and improving the Company's operations, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and the process of good corporate governance (*Good Corporate Governance*).

Dasar Penerapan Pengawasan Internal

Fungsi Internal Audit PTK dibentuk berdasarkan :

1. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Bab VI pasal 67, 68 dan 69 dengan sebutan fungsi Internal Audit .
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.
3. Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN No S-168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan *Good Corporate*

Basic Implementation of Internal Control

The PTK Internal Audit function is formed based on:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises Chapter VI articles 67, 68 and 69 with the title Internal Audit function.
2. Regulation of the Minister of State for SOEs Number: PER-01 / MBU / 2011 dated 1 August 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN, as last amended by Regulation of the Minister of BUMN Number: PER-09 / MBU / 2012 dated July 6, 2012 concerning the Amendment to the Minister of BUMN Regulation Number: PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN.
3. Letter of the Secretary of the State Ministry for SOEs No S-168 / MBU / 2008 dated 27 June 2008 concerning indicators/parameters of assessment and evaluation of the implementation of Good Corporate Governance which was updated by

Governance yang diperbaharui dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012.

4. Anggaran Dasar Perusahaan

the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number: SK-16 / S.MBU / 2012.

4. Company Articles of Association

Visi dan Misi Fungsi Audit Internal

Visi

Menjadi mitra strategis bagi Manajemen sesuai dengan tata nilai unggulan dalam mencapai sasaran perusahaan jasa maritim yang terintegrasi dengan skala global pada tahun 2026.

Misi

1. Mendorong terciptanya efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.
2. Mendorong pelaksanaan *Control Self Assessment* (CSA) pada setiap fungsi di lingkungan perusahaan dalam mengidentifikasi risiko dan sistem pengendalian internal.
3. Meningkatkan kompetensi menjadi Auditor Internal Profesional

Tujuan

1. Membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola Perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal.
2. Membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan *advice*, pertimbangan dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.

Value

1. *Powerful* (keberadaan Internal Audit secara tegas diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN).
2. *United* (Satu kesatuan dan berinteraksi dalam wadah Internal Audit yang solid).

Vision and Mission of The Internal Audit Function

Vision

To become a strategic partner for management in accordance with superior values in achieving the target of integrated maritime service companies on a global scale by 2026.

Mission

1. Encouraging effectivity in risk management, control, and Governance process.
2. Promoting Control Self Assessment (CSA) implementation to the Function in identifying the risks and internal control system
3. Increasing functional supervisory competence.

Purpose

1. Assist the Company to achieve its objectives effectively and efficiently by evaluating and recommending improvements in the effectiveness of corporate governance, risk management and internal control;
2. Assist the management of the Company and other stakeholders by providing advice, considerations and recommendations that are useful for increasing the effectiveness and efficiency of the Company.

Value

1. *Powerful* (the existence of Internal Audit is expressly regulated in Law No. 19 of 2003 on BUMN).
2. *United* (One unit and interacting in a solid Internal Audit).

3. *Respected* (Bermartabat serta diakui hasil kinerjanya).
4. *Energized* (Auditor yang energik dan tersertifikasi dengan kualifikasi yang membanggakan).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengendalian Internal Audit terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - a. Integritas dan nilai etika dan kompetensi pekerja, Filosofi dan gaya Manajemen.
 - b. Pengoperasian, pengembangan sumber daya manusia dan perhatian dan arahan.
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai dan mengelola risiko usaha.
3. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan, mengenai kewenangan, otorisasi, rekonsiliasi dan penilaian atas kinerja.
4. Sistem Informasi dan komunikasi mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan.
5. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
6. Menjadi "*Counter Part*" serta mendukung pihak eksternal dalam bidang yang sama untuk kepentingan perusahaan.

Lingkungan Perusahaan yang menjadi lingkup kerja Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Operasi
2. Direktorat Keuangan
3. Direktorat Pemasaran
4. *Corporate Secretary*
5. Fungsi-fungsi yang secara struktural berada dibawah Direktur Utama
6. Kantor Cabang, Anak Perusahaan serta badan Usaha yang dibentuk

3. *Respected* (Dignified and recognized for its performance results).
4. *Energized* (energetic and certified auditor with proud qualifications).

Scope

Scope of Internal Audit control consists of:

1. *Adisciplined and structured control environment, consisting of:*
 - a. Integrity and ethical values as well as employee competence, philosophy and management style
 - b. Operation, development of human resources as well as attention and direction;
2. Risk assessment and management, a process to identify, analyze, assess and manage business risks;
3. Control activities, namely actions taken in a process of controlling the activities of the company at each level and unit in the organizational structure of the company, concerning authority, authorization, reconciliation and evaluation of performance;
4. Information and communication system regarding operational, financial, and compliance with the rules and regulations prevail to the company;
5. Monitoring, namely the process of evaluating the quality of the internal control system at each level and unit of the company's organizational structure, so that it can be carried out optimally;
6. Become a "*Counter Part*" and support external parties in the same field for the benefit of the Company.

The Company's environment as scope of work of Internal Audit is as follows:

1. Directorate of Operations;
2. Directorate of Finance;
3. Directorate of Marketing;
4. *Corporate Secretary*;
5. Structural functions under the President Director;
6. Branch Offices, Subsidiaries and Business Entities formed.

Kode Etik Internal Audit

1. Integritas (*Integrity*)

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental menghasilkan kepercayaan dan menyediakan dasar kehandalan penilaian yaitu: bersikap jujur, obyektif, cermat, loyalitas, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wajib menghormati, mendukung nama baik perusahaan dari sisi hukum maupun etika.

2. Obyektivitas (*Objectivity*)

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental harus dapat menjalankan obyektivitas yang profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diaudit. Auditor membuat penilaian dengan kondisi yang relevan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau oleh pihak lain dalam membuat penilaian.

3. Konfidensial (*Confidentiality*)

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi pemberi informasi kecuali ada kewajiban hukum atau profesi yang mengharuskan dilakukan hal tersebut dan auditor wajib berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang dibutuhkan pada saat menjalankan tugas.

4. Kompetensi (*Competency*)

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental harus menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman secara profesional dalam melaksanakan tugas. Untuk itu auditor internal wajib secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan, efektivitas dan kualitas layanan sesuai dengan standar profesi auditor internal serta kebijakan dan peraturan perusahaan.

5. Berwawasan Luas dan Jauh Kedepan (*Visionary*)

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental harus mampu mengantisipasi potensi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan dan membangun komunikasi yang efektif antar auditor Perusahaan.

Internal Audit Code of Ethics

1. Integrity

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental earns trust and provides a basis for the reliability of the assessment, namely: being honest, objective, careful, loyal, as well as being responsible for carrying out duties and being obliged to respect, support the company's reputation from the legal and ethical sides;

2. Objectivity

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental shall be able to carry out professional objectivity in gathering, evaluating and communicating information about the audited activity or process. The auditors make prepare an audit with relevant conditions without being influenced by personal interests or by other parties in making judgments;

3. Confidentiality

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental respects the value and ownership of information obtained and does not disclose information without the authorization of the information provider unless there is a legal or professional obligation that requires it to be done and the auditor must be careful in using and maintaining the required information when performing the duties;

4. Competency

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental shall address professional knowledge, expertise and experience in carrying out its duties. Therefore, the internal auditors are required to continuously improve the ability, effectiveness and quality of services in accordance with the professional standards of internal auditors and company policies and regulations;

5. Visionary

PT Pertamina Trans Kontinental Internal Audit must be able to anticipate the potential for various problems that can affect the achievement of Company's goals and build effective communication between the Company's auditors.

6. Sanksi

Terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik di atas, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan.

Independensi

1. Fungsi Internal Audit dipimpin oleh seorang *Head of Internal Audit* yang secara struktural bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Komite Audit. Fungsi Internal Audit di dalam struktur organisasi Perseroan berada di leher Direktur Utama.
2. *Head of Internal Audit* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapat dari *Head of Internal Audit* dan perusahaan.
4. Auditor Internal dalam Fungsi bertanggung jawab secara langsung kepada *Head of Internal Audit*.
5. Dalam melakukan pemeriksaan, dibentuk Tim Audit berdasarkan surat tugas lengkap dengan jabatan fungsional dan jangka waktu yang ditentukan dengan susunan Tim Pemeriksa yang terdiri dari Pengawas, Ketua Tim dan Anggota Tim.
6. Fungsi IA dilarang terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mengganggu independensi Perusahaan.

Wewenang

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental mempunyai wewenang untuk:

1. Memberikan masukan/*advice* kepada Direktur Utama dalam hal pengelolaan perusahaan.
2. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.

6. Sanctions

Workers who violate the above code of conduct will be sanctioned according to company regulations.

Independence

1. The Internal Audit function is led by a Head of Internal Audit who is structurally responsible to the President Director and has a functional relationship with the Audit Committee. The Internal Audit function within the Company's organizational structure lies at the neck of the President Director.
2. The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
3. The appointment and dismissal of the Internal Auditor is carried out by considering the opinions of the Head of Internal Audit and the company.
4. Internal Auditor in function is directly responsible to the Head of Internal Audit.
5. In conducting the examination, an Audit Team is formed based on a letter of assignment complete with functional positions and a period determined by the composition of the Examining Team consisting of Supervisors, Team Leaders and Team Members.
6. The IA function is prohibited from being involved in the Company's operational activities which could interfere with the Company's independence.

Authority

The following is the authority of the Internal Audit Function

1. Providing the President Director with inputs in the Company's managerial affairs;
2. Preparing, adjusting, and implementing internal audit activities, such as determining the procedure and scope of audit work;

3. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan pekerja dalam rangka proses pelaksanaan audit.
4. Akses tidak terbatas terhadap semua dokumen, pencatatan dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
5. Meminta bantuan tenaga pemeriksa eksternal dalam hal tidak tersedia di organisasi Internal audit dengan biaya perusahaan.
6. Memiliki akses kepada Komite Audit.

Wewenang Internal Audit sebatas pada penilaian dan analisa atas aktivitas yang direview/diaudit. Internal Audit tidak mempunyai kewenangan dalam hal pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang diaudit.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun program kerja audit secara tahunan dan anggaran untuk mendapat persetujuan Direktur Utama.
2. Melaksanakan "Assurance" yaitu melakukan pengujian secara objektif berdasarkan bukti, bertujuan memberikan suatu penilaian yang independen atas pengelolaan risiko, pengendalian atau proses tata kelola organisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
3. Melakukan kegiatan "Consulting" yaitu memberikan jasa konsultasi yang dibutuhkan oleh Manajemen yang sifat dan cakupan penugasannya telah disepakati dengan tujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan pengelolaan risiko, pengendalian dan proses organisasi.
4. Sebagai "katalisator" yaitu agen perubahan (*Agent of Change*) dan pengendali potensi pemborosan biaya (inefisiensi).
5. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai dengan rencana audit tahunan maupun penugasan non rutin/khusus, dengan melakukan analisa evaluasi dan rekomendasi terhadap sistem dan prosedur

3. Inquiring information and explanation to all management levels and employees in the process of audit;
4. Having unlimited access to all documents, records, personal and physical, information over the audited objects in order to obtain data and information related to the implementation of duties;
5. Requesting an assistance from external auditor in the event the Internal Audit organization is unavailable to acquire at the expense of the Company.
6. Having access to the Audit Committee.

Authority of the Internal Audit is limited on the assessment and analysis of the activities that are being reviewed/audited. The Internal Audit does not have the authority in terms of implementation and responsibility for the audited activity.

Duties and responsibilities

1. Arranging the Annual Audit Work Program (PKPT) and its budget;
2. Carry out "Assurance", namely testing objectively based on evidence, aimed at providing an independent assessment of risk management, control or organizational governance processes so as to provide added value to the company;
3. Conducting "Consulting" activities, namely providing consultancy services required by Management with the agreed nature and scope of the assignment with the aim of providing added value and improving risk management, control and organizational processes;
4. As a "catalyst", which is an agent of change and a controller of potential costs (inefficiency);
5. Conduct regular audit based on the PKPT (Annual Audit Work Program) and non-PKPT based on the assignment of the President Director, by analyzing and evaluating the company's systems and procedures and operations on all functions and activities of the company on an ongoing basis;

- serta operasi perusahaan pada semua fungsi dan kegiatan perusahaan secara berkelanjutan.
6. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada pihak – pihak terkait (Komite Audit dan Auditee).
 7. Memonitor tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sampai dengan pos pembahasan audit ditindaklanjuti sesuai disposisi Direktur Utama.
 8. Meningkatkan kompetensi Auditor Internal melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan staf, strategi dan rencana audit.
 9. Terdapat 2 (dua) laporan hasil pemeriksaan antara lain :
 - a. Pemeriksaan Umum sesuai dengan rencana audit tahunan yang dilaporkan kepada Direktur Utama, Fungsi Terkait dan Komite Audit.
 - b. Pemeriksaan Non Rutin/ Khusus yang dilaporkan hanya ke Direktur Utama.

Standar Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan audit, *Head of Internal Audit* dan seluruh Perwira Internal Audit harus menaati Sistem Tata Kerja dan Kode Etik Internal Audit yang mengacu kepada *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing* yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors*, serta kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku di PT Pertamina Trans Kontinental.

Kedudukan dan Kualifikasi

Kedudukan internal audit berada langsung di bawah Direktur Utama, sesuai dengan SK Kpts-019/C0000/2016-S0 tentang struktur organisasi kantor pusat dan kantor cabang PT Pertamina Trans Kontinental tanggal 1 Desember 2016. Fungsi Internal audit bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen kepada segenap auditee di Perusahaan, dan bekerja berdasarkan rencana audit tahunan yang telah disetujui Direktur Utama dan ditinjau Dewan Komisaris. Fungsi Internal

6. Submitting the Audit Report (LHP) to the President Director with a copy to relevant parties (Audit Committee and the Auditee);
7. Oversee follow-up to the Audit Report (LHP), until the audit discussion pes followed up according to the position of the President Director;
8. Develop the competency of of Internal Auditors through education and training;
9. There are 2 (two) type of audit reports, namely:
 - a. General Audit in accordance with PKPT program reported to the President Director, Related Functions and Audit Committee;
 - a. Special Audit/Non PKPT program reported only to the President Director.

Implementation Standards

In carrying out audit activities, the Head of Internal Audit and all Internal Audit Officers must comply with the Internal Audit Work System and Code of Ethics which refer to the International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing set by The Institute of Internal Auditors, as well as other relevant policies. and is valid at PT Pertamina Trans Kontinental.

Position and Qualification

The internal audit position is directly under the President Director, in accordance with Decree Kpts-019/C0000/2016-S0 concerning the organizational structure of the head PT Pertamina Trans Kontinental head office and branch offices on December 1, 2016. The Internal Audit Function is responsible for carrying out independent audits of all auditee in the Company, and work based on an annual audit plan that has been approved by the President Director and reviewed by the Board of Commissioners. The

audit dipimpin Head of Internal Audit, Senior Auditor, Auditor, Junior Auditor dan Sekretaris.

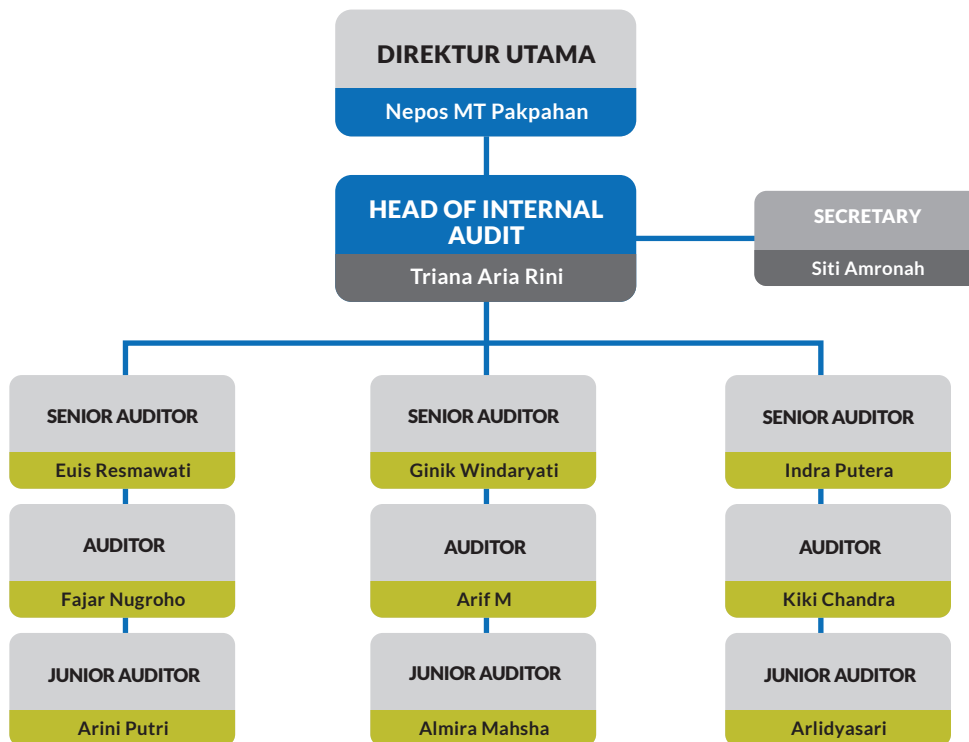
Internal Audit function is led by the Head of Internal Audit, Senior Auditors, Auditors, Junior Auditors, and Secretary.

Struktur Organisasi Unit Audit Internal

Berikut adalah struktur organisasi Unit Internal Audit PTK:

Internal Audit Unit Organization Structure

Organization structure of Internal Audit Unit in PTK is as follows:



Independensi Audit Internal

Fungsi Internal Audit bersifat independen dan tidak memiliki keterkaitan kerja, tanggung jawab, maupun kepentingan tertentu. Sejalan dengan kedudukan dan sifat independen, maka Internal Audit dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris

Independency of Internal Audit

The Internal Audit function is independent and does not have specific work, responsibilities or interests. In line with the position and nature of independency, the Internal Audit is eligible to communicate directly with the Board of Commissioners and the Audit

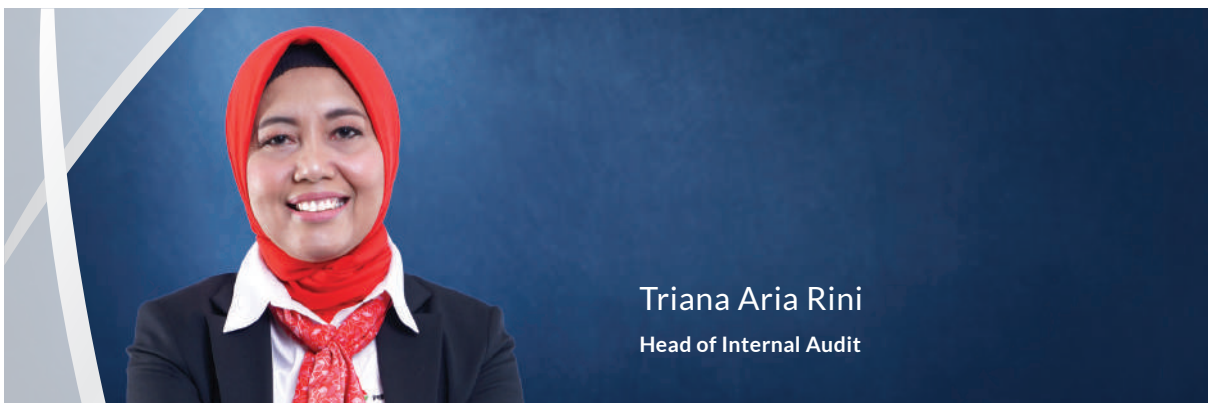
dan Komite Audit, untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Audit Internal dipimpin oleh *Head of Internal Audit* yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat mengusulkan penggantian Head of Internal Audit setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, apabila ditemukan Head of Internal Audit lalai dan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Piagam ini. Para internal auditor bertanggung jawab langsung kepada Head of Internal Audit.

Profil Head of Internal Audit

Perusahaan mengangkat Triana Aria Rini sebagai Head of Internal Audit berdasarkan KptsP-049/C0000/2017-S22 yang menjabat hingga 01 Desember 2017 - sekarang



Committee, to inform various matters related to result of the audit.

Appointment and Dismission

Internal Audit is led by a Head of Internal Audit who is appointed and terminated by the President Director with approval from the Board of Commissioners. The President Director may propose the replacement of the Head of Internal Audit after obtaining approval from the Board of Commissioners, if found the Head of Internal Audit is negligent and cannot fulfill his responsibilities as stated in this Charter. The internal auditors report directly to the Head of Internal Audit

Head of Internal Audit Unit Profile

The Company appointed Triana Aria Rini as Head of Internal Audit according to Decree KptsP-049/C0000/2017-S22 which has been serving since 01 December 2017 - now.

Berusia 52 tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, Indonesia, Lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1968. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof Dr Mustopo pada tahun 1996. Menjabat sebagai *Head of Internal Audit* sejak tanggal 1 Desember 2017

52 years old, Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, Indonesia, Born in Jakarta on January 23, 1968. She earned Bachelor of Economics in Management from the Universitas Prof. Dr. Mustopo in 1996. Served as Head of Internal Audit since 1 December 2017 based on Directors' decision No. KptsP-049/

berdasarkan keputusan Direksi No. KptsP-049/C0000/2017-S2 tanggal 27 November 2017. Memulai karir di Pertamina Trans Kontinental sejak tahun 1990 dengan jabatan penting yang pernah diemban adalah *Manager* Cabang Tanjung Priok periode 2011-2013, pernah ditunjuk sebagai Direktur PT Peteka Karya Gapura periode 2013-2016 dan VP Operation periode 2016-2017.

C0000/2017-S2 on November 27, 2017. She started her career at Pertamina Trans Kontinental since 1990 and assigned in several key positions, such as an Tanjung Priok Branch Manager in the 2011-2013 period, appointed as Director of PT Peteka Karya Gapura for 2013-2016 period and VP Operation for the 2016- 2017 period.

Jumlah dan Kualifikasi Auditor Internal

Hingga akhir Desember 2020, jumlah personil Internal audit sebanyak 11 orang. Unit Internal audit dipimpin seorang Head of Internal Audit yang bertanggung jawab atas akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Internal audit.

Total and Qualification of Internal Auditor

As end of December 2020, there were 11 Internal Audit personnel. The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit who is responsible for the accountability of carrying out the duties and authority of the Internal Audit.

Komposisi Fungsi Internal Audit Per 31 Desember 2020

Composition of the Internal Audit Function as of December 31, 2020

Jabatan Position	Jumlah Personel Total Personnel
Head of Internal Audit	1 Orang / Person
Senior Auditor	3 Orang/ Person
Auditor	3 Orang/ Person
Junior Auditor	3 Orang/ Person
Sekretaris	1 Orang/ Person
Jumlah	11 Orang/ Person

Kualifikasi Audit Internal

Jumlah personel Internal Audit per 31 Desember 2020 ada 10 (sepuluh) orang Auditor ditambah 1 (satu) satu orang sekretaris. Internal Audit dipimpin seorang *Head of Internal Audit* yang bertanggung jawab atas akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Internal audit. Setiap Auditor Internal wajib memenuhi syarat kualifikasi yang ditetapkan Perusahaan.

Internal Audit Qualifications

The Internal Audit personnel as of December 31, 2019 consisted of 8 (eight) Auditors and 1 (one) secretary. Internal Audit and led by a Head of Internal Audit who was responsible for accountability in carrying out the duties and authority of the Internal Audit. Every Internal Auditor must fulfill the qualification requirements set by the Company.

Internal auditor membutuhkan kemampuan yang spesifik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu parameter yang menjadi tolak ukur kemampuan dan keahlian auditor adalah pengalaman baik dari segi operasional, bisnis, dan pendukung lainnya. Selain pengalaman dan strata pendidikan, sertifikasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keahlian auditor internal. Berikut adalah sertifikasi profesi yang telah diperoleh oleh internal auditor kami:

Internal auditors require specific abilities to carry out their duties and responsibilities. One parameter that measures the ability and expertise of auditors is experience from operational, business and other supporting aspects. In addition to experience and education strata, certification also becomes an important factor in increasing the expertise of internal auditors. The professional certifications that have been obtained by our internal auditors are as follows:

Sertifikasi Profesi Internal Auditor Internal Auditor Professional Certification

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Certification
Triana Aria Rini	Head of Internal Audit	Qualified Internal Audit (QIA)
Euis Resmawati	Senior Auditor	Qualified Internal Audit (QIA)
Indra Putera	Senior Auditor	Audit tingkat Manajerial/ Managerial level audits
Ginik Windaryati	Senior Auditor	Audit tingkat Manajerial/ Managerial level audits
Kiki Chandra	Auditor	Audit tingkat Manajerial/ Managerial level audits
Arif Maulana	Auditor	Audit tingkat Manajerial/ Managerial level audits
Fajar Nugroho	Auditor	Qualified Internal Audit (QIA)
Arlidyasari	Junior Auditor	Audit tingkat Manajerial/ Managerial level audits
Arini Putri Setoaty	Junior Auditor	Audit tingkat Manajerial / Managerial level audits
Almira Mahsa	Junior Auditor	-

Pengembangan Kompetensi

Selain sertifikasi, keikutsertaan dalam seminar/ *training*/konferensi profesi baik di dalam dan luar negeri, magang dan pembekalan terhadap perkembangan organisasi dan bisnis PTK maupun pembekalan terhadap pemahaman industri, juga diberikan secara rutin setiap tahun kepada pekerja AI melalui program *refreshing* auditor. Selama tahun 2020 telah dilakukan program peningkatan pendidikan berkelanjutan, sebagai berikut:

Competency Development

In addition to certification, participation in seminars / training / professional conferences both at home and abroad, internships and briefings on the development of the PTK organization and business as well as briefing on industry understanding, are also given regularly every year to AI employees through an auditor refreshing program. During 2020 a continuous education improvement program was carried out, as follows:

Pelatihan Auditor Internal

Auditor Internal

Peserta Participant	Nama Pelatihan Name of Training	Waktu / Tanggal Time / Date	Penyelenggara Organizer
Almira Mahsa	<i>Completed Staff Work & Shipping Management</i>	20 -23 Januari	PT Kenaweenergi
1. Indra Putera 2. Arini Putri Setoaty	<i>Qualified Internal Audit(QIA) Tingkat Manajerial</i>	20 - 29 Januari	YPIA
Arlidiasari	<i>Risk Management & Knowledge</i>	17 - 19 Februari	Fungsi SPBD
1. Indra Putera 2. Kiki Chandra	Pra Purna Bhakti	2 - 4 Maret	PT Kenaweenergi
1. Euis Resmawati 2. Ginik Windaryati 3. Arlidyasari 4. Almira Mahsa 5. Arini Putri Setoaty	5S/5R untuk peningkatan kinerja HSE dan Produktivitas ditempat kerja	02 April	Fungsi SMR
1. Triana Aria Rini 2. Ginik Windaryati 3. Almira Mahsa	Meningkatkan kinerja Pekerja dengan <i>positive Reinforcement</i> di PTK	3 April	Fungsi SMR
1. Triana Aria Rini 2. Ginik Windaryati	Peran Auditor Internal dalam mengawal Proses Perubahan Organisasi Menuju <i>E-Business</i> * <i>E-Government</i> era Digital & Pandemi COVID-19	17 April	YPIA
1. Triana Aria Rini 2. Ginik Windaryati 3. Almira Mahsa	<i>Contractor Safety Management System (CSMS)</i>	14 Mei	Fungsi SMR
1. Triana Aria Rini 2. Euis Resmawati 3. Indra Putera 4. Arip Maulana 5. Kiki Chandra 6. Arlidyasari 7. Almira Mahsa 8. Arini Putri Setoaty	Pelatihan Diskusi Panel IIA-IKAI--IAPI	29 Juli	IIA INDONESIA, IKAI.IAPI
1. Kiki Chandra 2. Arip Maulana	Perangkat dan Tehnik Audit Internal	7-8 September	YPIA
1. Triana Aria Rini 2. Indra Putera	Audit Investigation	9-10 September	YPIA
1. Ginik Windaryati 2. Arlidyasari	<i>The Role Of I.A In Asseting Risk Management</i>	10-11 September	YPIA

Pelatihan Auditor Internal

Auditor Internal

Peserta Participant	Nama Pelatihan Name of Training	Waktu / Tanggal Time / Date	Penyelenggara Organizer
1. Arini Putri Setoaty 2. Almira Mahsa	IMS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 <i>Awareness & Internal Auditor</i>	14-18 September	PT RINA INDONESIA
	I. A Dimasa New Normal COVID-19	17-18 September	YPIA
1. Euis Resmawati 2. Almira Mahsa	Data Analitik Untuk Auditor Intenal	21-22 September	YPIA
1. Triana Aria Rini 2. Indra Putera 3. Kiki Chandra 4. Arlidyasari 5. Arini Putri Setoaty 6. Fajar Nugroho	<i>Knowledge Sharing</i> - Transko Academy, BUP PKS dalam perannya untuk mendukung distribusi BBM dan Logistik Pertamina	02 Oktober	Transko Academy - PTK
1. Triana Aria Rini 2. Euis Resmawati 3. Indra Putera 4. Kiki Chandra 5. Almira Mahsa 6. Fajar Nugroho	<i>Knowledge Sharing</i> - Transko Academy, Meningkatkan Percepatan proses penyelesaian piutang usaha melalui monitoring kualitas pekerjaan vendor, ketepatan waktu penagihan, serta komitmen pembayaran vendor.	09 Oktober	Transko Academy - PTK
Indra Putera	<i>Knowledge Sharing</i> - Transko Academy, Sinergi seluruh perwira PTK untuk mencapai target <i>Safety</i> dan <i>operational Excellent</i> Kapal Milik sebagai kesatuan <i>Profit Center</i>	02 November	Transko Academy - PTK
1. Triana Aria Rini 2. Indra Putera 3. Arini Putri Setoaty 4. Euis Resmawati	<i>Knowledge Sharing</i> - Transko Academy, Pemanfaatan sisa sample FAME menjadi produk Faseleti	06 November	Transko Academy - PTK
1. Triana Aria Rini 2. Indra Putera 3. Kiki Chandra 4. Fajar Nugroho 5. Arip Maulana	<i>Knowledge Sharing</i> - Transko Academy, Meminimalisir <i>Breakdown Maintenance</i> Kapal Akibat Kerusakan Propeller	13 November	Transko Academy - PTK
1. Triana Aria Rini 2. Ginik Windaryati	Pelatihan Asesmen SLAS Batch - I	20 -23 November	Fungsi HRS
Ginik Windaryati	<i>Knowledge Sharing</i> - Transko Academy, Peningkatan Visibilitas Sarfas Bawah Air dengan Metode VAR di Marine Integrated Terminal Manggis dalam rangka mendukung Program Digitalisasi Pertamina	04 Desember	Transko Academy - PTK

Pelatihan Auditor Internal

Auditor Internal

Peserta Participant	Nama Pelatihan Name of Training	Waktu / Tanggal Time / Date	Penyelenggara Organizer
Kiki Chandra	Pelatihan Asesmen Olas Batch - I <i>Olas Batch Assessment Training - I</i>	15 dan 17 Des	Fungsi HRS
Arip Maulana	Pelatihan Asesmen Olas Batch - II <i>Olas Batch Assessment Training - II</i>	17 dan 21 Des	Fungsi HRS
1. Euis Resmawati 2. Arini Putri Setoaty 3. Almira Mahsa 4. Kiki Chandra	<i>Knowledge Sharing</i> - Transko Academy, Optimalisasi Pengawasan Perkembangan Pembangunan Kapal dengan Implementasi Aplikasi PORT di PT Pertamina Trans Kontinental.	18 Des 2020	Transko Academy - PTK
Fajar Nugroho	Pelatihan Asesmen Olas Batch - III	21 - 22 Des 2020	Fungsi HRS

Piagam Audit Internal

Pedoman internal audit adalah Piagam internal audit (*Audit Charter*) yang mengatur struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik serta hubungan kerja dengan pihak terkait. Piagam internal audit telah disahkan yang tertuang dalam piagam internal audit antara Direksi dan Komisaris tanggal 29 Desember 2020.

Mekanisme & Prosedur Internal Audit

Mekanisme dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu sarana untuk memastikan pengelolaan Perusahaan telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip GCG dan prinsip korporasi yang sehat serta taat kepada peraturan perundang-undangan.

Selain Piagam Internal Audit, pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Fungsi Internal Audit juga berpedoman pada Pedoman Internal Audit, Pedoman Investigasi dan Prosedur yang terdiri dari:

Internal Audit Charter

Internal audit guidelines are the internal audit Charter (*Audit Charter*) which regulates the structure and position, duties and responsibilities, authority, code of ethics and working relationships with related parties. The internal audit charter has been ratified as stated in the internal audit charter between the Board of Directors and the Board of Commissioners dated 29 December 2020.

Internal Audit Mechanisms & Procedures

Internal control mechanisms and systems are one of the means to ensure that the Company's management is carried out in accordance with GCG principles and corporate principles that are sound and comply with laws and regulations.

Apart from the Internal Audit Charter, the implementation of the duties, responsibilities and obligations of the Internal Audit Function is also guided by the Internal Audit Guidelines, Investigation Guidelines and Procedures which consist of:

- Psd-001/G0000/2017-S0 (Revisi ke 2) Perihal Penyusunan Program kerja audit tahunan (PKAT) & Rencana Kerja Anggaran
- Psd-002/G0000/2016-S0 (Revisi ke 0) Perihal Penyusunan Surat Perintah (SP) dan Rencana
- Penugasan Audit (RPA)
- Psd-003/G0000/2018-S0 (Revisi ke 2) Perihal Pelaksanaan & Pelaporan Audit Operasional
- Psd-004/G0000/2016-S0 (Revisi ke 0) Perihal Audit Khusus Mengenai Audit Kecurangan (Investigasi)
- Psd-005/G0000/2016-S0 (Revisi ke 0) Perihal Pemberian Jasa Konsultasi
- Psd-006/G0000/2016-S0 (Revisi ke 0) Perihal Pembinaan Kompetensi Profesi Internal Audit
- Psd-007/G0000/2018-S0 (Revisi ke 0) perihal Monitoring Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit (LHA)
- Psd-008/G0000/2018-S0 (Revisi ke 0) perihal Pemberian Data dan Peminjaman Dokumen Kepada Auditor Eksternal (KAP)
- Psd-009/G0000/2018-S0 (Revisi ke 0) perihal Cash Opname

- Psd-001 / G0000 / 2017-S0 (2nd Revision) Regarding the Preparation of an annual audit work program (PKAT) & Budget Work Plan
- Psd-002/G0000/2016-S0(Revision0) Concerning the Preparation of Warrants (SP) and Plans
- Audit Assignment (RPA)
- Psd-003 / G0000 / 2018-S0 (2nd Revision) Regarding Operational Audit Implementation & Reporting
- Psd-004 / G0000 / 2016-S0 (Revision 0) Regarding Special Audit Regarding Fraud Audits (Investigation)
- Psd-005 / G0000 / 2016-S0 (Revision 0) Concerning Providing Consulting Services
- Psd-006 / G0000 / 2016-S0 (Revision 0) Regarding Internal Audit Professional Competency Development
- Psd-007 / G0000 / 2018-S0 (Revision 0) regarding Monitoring Follow-up on Audit Reports (LHA)
- Psd-008 / G0000 / 2018-S0 (Revision 0) regarding Providing Data and Lending Documents to External Auditors (KAP)
- Psd-009 / G0000 / 2018-S0 (Revision 0) regarding Cash Opname

Realisasi Audit

Sepanjang tahun 2020, Audit Internal Tahun 2020 telah merealisasikan 16 audit terhadap obyek audit umum dan audit operasional terkait Proses bisnis yang direncanakan.

Pelaksanaan Tugas Internal Audit Tahun 2020 Implementation of Internal Audit Duties in 2020

Objek Audit Audit Object	Rencana Plan	Realisasi Realization
Kantor Pusat/ Headquarters	6	8
Kantor Cabang/ Branch Office	4	3
Anak Perusahaan/ Subsidiaries	5	3
Project/ Project	1	2

Actual Audit

Throughout 2020, the 2020 Internal Audit carried out 16 audits of general audit objects and operational audits related to planned business processes.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja

Sesuai dengan program kerja unit internal audit tahun 2020 yang telah ditetapkan, hingga akhir periode pelaporan, Unit Internal Audit telah melaksanakan audit terhadap:

1. *Back-to-back Charter* (Cab.Plaju)
2. Kegiatan Project FAME
3. Keagenan (Cabang Priok)
4. Kapal Milik (Cabang Priok)
5. PT Trans Yeong Maritime
6. Pengelolaan Dana CSR
7. Fungsi *Marine Service*
8. Fungsi *Vessel Marketing*
9. Fungsi *Marketing Support*
10. Fungsi *Financial Accounting*
11. Fungsi *Treasury*
12. Fungsi Legal
13. PT Peteka Karya Jala
14. PT Peteka Karya Tirta
15. Kegiatan Rektifikasi *Free Span* Pipa Gas Bawah Laut 28 Pagerungan
16. Investasi tahun 2020

Work Program Implementation Report

In accordance with the work program of the internal audit unit for 2020 that has been determined, until the end of the reporting period, the Internal Audit Unit has carried out an audit of:

1. *Back-to-back Charter* (Cab.Plaju)
2. Project FAME activities
3. Agency (Priok Branch)
4. Owned Ship (Priok Branch)
5. PT Trans Yeong Maritime
6. CSR Fund Management
7. Marine Service Functions
8. Vessel Marketing Function
9. Marketing Support function
10. Financial Accounting Functions
11. Treasury function
12. Legal Function
13. PT Peteka Karya Jala
14. PT Peteka Karya Tirta
15. Free Span Rectification Activity for Underwater Gas Pipes 28 Pagerungan
16. Investments in 2020

Hasil Temuan Audit Internal 2020

Posisi tindak lanjut temuan per 31 Desember 2020, baik temuan Internal Auditor maupun Eksternal Auditor, dengan posisi sebagai berikut:

2020 Internal Audit Findings

Position of follow-up on findings as of December 31, 2020, both findings of the Internal Auditor and External Auditor, with the following positions:

Hasil dan Tindak Lanjut Temuan

Results and Follow-up on Findings

Objek Audit Audit Object	Jumlah Rekomendasi Total Recommendation	Selesai Completed	Proses Proces
Kantor Pusat/ Headquarters	80	79	1
Kantor Cabang/ Branch Office	18	18	-
Anak perusahaan/ Subsidiaries	60	60	-

Audit khusus di luar rencana kerja

Sepanjang Tahun 2020, Internal Audit tidak melaksanakan audit khusus sebagai penugasan yang diberikan di luar Program Kerja Audit Tahunan 2020.

Special audit outside the work plan

Throughout 2020, Internal Audit did not carry out a special audit as an assignment that was given outside the 2020 Annual Audit Work Program.

Penyimpangan Internal

Tidak ada penyimpangan internal di tahun 2020

Internal Deviations

No internal deviation in 2020

Rencana Kerja Tahun 2021

Unit Audit Internal telah menyusun rencana kerja kedepan. Berikut adalah rencana tugas objek audit yang akan dilakukan oleh Unit Internal Audit pada tahun 2021 :

Work Plan for 2021

The Internal Audit Unit has prepared a future work plan. The following is the audit object task plan that will be carried out by the Internal Audit Unit in 2021:

Rencana Kerja Tahun 2021 Internal Audit Task Plan for 2021

Objek Audit Audit Object	Rencana Plan
Kantor Pusat/ Headquarters	5
Kantor Cabang/ Branch Office	5
Anak Perusahaan/ Subsidiarie	5
Non PKPT/ Non PKPT	-

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal

IA menjalankan fungsinya sebagai pendamping auditor eksternal dengan memberikan dukungan kepada auditor eksternal, menjembatani antara auditor dengan *auditee* dan melakukan pembahasan temuan auditor dengan *auditee*.

Monitoring of Follow-up to External Audit Results

IA performs its function as a companion to the external auditor by providing support to the external auditor, bridging the auditor and the auditee and discussing the auditor's findings with the auditee.

Pemantauan Tindak Lanjut Keputusan dan Arahan RUPS

IA juga memantau tindak lanjut atas Keputusan dan Arahan RUPS 2020 secara berkala dan dilaporkan kepada Pemegang Saham. Berikut rincian tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2020:

Monitoring of the Follow-up of Resolutions and Direction of the GMS

IA also monitors the follow-up to the 2020 GMS Resolutions and Direction on a regular basis and reports it to the Shareholders. The following is the progress of completing the follow-up to as of December 31, 2020:

Pemantauan Tindak Lanjut Keputusan dan Arahan RUPS

Monitoring of the Follow-up of Resolutions and Direction of the GMS

RUPS	Jumlah Keputusan dan Arahan Number of Rulings and Directives	Persentase Selesai Ditindaklanjuti Percentage of Completed Followed Up
RUPS RKAP 2020 Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2020	6 Keputusan/ Resolutions	100%
RUPS RKAP 2019 Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2019	6 Keputusan/ Resolutions	100%
RUPS RKAP 2018 Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2018	6 Keputusan/ Resolutions	100%
RUPS RKAP 2017 Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2017	4 Keputusan/ Resolutions	100%

Audit Eksternal

External Audit

Hasil Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor eksternal disampaikan dalam bentuk Opini Laporan Keuangan. Untuk tahun 2020, Laporan Keuangan Konsolidasian PTK memperoleh Opini disajikan secara Wajar tanpa Pengecualian. Hal ini menunjukkan PTK telah menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku serta lepas dari salah saji yang material.

Result of audit done by external auditor is submitted in form of Financial Statements Opinion. In 2020, PTK Consolidated Financial Statements acquired Unqualified opinion presented in all material respect. This indicates PTK has presented the Consolidated Financial Statements accurately and in compliance with prevailing standard as well as free from any material misstatement.

Auditor eksternal merupakan badan independen yang telah memenuhi persyaratan dalam melakukan audit umum dan memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Audit eksternal dilakukan sebagai fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan perusahaan. Untuk menjamin independensi hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat perusahaan. Sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN), audit eksternal melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu ada Kantor Akuntan Publik (KAP).

External auditor is an independent body that has fulfilled the requirements in conducting general audits and provides opinions related to the suitability of the presentation of the company's financial statements with the prevailing Financial Accounting Standards (SAK).

External audit is carried out as an independent supervisory function of the company's financial aspects. To guarantee the independence of the audit results, the appointed external auditor may not have a conflict of interest with every executive level. As a subsidiary of PT Pertamina (Persero), a state-owned enterprise (BUMN), the external audit also involves the Supreme Audit Board (BPK). In addition, the audit is also conducted by the Public Accounting Firm (KAP).

Audit Eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Tidak terdapat audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2020

External Audit by The Audit Board

There is no audit conducted by the Supreme Audit Board in 2020.

Penunjukan Akuntan Publik

Sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunan yang terkait kewajaran, semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mekanisme dan proses pemilihan KAP dilaksanakan Perusahaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers).

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan, yang diaudit terhadap Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar. Dari hasil audit yang dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, Kantor Akuntan Publik memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 khususnya pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan

Appointment of Public Accountant

In accordance with the prevailing laws and regulations, the Company through Public Accounting Firm (KAP) performs an audit to the financial statements related to fairness in all material aspects, financial position, business results, changes in equity and cash flows, as per the generally accepted accounting principles in Indonesia. Mechanism and selection process of Public Accounting Firm (KAP) are carried out by the Company in accordance with the prevailing provisions and regulations.

Public Accounting Firm Appointment Mechanism

Public Accounting Firm Appointment Mechanism refers the Resolutions of Annual GMS for Fiscal Year 2019, the Shareholders delegated authority to the Board of Commissioners to appoint the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers).

The Public Accounting Firm is responsible for conveying an opinion to the Company's compliance on the Financial Statements, which is audited based on the generally accepted Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the prepared reports present financial position and fair business results. Of the audit findings on the Financial Statements of Fiscal Year 2020, Public Accounting Firm (KAP) declared opinion "Unqualified in all material aspects, financial position, as per the Statement of Financial Accounting Standards in Indonesia".

Stipulation of Public Accounting Firm (KAP) as an External Auditor has aligned with Minister of Finance Regulation Number 17/ PMK.01/2008 of 5 February 2008 especially Article 3 verse 1, stating that the provision of general audit service to the financial statements of an entity is performed by Public

Publik paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut.

Accounting Firm (KAP) at the most six fiscal years consecutively.

Berikut adalah informasi pihak yang melakukan audit keuangan Perusahaan dalam enam tahun terakhir:

Information about the party who performed the Company's financial audit within the last six years is as follows:

Akuntan Publik PTK 2015-2020

PTK Public Accountant 2015-2020

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Nama Akuntan Name of Accountant	Opini Opinion	Profesional Fee
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)	Daniel Kohar	Wajar Fair	Rp606 juta/ million
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)	Daniel Kohar	Wajar Fair	Rp598 juta/ million
2018	Purwantono, Sungkono & Surja (Ernst & Young)	Said Amru	Wajar Fair	Rp566 juta/ million
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Reka (PricewaterhouseCoopers)	Daniel Kohar	Wajar Fair	Rp570 juta/ million
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)	Tanudiredja, Wibisana, Yusron	Wajar Fair	Rp591 juta/ million
2015	Kosasih, Nurdian, Tjahjo dan Rekan (Crowe Horwath)	Nunu Nurdian	Wajar Fair	Rp475 juta/ million

Biaya Audit dan Jasa Lain yang Dilakukan Kantor Akuntan Publik

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PTK tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2020 adalah Rp606 juta yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, dan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan. Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Audit Fee and Other Services Provided by Public Accounting Firm

Total fee for General Audit of PTK's Financial Statements for fiscal year ended on 31 December 2020 amounted to Rp606 million which include audit on the Balance Sheet, Statement of Profit/Loss, Statement of Changes in Equity, as well as Statement of Cash Flows for fiscal year ended on that date, and to state an opinion on the fairness in presenting the financial position, business results, changes in equity, and cash flows of the Company. The audit was conducted based on the auditing standards stipulated by Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and Public Accountant Professional Standards (SPAP).

Selama tahun 2020 KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) tidak memberikan jasa lain kepada PTK selain jasa audit. Dengan demikian pelaksanaan proses audit berjalan independen dan tidak terdapat benturan kepentingan.

Tindak Lanjut Temuan Audit KAP

Tidak lanjut temuan audit KAP senantiasa dimonitoring untuk memastikan bahwa seluruh temuan tersebut telah terealisasi seluruhnya dan memberikan nilai tambah bagi PTK. Pada tahun 2020 tidak terdapat temuan atas audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020

Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

Komite Audit berkoordinasi dengan Internal Audit melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja, baik dari segi keuangan maupun operasional. PTK berupaya menindaklanjuti setiap temuan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga secara efektif mampu menekan temuan-temuan ditahun berikutnya.

Efektivitas dan Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik Eksternal dan Direksi

Efektivitas dan Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik Eksternal dan Direksi Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan regular dalam bentuk: rapat koordinasi pada saat *opening meeting* dan *exit meeting* penyampaian hasil audit serta pola komunikasi pada saat proses audit berlangsung.

In 2020, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) did not perform other services to PTK aside from audit service. Thus, the implementation of audit was accomplished independently and did not have conflict of interest.

PAF Finding's Follow Up

Furthermore, KAP audit findings are constantly monitored to ensure that all of these findings have been fully realized and provide added value for the PTK. In 2020, there were no findings on the audit of the 2020 Financial Year Financial Statements

Effectiveness Audit Activity by the Public Accountant

The Audit Committee coordinates with Internal Audit to review effectiveness of the external audits implementation to ensure that all findings can be followed up according to the assigned authority and improve performance, both from financial and operational perspective. PTK strives to follow up any audit findings by the Public Accounting Firm, so that they can effectively suppress the findings in the coming year.

Effectiveness and Communication Frequency by External Public Accountants and Board of Directors

Effectiveness and Frequency of Communication of External Public Accountants and Board of Directors During the audit activity conducted by the Public Accountant, communication and cooperation between the Public Accountant and the Board of Directors is carried out intensively and regularly in form of: coordination meetings during the kick-off and exit meetings, submission of audit results and communication activity at during the audit process.

Manajemen Risiko

Risk Management

- Perusahaan menyadari bahwa tuntutan dalam menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh dan efektif semakin meningkat, seiring tantangan Perusahaan yang semakin tinggi dalam menghadapi ketidakpastian yang timbul untuk pencapaian tujuan Perusahaan.

The Company realizes that the demands for implementing risk management in a comprehensive and effective manner are increasing, in line with the Company's increasing challenges in facing the uncertainties that arise for the achievement of the Company's objectives.

Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis/mengevaluasi, mengelola dan mengkaji ulang risiko perusahaan secara efektif agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dampak risiko seminimal mungkin. Penerapan manajemen risiko pada perusahaan guna menghindari atau meminimalkan potensi kerugian (*potential loss*); mengoptimalkan peluang (*opportunity*); mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif; meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham; meningkatkan tata kelola yang sehat; mengantisipasi perubahan lingkungan yang pesat; serta mengintegrasikan korporat.

Manajemen risiko yang diterapkan mencakup pada risiko yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas usaha. Risiko utama yang dihadapi timbul dari instrumen operasional, seperti kegiatan *operation days* kapal milik, keagenan, pelabuhan umum dan khusus, dan risiko lainnya. Sedangkan risiko lainnya adalah risiko keuangan yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar berupa tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko likuiditas.

Fungsi utama dari manajemen risiko yang dijalankan Perusahaan adalah mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan tata cara Perseroan. Secara rutin, Perusahaan menelaah

Risk management is an initiative to identify, analyze/evaluate, manage and review the Company's risks effectively so that the established company goals can be achieved with minimal risk impact. Implementation of risk management in companies to avoid or minimize potential losses; optimize opportunities; maintain a conducive work environment; increase shareholder value; improve healthy governance; anticipating rapid environmental changes; and integrating corporates.

The risk management implemented includes risks faced in performing the business activities. The main risks arising from operational instruments, among which are operation days activity of the ship owned, agencies, general and special port, and other risks. Meanwhile, the other risks include financial risk, consisting of credit risk, market risk (interest rate and foreign exchange rate), and liquidity risk.

The main functions of risk management performed by the Company are to identify all key risks, measure these risks and manage the risks position as per the Company's policies and procedures. The Company routinely analyzes the risk management policy

kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan dinamika bisnis Perseroan dan praktik pasar terbaik.

Kebijakan Manajemen Risiko

Dasar pelaksanaan atau pengelolaan risiko perusahaan tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko No.A-002/I0000/2020-S0 revisi ke-1 tanggal 19 Maret 2020 dan Tata Kerja Organisasi Manajemen Risiko *Ongoing Business* No. B-008/I0000/2020-S0 revisi ke-0 tanggal 19 Maret 2020. Pedoman manajemen risiko senantiasa ditinjau dan diperbaharui secara berkala.

Pedoman berlaku untuk aktivitas atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dan menjadi acuan Anak Perusahaan. Pedoman ini mencakup antara lain:

1. Prinsip dasar penerapan manajemen risiko;
2. Kerangka dan kebijakan manajemen risiko;
3. Proses penerapan manajemen risiko;
4. Atribut peningkatan manajemen risiko;
5. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja terkait;
6. Penerapan manajemen risiko.

PTK memiliki Traktat Manajemen Risiko yang ditandatangani Direksi tanggal 5 November 2019. Traktat Manajemen Risiko merupakan pengembangan prinsip-prinsip manajemen risiko yang tertera dalam Pedoman Manajemen Risiko. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Direksi PTK terhadap penerapan sistem manajemen risiko berbasis integrasi korporasi yang juga dikenal dengan *Enterprisewide Risk Management* (ERM) di PTK, serta sebagai landasan bagi seluruh jajaran Perusahaan.

and system to align with the Company's business dynamics and best market practices.

Risk Management Policy

The basis for implementing or managing corporate risk is contained in Risk Management Guidelines No. A-002/I0000/2020-S0 1st revision dated 19 March 2020 and the Work Procedure of the Ongoing Business Risk Management Organization No. B-008/I0000/2020-S0 0 revision dated March 19, 2020. Risk management guidelines are regularly reviewed and updated.

The guidelines prevail to activities or business activities that relate to the interests of the Company and become a reference for the Subsidiaries. These guidelines include, among others:

1. Risk management implementation basic principle;
2. Risk management framework and policy;
3. Risk management implementation process;
4. Risk management enforcement attributes;
5. Duties and responsibilities of related work units;
6. Risk management implementation.

PTK has Risk Management Tract signed by the Board of Directors on November 5, 2019. This Risk Management Tract constitutes a development of Risk Management principles stated in the Risk Management Manual, a form of commitment of PTK's Board of Directors toward the implementation of risk management system based on corporation integration (*Enterprise-wide Risk Management/ERM*) at PTK, as well as a foundation for all levels in the Company.

Struktur dan Sistem Pengelolaan Risiko

Struktur manajemen risiko PTK berawal dari pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui Komite Investasi dan Risiko Usaha (IRU) serta Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Selain itu, perusahaan juga memiliki fungsi pendukung untuk menerapkan pengelolaan risiko antara lain fungsi *Strategic Planning Business Development* (SPBD), manajemen risiko fungsi, serta manajemen risiko Anak Perusahaan.

Risk Management Structure And System

Risk management structure in PTK is started from the active supervision of the Board of Commissioners through the Investment and Business Risk Committee (IRU) and the Board of Directors through the Risk Management Committee. In addition, the company also has supporting functions to implement risk management, including the Strategic Planning Business Development (SPBD) function, Risk Management Function, and Risk Management of Subsidiaries.

Struktur Manajemen Risiko

Risk Management Structure

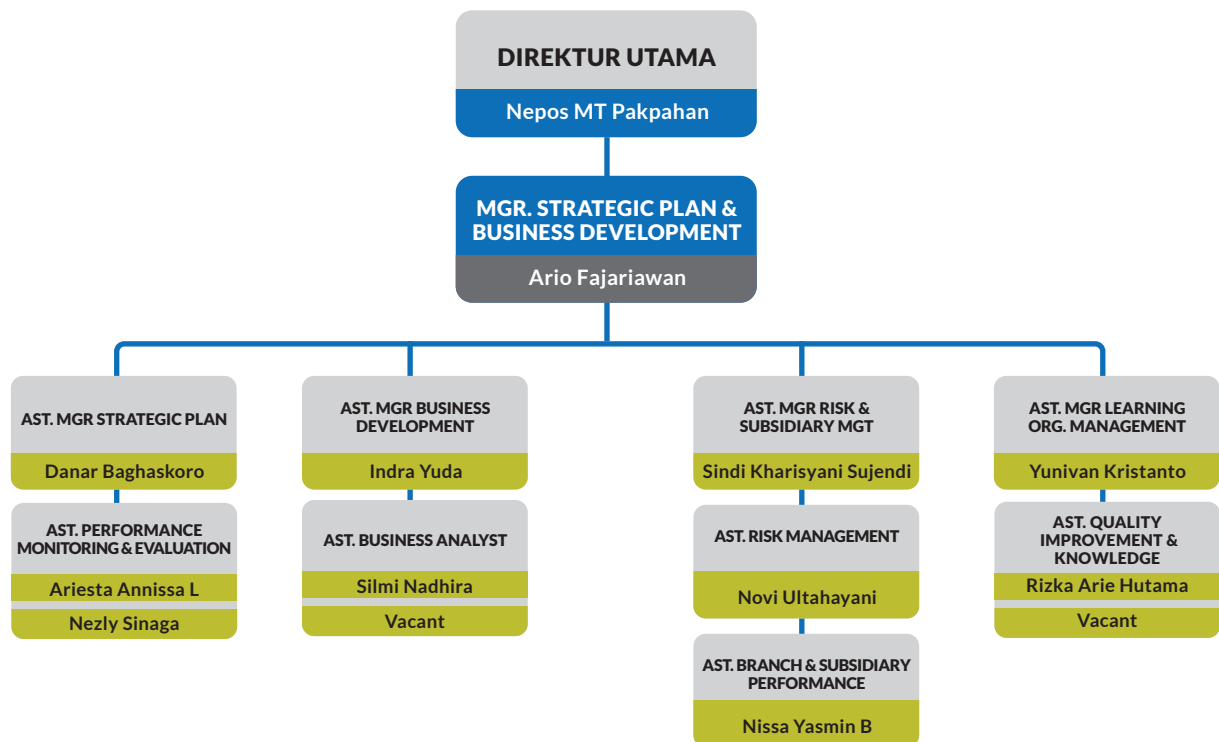
Nama Name	Keterangan Description	
Komite Investasi dan Risiko Usaha Investment and Business Risk Committee	Komite Investasi dan Risiko Usaha merupakan komite dibawah Dewan Komisaris yang bertujuan untuk mendukung fungsi pengawasan serta memberikan nasihat dan rekomendasi terhadap risiko usaha.	The Business Risk and Investment Committee is a committee under the Board of Commissioners that aims to support the supervisory function and provide advice and recommendations on business risks.
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Komite Manajemen Risiko adalah komite yang beranggotakan Dewan Direksi (BoD) dalam rangka menangani hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko di Perusahaan.	The Risk Management Committee is a committee consisting of a Board of Directors (BoD) in order to handle matters relating to Risk Management in the Company.
Strategic Planning Business Development Strategic Planning Business Development	Merupakan unit yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direksi Perseroan sebagai manajemen risiko Perusahaan, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing Direktorat dan fungsi leher.	It is a unit that is given authority and responsibility by the Board of Directors of the Company as Corporate Risk Management, to coordinate the implementation of Risk Management in each Directorate and neck function.
Manajemen Risiko Fungsi Risk Management Function	Merupakan PIC Manajemen Risiko Fungsi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direksi melalui pejabat tertinggi pada satu fungsi (satuan kerja) terkait untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing fungsi.	A PIC for Risk Management Function that is delegated the authority and responsibility by the Board of Directors through the highest official in a function (work unit) related to coordinating implementation of risk management in each function.
Manajemen Risiko Anak Perusahaan Subsidiary Risk Management	Merupakan fungsi manajemen risiko anak perusahaan PT Pertamina Trans Kontinental yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direktur Anak Perusahaan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing Anak Perusahaan PT Pertamina Trans Kontinental.	A risk management function in Pertamina Trans Kontinental's subsidiary that is delegated authority and the responsibility by the Director of subsidiaries to coordinate the implementation of risk management in each of Pertamina Trans Kontinental's subsidiary.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara terintegrasi dikelola oleh *Strategic Planning Business Development* (SPBD) yang disupervisi Direktur Utama. Secara spesifik pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab dari *Assistant Manager Risk & Subsidiary Management*.

Risk Management Work Unit

The integrated risk management function is managed by the *Strategic Planning Business Development* (SPBD) supervised by the President Director. Specifically risk management is the responsibility of *Assistant Manager Risk & Subsidiary Management*.



Pengelola Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko Perusahaan terdapat pada Divisi Manajemen Risiko yang dikelola oleh *Manager Strategic Plan & Business Development*. *Strategic Plan & Business Development* terbagi atas 4 sub-fungsi yang terdiri dari *Strategic Plan*, *Business Development*, *Risk & Subsidiary Management*, dan *Quality Management*.

Strategi Penerapan Manajemen Risiko

Strategi penerapan manajemen risiko yang diterapkan perusahaan mencakup:

- Penetapan *risk attitude*, *risk appetite* dan *risk tolerance*
- Penetapan rencana penanganan risiko (*risk treatment*)
- Penyusunan profil risiko sebelum dan setelah dilakukan penanganan risiko (*risk treatment*)
- Pembuatan skala prioritas (prioritas risiko) dalam penanganan risiko
- Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kerangka manajemen risiko
- Pelaporan pelaksanaan pengelolaan risiko

Mekanisme Manajemen Risiko

Strategi terkait penerapan manajemen risiko tersebut diimplementasikan dalam sebuah mekanisme manajemen risiko, yang melibatkan proses penyusunan daftar risiko hingga audit pelaksanaannya. Berikut adalah daftar risiko perusahaan:

- *Risk Owner*, bertanggung jawab menerapkan manajemen risiko di Fungsinya terkait dengan aktivitas dan kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya serta mendokumentasikannya.
- *Risk Register*, disusun oleh setiap Fungsi untuk selanjutnya diagregasikan menjadi risk register

Risk Management Manager

The Company's risk management function is in the Risk Management Division which is managed by the Strategic Plan & Business Development Manager. Strategic Plan & Business Development is divided into 4 sub-functions consisting of Strategic Plan, Business Development, Risk & Subsidiary Management, and Quality Management.

Risk Management Implementation Strategies

Strategies of the risk management implementation cover:

- Stipulating Risk Appetite and Risk Tolerance Stipulation;
- Stipulating Risk Treatment Plan;
- Implementing Risk Profile before and after handling;
- Developing Risk Priority in Risk Treatment;
- Monitoring the implementation of Risk Management policy and framework;
- Reporting the implementation of risk management.

Risk Management Mechanism

The strategies are implemented in a risk management mechanism, involving a process of preparing a list of risks up to its implementation.

- Risk Owner, this individual is responsible to perform Risk Management in its Function related to the activities and business activities to which become its responsibility and document the process.
- Risk Register, a document prepared by each Function to be subsequently aggregated as Risk

tiap Fungsi Leher dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Fungsi leher.

- *Risk Profile*, korporat dibuat sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- Laporan monitoring risiko ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Fungsi Leher dan dibuat secara periodic sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- Fungsi harus memasukkan biaya penanganan risikonya (*cost of risk*) ke dalam RKAP, baik operasional maupun investasi. Untuk investasi, *cost of risk* diperhitungkan dalam analisa keekonomian.
- Perusahaan dapat melakukan *risk financing* sebagai rencana kontijensi apabila dianggap perlu oleh Fungsi berdasarkan suatu kajian dan disetujui oleh Direktorat/Fungsi Leher.
- Perlu dilakukan *risk management audit* guna memastikan bahwa proses pengelolaan Risiko telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, penerapan mekanisme manajemen risiko di Perusahaan meliputi seluruh aktivitas dan kepentingan usaha PTK.

- Mandat dan komitmen dari Direksi;
- Pengawasan pemimpin tertinggi disetiap Fungsi/ Cabang/Anak Perusahaan;
- Adanya kebijakan, prosedur dan penetapan *risk attitude*, *risk appetite*, dan *risk tolerance* yang mendukung rencana strategis Pertamina Trans Kontinental;
- Adanya proses penentuan lingkup risiko, *risk identification*, *risk analysis*, *risk evaluation*, *risk treatment*, *monitoring & review*, serta sistem informasi manajemen risiko yang komprehensif, dan penyediaan data yang terintegrasi;
- Prosedur dan persyaratan yang memadai dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas aktivitas bisnis baru serta perubahan sistem dan prosedur kerja yang akan dilakukan;
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh;
- Peningkatan pemahaman secara komprehensif mengenai manajemen risiko, khususnya di tingkat manajemen.

Register in each Functional Structure and signed by the Highest Functional Leader.

- Risk Profile, a profile of corporate risk which is created at least once a year.
- Risk Monitoring Report is signed by the highest Functional Leader and developed periodically at least once a year.
- The function should include Cost of Risk into RKAP, either operational or investment. In investment, Cost of Risk is calculated in economy analysis.
- The Company could perform Risk Financing as a contingent plan if deemed necessary by the Function based on an analysis and approved by the Directorate/ Functional Structure.
- Risk Management Audit is necessary in ensuring the risk management process

In its implementation, the risk management mechanism at the Company includes all activities and business interests of PTK.

- Mandate and Commitment from the Board of Directors;
- Supervision on the highest leader in each Function/ Branch/Subsidiary;
- Establishment of policy, procedure, and stipulation of Risk Attitude, Risk Appetite, and Risk Tolerance which support Pertamina Trans Kontinental strategic plans;
- Performing process of determining the scope of risk, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, monitoring & review, as well as comprehensive risk management information system, and integrated data provision;
- Adequate procedure and requirements in performing evaluation and providing recommendation on the new business activities as well as changes in to be performed system and work procedures;
- Thorough internal control system;
- Increasing comprehensive understanding on risk management, especially in management level.

Proses manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Perusahaan pada setiap kegiatan dan atau transaksi usaha, baik itu aktivitas *ongoing business* ataupun aktivitas investasi. Aktivitas *ongoing business* merupakan serangkaian kegiatan PTK yang telah berjalan secara rutin sesuai dengan proses bisnis Perusahaan berdasarkan prinsip kelangsungan usaha. Sedangkan aktivitas investasi adalah serangkaian kegiatan penggunaan sumber daya dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan.

The process of risk management has the purpose of protecting the Company in every activity and/or business transaction, either ongoing business or investment activities. The ongoing business activities are a series of PTK activities which have been performed routinely in accordance with the Company's business process based on business continuity principle. Meanwhile, investment activities are series of resources use in increasing the Company's values.

Proses Manajemen Risiko Sesuai Aktivitas Usaha PTK

Risk Management Process in accordance with the PTK's Business Activities

Ongoing Business Ongoing Business	Investasi Investation
• Penentuan Lingkup Pengelolaan Risiko Establishing the Context • Identifikasi Risiko Risk Identification • Analisis Risiko Risk Analysis • Evaluasi Risiko Risk Evaluation • Penanganan Risiko Risk Treatment • Pemantauan dan Kaji Ulang Monitoring & Review • Komunikasi & Konsultasi Communication & Consultation	• Perencanaan Manajemen Risiko Risk Management Planning • Identifikasi risiko Risk identification • Analisis risiko kualitatif dan kuantitatif Qualitative and quantitative risk analysis • Perencanaan respon risiko Risk response planning • Pemantauan dan pengendalian risiko Risk monitoring and control

Hubungan Kerja dengan Komite Investasi dan Risiko Usaha

Secara aktif, Fungsi SPBD melakukan komunikasi dan pertemuan (rapat) dengan Komite Investasi dan Risiko Usaha. Sepanjang tahun 2020 Fungsi SPBD telah bertemu dan melaksanakan beberapa kali rapat dengan Komite IRU, terkait untuk membahas pengelolaan risiko dari pelaksanaan investasi yang dilakukan Perusahaan.

Work Relationship with Investment and Business Risk Committee

The SPBD Function actively performs communication and meetings with Investment and Business Risk Committee. In 2020, the SPBD Functions has convened and performed several meetings with the IRU Committee to discuss risk management of the investments conducted by the Company.

Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Perusahaan berupaya meningkatkan kompetensi serta sertifikasi profesional di bidang Manajemen Risiko guna meningkatkan pengembangan budaya sadar risiko (*risk consciousness*) dan berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*). Kegiatan pelatihan terkait manajemen risiko yang dilaksanakan tahun 2020:

Risk Management Competency Development

The Company strives to develop improve and professional certification in the field of Risk Management in order to improve the development of a risk awareness culture and knowledge sharing. Training activities related to risk management carried out in 2020:

Pelatihan Terkait Manajemen Risiko tahun 2020

Training activities related to risk management realized in 2020

Peserta Participant	Tema Pelatihan Theme of Training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
PIC Risk Management PTK Grup, serta Perwakilan tim BORM (<i>Business Operational Risk Management</i>) dan Fungsi ERM Pertamina (Persero). PIC Risk Management in PTK Group, as well as representatives of the BORM (<i>Business Operational Risk Management</i>) team and Pertamina (Persero) ERM Function	Workshop Risk & Knowledge Management	17-19 Februari 2020	Risk Management PTK
PIC Risk Korporat	Kick Off Pengelolaan Risiko Ongoing Business Tahun 2021 (Tahap 1)	1 April 2020	Fungsi ERM PT Pertamina (Persero)
PIC Risk Korporat	Kick Off Pengelolaan Risiko Ongoing Business Tahun 2021 (Tahap 2)	9 April 2020	Fungsi ERM PT Pertamina (Persero)
PIC Risk Korporat	Kick Off Pengelolaan Risiko Direktorat LSCI Tahun 2021	23 April 2020	BORM PT Pertamina (Persero)
PIC Risk Korporat	Ongoing Business Risk Management Dit. LSCI	11-12 Mei 2020	BORM PT Pertamina (Persero)

Pada tahun 2020, terdapat 5 pekerja PTK yang merupakan PIC Risk Korporat dan telah melakukan sertifikasi manajemen risiko (*certified risk professional/CRP*). Kedepannya akan dilakukan sertifikasi secara bertahap kepada seluruh pekerja PTK pada level Manager.

In 2020, there were 5 PTK employees as the Corporate Risk PIC and have carried out risk management certification (*Certified Risk Professional/CRP*). In the future, certification will be carried out in stages for all PTK workers at Manager level.

Profil Risiko Perusahaan dan Mitigasi Risiko

Perusahaan melakukan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang diklasifikasikan menjadi enam risiko: *Governance Risk, Strategy and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastructure Risk, Compliance Risk*, serta *Reporting Risk*. Berikut uraian terkait jenis dan mitigasi risiko:

Risk Profile and Risk Mitigation

The Company carries out management on risks that are classified into six risks: *Governance Risk, Strategy and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastructure Risk, Compliance Risk*, and *Reporting Risk*.

Mitigasi Risiko Perusahaan

Company Risk Mitigation

Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Operational Risk	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu tidak tercapainya pendapatan kapal, akibat: 1. Spesifikasi teknis kapal tidak sesuai dengan kebutuhan pen-charter 2. <i>Charter rate</i> kapal yang ditawarkan calon pen-charter dibawah HPP 3. Prioritas kapal sandar <i>time charter</i> lebih tinggi dibandingkan kapal COA 4. Performa kapal tidak maksimal (usia kapal yang sudah tua, kapal sering rusak) 5. Keterlambatan progres pekerjaan oleh kontraktor dan galangan 6. Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pelayaran dan galangan dalam negeri, dimana terdapat kebijakan PSBB dan <i>social distancing</i> *) This risk is related to the risk arising from the operational process, such as vessels revenue below the budget, due to: 1. Vessel technical specifications are not fulfilling the charterer's requirements. 2. Vessel charter rates offered by prospective charterers are below the cost of goods sold 3. The priority of docking time charters is higher than COA vessels 4. Ship performance is not optimal (the ship is aged and often damaged) 5. Delays in work progress by contractors and shipyards 6. The impact of the COVID-19 pandemic on the domestic shipping and shipyard industry, following implementation of PSBB and social distancing policies *)	1. Mencari project yang sesuai dengan spesifikasi teknis kapal 2. Mengevaluasi kembali HPP kapal milik PTK 3. Optimalisasi pemasaran kapal milik yang semula berdasarkan volume COA menjadi <i>time charter</i> 4. Optimalisasi pelaksanaan PMS (<i>Plan Maintenance System</i>) 5.1. Fungsi <i>Fleet</i> menyampaikan dengan detail kepada Fungsi <i>Procurement</i> terkait dengan jenis dan fasilitas yang harus dimiliki galangan, deskripsi pekerjaan dalam <i>docking list</i> dan SOW Permintaan 5.2. <i>Yard ability assessment</i> saat prakualifikasi kandidat galangan 6.1. Fungsi <i>Vessel Marketing</i> melakukan <i>marketing intelligence</i> lebih optimal guna memasarkan kapal yang idle *) 6.2. Fungsi <i>Vessel Marketing</i> melakukan negosiasi <i>charter rate</i> dan penyesuaian kurs *) 1. Finding projects based on the ship's technical specifications 2. Re-evaluate the HPP of PTK's vessels 3. Optimizing the marketing of owned vessels which was originally based on the volume of the COA to time charter 4. Optimizing the PMS (Plan Maintenance System) implementation 5.1. Fleet function submits details to the Procurement Function regarding the types and facilities that the shipyard must have, job descriptions in the docking list and SOW Request 5.2. Yard ability assessment during shipyard candidate prequalification 6.1. Vessel Marketing function to perform marketing intelligence more optimally to market idle vessels *) 6.2. Vessel Marketing functions to negotiate charter rates and exchange rate adjustments *)

Mitigasi Risiko Perusahaan

Company Risk Mitigation

Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
<i>Finance Risk</i>	Risiko ini berkaitan dengan optimalisasi keuangan perusahaan yaitu piutang macet, akibat: 1. Kurang optimalnya upaya untuk penyelesaian piutang macet 2. Tidak adanya itikad baik dari <i>customer</i> 3. PTK belum memiliki alat kontrol yang baik untuk memastikan <i>customer</i> yang memiliki <i>outstanding</i> piutang yang tinggi secara <i>realtime</i> 4. Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pelayaran dan galangan dalam negeri, dimana terdapat kebijakan PSBB dan <i>social distancing</i> *) This risk is related to the optimization of the company's finances, such as bad debts, due to: 1. Less optimum efforts to settle non-performing receivables 2. The absence of good faith from the customer 3. PTK does not have good control tools to ensure customers who have high outstanding receivables in real time 4. The impact of the COVID-19 pandemic on the domestic shipping and shipyard industry, following implementation of PSBB and social distancing policies *)	1.1 Pembentukan Fungsi Penagihan di Direktorat Keuangan 1.2 Pembentukan tim penagihan <i>outstanding</i> piutang 2.1 Melakukan penagihan secara maksimal untuk <i>customer</i> yang memiliki piutang melewati batas komitmen yang tertuang dalam kontrak 2.2 Pemberian surat somasi kepada <i>customer</i> dengan <i>aging</i> piutang >12 bulan 3.1 PTK tidak melayani perusahaan yang memiliki potensi <i>bad debt</i> 3.2 PTK melakukan pemetaan piutang berdasarkan kemungkinan penyelesaian piutang yang dapat diselesaikan 4. Pola monitoring penagihan disesuaikan dengan kondisi WFH dan PSBB guna percepatan penagihan ke <i>customer</i> *) 1.1 Establishment of Collection Function under Finance Directorate 1.2 Establishment of a team to collect outstanding accounts 2.1 Carry out maximum billing for customers whose receivables exceed the commitment limit stated in the contract 2.2 Giving a summons to customers with aging receivables > 12 months 3.1 PTK does not serve companies with bad debt potential 3.2 PTK conducts receivables mapping based on the possible settlement of the accounts that can be resolved 4. Billing monitoring patterns are adjusted to the conditions of WFH and PSBB in order to accelerate billing to customers *)
<i>Operational Risk</i>	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu terjadinya kecelakaan kapal, akibat: 1. Kompetensi <i>crew</i> yang kurang 2. Kepatuhan <i>crew</i> terhadap aturan yang kurang 3. Faktor eksternal	1.1 Melakukan audit secara berkala kepada <i>Crew Agent</i> 1.2 Meningkatkan kompetensi <i>crew</i> dengan membuat <i>training need analysis crew</i> dengan pelaksanaan <i>in house training</i> atau dilakukan oleh <i>Crew Agent</i> (PT PKG) 1.3 Menjalankan evaluasi penilaian <i>crew</i> dengan penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> 1.4 Memastikan <i>supply crew</i> dari <i>Crew Agent</i> sesuai dengan <i>requirement</i> 2.1 Melakukan HSE Campaign secara berkala saat kunjungan ke kapal 3.1 PTK mengasuransikan kapal milik secara <i>all risk</i> dan cover P&I

Mitigasi Risiko Perusahaan

Company Risk Mitigation

Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
	This risk relates to risks caused by operational process, such as ship accidents, due to: 1. Poor crew competence 2. Low compliance of the crew to the regulations 3. External factors	1.1 Conduct periodic audits to Crew Agent 1.2 Improve crew competence by making crew training needs analysis by implementing in-house training or carried out by Crew Agent (PT PKG) 1.3 Performing crew evaluation evaluations by applying rewards and punishments 1.4 Ensuring the supply of crew from the Crew Agent is in accordance with the requirements 2.1 Conduct HSE Campaign regularly during visits to ships 3.1 PTK provides all risk and cover P&I insurance for the owned vesse
Operational Risk	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu terjadinya keterlambatan <i>delivery time</i> kapal bangun baru, akibat: 1. Kondisi financial & manajemen pelaksanaan pekerjaan galangan yang kurang baik 2. Keterlambatan proses <i>approval drawing</i> oleh badan klasifikasi/pemerintah 3. Keterlambatan proses kelengkapan dokumen & teknis kapal 4. Spesifikasi kapal tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pen-charter/kontrak 5. Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pelayaran dan galangan dalam negeri, dimana terdapat kebijakan PSBB dan <i>social distancing</i> *)	1.1 Mendapatkan konfirmasi dari beberapa <i>engine maker</i>/distributor untuk kesiapan pengadaan mesin 1.2 Menambahkan persyaratan keuangan berupa jaminan pembiayaan dari galangan harus disupport oleh Bank Umum Nasional Buku-4 pada saat penyusunan pedoman baru 1.3 PTK (Fungsi <i>New Building Project</i> dan <i>Vessel Marketing</i>) berkoordinasi dengan pen-charter untuk kejelasan <i>delivery point</i> 2.1 Fungsi <i>New Building Project</i> melakukan pertemuan rutin antara pihak galangan, badan klasifikasi untuk pembahasan <i>approval drawing</i> 2.2 Fungsi <i>New Building Project</i> melakukan monitoring secara intensif proses <i>approval drawing</i> 2.3 Fungsi <i>New Building Project</i> melakukan berkoordinasi dengan Fungsi <i>Vessel Compliance</i> terkait untuk <i>final drawing approval</i> dari Hubla 3.1 Fungsi <i>Vessel Compliance</i> melakukan koordinasi dengan Hubla untuk percepatan pengurusan dan kelengkapan dokumen (dilakukan secara paralel) 4.1 Melakukan survey bersama dengan pen-charter pada saat seatrial 5.1 <i>New Building Project</i> berkoordinasi dengan fungsi internal terkait untuk memberi tanggapan atas surat permohonan perpanjangan waktu pembangunan kapal dari galangan *) 5.2 PTK menyiapkan program penyiapan familiarisasi crew dan <i>delivery</i> kapal sesuai kebijakan PSBB *)

Mitigasi Risiko Perusahaan

Company Risk Mitigation

Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
	This risk is related to risks from the operational process, such as the occurrence of delays in delivery time for new ships build, due to: 1. Poor financial condition & management of shipyard work implementation 2. Delay in the approval drawing process by the classification agency/government 3. Delays in the process of completing documents & ship technicalities 4. Vessel specifications are not in accordance with those required by the pen-charter/contract 5. The impact of the COVID-19 pandemic on the domestic shipping and shipyard industry, following implementation of PSBB and social distancing policies *)	1.1 Get confirmation from several engine makers/ distributors for machine procurement readiness 1.2 Adding financial requirements in the form of financial guarantees from shipyards must be supported by the National Commercial Bank Buku-4 at the time of compiling the new guidelines 1.3 PTK (New Building Project and Vessel Marketing Function) coordinates with charterers for clarity of delivery points 2.1 The New Building Project function conducts regular meetings between shipyards and classification bodies to discuss approval drawings 2.2 The New Building Project function intensively monitors the approval drawing process 2.3 The New Building Project function coordinates with the relevant Vessel Compliance Function for the final drawing approval from Hubla 3.1 Vessel Compliance function coordinates with Hubla to accelerate document management and completeness (done in parallel) 4.1 Conduct a survey together with the pen-charter at seatrial 5.1 The New Building Project coordinates with related internal functions to respond to requests for an extension of ship building time from the shipyard *) 5.2 PTK prepares a crew familiarization preparation program and ship delivery according to PSBB policy *)
Operational Risk	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu terjadinya kerusakan kapal milik, akibat: 1. Performa mesin kapal milik yang menurun (<i>main engine, auxiliary engine</i>) 2. Usia kapal yang sudah tua dan <i>sparepart</i> kapal sulit ditemukan 3. Kondisi kapal 2nd yang <i>under perform</i> 4. Belum optimalnya strategi pemeliharaan kapal 5. Kompetensi & <i>attitude crew</i>	1.1 Membuat monitoring pelaksanaan perawatan mesin sesuai dengan jam kerja mesin kapal 1.2 Percepatan pengadaan <i>critical sparepart</i> terutama untuk kapal milik yang sudah tua 1.3 Melakukan kontrak payung dengan <i>maker/ authorized agent</i> 2.1 Membuat daftar <i>sparepart</i> yang sudah discontinue dan <i>maker</i> yang sudah tidak exist 2.2 Melakukan penggantian sistem di kapal (<i>alarm monitoring sistem</i>) 2.3 Melakukan kontrak payung dengan <i>maker/ authorized agent</i> 3. Melakukan penggantian sistem di kapal (<i>alarm monitoring sistem</i>) 4.1 Melakukan restrukturisasi organisasi <i>maintenance</i> kapal 4.2 Membuat <i>check list</i> pekerjaan per kapal 5.1 Meningkatkan kompetensi <i>crew</i> dengan membuat <i>training need analysis</i> dengan pelaksanaan <i>in house training</i> atau dilakukan oleh <i>Crew Agent</i> (PT PKG) 5.2 Menjalankan evaluasi penilaian <i>crew</i> dengan penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>

Mitigasi Risiko Perusahaan

Company Risk Mitigation

Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
	This risk is related to the risks from the operational process, such as the occurrence of damage to owned vessels, due to 1. Decreased performance of the ship's engine (main engine, ae) 2. The ship is aged and the spare parts are difficult to find 3. The condition of the second ship was under performing 4. Not optimal ship maintenance strategy 5. Competence & crew attitude	1.1 Monitoring the implementation of engine maintenance in accordance with the ship's engine working hours 1.2 Acceleration of procurement of critical spare parts, especially for old owned vessels 1.3 Performing an umbrella contract with a maker/ authorized agent 2.1 Make a list of discontinued spare parts and makers that do not exist 2.2 Perform system replacement on the ship (alarm monitoring system) 2.3 Performing an umbrella contract with a maker/ authorized agent 3. Perform system replacement on the ship (alarm monitoring system) 4.1 Restructuring the ship maintenance organization 4.2 Make a check list of jobs per ship 5.1 Improve crew competence by making training needs analysis by implementing in-house training or carried out by Crew Agents (PT PKG) 5.2 Carry out crew assessment evaluations by applying rewards and punishments
Operational Risk	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu lamanya penyelesaian atas keluhan pelanggan, akibat: 1. Kurang responsifnya unit terkait dalam menangani keluhan pelanggan 2. Rantai penanganan keluhan yang belum jelas This risk is related to the risks from the operational process, such as the slow customer complaints settlement, due to: 1. The unit is less responsive in handling customer complaints 2. Unclear complaint handling mechanism	1.1 Peningkatan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian keluhan pelanggan 1.2 Melakukan <i>survey customer satisfaction</i> 2.1 Merevisi prosedur atas penyelesaian keluhan pelanggan untuk meningkatkan <i>effectiveness</i> 1.1 Improve monitoring and evaluation of the resolution of customer complaints 1.2 Conduct a customer satisfaction survey 2.1 Revise procedures for resolving customer complaints to improve effectiveness
Operational Risk	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu durasi pelaksanaan docking melebihi batas waktu, akibat 1. Terdapatnya pekerjaan bawah air yang tidak dapat diprediksi saat pembuatan <i>docking list</i> 2. Adanya temuan regulator pada saat pelaksanaan <i>docking</i> 3. Keterlambatan progres pekerjaan oleh kontraktor dan galangan 4. Belum optimalnya pengawasan oleh <i>owner superintendent</i> 5. Terdapat permintaan penundaan pelaksanaan docking oleh pencharter dikarenakan kebutuhan operasional 6. Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pelayaran dan galangan dalam negeri, dimana terdapat kebijakan PSBB dan <i>social distancing</i>*)	1.1 Pembentukan Tim Docking 1.2 Fungsi Fleet menyampaikan dengan detail kepada Fungsi Procurement terkait dengan jenis dan fasilitas yang harus dimiliki galangan, deskripsi pekerjaan dalam <i>docking list</i> dan SOW Permintaan 2.1 Pembentukan Tim Docking 2.2 Fungsi Fleet menyampaikan dengan detail kepada Fungsi Procurement terkait dengan jenis dan fasilitas yang harus dimiliki galangan, deskripsi pekerjaan dalam <i>docking list</i> dan SOW Permintaan 3.1 Pembentukan Tim Docking 3.2 <i>Yard ability assessment</i> saat prakualifikasi kandidat galangan 4. Meningkatkan kompetensi <i>owner superintendent</i>

Mitigasi Risiko Perusahaan

Company Risk Mitigation

Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
	This risk relates to risks from the operational process, such as duration of the docking that exceeds the time limit, due to: 1. Unpredictable underwater work during the docking list 2. Regulators' findings during the docking 3. Delay in work progress by Contractors and shipyards 4. Not optimal supervision by the OS 5. There is a request for a delay in the implementation of the docking by the charterer due to operational needs 6. The impact of the COVID-19 pandemic on the domestic shipping and shipyard industry, following implementation of PSBB and social distancing policies *)	5. Memberitahukan pen-charter 3 bulan sebelum pelaksanaan docking, sehingga bila diperlukan akan diupayakan untuk mencari kapal pengganti. 6.1 Monitoring pelaksanaan dan biaya docking dengan pihak galangan agar tetap sesuai dengan kontrak *) 6.2 Pekerjaan <i>maintenance/running repair</i> yang dapat dilakukan oleh crew sebelum kapal naik dok *) 1.1 Formation of the Docking Team 1.2 Fleet function submits details to the Procurement Function regarding the types and facilities that the shipyard must have, job descriptions in the docking list and Request SOW 2.1 Formation of the Docking Team 2.2 Fleet function submits details to the Procurement Function regarding the types and facilities that the shipyard must have, job descriptions in the docking list and SOW Request 3.1 Formation of the Docking Team 3.2 Yard ability assessment during shipyard candidate prequalification 4. Improve OS competence 5. Notifying the pen-charter 3 months before the docking, thereby efforts will be made to find a replacement vessel, if necessary. 6.1 Monitoring of execution and docking costs with shipyards to stay on contract *) 6.2 Maintenance/running repair work that can be done by the crew before the ship gets to dock *)

*) perubahan penyebab risiko dan rencana mitigasi sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

*) changes in risk factors and mitigation plans as a impact of COVID-19 pandemic.

Monitoring Realisasi Mitigasi Risiko Perusahaan Tahun 2020

Dari realisasi atas mitigasi risiko (tindak lanjut) terhadap 7 (tujuh) risiko korporat berbasis RKAP di tahun 2020, Perusahaan telah melakukan penanganan risiko dengan langkah-langkah sebagaimana yang terdapat dalam mitigasi tersebut diatas, yang dapat disimpulkan bahwa realisasi atas mitigasi risiko tersebut telah dilakukan dengan baik.

Monitoring risiko di tahun 2020 disusun dan dilakukan secara menyeluruh pada proses bisnis di setiap unit kerja melalui tahapan proses pemantauan (*monitoring*) risiko yang diikuti dengan proses komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan di tahun 2020, untuk memastikan efektifitas pelaksanaan atas mitigasi risiko (tindak lanjut) yang telah di susun oleh unit kerja telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan potensi risiko dapat diminimalisir dan dikendalikan.

Monitoring realisasi mitigasi risiko dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Direksi dan Dekom PTK melalui laporan manajemen serta dilaporkan kepada PT Pertamina International Shipping selaku Subholding Shipping dan PT Pertamina (Persero) melalui sistem ERMS.

Evaluasi manajemen risiko dilakukan dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan. Pada tahun 2020, PTK melakukan evaluasi manajemen risiko sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret dan Desember. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dilakukan pembaruan daftar risiko (*risk event*) yang telah disusun sebelumnya sebagai akibat dari pandemi COVID-19, dimana terdapat perubahan pada penyebab risiko, dampak risiko, serta rencana mitigasi. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi perubahan lingkungan yang pesat guna menghindari atau meminimalkan potensi kerugian serta mengoptimalkan peluang.

Monitoring on Enterprise Risk Mitigation Realization in 2020

Based on realization of risk mitigation (follow-up) for 7 (seven) RKAP-based corporate risks in 2020, the Company has carried out risk management with steps as contained in the mitigation mentioned above, which can be concluded that the realization of the risk mitigation has been carried out properly.

Risk monitoring in 2020 is compiled and carried out comprehensively in business processes in each work unit through the stages of the risk monitoring process followed by continuous communication and coordination processes in 2020, to ensure the effectiveness of the implementation of risk mitigation (follow-up) that has been arranged by the work unit has been done well and in accordance with the predetermined plan, so it is expected that the potential risk can be minimized and controlled.

Monitoring of risk mitigation realization is carried out every month and reported to the Board of Directors and the PTK Board of Directors through management reports and reported to PT Pertamina International Shipping as Subholding Shipping and PT Pertamina (Persero) through the ERMS system.

Risk management evaluation is carried out in order to improve the effectiveness of the Company's risk management implementation. In 2020, PTK conducted risk management evaluations 2 (two) times, namely in March and December. Based on the results of the evaluation, an update was made on the list of risks (risk events) that had been prepared previously as a result of the COVID-19 pandemic, where there were changes in risk causes, risk impacts, and mitigation plans. This is done in anticipation of rapid environmental changes in order to avoid or minimize potential losses and optimize opportunities.

PTK telah mempunyai kriteria mengenai batas tingkat risiko yang dapat diterima. Dengan adanya pembaruan daftar risiko perusahaan, maka dilakukan analisis/pengukuran ulang untuk menentukan prioritas pengelolaannya berdasarkan tingkat atau nilai risikonya. Daftar risiko yang teridentifikasi tersebut seluruhnya akan dikelola Perusahaan dengan mempertimbangkan rencana perlakuan yang sesuai. Setelah diterapkannya rencana perlakuan diharapkan risiko Perusahaan akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelum dilakukan perlakuan tersebut.

Hasil analisis/pengukuran terhadap risiko yang teridentifikasi menunjukkan tingkat risiko setelah dilakukan pengendalian/pengelolaan adalah menurun. Untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima diperlukan upaya peningkatan pengendalian yang ada atau alternatif perlakuan risiko yang lain.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas sistem manajemen risiko dilakukan di tahun 2018 yaitu dengan melakukan pengukuran maturitas risiko. Berdasarkan pengukuran tersebut, tingkat maturitas pelaksanaan manajemen risiko PTK berdasarkan kerangka kerja ISO 31000:2018 adalah 3,73 (*mature growth*).

Dengan perincian untuk aspek *principles* berada pada tahap *advance*, aspek *framework* dalam aspek *growth* dan aspek *process* dalam tahap *mature growth*. Dengan rincian:

- Aspek Principles berada dalam tahap *Advance*;
- Aspek Framework dalam tahap *Mature Growth*;
- Aspek Process dalam tahap *Mature Growth*.

Pencapaian ini menandakan bahwa ERM telah terdokumentasi dan terkoordinasi, serta dijalankan secara teratur pada tiap fungsi organisasi. ERM

PTK already has criteria regarding acceptable risk level limits. With the updating of the company's risk list, analysis/re-measurement is carried out to determine the priorities for management based on the level or value of risk. The list of identified risks will all be managed by the Company by considering the appropriate treatment plan. After implementing the treatment plan, it is expected that the Company's risk will be lower than before the treatment was carried out.

The results of the analysis/measurement of the identified risks show that the level of risk after controlling/management is decreasing. To reduce risk to an acceptable level, it is necessary to improve existing controls or alternative risk treatments.

The Risk Management System Effectiveness Overview

An evaluation on the risk management system is carried out in 2018 - 2019 by measuring risk maturity. Based on these measurements, the level of maturity of risk management in PTK according to the ISO 31000: 2018 framework is (*mature growth*).

Detail aspects of the principles are including the advance, framework, growth and process aspects in the mature growth stage, with detail, as follows:

- Principles Aspect in Advance stage;
- Framework Aspect in Mature Growth stage;
- Process Aspect in Mature Growth stage.

This achievement indicates that Enterprise Risk Management (ERM) has been documented and coordinated, and carried out in a measurable manner

terimplementasi secara komprehensif serta terdapat perangkat formal kendali ERM pada tingkat eksekutif. Integrasi ERM dengan perencanaan strategis dan penilaian kinerja perusahaan belum sempurna, namun telah terdapat tahap evaluasi framework ERM yang sistematis.

Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan Risiko

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan pengelolaan risiko perusahaan, berbagai upaya telah dilaksanakan PTK diantaranya melakukan integrasi manajemen risiko serta pengembangan dan pengintegrasian aplikasi manajemen risiko. Integrasi manajemen risiko dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan *three lines of defense* yaitu pendekatan yang sistematis dan efektif karena dapat meningkatkan komunikasi dan kontrol dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab (*accountability and segregation of duties*) sehingga dapat mendukung terciptanya budaya risiko, pemahaman dan kesadaran risiko yang lebih baik,
- *Risk based audit*, dan
- *Risk based budgeting* (RBB) yaitu menyelaraskan perumusan RKAP dengan pengelolaan risiko untuk memastikan pencapaian target perusahaan.

Disisi lain, pengelolaan risiko akan lebih mudah dan cepat dengan adanya digitalisasi. Untuk itu PTK akan melakukan reaktivasi aplikasi *Enterprise Risk Management* (ERM) PTK pada portal PRIDE dengan pengembangan fitur-fiturnya. Selain itu, PTK juga telah menggunakan aplikasi *Enterprise Risk Management System* (ERMS) Pertamina untuk mengintegrasikan *top risk* seluruh anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

at each organizational function. ERM is implemented comprehensively and formal tools for ERM control at the executive level are in place. ERM integration with strategic planning and evaluation of company performance is not perfect, but there has been a systematic evaluation phase of the ERM framework.

Risk Management Improvement and Enhancement

In order to improve and enhance the company's risk management, PTK has carried out various efforts, including integrating risk management and developing and integrating risk management applications. Risk management integration is carried out through the following activities:

- Implementation of three lines of defense, namely a systematic and effective approach because it can improve communication and control by clarifying duties and responsibilities (*accountability and segregation of duties*) so as to support the creation of a risk culture, better understanding and risk awareness.
- Risk based audit, and
- Risk based budgeting (RBB), namely aligning the RKAP formulation with risk management to ensure the achievement of company targets.

On the other hand, risk management will be easier and faster with digitalization. For this reason, the PTK will reactivate the PTK Enterprise Risk Management (ERM) application on the PRIDE portal with the development of its features. In addition, PTK has also used Pertamina's Enterprise Risk Management System (ERMS) application to integrate the top risks of all PT Pertamina (Persero) 's subsidiaries.

Sosialisasi dan Pengembangan Penerapan Manajemen Risiko

Pertamina Trans Kontinental secara berkesinambungan melakukan sosialisasi manajemen risiko guna membangun kesadaran risiko (*risk awareness*) kepada seluruh unit kerja, cabang dan juga pemangku kepentingan. Sosialisasi Manajemen Risiko dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan *internal event* kepada seluruh pekerja PTK pada segenap tingkatan termasuk tenaga *outsourcing*, serta pemangku kepentingan.

Sosialisasi Manajemen Risiko diantaranya dilakukan melalui media berikut:

- *Enterprise Risk Management System* (ERMS) Pertamina.
- *Upskilling* dan *coaching clinic* Risk Management kepada PIC 13 Cabang, seluruh Anak Perusahaan dan *Joint Venture*.
- Pelaporan *risk monitoring* secara berkala melalui Laporan Management dan Sistem ERMS
- Secara berkala, juga dilakukan sosialisasi terhadap Unit Kerja dan Cabang.

Pada tahun 2020 PTK juga melakukan beberapa upaya pengembangan terkait penerapan Manajemen Risiko yaitu:

- Mengesahkan Pedoman Manajemen Risiko No. A-002/I0000/2020-S0 revisi ke-1 tanggal 19 Maret 2020 dan Tata Kerja Organisasi Manajemen Risiko *Ongoing Business* No. B-008/I0000/2020-S0 revisi ke-0 tanggal 19 Maret 2020.
- Pelaksanaan *benchmarking* pengelolaan risiko

Socialization and Development of Risk Management Implementation

Pertamina Trans Kontinental is persistent to perform socialization on risk management to promote risk awareness to all work units, branches, and also stakeholders. The Risk Management socialization is performed by utilizing various media and internal event to all PTK employees and levels, including outsourcing personnel and stakeholders.

The socialization media of Risk Management is performed through::

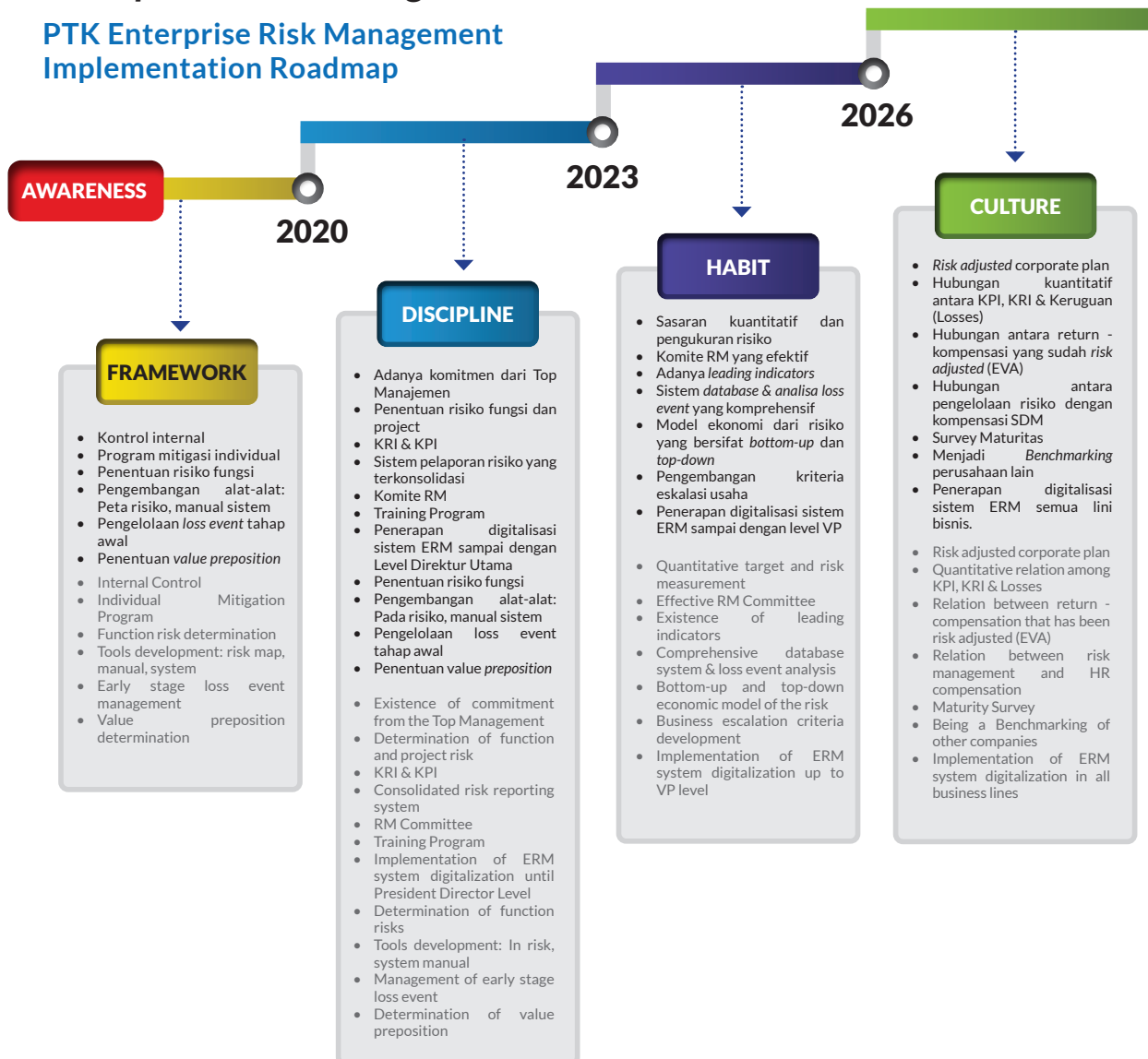
- Enterprise Risk Management, which is included in the portal, ptk-shipping.com.
- Upskilling and coaching clinic Risk Management to PIC of 13 Branches, all Subsidiaries, and Joint Venture.
- Risk Monitoring reporting.
- Periodical socialization to work units and branches.

In 2020, PTK also made several development efforts related to the application of Risk Management, as follows:

- Ratified the Risk Management Guidelines No. A-002/I0000/2020-S0 1st revision dated 19 March 2020 and the Work Procedure of the Ongoing Business Risk Management Organization No. B-008/I0000/2020-S0 0 revision dated 19 March 2020.
- Implementation of risk management benchmarking

Roadmap Implementasi Enterprise Risk Management PTK

PTK Enterprise Risk Management Implementation Roadmap



Sesuai *roadmap* implementasi ERM, pada tahun 2020 PTK berada pada posisi transisi menuju Stage 3: DISCIPLINE dimana pada tahap ini PTK sudah memiliki/menjalankan seluruh kegiatan berikut:

1. Stage 2: FRAMEWORK

- Kontrol internal
- Program mitigasi individual
- Penentuan risiko fungsi

In accordance with the ERM implementation roadmap, in 2020 PTK is in a transition position to Stage 3: DISCIPLINE where at this stage PTK already has/carries out all of the following activities:

1. Stage 2: FRAMEWORK

- Internal controls
- Individual mitigation programs
- Determination of functional risk

- Pengembangan alat-alat: Peta risiko, manual sistem
- Pengelolaan *loss event* tahap awal
- Penentuan *value preposition*

2. Stage 2: DISCIPLINE

- Adanya komitmen dari *top manajemen*
- Penentuan risiko fungsi dan *project*
- KRI & KPI
- Sistem pelaporan risiko yang terkonsolidasi
- Komite RM
- *Training program*
- Penerapan digitalisasi sistem ERM sampai dengan level Direktur Utama
- Penentuan risiko fungsi
- Pengembangan alat-alat: Peta risiko, manual sistem

Untuk mencapai Stage 3: DISCIPLINE secara penuh, PTK harus menyelesaikan beberapa tahapan akhir yang sepenuhnya terkait dengan pengelolaan *loss event* tahap awal dan penentuan *value preposition*. Kedua kegiatan tersebut saat ini baru dilaksanakan untuk *top risk* Perusahaan, sedangkan risiko fungsi atau cabang masih belum dilaksanakan. Kegiatan tersebut rencananya secara bertahap akan dilakukan pada tahun selanjutnya.

- Development tools: Risk maps, system manuals
- Early stage loss event management
- Determination of value prepositions

2. Stage 2: DISCIPLINE

- There is commitment from top management
- Determination of function and project risks
- KRI & KPI
- Consolidated risk reporting system
- RM Committee
- Training program
- Digitalization of the ERM system up to the level of the President Director
- Determination of functional risk
- Development tools: Risk maps, system manuals

To reach Stage 3: fully DISCIPLINE, PTK must complete several final stages which are fully related to the initial loss event management and determination of value prepositions. These two activities are currently only being carried out for the Company's top risk, while the function or branch risks have not yet been implemented. The activity is planned to be carried out in stages in the upcoming years.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

- Sistem Pengendalian Internal merupakan bagian dari proses bisnis yang terintegrasi antara kegiatan dan peraturan sebagai langkah untuk mencapai tujuan Perusahaan. Melalui sistem pengendalian internal diharapkan kegiatan bisnis Perusahaan berjalan efektif dan efisien, tercipta stabilitas keuangan Perusahaan. Implementasi sistem pengendalian internal telah mencerminkan bahwa Perusahaan memiliki catatan keuangan dan operasional bisnis yang sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku.
- Internal Control System is part of an integrated business process between activities and regulations as an initiative to achieve the Company's goals. Implementation of internal control system is expected to encourage effective and efficient business activity of the Company, to create the Company's financial stability. The implementation of the internal control system reflects that the Company has financial records and business operations in accordance with the articles of association and prevailing regulations.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 sebagai pengganti Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance). Pada Badan Usaha Milik Negara, Internal Audit terus berupaya mengembangkan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan pendekatan pengembangan Sistem Pengendalian Internal COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions) untuk mengamankan aset dan menjaga kesehatan keuangan PTK.

As stipulated in Article 26 of State Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 as a substitute for Minister of State-Owned Enterprises Decree Number KEP-117/M-MBU/2002 concerning Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises, Internal Audit continues to develop an Internal Control System by applying COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions) Internal Control System development approach to safeguard assets and maintain the financial soundness of PTK.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Proses perancangan sistem pengendalian internal PTK telah mengacu kepada kerangka Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway

Internal Control System Conformity With COSO Framework

In PTK, the internal control system designing process has complied to the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO)

Commissions (COSO) dengan memperhatikan 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan ditujukan untuk:

- Mengamankan aset;
- Mengupayakan efisiensi dan efektivitas operasi Perusahaan;
- Mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi akuntansi/finansial dan manajemen;
- Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku.

Three Lines of Defense

Sesuai COSO, PTK telah menerapkan mekanisme Three Line of Defense, sebagai aktivitas penerapan pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara terpadu.

First Line of Defense

Dikelola oleh masing-masing unit atau satuan kerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing:

- Pengetahuan dan pemahaman atas proses bisnis, proses kerja utama.
- Identifikasi potensi risiko pada tugas yang menjadi wewenang dari setiap unit.
- Pengendalian dan pelaksanaan mitigasi potensi risiko.

Second Line of Defense

Dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang berada pada unit *strategic & planning* dan fungsi *compliance* yang berada pada unit *Corporate Secretary*

- Peningkatan fungsi *check & balance* mendukung operasi Perusahaan.
- Sosialisasi kesadaran terhadap penerapan tata kelola Perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko pada semua unit kerja dan tingkatan organisasi.
- Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi.
- Penyempurnaan pedoman dan kebijakan operasional dan non-operasional.

framework by considering 5 components, such as control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and supervision. The implementation of internal control system is aimed to:

- Secure assets;
- Encourage efficiency and effectivity in the Company's operation;
- Develop reliability and comprehensiveness in accounting/financial information and management;
- Guarantee compliance to policy and procedure as well as the prevailing laws and regulations.

Three Lines of Defense

In accordance with COSO, PTK has implemented third line of defense mechanism as part of the internal control implementation and integrated corporate governance.

First Line of Defense

Managed by each unit or task force in accordance with respective functions and duties

- Knowledge and insight on business process, and main work process.
- Potential risks identification on the duties that have been authorized to each unit.
- Control and implementation of potential risks mitigation.

Second Line of Defense

Managed by risk management function under the strategic & planning unit and compliance function under the Corporate Secretary unit

- Increasing check & balance function in support of the Company's operation.
- Socializing awareness to the implementation of corporate governance, compliance and risk management in all work units and organizational levels
- Implementing integrated risk management.
- Improving operational and non-operational manuals and policies.

Third Line of Defense

Dikelola oleh Unit Audit Intern

- Pelaksanaan audit internal sesuai program kerja audit tahunan.
- Pelaksanaan audit surprise untuk mengukur kesadaran akan penerapan tata kelola perusahaan.
- Kepatuhan dan manajemen risiko.
- Database temuan audit internal dan eksternal sebagai masukan untuk peningkatan
- kualitas setiap unit/fungsi.

Penerapan Elemen Pengendalian Internal

PTK menerapkan elemen-elemen pengendalian internal dengan merujuk kepada COSO – *Internal Control Framework*.

- **Lingkungan Pengendalian**
PTK berkomitmen membangun lingkungan pengendalian yang baik melalui penerapan serangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi.
- **Penilaian Risiko**
PTK menerapkan sistem manajemen risiko dan melakukan pemetaan serta mitigasi risiko atas risikorisiko yang teregritasi: *governance risk, strategy and planning risk, finance risk, operational/ infrastructure risk, compliance risk, reporting risk*.
- **Aktivitas Pengendalian**
PTK memiliki pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan non-operasional. Mekanisme pengendalian terhadap risiko diterapkan dalam bentuk *Three Line of Defense*.
- **Komunikasi dan Informasi**
PTK memiliki sistem manajemen informasi

Third Line of Defense

Managed by the Internal Audit Unit

- Implementation of internal audits in accordance with the annual audit work program.
- Implementation of a surprise audit to measure awareness of the implementation of governance company.
- Compliance and risk management.
- Database of internal and external audit findings as input for improvement the quality of each unit/function.

Implementation of Internal Control Elements

PTK implements elements of internal control by referring to COSO – *Internal Control Framework*.

- **Control Environment**
PTK is committed to build a good control environment through a series of standards, processes, and structures which serve as basis for internal control implementation across the organization.
- **Risk Assessment**
PTK implements risk management system and performs risk mapping and mitigations over the integrated risks: *governance risk, strategy and planning risk, finance risk, operational/ infrastructure risk, compliance risk, and reporting risk*.
- **Control Activities**
PTK has a manual and policies for operational and non- operational activities. The control mechanism to risks is applied in the form of *Third Line of Defense*.
- **Monitoring Activity**
PTK has good information management system

yang baik dan terus mendorong komunikasi yang terbuka dengan seluruh pihak untuk memperoleh informasi yang memadai untuk proses pengambilan keputusan.

- **Aktivitas Pemantauan**

PTK memiliki mekanisme pemantauan dalam bentuk Rapat Kerja, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris – Direksi, Rapat Direksi dan berbagai aktivitas pengendalian lainnya.

and strives to promote open communication with all parties to acquire sufficient information for decision making.

- **Monitoring Activity**

PTK has a monitoring mechanism in form of Coordination Meeting, Board of Commissioners Meeting, Management Meeting, Board of Directors Meeting, and other various control activities.

Pengendalian Keuangan

Sejalan dengan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, PTK melakukan pengendalian atau pengelolaan terkait keuangan sebab hal tersebut menjadi faktor penting dalam kelancaran aktivitas operasional dan bisnis perusahaan. Pengendalian/ pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sehat sehingga perusahaan dapat meminimalisir pemborosan, penyimpangan, serta mengoptimalkan arus keuangan perusahaan.

Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan

Tujuan pengelolaan keuangan adalah memaksimalkan laba serta mengejar tingkat pertumbuhan Perusahaan melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (*cost consciousness*). Perusahaan menganalisa dan mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menangani risiko yang terjadi.

Pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Terkait prosedur, kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan disusun dan dievaluasi secara periodik, serta sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai guna menjauhkan perusahaan dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terkait proses pencatatan, kesalahan penyajian, hingga pelaporan keuangan perusahaan.

Financial Control

In line with the implementation of effective internal control system, CAR carries out financial control or management because it is an important factor in the smooth running of the company's operational and business activities. Financial control/management is carried out with sound principles thereby the company can minimize waste, fraud, and optimize financial flow of the Company.

Financial Management Basic Principles

Financial management holds the purpose of maximizing profit as well as pursuing growth level of the Company through an implementation of work program based on cost consciousness principle. The Company analyzes and anticipated all possible risks and performs necessary measures to address the risks.

The Company's financial management is carried out professionally, transparently, and based on the principle of prudence. Related to procedures, policies and regulations relating to financial management, it is prepared and evaluated periodically, and in accordance with Financial Accounting Standards and prevailing laws and regulations. Companies must create an adequate internal control system to keep the company away from various high-risk issues related to the recording process, misrepresentation, to the company's financial reporting.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan dalam bentuk rencana jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dasar penyusunan anggaran adalah program kerja dan dikoordinasikan antar fungsi/kantor cabang untuk menyinergikan usulan anggaran setiap fungsi/kantor cabang dengan menganut prinsip *bottom-up* dan *top-down*. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis setiap fungsi kantor cabang dengan mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya, dan analisis terhadap peluang pasar yang kemungkinan besar bisa dicapai. Anggaran Perusahaan terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran biaya dan anggaran investasi. Perusahaan telah melakukan pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dan penyetoran dana serta otorisasi dalam pengelolaan keuangan.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada RKAP dan mempertimbangkan azas manfaat. Direksi dan Dewan Komisaris menyusun kebijakan mengenai transaksi-transaksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, selain yang diatur dalam Anggaran Dasar. Setiap keputusan Dewan Komisaris terkait dengan transaksi-transaksi yang melalui persetujuan Komisaris, wajib ditaati Direksi.

Direksi menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan mengenai pendelegasian dan batas kewenangan untuk mempercepat proses aktivitas dengan tetap memperhatikan risiko. Pengeluaran-pengeluaran yang belum dicantumkan dalam RKAP dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Direksi.

Perubahan revisi rencana kerja dan anggaran harus melalui prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan Direksi dan dilakukan dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan memberikan apresiasi terhadap fungsi/kantor cabang yang dapat mencapai target kinerjanya.

Financial Management Planning

The company's financial management is carried out in the form of short-term, medium-term and long-term plans. The basis for preparing a budget is a work program and is coordinated between functions/branch offices to synergize the proposed budget of each function/branch office by adopting the bottom-up and top-down principles. The Board of Directors has set realistic revenue and cost targets for each branch office function by taking into account the needs, resources, and analysis of market opportunities that are likely to be achieved. The Company's budget consists of an income budget, a cost budget and an investment budget. The Company has segregated duties between the functions of verification, recording and reporting, depositing and depositing funds as well as authorization in financial management.

Financial Management Implementation

Activities of the Company are carried out by referring to RKAP and considering benefits principle. The Board of Directors and Board of Commissioners prepare policies on transactions requiring approval from the Board of Commissioners, aside from the regulations in the Articles of Association. Each decision made by the Board of Commissioners related to transactions that require approval from the Board of Commissioners must be obeyed by the Board of Directors.

The Board of Directors stipulates a financial management policy on the delegation and limit of authority to accelerate activity process by consistently considering the risks. Expenditures that have yet to be stated in RKAP could be made possible after obtaining an approval from the Board of Directors.

Changes in the revision of work plan and budget should undergo procedures/provisions stipulated by the Board of Directors and be based on justifications that can be held accountable for. The Company gives appreciation to functions/branch offices that could achieve its performance target.

Pengendalian Pengelolaan Keuangan

Setiap fungsi/kantor cabang harus mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan kepada Direksi. Manajer fungsi/ kepala cabang bertanggung jawab untuk memonitor, mengevaluasi dan mengefektifkan realisasi RKAP pada fungsi/kantor cabangnya.

Perusahaan melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP dan analisis terhadap penyimpangan (*variance*) yang dilakukan oleh fungsi kantor cabang secara keseluruhan. Adapun pemantauan pengelolaan keuangan kantor cabang menjadi tanggung jawab Fungsi *Financial Accounting*.

Perusahaan menetapkan kebijakan yang jelas mengenai pelimpahan wewenang pemberian otorisasi terhadap pengeluaran uang. Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Direksi.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan

Setiap fungsi/kantor cabang/anak perusahaan wajib mengirimkan laporan keuangan ke Direktur Keuangan. Perusahaan melakukan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh fungsi/kantor cabang serta anak perusahaan. Direktur Keuangan harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur akuntansi diterapkan secara konsisten dan dilaksanakan oleh seluruh fungsi/ kantor cabang. Direksi bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Penyampaian laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan tepat waktu, untuk dikonsolidasikan oleh induk perusahaan.

Pengendalian Operasional

Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan pengiriman jasa. Proses bisnis kunci PTK terdiri dari kegiatan pemasaran dan operasi kapal (*Marketing and Operation*), keagenan kapal, *port operation* and service untuk pelabuhan khusus migas.

Financial Management Control

Each function/branch office should be account for financial management to the Board of Directors. The manager of function/branch office is responsible for monitoring, evaluating, and making the realization of RKAP effective in its function/branch office.

The Company carries out an evaluation over the RKAP implementation and analysis on the variance performed by the branch office function as a whole. The monitoring of financial management at a branch office became the responsibility of Financial Accounting Function.

The Company stipulates a clear policy on the delegation of authority on giving authorization for cash expenditure. The Board of Commissioners monitors the financial management accomplished by the Board of Directors.

Financial Management Reporting

Each function/branch office/subsidiary is obligated to submit financial statements to Finance Director. The Company performs the consolidated financial statements from all functions/branch offices as well as subsidiaries. Finance Director should ensure the accounting policies and procedures are implemented consistently and by all functions/branch offices. The Board of Directors is responsible in preparing the financial statements, in accordance with the prevailing financial accounting standards in Indonesia. The submission of audited financial statements should be handled in a timely manner in order to be consolidated by the parent company.

Operational Control

The Company administers the business activities starting by identifying the needs and ended with service delivery. The key business process of PTK consists of Marketing and Operation, ship agencies, port operation and service for oil and gas special port.

Prinsip Dasar Pengelolaan Operasional

- Tujuan bisnis perusahaan adalah terus melakukan, menguntungkan, dan ditujukan untuk kelangsungan hidup (*going concern*) Perusahaan.
- Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan jasa yang profesional dan penuh integritas.

Perencanaan Pengelolaan Operasional

- Direktur utama memastikan bahwa tujuan manajemen didefinisikan dalam semua proses kunci.
- Rencana dan pengembangan proses yang diperlukan untuk merealisasikan jasa perusahaan tertuang dalam Rencana Kerja Pendapatan dan Laba Tahunan (RKPL).
- *Management Representative* (MR) dan *Designated Person Ashore* (DPA) berwenang untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan memelihara sistem manajemen.

Pelaksanaan Pengelolaan Operasional

- Melaksanakan operasional perusahaan sesuai RKAP dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas biaya.
- Pemilik proses kunci dan proses owner memimpin pelaksanaan kegiatan operasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Utama.
- Jasa diberikan kepada pelanggan mengacu pada TOR (*Term of Reference*) untuk pekerjaan dalam dokumen kontrak yang telah disepakati.

Pengendalian dan Pelaporan

- Pelaporan realisasi kegiatan operasional perusahaan dilakukan oleh unit/ fungsi yang terkait secara berkala kepada Direksi.
- Semua jasa yang diberikan kepada pelanggan dikaji dan ditinjau. Bila mana ada perubahan persyaratan dalam perjanjian maka perubahan diberitahukan kepada pelanggan dan fungsi yang bersangkutan.

Basic Principles of Operational Management

- The business objective of the Company continuously performs, benefits, and is aimed for the Company's going concern.
- Fulfilling the customers' needs with professional service and integrity.

Operational Management Planning

- President Director to ensure the management objectives are defined in all key processes.
- Required process planning and development for company services realization are regulated in Annual Revenues and Profit Budget Plan (RKPL).
- Management Representative (MR) and Designated Person Ashore (DPA) hold the authority to develop, implement, and maintain the management system.

Operational Management Implementation

- Performing company operational in accordance with RKAP by considering cost efficiency and effectivity.
- Owner of key process and owner process are in charge of implementing operational activities to achieve the objectives stipulated and agreed by the President Director.
- Services provided for the customers refer to TOR (*Term of Reference*) designed for the jobs in the agreed contract.

Control And Reporting

- Reporting of the realization of company's operational activities is conducted by related units/functions periodically to the Board of Directors.
- All of the services provided to the customers to be analyzed and reviewed. If there is any change of requirements in the agreement, notification should be made to the customers and functions concerned..

Evaluasi dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal menjaga keamanan harta milik Perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Evaluasi tersebut dilakukan oleh fungsi audit internal untuk memonitoring kecukupan dan efektivitas pengendalian internal. Perusahaan melakukan evaluasi melalui pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan operasional dan menyampaikan hasilnya kepada Direksi dan Kantor Cabang, untuk segera ditindaklanjuti.

Pengendalian internal dalam hal keuangan perusahaan dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal atas pelaporan keuangan (*Internal Control Over Financial reporting/* ICOFR). Pelaksanaan ICOFR sebagai tinjauan (*review*) dalam hal keuangan Perusahaan, telah dilaksanakan Internal Audit selama kurun waktu periode pelaporan. Kesimpulan hasil sertifikasi yang dilaksanakan oleh *Control Group*, memperlihatkan tingkat kecukupan dan efektivitas ICOFR berada pada tingkat efektif.

Pengendalian internal atas operasional Perusahaan dilaksanakan melalui mekanisme *Internal Control Review* (ICR) oleh Internal Audit melalui mekanisme audit operasional. Hasil tinjauan yang dilakukan selama tahun 2020 memperlihatkan perusahaan telah melaksanakan standar prosedur operasi sesuai praktik-praktik terbaik pengelolaan jasa maritim.

Internal Control System Evaluation And Effectivity

Evaluate the effectiveness of the internal control system to safeguard the security of Company property, examine the accuracy and accuracy of accounting data, encourage efficiency, and help encourage compliance with established management policies. The evaluation is carried out by the internal audit function to monitor the adequacy and effectiveness of internal control. The company evaluates through monitoring of the follow-up results of operational checks and submits the results to the Directors and Branch Offices, for immediate action.

The internal control in finance is realized through an internal supervision mechanism over the financial statements (*Internal Control Over Financial Reporting/* ICOFR). The implementation of ICOFR as a review in the Company's finance has been conducted by the Internal Audit throughout the reporting period. The conclusion of certification results, developed by *Control Group*, depicts the ICOFR level of adequacy and effectivity at effective level.

Internal control over the Company's operations is carried out through the *Internal Control Review* (ICR) mechanism by the Internal Audit through the operational audit mechanism. The results of the review conducted during 2020 indicated that the Company had implemented standard operating procedures in accordance with maritime services management best practices.

Pembaruan Terkait Pengendalian Internal

Guna mengefektifkan pelaksanaan sistem pengendalian internal, Perusahaan melakukan pembaruan terkait pengendalian internal yang akan mulai diterapkan pada tahun 2019. Pembaruan tersebut meliputi:

1. Sinergi Internal Audit PT Pertamina (Persero) dengan Anak perusahaan.
2. *Continuous Audit Management System* (CAMS) audit berbasis teknologi.
3. Audit Internal dilakukan berdasarkan Bisnis Proses dan Risk Management, sesuai Audit Annual Program.

Updates Related To Internal Control

In order to have an effective internal control system, the Company carried out updating activities related to the internal control, to which the implementation will commence in 2019. The updates include:

1. Internal Audit Synergy of PT Pertamina (Persero) and Subsidiaries.
2. Technology based audit cams (continuous Audit Management).
3. Internal Audit to be based on Business Process and Risk Management, as per Audit Annual Program.

Permasalahan Hukum

Litigation

Permasalahan Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Selama tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki perkara penting terkait permasalahan hukum dengan pihak-pihak baik yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan operasi bisnis PTK.

Permasalahan Hukum Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2020, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina Trans Kontinental yang sedang menjabat.

Sanksi Regulator

Selama tahun 2020, PTK tidak menerima sanksi dalam bentuk apapun dari lembaga maupun regulator.

Kepatuhan Terhadap Pajak

Selama tahun 2020, PTK telah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pembayaran pajak tepat waktu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Penyimpangan Internal

Selama tahun 2020, tidak terdapat penyimpangan yang bersifat kecurangan yang dilakukan oleh Pekerja PTK.

Legal Issues Involving the Company

In 2020, the Company did not involve in any litigation related to legal issues with parties both those who have direct or indirect relation with the business operations of PTK.

Legal Issues Involving the Board of Commissioners and Board of Directors

In 2020, there was no litigation involving the currently serving members of the Board of Commissioners and Directors of Pertamina Trans Kontinental.

Regulatory Sanctions

In 2020, PTK did not receive any form of sanctions from institutions or regulators.

Tax Compliance

During 2020, PTK has carried out the obligation to deposit and pay taxes on time in accordance with the applicable tax regulations.

Internal Fraud

In 2020, there was no internal fraud committed by PTK employees.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham.

Selama tahun 2020, tidak ada transaksi yang memiliki benturan kepentingan di PTK, setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Dampak Terhadap Perusahaan

Permasalahan hukum perdata dan pidana selama tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum, pengaruhnya terhadap Perusahaan tidak signifikan karena telah melalui proses mitigasi.

Upaya Meminimalisir Risiko Hukum

PTK berupaya secara berkesinambungan untuk terus meminimalisir risiko hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Secara konsisten melaksanakan program *Legal Risk Awareness* sebagai salah satu upaya pencegahan risiko hukum dan peningkatan kualitas pemahaman aspek hukum bagi seluruh pekerja maupun calon pekerja secara berjenjang dan sesuai dengan kebutuhan bisnis PTK.
2. Memperkuat budaya Perusahaan dan integritas melalui sosialisasi dan pengukuran pemahaman pekerja terhadap integritas.
3. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
4. Penegakan disiplin pekerja

Transactions With Conflict of Interest

Conflict of interest refers to a situation containing a conflicting economic interest between the Company and the personal economic interests of the Board of Directors, Commissioners and Shareholders.

Throughout 2020, there was no transactions with a conflict of interest in PTK, each transaction was carried out in accordance with prevailing regulations and always concerning the GCG principles.

Impact to the Company

Civil and criminal legal issues during the reporting year and have been claimed through a legal process, impact on the Company is less significant as been processed through a mitigation process.

Efforts to Minimize Legal Risks

PTK continuously strives to minimize legal risks against the company in carrying out business activities which are reflected in the following activities:

1. Consistently implementing Legal Risk Awareness program as an effort to prevent legal risks and improve the quality of understanding on legal aspects for all employees and prospective employees in stages and in accordance with PTK's business needs.
2. Strengthening corporate culture and integrity through socialization and measurement of employees' understanding of integrity.
3. Establishment of Gratification Control Unit
4. Employee discipline enforcement

Akses Informasi Perusahaan

Access to Company Information

- PTK senantiasa berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai GCG, diantaranya melalui penerapan keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal. Hal ini mengacu kepada Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan, "bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik", dan sebagai pelaksanaan prinsip GCG.
- PTK is always committed to adapt GCG values, including through the implementation of internal and external information disclosure. This refers to Law No.14 of 2008 concerning Public Information Openness which declares, "that the disclosure of Public Information refers to a mechanism to optimize public supervision over administration of the State and other Public Agencies and any matters with impact to the public interest", and as an implementation of the principles of GCG.

PTK menjamin tersedianya akses informasi dan data Perusahaan kepada publik melalui berbagai media. PTK mempertimbangkan kemudahan akses setiap *stakeholder* termasuk masyarakat agar informasi dan data perusahaan dapat tersampaikan dengan baik, cepat dan aktual dengan perantara media online seperti website dan PTK portal serta media cetak seperti Annual Report dan Sustainability Report yang sebagian diantaranya disediakan juga dalam bentuk yang bisa diakses secara online. Namun PTK juga menyediakan media informasi secara langsung melalui siaran pers dan Forum Komunikasi Internal untuk insan PTK.

PTK guarantees availability of corporate information and data access to public through various media. PTK considers accessibility for each stakeholder, including the community so that company information and data can be conveyed properly, quickly and accurately with online media intermediaries such as websites and PTK portals as well as print media such as Annual Reports and Sustainability Reports, some of which are also provided online to be accessed easily. However, PTK also provides direct media information via press releases and Internal Communication Forum for PTK personnels.

Alamat Kantor Korespondensi
Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450
Telp : (+6221) 31923005
Fax : (+6221) 3106804
E-mail : ptkpusat@ptk-shipping.com
Website : www.ptk-shipping.com

Correspondence Office Address
Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450
Telp : (+6221) 31923005
Fax : (+6221) 3106804
E-mail : ptkpusat@ptk-shipping.com
Website : www.ptk-shipping.com

Keterbukaan dalam Komunikasi Internal

Komunikasi internal merupakan sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan terbentuknya hubungan timbal balik antar pihak internal dalam organisasi. Oleh karena itu, PTK senantiasa menciptakan komunikasi dua arah kepada pekerja melalui berbagai media komunikasi.

PTK memiliki media internal berupa aplikasi PRIDE. Aplikasi tersebut merupakan sarana penyampaian berita perusahaan hingga pengumuman terkait perusahaan. Selain itu, komunikasi internal di perusahaan juga dibangun dalam aktivitas-aktivitas operasional seperti meeting internal, townhall meeting, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi internal dalam bentuk selain aktivitas operasional melalui kegiatan employee gathering/ family gathering.

Keterbukaan dalam Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal merupakan bentuk transparansi kepada pihak eksternal. Komunikasi eksternal dengan para pemangku kepentingan senantiasa dijaga agar tercipta hubungan timbal balik antara Perusahaan dan pemangku kepentingan. Selain itu komunikasi eksternal juga sebagai bentuk kewajiban pemenuhan keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh regulator.

Rapat Umum Pemegang Saham & Paparan Publik

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum bagi pemegang saham dalam memutuskan arah Perusahaan serta forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada para pemegang saham.

Disclosure in Internal Communication

Internal communication is a means of communication carried out to disseminate information, both conveying and receiving, and the establishment of reciprocal relationships between internal parties in the organization. Therefore, PTK always creates two-way communication to employees through various communication media

PTK has an internal media in form of a PRIDE application. The application is a channel to disseminate corporate news to until other announcement related to the Company. In addition, internal communication in the company is also built in operational activities such as internal meetings, townhall meetings, and others. Whereas internal communication in the form of other than operational activities through employee gathering/family gathering.

Disclosure in External Communication

External communication is a means of transparency to external parties. External communication with stakeholders is always maintained in order to create a reciprocal relationship between the Company and stakeholders. In addition, external communication is also a form of obligation to fulfill the disclosure of information as stipulated by the regulator.

General Meeting of Shareholders & Public Expose

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a forum where the shareholders decide the direction of the Company and a forum for the Board of Commissioners and Board of Directors to report and being responsible upon their duty implementation and performance to shareholders.

Laporan Tahunan

PTK rutin menerbitkan laporan tahunan yang menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan pada tahun buku tersebut. Laporan tahunan didistribusikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sustainability Report

PTK juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan Perusahaan secara menyeluruh melalui Sustainability Report. Sustainability Report akan disampaikan kepada pemegang saham, regulator, organisasi massa, media massa dan masyarakat.

Siaran Pers

Sebagai bentuk informasi kepada pemangku kepentingan dalam bentuk berita. Sepanjang tahun 2020, PTK telah melakukan siaran pers untuk beberapa berita mengenai informasi positif perusahaan.

Situs Web

PTK menyediakan layanan akses informasi dan data perusahaan melalui situs web perusahaan di alamat www.ptk-shipping.com Informasi terkait perusahaan yang dimuat pada situs web perusahaan.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

PTK berupaya menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan guna menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. Sebab pemangku kepentingan merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada (perusahaan).

PTK melakukan hubungan dan komunikasi dengan seluruh stakeholdernya melalui kegiatan CSR, vendor day, publikasi berita melalui website, publikasi melalui sosial media, penerbitan bulletin cetak dan e-buletin dan siaran pers di media online serta publikasi berita melalui media cetak. yang memiliki tanggung jawab

Annual Report

PTK regularly publishes annual report that presents information about the company's performance during the fiscal year. The annual report is distributed to shareholders and stakeholders

Sustainability Report

PTK also provides comprehensive information regarding the Company's activities through the Sustainability Report. Sustainability Report will be submitted to our shareholders, regulators, mass organizations, mass media and public.

Pers Broadcast

As a manifestation of information to stakeholders in form of news. Throughout 2020, PTK has distributed press releases regarding some news about positive Company's information.

Website

PTK provides corporate information and data access through the official website at www.ptk-shipping.com. Information related to the Company are also presented on the official website.

Relationships with Stakeholders

PTK strives to maintain good relations and communication with stakeholders in order to maintain the sustainability of the company's business. Because stakeholders are parties who have interests both directly and indirectly to the Company.

PTK engages and communicates with all of stakeholders through CSR activities, vendor days, news publications through websites, publications through social media, publishing bulletins and e-bulletins and press releases in online media and news publications through print media. who has the

untuk mengintegrasikan antara kepatuhan aturan yang berlaku dengan kinerja Perusahaan.

responsibility to integrate compliance with applicable rules and company performance.

Dalam upaya menjaga komunikasi yang baik kepada pihak stakeholder, selama tahun 2020 telah melakukan berbagai rangkaian aktivitas yang dijelaskan dibawah ini:

In an effort to maintain good communication with stakeholders, various activities throughout 2020 have been described as follows:

Aktivitas Investor Relations

Investor Relations Activities

Aktivitas Activities	Frekuensi Frequency	
CSR	23 rencana kegiatan tahun 2020, terealisasi 13 kegiatan	23 planned activities for 2020, 13 activities were realized
Vendor Day	1 kali pertahun	Once per Year
Publikasi Berita	1 kali Setiap bulan	Once Per Month

Berbagai media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, siklus bisnis, dan pencapaian kinerja Perusahaan dapat juga dilihat pada tabel di bawah ini:

The various communication media used by the Company to convey data and information related to the operational activities, business cycle and achievement of the Company's performance can also be seen in the table below:

Kepada To	Bentuk Komunikasi Form of Comunciation	
Regulator	Surat dan Laporan	Letter and Report
Pemegang Saham Shareholders	RUPS Sirkuler (9 kali), Media Massa (14 rilis)	Circular GMS (9 meetings), Mass Media (14 releases)
Lembaga Publik Public Institution	Notaris, Konsultan Hukum	Notary, Legal Consultant
Konsumen Consumer	Media cetak dan media online, Indeks Kepuasan Pelanggan	Print and online media, Customer Satisfaction Index
Pekerja Employees	Manajemen Review, Pelatihan, Media Komunikasi Internal	Management Reviews, Training, Internal Communication Media
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	Media Cetak dan Media online nasional, Website, Annual Report, Sosial Media (Instagram)	Print and national online media, websites, annual reports, social media (Instagram)
Mitra Kerja dan Rekanan Partners and Partners	Vendor day, Vendor Rating	Vendor day, Vendor Rating
Organisasi Profesi Professional Organizations	INSA	INSA
Masyarakat/Ummum General public	Website, Sosial Media, Media cetak dan media online	Website, social media, print media and online media

Kode Etik

Code of Conduct

- **Pedoman Perilaku merupakan salah satu bentuk komitmen dalam rangka penerapan dan penegakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan merupakan sekumpulan komitmen yang berisi tentang kewajiban, larangan dan hubungan dengan stakeholders lainnya. *Code of Conduct* mengatur kewajiban yang harus ditaati setiap insan Perusahaan.**

The Code of Conduct is a form of commitment in the context of implementing and enforcing Good Corporate governance and is a set of commitments containing obligations, prohibitions and relationships with other stakeholders. The Code of Conduct regulates the obligations that shall be complied by every employee of the Company.

Perusahaan senantiasa menjalankan bisnis operasional secara jujur, beretika, berintegritas, dan berupaya melakukan yang terbaik. Untuk mendukung komitmen tersebut, PTK menerapkan kode etik dan etika bisnis yang harus dipatuhi semua pihak perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan, serta menciptakan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Kode etik merupakan pedoman perilaku profesional seluruh insan perusahaan. Termasuk jajaran manajemen yaitu Dewan Komisaris dan Direksi.

The company always runs the operational business honestly, ethically, with integrity, and strives to do the best. To support this commitment, PTK has prevailed a code of ethics and business ethics (Code of Conduct) that shall be complied to by all parties in the Company. This was done to maintain the trust of stakeholders, and create sustainable performance growth. The code of conduct refers to a code of professional behavior for all employees of the Company, also the management, including the Board of Commissioners and Directors.

Pokok-Pokok dalam Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (CoC)

Pedoman Perilaku PTK termaktub dalam Pedoman COC No. A-002/F1000/2019-S0 Revisi ke-00. Pedoman Kode Etik tersebut dimutakhirkan secara berkala sebagai komitmen perusahaan untuk menjaga etika bisnis perusahaan yang berkesinambungan. Pedoman tersebut berlaku bagi:

Code of Conduct (CoC) Principals

PTK Code of Conduct is disclosed in COC Guideline No. A-002/F1000/2019-S0 Revision-00. The Code of Conduct is regularly updated as a commitment of the company to maintain a sustainable business ethics. These guidelines apply to:

1. Insan PTK
2. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama PTK.
3. Anak Perusahaan dan struktur perusahaan di bawahnya, yaitu badan hukum/usaha lain yang dikendalikan oleh PTK, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Mitra Kerja yang bekerjasama dengan PTK. Secara umum, muatan Kode Etik Perusahaan yang dimiliki PTK adalah sebagai berikut:

1. PTK personnel
2. External parties who act for and on behalf of PTK.
3. Subsidiaries and the company structure that follows, namely other legal/business entities controlled by PTK, either directly or indirectly.
4. Business Partners collaborating with PTK. In general, contents of the Code of Conducts in PTK are as follows:

Pokok-pokok Pedoman Perilaku

Code of Conducts Contents

Bab Chapter	Uraian Description	
Umum General	• Pendahuluan • Tujuan • Ruang Lingkup • Pengertian • Referensi	• Introduction • Objectives • Scope • Definition • Reference
Visi, Misi dan Tata Nilai Unggulan Perusahaan/ Vision, Mission and Core Values of the Company	• Visi dan Misi • Tata Nilai Unggulan Perusahaan	• Vision and mission • Core Corporate Values
Prinsip-prinsip GCG, Perilaku Integritas Insan PTK/ GCG Principles, Integrity Behavior of PTK Personnel	• Integritas • Persaingan Usaha Yang Sehat • Sikap Kerja Profesional	• Integrity • Healthy competition • Professionalism
Persaingan Sehat Fair Competition	• Persaingan Usaha yang Sehat • Proses Pengadaan Penyedia Barang/ Jasa • Informasi Penting	• Fair Business Competition • Goods/Services Procurement Process • Significant Information
Kerahasiaan Data dan Transparansi/ Data Confidentiality and Transparency	• Kerahasiaan Data dan Informasi • Pelaporan Akuntansi dan Keuangan • Pengelolaan Arsip	• Data and Information Confidentiality • Accounting and Financial Reporting • Archival Management
Sikap Profesional Professional Attitude	• Sikap Kerja Profesional • Berani Mengungkapkan Masalah • Pengambilan Keputusan • Hak Kekayaan Intelektual • Menghindari Diskriminasi • Kesempatan Karir yang Sama • Standar Ketenagakerjaan • Bebas Narkoba dan Minuman Keras • Aktivitas Politik • Media Massa • Organisasi Profesi	• Organisasi Profesi • Professional Work Attitude • Courage in Disclosing Any Issues • Decision Making • Intellectual Property Rights • Avoiding Discrimination • Equal Career Opportunity • Free from Drugs and Alcohol Beverages • Political Activity • Mass Media • Organizational Profession

Pokok-pokok Pedoman Perilaku

Code of Conducts Contents

Bab Chapter	Uraian Description
Komitmen Terhadap Pemangku Kepentingan Lainnya. Commitment to Other Stakeholders	• Komitmen Terhadap Pemegang Saham • Komitmen Terhadap Pekerja • Komitmen Terhadap Serikat Pekerja • Komitmen Terhadap Anak Perusahaan • Komitmen Terhadap Penyedia Barang/Jasa • Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator • Komitmen Terhadap Legislatif • Komitmen Terhadap Investor, Kreditur dan Bank • Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi • Komitmen Terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan • Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial • Commitment to Shareholders • Commitment to Employees • Commitment to Labor Union • Commitment to Subsidiaries • Commitment to Goods/ Services Provider • Commitment to Government As a Regulator • Commitment to Legislative • Commitment to Investor, Creditor, and Bank • Commitment to Business Partners, Research Institution, and Universities • Commitment to Health, Safety, Security (HSE), and Environment • Commitment to Community and Social Responsibility
Whistleblowing System	• Ruang Lingkup • Struktur • Fungsi Pengelola • Saluran Penyampaian Pelaporan • Scope • Structure • Management function • Reporting channel

Pengungkapan Pedoman Perilaku

Setiap insan PTK harus memiliki komitmen untuk dapat menyelaraskan diri dengan sistem nilai dan budaya kerja di Perusahaan. Oleh karena itu, seluruh insan PTK wajib menempatkan diri untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya kerja yang dianut Perusahaan, yang dikodifikasikan dalam *Code of Conduct*. Keberhasilan penerapan *code of conduct* merupakan tanggung jawab dari setiap insan PTK di lingkungan unit kerja masing-masing.

Code of Conduct PTK wajib dilaksanakan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pimpinan Unit sampai

Code of Conduct Disclosures

Every employee of PTK shall be committed to align with the value system and work culture in the Company. Therefore, all PTK personnel are obliged to adapt to align and unite their beliefs and determination to adopt work attitudes and behaviors in accordance with the value system and work culture adopted by the Company, which are codified in the *Code of Conduct*. The successful application of the *code of conduct* is the responsibility of every PTK personnel in each work units.

PTK *Code of Conduct* shall be implemented starting from the Board of Commissioners, Board of

dengan pekerja. *Code of Conduct* PTK dilaksanakan secara konsisten sebagai budaya kerja dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Sosialisasi dan Penegakan Pedoman Perilaku

Perusahaan memastikan bahwa setiap insan PTK mengetahui, memahami, dan menerapkan kode etik baik di lingkungan dalam maupun di lingkungan luar perusahaan. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi pedoman CoC bagi seluruh insan Perusahaan. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan internal event kepada seluruh pekerja pada segala tingkatan termasuk tenaga *outsourcing*.

Perusahaan juga terus melakukan penegakan kepatuhan Pedoman Perilaku, yang melibatkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris maupun Direksi serta dukungan seluruh Insan PTK.

- Direksi membentuk tim pemantau penerapan dan penegakan *Code of Conduct* yang bertugas:
 - » Melakukan sosialisasi *Code of Conduct* untuk memastikan bahwa seluruh insan Perusahaan memahami substansi *Code of Conduct*.
 - » Mengoordinasikan pembagian buku *Code of Conduct* kepada insan Perusahaan.
 - » Mengoordinasikan pelaksanaan penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap *Code of Conduct*.
- Penerapan *Code of Conduct* dilengkapi dengan media komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang timbul dan transparansi tindak lanjut atas pelanggaran dalam penerapan *Code of Conduct* tersebut.
- Setiap insan Perusahaan wajib meminta penjelasan kepada atasan langsung jika terdapat ketidak jelasan berperilaku sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Setiap insan Perusahaan yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap *Code of Conduct*,

Directors, Unit Heads up to the employees. PTK *Code of Conduct* is implemented consistently as a work culture in daily operational activities.

Code of Conduct Socialization and Enforcement

The Company ensures that every PTK employee has acknowledged, understood and applied the Code of Conducts inside and outside the company. An initiative to achieve this purpose is through the CoC guidelines socialization for all people of the company. The socialization was carried out by using various media and internal event opportunities to all employees at all levels including the outsourcing personnel.

The Company also continuously uphold the compliance to the Code of Conduct, involving the roles and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as all of the PTK People.

- The Board of Directors established a monitoring team for the implementation and upholding of Code of Conduct with duties as follows:
 - » Implement the Code of Conduct socialization to ensure all of the Company's people has understood the contents of Code of Conduct.
 - » Coordinate the Code of Conduct book distribution to the Company's people.
 - » Coordinate the signing of compliance statement on the Code of Conduct.
- Implement the Code of Conduct along with the communication media to convey the arising issues and follow-up transparency on violations occurred in implementing the Code of Conduct.
- Each personnel of the Company is required to inquire an explanation to the immediate supervisor if there is behavioral obscurity, in accordance with its duties and responsibilities.
- Each personnel of the Company who recognizes any violations to the Code of Conduct should report it to the monitoring team on the

wajib melaporkan kepada tim pemantau penerapan dan penegakan *Code of Conduct*, dan identitasnya akan dirahasiakan.

- Terdapat sanksi yang tegas dan jelas bagi insan Perusahaan yang melanggar *Code of Conduct*.
- Tim pemantau penerapan dan penegakan *Code of Conduct* mengusulkan sanksi disiplin atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan bagian HR & GA.
- Direksi menerapkan sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang perlu dilaksanakan.
- Tim pemantau penerapan dan penegakan *Code of Conduct* melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Setiap insan Perusahaan dapat memberi masukan untuk penyempurnaan *Code of Conduct* kepada Tim pemantau penerapan dan penegakan *Code of Conduct*. Perubahan atau revisi atas *Code of Conduct* dapat ditetapkan dengan pengesahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Selain mekanisme yang telah diatur tersebut, Perusahaan juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan internalisasi secara berkala dalam berbagai kesempatan event internal ataupun pelatihan *inhouse* untuk memastikan konsistensi implementasi dan konsistensi kesepahaman pekerja dan manajemen terhadap kode etik.

Perilaku Integritas Insan PTK

Selain pedoman CoC, PTK juga memiliki pedoman perilaku integritas. Berikut adalah muatan pedoman perilaku integritas insan PTK:

- Insan PTK mematuhi hukum, peraturan dan undang-undang, baik yang berlaku pada wilayah setempatnya berada/ditugaskan, maupun pada

implementation and upholding of the Code of Conduct with its identity remains confidential.

- Strict and straight forward sanctions for personnel of the Company who violates the Code of Conduct
- The monitoring team on the implementation and upholding of Code of Conduct proposes mandatory disciplinary sanctions or corrective measures as well as preventions after coordinating with HR & GA division.
- The Board of Directors determines the mandatory disciplinary sanctions and/or corrective measures as well as preventions.
- Monitoring team on the implementation and upholding of Code of Conduct reports its duties to the Board of Directors, and copy the Board of Commissioners in.
- Every personnel of the Company has the capability to give inputs on the Code of Conduct improvement to the Monitoring team on the implementation and upholding of Code of Conduct. Any changes or revisions to the Code of Conduct may be implemented with ratification from the Board of Directors and Board of Commissioners.

Aside from the regulated mechanism, the Company also carries out socialization and internalization activities periodically in various internal events or in-house training to ensure the consistency of implementation and understanding among the employees and management toward the code of conduct.

Integrity Conduct of PTK Personnel

In addition to the CoC guidelines, CAR also has a code of integrity behavior. The following is the content of the PTK employees' integrity behavior guidelines:

- Personnel of PTK comply with the prevailing laws and regulations in areas they are located/assigned in, or on national and international

tingkat nasional dan internasional termasuk peraturan internal Perusahaan;

- Insan PTK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu kewajibannya terhadap Perusahaan. Insan PTK menghindari situasi di mana kepentingan pribadi (langsung maupun tidak langsung), aktivitas di luar, atau kepentingan keuangan, bertentangan, tampak bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan kepentingan PTK;
- Insan PTK tidak akan terlibat dalam tindakan suap dan/ atau korupsi, baik sebagai pihak yang memberi maupun sebagai pihak yang menerima dan tidak menawarkan atau menerimanya bila menurut pertimbangan Insan PTK, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan;
- Insan PTK tidak mendukung pemberian uang/ fasilitas/ hadiah atau janji kepada petugas pemerintahan atau lembaga pemerintah dengan tujuan memperoleh atau memperpanjang perizinan dan lain sebagainya;
- Setiap peristiwa penipuan, penggelapan dan pencurian yang terjadi di PTK atau yang berkaitan dengan PTK akan segera diselidiki, dilaporkan, dan setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup akan dikenakan hukuman yang sepatutnya;
- PTK memiliki hubungan baik dengan Pusat Pelaporan untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di PTK. Untuk itu, insan PTK tidak mentolerir tindakan pencucian uang yang dilakukan di lingkungan PTK.

levels, including the Company's internal regulations.

- Personnel of PTK uphold the responsibility in ensuring personal interest outside work does not interfere with its obligations to the Company. The personnel avoid any situations in which the personal interest (direct and indirect), outside activities, or financial interest, conflict or seem to be conflicted with or have the potentials of conflicting with the interest of PTK.
- Personnel of PTK will not be involved in any bribery and/or corruption, either as provider or recipient, and will not offer or receive it if according to the personnel of PTK the action could impact or gives the impression of impacting decision making.
- Personnel of PTK provide no support to provision of money/facilities/reward or promises to government officials or government institutions with the aim of obtaining or extending licenses and others.
- Every fraud, embezzlement, and robbery occurred at PTK or has relations to PTK will be investigated, reported, and after completing sufficient investigation appropriate punishment will be charged.
- Personnel of PTK has good relationship with Center of Financial Transaction Reporting and Analysis to jointly prevent and eradicate money laundering at PTK. Therefore, Personnel of PTK does not tolerate any money laundering in PTK environment.

Persaingan Usaha yang Sehat

Dalam menjalankan komitmen sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai GCG, PTK senantiasa menjaga persaingan usaha yang sehat kepada pemangku kepentingan. PTK berkomitmen untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan

Fair Business Competition

In carrying out its commitment as a company that upholds the values of GCG, PTK always maintains fair business competition to stakeholders. PTK is committed to ensuring that the Company's business activities are compliant with antitrust and fair

patuh pada undang-undang antimonopoli dan persaingan sehat di Indonesia dan peraturan setempat dimana PTK menjalankan kegiatan bisnis/operasionalnya.

Terkait dengan kegiatan bisnis dan persaingan usaha tersebut, seluruh insan PTK harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat, dan hanya melakukan bentuk praktik bisnis yang adil dan etis. Sehingga apabila dalam kegiatan operasionalnya, insan PTK menghadapi tindakan yang mengarah pada pertentangan prinsip persaingan usaha yang sehat diwajibkan melakukan konsultasi dengan fungsi legal atau hukum perusahaan.

competition laws in Indonesia and local regulations where PTK operates its business/operations.

With regard to business activities and business competition, all PTK employees must be aware of efforts that lead to unfair business competition, and only engage in fair and ethical business practices. So if in its operational activities, PTK people face actions that lead to a conflict of principles of fair business competition, they are required to consult with the legal or legal functions in the company.

Sikap Kerja Profesional

Selain menerapkan pedoman CoC serta pedoman perilaku integritas, insan PTK juga harus membangun sikap profesional yang ditandai dengan sikap-sikap sebagai berikut:

- Dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja, Insan PTK dituntut untuk bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan dan memberi masukan, solid dan bersinergi untuk mencapai visi dan misi PTK;
- Insan PTK melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan tanggung jawab;
- Sesama Insan PTK tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat;
- Insan PTK berperilaku disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan atau tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja;
- Insan PTK menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.

Professional Work Attitude

In addition to applying CoC guidelines and integrated behavior guidelines, PTK people shall also develop professional attitudes which are characterized by the following attitudes:

- In interacting with co-workers, Personnel of PTK are required to present mutual trust, sincerity, honesty; and warn each other as well as provide inputs, show strength, able to perform synergy for the achievement of vision and mission of PTK.
- Personnel of PTK performs each work with good intention and full of responsibility.
- Among Personnel of PTK should not pressure or intimidate, humiliate, abuse or provoke, and not cause unfair competition.
- A PTK People shall present discipline behavior, not neglecting any work activities prior to receiving permission from the supervisor, and/or not performing other activities for personal interest or interest of parties outside the Company without permission during the working hours.
- Personnel of PTK keep the confidentiality of documents and information on the Company.

Standar Etika Usaha

Standar Etika Usaha mengatur etika Perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan, termasuk diantaranya kepada para pekerja, pelanggan, penyedia barang dan jasa (pemasok), kreditur, masyarakat, pesaing, pemerintah, media massa. Penerapan standar etika usaha bertujuan untuk memastikan Perusahaan memenuhi komitmen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Pemenuhan komitmen tersebut tetap dilaksanakan dalam kaidah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Business Ethic Standard

Business Ethics Standards regulate the Company's ethics toward Stakeholders, including to the employees, customers, goods and services provider (suppliers), creditors, community, competitors, government, and mass media. The implementation of business ethics standards aim to ensure the Company fulfilling its commitments to the stakeholders. The fulfillment of commitment is consistently performed based on the prevailing laws and regulations.

Standar Etika Usaha Terhadap Pemangku Kepentingan

Business Ethics Standards for Stakeholders

	URAIAN Description	
Komitmen Terhadap Pemegang Saham Commitment to Shareholders	PTK berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (<i>shareholder value</i>) seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan, dan kepentingan lain dari pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	PTK strives to optimally and continuously increase shareholder value, such as level of profit, growth rate, and other interests of the shareholders as per the prevailing laws and regulations
Komitmen Terhadap Pekerja Commitment to Employees	PTK menghargai pekerja sebagai aset Perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, suku, hambatan fisik, gender, dan usia, yang kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten. PTK memberikan penghargaan kepada pekerja yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan Perusahaan	PTK respects employees as assets of the Company without discriminating race, skin color, religion, ethnicity, physical challenges, gender, and age, as well as those which capacity should be honed through education and training consistently. PTK gives rewards to outstanding employees, and imposes strict sanctions to individuals who are negligent about their duties, or violate the Company's provisions
Komitmen Terhadap Serikat Pekerja Commitment to Labor Union	PTK menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dalam usaha mencapai tujuan Perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis.	PTK places Labor Union as the Company's partner in its endeavors to achieve the Company's objectives for dynamic and harmonious industrial relationship.
Komitmen Terhadap Anak Perusahaan Commitment to Subsidiaries	Hubungan kerjasama dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan (perusahaan afiliasi) ditujukan untuk membangun sinergi dan citra yang lebih baik juga agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.	Cooperative relationship with subsidiaries and joint ventures (affiliations) is aimed to build better synergy and image as well as to increase the Company's performance.

Standar Etika Usaha Terhadap Pemangku Kepentingan

Business Ethics Standards for Stakeholders

	URAIAN Description	
Komitmen Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Commitment to Goods and Services Provider	PTK memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang/jasa atau rekanan sebagai mitra strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran operasi Perusahaan. PTK melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. PTK menghindari bisnis dengan penyedia barang/jasa atau rekanan yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat dan atau Perusahaan yang patut diduga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme	PTK maintains good communication with goods/services provider or partners as strategic partners with a role of guaranteeing the availability of goods and services supply required for the Company's operation continuity. PTK performs transparent goods and services procurement as per the prevailing provisions. Moreover, the Company avoids business with goods/services provider or partners which may have conflict of interest with officials and/or the Company that may have an indication of causing corruption, collusion, and nepotism
Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator Commitment to Government as Regulator	PTK mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi Perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lindungan lingkungan hidup. PTK mendukung program nasional maupun regional khususnya dibidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.	PTK complies with and support laws and regulations related to the Company's operation, including adherence to tax payment, retribution, employment and environment issues. The Company supports national and regional programs, especially in technology, education, social, economy, and culture
Komitmen Terhadap Legislatif Commitment to Legislative	PTK menyediakan informasi yang relevan tentang Perusahaan bagi legislatif dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. PTK memperhatikan dan memberikan respon terhadap masukan dari legislatif yang membawa kepentingan masyarakat luas sesuai kepentingan dan kemampuan Perusahaan	PTK provides relevant information on the Company for legislative by continuously referring to the prevailing provisions. The Company observes and provides response to any inputs from the legislative that may aspire the community interest in accordance with the Company's interest and capability
Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Commitment to Business Partners, Research Facilities, and Universities	PTK melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis hanya dengan mitra usaha strategis yang resmi dan memiliki reputasi yang baik. Menjamin akurasi informasi layanan dan produk yang akan dipasarkan oleh mitra usaha strategis	PTK exerts its efforts in security toward investments conducted by investors through optimal investment return. The Company is also committed to provide transparent information on the Company's condition to the creditors and bank
Komitmen terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan Commitment to Health, Safety, Security and Environment (HSSE)	Merupakan tanggung jawab PTK untuk menciptakan tempat bekerja yang aman dan sehat serta menyediakan perlengkapan dan perlindungan kerja yang sesuai bagi semua Insan PTK dan kontraktor untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera dan wabah penyakit di tempat kerja. PTK akan melakukan kegiatannya dengan	A form of responsibility for PTK in creating a safe and healthy work environment, as well as providing appropriate work equipment and protection for all Personnel of PTK and contractors to prevent accidents, injuries, and infectious diseases in the workplace. PTK will perform its activities by paying attention

Standar Etika Usaha Terhadap Pemangku Kepentingan

Business Ethics Standards for Stakeholders

	URAIAN Description
	memperhatikan lingkungan. PTK menggunakan sumber daya energi dan sumber daya alam secara efisien serta berusaha mencegah terjadinya polusi terhadap lingkungan.
Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial Commitment to the Surrounding Community and Social Responsibility	PTK menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/ operasionalnya.

Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik

Seluruh insan PTK wajib mematuhi Kode Etik. Pelanggaran terhadap Kode Etik, etika bisnis yang berlaku atau undang-undang, akan dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat ditolerir dan akan dikenai tindakan pendisiplinan. Hal ini juga bisa mengakibatkan pemberian hukuman atau sanksi bagi setiap pelanggarnya.

Terkait kepatuhan terhadap kode etik, etika bisnis, dan peraturan yang berlaku, PTK memiliki fungsi pemantau kepatuhan yaitu *Chief Compliance Officer* (CCO). Sehingga apabila terdapat pelanggaran terhadap pedoman perilaku perusahaan akan ditindaklanjuti oleh CCO, yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak Perusahaan. Manajemen puncak (Direksi atau Dewan Komisaris) akan memutuskan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung Insan PTK yang terbukti melakukan pelanggaran.

Punishment For Code Of Conduct Violation

All of PTK People shall comply with the Code of Ethics. Violations against the Code of Ethics, prevailing business ethics or the law, will be considered as intolerable behavior and will result in disciplinary punishment. This may also result in the imposition of penalties or sanctions for each violator.

In terms of compliance with the code of ethics, business ethics, and applicable regulations, CAR has a compliance monitoring function, the *Chief Compliance Officer* (CCO). Therefore, in the case of violation against the company's code of conduct, it will be followed up by the CCO, which will provide the results of its study to the top management of the Company. The top management (the Board of Directors or the Board of Commissioners) will decide on corrective actions or preventive actions that must be carried out by the direct supervisor of PTK's employees who are proven to have committed violations.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan diberikan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan. Namun, PTK juga menghormati hak membela diri dari Insan PTK yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggaran Pedoman Perilaku sebagai Kode Etik, mulai dari teguran tertulis, pemberian surat peringatan, penurunan golongan upah sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Evaluasi Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

PTK terus berupaya untuk membenahi dan memperbaiki agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berbagai metode sosialisasi terus digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap individu. Upaya ini dilakukan dengan menyempurnakan code of conduct agar berlaku efektif dan implementatif.

Pada tahun 2020, Keberadaan *code of conduct* di PTK semakin baik dengan terus didorong oleh peningkatan kesadaran baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan. Hal tersebut seiring dengan dilakukannya upaya-upaya yang konsisten dan berkesinambungan sosialisasi terhadap *code of conduct* tersebut melalui berbagai media di antaranya dengan pemasangan banner ditempat-tempat umum dan sosialisasi lainnya. Selain itu adanya peningkatan laporan juga dapat berarti bahwa pihak eksternal dan internal Perusahaan semakin mempercayai kredibilitas dan independensi pengelolaan *code of conduct*.

Sanctions to the performed violations are aligned with the provisions in Joint Working Agreement (PKB) and other prevailing provisions at the Company. PTK respects self- defense rights displayed by Personnel of PTK who allegedly perform violations and accept the explanation to be taken as a consideration in determining the form of disciplinary consequences. The sanctions imposed in the violation of Behavior Manual as Code of Conduct starting from written warning, warning letter, salary grade demotion up to work termination.

Evaluation on the Whistleblowing System Management

PTK continues to strive to prepare and improve so that it can run effectively and efficiently. Various methods of socialization are continuously used to increase understanding and awareness of each individual. This effort was made by improving the code of conduct to make it effective and can be implemented.

In 2020, the existence of the code of conduct in PTK will be getting better and is continuously driven by increased awareness from both internal and external parties of the Company. This is in line with the consistent and continuous efforts to socialize the code of conduct through various media, including the installation of banners in public places and other socializations. In addition, an increase in reports may also mean that external and internal parties of the Company are increasingly trusting in the credibility and independence of managing the code of conduct.

Whistleblowing System

Whistleblowing System

- Kebijakan *Whistleblowing System* memiliki tujuan untuk memberikan kepastian dan keyakinan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan, sekaligus memberikan keamanan pelapor pelanggaran dan penerima laporan melalui jaminan kerahasiaan pelapor.

Whistleblowing System policy aims to provide assurance and confidence that the report submitted will be followed up by the Company, as well as to provide security for the whistleblowers and report recipients through a whistleblower confidentiality protection guarantee.

Whistleblowing System menjadi bagian dalam implementasi GCG yang cukup penting dalam menekan pelanggaran yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, inisiatif penerapan WBS di lingkungan PTK telah dimulai oleh manajemen puncak Perusahaan dan untuk menunjukkan komitmen Perusahaan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PTK senantiasa melakukan pemutakhiran pedoman maupun mekanisme penerapannya.

Dasar Kebijakan dan Ruang Lingkup WBS

Sebagai bagian dalam membangun *Fraud Control System* (FCS), PTK telah menyusun pedoman pelaporan pelanggaran dan penanganannya, yakni berdasarkan Keputusan Direksi No. Psd 015/ F1000/2016-S0 (Revisi ke 00). Kebijakan ini melengkapi landasan-landasan FCS lain yang ada saat ini. Landasan tersebut berupa Pedoman Perilaku PTK dan menjadi landasan utama sistem pelaporan pelanggaran yang diterapkan oleh PTK yang merupakan sistem dalam mengelola pengaduan/ penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan PTK dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PTK.

Whistleblowing System is an important part of GCG implementation to minimize any violations potential. Therefore, the initiative to implement WBS within the PTK environment has been initiated by the top management of the Company and to demonstrate the Company's commitment to Good Corporate Governance, PTK is constantly updating the WBS guidelines and implementation mechanisms.

WBS Policy Framework and Scope

As part of building the *Fraud Control System* (FCS), PTK has prepared guidelines for reporting violations and their handling, such as according to Board of Directors Decree No. Psd 015/F1000/2016-S0 (Revision 00). This policy complements the foundations of other current FCSs. The basis is formulated as PTK Code of Conduct and is the main basis for the violation reporting system implemented by the PTK which is a system for managing complaints/disclosures regarding unlawful behavior, unethical/improper actions in a confidential, anonymous and independent manner which is used to optimize the participation of PTK personnel and partners in exposing violations that occur within the PTK environment.

Lingkup kebijakan WBS PTK mencakup pelaporan terhadap perbuatan pelanggaran diantaranya :

The scope of the PTK WBS policy includes reporting of violations including:

Lingkup Laporan ditindaklanjuti oleh WBS

Scope of Report Followed up by WBS

Bentuk Pelanggaran Hukum Forms of Legal Violation	Keterangan Description	
Korupsi Corruption	Adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PTK, yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan perusahaan.	Actions that are committed fraudulently or against the law by the Board of Commissioners, Directors, Management, and Employees who work for and on behalf of PTK, against the interest of the Company or abuse of authority/trust entrusted to the individual with the purpose of enriching one self, or other people, or corporate that may bring loss to the company
Suap Bribery	Adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi.	Any actions committed by an individual in the form of bribe money/bribery/giving money or promises that are given or received in any form to someone who has influence or has relations with its position, aiming to satisfy personal or corporate interest
Pencurian Theft	Adalah mengambil barang atau sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau perusahaan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.	Actions of taking something, as a whole or partially that belongs to other people or the company with the intention of owning it by violating the law
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Adalah sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu antara kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan sehingga harus memilih dan mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadinya	A situation in which an individual is confronted with different interests, between personal or the company's interest causing the individual to choose and prioritize the company's interest over his or her personal interest
Kecurangan Fraud	Adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain	Dishonest or deceitful actions, including fraud, extortion, forgery, concealment or destruction of documents/reports or use false documents, conducted by an individual/a group of people that may cause potential loss or any real losses toward the company or other people

Struktur Pengelola

Pihak yang mengelola Laporan pelanggaran di PTK adalah Fungsi Penerima Laporan yang merupakan pihak Internal Perusahaan. Fungsi Penerima Laporan melakukan analisis laporan untuk pengumpulan bukti dan informasi. Hasil analisis tersebut disampaikan kepada pihak atau fungsi yang berwenang sesuai dengan peraturan Perusahaan untuk penetapan dan pemberian sanksi.

- Direktur Utama dan Direksi lainnya
- *Chief Compliance Officer (CCO)*
- Pejabat Berwenang Terkait
- Dewan Komisaris
- Pelapor
- Terlapor
- Tim WBS
- Tim Investigasi

Fungsi Pengelola *Whistleblowing System*

Fungsi atau tugas pengelola WBS perusahaan adalah sebagai berikut:

- Memfasilitasi mekanisme penyampaian laporan dugaan pelanggaran untuk segera ditangani;
- Memfasilitasi mekanisme deteksi dini untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran;
- Mendorong seluruh pekerja berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran tanpa takut diketahui identitasnya;
- Meminimalkan risiko keuangan dan risiko non keuangan dalam menangani tindak pelanggaran;
- Mengidentifikasi kelemahan sistem kontrol internal untuk dilakukan perbaikan.

Management Structure

The party that manages the violation report in the PTK is the Report Recipient Function which is an Internal Company of the Company. The Report Recipient function performs report analysis for gathering evidence and information. The results of the analysis are submitted to the authorized party or function in accordance with Company regulations for the determination and imposition of sanctions.

- President Director and other Directors
- Chief Compliance Officer (CCO)
- Related Authorities
- Board of Commissioners
- Reporters
- Reported Party
- WBS Team
- Investigation team

WBS Manager Function

The functions or tasks of a company WBS manager are as follows:

- Facilitating the mechanism for submitting reports of alleged violations to be addressed immediately;
- Facilitating early detection mechanisms to minimize the occurrence of violations;
- Encouraging all employees to report violations without fear of being identified;
- Minimizing financial risks and non-financial risks in handling violations;
- Identify weaknesses in the internal control system for improvement.

Prinsip Pelaporan Pelanggaran

WBS Reporting Principles

Prinsip Pelaporan WBS

WBS Reporting Principles

Prinsip Principle	Uraian Uraian
Rahasia	Prinsip ini mencakup: 1. Perlindungan terhadap identitas pelapor; 2. Perlindungan terhadap pelaksana investigasi dan pelapor; 3. Hanya pihak-pihak terbatas/ tertentu yang mengetahui; 4. Penerapan azas praduga tidak bersalah. This principle includes: 1. Protection against the identity of the reporter; 2. Protection against executor and investigator reporter; 3. Only limited parties/certain who knows; 4. Application of the principle of presumption not guilty.
Anonim	1. Prinsip ini mencakup menjamin adanya kemungkinan untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor. 2. Hal tersebut memberikan jaminan rasa aman kepada pelapor. 1. This principle includes guaranteeing the possibility for not reveal identity reporter. 2. That gives guarantee of security to reporter.
Independen	1. WBS PT Pertamina Trans Kontinental dikelola secara profesional; 2. Pengaduan yang ditindaklanjuti hanya yang memenuhi kriteria; 3. Tidak dimungkinkan untuk terjadinya intervensi terhadap laporan. 1. WBS PT Pertamina Trans Kontinental is managed professionally; 2. Complaints that are followed up are only those that meet the criteria; 3. It is not possible to intervene in the report.

Penyampaian Pelaporan Whistleblowing System

PTK menyediakan beberapa saluran untuk penyampaian pelaporan pelanggaran.

Submission of Whistleblowing System Reporting

PTK provides a channel for the delivery of reporting.



TELEPON/ Telephone

+62 21 31923005



SMS

+62 812 1989 1000



FAKSIMILI / Fax

+62 21 3106804



WEB / Web

www.ptk-shipping.com



EMAIL / Email

ptkpusat@ptk-shipping.com



PTK CLEAN

PO BOX 1945 JKP 10019

Mekanisme Whistleblowing System

Mekanisme penyaluran pengaduan/penyingkapan oleh pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung, direktorat dan fungsi terkait. Bila Pelapor memandang sarana pengaduan/ penyingkapan tidak efektif atau ada keraguan, Pelapor dapat menyalurkan pengaduan/ penyingkapan melalui WBS.

Prosedur WBS adalah sebagai berikut:

- Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada pengelola WBS melalui sarana/media yang telah ditentukan.
- Tim WBS menerima pengaduan penyingkapan, mencatat dan menuangkan ke dalam format standar yang menghasilkan:
 - » Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan.
 - » Laporan penyingkapan (*disclosure report*).
- Memasukkan Laporan penyingkapan ke dalam e-Room yang hanya dapat diakses oleh Tim WBS dan *Chief Compliance Officer*.
- Tim WBS menyampaikan laporan penyingkapan (*disclosure report*) kepada *Chief Compliance Officer/ Dewan Komisaris/Direktur Utama* (sesuai kategori Terlapor).
- Tim WBS melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan tersebut dan membuat resumennya. Kemudian mempresentasikan kepada *Chief Executive Officer*. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, *Chief Compliance Officer* memutuskan tindak lanjut :
 - Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
 - Bekerja sama dengan eksternal Investigator jika substansi pengaduan/ penyingkapan terkait dengan citra/reputasi PTK dan/atau menimbulkan kerugian besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti Internal Audit.
 - Bekerja sama dengan Internal Audit dan/ atau Sekuriti sesuai substansi.
 - Pengaduan/penyingkapan dilakukan Tim

Histleblowing System Mechanism

The mechanism of report/disclosure flow by the whistleblower is basically conducted through formal channel, namely direct supervisor, directorate and related functions. If the Whistleblower views the report/ disclosure facility is ineffective or causes doubts, the Whistleblower could submit the report/ disclosure through WBS.

The WBS procedure is as follows:

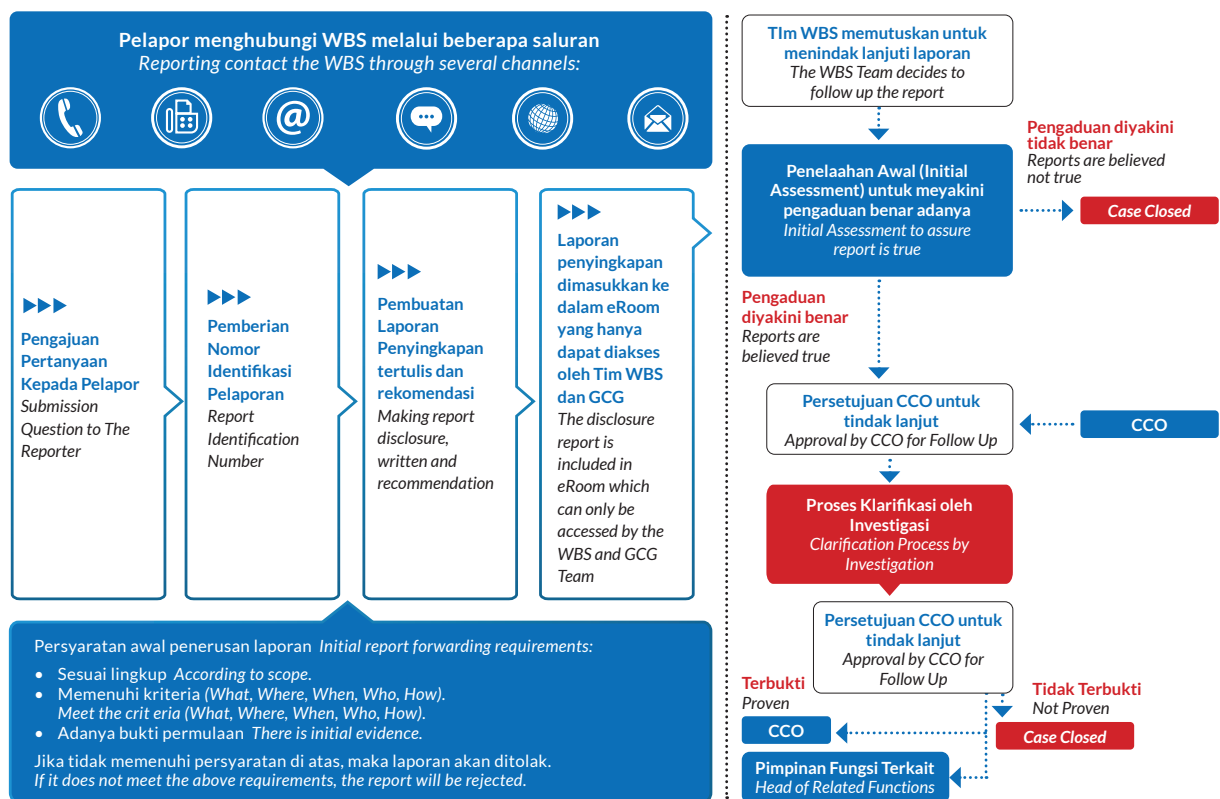
- Whistleblower establishes a report/disclosure and submits it to WBS manager through the determined means/media.
- WBS Team receives the report/disclosure, records, and prepares it in a standard format, generating:
 - » Contact acceptance report in accordance with the scope of report category.
 - » Disclosure report.
- Transferring the disclosure report into e-Room that could only be accessed by WBS Team and Chief Compliance Officer.
- WBS Team submits the disclosure report to Chief Compliance Officer/Board of Commissioners/ President Director (in accordance with the Offender category).
- WBS Team performs initial analysis/clarification on the report and develops si resumé. Afterward it is to be presented to Chief Executive Officer. Based on the presentation results, Chief Compliance Officer decides the follow up:
 - Suspended, if it does not meet the requirements of initial indication
 - Cooperating with an external investigator if the substance of report/disclosure is related to PTK image/reputation and/or may cause huge loss and/ or has never been followed up by Internal Audit.
 - Cooperating with Internal Audit and/or Security in accordance with the substance.
 - Report/disclosure is conducted by WBS Team on the justifications and appointment

WBS atas justifikasi dan penunjukan dari *Chief Compliance Officer*.

- Tim investigasi melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada *Chief Compliance Officer*.
- Berdasarkan hasil presentasi tersebut, *Chief Compliance Officer* memutuskan.

from Chief Compliance Officer.

- The Investment Team conducts an investigation and presents the results to the Chief Compliance Officer.
- Based on the results of the presentation, the Chief Compliance Officer decided.



Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Apabila ada laporan yang masuk ke dalam *Whistleblowing System* akan ditindaklanjuti dengan peneraan sanksi yang tegas dan konsisten jika terbukti bersalah, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran maupun pihak lain yang memiliki niat melakukan pelanggaran. Terkait penanganan pelaporan pelanggaran telah tertuang dalam mekanisme *Whistleblowing System*.

Violation Report Processing

If there is any report submitted through the *Whistleblowing System*, the report will be followed up with the strict and consistent punishment if proven guilty, thereby will give a deterrent effect for violators or other parties who have the intention to commit violations. With regards to the violation report processing, the procedure has been disclosed in the *Whistleblowing System* mechanism.

Perlindungan Bagi Pelapor

Setiap Pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak wajar, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan *Personal File Record*.

Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum jika diperlukan, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 UU No. 15 tahun 2002 jo. UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengelola WBS dilarang mengungkapkan identitas Pelapor. Apabila dalam faktanya bahwa identitas pelapor perlu diungkapkan atau tidak disembunyikan sebagaimana diperlukan oleh undang-undang dan proses peradilan atau dalam rangka diperlukannya pengambilan tindakan yang sesuai, maka Pengelola WBS wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Pelapor secara tertulis. Perlindungan terhadap Pelapor dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran yang disampaikan memenuhi kriteria, yaitu informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan telah terjadi dan dapat dipercaya/valid (setelah dilakukan verifikasi oleh Pengelola WBS). Kriteria perlindungan terhadap Pelapor wajib dipenuhi, dalam rangka menghindarkan adanya laporan palsu, fitnah, bersifat mengada-ada atau tidak beritikad baik.

Selain itu, PTK juga memberikan perlindungan kepada terlapor, sebab Perusahaan juga mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme dalam rangka melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan.

Protection for Whistleblower

Every whistleblower will receive protection from the Company against any adverse treatment such as improper dismissal, demotion or rank, harassment or discrimination in all its forms, and records which is detrimental to the Personal File Record.

The Company will also provide legal protection if necessary, in line with what is regulated in article 43 of Law no. 15 of 2002 jo. UU no. 25 of 2003 concerning the Money Laundering Crime and Article 13 of Law No.13 of 2006 on Witness and Victim Protection, and Article 5 PP No.57 of 2003 concerning Protection Procedures Especially for Reporters and Witnesses in Criminal Acts Money laundering.

WBS managers are prohibited from disclosing identity of the Whistleblowers. If, factually, identity of the whistleblowers need to be disclosed or not withheld as required by law and judicial process or in the context of its need taking appropriate action, the WBS Manager shall further ask for approval in advance to the Whistleblower through written letter. Protection to the Whistleblower is carried out when reporting the violations submitted meet the criteria, namely information and/or violations submitted has occurred and can be trusted/valid (after verification by the Manager WBS). Protection criteria for whistleblowers are mandatory to be fulfilled, in order to avoid fake reports, slander, fabricated or not in good faith.

In addition, PTK also provides protection to reported, because the Company also uphold confidentiality, the presumption of innocence and professionalism policies in order to carry out the report follow-up process.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelaporan pelanggaran dari eksternal maupun internal melalui WBS.

Total Violation Report

In 2020, there was no violation report submitted by external and internal parties through the WBS.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran Number of Complaints of Violation

Status Laporan Report Status	Jumlah Laporan Number of Reports	2020	2019	2018
Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti Complaints that can be followed up	0	0	1	0
Pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti Complaints that cannot be followed up	0	0	0	0
Jumlah pengaduan/pelaporan Number of complaints / reports	0	0	1	0

Sosialisasi dan Evaluasi

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan sosialisasi WBS melalui media wallpaper yang ada di dalam desktop seluruh pekerja dan seluruh pekerja dapat menyalurkan pengaduan melalui WBS. Sosialisasi WBS akan terus dilakukan secara berjenjang dan bertahap kepada seluruh *stakeholder* dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan WBS.

Socialization and Evaluation

In 2020, the Company will socialize the WBS through the media wallpaper on the desktops of all workers and all workers can channel complaints through the WBS. WBS socialization will continue to be carried out in stages and gradually to all stakeholders in order to increase the effectiveness of WBS implementation.

Sanksi Terhadap Pelanggaran

Perusahaan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif. Hal tersebut tercantum pada Tata Kerja Organisasi Pengelolaan WBS No. B-008/F1000/2019-S0 Juni 2019.

Sanctions Against Violations

The company provides sanctions in accordance with applicable regulations, if proven and related to administrative actions. This is stated in the WBS Management Organization Work Procedure No. B-008/F1000/2019-S0 June 2019.

Praktik Bad Governance

Sepanjang tahun 2020, tidak ditemukan adanya kegiatan atau indikasi yang mengarah pada praktik *bad corporate governance* di lingkungan Perusahaan yang dinilai dapat mengganggu sistem penerapan GCG dan menimbulkan risiko reputasi ataupun risiko lainnya di kemudian hari, sebagaimana tabel di bawah ini:

Bad Governance Practices

Throughout 2020, there were no activities or indications that led to bad corporate governance practices in the Company's environment which were deemed to disrupt the GCG implementation system and cause reputational or other risks in the future, as in the table below:

Praktik Bad Governance

Bad Governance Practice

Keterangan Description	Praktik Practices
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	There are reports of companies that pollute the environment
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Important cases currently faced by the company, subsidiaries, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are currently serving are not disclosed in the Annual Report.
Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Non-compliance in fulfilling tax obligations
Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	The inconsistency in the presentation of annual reports and financial reports with the applicable regulations and Indonesian GAAP
Kasus terkait Buruh dan Pekerja	Cases related to Labor and Employees
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan	There is no disclosure of operating segments at the company
Terdapat Ketidak sesuaian antara LT Hardcopy dengan LT Softcopy	Inconformity between Hardcopy and Softcopy Annual Report

Manajemen Persediaan Pengadaan Barang dan Jasa

Inventory Management for Goods and Services Procurement

- **Fungsi *Procurement*** yang menjalankan proses pengadaan barang dan jasa, memiliki peranan yang sangat penting terhadap kelancaran proses operasional di PT Pertamina Trans Kontinental. Seiring dengan bertambahnya jumlah kapal, maka permintaan akan pengadaan barang dan jasa juga meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2020, Fungsi *Procurement* melakukan reformasi digital pada proses pengadaan barang dan jasa.

Procurement function, which carries out the goods and services procurement process, has a very important role in smooth operational process at PT Pertamina Trans Kontinental. As the number of vessels increased, demand for the goods and services procurement is also rising. Regarding this condition in 2020, the Procurement Function carried out digital reforms in the goods and services procurement process.

Pada tanggal 7 Januari 2019, Fungsi *Procurement* bekerja sama dengan induk Perusahaan yakni PT Pertamina (Persero) melakukan digitalisasi procurement melalui Implementasi aplikasi E-Procurement di lingkungan PT Pertamina Trans Kontinental untuk memastikan proses GCG dalam pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik yang akan diimplementasikan mulai tahun 2020. Ditahun yang sama, Fungsi *Procurement* juga telah mengimplementasikan aplikasi Vendor Management System "Extra" yang berfungsi sebagai media pendaftaran vendor.

On January 7, 2019, the *Procurement Function* cooperated with PT Pertamina (Persero) 's parent company to digitize procurement through the implementation of the E-Procurement application within PT Pertamina Trans Kontinental to ensure that the GCG process in the goods and services procurement runs well which will be implemented starting in 2020. In the same year, the *Procurement Function* has also implemented and also Vendor management system "Extra" application as platform for vendor registration

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PTK mengacu pada:

1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa No. A-001/E2300/2020-S0 Revisi Ke 00.
2. Prosedur Pelelangan Pengadaan Barang Dan jasa No. Psd-001/E2300/2017-S0 Revisi Ke - 00
3. Prosedur Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/ Material No. Psd-002/E2300/2017-S0 Revisi Ke - 00
4. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Dalam

Goods and Services Procurement Policy

The implementation of the goods and services procurement in the PTK refers to:

1. Guidelines for Procurement of Goods and Services No.A-001/E2300/2020-S0 Revision 00.
2. Procurement Tender Procedure for goods and services No.Psd-001/E2300/2017-S0 Revision - 00
3. Procedure for Inspection and Acceptance of Goods/Materials No.Psd-002/E2300/2017-S0 Revision - 00.
4. Procedure for Procurement of Goods/Services

Kadaan Darurat No. Psd-003/E2300/2017-SO Revisi Ke - 00

5. Prosedur Penunjukan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa No. Psd-004/E2300/2017-SO Revisi Ke - 00
6. Prosedur Sertifikasi/Prakualifikasi Penyedia Barang/ Jasa No. Psd-005/E2300/2017-SO Revisi Ke - 00
7. Instruksi Kerja Pelaksanaan Evaluasi Harga dan Negosiasi Pengadaan Barang/Jasa No. IK-001/E2300/2017 -SO Revisi Ke - 00
8. Instruksi Kerja Pelaksanaan Laporan Scoring Vendor No. IK-202/E2300/2017 -SO Revisi Ke - 00
9. Sistem management terintegrasi (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007, ISM Code)

Dalam pelaksanaannya PTK memegang prinsip pengadaan jasa sebagai berikut:

1. **Adil**, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
2. **Akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;
3. **Bertanggung jawab**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
4. **Berwawasan HSE**, berarti memenuhi dan memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan lingkungan;
5. **Efektif**, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan;
6. **Efisien**, berarti diusahakan dengan menggunakan dana, daya, fasilitas yang sekecil-kecilnya, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

in an Emergency No. Psd-003/E2300/2017 -SO Revision - 00

5. Procedure for Appointment and Direct Selection for Procurement of Goods/Services No. Psd-004/E2300/2017 -SO Revision - 00
6. Procedure for Certification/Prequalification of Goods/Services Providers No. Psd-005/E2300/2017 -SO Revision - 00
7. Work Instruction for Price Evaluation and Negotiation of Goods/Services Procurement No. IK-001/E2300/2017 -SO Revision - 00
8. Work Instructions for Implementing Vendor Scoring Report No. IK-202/E2300/2017-SO Revision - 00
9. Integrated management system (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OSHAS 18001: 2007, ISM Code)

In its implementation, PTK holds the following principles of service procurement:

1. Fair, means that it is not discriminatory in giving treatment to all potential providers of goods/ services and does not lead to providing benefits to certain parties, in any way and or for any reason;
2. Accountable, means that it must achieve the target and be accountable so that it keeps away from potential abuse and irregularities;
3. Responsible, means achieving physical, financial and beneficial goals for the smooth running of the business in accordance with the principles and policies as well as the applicable provisions in the procurement of goods/services;
4. Having HSE insight, means fulfilling and paying attention to occupational health and safety aspects as well as environmental protection;
5. Effective, means that it must be in accordance with the needs that have been determined and can provide the maximum benefit in accordance with the objectives set by the Company;
6. Efficient, means that it is managed by using the smallest amount of funds, power, facilities to achieve the targets set in the shortest time and can be accounted for;
7. Integrity, means that the implementation of the procurement of goods/services must be fully committed to meeting procurement ethics;

7. **Integritas**, berarti pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan;
8. **Kehati-hatian**, berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi atau tindakan atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan immaterial terhadap Perusahaan selama proses pengadaan, proses pelaksanaan/pekerjaan, dan paska pelaksanaan pekerjaan;
9. **Kemandirian**, berarti suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. **Kompetitif**, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
11. **Penerapan GCG**, berarti menjalankan prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha, sehingga perusahaan dapat dijalankan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan;
12. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administrasi termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan penyedia barang/jasa harus bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa.
8. **Prudence**, means always paying attention to or should suspect any information or action or form as a precautionary measure to avoid material and immaterial losses to the Company during the procurement process, execution/ work process, and post-work implementation;
9. **Independency**, means a condition in which the procurement of goods/services is professionally managed without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the prevailing laws and regulations;
10. **Competitive**, means that it must be carried out through healthy selection and competition among providers of equal goods/services and meet certain requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures;
11. **Implementation of GCG**, means implementing the principles that underlie a company management process and mechanism based on laws and regulations and business ethics, so that the company can run properly and be accountable to all stakeholders;
12. **Transparent**, means that all provisions and information, both technical and administrative, including procedures for evaluation, results of evaluation and determination of providers of goods/services must be open to providers of goods/services.

Kriteria Utama & Ukuran Kinerja Excellent

- Efisiensi biaya sebesar 10% dari nilai Purchase Requisition (PR).
- Menjamin kegiatan operasional berjalan dengan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat yang tepat, secara efektif dan efisien dengan persyaratan dan kondisi kontrak yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan.

Main Criteria & Measures for Excellent Performance

- Cost efficiency of 10% of the Purchase Requisition (PR) value.
- Ensure that operational activities run by obtaining the required goods/services in the right quantity, quality, price, time and place, effectively and efficiently with clear and accountable terms and conditions of the contract.

- Meningkatkan kepedulian dan kesadaran kontraktor dalam pengelolaan aspek HSSE sehingga insiden yang disebabkan kontraktor dapat dihilangkan.

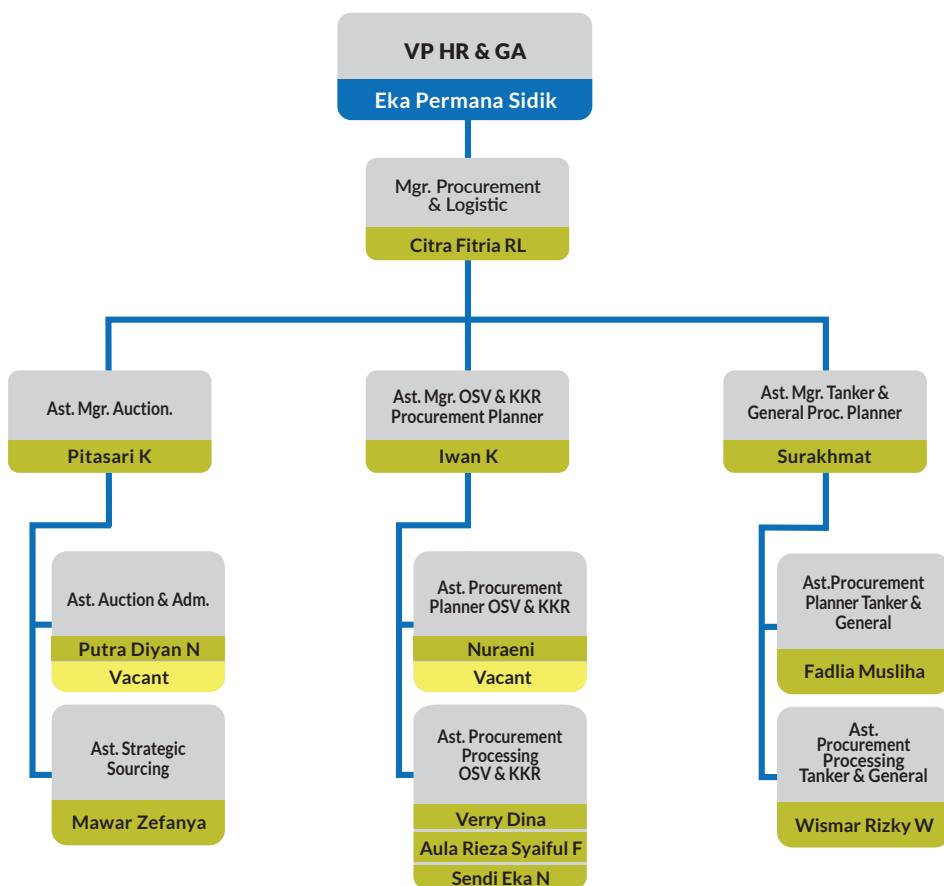
- Increase the awareness of contractors in managing the HSSE aspects so that incidents caused by contractors can be eliminated.

Struktur Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di PTK dikelola oleh Fungsi Procurement berada dibawah Direktorat Keuangan dan SDM yang diuraikan dalam bagan di bawah ini.

Structure of Goods and Services Procurement Management

The goods and services procurement in PTK is managed by the Procurement Function under the Directorate of Finance and Human Resources which is described in the chart below.



Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Fungsi Procurement sebagai berikut:

- a. Mengadakan *tender*, *beauty contest*, penunjukan langsung, *swakelola*, *cash and carry* (pembelian tunai).
- b. Menyusun daftar penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat kualifikasi dan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta informasi untuk pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasi.
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen sertifikasi/prakualifikasi, serta kriteria dan tata cara penilaian penawaran.
- d. Menerima dokumen/berkas HPS/OE/EE dari fungsi yang bertanggung jawab, menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- e. Menilai/mengevaluasi penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi, negosiasi dan menetapkan urutan dan mengusulkan calon penyedia barang/jasa.
- f. Menyimpan semua dokumen pengadaan

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Praktik pengadaan merupakan tanggung jawab seluruh pihak yang berkepentingan, yang meliputi Fungsi Pengadaan (*Procurement*), Fungsi Peminta Pengadaan (*User*), Penyedia Barang/Jasa (*Supplier*) dan pemangku kepentingan. PTK menerapkan kebijakan dan strategi praktik pengadaan melalui empat metode pengadaan barang dan jasa yaitu tender terbuka, tender terbatas, *beauty contest*, dan penunjukan langsung, sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

The main duties and responsibilities of the Procurement Function are as follows:

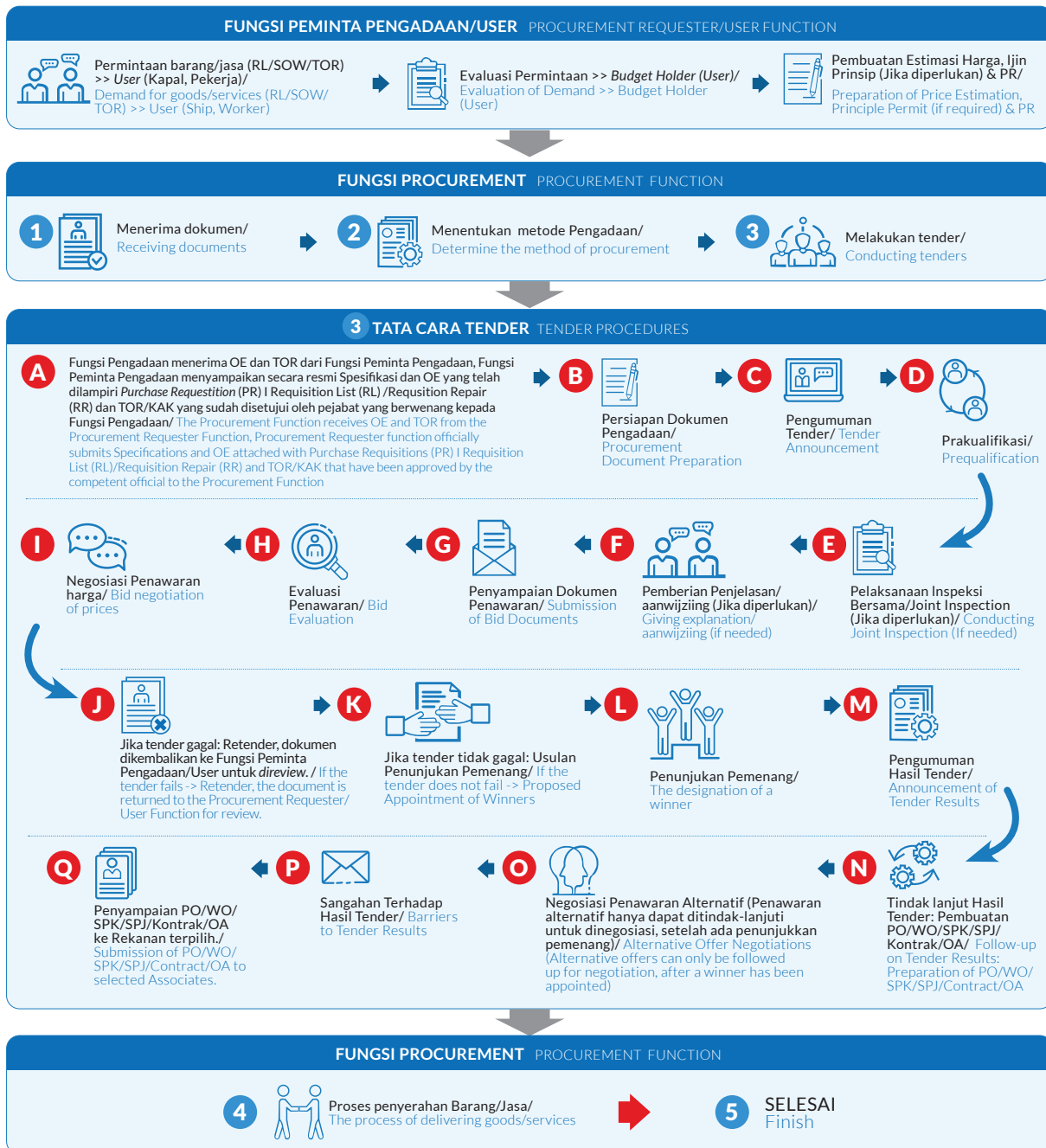
- a. Hold tenders, beauty contests, direct appointment, self-management, cash and carry (cash purchases).
- b. Compile a list of providers of goods/services that meet the qualification and classification requirements (business fields and sub-fields) to be invited to participate in procurement and if necessary request information to prove the truth of qualifications and classification
- c. Prepare procurement documents, certification/pre-qualification documents, as well as criteria and procedures for evaluating bids.
- d. Receiving HPS/OE/EE documents/files from the responsible function, compiling a schedule and implementation method as well as the location of the procurement.
- e. Assessing/evaluating incoming bids, conducting clarifications, negotiating and determining the order and proposing prospective providers of goods/services.
- f. Keep all procurement documents

Methods of Procurement of Goods and Services

Procurement practices are the responsibility of all interested parties, including the Procurement Function, User Function, Goods/Service Provider (Supplier) and other stakeholders. PTK implements procurement practice policies and strategies through four methods of goods and services procurement, namely open tender, limited tender, beauty contest, and direct appointment, in accordance with the applicable rules in the Guidelines for the Procurement of Goods and Services.

Alur Proses Pengadaan Barang dan Logistik

Process Flow of Procurement of Goods and Logistics



Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 Fungsi Procurement melaksanakan 2.403 kegiatan pengadaan dan beberapa diantaranya pencapaian lainnya sebagai berikut:

1. Efisiensi pengadaan sebesar 11,99%
2. Implementasi Digitalisasi Procurement via E-Proc dan Extra
3. Pembuatan kontrak payung untuk pengadaan air bersih, oli, ekspedisi, dan jasa service dan resertifikasi keselamatan kapal, dan
4. Pelaksanaan Vendor Day
5. Revisi dan Penyesuaian Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sesuai regulasi dan kebutuhan kerja terkini

Rencana Tahun 2021

Untuk program kerja tahun 2021, Fungsi Procurement merencanakan 3 (tiga) agenda kegiatan utama sebagaimana diuraikan dalam matrik kegiatan di bawah ini:

Implementation of Activities and Achievements in 2020

Throughout 2020 the Procurement Function carried out 2,403 procurement activities and several achievements were as follows:

1. Efficiency of 11.99%
2. Implementation of Procurement Digitization via EProc and Extra
3. Organized Outline agreement (OA) for the supply of clean water,, oil, goods expedition, and ship safety services and recertification services
4. The implementation of the Vendor Day
5. Revision and Adjustment of Guidelines for the Procurement of Goods / Services according to the latest regulations and work needs

Plans in 2021

For the work program in 2021, the Procurement Function plans 3 (three) main activity agendas as outlined in the activity matrix below.



Periode 2021 – 2022: berfokus pada Percepatan Proses Bisnis (*Accelerating*) dengan rencana kerja diantaranya Penerapan Kontrak Payung dan OA untuk Pengadaan Barang / jasa yang sifatnya Rutin dan *Consumable*, Penerapan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam proses pengadaan barang/jasa, serta Pengembangan dan Implementasi I-P2P maupun *Integrated Process Online Based*.

2021 – 2022 Period: focuses on Business Process Acceleration (*Accelerating*) with work plans including Implementation of Umbrella Contracts and OA for Routine and Consumable Procurement of Goods/ Services, Application of TKDN (Domestic Component Level) in the process of procuring goods/services, and Development and Implementation of I-P2P and Integrated Online Based Process.



7

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social
Responsibility



Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi Pertamina Trans Kontinental merupakan suatu komitmen berkelanjutan untuk bertindak etis dalam mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk bersama membangun kualitas kehidupan yang lebih baik dengan masyarakat dan lingkungan sosial di mana perusahaan berada.

Pertamina Trans Kontinental defines *Corporate social responsibility* (CSR) as a continuous commitment to act ethically in implementing corporate social responsibility programs to altogether build a better quality of life hand in hand with the society and social environment where the company is located.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Komitmen dan Kebijakan CSR

Perusahaan senantiasa menyeimbangkan kegiatan usaha dengan memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial kemasyarakatan dan kepada lingkungan. Hal itu, antara lain dilaksanakan melalui beragam kegiatan untuk menunjukan tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu, Perseroan juga melakukan kegiatan CSR yang mendukung ISO 26000.

CSR Commitment and Policy

The Company always align business activities by contributing to social life and to the environment. This, among others, is carried out through various activities to demonstrate Corporate Social Responsibility (CSR). The corporate entities are required to perform Social and Environmental Responsibility as regulated under the Law Number 40 of 2007 on Limited Companies and PP Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility. In addition, the Company also implements CSR activities that support ISO 26000.

Pelaksanaan CSR PTK merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial.

- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

CSR implementation in PTK refers to the laws and regulations concerning the social responsibility implementation.

- Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
- Law No. 25 of 2007 on Investment
- Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management
- Law Number 13 of 2011 on the Poor and Underprivileged
- Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility for Limited Liability Company

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Lingkup tanggung jawab sosial Pertamina Trans Kontinental meliputi enam aspek yaitu: menjadi: (1) Tanggung jawab sosial terhadap pengelolaan operasi yang adil; (2) Tanggung jawab sosial terhadap Hak Asasi Manusia; (3) Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan; (4) Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat; (5) Tanggung jawab sosial terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja; (6) Tanggung jawab sosial terhadap pelanggan.

Scope of Corporate Social Responsibility

Scope of social responsibility in Pertamina Trans Kontinental covers six aspects, such as: (1) Social responsibility on fair management of operations; (2) Social responsibility for human rights; (3) social responsibility to the environment; (4) social responsibility to the community; (5) Social responsibility for Occupational Health, Safety and Employment; (6) Social responsibility to the customers.

Isu dan Strategi Perusahaan Terkait Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Pertamina Trans Kontinental menyoroti empat isu tema keberlanjutan terkait yaitu Pendidikan, Lingkungan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesehatan. Isu-isu tersebut kami pandang sangat krusial dan mendesak untuk dilaksanakan dalam program CSR PTK tahun 2020. Fokus perhatian PTK terhadap empat isu tersebut sejalan dengan program pemerintah serta arahan induk Perusahaan, PT Pertamina (Persero).

Corporate Issues and Strategy Regarding Social, Economic and Environmental

Pertamina Trans Kontinental emphasizes four issues related to sustainability, including Education, The Environment, Public Economy Development and Health. We consider these issues crucial and urgent to be implemented in the PTK CSR program in 2020. The focus of PTK's attention to these four issues is in line with the government's program and the direction of PT Pertamina (Persero) as our parent company.



Metoda dan Ruang Lingkup Due Diligent Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Dalam rangka mendukung keberlanjutan bisnis Perusahaan, yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Perusahaan melaporkan aspek aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perusahaan juga telah memiliki *due diligent* dari kegiatan tanggung jawab perusahaannya yang berupa pertemuan berkala, pertemuan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, *multi-stakeholder forum*, *one-on-one meeting*, seminar, pameran, survei kepuasan, ataupun *Focus Group Discussion* (FGD) yang dapat disesuaikan dengan topik/isu yang ingin dikelola.

Rumusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Rumusan CSR Pertamina Trans Kontinental mengacu kepada arahan dari induk perusahaan yaitu PT Pertamina (Persero). Arahan induk perusahaan tersebut mengemban misi Pemerintah untuk menciptakan SDM yang unggul agar Indonesia maju serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari kerangka tersebut, maka Pertamina Trans Kontinental menyusun rumusan program pelaksanaan.

Method and Scope of Due Diligent on Social, Economic and Environmental Impacts

To support the Company's business sustainability, which is oriented towards economic, social and environmental aspects, the Company reports the Social Responsibility activities aspect. The company also has a *due diligent* for corporate responsibility activities in form of regular meetings, on demand meetings, *multi-stakeholder forums*, *one-on-one meetings*, seminars, exhibitions, satisfaction surveys, or *Focus Group Discussions* (FGD) that is adjustable based on desirable topic/issue to be managed.

Formulation of Corporate Social Responsibility

Formulation of CSR in Pertamina Trans Kontinental refers to the guideline from PT Pertamina (Persero) as parent company. The guideline from the parent company brought the Government's mission to create excellent human resources thereby Indonesia will progress and to develop economy of the society. From this framework, Pertamina Trans Kontinental has formulated the implementation program.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perencanaan CSR disusun mengacu kepada arahan induk perusahaan yang kemudian dituangkan dalam kebijakan Direksi Pertamina Trans Kontinental.

Corporate Social Responsibility Planning

CSR planning is prepared based on guideline from the parent company as outlined in Pertamina Trans Kontinental Board of Directors policy.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Merupakan Kewajiban Maupun yang Melebihi Kewajiban

Pertamina Trans Kontinental telah melaksanakan tanggung jawab sosial yang merupakan kewajiban dan yang melebihi kewajiban dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

Corporate Social Responsibility that is an Obligation or Exceeds an Obligation

Pertamina Trans Kontinental have carried out social responsibility as part of and beyond obligation properly. These activities include:

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial yang Merupakan Kewajiban Social Responsibility Activities as Obligations

Kegiatan Activities	Dasar Regulasi Regulatory Framework
Lingkungan Hidup Environment	- UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas - PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. - Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company - Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility.
Ketenagakerjaan Employment	- UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Law no. 13 of 2003 on Manpower
Keselamatan Kerja Work Safety	- UU Nomor 01 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. - Law Number 01 of 1970 on Occupational Work. - Republic of Indonesia Government Regulation No. 50 of 2012 concerning Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems.
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Partnership Program and Community Development Program	- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. - Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. - Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 3 Juli 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. - Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 concerning Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises. - Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 dated 16 December 2016 as the Amendment to the Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises. - Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/07/2017 dated 3 July 2015 as the Second Amendment to Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises.



Jumlah Anggaran Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pertamina Trans Kontinental memandang CSR sebagai sebuah investasi dalam jangka panjang, sehingga perencanaan harus diperhitungkan secara matang guna kelancaran realisasi semua program CSR dan pencapaian targetnya. Salah satu faktor penting dari pelaksanaan program CSR adalah tersedianya dana atau anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan CSR. Dana yang telah dikeluarkan oleh Pertamina Trans Kontinental berasal dari RKAP Perusahaan dan penyisihan laba, pengalihan THR BoD & BoC PTK serta anggaran dari PT Pertamina (Persero) dengan realisasi sebagai berikut:

Realisasi Anggaran CSR Tahun 2020

CSR Budget Realization in 2020

PROGRAM CSR CSR Program		REALISASI (Rp) Realization (Rp)	ANGGARAN (Rp) Budget (Rp)
Pendidikan	Education		
Anggaran PTK	PTK budget	10.000.000	
Anggaran Pertamina	Pertamina budget	267.000.000	
			277.000.000
Lingkungan	Environment		
Anggaran PTK	PTK budget	30.131.180	
Anggaran Pertamina	Pertamina budget	200.000.000	
			230.131.180
Sosial Masyarakat	Social Community		
Anggaran PTK	PTK budget	149.006.500	
			149.006.500



Total Corporate Social Responsibility Budget

Pertamina Trans Kontinental views CSR as a long-term investment thereby the planning shall be carefully calculated in order to smooth the realization of all CSR programs and achieve their targets. One of the important factors in implementing the CSR program is the availability of funds or a budget specifically allocated for CSR activities. The funds that have been issued by Pertamina Trans Kontinental come from the Company's RKAP and the provision of profit, diversion of Religious Holiday Allowance of PTK BoD & BoC and budget from PT Pertamina (Persero) with the following realization:

Realisasi Anggaran CSR Tahun 2020

CSR Budget Realization in 2020

PROGRAM CSR CSR Program		REALISASI (Rp) Realization (Rp)	ANGGARAN (Rp) Budget (Rp)
Kesehatan	Health		
Anggaran PTK	PTK budget	131.943.000	
Anggaran Pertamina	Pertamina budget	74.979.000	
Pengalihan THR BoD BoC PTK	Diversion of Religious Holiday Allowance of PTK BoD BoC	371.270.661	
			578.192.661
Infrastruktur	Infrastructure		
-	-	-	-
Pemberdayaan	Empowerment		
Anggaran PTK	PTK budget	74.250.000	
Anggaran Pertamina	Pertamina budget	297.300.000	
			371.550.000
TOTAL (Rp)			1.605.880.341

Evaluasi Kebijakan Perusahaan Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Evaluasi atas kebijakan perusahaan di bidang CSR dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan kegiatan CSR yang disampaikan kepada induk perusahaan dan Direksi Perusahaan. Selain itu monitoring pelaksanaan CSR dilakukan setiap tiga bulan sampai enam bulan untuk memantau efektifitas pelaksanaan di lapangan.

Evaluation on Corporate Social Responsibility Policy

Evaluation of company policies in the field of CSR is carried out in the form of compiling reports on CSR activities that are submitted to the parent company and Directors of the Company. Besides monitoring the implementation of CSR conducted every three months to six months to monitor the effectiveness of implementation in the field.

Pengukuran Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengukuran dampak pelaksanaan CSR dilakukan dengan memonitor perubahan yang terjadi di target program yang dilaksanakan. Pengukuran ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana program CSR sudah berjalan sesuai perencanaan.

Measurement of The Corporate Social Responsibility Impact

Measurement of the impact of the implementation of CSR is done by monitoring changes that occur in the target program implemented. This measurement is carried out to observe extent to which the CSR program has been implemented as planned.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Social Responsibility Related to Fair Operations



Komitmen dan Kebijakan

PTK berkomitmen untuk menerapkan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip operasi yang adil. PTK tunduk dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Commitment and Policy

PTK is committed to implement business development by promoting fair operating principle. PTK is a subject and comply to every prevailing laws and regulations.

Antikorupsi

Sejalan dengan semangat pemerintah Indonesia memberantas korupsi, PTK memiliki komitmen serupa. Komitmen itu tak terpisahkan dengan implemementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang tujuannya antara lain meningkatkan kepercayaan pelanggan, vendor dan Pemegang Saham.

Anticorruption

In line with the spirit of the Indonesian government in eradicating corruption, PTK has a similar commitment. This commitment is inseparable from the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG), the aim of which is to increase the trust of customers, vendors and Shareholders.

Untuk itu, berupaya untuk menutup pintu-pintu yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan, termasuk kemungkinan terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan. Komitmen menutup peluang terjadinya korupsi berlaku bagi seluruh pekerja PTK tanpa terkecuali.

Therefore, it seeks to close the doors that open up opportunities for abuse of office, including the possibility of the practice of gratuity and bribery. Commitment to close the opportunity for corruption applies to all PTK employees without exception.

Kebijakan PTK tentang anti korupsi mengharuskan semua pekerja untuk mengisi form gratifikasi setiap bulannya. Form ini juga mengharuskan semua pekerja untuk bertindak jujur dan menghindari memberi maupun menerima hadiah atau penyuapan.

Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

PTK memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menjadi mitra dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, PTK menetapkan persyaratan tertentu untuk menjadi mitra/vendor.

Setiap perusahaan yang ingin menjadi mitra/vendor PTK harus terlebih dahulu mendaftarkan sebagai vendor PTK. Hal ini dimaksudkan agar PTK dapat memastikan keberadaan dan legalitas persyaratan administratif vendor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kegiatan

Kami menancangkan program antikorupsi yang dilaksanakan melalui dua kegiatan yang mendukung terciptanya kondusifitas iklim bisnis. Pertama adalah kegiatan sosialisasi gratifikasi kepada seluruh pekerja. Berikutnya kegiatan pengisian form gratifikasi yang dilakukan oleh semua pekerja setiap bulan.

Guna mencegah praktik korupsi, Pertamina Trans Kontinental juga melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang transparan. Hal ini ditempuh dengan pengadaan barang dan jasa melalui tender. Sejalan dengan hal tersebut kami melakukan penilaian kinerja terhadap vendor.

PTK's anti-corruption policy requires all employees to submit gratification forms every month. This form also requires all employees to act honestly and avoid giving or receiving gifts or bribes

Transparent Goods and Services Procurement

PTK provides equal opportunities for all parties to become partners in the process of procurement of goods and services. However, PTK has implemented certain requirements to become a partner/vendor.

Every company that wants to become a TOD partner/vendor must first register as a PTK's vendor. This is intended thereby PTK can ensure the existence and legality of vendor administrative requirements in accordance with prevailing law and regulations.

Activity Plan

We have launched an anticorruption program which has been carried out through two activities that support the creation of a conducive business climate. The first is gratification socialization activities for all workers. Next is the activity of filling out the gratification form which is done by all workers every month.

To prevent corrupt practices, Pertamina Trans Kontinental also implements transparent procurement of goods and services mechanisms. This is done by procuring goods and services through tenders. In line with this we have conducted a vendor performance assessment.

Tanggung Jawab Sosial dalam Penerapan HAM

Social Responsibility in The Implementation of Human Rights



Komitmen dan Kebijakan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Komitmen perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi bagian dalam penerapan nilai-nilai dan budaya Perusahaan serta termaktub dalam Pedoman Perilaku Perusahaan.

Commitment and Policy

Human rights are basic rights for every human being. The company's commitment to human rights is part of the implementation of the corporate values and culture and is included in the Code of Conduct.

Rumusan dan Rencana Kegiatan

Rumusan praktik hak asasi manusia telah dituangkan dalam dokumen Kode Etik Perseroan (*Code of Conduct*) yang memuat etika individu dan etika bisnis. Dokumen ini telah mengatur tata hubungan antar individu untuk saling menjaga, menghormati, serta menghargai hak-hak sesama insan PTK. Diantaranya adalah bahwa Perseroan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat untuk bisa bekerja sesuai kapasitas dan kemampuan tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, ras, agama, dan gender.

Formulation and Activity Plan

The formulation of human rights practices has been stated in the Code of Conduct, which contains individual ethics and business ethics. This document has regulated the relationship between individuals to look after each other, respect and respect the rights of other PTK people. Among them is that the Company provides equal opportunities to the entire community to be able to work according to their capacity and ability without being limited by ethnic, racial, religious, and gender differences.

Kode etik ini telah disosialisasikan kepada seluruh insan Perseoran baik melalui penyebaran dokumen via website maupun pertemuan-pertemuan dan *sharing session*.

This code of conduct has been disseminated to all employees through the distribution of documents via the website as well as meetings and sharing sessions

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup

Social Responsibility for The Environment



Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu komitmen jangka panjang Perusahaan untuk mencapai keberlanjutan usaha. Untuk mengelola aspek dan dampak lingkungan dari operasional Perusahaan, manajemen PTK telah menetapkan kebijakan lingkungan yang terintegrasi dengan Kebijakan Mutu, Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan.

Environment conservation becomes one of the Company's long-term commitments to achieve business sustainability. To manage environmental aspects as well as the impacts against the Company's operations, PTK management has formulated environmental policy that is integrated with the Quality, Safety, Health & Environment Policy.

Komitmen dan Kebijakan

PTK menyadari bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tugas dan tanggung jawab bersama warga dunia, termasuk bagi PTK. Sekecil apapun tindakan dan kebijakan yang berdampak positif bagi lingkungan, hal itu harus diwujudkan. Kepedulian serupa itu harus ditumbuhkan karena kerusakan lingkungan bumi kian memburuk dari waktu ke waktu.

Commitment and Policy

PTK realizes that environment protection becomes a shared obligation and responsibility among the global citizens, including PTK. No matter how small the actions and policies that have a positive impact on the environment, it must be realized. Such concern must be fostered because the damage to the earth's environment is getting worse over time.

Sebagai korporasi yang bertanggung jawab, PTK memberikan dukungan dan komitmen untuk menjaga kelestarian bumi melalui berbagai kebijakan dan dalam melakukan kegiatan usahanya PTK berkomitmen untuk mendukung program pelestarian lingkungan. Dengan upaya itu, maka PTK ikut berperan untuk mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan bumi bagi manusia, sekaligus bermanfaat bagi generasi mendatang agar bisa menikmati kehidupan yang lebih baik di bumi. Keberlanjutan kehidupan di bumi akan menjadi berkah pula bagi keberlanjutan perusahaan.

Rumusan dan Rencana Kegiatan

Pertamina Trans Kontinental memiliki rencana mitigasi dalam mengendalikan limbah buang baik air, dan udara yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Untuk Perusahaan menggandeng lembaga independen untuk bekerjasama dalam melakukan monitoring limbah buang. Proses monitoring dilakukan setiap bulan dan terbagi atas dua periode dalam laporan tahunan yakni laporan tiap semester. Adapun uji yang dilakukan monitoring adalah 7 jenis uji, yakni uji udara ambien, udara lingkungan kerja, kebisingan luar, kebisingan dalam, cahaya, udara emisi genset, dan air limbah domestik.

Kegiatan yang Dilaksanakan dan Capaiannya

Efisiensi Penggunaan Material, Energi dan Air

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Energi Perusahaan menggunakan lima jenis sumber energi dalam menunjang kegiatan operasional, yaitu gas, solar, bensin dan listrik.

Upaya penghematan pun tetap dilakukan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan efisiensi energi, seperti kebijakan efisiensi pencahayaan gedung pada area kurang produktif dan lain-lain. Inisiatif

As a responsible corporation, PTK provides support and commitment to preserve the earth through various policies and in conducting its business activities PTK is committed to supporting environmental conservation programs. With this effort, PTK will play a role in reducing the negative impact of damage to the earth's environment for humans, while at the same time benefiting future generations to enjoy a better life on earth. Sustainability of life on earth will also be a blessing for corporate sustainability.

Formulation and Action Plan

Pertamina Trans Kontinental has a mitigation plan in controlling waste water, and air that has the potential to pollute the surrounding environment. For the company, collaborating with an independent institution to cooperate in monitoring waste disposal. The monitoring process is carried out every month and is divided into two periods in the annual report which is the report every semester. The monitoring tests are 7 types of tests, including the ambient air, work environment air, external noise, internal noise, light, air emission generator, and domestic waste water.

Activities and Achievements

Material, Energy and Water Efficiency Efficient Use of Energy Sources

The Company uses five types of energy sources to support operational activities, such as gas, diesel, gasoline and electricity.

The efficiency plan are conducted by implementing energy efficiency policies, such as building lighting efficiency policies in less productive areas and so on. This simple initiative is a form of support for the 13th

sederhana ini merupakan bentuk dukungan terhadap target SDG nomor ke-13 dalam penanganan perubahan iklim dengan terus berupaya menerapkan kebijakan pengurangan pemanfaatan energi untuk mengurangi produksi gas rumah kaca yang dapat mempengaruhi iklim.

Pemanfaatan limbah material dari kapal dengan berbagai langkah, yakni:

1. Mengelompokkan limbah kapal sesuai jenisnya
2. Membuang kelaut untuk limbah makanan setelah dihancurkan sebagai bahan makanan ikan laut
3. Membuang atau mengirimkan ke fasilitas darat pada kategori limbah minyak atau limbah besi untuk dikelola atau di daur ulang.

Kapal-kapal juga melaksanakan program penghematan penggunaan energi di kapal, antara lain:

1. Kampanye hemat energi melalui pelatihan dan penggunaan listrik dan air oleh setiap crew khususnya pada jam istirahat dan penerapan *energy conservation* di atas kapal dengan melakukan kecepatan ekonomis.
2. Dimasa pandemic COVID-19 crew tidak diperbolehkan pesiar pada saat kapal sandar di pelabuhan untuk menghindari terpaparnya COVID-19
3. Penerapan sistem manajemen lingkungan hidup ISO 14001 dan system keselamatan dan pencegahan pencemaran laut (ISM Code) dan telah tersertifikasi.
4. Kapal melakukan penghematan penggunaan BBM dengan cara menggunakan mesin kapal sesuai dengan kebutuhan operasional secara ekonomis dan *safety*.

SDGs target in tackling climate change by continuing to strive to implement policies to reduce energy use to reduce the production of greenhouse gases that may affect the climate.

Utilization of material waste from the vessels through various initiatives, as follows:

1. Classify vessels waste based on type
2. Disposal to the ocean for food waste after being crushed as food material for marine fish
3. Dispose of or deliver to onshore facilities in the category of waste or iron waste to be managed or recycled

The vessels also implement energy-saving programs on board, including:

1. Energy saving campaign through training and the use of electricity and water by each crew, especially during rest hours and the application of energy conservation on board at an economical speed.
2. During the COVID-19 pandemic the crew was not allowed to cruise when the ship docked at the port to avoid exposure to the COVID-19.
3. The implementation of the ISO 14001 environmental management system and the safety and prevention of marine pollution (ISM Code) and has been certified.
4. Shipssave fuel by using ship engines in accordance with operational needs economically and safely.

Pengelolaan Limbah

Selama 2020, PTK/pihak kapal melakukan pengelolaan limbah sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap lingkungan, berikut merupakan pengelolaan limbah B3 PTK selama 2020:

Waste Treatment

In 2020, PTK/the vessels have carried out waste management as a means of corporate social responsibility to the environment, the following is B3 waste treatment in PTK in 2020 are as follows::

Pengelolaan Limbah B3 PTK selama 2020

Waste Treatment

KATEGORI LIMBAH Waste Category	JENIS Type	UPAYA PENGELOLAAN Treatment Plan		JUMLAH/ BULAN (TON) Total/Month
Cair Liquid	Oli Bekas Used Oli	Reuse Diserahkan kepada fasilitas darat/ pelabuhan pemanfaat berizin	Reuse Handed to the licensed utilizing land/port facility	15 Ltr Oli Bekas
PADAT/ SOLID				
Kapal Ship	Plastik (A) Plastic	Dibuang ke fasilitas darat/ terminal yang kemudian akan didaur ulang.	Disposed to land facilities/ terminals which will then be recycled.	15 Kg
	Food Wastes (B)	Dibuang kelaut setelah dipotong-potong kecil kurang dari 1cm ² kemudian dibuang kelaut dengan jarak lebih dari 12 NM dari daratan terdekat.	Dumped to sea after being cut into pieces less than 1cm ² then dumped into the sea more than 12 NM from the nearest land.	30 Kg
	Domestic Wastes (C) Sampah yang dihasilkan dari operasional harian kapal.	Dikumpulkan didalam kantung plastik besar kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat / terminal yang kemudian akan diolah kembali.	Collected in large plastic bags then altogether with plastic waste is disposed of to landfill facilities/terminals which will then be processed again.	16 Kg
	Cooking Oil (D)	Dikumpulkan didalam drum kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat/ terminal yang kemudian akan di olah kembali.	Collected in the drum then together with plastic waste disposed of to landfill facilities/ terminals which will then be processed again.	10 Ltr
	Incinerator Ashes (E)	Dikumpulkan di dalam cylinder kemudian dikumpulkan di dalam kantung plastik besar kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat / terminal yang kemudian akan di olah kembali.	Collected in the cylinder then Collected in a large plastic bag then together with the plastic waste is disposed of to a landfill/terminal garbage disposal facility which will then be processed again.	10 Kg

KATEGORI LIMBAH Waste Category	JENIS Type	UPAYA PENGELOLAAN Upaya Pengelolaan	JUMLAH (TON) Jumlah (Ton)
-	Electronic Wastes (I)	Dikumpulkan didalam kantung Plastik besar kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat / terminal yang kemudian akan diolah kembali.	-
KANTOR/ OFFICE			
Gedung Building	Lampu Electricity	Diserahkan kepada Pengelola Gedung.	Handed to the Building Manager.
	Cartridge Fotocopy	Diserahkan kembali kepada vendor.	Sent back to the vendor.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Environmental Certification

SERTIFIKASI Certification	VARIABEL PENGUKURAN Measurement Variables	TARGET YANG DIHASILKAN Resulting Target
ISO 14001	Sertifikasi Certification	Ramah lingkungan dan mematuhi peraturan dan perundangan. Eco-friendly and comply with the laws and regulations.

Lingkup Pengaruh Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup

Pertamina Trans Kontinental menjalankan usaha di bidang perkapalan, kepelabuhan, dan logistik, di mana seluruh rangkaian kegiatan operasional tidak memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup. Produk dan jasa kami bukanlah industri yang mengeluarkan limbah sehingga tidak berpotensi terhadap pencemaran lingkungan.

Scope of The Company's Impact to The Environment

Pertamina Trans Kontinental operates business in the shipping, port and logistics sectors, where the entire operational activities do not generate any negative impact to the environment. Our products and services are not industries generating waste thereby not causing any potential environmental pollution.

Mekanisme Penanganan Konflik Terkait Lingkungan Hidup

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi konflik terkait lingkungan hidup sebagai akibat dari operasi bisnis Pertamina Trans Kontinental. Karena itu manajemen tidak melaksanakan penanganan konflik lingkungan dengan pihak-pihak mana pun yang merasa dirugikan atau terkena dampak.

Due Diligence Terhadap Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup

Kegiatan *due diligence* dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga independent dan perguruan tinggi (Universitas Indonesia) yang tertuang dalam laporan monitoring hasil uji di udara, kebisingan, cahaya, udara emisi genset, dan air limbah domestik yang masih sesuai dengan kategori NAB (Nilai Ambang Batas). PTK juga berkomitmen untuk terlibat langsung dalam program CSR yang terkait dengan isu lingkungan yaitu bencana alam, dan bank sampah.

Biaya Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup

Sepanjang tahun 2020, PTK telah mengeluarkan dana untuk melakukan program pemeliharaan lingkungan hidup sebesar Rp230.131.180.

Sertifikasi

Pertamina Trans Kontinental telah memperoleh sertifikasi monitoring lingkungan sudah tercatat dan terakreditasi dalam Komite Akreditasi Nasional (KAN) No. : LHP. KHT.1907.1330 tentang Laporan Hasil Pengujian tanggal 11 Juli 2019, dan No. : LHP. KHT.1912.3560 tentang Laporan Hasil Pengujian tanggal 16 Desember 2019.

Conflict Management Mechanisms Regarding The Environment

In 2020, there is no conflicts related to the environment as a result of Pertamina Trans Kontinental business operations. Therefore management does not carry out handling environmental conflicts with any parties who feel disadvantaged or affected.

Due Diligence on Social Responsibility Regarding The Environment

The due diligence activity was carried out in collaboration with independent institutions and universities (Universitas Indonesia) as contained in the monitoring report on the results of tests on air, noise, light, air emissions of generators, and domestic wastewater that still fit the NaB category (threshold value). PTK is also committed to be directly involved in CSR programs related to environmental issues, namely natural disasters and waste banks.

Budget of Social Responsibility Related to The Environment

Throughout 2020, PTK has spent funds to carry out environmental maintenance programs amounting to Rp230,131,180.

Certification

Pertamina Trans Kontinental has obtained environmental monitoring certification that has been registered and accredited by the National Accreditation Committee (KAN) No.: LHP.KHT.1907.1330 concerning Test Results Report on July 11, 2019, and No. : LHP.KHT.1912.3560 concerning Test Results Report on December 16, 2019.

Pengaduan Terkait Pengelolaan Lingkungan

Sepanjang tahun 2020 Pertamina Trans Kontinental tidak memperoleh pengaduan terkait lingkungan hidup dari pihak-pihak yang merasakan dirugikan sebagai akibat dari operasi bisnis kami. Meskipun demikian, praktik usaha Pertamina Trans Kontinental senantiasa tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku baik terkait operasi bisnis maupun yang mengatur masalah lingkungan hidup.

Dampak Kualitatif Kegiatan

Berbagai kegiatan dan program pengelolaan lingkungan yang telah dijalankan selama ini telah ikut memberikan pengaruh terhadap terjaganya kelestarian.

Dampak Keuangan

PTK mengalokasikan biaya untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial yang diselenggarakan sesuai dengan strategi dan bisnis perusahaan dengan mengedepankan hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat dan lingkungan. Pada tahun 2020, secara umum penyaluran dana kegiatan dalam bidang Lingkungan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Pada tahun 2020 PTK telah melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dengan biaya sebesar Rp 230.131.180.

Complaints Regarding Environmental Management

Throughout 2020 Pertamina Trans Kontinental did not receive environmental complaints from parties who felt disadvantaged as a result of our business operations. Nevertheless, the Pertamina Trans Kontinental business practices have complied to the prevailing laws both in business operations and provisions that regulate environmental issues.

Qualitative Impacts from the Activities

Various activities and environmental management programs that have been carried out currently have contributed to maintain sustainability.

Financial Impact

PTK has allocated a budget to provide sustainable benefits for the community through various social responsibility programs that were organized in accordance with the company's strategy and business by promoting sustainable relationships with the society and the environment. In 2020, in general, the distribution of funds for activities in the environmental sector did not cause significant impact to the Company's financial performance. In 2020 PTK has carried out social responsibility for the environment at a cost of Rp230,131,180.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat

Social Responsibility to The Community



Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk kinerja dan investasi sosial PTK kepada masyarakat. Melalui implementasi program CSR yang terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan, PTK ingin menciptakan manfaat atas kehadiran perusahaan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

CSR implementation is manifestation of PTK's social performance and investment to the society. Through implementation of a planned, targeted, transparent and sustainable CSR program, PTK strives to create benefits for the company's presence through the initiatives to improve the living standard and welfare of the society.

Komitmen dan Kebijakan

PTK berkomitmen memberikan manfaat positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Komitmen tersebut direalisasikan dengan menyelenggarakan program-program yang berdampak baik dan positif terhadap masyarakat. Program dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Commitment and Policy

PTK is committed to contribute positive and sustainable benefits for all stakeholders, especially the communities around the company's operational areas. This commitment is realized by arranging several programs that have a positive and positive impact on society. The program is carried out continuously to realize participation and support from the community while also improving the quality of life of the community.

Rumusan dan Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan disusun sebagaimana tertuang dalam program sosial kemasyarakatan adalah meliputi: bantuan panti asuhan, bantuan anak yatim, kegiatan buka puasa bersama, kegiatan pemuda dan olah raga, bantuan sembako, dan bantuan keagamaan.

Kegiatan yang Dilaksanakan dan Capaiannya

Dalam pelaksanaannya, PTK menerapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam beberapa aspek program, yaitu pendidikan, lingkungan, sosial masyarakat, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan dana langsung (donasi), kegiatan, pembangunan infrastruktur, dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Formulation and Action Plan

The activities that are planned and arranged as disclosed in the social community program which includes: assistance for orphanages, assistance for orphans, breaking fasting together, youth and sports activities, food assistance, and religious assistance.

Activities Implementation and Achieved

In its implementation, PTK has implemented social and environmental responsibility programs in several aspects, such as education, environment, social society, health, infrastructure, and empowerment. The form of assistance provided in form of direct funds (donations), activities, infrastructure development, and adjusted based on needs.

BIDANG Sector	KEGIATAN Activity	
Pendidikan Education	Bantuan dana kegiatan maupun program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun tidak terbatas pada lembaga pendidikan formal, non-formal, serta kepada tenaga pendidik, dan lain-lain.	Donation for activities and programs with purpose to improve the quality of education in Indonesia, but are not limited to formal, non-formal educational institutions, as well as to teaching staff, and others.
Sosial masyarakat Social Community	Kegiatan kepemudaan, keagamaan, bantuan anak yatim, dan lain-lain.	Youth, religious activities, charity for orphans, and others
Kesehatan Health	Bantuan penanggulangan COVID-19 dalam bentuk APD & dana tunai.	COVID-19 response assistance in the form of PPE & cash.
Infrastruktur Infrastructure	Pembangunan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan infrastruktur fasilitas umum.	Construction, maintenance, maintenance and improvement of public facilities infrastructure
Pemberdayaan Empowerment	Pelatihan dan kemitraan kewirausahaan.	Entrepreneurship training and partnership



BIDANG PENDIDIKAN

Program Terminal WIFI

Program terminal wifi yaitu menyediakan sarana belajar kepada para siswa yang kesulitan dalam melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemic COVID-19. Program ini bertujuan memberikan kemudahan akses internet dan gadget untuk siswa yang tidak mampu dan terkendala dalam proses belajar mengajar online secara gratis.

Program ini menyediakan 1 lokasi sarana yang mampu menampung 15 orang dalam satu waktu untuk mengakses internet secara gratis. Tersedia 10 gadget, akses internet dengan kecepatan 100 Mbps, 8 pack masker tersedia gratis, sarana cuci tangan, dan dipandu 2 orang pembimbing untuk anak. Realisasi biaya kegiatan Terminal WIFI sebesar Rp75.000.000.

EDUCATIONAL SECTOR

WIFI Terminal Program

The wifi terminal program is to provide learning tool to students with difficulty in doing Distance Learning during the COVID-19 pandemic. This program aims provide easy internet access and gadgets for students who are unable and constrained in online teaching and learning process for free.

This program provides 1 location facility with capability to accommodate 15 people at a time to access the internet for free. There are 10 gadgets, internet access with a speed of 100 Mbps, 8 packs of masks are available for free, hand washing facilities, and guided by 2 mentors for children. Realization WIFI Terminal activity budget is Rp75,000,000.

Selain itu, untuk memaksimalkan program penanganan COVID-19, PTK berpartisipasi dalam memberikan bantuan berupa bantuan uang tunai kepada Rumah Sakit Rujukan, alokasi dana diambil dari program PTK mengajar dimana kegiatan ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dimasa pandemi COVID-19. Total dana yang disumbangkan sebesar Rp45.000.000,- kepada RS Pertamedika.

In addition, to optimize the COVID-19 response program, PTK participated in provide assistance in form of cash assistance to the Referral Hospital, allocation of funds is allocated from PTK teaching program where the activity is not possible to be implemented during a COVID-19 pandemic. The total budget donated achieved Rp45.000.000,- to Pertamedika Hospital.



LINGKUNGAN DAN KESEHATAN

Bantuan COVID-19 (Bantuan APD)

Bantuan COVID-19 berupa bantuan APD merupakan wujud kepedulian kepada Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dengan menggunakan pengalihan anggaran dari program Bank Sampah Terpadu. Program ini bertujuan untuk membantu RS Rujukan untuk menangani pasien di masa pandemi ini.

Realisasi biaya kegiatan Bantuan COVID-19 dalam bentuk APD kepada 4 RS Rujukan di wilayah PTK Cabang Medan, Makassar, Jambi, dan Balikpapan sebesar Rp200.000.000,-

Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Bantuan Pemberian makanan Tambahan merupakan wujud kepedulian PT PTK kepada siswa/i PAUD di lingkungan area Kantor Pusat PT PTK yang terdampak pandemi COVID-19. Program ini

ENVIRONMENT AND HEALTH

COVID-19 Assistance (PPE Donation)

COVID-19 assistance in form of PPE donation becomes manifestation of concern for the Referral Hospital. COVID-19 by using a diversion budget from the Integrated Waste Bank program. This program aims to help referral hospitals to treat patients in this time of the pandemic.

Realization of the budget for the COVID-19 Assistance activities in form of PPE to 4 Referral Hospitals in the PTK area such as Medan, Makassar, Jambi and Balikpapan branches achieved Rp200.000.000,-

Extra Food Donation

Extra Food Donation (PMT) becomes manifestation of PT PTK's concern for PAUD students in the PT PTK Headquarters area which affected by the COVID-19 pandemic. This program aims to increase children's



bertujuan meningkatkan kebutuhan gizi anak dengan memberikan bantuan paket gizi kepada siswa usia balita agar tercukupi kebutuhan zat gizinya.

Bantuan PMT diberikan dalam bentuk 100+ paket gizi yang disalurkan dalam 2 kali di PAUD Al-Ihsan RW 05 Kelurahan Paseban. Realisasi biaya kegiatan sebesar Rp49.250.000,-

Pelatihan Penyiapan Asupan Makanan (via online)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi bagi para Ibu untuk menjaga keseimbangan gizi keluarga dimulai dari mengolah bahan makanan dan memasak menu sehat bagi keluarga dalam mengatasi masalah gizi buruk khususnya di masa pandemi dan saat isolasi mandiri di rumah.

Pelatihan asupan makanan menyediakan untuk 60 paket bahan masak yang dibagikan sebelum pelatihan online dengan basis data orang tua siswa PAUD Al-Ihsan dilakukan sebanyak 2 kali dengan total 4 menu olahan makanan yang dipandu oleh chef Baron. Realisasi biaya kegiatan sebesar Rp39.500.000,-

nutritional needs by providing nutritional package assistance to students below five years old thereby their nutritional needs are fulfilled.

PMT assistance was provided in form of 100+ nutritional packages which were distributed twice at PAUD AL-Ihsan RW 05 Paseban Urban Village. Realization of activity budget achieved Rp49,250,000.-

Meal Preparation Training (via online)

This activity aims to provide education for mothers to maintain nutritional balance family starting from processing food and groceries cook a healthy menu for the family in overcoming malnutrition, especially in times of pandemic and during self-isolation at home.

The meal training provides for 60 packages of cooking ingredients distributed before training online with a database of parents of PAUD AL-Ihsan students done 2x with a total of 4 menus processed food guided by chef Baron. Realization of activity budget amounting to Rp39,500,000.



Pemberdayaan Perempuan Pesisir

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberdayakan perempuan sehingga dapat lebih berperan dalam keluarga dan masyarakat, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga sebagai pendamping suami dan mengurus anak-anak tetapi perempuan pesisir akan lebih sadar keterlibatannya secara aktif di bidang kesehatan, pendidikan dan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka khususnya di masa pandemi saat ini.

Pelaksanaan program berupa pelatihan usaha, perbaikan kemasan produk, pendampingan usaha, bantuan modal dan sarana usaha. Realisasi biaya kegiatan Pemberdayaan Perempuan sebanyak 3 kali pelaksanaan sebesar Rp223.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dimana masing-masing lokasi biayanya sebesar Rp74.250.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Medan, Rp74.500.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di Makassar, dan Rp74.250.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Jambi.

Pemberdayaan Masyarakat (Kampung Ramah Lingkungan) Ciwandan

Kegiatan CSR tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan

Coastal Women Empowerment

This activity is intended to empower women thereby they can play more significant role in their family and society, the coastal women are expected to beyond as housewives as companions to their husbands and take care of children but also to have greater awareness on their active involvement in health, education and business that can improve their well-being especially in the current pandemic era.

Implementation of programs in the form of business training, product packaging improvements, business assistance, capital assistance and business facilities. Cost realization of the Women's Empowerment activities 3 times implementation of Rp223,000,000, - (Two Hundred Two Thirty Three Million Rupiah) where each location the budget is Rp74,250,000 (Seventy-four Million Two Hundred Fifty Thousand Rupiah) in Medan, Rp74,500,000, - (Seventy-Four Million Five Hundred Thousand Rupiah) in Makassar, and Rp74,250,000 (Seventy Four Million Two Hundred Fifty Thousand Rupiah) in Jambi.

Community Empowerment (Kampung Environmentally Friendly) Ciwandan

The CSR activities are aimed at empowering the community by providing knowledge and training on



pengetahuan dan pelatihan mengenai *urban farming* bagaimana bercocok tanam dengan memanfaatkan ruang terbuka di pekarangan rumah atau lingkungan sekitar dan menggunakan pupuk dari hasil olahan sampah rumah tangga.

Kegiatan dilakukan untuk perbaikan saung kreatif (PTK), pelatihan urban farming untuk 5 Kelompok wanita tani (KWT) dan pembuatan taman toga di RW 01. Realisasi biaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kampung Ramah Lingkungan) Ciwandan adalah sebesar Rp74.300.000,-

Lingkup Pengaruh Perusahaan Terkait Isu Sosial dan Kemasyarakatan

Kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi usaha kecil dan pemberdayaan sosial masyarakat. Program telah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan.

urban farming how to grow crops by using open space in the yard or environment around and use fertilizers from processed products household waste.

Activities carried out to improve creative huts (PTK), urban farming training for 5 groups woman farmer (KWT) and making a toga garden in RW01. Realization of the budget for Community (Environmentally Friendly Village) empowerment activity in Ciwandan amounted Rp74,300,000.

Scope of Influence on Social and Community Issues

Social community development activities are carried out through the Partnerships and Community Development Program with the purpose to increasing the economic activities of small businesses and community social empowerment. The program has had a positive impact on improving the community's economy and improving the quality of life through health and education.

Mekanisme Pelibatan Stakeholders

Mekanisme pelibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial di bidang kemasyarakatan diuraikan dalam skema sebagai berikut:

Mechanisms for Involving Stakeholders

The mechanism for stakeholder involvement in the implementation of social responsibility in the community sector is described in the following table:

AKTIFITAS Activity	KETERLIBATAN STAKEHOLDER Stakeholder Involvement		KETERANGAN Description	
Pendidikan Education	- Kantor pusat - Kantor cabang - Perguruan tinggi - Masyarakat di lokasi - Instansi Pemerintah	- Headquarters - Branch office - Universities - Community on site - Government agencies	- Kebijakan - Koordinasi dan pelaksanaan - Mitra pelaksana - Fasilitator - Penerima manfaat - Koordinasi	- Policy - Coordination and implementation - Implementing partners - Facilitator - Beneficiaries - Coordination
Kesehatan Health	- Kantor pusat - Kantor cabang - RS Pertamedika - Masyarakat - Instansi Pemerintah	- Headquarters - Branch office - Pertamedika Hospital - Public - Government agencies	- Kebijakan - Koordinasi dan pelaksanaan - Mitra pelaksana - Fasilitator - Penerima manfaat - Koordinasi	- Policy - Coordination and implementation - Implementing partners - Facilitator - Beneficiaries - Coordination
Pemberdayaan Empowerment	- Kantor pusat - Kantor cabang - Anak Perusahaan - Masyarakat - Instansi Pemerintah	- Headquarters - Branch office - Subsidiaries - Public - Government agencies	- Kebijakan - Koordinasi dan pelaksanaan - Mitra pelaksana - Penerima manfaat - Koordinasi	- Policy - Coordination and implementation - Implementing partners - Beneficiaries - Coordination
Fasilitas Umum dan Bencana Alam Public Facilities and Natural Disasters	- Kantor pusat - Kantor Cabang - Masyarakat - Instansi Pemerintah	- Headquarters - Branch office - Public - Government agencies	- Kebijakan - Koordinasi dan pelaksanaan - Mitra pelaksana - Penerima manfaat - Koordinasi	- Policy - Coordination and implementation - Implementing partners - Beneficiaries - Coordination

Mekanisme Penanganan Konflik

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi konflik antara Pertamina Trans Kontinental dengan masyarakat sebagai akibat dari operasi bisnis Pertamina Trans. Karena itu manajemen tidak melaksanakan penanganan konflik sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak mana pun yang merasa dirugikan atau terkena dampak.

Conflict Management Mechanism

In 2020, there is no conflicts between Pertamina Trans Kontinental and the community caused by the operation of Pertamina Trans Kontinental. Therefore management does not carry out handling social conflict with any parties who feel disadvantaged or affected.

Metoda dan Ruang Lingkup Due Diligent Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan

Dalam rangka mendukung keberlanjutan bisnis Perusahaan, yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Perusahaan melaporkan aspek aktivitas Tanggung Jawab Sosial. Perusahaan juga telah memiliki *due diligent* dari kegiatan tanggung jawab perusahaannya yang berupa pertemuan berkala, pertemuan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, *multi-stakeholder forum*, *one-on-one meeting*, seminar, pameran, survei kepuasan, ataupun *Focus Group Discussion* (FGD) yang dapat disesuaikan dengan topik/isu yang ingin dikelola.

Stakeholder Penting yang Terdampak oleh Perusahaan

Penting bagi Perusahaan melakukan pelibatan pemangku kepentingan. Pelibatan pemangku kepentingan secara langsung oleh masing-masing divisi/unit bisnis yang terkait dilaksanakan secara rutin, terbuka, dan jujur. Hal tersebut membantu Perusahaan untuk mengidentifikasi, memahami, dan isu yang paling penting bagi pemangku kepentingan dan operasional Perusahaan. Dalam melakukan identifikasi dan interaksi dengan para pemangku kepentingan di seluruh area operasional, Perusahaan mengacu pada data primer penelitian lapangan yang dilakukan sesuai dengan metodologi identifikasi pemangku kepentingan. Hasil proses identifikasi tersebut menjadi dasar bagi Perusahaan dalam melakukan pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), pengelolaan isu, dan merumuskan program pengembangan masyarakat yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing masyarakat setempat.

Perusahaan menggunakan berbagai metode dalam pelibatan pemangku kepentingan. Keragaman metode ini dilakukan demi memastikan aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan Perusahaan yang tersebar dapat ditangkap dengan efektif dan efisien sehingga Perusahaan dapat bertindak dan mengambil langkah aksi yang terbaik bagi semua

Method and Scope of Due Diligent on the Social, Economic and Environmental Impact of Company Activities

In order to support the Company's business sustainability, which is oriented towards economic, social and environmental aspects, the Company reports activities in Social Responsibility aspects. The Company also has a *due diligent* of its corporate responsibility activities in the form of regular meetings, on demand meetings, multi-stakeholder forums, one-on-one meetings, seminars, exhibitions, satisfaction surveys, or Focus Group Discussions (FGD) that are adjustable based on the topic/issue to be managed.

Key Stakeholders Affected by the Company

The Company views the importance to engage with the stakeholders. Direct stakeholder engagement by each related division/business unit is carried out regularly, transparently and honestly. This initiative helps the Company to identify, understand and the issues that are most important to stakeholders and the Company's operations. In identifying and interacting with stakeholders in all operational areas, the Company utilizes the primary data from field research conducted based on stakeholder identification methodology. The results of the identification process serve as the basis for the Company in engaging with stakeholders (*stakeholder engagement*), managing issues, and formulating community development programs that are appropriate to the context and needs of each local community.

The Company applies a variety of methods for stakeholder engagement. This diversity of methods is carried out in order to ensure that the aspirations and input of the Company's scattered stakeholders can be captured effectively and efficiently so that the Company can act and take the best possible action for all parties. The company always ensures that in every

pihak. Perusahaan senantiasa memastikan di setiap pelibatan, khususnya yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*), wakil dari setiap kelompok pemangku kepentingan hadir dan terwakili dengan baik.

Oleh karena itu, Perusahaan mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan dan mengelompokkannya ke dalam kelompok pemangku kepentingan, yakni:

1. Pemegang Saham.
2. Kreditur
3. Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, termasuk instansi yang ada di dalamnya
4. Pekerja
5. Pelanggan
6. Pesaing
7. Mitra usaha/pemasok/supplier/distributor
8. Komunitas masyarakat dan lembaganya.
9. Media massa

Dari berbagai kegiatan interaksi dengan para pemangku kepentingan, Perusahaan menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing pemangku kepentingan. Suara pemangku kepentingan tersebut menjadi salah satu masukan penting bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan maupun dalam menyelaraskan arah strategi perusahaan baik saat ini, maupun di masa yang akan datang. Masing-masing divisi dan unit kerja menyusun program kerja, target, dan rencana aksi berdasarkan pelibatan pemangku kepentingan, arah prospek bisnis, dan target-target operasional Perusahaan.

Isu-Isu Penting Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Perusahaan memberikan imbal balik dengan manfaat yang saling menguntungkan untuk pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, Perusahaan mengidentifikasi isu-isu penting dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Isu-isu penting sosial, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut:

engagement, especially those involving multiple stakeholders (*multi-stakeholder*), representatives from each stakeholder group are present and well represented.

Therefore, the Company identifies various stakeholders and classifies them into stakeholder groups, namely:

1. Shareholders.
2. Creditors
3. Government, both Central and Regional, including the agencies within it
4. Employees
5. Customers
6. Competitors
7. Business partners/suppliers/distributors
8. Communities and institutions.
9. Mass media

From various interaction activities with stakeholders, the Company adapts to the characteristics of each stakeholder. The voices of stakeholders are an important input for the Company in making decisions and in aligning the direction of the company's strategy, both now and in the future. Each division and work unit prepares work programs, targets and action plans based on stakeholder engagement, direction of business prospects, and the Company's operational targets.

Key Social, Economic and Environmental Issues Related to the Impact of Company Activities

The Company provides reciprocity with mutually beneficial benefits for community empowerment. Therefore, the Company identifies important issues by conducting Focus Group Discussions (FGD) with internal and external stakeholders. The key social, economic and environmental issues are as follows:

ASPEK Aspect	ISU PENTING Important Issue	KETERANGAN Description
Sosial Social	Penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberian kesempatan bagi masyarakat menjadi pemasok lokal. Absorption of local labor, and providing opportunities for people to become local suppliers.	Mereka berpendapat bahwa pemberian pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat saat ini sudah optimal. Program pelatihan yang dimaksud, diantaranya berupa kegiatan peningkatan keterampilan berwirausaha. Masyarakat berharap, penerima manfaat yang telah menyelesaikan rangkaian program pelatihan mendapat prioritas penyerapan tenaga kerja oleh Perusahaan maupun kontraktor, selain diarahkan untuk berwirausaha. Atas kebutuhan ini, Perusahaan menyatakan bahwa dalam menerima tenaga kerja yang memang diutamakan berasal dari masyarakat sekitar, sejauh semua persyaratan kemampuan, keterampilan dan kebutuhan terpenuhi. Namun demikian, Perusahaan juga meminta pengertian masyarakat agar memahami bahwa Perusahaan belum memerlukan tambahan tenaga kerja maupun pemasok lokal selama tahun 2020. Perusahaan masih terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari sumber daya manusia dan pemasok lokal yang selama ini sudah ada. They assumed that current training and skills development opportunity for the community has been optimal. The training program includes activities to improve entrepreneurial skills. The community hopes that beneficiaries who have completed a series of training programs will receive priority for employment by companies and contractors, in addition to being directed towards entrepreneurship. In response to this need, the Company stated that in recruiting workers that were prioritized from the local community, as long as all fulfilment of abilities, skills and position requirements. However, the Company also requested the public's understanding to understand that the Company does not need additional manpower or local suppliers during 2020. The company continues to improve the efficiency and effectiveness of its existing local workers and suppliers.
Ekonomi Economy	Pencapaian Kinerja Ekonomi dan Alokasi dana CSR. Achievement of Economic Performance and CSR Budget Allocation	Masyarakat berharap Perusahaan lebih transparan dalam menyampaikan pencapaian kinerja ekonomi dan alokasi dana CSR. Masyarakat berharap adanya peningkatan alokasi dana untuk CSR agar program yang diberikan semakin berkualitas dan menyentuh lebih banyak masyarakat. Atas kebutuhan ini, Perusahaan menanggapi bahwa biaya CSR telah disampaikan dalam laporan tahunan dan dapat dibaca oleh publik. Lebih jauh, Perusahaan juga menyatakan bahwa kegiatan CSR lebih mengutamakan pemberdayaan dan membangun kemandirian masyarakat. Public has an expectation that the Company will be more transparent in delivering economic performance achievements and the allocation of CSR funds. The community hopes that there will be an increase in the allocation of funds for CSR so that the programs provided will be of higher quality and reach more people. In response to this need, the Company responded that CSR costs have been submitted in the annual report and can be read by the public. Furthermore, the Company also explained that CSR activities prioritize empowerment and building community independence.
Lingkungan Environment	Penghijauan untuk pelestarian lingkungan. Greening for environment conservation	Masyarakat berharap Perusahaan lebih meningkatkan kegiatan penghijauan baik di internal maupun eksternal Public has an expectation that the Company will intensify both internal and external greening activities.

Evaluasi Regulasi Terkait Sosial Kemasyarakatan

Evaluasi atas kebijakan perusahaan di bidang CSR dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan kegiatan CSR yang disampaikan kepada induk perusahaan dan Direksi Perusahaan. Selain itu monitoring pelaksanaan CSR dilakukan setiap tiga bulan sampai enam bulan untuk memantau efektifitas pelaksanaan di lapangan.

Anggaran Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan

Hingga akhir Desember 2020, Penyaluran dana program tanggung jawab sosial kemasyarakatan PTK dengan total biaya Rp149.006.500,- Berikut adalah rincian kegiatan dan anggaran biaya tanggung jawab sosial kemasyarakatan PTK:

Biaya CSR Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2020

CSR Budget in the Social Community Aspect in 2020

PROGRAM/ KEGIATAN Program/Activities		TRIWULAN Quarter	REALISASI DANA CSR (RP) Realization of CSR Funds (Rp)
Bantuan Panti Asuhan/ Penyandang Cacat	Assistance for Orphanages/ Persons with Disabilities	II	73.506.500,-
Bantuan Anak Yatim HUT PTK	Aid for Orphans of PTK Anniversary	III	35.500.000,-
Qurban	Qurban	III	40.000.000,-
Total	Total		149.006.500,-

Dampak Kualitatif Kegiatan

Terciptakan hubungan yang baik antara masyarakat yang berada di lingkungan bisnis Perusahaan dengan Pertamina Trans Kontinental, serta citra yang positif bahwa Perseroan memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Evaluation of Social Related Regulations

Evaluation of company policies in the field of CSR is carried out in the form of compiling a CSR activity report which is submitted to the parent company and the Company's Directors. In addition, the monitoring of CSR implementation is carried out every three months to six months to monitor the effectiveness of implementation in the field

Community Social Responsibility Activity Budget

As end of December 2020, PTK social responsibility program budget disbursement achieved total cost of Rp149,006,500. Details activities and PTK social responsibility budget realization are as follows:

Qualitative Impacts of Activities

A harmonious relationship is created among people in the Company's business environment and Pertamina Trans Kontinental, as well as a positive reputation that the Company has a care and concern to interests of the society and the environment.

Tanggung Jawab Sosial Terkait K3

Social Responsibility Related To HSSE



Pertamina Trans Kontinental berkomitmen untuk memprioritaskan prinsip-prinsip Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam setiap kegiatan usahanya sebagai bentuk perlindungan terhadap Pekerja dan Aset Perusahaannya.

Pertamina Trans Kontinental is committed to prioritize of manpower, occupational health and safety in each of its business activities as a form of protection for its employees and company assets.

Komitmen

Perusahaan berupaya untuk dapat memenuhi hak-hak para pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar bagi Perusahaan dalam menjalankan hubungan industrial dengan tenaga kerja. Perusahaan berupaya untuk menjadi perusahaan yang taat asas dan taat aturan termasuk di bidang ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perusahaan berupaya untuk mematuhi semua peraturan

Commitment

The Company strives to fulfill rights of employees as regulated in Law No. 13 of 2003 on Employment. The law is also the basis for the Company in implementing industrial relations with workers. The Company strives to be a company with legal and law compliance, including in employment, occupational health and safety. The Company strives to comply with all prevailing laws and regulations. The Company pays high attention and commitment in terms of gender equality and job opportunities, job training to

perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme pekerja, sistem imbal jasa yang sepadan hingga kesehatan serta keselamatan kerja bagi seluruh pekerja.

Kesehatan dan keselamatan bukan hanya diprioritaskan ke dalam Perusahaan, namun juga diperluas ke semua mitra, kontraktor, dan vendor bisnis pihak ketiga. Untuk memastikan bahwa peraturan, kebijakan, dan prosedur keselamatan telah diterapkan dengan benar dan konsisten, Perusahaan terus melibatkan setiap divisi, unit kerja, dan pihak ketiga melalui serangkaian pelatihan keselamatan, lokakarya, serta pesan-pesan komunikasi lainnya. Perusahaan mendukung inisiatif-inisiatif edukatif dengan menanamkan rasa disiplin yang kuat serta memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan keselamatan akan mendapatkan sanksi yang tegas. Standar dan persyaratan keselamatan adalah bagian dari perjanjian kontrak antara Perusahaan dan pihak ketiga. Perusahaan memiliki tujuan agar standar ini sepenuhnya dipenuhi saat melakukan semua kegiatan bisnis. Pelanggaran terhadap standar yang telah disepakati akan mendapatkan konsekuensi hukum.

Kebijakan dan Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan K3

Aspek Keselamatan Kerja merupakan salah satu hal yang jadi perhatian manajemen Perusahaan. PTK berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang selamat, aman dan nyaman untuk mendukung terciptanya kinerja Perusahaan yang optimal. Kebijakan terkait keselamatan dan kesehatan kerja PTK tercantum dalam Keputusan Direksi tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

develop employee professionalism, as well equivalent remuneration system up to occupational health and safety for all employees.

Health and safety are not only prioritized internally within the Company but also extended to all partners, contractors and third-party business vendors. To ensure that the safety regulations, policies and procedures have been implemented correctly and consistently, the Company continues to involve every division, work unit and third parties through a series of safety trainings, workshops and other communication messages. The company supports educational initiatives by instilling a strong sense of discipline and ensuring that any violation of safety regulations will be subject to strict sanctions. Safety standards and requirements are part of the contractual agreement between the Company and third parties. It is the aim of the company that these standards are fully met when conducting all business activities. Violation of the agreed standards will have legal consequences.

Corporate Social Responsibility in HSE Policy and Commitment

The aspect of work safety is one of the things that concern the management of the Company. PTK strives to create a safe, secure and comfortable work environment to support optimal Company performance. Policies related to PTK occupational safety and health are listed in the Board of Directors' Decree regarding Occupational Safety and Health (K3) Policy.



Kebijakan lainnya , yaitu:

- Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan SMK3

Due Diligence Terkait Permasalahan Ketenagakerjaan

Topik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) penting disajikan dalam laporan ini mengingat kegiatan operasional Perusahaan memiliki potensi risiko K3 dan dapat mempengaruhi keberlanjutan operasi. Perusahaan menjalankan pengelolaan K3 dalam rangka pencapaian *zero accident* dan *zero fatality* menuju *World Class Safety Culture*. Pengelolaan K3 mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan SMK3. Perusahaan juga bekerja sama dengan pihak eksternal menyelenggarakan pelatihan teknis yaitu ISO14001, OHSAS 18001 dan SMK3.

Other policies are including as follows:

- Law No. 01 of 1970 on Occupational Safety
- Law No.13 of 2013 on Manpower.
- Law No.2 of 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes.
- Government Regulation Number 50 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of SMK3

Due Diligence Related to Labor Issues

The Occupational Safety and Health (HSE) topic is important to be presented in this report considering that the Company's operational activities have potential HSE risks and may affect operational sustainability. The Company implements the HSE management in order to achieve zero accidents and zero fatality towards a *World Class Safety Culture*. K3 management refers to PP Number 50 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of SMK3. The company also works with external parties to organize technical training, including ISO14001, OHSAS 18001 and SMK3

Komitmen Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara aman dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) yang dituangkan dalam Kebijakan Perusahaan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan.

Target, Realisasi dan Dampak Kegiatan CSR Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Rencana kegiatan pelaksanaan CSR yang terkait dengan ketenagakerjaan telah tertuang di dalam RKAP PTK yang telah diturunkan dalam Program Kerja SDM yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan SDM dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, penetapan remunerasi sampai dengan *retirement* pekerja. PTK menargetkan untuk dapat melaksanakan praktik-praktik ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang maupun regulasi yang berlaku.

Sedangkan terkait dengan pengelolaan kesehatan pekerja adalah berupa jaminan pemeliharaan kesehatan serta keikutsertaan pekerja pada program BPJS Kesehatan. Dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai, diharapkan produktivitas pekerja akan terus terjaga dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

PTK juga memiliki komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko K3 dalam kegiatan Perusahaan dikendalikan dengan tujuan untuk mencegah dan melindungi setiap orang, aset Perusahaan dan lingkungan sekitar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. PTK merencanakan untuk melakukan pembinaan, penerapan, dan pemeliharaan K3 di lingkungan Perseroan secara berkesinambungan.

The Company's commitment to carrying out its operational activities safely by applying high standards to the Health and Safety and Environmental (K3LH) aspects as outlined in a written Company Policy signed by the President Director.

Targets, Realizations and Impacts of CSR Activities on Employment, Health and Safety (HSE)

CSR implementation activity plan related to employment has been disclosed in PTK RKAP which has been descended in HR Work Program related to the implementation of HR management starting from recruitment process, competency development, determining remuneration to employee retirement. PTK has set targets to carry out labor practices in accordance with prevailing laws and regulations.

Meanwhile, related to employee health management, is provided in form of health care insurance and employee participation in BPJS Kesehatan program. Adequate health facilities provision is expected to continuously maintain employee productivity.

PTK is also committed to occupational safety and health by ensuring that the potential hazards and risks to K3 in the Company's activities are controlled with the aim of preventing and protecting every person, company assets and the surrounding environment from the possibility of occupational accidents and occupational diseases. PTK plans to carry out HSE guidance, implementation and maintenance within the Company on an ongoing basis.

- Memberikan prioritas pertama untuk aspek HSSE;
- Mengidentifikasi potensi bahaya dan mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden;
- Menekankan kepada seluruh pekerja untuk mematuhi semua peraturan perundangan dan ketentuan HSSE;
- Meningkatkan secara berkelanjutan sistem pengelolaan HSSE;
- Mensyaratkan kontraktor untuk menerapkan CSMS dalam menjalankan kegiatan dilingkungan perusahaan;
- Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja agar melakukan pekerjaannya dengan benar dan aman;
- Membina hubungan baik, penuh pengertian antara kegiatan operasional perusahaan dengan masyarakat sekitarnya;
- Mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan melalui upaya pembinaan dan pengintegrasian aspek K3LL dalam bisnis.

Dalam menjalankan bisnisnya PTK mengedepankan aspek HSSE sebagai salah satu persyaratan utama dalam mengikuti tender, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat suatu pekerjaan serta meminimalisasi kerugian yang timbul akibat dari terjadinya kecelakaan pada manusia, aset dan lingkungan.

Lingkup Pengaruh Perusahaan Dalam Bidang Ketenagakerjaan

Kehadiran Pertamina Trans Kontinental telah memberikan pengaruh dan dampak positif di bidang ketenagakerjaan dengan turut serta memberikan kesempatan bagi masyarakat seluas-luasnya untuk bekerja sesuai kapasitas dan persyaratan yang kerja yang berlaku. Sepanjang sejarahnya, perusahaan ini telah ikut memberikan kesempatan bagi masyarakat

- Give first priority to HSSE aspects;
- Identify potential hazards and reduce risks as low as possible to prevent incidents from occurring;
- Emphasize all employees to comply with all HSSE laws and regulations;
- Continuously improve HSSE management system;
- Require contractors to apply CSMS in carrying out activities within the Company;
- Increase awareness and competence of workers to do their jobs properly and safely;
- Fostering good, understanding relationships between the company's operational activities and the surrounding community;
- Preventing and overcoming accidents, occupational diseases and environmental pollution through efforts to develop and integrate K3LL aspects into business

In running its business, PTK prioritizes the HSSE aspect as one of the main requirements in participating in tenders, preventing work accidents, environmental pollution and occupational diseases and minimizing losses arising from accidents to humans, assets and the environment.

Scope of Company Influence in the Employment Sector

Existence of Pertamina Trans Kontinental has contributed a positive influence and impact in the employment sector by participating in providing opportunities for the widest possible community to work in accordance with the capacities and working conditions that apply. Throughout its history, this company has provided opportunities for people to

untuk ikut menikmati manfaat ekonomi melalui remunerasi yang mereka terima sebagai pekerja. Saat ini Pertamina Trans Kontinental mempekerjakan pekerja sebanyak 898 orang.

enjoy economic benefits through the remuneration they receive as employees. Currently Pertamina Trans Kontinental is supported by 898 workers.

Mekanisme Penanganan Konflik Terkait Ketenagakerjaan

Pada tahun 2020 tidak terjadi konflik ketenagakerjaan atau masalah hubungan industrial. Namun demikian, kami memiliki mekanisme penanganan dan mitigasi apabila terjadi konflik. Kepentingan pekerja dalam hubungan industrial terwakili oleh organisasi Serikat Pekerja PTK. Melalui organisasi ini, maka semua permasalahan ketenagakerjaan dimusyawarkan dengan mengacu kepada Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB).

Industrial Dispute Settlement Mechanism

In 2020, there was no labor conflicts or industrial relations problems. However, we conflict handling and mitigation mechanism for any case of conflict. The interests of workers in industrial relations are represented by the PTK Workers Union organization. Through this organization, all labor issues are discussed with reference to the Collective Labor Agreement (CLA).

Penghargaan di Bidang Ketenagakerjaan

Program Penghargaan merupakan pengakuan dan ungkapan terima kasih kepada pekerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atas pengabdian dan prestasi yang telah dicapai. Perusahaan memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) dengan beberapa jenjang waktu pengabdian sebagai berikut:

Awards in Employment Sector

The Award Program is an acknowledgment and an expression of gratitude to employees in accordance with established criteria for their dedication and achievements. The company provides a Service Anniversary (UTD) award with several levels of service as follows:

Program Penghargaan Pekerja tahun 2020

Awards in Employment Sector in 2020

MASA KERJA Term of service	PENGHARGAAN YANG DITERIMA Awards Received		JUMLAH PEKERJA PENERIMA PENGHARGAAN LENCANA/ PENITI Number of Workers Recipient of Badges / Pins
	BADGE/PIN (emas murni/ pure gold)	UANG PENGHARGAAN Award Money	
10 Tahun/ years	2,5 gram	0,5 x Basic Salary	15 Pekerja/ Employee
15 Tahun/ years	5,0 gram	1,0 x Basic Salary	22 Pekerja/ Employee
20 Tahun/ years	7,5 gram	1,5 x Basic Salary	26 Pekerja/ Employee
25 Tahun/ years	10,0 gram	2,0 x Basic Salary	2 Pekerja/ Employee
30 tahun/ years	12,5 gram	2,5 x Basic Salary	5 Pekerja/ Employee
35 Tahun/ years	15,0 gram	3,0 x Basic Salary	-

Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan

PTK berkomitmen senantiasa memperhatikan kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja sebagai aset yang paling berharga. Komitmen tersebut diwujudkan dalam penerapan sistem manajemen terpadu dan praktik Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan (*Health, Safety, Security, Environment/HSSE*) secara konsisten. Tahun 2020, Perusahaan mempertahankan *zero fatality* dengan jumlah jam kerja yang terus meningkat.

Kebijakan

PTK menjiwai dan melaksanakan secara sungguh-sungguh nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) untuk setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan strategis Perusahaan, kami berkomitmen untuk mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja, Pengamanan, dan Lindungan Lingkungan yang meliputi:

1. Mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku di semua wilayah dimana Perusahaan beroperasi;
2. Mengidentifikasi semua potensi bahaya dan kerugian serta mengkaji risiko untuk menetapkan prioritas dan menyusun langkah pencegahan dan mitigasi yang diperlukan;
3. Menetapkan tujuan, target dan program kerja untuk mencapai kinerja unggul dalam menghasilkan produk dan jasa, mencegah cedera dan sakit akibat kerja, memproteksi keamanan personil dan aset, mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisiensi, keandalan dan keutuhan aset;

Occupational Health, Safety, Security And Environment

PTK is committed to always concern health, safety and security of workers as the our most valuable assets. This commitment is manifested in the implementation of an integrated Occupational health, safety, security and (HSSE) program consistently. In 2020, the Company maintains zero fatality with the number of working hours that continues to increase.

Policy

PTK has whole-heartedly implemented the AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) excellent values for every taken decision and action. To achieve objectives of the Company's vision and mission objectives, we are committed to develop, implement, evaluate and drive continuous improvements on Quality Management, Occupational Health & Safety, Security and Environmental Protection System continuously which includes:

1. Comply with all prevailing laws and regulations in all areas in the Company's operational area;
2. Identify all potential hazards and losses as well as assessing risks to set priorities and develop necessary prevention and mitigation measures;
3. Set goals, targets and work programs to achieve superior performance in producing products and services, prevent work injuries and illness, protect the security of personnel and assets, prevent environmental pollution and improve the efficiency, reliability and integrity of assets;

4. Membangun dan memelihara sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk menjalankan program kerja yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan target;
5. Mengkaji dan menerapkan pilihan teknologi terkini sebagai penunjang pelaksanaan proses bisnis Perusahaan;
6. Mengembangkan dan memelihara sistem tata kerja yang terstandarisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar dan kode internasional serta praktik-praktik industri terbaik yang telah diakui dan relevan;
7. Mengembangkan dan memelihara rencana dan prosedur tanggap darurat, manajemen krisis dan pemulihan keberlangsungan bisnis yang diuji secara berkala untuk menjamin kesiapsiagaan dan efektivitasnya melalui program pelatihan dan latihan dengan skenario yang kredibel untuk meminimalkan potensi kerugian yang ditimbulkan;
8. Memastikan semua insiden dan ketidaksesuaian dilaporkan, diinvestigasi, dianalisis, dan dilakukan tindakan perbaikan untuk ditindaklanjuti secara efektif serta dikomunikasikan sebagai pembelajaran;
9. Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem manajemen Perusahaan melalui proses audit yang terstruktur, independen dan kredibel sebagai bahan pertimbangan dalam tinjauan ulang manajemen untuk perbaikan yang berkesinambungan.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Kebijakan QHSSE di atas, dalam menjalankan bisnisnya PTK mengedepankan aspek HSSE sebagai salah satu persyaratan utama dalam setiap fase pelaksanaan pekerjaan guna mencegah terjadinya insiden serta meminimalisasi kerugian yang timbul terhadap manusia, lingkungan dan aset serta reputasi Perusahaan.

4. Build and maintain competent human resources and have a high concern to carry out the work program that is set to achieve goals & targets;
5. Review and implement the latest means of technology to support the implementation of the Company's business processes;
6. Develop and maintain a standardized work system that refers to the prevailing laws and regulations, international standards and codes as well as industry practices that are recognized and relevant;
7. Develop and maintain plans and procedures for emergency response, crisis management & business continuity recovery that are periodically tested to ensure their preparedness and effectiveness through training and training programs with credible scenarios to minimize potential losses incurred;
8. Ensure that all incidents and non-conformities are reported, investigated, analyzed and corrective actions taken to be followed up effectively and communicated as learning;
9. Evaluate the effectiveness of the implementation of the Company's management system through a structured, independent and credible audit process for consideration in management reviews for continuous improvement.

In accordance with the Vision, Mission and QHSSE Policy above, in conducting its business, PTK prioritizes the HSSE aspect as one of the main requirements in each phase of work implementation to prevent incidents and minimize losses arising from people, the environment and assets and the Company's reputation.

Strategi HSSE

Sesuai dengan Visi, Misi, Tata Nilai dan Kebijakan QHSSE yang dimiliki, PTK melakukan pengelolaan QHSSE dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencegah semua potensi insiden dan melakukan mitigasi terhadap dampak dari insiden tersebut. Adapun strategi yang dibangun dan dikembangkan serta dilaksanakan adalah sebagaimana berikut ini:

- Mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen terpadu QHSSE yang kuat, ringkas, komprehensif dan efektif dengan turunan program dan sistem tata kelola (STK) sebagai pedoman dalam pelaksanaan di lapangan;
- Mengembangkan sistem digitalisasi (aplikasi komputer) untuk pengelolaan data HSSE untuk mendukung dalam pengambilan keputusan-keputusan penting Perusahaan dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen terpadu QHSSE;
- Membangun budaya kerja HSSE yang terbuka dengan memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap keterlibatan aktif setiap insan PTK dalam upaya-upaya pencegahan dan pelaporan insiden di tempat kerja;
- Membangun kepemimpinan dalam QHSSE yang kuat dengan komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen terpadu dan program QHSSE dengan peran aktif setiap Pimpinan menjadi teladan (*role model*) dalam penerapan aspek HSSE di tempat kerja.

Empat strategi tersebut menjadi landasan utama setiap insan PTK dalam bertindak untuk mencapai nihil insiden dan kinerja unggul dalam bidang QHSSE.

Kegiatan dan Capaiannya

Dalam kegiatan operasionalnya, PTK memegang prinsip kehati-hatian dan pentingnya keselamatan serta kesehatan pekerja. Pada tahun 2020, PTK melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi pekerja di bidang HSSE. Berikut adalah realisasi pelatihan HSSE dalam kurun waktu 3 tahun:

HSSE Strategy

In accordance with its Vision, Mission, Values and QHSSE Policies, PTK has implemented QHSSE management with a risk management approach to prevent all potential incidents and mitigate the impact of such incidents. The strategies developed and developed and implemented are as follows:

- Developing and implementing a strong, concise, comprehensive and effective QHSSE integrated management system with derivative programs and governance systems (STK) as a guide for implementation in the field;
- Develop a digitization system (computer application) for HSSE data management to support the decision making of important Company decisions and increase the effectiveness of the implementation of the QHSSE integrated management system;
- Build a transparent HSSE work culture by giving appreciation and appreciation for the active involvement of every CAR person in efforts to prevent and report incidents in the workplace;
- Build strong QHSSE leadership with a high commitment to support the implementation of an integrated management system and the QHSSE program with the active role of each leader being a role model in the HSSE implementation at the workplace.

The four strategies have become main foundation for every PTK's employee in behaving to achieve zero incidents and superior performance in the QHSSE aspect.

Activities and Achievements

In its operations, PTK upholds the prudent principle and the priority of employee safety and health. In 2020, PTK has implemented a training program and employee competency development in the HSSE field. The HSSE training realization in 3 years is as follows:

Kinerja HSE

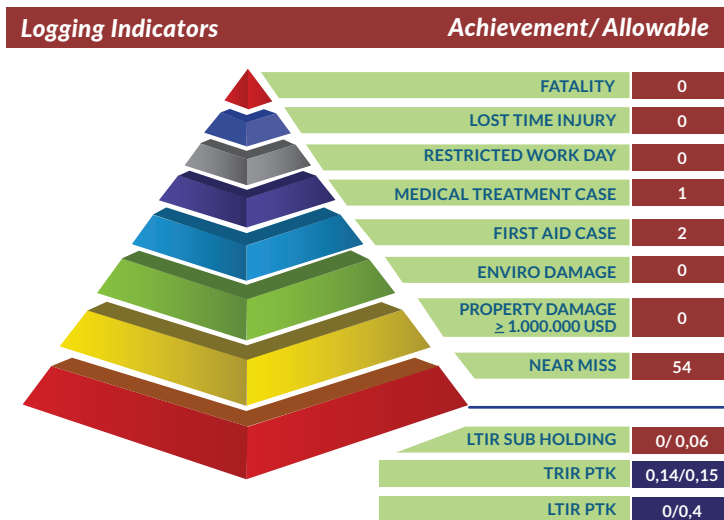
HSE Performance

KETERANGAN Description	2018	2019	2020
<i>Fatalites</i>	0	0	0
<i>Lost Time Incident</i>	2	0	0
<i>Restricted Work Days Cases</i>	0	0	0
<i>Medical Treatment Cases</i>	0	1	1
<i>Environmental Damage > 15 barrel</i>	-	-	0
<i>First Aid Cases</i>	0	0	2
<i>Property Damage</i>	-	-	0
<i>Near Misses/ HIPO</i>	19	59	54
<i>Unsafe Act & Condition</i>	193	560	1298
<i>Man Hours</i>	5.905.976	6.271.064	7.027.120
<i>LTIR</i>	0,338	0	0

Kinerja HSE PTK selama 3 (tiga) tahun terakhir masih terdapat catatan dalam kinerja tahun 2020 dimana ditemukan 1 (satu) kasus Medical Treatment Cases pada pekerja Anak Perusahaan yaitu PKJ, 2 (dua) kasus *First Aid* pada anggota *Mooring gang* STS Fame Balikpapan dan Bosun di Transko Aquila

HSE PTK performance for the last 3 (three) years, there are still records in 2020 performance where 1 (one) case of Medical Treatment Cases in child workers Companies namely PKJ, 2 (two) First Aid cases on members of the Mooring gang STS Fame Balikpapan and Bosun at Transko Aquila.

Safety Performance



Safety Performance

Logging Indicators	Ach/ Target
MWT DIREKSI	16/10
FOLLOW UP HSSE ASSESSMENT RECOMMENDATION	100%/100%
UNSAFE ACT & UNSAFE CONDITION	1298/-
PELATIHAN IMT & CMT	1/1
LATIHAN IMT & CMT	1/1
PSA RATING	100%/100%

■ Target Pertamina
■ Target PTK

Untuk meningkatkan kinerja menyeluruh HSE, untuk tahun 2020 PTK telah melaksanakan program sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi dan awarness serta kemampuan organisasi dalam bidang HSE melalui pelatihan QHSSE untuk semua insan PTK mulai level Direksi hingga Asisten. Pelatihan ini akan mencakup visi, misi dan kebijakan QHSSE, sistem manajemen QHSSE, perangkat bantu untuk implementasi sistem manajemen QHSSE, tugas dan tanggung jawab serta tata kerja aman. Untuk peningkatan siapan dan kemampuan dalam melakukan penanggulangan insiden dan krisis, PTK telah memiliki pusat manajemen krisis dan komando insiden, dan melakukan pelatihan (*training*) serta latihan (*exercise/ drill*) untuk Tim Manajemen Krisis dan Tim Manajemen Insiden termasuk Tim Taktis Penanggulangan Keadaan Darurat;
- Peningkatan tata kelola organisasi untuk memudahkan komunikasi dan peran serta aktif setiap elemen di PTK dengan melakukan

To improve overall HSE performance, in 2020 PTK has implemented the following programs:

- Competency development and raise awareness as well as organizational capabilities in HSE field through QHSSE training for all PTK personnel from the level of Directors to Assistant. This training will cover QHSSE vision, mission and policies, QHSSE management systems, tools for implementing QHSSE management systems, duties and responsibilities Including safe work procedures. To increase preparedness and capability in responding to incidents and crises, PTK will also build a crisis management center and incident command, and conduct training and exercises for the Crisis Management Team and Incident Management Team including the Emergency Response Tactical Team;
- Improved organizational governance to facilitate communication and active participation of every element in the PTK by revitalizing the

refitalisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Safety Committee*) untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kapal;

- Peningkatan proses bisnis dan budaya QHSSE melalui program, *Positive Reinforcement & Just Culture*; Human Performance Improvement, Lean Sigma, Housekeeping (5S/5R) & Kaizen, serta program penghargaan dan apresiasi (Recognition & Award).

Berbagai program kerja QHSSE tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem manajemen terpadu QHSSE yang telah dikembangkan oleh PTK dan sejalan dengan standar nasional dan internasional yang berlaku antara lain SMK3, ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ISM Code dan ISPS Code serta standar internasional lainnya.

Melalui penerapan berbagai program QHSSE, PTK dapat memaksimalkan upaya-upaya pencegahan kecelakaan dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan sehingga tercipta lingkungan kerja yang nihil cedera dan insiden.

Program Kesehatan dan Sarana Keselamatan

Selama tahun 2020, PTK melakukan berbagai kegiatan guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kondusif, serta menjamin efektivitas penerapan keselamatan kerja. Program terkait kesehatan dan sarana keselamatan kerja PTK antara lain:

- Klinik Kesehatan di lokasi PTK *Shore Base* Tanjung Batu (PSTB)
- MCU berkala bagi setiap pekerja
- Pelatihan P3K sesuai standar Kemenakertrans
- Kampanye HSE

Occupational Safety and Health Committee (P2K3), the Occupational Safety and Health Committee (*Safety Committee*) for the Head Office, Branch Offices and Ships;

- Improvement of business processes and QHSSE culture through the program, *Positive Reinforcement & Just Culture*; Human Performance Improvement, Lean Sigma, Housekeeping (5S/5R) & Kaizen, as well as awards and appreciation programs (Recognition & Award).

Various QHSSE work programs become the implementation of QHSSE integrated management system that has been developed by PTK and is in line with applicable national and international standards, including SMK3, ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environmental Management System, ISO 45001 Safety and Health Management System. Work, ISM Code and ISPS Code as well as other international standards.

Through the implementation of various QHSSE programs, PTK is succeed in optimizing accident prevention efforts and minimize the impact so that a work environment is zero injuries and incidents.

Health Program and Safety Equipment

Throughout 2020, PTK has conducted several activities to create a healthy, conducive working environment as well as ensure effectiveness of the occupational safety implementation. The program related to occupational health and safety in PTK are as follows:

- Health Clinic in PTK *Shore Base* Tanjung Batu (PSTB) location.
- Regular MCU for every worker.
- First Aid training based on the Ministry of Manpower and Transmigration Standard
- HSE Campaign.

Anggaran Biaya Program HSSE

PTK menetapkan anggaran terkait pelaksanaan program HSSE sebesar Rp3.706.704.000,- dengan rincian sebagai berikut:

HSSE Program Budget

PTK has stipulated the budget related HSSE program with a total budget of Rp3.706.704.000,-The a breakdown of budget is as follows:

Anggaran Biaya Program HSSE tahun 2020 HSSE Program Budget in 2020

KEGIATAN Activities		BIAYA (RP) Cost (Rp)
Vetting perpanjangan PSA	Vetting PSA extension	1.229.500.000
Perpanjangan / Pembaharuan Sertifikat SMC - ISM Code	Extension/Renewal of SMC Certificates - ISM Code	468.000.000
Intermediate / Renewal Sertifikat ISSC - ISPS Code	Intermediate/Renewal ISSC Certificate Verification - ISPS Code	126.000.000
ISM Code Perusahaan (DOC)	ISM Company Code (DOC)	32.500.000
Pelaksanaan Bulan K3	Implementation of K3 Month	95.000.000
Pengelolaan P3K	First aid management	10.000.000
Pelaksanaan Keslingker	Implementation of Keslingker	80.000.000
Sertifikasi SMT	SMT Certification	200.000.000
Penanggulangan Keadaan Darurat	Emergency Response	120.000.000
Pelatihan Tim Tanggap Darurat	Emergency Response Team Training	100.000.000
CSMS	CSMS	60.000.000
Inhouse Training	Inhouse Training	8.420.000
Pelatihan anggota sekuriti	Security member training	40.050.000
Pengadaan Alat Pendukung Sekuriti	Procurement of Security Support Tools	4.070.000
Operasional Sekuriti	Operational Security	13.200.000
Perjalanan Dinas	Official travel	1.120.000.000
		3.706.740.000

Sertifikasi HSSE

Selama periode tahun 2020, perusahaan meraih sertifikat sistem manajemen keselamatan baik di untuk di kantor maupun di kapal yaitu:

1. Certificate Pertamina Safety Gas Patra 2 tanggal 12 april 2020

HSSE Certification

Throughout the 2020 period, the Company obtained a safety management system certificate both in the office and on board, as follows:

1. Pertamina Gas Safety Patra Certificate 2 April 12, 2020

2. Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bulan November 2020 3. Sertifikat Demo Room tanggal 21 September 2020 4. Certificate ISO 9001:2015 tanggal 04.12.2019 sd 18.12.2022 5. Certificate ISO 14001:2015 tanggal 20.11.2017 sd 06.11.2020 6. Certificate ISO 45001:2018 tanggal 03.11.2019 sd 12.11.2020	2. Ratification of the Establishment of the Occupational Safety and Health Committee (P2K3) in November 2020 3. Demo Room Certificate dated 21 September 2020 4. ISO 9001: 2015 Certificate dated 04.12.2019 to 18.12.2022 5. ISO 14001: 2015 Certificate dated 20.11.2017 to 06.11.2020 6. ISO 45001: 2018 Certificate dated 03.11.2019 to 12.11.2020

Penghargaan Dalam Pengelolaan HSSE

HSSE Management Award

PENGHARGAAN Award		TAHUN Year
Penghargaan dari PT Pertamina Trans Kontinental terhadap Crew Kapal TB Patra Tunda 3152 atas penyelamatan nelayan jatuh di laut dari kapal Bintang Muda 1	Award from PT. Pertamina Trans Kontinental for TB Patra Tunda 3152 crew for rescuing fishermen who fell to the ocean from the Bintang Muda 1 vessel	25 Oktober 2020
Penghargaan dari LANAL Lhokseumawe terhadap crew kapal Transko Rajawali atas upaya Penyelamatan KRI Surik 645 di Perairan Tanjung Jambo Aye	Award from LANAL Lhokseumawe for the crew of the Transko Rajawali ship for the efforts to save KRI Surik 645 in Tanjung Jambo Aye waters	23 Oktober 2020
Penghargaan dari LANAL Lhokseumawe terhadap Nakhoda Transko Cempala atas partisipasi membantu Lanal Lhokseumawe dalam pelaksanaan evakuasi kapal akibat cuaca buruk	Award from LANAL Lhokseumawe to Transko Cempala Master for participating in helping Lanal Lhokseumawe in carrying out ship evacuation due to bad weather	2020

Dampak Kuantitatif Terkait Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PTK berkomitmen senantiasa memperhatikan kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja sebagai aset yang paling berharga. Komitmen tersebut diwujudkan dalam penerapan praktek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan (*Health, Safety, Security, Environment*) secara konsisten.

Quantitative Impact Related to Occupational Health and Safety Practice

PTK is committed always concern the health, safety and security of workers as the most valuable assets. This commitment is manifested in the consistent application of Occupational Health, Safety and Environmental practices.

Program kesehatan dan keselamatan kerja yang dijalankan secara konsisten telah memberikan dampak positif yaitu kondusifitas dan kelangsungan operasi perusahaan yang terjaga dengan baik. Hingga akhir tahun 2020, tidak terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja Pertamina Trans Kontinental. Hal tersebut sebagai bukti komitmen perusahaan yang berupaya melakukan tindak preventif melalui berbagai kegiatan seperti edukasi, hingga kelengkapan atribut dan alat baik yang digunakan maupun yang ada di lingkungan kerja para pekerja.

Dampak Kualitatif Terhadap Turnover Pekerja

Tingkat Turnover Pekerja

Turnover adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pengelolaan SDM dan petunjuk kestabilan pekerja. Sepanjang tahun 2020 terkait dengan tingkat perputaran pekerja (*turnover*), secara keseluruhan terdapat 5 pekerja *turnover* atau sekitar 0,56% dari keseluruhan jumlah pekerja PTK, dimana angka ini masih berada di bawah rata-rata *turnover rate* industri.

Jumlah Turnover Pekerja

Employee Turnover Rate

KETERANGAN Description		2018	2019	2020
Jumlah Pekerja	Total Employee	673	668	898
Pekerja Mengundurkan Diri	Employee Resigns	3	3	5
Turnover Pekerja (%)	Employee Turnover (%)	0,45%	0,45%	0,56%

Biaya yang Dikeluarkan

Perusahaan secara berkesinambungan melakukan praktik ketenagakerjaan layak untuk terus menjaga pekerja sebagai aset utama. Dalam upaya untuk melaksanakan praktik ketenagakerjaan ini sepanjang tahun 2020, total biaya untuk meningkatkan kompetensi pekerja yang telah dikeluarkan Perusahaan sebesar Rp2.276.909.689.

Occupational health and safety programs that have been carried out consistently have had a positive impact, namely the conduciveness and continuity of company operations that are well maintained. Until the end of 2020, there were no work accidents at Pertamina Trans Kontinental employees. This is evidence of the company's commitment to preventive actions through various activities such as education, to the completeness of attributes and tools both used and those in the work environment of employees.

Qualitative Impact on Employee Turnover

Employee Turnover Rate

Turnover is a measure of the success of HR management and an indicator of employee stability. Throughout 2020 related to employee turnover rates, in total there were 5 employee turnover or around 0.56% of the total number of PTK employees, where this figure is still below the industry average turnover rate.

Budget Allocation

The Company continuously implements sufficient labor practices to retain employees as our main asset. As the effort to implement this labor practice throughout 2020, the total budget for of and benefits that have been allocated by the Company achieved Rp2.276.909.689.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan

Social Responsibility to Customers



Pelanggan memiliki arti yang sangat besar bagi PTK. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan tanggung jawab kepada pelanggan, PTK selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bersifat proaktif dalam menanggapi segala keluhan atau permasalahan pelanggan. PTK memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur untuk menjaga kepuasan pelanggan dan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan.

Customers have a very significant meaning for PTK. In performing the corporate social responsibility related to responsibility to the customers, PTK strives to deliver excellent service and being proactive in responding to every customer complaint or issue. PTK applies various policies and procedures to maintain customer satisfaction level and as manifestation of responsibility to customers.

Komitmen dan Kebijakan

Pemangku kepentingan yang terkait dengan pemenuhan tanggung jawab produk/jasa adalah pelanggan dan pemasok. Komitmen pada penerapan tanggung jawab produk/jasa kepada pelanggan, dilaksanakan dengan upaya untuk memberikan pelayanan terbaik, baik dalam segmen usaha perkapalan, pengelolaan pelabuhan dan jasa maritim, serta pengelolaan *shore base* dan industri maritim

Commitment And Policy

Stakeholders who are related to product/service responsibility fulfillment are customers and suppliers. Commitment to the implementation of product/service responsibilities to customers, carried out with efforts to provide the best service, both in the shipping business segment, port management and maritime services, as well as shore base management and maritime industry by ensuring the quality of

dengan menjamin kualitas jasa yang diberikan melalui pengelolaan manajemen mutu. Sementara komitmen pada penerapan tanggung jawab produk/ jasa kepada pemasok, dilaksanakan dengan penerapan proses tender/lelang yang terbuka dan pemenuhan kewajiban sesuai kontrak pemberian pekerjaan.

Secara berkala PTK melakukan survei kepuasan kepada pelanggan dan pemasok, untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan jasa yang diberikan Perusahaan. Selain itu PTK juga menyediakan saluran pengaduan yang bisa dimanfaatkan pelanggan maupun pemasok untuk menyampaikan keluhan terkait produk dan layanan jasa yang diberikan Perusahaan.

Rumusan dan Rencana Kegiatan

PTK berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, salah satunya dengan mewujudkan 4 pilar *Quality Management* (QM) Pertamina, yaitu QMA (*Quality Management Assessment*), SM (*System Management*), KOMET (*Knowledge Management*), dan CIP (*Continuous Improvement Program*).

Manajemen mutu yang diterapkan berpedoman pada Kebijakan Manajemen Mutu Perusahaan yang ditetapkan tanggal 13 April 2017 dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Pokok-pokok manajemen mutu Perusahaan antara lain:

- Memastikan peran manajemen puncak sebagai *role model* dalam setiap kegiatan yang berbasis perbaikan berkelanjutan;
- Melaksanakan penyelesaian masalah pekerjaan dan ide inovasi dengan metode *continuous improvement* program yang berorientasi pada *value creation*;
- Menerapkan sistem manajemen terintegrasi (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, dan ISM Code), yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis dan tuntutan *stakeholder*;
- Mengembangkan budaya berbagi pengetahuan

services provided through quality management. While the commitment to the implementation of product/service responsibilities to suppliers, is carried out through the adoption of an open tender process and fulfillment of obligations in accordance with the employment contract.

PTK regularly conducts customer and supplier satisfaction surveys, to determine the level of satisfaction with the products and services provided by the Company. In addition, PTK also provides complaints channels that can be used by customers and suppliers to submit complaints related to products and services provided by the Company.

Formulation and Activity Plan

PTK is committed to provide the best service to customers, one of which is by realizing the 4 pillars of Pertamina's *Quality Management* (QM), namely QMA (*Quality Management Assessment*), SM (*System Management*), KOMET (*Knowledge Management*), and CIP (*Continuous Improvement Program*).

The applied quality management is guided by the Company's *Quality Management Policy* which was established on April 13, 2017 and signed by the President Director. The Company's quality management principles include:

- Ensuring the role of top management as a role model in every activity based on continuous improvement;
- Carrying out work problem solving and innovation ideas with a continuous improvement program oriented to value creation;
- Implement an integrated management system (ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, and ISM Code), which is in accordance with business process needs and stakeholder demands;
- Developing a culture of sharing knowledge that is able to ensure outputs in the form of goods and

yang mampu memastikan hasil keluaran berupa barang dan jasa berbasis pada pengetahuan;

- Mengelola bisnis Perusahaan berbasis kinerja ekselen secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- Menciptakan dan memelihara kompetensi sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi persyaratan sistem manajemen mutu dan diakui secara internasional.

services based on knowledge;

- Manage the Company's business based on excellent and comprehensive performance in a sustainable manner;
- Create and maintain human resource competencies that meet the quality management system qualification requirements and are recognized internationally.

Kegiatan yang Dilaksanakan dan Capaiannya

- Di 2020 Untuk meningkatkan layanan keluhan pelanggan, diluncurkan Aplikasi Penanganan Keluhan Pelanggan "We Care", aplikasi berbasis web terintegrasi yang memudahkan penyampaian keluhan dan monitoring penanganan keluhan bagi pelanggan / petugas dengan mudah dapat diakses via HP dan pada WEB.
- Penandatanganan *Service Level Agreement* (SLA) antar fungsi terkait untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan dengan target maksimal 2 (dua) hari kerja.
- Saluran Penyampaian Keluhan :



TELEPON/ Telephone

+62 21 31923005



FAKSIMILI / Fax

+62 21 3106804



EMAIL / Email

ptkpusat@ptk-shipping.com



WEB / Web

<https://complain.ptk-shipping.com>

Activities Carried Out and Their Achievements

- In 2020, to improve customer complaint services, the "We Care" Customer Complaint Handling Application was launched, an integrated web-based application that makes it easy to submit complaints and monitor complaint handling for customers/officers, which can easily be accessed via cellphone and on the WEB.
- Signing Service Level Agreement (SLA) between related functions to follow up customer complaints with a maximum target of 2 (two) working days.
- Grievance Channel:

- Upaya perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja operasi dan layanan diluncurkan Perusahaan dengan melaksanakan *Program Strategic Initiative*:

- **Pembuatan Aplikasi Monitoring Kapal (Bunker, Speed, Pumping Rate)**

Background

Mempermudah proses monitoring, merecord dan mengevaluasi seluruh data operasional kapal-kapal PTK yang semakin banyak dan

- Continuous improvement efforts to improve operating and service performance were launched by the Company by implementing the Strategic Initiative Program, as follows:

- **Development Of Ship Monitoring Application (Bunker, Speed, Pumping Rate)**

Background

Simplify the process of monitoring, recording and evaluating all operational data for the PTK vessels, which are increasing in number

akan terus bertambah banyak. Guna mencegah klaim-klaim dari Pencharter mengenai *Over Bunker*, *Slow Speed*, *Slow Pumping Rate* dan *Cargo Losses*, serta menghindari indikasi *Fraud Bunker* dan *Cargo*.

Goals

- Menciptakan Budaya ANTI FRAUD dalam Perusahaan.
- Meminimalisir klaim yang dapat merugikan Perusahaan.
- Mewujudkan VISI & MISI Perusahaan.
- Memudahkan dalam mereview dan pengarsipan digital.

- **Optimalisasi Sistem Crew Change untuk memenuhi kebutuhan Crew di Fungsi Manning**

Background

Terus bertambahnya kapal-kapal milik PT Pertamina Trans Kontinental sangat berpengaruh terhadap permintaan jumlah crew yang terus meningkat, sehingga dibutuhkan kecepatan, ketepatan dalam proses *recruitmen* & *crew change* (penempatan crew) guna menunjang kegiatan operasional kapal.

Goals

- Efektifitas dalam pelaksanaan *recruitmen* & *Crew Change*
- Tidak menimbulkan diskriminasi/kecemburuan diantara crew kapal.

- **Pengoptimalan penggunaan aplikasi sertifikat handling terhadap monitoring permohonan sertifikat di portal PRIDE**

Background

- Jumlah kapal PTK yang semakin bertambah dan tersebar di seluruh Indonesia.
- Adanya wabah COVID-19 yang melanda Indonesia.
- Pemberlakuan *lock down* di daerah

and will continue to grow. In order to prevent claims from Charterers regarding *Over Bunker*, *Slow Speed*, *Slow Pumping Rate* and *Cargo Losses*, and to avoid indications of *Fraud Bunker* and *Cargo*.

Goals

- Creating ANTI FRAUD Culture in the Company.
- Minimizing claims that can harm the Company.
- Realizing the VISION & MISSION of the Company.
- Make it easy to review and digital archiving.

- **Optimization of Crew Change System to Fulfill the Crew's Requirement in Manning Function**

Background

The increasing number of ships owned by PT Pertamina Trans Kontinental greatly affects the demand for the number of crew that continues to increase thereby the speed, accuracy are required in the recruitment process & crew change (crew placement) to support ship operational activities.

Goals

- Effectiveness in the implementation of recruitment & Crew Change
- Does not cause discrimination/grudge among ship crews.

- **Optimize the use of certificate handling applications for monitoring certificate requests on PRIDE portal**

Background

- The number of PTK ships is increasing and scattered throughout Indonesia.
- The COVID-19 outbreak that hit Indonesia.
- Enforcement of Lock Down in Jakarta

Jakarta dan sekitarnya sehingga banyaknya lembaga yang menganjurkan pekerjaanya bekerja dari rumah.

Goals

- Memudahkan monitoring permohonan sertifikat
- Pengurusan sertifikat sesuai SOP Dirkapel.
- Menghindari Keterlambatan pengurusan Sertifikat.
- Memback-up / mengingatkan staf yang lain selama sistem *shift* bekerja dari rumah

● **Pembangunan dan Implementasi Vendor Management System**

Background

- Banyaknya pendaftar rekanan PTK dalam setiap setiap harinya
- Belum ada aplikasi yang dapat membantu proses sertifikasi rekanan, keseluruhan proses masih dijalankan secara manual.

Goals

- Mempercepat proses sertifikasi rekanan di PTK
- Mengurangi penggunaan kertas secara berlebih/ *paperless culture*
- Meningkatkan akurasi dan kelengkapan data calon rekanan PTK
- Memanfaatkan teknologi untuk menunjang kinerja fungsi/perusahaan.

● **Aplikasi Safety Online System (SOS)**

Background

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas aspek *Health Safety Security Environment* (HSSE).

Goals

- Menunjukkan kepatuhan dengan persyaratan peraturan yang berlaku
- Meningkatkan kepedulian pekerja terhadap aspek *safety*

and its surrounding areas institutions that encourage employees to work from home.

Goals

- Facilitate monitoring of certificate applications
- Certificate processing according to Dirkapel SOP.
- Avoid Delays in Certificate processing.
- Backing up/reminding other staff during the shift system working from home

● **Development and Implementation of a Vendor Management System**

Background

- The number of PTK partner registrants every day
- There is no application that can help the partner certification process, the whole process is still carried out manually

Goals

- Accelerate the partner certification process in PTK
- Reducing the use of paper excess/ *paperless culture*
- Improve the accuracy and completeness of PTK candidate partner data
- Utilizing technology to support the performance of functions/companies

● **Safety Online System (SOS) application**

Background

In order to improve the quality of the Health Safety Security Environment (HSSE) aspects.

Goals

- Demonstrate compliance with applicable regulatory requirements
- Increase employee awareness of safety aspects

- Meningkatkan reputasi dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan
- Meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dengan mengintegrasikan masalah lingkungan dalam strategi bisnis
- Meningkatkan *environmental performance*
- Mempercepat proses pelaporan *obit, incident, inspection*, dll

● **Pembuatan *Cradle* Khusus Guna Pencegahan *Property Lost* dan *Property Damage* pada Kapal – Kapal Ringan di Pelabuhan Terbuka**

Background

Pada saat ini PTK memiliki banyak kapal – kapal ringan seperti RIB, *Mooring Boat* dan *Small Craft* yang tidak memiliki tempat berlindung ketika berada di pelabuhan yang terbuka. Hal tersebut memunculkan risiko *property lost* dan *property damage* bagi PTK yang dibuktikan dengan adanya kejadian tenggelamnya kapal RIB 4 di Tanjung Manggis, Bali.

Goals

Mencegah risiko – risiko pada kapal - kapal ringan di pelabuhan terbuka, antara lain:
1. *Property lost*, 2. *Property damage*

● **Publikasi Berita Melalui Platform PTK Flash**

Background

- Perkembangan teknologi saat ini makin pesat, terutama pada era Digital 4.0 semua sudah mulai melakukan digitalisasi pada proses bisnis tiap usaha.
- Sejalan dengan arahan Dewan Komisaris dan juga komitmen Direksi untuk memaksimalkan teknologi IT dalam setiap bisnis dilingkungan PTK.
- Komitmen Direksi yang mencanangkan “Digitalisasi Proses Bisnis dan

- Increase reputation and trust among stakeholders
- Increase efficiency and reduce costs by integrating environmental concerns into business strategy
- Improve environmental performance
- Speed up the reporting process for *obit, incident, inspection*, etc.

● **Making a Special *Cradle* to Prevent *Property Lost* and *Property Damage* on Light Ships at Open Ports**

Background

At present PTK has many light vessels such as RIB, *Mooring Boat* and *Small Craft* which do not have shelter when in open ports. This raises the risk of *property lost* and *property damage* for PTK as evidenced by the sinking of the RIB 4 ship in Tanjung Manggis, Bali

Goals

Prevent risks on light ships in open ports, including: 1. *property lost* 2. *property damage*

● **News Publication via Flash PTK Platform**

Background

- The development of technology is currently increasing rapidly, especially in the Digital 4.0 era, all have started digitizing the business processes of each business.
- In line with the direction of the Board of Commissioners and also the commitment of the Board of Directors to maximize IT technology in every business within the PTK environment.
- The Board of Directors' commitment

Penguatan SDM”, pada tahun 2020 akan diterapkan di PTK guna mendukung usaha Perusahaan untuk meraih target yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham.

to initiate "Digitalization of Business Processes and Strengthening Human Resources", will be implemented in 2020 at PTK to support the Company's efforts to achieve the targets set by Shareholders.

Lingkup Pengaruh Perusahaan Terkait Isu Konsumen

Penanganan serta perhatian yang diberikan oleh Perseroan terkait isu-isu yang dibutuhkan oleh konsumen sejauh ini telah berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan hubungan bisnis. Hal ini disebabkan karena Pertamina Trans Kontinental mengedepankan kepuasan pelanggan.

Scope of Company's Impact Related To Consumer Issue

The process and concern of the Company to the several issues required by the customers so far have been implemented properly thereby not causing significant impact on business relation going concern. This is due to the Pertamina Trans Kontinental always prioritizes customer satisfaction.

Evaluasi Regulasi Terkait Konsumen

Sebagai Perusahaan pelayaran dan jasa maritime terkait kegiatan migas, *Health, Safety* dan *Environment* sangat diutamakan oleh Perusahaan, dimana Perusahaan comply dengan regulasi Pemerintah, *Class, International Maritim Organization*, termasuk comply dengan persyaratan yang ditetapkan oleh *Customer* untuk *speed, pumprate, bunker consumption* dan audit teknis.

Regulatory Evaluation Related To Customers

As a Company providing shipping and maritime services related to oil and gas activities, *Health, Safety* and *Environment* become a primary priority of the Company, where the Company complies with Government, *Class, International Maritime Organization* regulations, including compliance with the requirements stipulated by *Customer* in term of *speed, pumprate, bunker consumption* and technical audit.

Keselamatan menjadi hal mutlak bagi PTK dalam menjalankan segmen bisnis perkapalan. Perusahaan berkomitmen memenuhi aspek-aspek keselamatan dan mematuhi setiap regulasi yang mengatur keselamatan, baik keselamatan di kapal maupun selama melaksanakan pelayaran. Sesuai regulasi yang ditentukan pihak berwenang, PTK melengkapi setiap unit kapal dengan peralatan keselamatan standar.

Safety becomes a very essential for aspect for PTK in running the shipping business segment. The company is committed to fulfilling safety aspects and complying with every regulation governing safety, both safety on board and during shipping. In accordance with regulations determined by the authorities, PTK provides each vessel with standard safety equipment.

Dampak Kualitatif Terkait Tanggung Jawab Produk

PTK memperoleh berbagai penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional atas perbaikan berkelanjutan yang dilakukan.

Penghargaan

Penghargaan yang diterima Perusahaan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. PT Donggi-Senoro LNG on *National Occupational Health and Safety Month (K3) 2019 Without Lost Time Incident* (21 Januari 2020).
2. Work Case PT Donggi-Senoro LNG 28.356.348 *Man Hours without Days Away* (21 Januari 2020).
3. *In Appreciation of your ships calls contribution at Port of Banten on year 2019 The Best Shipping Agent* (22 Januari 2020).
4. 9th Anugerah BUMN 2020 kategori Transformasi Organisasi Anak Perusahaan BUMN (10 Juli 2020).
5. BUMN *Marketeers Award 2020* predikat *Bronze Winner The Most Promising Company in Strategic Marketing* kategori Anak Perusahaan (16 September 2020).
6. BUMN *Branding & Marketing Award 2020* untuk Anak Perusahaan BUMN kategori Trans Archipelago Branding (11 November 2020).
7. BUMN *Branding & Marketing Award 2020* untuk Anak Perusahaan BUMN *The Best CMO kategori Marketing Teamwork* (11 November 2020).
8. Annual Pertamina Quality Award (APQ) 2020 untuk PC Prove Angguk-angguk Mantul predikat Platinum (2 Juli 2020).
9. Annual Pertamina Quality Award (APQ) 2020 untuk PC Prove Pesut predikat Gold (2 Juli 2020).
10. Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 untuk PC Prove mendapat 4 Gold, 7 Silver dan 5 Bronze (17-19 November 2020).
11. Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 untuk FT Prove mendapat 1 Gold dan 1 Silver (17-19 November 2020).

Qualitative Impact Related To Product Responsibility

PTK has received various awards at both national and international levels for the continuous improvement activity done.

Appreciation

The awards received by the Company during 2020 are as follows:

1. PT Donggi-Senoro LNG on *National Occupational Health and Safety Month (K3) 2019 Without Lost Time Incident*. January 21, 2020
2. PT Donggi-Senoro LNG Work Case 28,356,348 *Man Hours without Days Away*. January 21, 2020
3. *In Appreciation of your ships calls contribution at Port of Banten on year 2019 The Best Shipping Agent*. January 22, 2020
4. 9th Anugerah SOEs 2020 for the category of SOE Subsidiary Organizational Transformation. July 10, 2020
5. BUMN *Marketeers Award 2020* named *Bronze Winner of The Most Promising Company in Strategic Marketing* for the category of Subsidiaries September 10, 2020
6. BUMN *Branding & Marketing Award 2020* for BUMN Subsidiaries in the Trans category Archipelago Branding. November 11, 2020
7. BUMN *Branding & Marketing Award 2020* for BUMN Subsidiaries *The Best CMO category Marketing Teamwork*. November 11, 2020
8. Annual Pertamina Quality Award (APQ) 2020 for PC Prove Nodding the title. Platinum. July 2, 2020
9. Annual Pertamina Quality Award (APQ) 2020 for PC Prove Pesut with Gold predicate. July 2, 2020
10. Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 for PC Prove gets 4 Gold, 7 Silver and 5 Bronze. 17-19 November 2020
11. Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020 for FT Prove got 1 Gold and 1 Silver. 17-19 November 2020

12. *Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020* untuk RT Prove mendapat 1 Gold dan 1 Silver (17-19 November 2020)
13. *Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020* untuk I Prove mendapat 1 Silver (17-19 November 2020).
14. Penghargaan dari LANAL Lhokseumawe terhadap crew kapal Transko Rajawali atas upaya Penyelamatan KRI Surik 645 di Perairan Tanjung Jambo Aye (23 Oktober 2020).
15. Penghargaan dari LANAL Lhokseumawe terhadap Nakhoda Transko Cempala atas partisipasi membantu Lanal Lhokseumawe dalam pelaksanaan evakuasi kapal akibat cuaca buruk (23 Oktober 2020).

12. *Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020* for RT Prove gets 1 Gold and 1 Silver. 17-19 November 2020
13. *Continuous Improvement Program (CIP) Shipping Co. 2020* for I Prove gets 1 Silver. 17-19 November 2020
14. Award from LANAL Lhokseumawe to the crew of the Transko Rajawali for their efforts . Rescuing KRI Surik 645 in the waters of Tanjung Jambo Aye. October 23, 2020
15. Award from LANAL Lhokseumawe to the Cempala Transco Master participation to assist Lanal Lhokseumawe in carrying out the evacuation of the vessel due to bad weather. October 23, 2020

Survei Kepuasan Pelanggan

Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu tahun yang meliputi segmen bisnis PTK yakni Sewa Kapal Milik / B2B, Ship Management, Keagenan Tanker / Bunker Services, Diversifikasi Usaha dan Keluhan Pelanggan lainnya dengan scoring 3,72 dari target 4,0.

Customer Satisfaction Survey

The company conducts customer satisfaction surveys at least 1 (one) time a year covering the PTK business segment, namely Owned Ship Rentals/B2B, Ship Management, Tanker/Bunker Services Agency, Business Diversification and other Customer Complaints with a scoring of 3.72 from the target of 4.0.

Hasil Survei Kepuasan Terhadap Seluruh Aspek Layanan

Result of Satisfaction Survey on All Service Aspects

ASPEK Aspect	KEPUASAN Satisfaction	HARAPAN Expectation
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Keagenan Tanker	3,7	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Peteka Shorebase Tanjung Batu	3,7	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sewa Kapal Milik	3,5	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pengelolaan Pelabuhan	4,0	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Ship Management	3,7	4,0

Ketidakcapaian target survey kepuasan pelanggan diantaranya harapan Customer yang perlu ditingkatkan antara lain kecepattanggapan petugas, percepatan administrasi, peningkatan performansi kapal.

Menindaklanjuti harapan pelanggan, tahun 2021, Perusahaan merencanakan strategi antara lain Digitalisasi proses bisnis, peningkatan kompetensi SDM, Penerapan *Computerized Maintenance Management*, Penerapan *Safety Culture Improvement* dalam meningkatkan budaya HSSE yang baik untuk membentuk perilaku pekerja terhadap keselamatan kerja.

Achievement of customer satisfaction survey below the target was namely due to the Customer's expectation that shall be improved, such as the response of the officers, faster administration process and improvement of the vessels' performance.

Following-up the customer's expectation, in 2021, the Company has planned several strategies, including business process Digitalization, HR competency development, implementation of *Computerized Maintenance Management*, Implementation of *Safety Culture Improvement* to improve good HSSE culture to shape the workers' behavior towards the occupational safety.



REFERENSI PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2020

Reference of The 2020 Annual Report

UMUM GENERAL PROVISIONS

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. The Annual Report shall be written in the good Indonesian, and also recommended to present this report in English.		
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. The Annual Report shall be printed with a good quality and using readable font type and size		
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. The Annual Report shall present corporate identity obviously		
4.	Nama perusahaan dan tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman Company's Name and Annual Report period shall be presented at: 1. Front Cover; 2. Spine; 3. Back Cover; and 4. Every Page		
4.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan. The Annual Report shall be uploaded at the Company's Website	Mencakup laporan tahunan terkini dan tahun-tahun sebelumnya.	Including recent and 4 recent years Annual Report.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Information of comparatives statements of incomes within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Dibagikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Dibagikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan; a. Dibagikan kepada pemilik entitas induk; b. Dibagikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	The information includes: 1. Revenue/Sales; 2. Earning (loss); a. Attributable to owner of parent entity; and b. Attributable to non-controlling interest 3. Comprehensive Income for the year; a. Attributable to owner of parent entity; and b. Attributable to non-controlling interest 4. Profit (loss) per share). Notes: if the Company does not have subsidiary, the Company shall present total statements of profit (loss) and comprehensive income for current period.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Information of comparative financial positions within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	The information includes: 1. Total investment with associations; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity.
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Comparative financial ratio within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	The information covers 5 (five) common financial ratio that are relevant with the Company's industry.
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Shares Price Information in Table and Chart.	Informasi dalam bentuk tabel dan grafik 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	Information in the form of tables and graphs 1. Total Shares Outstanding 2. Information as table includes: a. Market capitalization based on price at the Stock Exchange where the shares are listed; b. The highest, lowest and closing shares prices based on price at the Stock Exchange where the shares are listed; c. Shares trading volume at the Stock Exchange where the shares are listed. 3. Information in chart is at least including: a. Closing price based on price at the Stock Exchange where the shares are listed; b. Shares trading volume at Stock Exchange where shares trading is at the Stock Exchange where the Company's shares are listed. For every quarter in the last 2 years.
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Information on issued Bonds, Sukuk or Converted Bonds within recent 2 (two) fiscal years	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi /sukuk /obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk 2015 & 2016. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Total bonds/ sukuk/ converted bonds outstanding; 2. Interest/yield rate; 3. Date of Maturity; and 4. Bonds/Sukuk Rating in 2015 and 2016 Notes: if the Company did not have bonds/sukuk/converted bonds, the condition shall be reported.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

REPORT FROM BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
1.	Laporan Dewan Komisaris. Report from Board of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	Contains the followings: 1. Assessment on the Board of Directors Performance in the course of Company's management altogether with the assessment basis; 2. View on the Company's business prospect prepared by the Board of Directors and basis for the consideration; 3. View on Whistleblowing System (WBS) implementation and role of the Board of Commissioners in the WBS practice; 4. Change to Board of Commissioners composition altogether with the reason.
2.	Laporan Direksi. Report from Board of Directors	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis; b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya;	Contains the followings: 1. Analysis on the Company's performance including: a. strategic policy; b. comparison between target and realization; and c. issues experienced by the Company and settlement plants;

LAPORAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

REPORT FROM BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
		2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	2. Business prospect analysis; 3. Corporate governance practice; and 4. Change to Board of Directors composition altogether with the reason (if any).
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Sign of approval from the Board of Commissioners and the Board of Directors	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	Contains the followings: 1. The signatures are disclosed in separated sheet; 2. Board of Directors and Board of Commissioners Responsibility Statement upon the Authenticity of the Annual Report Contents; 3. Signed by all Board of Directors and Board of Commissioners Members by declaring their name and position; and 4. Written explanation in a separated letter for any Board of Directors or Board of Commissioners member not signing the Annual Report, or: written explanation in a separated letter for other members if the written explanation from respective member is unavailable.

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan. Name and Full Address of the Company	Informasi memuat antara lain: nama & alamat, kode pos, no.telp, no.fax, email, dan website.	The information includes name and address, zip code, phone number, fax number, email and website.
2.	Riwayat singkat perusahaan. Brief History of the Company	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	Includes, among others: date/year of establishment, name and effective date of the Company's name change. Notes: if the Company's not doing any name changes, the condition shall be disclosed.
3.	Bidang usaha. Line of Business	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	The description includes: 1. Business activity based on the latest Articles of Association; 2. Business activity that is operated; and 3. Products and services provided.
4.	Struktur organisasi. Organization Structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.	In chart, including name and position at least until one level below the Board of Directors
5.	Visi dan Misi Perusahaan. Vision and Mission	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direvisi dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	Includes: 1. Vision; 2. Mission; and 3. Explanation of the Vision and Mission Approval by the Board of Directors/Board of Commissioners 4. Statements of Corporate Culture
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris. Identity and Brief Profile of Board of Commissioners Members	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi & Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	The information includes: 1. Name; 2. Position (including position in other companies or organizations); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (Major and Educational Institution) 6. Career History (Position, Institution & Serving Period); and 7. Appointment History (period and position) as member of Board of Commissioners in the Company since initial appointment.
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi. Identity and Brief Profile of Board of Directors Members	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	The information includes: 1. Name; 2. Position (including position in other companies or organizations); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (Major and Educational Institution)

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
		6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi & Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	6. Career History (Position, Institution and Serving Period); and 7. Appointment History (period and position) as member of Board of Directors in the Company since initial appointment.
8.	Jumlah pekerja (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi pekerja yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Employee Demography (2 years comparative) and description of their competency development (i.e. employee education and training aspects)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah pekerja untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah pekerja untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah pekerja berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi pekerja yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi pekerja yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	The information includes: 1. Employee demography by organization level; 2. Employee demography by education level; 3. Employee demography by employment status; 4. Employee competency development program initiated in recent fiscal year consists of training participants (position level), type of training, and purpose of the training; and 5. Realization of employee competency development budget.
9.	Komposisi pemegang saham. Shareholders Composition	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	Contains the followings: 1. List of Top 20 Shareholders Name and Ownership Percentage; 2. Name of Shareholders and ownership percentage, including: a. Name of Shareholders with 5% or higher Shares Ownership; and b. Public shareholders with less than 5% shares ownership; and the ownership percentage. 3. Name of Director and Commissioner with Shares Ownership; Notes: If the Board of Directors and Board of Commissioners do not have direct shares ownership, the condition shall be disclosed.
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi. List of subsidiary and/or association	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	The information in tables includes: 1. Subsidiary and Association; 2. Shares ownership percentage; 3. Description of business line of the subsidiary and/or association; and 4. Description of operational status of the subsidiary and/or association (operating or not yet operated)
11.	Struktur Grup Perusahaan. Company Group Structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan Special Purpose Vehicle (SPV).	Group Structure as chart illustrating the subsidiary, association, joint venture and special purpose vehicle (SPV).
12.	Kronologis pencatatan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Shares Listing Chronology (including private placement) and/or shares listing since the initial issuance until end of fiscal year	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 3. Nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	Includes the information, as follows: 1. Years of shares listing, total shares, shares par value and shares offering prices for each corporate action. 2. Total shares listed after each corporate action; and 3. Name of the stock exchange where the shares are listed. Notes: If the Company does not have shares listing chronology, the condition shall be disclosed.
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Other Securities Listing Issuance and/or Listing Chronology since the initial issuance until end of fiscal year	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	Includes the information, as follows: 1. Name of other securities, other securities issuance date, interest/yield rate of other securities, and maturity date of other securities; 2. Other securities offering price; 3. Name of stock exchange where other securities are listed; and 4. Securities rating. Notes: if the Company does not have other securities listing chronology and issuance, the condition shall be disclosed.
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Name and address of stock market supporting institution and/or profession	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek	Includes the information, as follows: 1. Name and address of Shares Registrar/ Company's Shares Administrator; 2. Name and Address of Public Accountant Firm; and 3. Name and address of rating company.

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional National and International scales awards received and/ or valid certifications in recent fiscal year	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	Information includes: 1. Name of award and / or certification; 2. Year of award and / or certification; 3. Agency for awarding and / or certification; and 4. Validity period (for certification).
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). Name and address of subsidiary or branch office or representative office (if any)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	Includes the information, as follows: 1. Name and address of the subsidiary; and 2. Name and address of branch/representative office. Notes: if the Company does not have any subsidiary/ branch office/representative office, shall be disclosed.
17.	Informasi pada Website Perusahaan. Information at Official Website	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	Includes the information, at least, as follows: 1. Shareholders information until individual end-owners; 2. Code of Conducts contents; 3. Information about General Meetings of Shareholders (GMS) at least including agenda discussed in the GMS, GMS Minutes of Meeting Summary and important date information, such as GMS announcement date, GMS invitation date, GMS Summary publication date; 4. Separated Financial Statements (5 recent years); 5. Profile of Board of Commissioners and Board of Directors; and 6. Charter of the Board of Commissioners, Committees and Internal Audit Unit
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Education and/or training program participated by Board of Commissioners, Board of Directors, the Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan.	Includes the information, at least, as follows (type and person who is relevant to participate in): 1. Education and/or training program for Board of Commissioners; 2. Education and/or training program for Board of Directors; 3. Education and/or training program for Audit Committee; 4. Education and/or training program for Remuneration and Nomination Committee; 5. Education and/or training program for Other Committees; 6. Education and/or training program for Corporate Secretary; and 7. Education and/or training program for Internal Audit Unit. Notes: if there is no education and/or training program done in the fiscal year, the condition shall be disclosed.

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS ON THE COMPANY'S PERFORMANCE

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
1	Tinjauan operasi per segmen usaha. Operational Review by Business Segment	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	The information contains, as follows: 1. Explanation about each business segment. 2. Performance by business segment: a. Production; b. Increasing/decreasing production capacity; c. Sales/Revenue; and d. Profitability.
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Description on Financial Performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:	Financial performance analysis including comparison of financial performance in recent fiscal year with earlier year and the cause of increasing/decreasing performance (narrative explanation and table), includes the information, as follows:

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS ON THE COMPANY'S PERFORMANCE

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
		1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain & penghasilan komprehensif periode berjalan; 5. Arus kas.	1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Current liabilities, non-current liabilities and total liabilities; 3. Equity; 4. Sales/Revenue, expense and profit (loss), comprehensive income & total comprehensive income (loss); and 5. Cash flows.
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Discussion and analysis on solvency and receivables collectability by presenting calculation of ratio that are relevant with the Company's industry	Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	Explanation on: 1. Solvency, both short-term and long-term; and 2. Receivables collectability ratio.
4.	Bahasan tentang struktur modal (capital structure), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy). Discussion on capital structure and capital structure policy	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal; 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	Explanation on: 1. Capital structure description comprising of interest/sukuk based liabilities and equity; and 2. Capital structure policies; and 3. Basis for capital structure policy preference
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir. Discussion on material commitment for capital expenditure	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	Explanation on: 1. Name of the committed party; 2. Purpose of the commitment; 3. Source of fund expected to fulfill the commitment; 4. Denomination currency; and 5. Initiatives planned by the Company as protection from related foreign currency. Notes: if the Company does not have any commitment related with capital expenditure in the recent fiscal year, the condition shall be disclosed.
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. Discussion on capital expenditure realization in recent fiscal year	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	Explanation on: 1. Type of capital expenditure; 2. Purpose of capital expenditure; and 3. Value of capital expenditure realization in recent fiscal year. Notes: if there is no capital expenditure realization, the condition shall be disclosed.
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Information on comparison between target at beginning of fiscal year with the result (realization), and target or projection to be achieved within one upcoming period in terms of revenue, profit, capital structure or others considered necessary for the Company.	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	The information includes: 1. Comparison between target at beginning of fiscal year and result (realization); and 2. Target or projection to be achieved within one upcoming period
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Subsequent material information and fact after accountant reporting date	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	Description on subsequent material event after accountant reporting date including its impact to future performance and business risk. Notes: If there is no subsequent material information after accountant reporting date, the condition shall be disclosed.
9.	Uraian tentang Prospek Usaha Perusahaan. Description on business prospect	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	Description on business prospect related with the industry and economics generally followed by quantitative supporting data from reliable sources.
10.	Uraian tentang aspek pemasaran. Description on marketing aspect	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	Description on marketing aspect of the Company's products and/or services, i.e. marketing strategy and market share.

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS ON THE COMPANY'S PERFORMANCE

KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION	
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description on dividend policy and amount of cash dividend per share and total dividend per annum that is announced or paid within 2 (two) recent fiscal years	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	The information includes: 1. Dividend policy; 2. Total dividend paid; 3. Total cash dividend per share; 4. Payout ratio; and 5. Cash dividend announcement and payment date in each year. Notes: If no dividend payment, the reason shall be disclosed.
12. Program kepemilikan saham oleh pekerja dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP). Employee and/or management stock option plan (ESOP/MSOP)	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak; 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Amount of ESOP/MSOP shares and realization; 2. Maturity; 3. Requirement for eligible employee and/or management; 4. Exercise price. Notes: If the program is unavailable, the condition shall be disclosed.
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). Public offering proceeds realization (in the course of the Company has a mandatory to report proceeds realization)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Total proceeds; 2. Proceeds realization plan; 3. Detail of proceeds realization; 4. Outstanding; and 5. Date of GMS approval on the change of proceeds realization (if any). Notes: if the public offering proceeds realization information is not available, the condition shall be disclosed.
14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Material information on investment, expansion, divestment, business merger/joint, acquisition and/or debt/capital restructuring	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Name of the transaction and nature of the affiliated relation; 2. Explanation about the transaction fairness; 3. Reason of the transaction; 4. Realization of the transaction during the recent fiscal year period; 5. Company policy related with transaction review mechanism; 6. Compliance with related Law and regulation. Notes: if the transaction is unavailable, the condition shall be disclosed.
15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Description on change in regulation in recent fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan	The information contains information, as follows: 1. Name of changing regulation; 2. Impacts (quantitative and/or qualitative) to the Company (if significant) or statements that the impact is less material. Notes: if there is no changing regulation, the condition shall be disclosed.
16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. Description on change in accounting policy implemented in recent fiscal years	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	Description includes: 1. Change in accounting policy; 2. Reason of the change to the accounting policy; and 3. Quantitative impact on the financial statements Notes: If there is no change in accounting policy, the condition shall be disclosed.
17. Informasi kelangsungan usaha Information on Business Sustainability	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i> .	Disclosure of information, as follows: 1. Issues with potential significant impact towards the Company's business sustainability in the recent fiscal year. 2. Assessment form the management on issues explained at point 1; and 3. Assumption used by the Management in the assessment.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
1.	Uraian Dewan Komisaris Description on Board of Commissioners	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Komisaris dan dasar penilaiannya 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris) 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan;	Description includes: 1. Description of the responsibilities of the Board of Commissioners; 2. Evaluation of the performance of each committee under the Board of Commissioners and the basis of the assessment 3. Disclosure of Board Charter (Board of Commissioners guidelines and rules) 4. Frequency of meetings and the level of attendance of the Board of Commissioners in meetings;
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Independent Commissioner (minimum 30% of total Board of Commissioners)	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	Includes the information, as follows: 1. Independent Commissioner appointment criteria; and 2. Statement of Independency for every Independent Commissioner.
3.	Uraian Direksi. Description of Board of Directors	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	The information includes: 1. Scope of individual duty and responsibility for every Board of Directors member; 2. Assessment on the Committees under the Board of Directors (if any); and 3. Disclosure on Board Charter (Board of Directors Working Guideline and Procedure).
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi GCG Assessment for Fiscal Year 2015 including, at least, Board of Commissioners and Board of Directors aspects	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Assessment criteria; 2. Name of the Assessor; 3. Score for each criteria; 4. Assessment recommendation; and 5. Reason for recommendation that is not/ not yet implemented. Notes: If there is no GCG Assessment in 2015, the condition shall be disclosed.
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Description on remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Disclosure of Board of Commissioners remuneration proposal until stipulation procedure; 2. Disclosure of Board of Directors remuneration proposal until stipulation procedure; 3. Remuneration structure indicating remuneration component and amount per component for every Board of Commissioners member; 4. Remuneration structure indicating remuneration component and amount per component for every Board of Directors member; 5. Disclosure of Board of Directors remuneration indicator; and 6. Disclosure of performance and non-performance incentives and/or stock option received by every Board of Commissioners and Board of Directors member (if any). Notes: If the performance and non-performance incentives and/or stock option received by every Board of Commissioners and Board of Directors member are unavailable, the condition shall be disclosed.
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) Meeting frequency & attendance list that is attended by majority of the members in Board of Commissioners meeting (minimum once in 2 months), Board of Directors meeting (minimum once in 1 month), and Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting (Management Meeting) (minimum once in 4 months)	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	The information includes: 1. Meeting date; 2. Meeting participants; and 3. Meeting agenda. For every Board of Commissioners meeting, Board of Directors meeting or Management Meeting

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION	
7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Information about ultimate and controlling shareholders, both direct and non-direct shareholders until individual shareholder.	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	Presented as scheme or chart, with separation between ultimate and controlling shareholders. Notes: Ultimate shareholders refer to any party with direct and indirect shares ownership minimum 20% (twenty per cent) of voting rights from total shares with voting rights issued by a Company who are not controlling Shareholders.
8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Disclosure of affiliation among the Board of Directors members, Board of Commissioners and Ultimate/Controlling Shareholders	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Komisaris lainnya; 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Affiliation among the Board of Directors members; 2. Affiliation between Board of Directors and Board of Commissioners members; 3. Affiliation between Board of Directors members with Ultimate and/or Controlling Shareholders; 4. Affiliation among the Board of Commissioners members; and 5. Affiliation between Board of Commissioners members with Ultimate and/or Controlling Shareholders. Notes: If the affiliation is unavailable, the condition shall be disclosed.
9. Komite Audit. Audit Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	The information includes: 1. Name and position of Audit Committee members; 2. Educational background (Major and Institution) and career history (Position, Institution, and tenure) of the Audit Committee members; 3. Independency of Audit Committee members; 4. Description of duty and responsibility; 5. Description of Audit Committee working report in the fiscal year; 6. Audit Committee meeting frequency and attendance level.
10. Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and/or Remuneration Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi.	The information includes: 1. Name, position, and brief profile of Nomination and/or remuneration committee members; 2. Independency of nomination and/or remuneration committee members; 3. Description of duty and responsibility; 4. Description of nomination and/or remuneration committee working report in the fiscal year; and 5. Nomination and/or remuneration committee meeting frequency and attendance level; 6. Statements of nomination and/or remuneration committee charter; and 7. Board of Directors succession policy.
11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Other Committees under the Board of Commissioners established by the Company	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	The information includes: 1. Name, position, and brief profile of the other committee's members; 2. Independency of other committee's members; 3. Description of duty and responsibility; 4. Description of working report by the other committees; and 5. Other committees meeting frequency and attendance level.
12. Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan. Description of Corporate Secretary Duty and Function	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	The information includes: 1. Name and brief profile of Corporate Secretary; 2. Domicile; 3. Description of duty and responsibility; 4. Corporate secretary working report in the fiscal year.
13. Uraian mengenai unit audit internal Description on Internal Audit Unit	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pekerja (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;	The information includes: 1. Name of Internal Audit Unit Chief; 2. Total personnel (internal auditor) at Internal Audit Unit; 3. Certification as internal audit profession;

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
		4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	4. Position of internal audit unit in the organization structure; 5. Description of internal audit unit working report; and 6. Party who appointed and discharged Head of Internal Audit Unit.
14.	Akuntan Publik Public Accountant	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	The information includes: 1. Name and period of public accountant auditing the annual financial statements for 5 recent years; 2. Name and period of Public Accountant Firm auditing annual financial statements for 5 recent years; 3. Amount of fee for each service provided by the public accountant in recent fiscal year; and 4. Other service provided by Public Accountant Firm besides annual financial statements audit service Notes: If there is no other service provided, the condition shall be disclosed.
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Description on Risk Management	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	The information includes: 1. Explanation on risk management system implemented by the Company 2. Explanation on evaluation done to effectiveness of the risk management system; 3. Explanation on risks profile of the Company; and 4. Risk mitigation plan.
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern Description on internal control system	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian internal, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO - internal control framework); 3. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun buku.	The information includes: 1. Brief explanation on internal control system including financial and operational controlling; 2. Explanation of internal control system compliance with international-standard framework (COSO - internal control framework); 3. Explanation on evaluation to the internal control system
17.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup Description on corporate social responsibility related with environment	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan 3. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab	The information includes: 1. Information about commitment on social responsibility 2. Information on method and scope of due diligent to social, economic and environmental impacts from the Company's activity 3. Information about key stakeholders who are affected or influenced by impact from the Company's activity 4. Information about social economics and environmental key issues related to impact from the Company's activity 5. Information about scope of corporate social responsibility as obligations or beyond obligation 6. Information about strategy and working program in handling social, economics and environmental issues as stakeholders engagement initiatives and to increase value for the stakeholders and shareholders 7. Information about various programs exceeding the minimum corporate responsibility that is relevant with current business practice 8. Information about social responsibility financing and budget
18.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan core subject hak asasi manusia Description on corporate social responsibility related to Human Rights subject	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Asasi Manusia 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Asasi Manusia 3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Asasi Manusia	The information includes: 1. Information about social responsibility commitment and policy on Human Rights core subject 2. Information about corporate formulation on scope of social responsibility Human Rights core subject 3. Information about corporate social responsibility planning on Human Rights aspect

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
		4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	4. Information about implementation of CSR initiatives in Human Rights aspect 5. Information about achievements and rewards for CSR initiatives in Human Rights aspect
19.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subjek Operasi yang adil Description on Social Responsibility related to Fair Operation Core Subject	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subjek Operasi yang adil 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subjek operasi yang adil 3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	The information includes: 1. Information about social responsibility commitment and policy on Fair Operation core subject 2. Information about corporate formulation in scope of social responsibility in Fair Operation core subject 3. Information about corporate social responsibility planning in Fair Operation aspect 4. Information on implementation of CSR initiatives in fair operations aspect 5. Information on achievements and rewards of CSR in fair operations aspect
20.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup Description on Corporate Social Responsibility related to Environment	Penyampaian Informasi Tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan 2. Informasi tentang dampak dan risiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	Disclosure of information, as follows: 1. Information about environmental commitment and policy 2. Information about environmental impact and risk that are related directly or non-directly with the Company 3. Information about activity target/plan for 2018 as stipulated by the management; 4. Information about activities that are done and related to environmental program engaging with the Company's operational activity 5. Information about implementation of CSR in environment 6. Information about quantitative impact from the activities, and, the use of eco-friendly material and energy, and during the recycle process, the Company's waste management treatment, environmental issue reporting mechanism, considering environmental aspect in loans disbursement to the customers and others. 7. Certification in environment aspect.
21.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja Description on corporate social responsibility related to employment, occupational health and safety.	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjek ketenagakerjaan 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover pekerja, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	The information includes: 1. Corporate social responsibility policy and commitment in employment subject 2. Information about social responsibility scope and formulation in employment aspect 3. Information related to target/activity plan in 2018 as stipulated by the management; and 4. Implemented activity and quantitative impact from the activity 5. Information about occupational health, safety and employment such as gender equity and working opportunity, occupational health and equipment, employee turnover rate, accident rate, remuneration, employment issue reporting mechanism, and others.
22.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen Description on corporate social responsibility related to responsibility to the customers	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanganan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	Including, among others: 1. Activity target/plan in 2018 as stipulated by the management; 2. Activities done and its impact 3. Related to product responsibility such as customer's health and safety, product information, facilities, amount and handling process upon the customer complaint, and others.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION
23. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan Description on Corporate Social Responsibility related to social and community development	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan/core subjek pengembangan sosial dan kemasyarakatan 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan 3. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial & kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. Including information about: 1. Corporate social responsibility policy and commitment in social and community development/core subject 2. Information about social issues that are relevant with the Company 3. Information about social risks managed by the Company 4. Information about social responsibility scope and formulation in social and community development 5. Activity target/plan in 2018 as stipulated by the management; 6. Activity realization and impact from the activities; and 7. Related to social and community development, such as hiring local workers, community development in operational area, improvements of social infrastructures and facilities, other donations, communication about anti-corruption policy and procedure, anti-corruption training and others.
24. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Litigation encountered by the Company, subsidiary, Board of Directors and/or Board of Commissioners members serving in the Annual Report period	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi) Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan The information includes: 1. Case/lawsuit summary; 2. Case/lawsuit settlement status; 3. Risk encountered by the Company and value of the litigation/lawsuit; 4. Administrative sanction charged to the Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members by the authorized regulator (stock market, banking and other authorities) in recent fiscal year (or statements of free from any administrative sanction). Notes: In the course of the Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members do not encounter any litigation, the condition shall be disclosed.
25. Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik Access to company information and data: A description of the availability of access to company information and data to the public	Misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Description on the availability of corporate information and data access publicly, i.e. via website (in Indonesian and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting and others
26. Bahasan mengenai kode etik Description on Code of Conducts	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik & sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan The information includes: 1. Code of Conducts provisions; 2. Disclosure that Code of Conducts prevail for entire organization level; 3. Code of Conducts dissemination; 4. Punishment for every violation as stipulated in the Code of Conducts; 5. Number of Code of Conducts violation, punishment administered in recent fiscal year Notes: If Code of Conducts violation is unavailable in recent fiscal year, the condition shall be disclosed.
27. Pengungkapan mengenai whistleblowing system Disclosure on Whistleblowing System	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The information includes Whistleblowing System mechanism, as follows: 1. Fraud report submission; 2. Protection to the Whistle Blower; 3. Report handling; 4. Report Manager authority; and 5. Total report received and processed in recent fiscal year; and 6. Punishment/follow-up on the report that had been processed completely during the fiscal year. Notes: If neither incoming or processed report in recent fiscal year, the condition shall be disclosed.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION
28.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity Policy	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. Description of written policy of the Company on Board of Commissioners and Board of Directors composition diversity policy in terms of educational background (major), career history, age and gender. Notes: if the policy is unavailable, the condition shall be disclosed altogether with the consideration.

INFORMASI KEUANGAN

FINANCIAL INFORMATION

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION
1.	Surat pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Keuangan. Declaration from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on Financial Statements Responsibility	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with regulations related with Financial Statements Responsibility
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan. Independent Auditor Opinion on the Financial Statements	
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini. Description of Independent Auditor in the Opinion	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP & nomor ijin Akuntan Publik. Description includes, as follows: 1. Name & signature; 2. Date of Audit Report; and 3. KAP and Public Accountant Registries.
4.	Laporan keuangan yang lengkap. Complete Financial Statements	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca); 2. Laporan laba rugi komprehensif; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Laporan komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Full disclosure of financial statements parts, as follows: 1. Statements of financial position (balance sheet); 2. Statements of profit or loss; 3. Statements of equity change; 4. Statements of cash flows; 5. Note on the financial statements; 6. Comparative statements on earlier period; 7. Statements of financial position at beginning of earlier period when the entity implemented certain accounting policy retrospectively or restating the financial statement accounts, or when the entity reclassified the accounts in the financial statements (if relevant)
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas. Comparison of profitability	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Comparative profit (loss) for the year and earlier year
6.	Laporan Arus Kas. Statements of Cash Flows	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan The information includes: 1. Classification of three activity categories: operating, investing and financing; 2. Implementation of direct method to report cash flows from operating activities; 3. Separation of disclosure between inflow and outflow cash in recent year on operating, investing and financing activities; 4. Disclosure of non-cash transaction that shall be disclosed in the notes on financial statements.
7.	Ikhtisar kebijakan akuntansi. Summary of Accounting Policy	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. The information, at least, includes: 1. Statement of compliance with the FAS; 2. Basis of Financial Statements measurement and preparation; 3. Recognition of income and expenses; 4. Employment benefits; and 5. Financial Instruments.

INFORMASI KEUANGAN

FINANCIAL INFORMATION

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION	
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Disclosure of related party transaction	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	The disclosure includes: 1. Name of related parties; and nature and relation with the related parties; 2. Amount of the transaction and percentage total related income and expenses; and 3. Amount of balance and percentage to total assets or liabilities.
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. Disclosure of taxation-related information	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan;	The disclosure shall present information as follows: 1. Fiscal reconciliation and current tax calculation; 2. Explanation on relationship between tax income (expense) and accounting income. 3. Statements of reconciliated Taxable Income (LKP) is placed as basis for the Entity Income Tax Annual SPT submission;
		4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	4. Detail of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial statements for every presentation period, and total deferred tax income (expenses) recognized in statements of profit or loss if the amount is unrecognized in the total deferred tax assets or liabilities recognized in the statements of financial position; and 5. Disclosure of any tax dispute event
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. Disclosure related with fixed assets	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam meng-estimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	The disclosure shall present information as follows: 1. Depreciation method applied; 2. Disclosure on selected accounting policy between revaluation model and cost model; 3. Significant method and assumption applied to estimate fair value of the fixed assets (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and 4. Reconciliation of total fixed assets gross booked value and accumulative depreciation at beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. Disclosure related with operation segment	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	The disclosure shall present information as follows: 1. General information including factors applied to identify the reported segment; 2. Information on profit or loss, assets and liabilities of the reported segment; 3. Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities and other material elements of the segments to total related in the entity; and 4. Disclosure at entity level, including information about product and/or service, geographical area and main customers.
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. Disclosure related with Financial Instruments	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	The disclosure shall present information: 1. Detail information of owned financial instruments by classification; 2. Fair value and its hierarchical level for every financial instrument group; 3. Explanation of risk related with the financial instrument; market risk, credit risk and liquidity risk; 4. Risk management policy; and 5. Quantitative risk analysis related with financial instrument.
13.	Penerbitan Laporan Keuangan. Financial Statements Publication	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	The disclosure shall present information: 1. Date of authorization for the financial statements publication; and 2. Authorized party of the financial statements.



8

LAPORAN KEUANGAN AUDIT

Audited Financial
Report

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2020/
*31 DECEMBER 2020***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

**THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Sesuai dengan resolusi Direksi PT Pertamina Trans Kontinental dan atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

In accordance with a resolution of the Board of Directors of PT Pertamina Trans Kontinental and on behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. Nama : Nepos MT Pakpahan
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telepon : 021 - 3192 3005
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Azwani
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telepon : 021 - 3192 3005
Jabatan : Direktur Keuangan & SDM

1. Name : Nepos MT Pakpahan
Address : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telephone : 021 - 3192 3005
Position : President Director
2. Name : Azwani
Address : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telephone : 021 - 3192 3005
Position : Finance & HR Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. *The Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;*
b. *The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or facts; and*
4. *The Board of Directors are responsible for the Group's internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi.

For and on behalf of the Board of Directors.



Jakarta,
19 Februari/February 2021

Nepos MT Pakpahan
Direktur Utama/President Director

Azwani
Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2020, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries as at 31 December 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA

19 Februari/February 2021

Daniel Kohar, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1130

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4, 24	652,483	714,498	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya		588	588	Restricted cash
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak berelasi	5, 24	516,040	311,114	Related parties -
- Pihak ketiga	5	109,718	86,504	Third parties -
Kontrak aset				Contract assets
- Pihak berelasi	6, 24	625,121	409,445	Related parties -
- Pihak ketiga	6	177,323	168,697	Third parties -
Piutang sewa pembiayaan	8	20,624	20,325	Finance lease receivables
Persediaan		675	594	Inventories
Pajak dibayar				
di muka - pajak lain-lain	15a	15,808	42,136	Prepaid taxes - other taxes
Uang muka dan biaya				
dibayar di muka	7	41,655	24,745	Advances and prepayments
Jumlah aset lancar		<u>2,160,035</u>	<u>1,778,646</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	10	3,520,066	2,750,120	Fixed assets
Aset hak-guna	14a	56,332	-	Right-of-use assets
Aset pajak tangguhan	15e	43,115	33,564	Deferred tax assets
Piutang sewa pembiayaan	8	61,871	81,301	Finance lease receivables
Penyertaan saham	24	8,098	598	Investment in shares
Investasi pada ventura bersama	9	74,425	73,083	Investment in a joint venture
Taksiran pengembalian pajak				Estimated tax refund
- Pajak penghasilan	15b	2,866	13,161	Corporate income taxes -
- Pajak lain-lain	15b	65,924	-	Other taxes -
Aset lain-lain		<u>3,618</u>	<u>3,050</u>	Other assets
Jumlah aset tidak lancar		<u>3,836,315</u>	<u>2,954,877</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET		<u>5,996,350</u>	<u>4,733,523</u>	TOTAL ASSETS

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
- Pihak berelasi	11, 24	456,758	306,478	Related parties -
- Pihak ketiga	11	189,211	179,563	Third parties -
Biaya masih harus dibayar	12	1,147,039	562,353	Accrued expenses
Liabilitas kontrak				Contract liabilities
- Pihak berelasi	13, 24	105	-	Related parties -
- Pihak ketiga	13	115,066	64,808	Third parties -
Utang pajak				Taxes payable
- Pajak penghasilan	15c	6,320	6,667	Corporate income taxes -
- Pajak lain-lain	15c	14,115	6,197	Other taxes -
Bagian jangka pendek atas liabilitas sewa	14b	27,123	-	Current portion of long-term lease liabilities
Pinjaman jangka pendek	16	-	25,516	Short term borrowings
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	16	364,928	200,225	Current portion of long-term borrowings
Jumlah liabilitas jangka pendek		2,320,665	1,351,807	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa	14b	33,794	-	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	16	883,886	878,268	Long-term borrowings
Liabilitas imbalan pascakerja	17	178,402	161,307	Post-employment benefits obligation
Liabilitas pajak tangguhan	15e	4	-	Deferred tax liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		1,096,086	1,039,575	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		3,416,751	2,391,382	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham - modal dasar dan disetor penuh 693,708 lembar saham A dengan nilai nominal Rp1,000,000 dan 819 saham B dengan nilai nominal Rp1,000	18	693,709	693,709	Share capital - authorised and fully paid 693,708 shares A at par value of Rp1,000,000 per share and 819 shares B at par value of Rp1,000 per share
Tambahan modal disetor		3,000	3,000	Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif lain		(117,082)	(107,438)	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
- Ditentukan penggunaannya	25	75,943	75,943	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		1,924,029	1,676,927	Unappropriated -
JUMLAH EKUITAS		2,579,599	2,342,141	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		5,996,350	4,733,523	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2020	2019*)	
Pendapatan usaha	19	3,058,197	2,539,806	Revenue
Beban pokok pendapatan	20	(2,181,550)	(1,859,832)	Cost of revenue
Laba bruto		876,647	679,974	Gross profit
Beban umum dan administrasi	21	(318,096)	(288,144)	General and administrative expenses
(Beban)/keuntungan lain-lain, bersih	22	(26,955)	35,303	Other (expenses)/income, net
Pendapatan keuangan		15,075	8,406	Finance income
Beban keuangan	23	(58,860)	(72,965)	Finance costs
Bagian atas laba bersih ventura bersama	9	22,283	30,403	Share in profit of a joint venture
Beban pajak final		(26,164)	(18,816)	Final tax expenses
Laba sebelum pajak penghasilan		483,930	374,161	Profit before income tax
(Beban)/manfaat pajak penghasilan				Income tax (expenses)/benefit
Kini	15d	(67,505)	(72,900)	Current
Tangguhan	15d	8,507	(6,111)	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	15d	(1,555)	(152)	Adjustment in respect of prior years
Beban pajak penghasilan		(60,553)	(79,163)	Income tax expenses
Laba tahun berjalan		423,377	294,998	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to the profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	17	(10,746)	(21,942)	Remeasurement of liabilities defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait		1,109	2,806	Related income tax
Jumlah rugi komprehensif lain setelah pajak		(9,637)	(19,136)	Total other comprehensive loss net of tax
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:				Items that will be reclassified to the profit or loss:
Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain		(7)	-	Changes in the fair value of equity instruments at fair value through other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		413,733	275,862	Total comprehensive income for the year
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		423,377	294,998	Owners of the parent entity
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk		413,733	275,862	Owners of the parent entity

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

As restated (Notes 30) *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 3 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah)

	Distribusikan kepada pemilik entitas induk/Atributable to the owners of the parent					
	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss	Saldo laba/ Retained earnings		
				Telaah penggunaan/ appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo per 31 Desember 2018	693.709	3.000	(88.302)	75.943	1.381.929	2.066.279
Rugi komprehensif lain	-	-	(19,136)	-	-	(19,136)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	294,998	294,998
Saldo per 31 Desember 2019	693.709	3.000	(107.438)	75.943	1.676.927	2.342.141
Penyesuaian saldo atas penerapan awal - PSAK 71	-	-	-	-	723	723
Saldo 1 Januari 2020	693.709	3.000	(107.438)	75.943	1.677.650	2.342.864
Rugi komprehensif lain	-	-	(9,644)	-	-	(9,644)
Dividen	-	-	-	-	(176,998)	(176,998)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	423,377	423,377
Saldo per 31 Desember 2020	693.709	3.000	(117.082)	75.943	1.924.029	2.579.599

Opening balance adjustment upon initial application SFAS 71 -

Balance 1 January 2020

Other comprehensive loss

Dividend

Profit for the year

Balance as at 31 December 2020

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan		2,472,407	2,702,812	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok untuk beban operasi		(1,506,978)	(1,913,798)	Cash paid to suppliers for operating expenses
Pembayaran beban keuangan		(52,840)	(72,965)	Cash payments for finance cost
Pembayaran pajak final		(26,164)	(18,816)	Cash payments of final tax expense
Penerimaan kas dari pendapatan keuangan		15,075	8,406	Cash receipts from finance income
Pembayaran kepada karyawan		(225,633)	(204,493)	Cash payments to employees
Pembayaran atas beban pajak penghasilan badan		(71,198)	(73,951)	Payment of corporate income tax
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		604,669	427,195	Net cash flows provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penerimaan dividen dari ventura bersama	9	20,941	12,386	Dividends received from joint venture
Penerimaan piutang pembiayaan		19,131	29,537	Received from lease receivables
Perolehan aset tetap		(773,228)	(172,719)	Acquisition of fixed assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(733,156)	(130,796)	Net cash flows used for investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan pinjaman		384,514	227,653	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman		(248,520)	(357,935)	Repayments of borrowings
Pembayaran dividen		(2)	-	Dividend paid
Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa	14b	(6,021)	-	Payments for interest expense of lease liabilities
Pembayaran liabilitas sewa	14b	(74,437)	-	Repayments of lease liabilities
Arus kas bersih diperoleh/ (digunakan) dari aktivitas pendanaan		55,534	(130,282)	Net cash flows provided/(used) from financing activities
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		10,938	(12,427)	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
(Penurunan)/kenaikan neto kas dan setara kas		(62,015)	153,690	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	4	714,498	560,808	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas akhir tahun	4	652,483	714,498	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pertamina Trans Kontinental ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 9 September 1969 oleh Tan Thong Kie yang diubah dengan notaris yang sama dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 3 Januari 1975 dengan nama PT Pertamina Tongkang. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.Ya.5/5/4 tanggal 21 Januari 1975 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 10 tanggal 4 Februari 1975. Nama Perusahaan diubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 26 Oktober 2011 oleh Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 3 Juli 2013 dari Rusnaldy, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan peningkatan modal dasar Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-38826.AH.01.012 dan AHU-AH.01.10-29670 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Kramat Raya No. 29.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Maksud Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik baik di dalam negeri maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik tersebut.
- Tujuan Perusahaan adalah untuk:
 - a. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan secara efektif dan efisien.
 - b. Memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Pertamina Trans Kontinental (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 3 dated 9 September 1969, as amended by Notarial Deed No. 1 of the same notary dated 3 January 1975, by Tan Thong Kie under the name of PT Pertamina Tongkang. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No.Ya.5/5/4 dated 21 January 1975 and was published in State Gazette No. 10 dated 4 February 1975. The Company's name was changed to PT Pertamina Trans Kontinental based on Notarial Deed No. 12 dated 26 October 2011, of Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-58581.AH.01.02. Year 2011 dated 29 November 2011.

The Company's Articles of Association have been amended several times, with the latest amendment made by Notarial Deed No. 7 of Rusnaldy, S.H., notary in Jakarta, dated 3 July 2013, regarding the increase in the authorised share capital of the Company. The change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-38826.AH.01.012 and AHU-AH.01.10-29670 Year 2013 dated 17 July 2013.

The Company is domiciled in Jakarta and its head office is located in Jl. Kramat Raya No. 29.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities are as follows:

- *The Company's objective is to conduct business in shipping, maritime and logistics services both domestically and abroad, as well as other related or supporting business activities in shipping, maritime and logistics services.*
- *The Company's objectives are to:*
 - a. *Make profits based on the principles of effective and efficient management; and*
 - b. *Contribute to economic activities for the welfare and prosperity of the people.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Struktur Grup

i. Entitas anak

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup".

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, struktur Grup adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiaries	Aktivitas bisnis/ Business activities	Domisili/ Domicile	Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Jumlah aset/Total assets	
				2020	2019	2020	2019
1. PT Peteka Karya Samudera ("PKS") (Berdiri tanggal 10 Februari 1986)/ (Established on 10 February 1986)	Jasa bongkar muat/ Cargo handling	Jakarta	1996	99.99%	99.99%	224,792	118,242
2. PT Peteka Karya Gapura ("PKG") (Berdiri tanggal 5 Juni 1987)/ (Established on 5 June 1987)	Jasa angkutan, penyediaan tenaga kerja dan perdagangan umum/ Transportation service, labor supply and general trade	Jakarta	1998	99.99%	99.99%	179,639	156,252
3. PT Peteka Karya Tirta ("PKT") (Berdiri tanggal 21 Januari 1988)/ (Established on 21 January 1988)	Pengelolaan dan jasa pengadaan air/ Management and water supply services	Jakarta	1998	99.99%	99.99%	91,351	78,843
4. PT Peteka Karya Jala ("PKJ") (Berdiri tanggal 6 November 1991)/ (Established on 6 November 1991)	Perawatan dan pengadaan barang dan jasa/ Maintenance and procurement of goods	Jakarta	1991	99.99%	99.99%	232,465	86,019

ii. Ventura bersama

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 September 2014 yang risalah rapatnya di dokumentasikan dalam Akta Notaris No. 41 oleh Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA, Perusahaan dan Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT"), mendirikan ventura bersama bernama PT Trans Yeong Maritime ("TYM") sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha dibidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut. Kepemilikan saham Perusahaan di TYM adalah sebesar 51%.

Perusahaan induk langsung dan utama Perusahaan adalah PT Pertamina (Persero), badan usaha milik negara.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. The Group structure

i. Subsidiaries

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

As at 31 December 2020 and 2019, the structure of the Group was as follows:

ii. Joint venture

Based on the Annual Shareholder's meeting dated 16 September 2014, which was documented in Notarial Deed No. 41 by Dewantari Handayani S.H., MPA, the Company and Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT") established a joint venture named PT Trans Yeong Maritime ("TYM"), a company located in Central Jakarta. The joint venture's purpose and objective are related to shipping and harbour services. The Company's share of ownership in TYM is 51%.

The Company's immediate and ultimate parent company is PT Pertamina (Persero), a state-owned enterprise.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	-
Komisaris	Ivan Airlangga EP
Komisaris	Achmad Fachruddin
Komisaris	Andi Saiful Haq
Direksi	
Direktur Utama	Nepos MT Pakpahan
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Azwani
Direktur Operasi	Hadi Purnomo
Direktur Pemasaran	Arsono Kuswardanu

*Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/Acting as Director of Finance and Human Resources

d. Penyelesaian atas laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan pada tanggal 19 Februari 2021.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Boards of Commissioners, Board of Directors and Employees

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at 31 December 2020 and 2019 were as follows:

	2019	
		Board of Commissioners
	Ignatius Tallulembang	President Commissioner
	Ivan Airlangga EP	Commissioner
	Achmad Fachruddin	Commissioner
	Alfian Nasution	Commissioner
		Board of Directors
	Nepos MT Pakpahan	President Director
	Nepos MT Pakpahan*	Finance and Human Resources Director
	Hadi Purnomo	Operation Director
	Arsono Kuswardanu	Commercial Director

d. Completion of the consolidated financial statements

These consolidated financial statements were authorised for issuance in accordance with a resolution of the Board of Directors of the Company on 19 February 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

The accounting policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention and using the accrual basis except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK")**

**Penerapan dari standar dan interpretasi
baru/revisi**

Grup telah mengadopsi standar berikut dengan dampak terhadap bisnis Grup sebagai berikut:

Penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

Grup menerapkan PSAK 71 mulai dari 1 Januari 2020 secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan awal PSAK 71 disesuaikan pada saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020.

Grup memiliki investasi pada instrumen ekuitas yang merupakan investasi strategis. Sebelum adopsi PSAK 71, instrumen ini diukur pada biaya perolehan. Pada 1 Januari 2020, sesuai dengan ketentuan PSAK 71, Grup melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen ini dan mencatat penyesuaian nilai wajar sebesar Rp7.507.

Untuk piutang usaha dan kontrak aset, Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang disyaratkan oleh PSAK 71 yang mengharuskan penggunaan provisi kerugian ekspektasian seumur hidup.

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

**Changes to Statements of Financial
Accounting Standards ("SFAS") and
Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards ("IFAS")**

**The adoption of new/revised standards and
interpretations**

The Group has adopted the following standards which impact the Group's business as follows:

Adoption of SFAS 71 "Financial Instruments"

The Group has adopted SFAS 71 effective from 1 January 2020 retrospectively, with the cumulative impact of the initial adoption of SFAS 71 adjusted to the opening balance of equity as at 1 January 2020.

The Group has an investment in equity instrument for strategic purposes. Prior to the adoption of SFAS 71, this investment was measured at cost. As at 1 January 2020, in accordance with the requirements of SFAS 71, the Group measured the fair value of this investment and recognised a fair value adjustment of Rp7,507.

For trade receivables and contract assets, the Group applies the simplified approach in order to provide for expected credit losses prescribed by SFAS 71 which requires the use of lifetime expected loss provision.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK") (lanjutan)**

**Penerapan dari standar dan interpretasi
baru/revisi (lanjutan)**

Penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
(lanjutan)

Penerapan PSAK 71 menyebabkan kenaikan
provisi atas penurunan nilai aset keuangan
sebesar Rp6.708 yang diakui sebagai
penyesuaian atas saldo laba pada 1 Januari
2020, dengan komposisi provisi penurunan nilai
untuk piutang usaha Rp4.935 dan kontrak aset
Rp1.773.

Dampak penerapan PSAK 71 secara
keseluruhan pada 1 Januari 2020 menambah
laba ditahan sebesar Rp723 setelah
memperhitungkan dampak pajak tangguhan.

Penerapan atas PSAK 72 "Pendapatan dari
Kontrak dengan Pelanggan"

Grup menerapkan PSAK 72 secara efektif untuk
tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.
Penamaan akun "Piutang usaha yang belum
difakturkan" dalam laporan keuangan tahun
2019 diubah menjadi "Aset kontrak" dan "Uang
muka pelanggan" diubah menjadi "liabilitas
kontrak" mengikuti istilah yang digunakan dalam
PSAK 72.

Selain hal diatas, penerapan atas PSAK 72 tidak
memiliki dampak yang signifikan terhadap
laporan keuangan Grup pada 1 Januari 2020.

Penerapan atas PSAK 73 "Sewa"

Grup menerapkan PSAK 73 secara efektif untuk
tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020,
tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka
komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya
sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan
transisi khusus dalam standar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

**Changes to Statements of Financial
Accounting Standards ("SFAS") and
Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards ("IFAS") (continued)**

**The adoption of new/revised standards and
interpretations (continued)**

Adoption of SFAS 71 "Financial Instruments"
(continued)

The adoption of SFAS 71 resulted in an increase
in the provision for impairment of financial asset
by Rp6,708 which was recognised as an
adjustment to the retained earnings as at 1
January 2020, which comprised provision for
impairment of trade receivables of Rp4,935 and
contract assets of Rp1,773.

The overall impact of the adoption of SFAS 71
as at 1 January 2020 resulted in an increase in
retained earnings by Rp723 after taking into
account deferred tax impact.

Adoption of SFAS 72 "Revenue from Contracts
with Customers"

The Group has adopted SFAS 72 effective for
the financial year starting 1 January 2020. The
naming of the "Unbilled receivables" account in
the 2019 financial statements was changed to
"Contract assets" and "Advances from
customers" was changed to "Contract liabilities"
following the terms used in SFAS 72.

Apart from the above, the adoption of SFAS 72
did not have a significant impact on the Group's
financial statements as at 1 January 2020.

Adoption of SFAS 73 "Leases"

The Group has adopted SFAS 73 effective for
the financial year starting 1 January 2020, but
did not restate comparative figures for the
previous reporting period as permitted under the
specific transition provisions in the standard.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK") (lanjutan)**

**Penerapan dari standar dan interpretasi
baru/revisi (lanjutan)**

Penerapan atas PSAK 73 "Sewa" (lanjutan)

Pada saat penerapan PSAK 73, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30, "Sewa". Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental adalah sebesar 6,44% pada tanggal penerapan awal.

Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2019.

Dengan menerapkan standar ini, pada 1 Januari 2020, aset tetap Grup meningkat sebesar Rp80.913 yang terdiri dari reklasifikasi dari biaya dibayar di muka sebesar Rp356, pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp51.121, dan pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp131.678. Selain itu, liabilitas sewa Grup meningkat sebesar Rp131.678 akibat dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

**Changes to Statements of Financial
Accounting Standards ("SFAS") and
Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards ("IFAS") (continued)**

**The adoption of new/revised standards and
interpretations (continued)**

Adoption of SFAS 73 "Leases" (continued)

On the adoption of SFAS 73, the Group recognised right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as 'operating lease' under the principles of SFAS 30, "Leases". These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate as at 1 January 2020. The weighted average of the Group's incremental borrowing rate applied was 6.44% on the initial application date.

Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liabilities, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to the leases recognised in the statement of financial position as at 31 December 2019.

By applying this standard, as at 1 January 2020 the Group's property and equipment increased by Rp80,913 which comprised reclassification of prepaid expense amounting to Rp356, accrued lease payments related to the leases recognised in the statement of financial position as at 31 December 2019 which amounted to Rp51,121, and the recognition of leases had previously been recognised as operating leases amounting to Rp131,678. In addition, the Group's lease liabilities increased by Rp131,678 as a result of the recognition of lease obligations that had previously been recognised as operating leases.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

*Changes to Statements of Financial
Accounting Standards ("SFAS") and
Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards ("IFAS") (continued)*

Penerapan dari standar dan interpretasi
baru/revisi (lanjutan)

*The adoption of new/revised standards and
interpretations (continued)*

Penerapan atas PSAK 73 "Sewa" (lanjutan)

Adoption of SFAS 73 "Leases" (continued)

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi
yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30 pada
31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang
diakui berdasarkan PSAK 73 pada 1 Januari
2020 adalah sebagai berikut:

*The reconciliation between the operating lease
commitments disclosed under SFAS 30 as at 31
December 2019 and the lease liabilities
recognised under SFAS 73 as at 1 January 2020
is as follows:*

	Jumlah/ Amount	
Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 31 Desember 2019	137,853	<i>Operating lease commitments disclosed as at 31 December 2019</i>
Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga inkremental Grup	137,117	<i>Discounted using the Group's incremental borrowing rate</i>
Ditambah:		<i>Add:</i>
- Komitmen sewa yang tidak diungkapkan pada 31 Desember 2019	65,130	<i>Operating lease commitments that was - not disclosed as at 31 December 2019</i>
Dikurang:		<i>Less:</i>
- Sewa jangka pendek	(70,338)	<i>Short-term leases -</i>
- Sewa aset bernilai rendah	(231)	<i>Leases of low-value assets -</i>
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	131,678	<i>Lease liabilities recognised as at 1 January 2020</i>

Panduan Praktis

Practical expedient

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama
kalinya, Grup menerapkan cara praktis berikut
yang diizinkan oleh standar:

*In applying SFAS 73 for the first time, the Group
applies the following practical expedients
permitted by the standard:*

- 1) Sewa operasi yang masa sewanya berakhir
dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020
diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- 2) Menggunakan tinjauan ke belakang
(*hindsight*) dalam menentukan masa sewa
jika kontrak mengandung opsi untuk
memperpanjang atau menghentikan sewa;
- 3) Mengecualikan biaya langsung awal dari
pengukuran aset hak-guna pada tanggal
penerapan awal;
- 4) Menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk
portofolio sewa dengan karakteristik yang
cukup serupa; dan
- 5) Mengandalkan penilaian apakah sewa
bersifat memberatkan sesuai PSAK 57,
"Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset
Kontinjensi" segera sebelum tanggal
penerapan awal sebagai alternatif untuk
melakukan tinjauan penurunan nilai.

- 1) *Operating leases with a remaining lease
term of less than 12 months as at 1 January
2020 are treated as short-term leases;*
- 2) *The use of hindsight in determining the
lease term where the contract contains
options to extend or terminate the lease;*
- 3) *The exclusion of initial direct costs for the
measurement of the right-of-use asset at
the date of initial adoption*
- 4) *The use of a single discount rate for lease
portfolios with reasonably similar
characteristics; and*
- 5) *Reliance on the assessment of whether or
not leases are onerous based on SFAS 57,
"Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets" immediately before the
date of initial application as an alternative to
performing an impairment review.*

Grup tidak menerapkan PSAK 73 ini untuk
kontrak yang sebelumnya tidak diidentifikasi
mengandung sewa sesuai PSAK 30 dan ISAK 8.

*The Group does not apply SFAS 73 to contract
previously identified as not containing leases
under SFAS 30 and IFAS 8.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK") (lanjutan)**

PSAK dan ISAK lainnya

Standar dan interpretasi baru/revisi lain yang berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba"; dan
- ISAK 36 "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

**Changes to Statements of Financial
Accounting Standards ("SFAS") and
Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards ("IFAS") (continued)**

Other SFAS and IFAS

Other new and amended standards and interpretations that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2020 are as follows:

- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements";
- The amendments to SFAS 15 "Investments in Associates and Joint Ventures";
- The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Annual improvements on SFAS 1 "Presentation on Financial Statements";
- The amendments of SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement", SFAS 60 "Financial Instruments Disclosure" and SFAS 71 "Financial Instrument" about interest rate benchmark reform;
- The amendments of SFAS 71 "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation";
- The amendments of SFAS 73 "Lease" about rent concession related to COVID-19;
- IFAS 35 "Presentation of Financial Statements for Non-profit oriented Entities"; and
- IFAS 36 "Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in SFAS 16: Fixed Assets and SFAS 73: Leases".

Implementation of these standards does not result in substantial changes to the Group's accounting policies and has no material impact on the consolidated financial statements in the current period or the previous year.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK") (lanjutan)**

PSAK dan ISAK lainnya (lanjutan)

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2021:

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis"
- Amandemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi IBOR Tahap 2)";
- Amandemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi IBOR Tahap 2)";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan (Reformasi IBOR Tahap 2)"; dan
- Amandemen PSAK 73 "Sewa (Reformasi IBOR Tahap 2)".

Efektif 1 Januari 2022:

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis (Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan)";
- Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa".

Efektif 1 Januari 2023:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan (Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Panjang)".

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mengevaluasi dampak dari penerapan standar dan interpretasi diatas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

**Changes to Statements of Financial
Accounting Standards ("SFAS") and
Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards ("IFAS") (continued)**

Other SFAS and IFAS (continued)

New standards, amendments and interpretations issued but effective for the financial year beginning 1 January 2021 are as follows:

Effective 1 January 2021:

- The amendments to SFAS 22 "Business Combinations";
- The amendments to SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement (IBOR Reform Batch 2)";
- The amendments to SFAS 60 "Financial Instruments: Disclosures (IBOR Reform Batch 2)";
- The amendments to SFAS 71 "Financial Instruments (IBOR Reform Batch 2)"; and
- The amendments to SFAS 73 "Lease (IBOR Reform Batch 2)".

Effective 1 January 2022:

- The amendments to SFAS 22 "Business Combination (References to the Conceptual Framework of Financial Reporting)";
- The amendments to SFAS 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts";
- Annual improvement on SFAS 71 "Financial Instruments"; and
- Annual improvement on SFAS 73 "Lease".

Effective 1 January 2023:

- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements (Liabilities Classification as Short or Long-term)".

As at the completion date of the consolidated financial statements, the Group is still evaluating the impact of the application of the above standards and interpretations on the Group's consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Prinsip atas akuntansi konsolidasian dan
ekuitas (lanjutan)**

**b. Principles of consolidation and equity
accounting (continued)**

(i) Entitas anak

(i) Subsidiaries

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

(ii) Entitas asosiasi

(ii) Associates

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognised at cost.

(iii) Pengaturan bersama

(iii) Joint arrangements

Menurut PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor bukan struktur hukum dari pengaturan bersama. Grup telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama. Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui sebagai biaya pada laporan posisi keuangan.

Under SFAS 66 investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor rather than the legal structure of the joint arrangement. The Group has assessed the nature of its joint arrangement and determined them to be joint venture. Joint venture is accounted for using the equity method, after initially being recognised at cost in the statement of financial position.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**b. Prinsip atas akuntansi konsolidasian dan
ekuitas (lanjutan)**

(iv) Metode ekuitas (lanjutan)

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari investee pada laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lain dari investee atas pendapatan komprehensif lain.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas-entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi dan ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai.

c. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Principles of consolidation and equity
accounting (continued)**

(iv) Equity method (continued)

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the investor's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in the profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in the other comprehensive income.

When the Group's share of losses in an associate or joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates and joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in these entities. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the associates and joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Dividends received or receivable from associates or joint ventures are recognised as a reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investments is tested for impairment.

c. Foreign currency transactions

(i) Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional of the Company.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

c. Foreign currency transactions and balances

(ii) Transaksi dan saldo

(ii) Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into functional currency using the closing exchange rate. The exchange rate used as a benchmark is the rate that is issued by the Bank of Indonesia. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

The rates of exchange used are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rupiah/1 Dolar Amerika Serikat	14,105	13,901	Rupiah/1 United States

d. Kas dan setara kas

d. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or restricted.

e. Transaksi dengan pihak berelasi

e. Transactions with related parties

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

The Group have transactions with related parties. The definition of related parties is in accordance with SFAS No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Grup memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

Significant transactions and balances of the Group with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The Group elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

f. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha. Bila pembayaran diharapkan akan diterima dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Bila tidak, disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai.

g. Kontrak aset

Kontrak aset merupakan jumlah pendapatan yang belum ditagihkan pada akhir periode pelaporan keuangan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan.

h. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Transactions with related parties (continued)

Transactions with related parties are based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

f. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate ("EIR") method, less provision for impairment.

g. Contract Assets

Contract assets represent the unbilled amounts at the end of financial reporting period in respect of services performed.

h. Prepayments

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

i. Fixed assets

Fixed assets are initially stated at the cost of acquisition, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Cost of acquisition includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Aset tetap (lanjutan)

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi ketika terjadi.

Kapal milik Grup mengalami pengedokan secara berkala secara umum setiap 2 - 2,5 tahun dan biaya pengedokan tersebut dikapitalisasi sepanjang pengeluarannya dapat menunjukkan peningkatan manfaat ekonomis mendatang kapal. Kapitalisasi biaya tersebut dicatat sebagai penambahan ke harga perolehan kapal untuk kapal yang dimiliki sendiri dan kapal yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, atau dicatat sebagai biaya ditangguhkan untuk kapal yang disewa melalui sewa operasi, dan disusutkan selama periode hingga jadwal pengedokan berikutnya. Total biaya pengedokan terdahulu yang tersisa, jika ada, dihentikan pengakuannya dan dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan	20
Kendaraan dan alat berat	5 - 15
Peralatan kantor	5
Kapal	25
Peralatan kapal	5

Masa manfaat aset, nilai sisa, dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatat aset) diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

i. Fixed assets (continued)

All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are charged to the profit or loss as incurred.

The Group's vessels generally dock every 2 – 2.5 years and the docking costs are capitalised to the extent that the expenditure results in an increase in the future economic benefit of the vessels. The capitalised costs are recorded as an additional cost of the owned vessels and leased vessels under finance lease arrangements, or are recorded as deferred docking costs of leased vessels under operating lease arrangements, and the costs are amortised over the period up to the next scheduled dry-docking. Any remaining carrying amount of the cost of the previous docking is derecognised, and charged to current year profit or loss.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

	<i>Buildings</i>
	<i>Vehicles and heavy equipment</i>
	<i>Office equipment</i>
	<i>Vessels</i>
	<i>Vessel equipment</i>

The assets' useful lives, residual values and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the financial period-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss and in the period which the asset is derecognised.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Biaya konstruksi kapal dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

j. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika aset kualifikasian telah selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

i. Fixed assets (continued)

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

The costs of the construction of vessels are capitalised as construction in progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

j. Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised as part of the cost of those assets. Capitalisation of borrowing costs ceases when the qualifying assets are complete and ready for service.

k. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The recoverable amount is the higher of an asset's Fair Value Less Cost to Sell ("FVLCTS") and Value in Use ("VIU"). Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognised in the profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

**k. Impairment of non-financial assets
(continued)**

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan dapat untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuations or other available fair value indicators.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses recognised for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognised in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Sewa

I. Leases

Sebelum 1 Januari 2020

Before 1 January 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer to the lessee substantially all of risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Leases which do not transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

Pembayaran sewa operasi dibebankan pada laporan laba rugi selama periode sewa.

Payments made under operating leases are charged to profit or loss over the term of the lease.

Grup sebagai lessee:

The Group as a lessee:

- i) Dalam sewa pembiayaan, Grup mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa pembiayaan. Biaya keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontingen dibebankan pada periode terjadinya. Aset sewa (disajikan sebagai bagian dari aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dengan masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.
- ii) Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

- i) *Under a finance lease, the Group recognises assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of the leased assets or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments are apportioned between the finance cost and the reduction of the finance lease liability. The finance cost is allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. The contingent lease is charged as an expense in the period in which it is incurred. Leased assets (presented as part of fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful lives of the assets and the lease terms, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership of the assets by the end of the lease terms.*
- ii) *Under an operating lease, the Group recognises lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease terms.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Sewa (lanjutan)

I. Leases (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Before 1 January 2020 (continued)

Grup sebagai lessor:

The Group as a lessor:

- i) Dalam sewa pembiayaan, Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.
- ii) Dalam sewa operasi, Grup mengajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewa dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

- i) Under a finance lease, the Group recognises and presents finance lease receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investments as lessors in finance leases.
- ii) Under an operating lease, the Group presented assets subject to operating leases in its statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents, if any, are recognised as revenue in the period in which they are earned. Lease income from operating leases is recognised as income on a straight-line basis over the lease terms.

Setelah 1 Januari 2020

After 1 January 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau, setelah 1 Januari 2020.

From 1 January 2020, the Group has applied SFAS 73 which sets the requirements for the recognition of lease liabilities in relation to leases previously classified as 'operating leases'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or, after 1 January 2020.

Grup sebagai penyewa

The Group as lessee

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

I. Sewa (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan harus berbeda secara fisik atau secara substansial mewakili seluruh kapasitas aset. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Grup memiliki hak ini hanya jika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan telah ditentukan sebelumnya, dan:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dan mencatat komponen sewa dan non-sewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Leases (continued)

After 1 January 2020 (continued)

The Group as lessee (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The contract involves the use of an identified asset - this can be explicitly specified or implicitly, and must be physically distinct or represents substantially all of the total capacity. If the supplier has substantive substitution rights, then there is no identified asset; and
- The Group has the right to obtain substantially all economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right only if it has the rights to make relevant decisions about how and for what purpose the asset is being used is predetermined, and:
 1. The Group has the right to operate the asset; and
 2. The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purposes it will be used throughout the period of use

At the inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone prices of the non-lease component. However, for the leases of improvements whereby the Group is a lessee, the Group has elected not to separate non-lease components and to account for the lease and non-lease components as a single lease component.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Sewa (lanjutan)

I. Leases (continued)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

After 1 January 2020 (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as lessee (continued)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Lease liabilities are measured at the present value of any unpaid lease payments at the inception date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that interest rate cannot be determined, then using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses the incremental borrowing rate as the interest rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Sewa (lanjutan)

I. Leases (continued)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

After 1 January 2020 (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as lessee (continued)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities as separate line items in the statement of financial position.

Sewa jangka pendek dan yang aset dasarnya bernilai rendah

Short-term leases and leases of low-value assets

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Modifikasi sewa

Lease modifications

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

The Group accounts for a lease modifications as a separate leases if both the:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

- *modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

I. Sewa (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Leases (continued)

After 1 January 2020 (continued)

Lease modifications (continued)

For a lease modifications that are not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease;*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right of-use asset for all other lease modifications.*

The Group as lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

l. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai pesewa (lanjutan)

Dalam sewa pembiayaan, dimana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Grup mengakui pembayaran sewa yang diterima dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai pesewa-antara

Ketika Grup adalah pesewa-antara, Grup memperhitungkan kepentingannya di sewa utama dan subsewa secara terpisah. Grup mengklasifikasikan suatu subsewa dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama, bukan dengan mengacu pada aset pendasar. Jika sewa utama adalah sewa jangka pendek di mana Grup sebagai penyewa telah menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek tersebut, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

m. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha lain-lain berkaitan dengan transaksi pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha normal. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar (dikurangi biaya transaksi) dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Leases (continued)

The Group as lessor (continued)

Under a finance lease, where the Group transfers substantially all of the risks and rewards related to the ownership of the leased item, the Group recognised and presents a finance lease receivables in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment as lessors in finance leases.

The Group recognises lease payments received under operating leases as income on a straight-line basis over the lease term.

The Group as intermediate lessor

When the Group acts as intermediate lessor, it accounts for its interests in the head lease and the sub-lease separately. The Group assesses the lease classification of a sub-lease with reference to the right-of-use asset arising from the head lease, not with reference to the underlying asset. If a head lease is a short-term lease to which the Group applies the exemption for short term lease, then it classifies the sub-lease as an operating lease.

m. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are amounts due to third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value (net of transaction cost) and subsequently measured at amortised cost using the EIR method.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Pinjaman

n. Borrowings

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode SBE.

Borrowings are recognised initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the year of the borrowing, using the EIR method.

Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode dari fasilitas yang terkait.

Fees paid on the establishment of the loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Biaya pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Borrowing costs either directly or indirectly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalised as part of the cost of that asset until such time as the asset is substantially ready for its intended use or sale. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. All other borrowing costs are recognised in the profit or loss in the period in which they are incurred.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar kecuali Grup mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal laporan pelaporan.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Perpajakan

o. Taxation

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

The current income tax charge is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions, where appropriate, based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Pendapatan usaha Grup ada yang terkena pajak penghasilan final. Penghasilan Grup atas pendapatan dari jasa perkapalan yang diberikan kepada perusahaan domestik dikenakan pajak final dengan tarif 1,20% sesuai dengan Undang-undang Perpajakan di Indonesia.

Certain revenues are subject to final income tax. The Group's vessel charter income provided to Indonesian companies is subject to a final tax at a rate of 1.20% and under the Taxation Laws of Indonesia.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan konsolidasian. Pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis dan saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. The deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination and when the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Perpajakan (lanjutan)

o. Taxation (continued)

Aset pajak tangguhan berasal dari pajak yang dapat dikompensasi diakui jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

The deferred tax assets of the tax loss carried forward are recognised when it is probable that there will be future taxable profit available against which the unused tax losses can be utilised. Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan akan saling hapus jika ada hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan jika aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh otoritas pajak yang sama pada entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda serta jika ada keinginan untuk melakukan penyelesaian saldo secara neto.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

p. Liabilitas imbalan kerja

p. Employee benefits liabilities

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service, or compensation.

Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau KKB adalah program pensiun imbalan pasti.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labour Law No. 13/2003 or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Labour Law and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir periode dikurangi nilai wajar aset program.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the period end date less the fair value of plan assets.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

p. Employee benefits liabilities (continued)

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality Government bonds (considering that currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui dalam laporan laba rugi pada beban imbalan kerja dimana mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in the profit or loss in employee benefits expenses reflecting the increase in the defined benefit obligation resulting from employee service in the current year.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

Past service costs are recognised immediately in the profit or loss.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke laba komprehensif lainnya yang merupakan bagian dari cadangan lainnya pada tahun dimana terjadinya perubahan tersebut.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of other reserves in the year in which they arise.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in the profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

q. Instrumen keuangan

q. Financial instruments

1. Aset keuangan

1. Financial assets

Sebelum 1 Januari 2020

Before 1 January 2020

Pengakuan awal dan pengukuran

Initial recognition and measurement

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman dan piutang, dan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan. Pada tanggal pelaporan keuangan, Grup hanya memiliki aset keuangan dengan kategori sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dan instrumen tersedia untuk dijual.

The Group classifies its financial assets into the following categories: at fair value through the profit or loss, held-to-maturity investments, loans and receivables, and available-for-sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. As at the reporting date, the Group only has financial assets which are categorised as loans and receivables and available-for-sale.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Before 1 January 2020 (continued)

**Pengakuan awal dan pengukuran
(lanjutan)**

**Initial recognition and measurement
(continued)**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak dikutip pada pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang Grup terdiri dari "kas dan setara kas", "piutang usaha", dan "kontrak aset" pada laporan posisi keuangan.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are included in current assets, except for those with maturities greater than 12 months after the end of the reporting period. These are classified as non-current assets. The Group's loans and receivables comprise "cash and cash equivalents", "trade receivables" and "contract assets" in the statement of financial position.

Pinjaman dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Loans and receivables are initially recognised at fair value including directly attributable transaction costs and are subsequently carried at amortised cost using the EIR method.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Grup telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian yang memenuhi kriteria "pass-through"; dan (a) Grup telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Grup secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

A financial asset is derecognised when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all of the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Penurunan nilai

Impairment

Pada setiap akhir periode pelaporan Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

At the end of each reporting period the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Before 1 January 2020 (continued)

Penurunan nilai (lanjutan)

Impairment (continued)

Pada setiap tanggal akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa kerugian") dan peristiwa rugi tersebut memiliki dampak pada arus kas masa depan diestimasi atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events occurring after the initial recognition of the asset (a "loss event") with that loss event (or events) having an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini arus kas masa depan diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan SBE awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo memiliki tingkat bunga bervariasi, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

For the loans and receivables category, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original EIR. The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity investment has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Group may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price.

Jika, pada periode selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitor), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the reversal of the previously recognised impairment loss is recognised in the profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Setelah 1 Januari 2020

After 1 January 2020

Klasifikasi

Classification

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah sebagai berikut:

From 1 January 2020, the Group adopted SFAS No. 71, which sets the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets, and in hedge accounting. Therefore, the accounting policies applied for the current reporting period are as follows:

Secara umum, aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

In general, financial assets are classified in the following two categories:

1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

1. *Financial assets at amortised cost; and*
2. *Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").*

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

Pada tanggal pelaporan keuangan, Grup hanya memiliki aset keuangan dengan kategori sebagai biaya diamortisasi dan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dengan kategori biaya diamortisasi terdiri dari "kas dan setara kas", "kas yang dibatasi penggunaannya", "piutang usaha", "kontrak aset" dan "piutang sewa pembiayaan". Aset keuangan dengan kategori nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari "penyertaan saham".

As at the reporting date, the Group only has financial assets which are categorised as amortised cost and fair value through other comprehensive income. The Group's amortised costs comprise "cash and cash equivalents", "restricted cash", "trade receivables", "contract assets" and "finance lease receivables". The Group's fair value through other comprehensive income comprises "investment in shares".

Grup memiliki investasi dalam instrumen ekuitas, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

The Group has investments in equity instruments which are classified as financial assets at FVOCI.

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

After 1 January 2020 (continued)

Pengakuan dan pengukuran

Recognition and measurement

Pembelian dan penjualan aset keuangan diakui pada saat tanggal perdagangan dimana, Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut telah kadaluwarsa atau dialihkan dan Grup telah mengalihkan secara substansial risiko dan manfaat atas kepemilikan.

Regular purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date, i.e., the date on which the group commits to purchase or sell the asset. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership.

Saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

Instrumen utang

Debt instruments

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasikan instrumen utang:

Subsequent measurement of debt instruments depends on the business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

- Biaya perolehan diamortisasi:
Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya bersama dengan keuntungan dan kerugian selisih kurs. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

- *Amortised cost:*
Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows solely represent payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses) together with foreign exchange gains and losses. Impairment losses are presented as a separate line item in the profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

After 1 January 2020 (continued)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

**Recognition and measurement
(continued)**

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:

Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lain-lain, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.

- Nilai wajar melalui laba rugi
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

- FVOCI:

Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where payments of principal and interest are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment expenses are presented as separate line item in the statement of profit or loss.

- FVTPL
Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognised in the profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

After 1 January 2020 (continued)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

**Recognition and measurement
(continued)**

Instrumen ekuitas

Equity instruments

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Investasi pada instrumen ekuitas tidak diuji penurunan nilai.

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Equity investments are not tested for impairment.

Penurunan nilai aset keuangan

Impairment of financial assets

Sejak 1 Januari 2020, Grup mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa pembiayaan tanpa komponen pendanaan yang signifikan diukur dengan jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umurnya. KKE sepanjang umurnya adalah KKE yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

Since 1 January 2020, the Group has recognised impairment loss provision for expected credit losses (ECLs) on financial assets measured at amortised cost. Impairment loss provision for trade receivables, contract assets and finance lease receivables without a significant financing component are measured at an amount equal to lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

After 1 January 2020 (continued)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan. Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan KKE, Grup mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perseroan dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's historical experience, credit rating and future information.

KKE adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Grup harapkan untuk diterima). KKE didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

ECLs are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa suatu aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat diobservasi sebagai berikut:

At each reporting date, the Group assesses whether financial assets carried at amortised cost are credit-impaired. A financial asset is 'credit-impaired' when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari pelanggan;
- pelanggaran kontrak seperti gagal bayar; atau
- ada kemungkinan bahwa pelanggan akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya.

- *significant financial difficulty of the customer;*
- *breach of contract such as default; or*
- *it is probable that the customer will enter bankruptcy or other financial reorganization.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

2. Liabilitas keuangan

2. Financial liabilities

Pengakuan awal dan pengukuran

Initial recognition and measurement

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai pada saat pengakuan awal. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortised cost, or derivatives that are designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi pada awalnya dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at their fair values plus directly attributable transaction costs.

Seluruh liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi.

All of the Group's financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortised cost.

Liabilitas keuangan Grup mencakup utang usaha, utang lain-lain pihak berelasi, biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman jangka panjang.

The Group's financial liabilities include trade payables, other payables to related parties, accrued expenses and long-term borrowings.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

After initial recognition, financial liabilities measured at amortised cost are subsequently measured at amortised cost using the EIR method.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Gains and losses are recognised in the statement of profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the amortisation process.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognised when, and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

2. Financial liabilities (continued)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Derecognition (continued)

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

When an existing financial liability is replaced by another financial liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the profit or loss.

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

3. Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, the entity currently has a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

r. Provisi

r. Provision

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai total kewajiban tersebut dibuat.

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Pengakuan pendapatan dan beban

s. Revenue and expense recognition

Pendapatan

Revenue

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

Revenue recognition has to fulfill five steps of assessment:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di yang tertuang dalam nilai kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

1. *Identify contract(s) with customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each the distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin; and*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of said goods or services).*

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. Suatu titik waktu; atau
- b. Suatu periode waktu. Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- a. *A point in time; or*
- b. *Over time. For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

s. Revenue and expense recognition (continued)

Pendapatan (lanjutan)

Revenue (continued)

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Payment of the transaction price differs for each contract. A contract asset is recognised when the consideration paid by the customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised when the consideration paid by the customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Tabel berikut ini menunjukkan perubahan atas perlakuan akuntansi pada tipe pendapatan yang terdampak PSAK 72:

The following table shows the changes in the accounting treatment of the types of revenue affected by SFAS 72:

Pendapatan / Revenue	2020 (PSAK 72 / SFAS 72)	2019 (PSAK 23 / SFAS 23)
Jasa pengelolaan kapal dan broker kapal	Pendapatan dari jasa pengelolaan kapal dan jasa broker kapal diakui pada waktu tertentu saat pengendalian atas jasa diserahkan kepada pelanggan. Untuk jasa broker kapal, arus masuk bruto manfaat ekonomi mencakup jumlah yang ditagih untuk kepentingan prinsipal yang tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas Grup. Jumlah yang ditagih atas nama prinsipal bukan merupakan pendapatan. Pendapatan jasa broker kapal diakui senilai pendapatan bersih atas jasa keagenan kapal atau senilai komisi pada waktu tertentu saat pengendalian atas jasa diserahkan kepada pelanggan.	Pendapatan dari jasa pengelolaan kapal dan jasa broker kapal diakui pada saat penyerahan jasa kepada pelanggan. Pendapatan jasa broker kapal diakui senilai pendapatan bersih atas jasa keagenan kapal atau senilai komisi pada waktu tertentu saat pengendalian atas jasa diserahkan kepada pelanggan.
Ship management and charter broker services	<i>Revenue on ship management and charter broker service is recognised when at a point in time when control over the services is rendered to the customers.</i> <i>For charter broker service, the gross inflows of economic benefits include amounts collected on behalf of the principal which do not result in increases of the Group's equity. The amounts collected on behalf of the principle are not revenue. The charter broker revenue is recognised at the net amount of agency services or equal to the commission at a point in time when control over the services is provided to the customers.</i>	<i>Revenue on ship management and charter broker services is recognised when the services are rendered to the customers.</i> <i>The charter broker revenue is recognised at the net amount of agency services or equal to the commission at a point in time when control over the services is provided to the customers.</i>

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

s. Revenue and expense recognition (continued)

Penerapan panduan praktis

Application of practical expedient

Grup memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak menyesuaikan jumlah imbalan atas efek komponen pendanaan signifikan, jika Grup mengharapkan, saat kontrak dimulai, bahwa periode antara saat Grup mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan saat pelanggan melakukan pembayaran atas barang atau jasa adalah satu tahun atau kurang.

The Group applies the practical expedient to not adjust the promised amount of consideration for the effects of a significant financing component if the Group expects, at contract inception, that the period between when the Group transfers a promised good or services to the customer and when the customer pays for the goods or services will be one year or less.

Pendapatan Bunga

Interest revenue

Pendapatan atau biaya bunga untuk semua instrumen keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dicatat menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sebagaimana mestinya, digunakan periode yang lebih singkat, sampai mencapai nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Interest income or expense on all financial instruments measured at amortised cost is recorded using the EIR method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Beban

Expenses

Sebelum 1 Januari 2020

Before 1 January 2020

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Setelah 1 Januari 2020

After 1 January 2020

Beban dari kontrak dengan pelanggan

Expenses from contracts with customers

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak dan menghasilkan meningkatkan atau meningkatkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") dan biaya incremental untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") diakui sebagai aset bila biaya tersebut memenuhi syarat untuk dikapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diharapkan akan dipulihkan. Aset ini diamortisasi dengan dasar sistematis yang konsisten dengan pengalihan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset tersebut.

The costs that directly relate to the contract generate or enhance resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") and incremental costs of obtaining a contract ("cost to obtain") are recognised as assets if they meet the criteria for capitalisation under SFAS 72 and expected to be recovered. These assets are amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which the assets relates

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban lainnya

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Penerapan panduan praktis

Grup memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk mengakui biaya yang terjadi untuk mendapatkan kontrak sebagai beban saat terjadinya jika periode amortisasi aset tersebut adalah satu tahun atau kurang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Revenue and expense recognition (continued)

Other expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Application of practical expedient

The Group applies the practical expedient to recognise the incremental cost of obtaining a contracts as an expense when incurred if the amortisation period of the asset that the Group otherwise would have recognised is one year or less.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2q.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements:

Financial assets and liabilities classifications

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2q.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun finansial berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Rugi penurunan nilai piutang

Grup menghitung KKE piutang usaha dan piutang lain-lain. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that carry a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Impairment loss on receivables

The Group calculates ECL for trade receivables and other receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customers' actual default in the future.

Estimating the useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation, as anchored to business plans and strategies that also consider expected market behaviour. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Lihat Catatan 10 untuk pengungkapan lebih lanjut.

Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya neto imbalan pascakerja mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi- asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan pascakerja lainnya termasuk asumsi kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 2p dan 17.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Estimating useful lives of fixed assets (continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The Group estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 and 25 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 10.

Post-employment benefit

The present value of post-employment liabilities depends on several factors that are determined via an actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the net cost of post-employment benefits include discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amounts of post-employment liabilities.

The appropriate discount rate at the end of the reporting period is the interest rate used in determining the present value of estimated future cash outflows expected to settle other post-employment liabilities. In determining the appropriate level of interest rates, the Group consider the interest rates of Government bonds denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid, and which have a time periods similar to those of related employment benefits liability.

The key assumptions used for determining post-employment liabilities include current market conditions. Additional information is disclosed in Notes 2p and 17.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan dan pajak lainnya

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan pengurangan beban tertentu dalam mengestimasi provisi beban pajak penghasilan untuk Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Penghasilan usaha Grup ada yang dikenakan pajak penghasilan final.

Grup mengestimasi bagian final atas biaya umum yang tidak dapat dipisahkan antara bagian pajak penghasilan final dan tidak final dengan alokasi secara proporsional berdasarkan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final terhadap penghasilan bruto.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Kantor Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisa terhadap semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Income taxes and other taxes

Judgements and assumptions are required to determine the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for the Group. In particular, the calculation of the Group's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain, during the ordinary course of business.

Certain revenues of the Group are subject to final income tax.

The Group estimates the final portion of general expenses that cannot be itemised between the final and non-final income tax portion, using an allocation based on proportion of revenue subject to final income tax to the gross revenue.

All judgements and estimates taken by management, as discussed above, may be challenged by the Tax Office. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognised in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognised in accordance with SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Group conducts an analysis of all tax positions related to income taxes in order to determine if a tax liability for unrecognised tax expense should be recognised.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan dan pajak lainnya (lanjutan)

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2o dan 15.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai penggunaan.

Penentuan nilai wajar dan nilai yang digunakan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi volume *transaksi time charter*, harga jual *time charter* (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya operasi, dan belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Income taxes and other taxes (continued)

The Group recognises liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Notes 2o and 15.

Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss recognised to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

The determination of the fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected time charter transaction volumes, time charter selling prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Reserve estimates' above), operating costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in profit or loss.

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada berdasarkan PSAK 73, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Leases (continued)

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased asset are transferred to the lessee based on SFAS 73, which requires the Group to make judgements and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of a leased asset.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management used the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kas			Cash on hand
Dolar AS	3,807	3,026	US Dollar
Rupiah	<u>1,430</u>	<u>2,145</u>	Rupiah
Jumlah kas	<u>5,237</u>	<u>5,171</u>	Total cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 24)			entities (Note 24)
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk.	56,143	63,643	(Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	105,784	204,815	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia.
(Persero) Tbk.	<u>65</u>	<u>22</u>	(Persero) Tbk.
	<u>161,992</u>	<u>268,480</u>	
Pihak ketiga	<u>77,792</u>	<u>22,683</u>	Third parties
Dolar AS			US Dollar
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 24)			entities (Note 24)
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk.	335,221	93,965	(Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	6,232	4,439	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.	<u>65</u>	<u>64</u>	(Persero) Tbk.
	<u>341,518</u>	<u>98,468</u>	
Pihak ketiga	<u>26,426</u>	<u>42,650</u>	Third parties
Jumlah kas di bank	<u>607,728</u>	<u>432,281</u>	Total cash in banks
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 24)			entities (Note 24)
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk.	<u>2,000</u>	<u>2,500</u>	(Persero) Tbk.
Pihak ketiga	<u>-</u>	<u>93,834</u>	Third parties
Dolar AS			US Dollar
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 24)			entities (Note 24)
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk.	14,104	139,009	(Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.	<u>-</u>	<u>41,703</u>	(Persero) Tbk.
	<u>14,104</u>	<u>180,712</u>	
Pihak ketiga	<u>23,414</u>	<u>-</u>	Third parties
Jumlah deposito berjangka	<u>39,518</u>	<u>277,046</u>	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	<u>652,483</u>	<u>714,498</u>	Total cash and cash equivalents

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rupiah	3.00%	4.50% - 6.00%
Dolar AS	0.3% - 1.80%	0.75% - 3.20%

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

The annual interest rates on time deposits during the year were as follows:

Rupiah
US Dollar

5. PIUTANG USAHA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak berelasi (Catatan 24)		
PT Pertamina (Persero)	401,848	236,460
PT Perta Arun Gas	39,293	26,210
PT Pertamina International Shipping	37,174	2,858
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	14,393	12,916
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	7,490	649
PT Trans Yeong Maritime	7,398	7,365
PT Nusantara Regas	2,404	1,194
PT Pertamina Hulu Energi WMO	2,139	216
PT Pertamina Retail	1,473	8,456
PT Pertamina Patra Niaga	246	2,294
PT Pertamina Hulu Mahakam	-	9,297
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2,000)	2,343	3,199
	<u>516,201</u>	<u>311,114</u>

Provisi penurunan nilai pihak berelasi	<u>(161)</u>	<u>-</u>

Jumlah piutang berelasi, neto	<u>516,040</u>	<u>311,114</u>

Pihak ketiga	206,273	181,757

Provisi penurunan nilai pihak ketiga	<u>(96,555)</u>	<u>(95,253)</u>

Jumlah piutang pihak ketiga, neto	<u>109,718</u>	<u>86,504</u>

Jumlah piutang usaha, neto	<u>625,758</u>	<u>397,618</u>

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak berelasi		
0 - 30 hari	421,249	220,618
30 - 90 hari	68,219	68,100
90 - 365 hari	26,395	13,825
Lebih dari 365 hari	338	8,571
	<u>516,201</u>	<u>311,114</u>

Provisi penurunan nilai pihak berelasi	<u>(161)</u>	<u>-</u>

Jumlah piutang berelasi, neto	<u>516,040</u>	<u>311,114</u>

5. TRADE RECEIVABLES

Related parties (Note 24)
PT Pertamina (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Trans Yeong Maritime
PT Nusantara Regas
PT Pertamina Hulu Energi WMO
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Hulu Mahakam

Others (each below Rp2.000)

Provision for doubtful accounts of related parties

Total related parties, net

Third parties
Provision for doubtful accounts of third parties

Total third parties, net

Total trade receivables, net

The details of trade receivables based on aging schedule are as follows:

Related parties
0 - 30 days
30 - 90 days
90 - 365 days
More than 365 days

Provision for doubtful accounts of related parties

Total related parties, net

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
0 - 30 hari	88,150	38,455	<i>0 - 30 days</i>
30 - 90 hari	19,624	22,379	<i>30 - 90 days</i>
90 - 365 hari	6,212	25,340	<i>90 - 365 days</i>
Lebih dari 365 hari	92,287	95,583	<i>More than 365 days</i>
	<u>206,273</u>	<u>181,757</u>	
Provisi penurunan nilai pihak ketiga	(96,555)	(95,253)	<i>Provision for doubtful accounts of third parties</i>
Jumlah piutang pihak ketiga, neto	109,718	86,504	<i>Total third parties, net</i>
Mutasi saldo provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:			<i>The movements in the provision for impairment of trade receivables are as follows:</i>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Saldo awal	95,253	95,122	<i>Beginning balance</i>
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	4,935	-	<i>Opening balance adjustment upon initial adoption of SFAS 71</i>
Penambahan	2,111	16,229	<i>Additions</i>
Pemulihan	(5,583)	(16,098)	<i>Recovery</i>
Jumlah	96,716	95,253	<i>Total</i>
Manajemen berkeyakinan bahwa provisi penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha.			<i>Management believes that the provision for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables.</i>

6. KONTRAK ASET

6. CONTRACT ASSETS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak berelasi (Catatan 24)			<i>Related parties (Note 24)</i>
PT Pertamina (Persero)	423,299	258,515	<i>PT Pertamina (Persero)</i>
PT Pertamina International Shipping	106,575	24,151	<i>PT Pertamina International Shipping</i>
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	35,757	1,162	<i>PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur</i>
PT Pertamina Retail	16,350	9,169	<i>PT Pertamina Retail</i>
PT Perta Arun Gas	11,603	9,294	<i>PT Perta Arun Gas</i>
PT Pertamina Hulu Mahakam	10,457	12,171	<i>PT Pertamina Hulu Mahakam</i>
PT Pertamina Hulu Energi OSES	6,690	10,735	<i>PT Pertamina Hulu Energi OSES</i>
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	5,231	47,219	<i>PT Pertamina Hulu Energi ONWJ</i>
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	2,921	975	<i>PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.</i>
PT Pertamina EP	2,657	147	<i>PT Pertamina EP</i>
PT Nusantara Regas	1,347	4,079	<i>PT Nusantara Regas</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	-	22,491	<i>PT Adhi Karya (Persero) Tbk.</i>
PT Pertamina Gas	-	2,689	<i>PT Pertamina Gas</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2.000)	2,558	6,648	<i>Others (each below Rp2,000)</i>
	<u>625,445</u>	<u>409,445</u>	
Provisi penurunan nilai pihak berelasi	(324)	-	<i>Provision for doubtful accounts of related parties</i>
Jumlah kontrak aset berelasi, neto	625,121	409,445	<i>Total contract assets related parties, net</i>

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. KONTRAK ASET (lanjutan)

6. CONTRACT ASSETS (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga	178,772	168,697	Third parties
Provisi penurunan nilai pihak ketiga	<u>(1,449)</u>	<u>-</u>	Provision for doubtful accounts third parties
Jumlah kontrak aset pihak ketiga, neto	<u>177,323</u>	<u>168,697</u>	Total contract assets third parties, net
Jumlah	<u>802,444</u>	<u>578,142</u>	Total

Mutasi saldo provisi penurunan nilai kontrak aset adalah sebagai berikut:

the movements in the provision for impairment of contract assets are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	<u>1,773</u>	<u>-</u>	Opening balance adjustment upon initial adoption of SFAS 71
Jumlah	<u>1,773</u>	<u>-</u>	Total

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

7. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Uang muka karyawan	16,278	12,992	Employee advances
Uang muka kerja	17,752	7,753	Operational advances
Biaya dibayar di muka	5,552	2,338	Prepaid expenses
Lain-lain	<u>2,073</u>	<u>1,662</u>	Others
Jumlah	<u>41,655</u>	<u>24,745</u>	Total

Uang muka kerja merupakan uang muka yang diberikan kepada karyawan untuk kegiatan operasional Grup.

Advances for operational activities represent advances paid to employees for the operational activities of the Group.

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES

Analisa jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa pembiayaan neto adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of gross finance lease receivables and net finance lease receivables is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Piutang sewa pembiayaan bruto:			Gross finance lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	22,488	24,191	Due within one year
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	<u>64,377</u>	<u>88,406</u>	Due between two and five years
	<u>86,865</u>	<u>112,597</u>	
Dikurangi: pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(4,370)</u>	<u>(10,971)</u>	Less: unearned finance lease income
Piutang sewa pembiayaan neto	<u>82,495</u>	<u>101,626</u>	Net finance lease receivables

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Piutang sewa pembiayaan neto:			Net finance lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	20,624	20,325	Due within one year
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	<u>61,871</u>	<u>81,301</u>	Due between two and five years
Jumlah	<u>82,495</u>	<u>101,626</u>	Total

9. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

9. INVESTMENT IN JOINT VENTURE

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pada awal tahun	73,083	55,066	At the beginning of the year
Bagian atas laba bersih	22,283	30,403	Share of net profit
Dividen yang diterima	<u>(20,941)</u>	<u>(12,386)</u>	Dividends receipt
Saldo akhir	<u>74,425</u>	<u>73,083</u>	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup memiliki ventura bersama sebagai berikut:

As at 31 December 2020 and 2019, the Group had the following joint venture:

<u>Nama entitas/ Name of entity</u>	<u>Lokasi usaha/Place of business</u>	<u>Persentase kepemilikan/ % of ownership interest</u>	<u>Kegiatan usaha/ Business activity</u>	<u>Metode pengukuran/ Measurement method</u>
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Indonesia	51%	Menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut/Conduct activities related to shipping and harbour services	Ekuitas/ Equity

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan TYM pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jumlah aset	346,311	387,056
Jumlah liabilitas	<u>(200,381)</u>	<u>(243,756)</u>
Aset neto	<u>145,930</u>	<u>143,300</u>
Laba bersih tahun berjalan	<u>43,691</u>	<u>59,613</u>

Tidak ada liabilitas kontijensi terkait dengan investasi pada TYM.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai investasi, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama.

9. INVESTMENT IN JOINT VENTURE (continued)

Set out below is the summary of financial information for TYM as at 31 December 2020 and 2019, accounted for using the equity method:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Total assets	346,311	387,056	Total assets
Total liabilities	<u>(200,381)</u>	<u>(243,756)</u>	Total liabilities
Net assets	<u>145,930</u>	<u>143,300</u>	Net assets
Net profit for the year	<u>43,691</u>	<u>59,613</u>	Net profit for the year

There is no contingent liability related to the Company investment in TYM.

Management is of the opinion that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of the investment, therefore, no provision for impairment in the value of investment in a joint venture is necessary.

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

	<u>2020</u>				
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Harga perolehan					Cost
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					<u>Non-shipping fixed assets</u>
Tanah	33,058	578	5,105	38,741	Land
Bangunan	81,627	2,102	1,900	85,629	Buildings
Kendaraan dan alat berat	3,740	202	13,774	17,716	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	<u>16,309</u>	<u>276</u>	<u>-</u>	<u>16,585</u>	Office equipments
	<u>134,734</u>	<u>3,158</u>	<u>20,779</u>	<u>158,671</u>	
<u>Aset tetap pelayaran</u>					<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	3,551,628	-	104,514	3,656,142	Vessels
Peralatan kapal	<u>3,817</u>	<u>-</u>	<u>100,837</u>	<u>104,654</u>	Vessel equipments
	<u>3,555,445</u>	<u>-</u>	<u>205,351</u>	<u>3,760,796</u>	
Aset dalam penyelesaian	<u>59,408</u>	<u>988,503</u>	<u>(226,130)</u>	<u>821,781</u>	Construction in progress
<u>Aset sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	<u>207</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>207</u>	Vehicles
Jumlah	<u>3,749,794</u>	<u>991,661</u>	<u>-</u>	<u>4,741,455</u>	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					<u>Non-shipping fixed assets</u>
Bangunan	39,737	4,380	-	44,117	Buildings
Kendaraan dan alat berat	3,457	1,609	-	5,066	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	<u>12,781</u>	<u>771</u>	<u>-</u>	<u>13,552</u>	Office equipments
	<u>55,975</u>	<u>6,760</u>	<u>-</u>	<u>62,735</u>	
<u>Aset tetap pelayaran</u>					<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	940,051	163,248	-	1,103,299	Vessels
Peralatan kapal	<u>3,191</u>	<u>51,707</u>	<u>-</u>	<u>54,898</u>	Vessel equipment
	<u>943,242</u>	<u>214,955</u>	<u>-</u>	<u>1,158,197</u>	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	<u>457</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>457</u>	Vehicles
Jumlah akumulasi penyusutan	<u>999,674</u>	<u>221,715</u>	<u>-</u>	<u>1,221,389</u>	Total accumulated depreciation
Nilai buku	<u>2,750,120</u>			<u>3,520,066</u>	Net book value

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

	2019				
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Harga perolehan					Cost
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					<u>Non-shipping fixed assets</u>
Tanah	31,902	1,156	-	33,058	Land
Bangunan	73,700	7,927	-	81,627	Buildings
Kendaraan dan alat berat	3,740	-	-	3,740	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	15,457	852	-	16,309	Office equipments
	<u>124,799</u>	<u>9,935</u>	<u>-</u>	<u>134,734</u>	
<u>Aset tetap pelayaran</u>					<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	3,358,945	-	192,683	3,551,628	Vessels
Peralatan kapal	3,817	-	-	3,817	Vessel equipments
	<u>3,362,762</u>	<u>-</u>	<u>192,683</u>	<u>3,555,445</u>	
Aset dalam penyelesaian	45,151	206,940	(192,683)	59,408	Construction in progress
<u>Aset sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	207	-	-	207	Vehicles
Jumlah	<u>3,532,919</u>	<u>216,875</u>	<u>-</u>	<u>3,749,794</u>	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					<u>Non-shipping fixed assets</u>
Bangunan	35,573	4,164	-	39,737	Buildings
Kendaraan dan alat berat	3,090	367	-	3,457	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	11,880	901	-	12,781	Office equipments
	<u>50,543</u>	<u>5,432</u>	<u>-</u>	<u>55,975</u>	
<u>Aset tetap pelayaran</u>					<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	751,663	188,388	-	940,051	Vessels
Peralatan kapal	3,106	85	-	3,191	Vessel equipment
	<u>754,769</u>	<u>188,473</u>	<u>-</u>	<u>943,242</u>	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	457	-	-	457	Vehicles
Jumlah akumulasi penyusutan	<u>805,769</u>	<u>193,905</u>	<u>-</u>	<u>999,674</u>	Total accumulated depreciation
Nilai buku	<u>2,727,150</u>			<u>2,750,120</u>	Net book value

Penyusutan dialokasi sebagai berikut:

Depreciation is allocated as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	218,086	190,600	Cost of revenue (Note 20)
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	3,629	3,305	General and administrative expenses (Note 21)
Jumlah	<u>221,715</u>	<u>193,905</u>	Total

Beberapa asset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang Grup.

Certain fixed assets are pledged as collateral for long-term loans by the Group.

Aset tetap Grup diasuransikan terhadap risiko kerugian, kecelakaan, kebakaran dan resiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar AS\$323.408.982 (nilai penuh) pada tahun 2020 dan (2019: AS\$314.710.387 – nilai penuh). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Fixed assets of the Group are insured against losses, accidents, fire and other risks, with the sum insured amounting to US\$323,408,982 (full amount) in years 2020 (2019: US\$314,710,387 – full amount). Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses arising from such risks.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset dalam penyelesaian terutama terdiri dari pembuatan kapal yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pembangunan.

10. FIXED ASSETS (continued)

Based on management's assessment, there is no impairment indicator identified to fixed assets as at 31 December 2020.

Construction in progress mainly consisted of construction of vessels that have not been completed as at the reporting date.

11. UTANG USAHA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak berelasi (Catatan 24)		
PT Pertamina (Persero)	438,648	291,139
PT Surveyor Indonesia (Persero)	6,211	1,419
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	3,719	774
PT Perta Arun Gas	284	2,735
PT Pertamina International Shipping	-	4,355
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2.000)	<u>7,896</u>	<u>6,056</u>
	<u>456,758</u>	<u>306,478</u>
Pihak ketiga	<u>189,211</u>	<u>179,563</u>
Jumlah	<u>645,969</u>	<u>486,041</u>

Related parties (Note 24)
PT Pertamina (Persero)
PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertamina International Shipping
Others
(each below Rp2,000)

Third parties

Total

12. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jasa penunjang operasi dan penyediaan tenaga kerja	222,777	174,775
Pembangunan kapal	222,512	5,560
Keagenan umum	187,952	59,513
Sewa kapal jangka pendek	97,605	41,984
Pemanduan dan penundaan	93,496	24,911
Provisi bonus karyawan	68,229	19,999
Lain-lain	<u>254,468</u>	<u>235,611</u>
Jumlah	<u>1,147,039</u>	<u>562,353</u>

*Marine operations support
and labour supply services*
Construction of vessels
General agencies
Short-term ship rentals
Towage and pilotage
Employee bonus provision
Others

Total

13. LIABILITAS KONTRAK

Liabilitas kontrak adalah uang muka pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak ketiga	115,066	64,808
Pihak berelasi (Catatan 24)		
Pertamina International Marketing & Distribution Pte. Ltd.	<u>105</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>115,171</u>	<u>64,808</u>

Contract liabilities are advances from customers with the following details:

Third parties
Related parties (Note 24)
*Pertamina International Marketing
& Distribution Pte. Ltd.*

Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. SEWA

14. LEASES

a. Aset hak-guna

a. Right-of-use assets

	2020					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Costs
Bangunan	74,263	110	-	-	74,373	Land and building
Kendaraan dan alat berat	6,650	3,566	-	-	10,216	Vehicles and heavy equipment
Jumlah	80,913	3,676	-	-	84,589	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Tanah dan Bangunan	-	24,765	-	-	24,765	Land and building
Kendaraan dan alat berat	-	3,492	-	-	3,492	Vehicles and heavy equipment
Jumlah	-	28,257	-	-	28,257	Total
Nilai tercatat	80,913				56,332	Net carrying value

Alokasi beban penyusutan aset hak-guna adalah sebagai berikut:

The depreciation expenses of right-of-use assets were allocated as follows:

	2020	2019	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	24,976	-	Cost of revenue (Note 20)
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	3,281	-	General and administrative expenses (Note 21)
Jumlah	28,257	-	Total

b. Liabilitas sewa

b. Lease liabilities

	2020	2019	
Saldo awal	131,678	-	Beginning balance
Penambahan	3,676	-	Additions
Beban bunga	6,021	-	Interest expense
Pembayaran	(80,458)	-	Payments
Saldo akhir	60,917	-	Ending balance
Bagian lancar	27,123	-	Current portion
Bagian tidak lancar	33,794	-	Non-current portion
Jumlah	60,917	-	Total

Laporan arus kas menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The statement of cash flows shows the following amounts related to leases:

	2020	2019	
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flow from financing activities
Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa	(6,021)	-	Payments for interest expense of lease liabilities
Pembayaran liabilitas sewa	(74,437)	-	Repayments of lease liabilities
Jumlah	(80,458)	-	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pajak lain-lain			Other taxes
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") - Perusahaan	-	38,460	Value Added Taxes ("VAT") - the Company
PPN - Entitas anak	<u>15,808</u>	<u>3,676</u>	VAT - Subsidiaries
Jumlah	<u>15,808</u>	<u>42,136</u>	Total

b. Taksiran pengembalian pajak

b. Estimated tax refund

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pajak penghasilan			Corporate income taxes
Perusahaan			The Company
- 2019	-	13,161	2019 -
	-	13,161	
Entitas anak			Subsidiaries
- 2019	<u>2,866</u>	-	2019 -
	<u>2,866</u>	-	
Pajak lain-lain			Other taxes
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") - Perusahaan	<u>65,924</u>	-	Value Added Taxes ("VAT") - the Company
	<u>65,924</u>	-	
Jumlah	<u>68,790</u>	<u>13,161</u>	Total

c. Utang pajak

c. Taxes payable

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pajak penghasilan			Corporate income taxes
Perusahaan			The Company
Kurang bayar pajak penghasilan			Underpayment of corporate income taxes
- 2020	1,579	-	2020 -
- 2019	-	3,487	2019 -
	<u>1,579</u>	<u>3,487</u>	
Entitas anak			Subsidiaries
Kurang bayar pajak penghasilan			Underpayment of corporate income taxes
- 2020	4,741	-	2020 -
- 2019	-	3,180	2019 -
	<u>4,741</u>	<u>3,180</u>	
	<u>6,320</u>	<u>6,667</u>	

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Utang pajak (lanjutan)

c. Taxes payable (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pajak lain-lain			Other taxes
Perusahaan			The Company
Pasal 21	1,271	2,468	Article 21
Pasal 23	570	719	Article 23
Pasal 26	120	120	Article 26
Pasal 15	<u>280</u>	<u>204</u>	Article 15
	<u>2,241</u>	<u>3,511</u>	
 Entitas anak			 Subsidiaries
PPN	11,000	1,940	VAT
Pasal 23	38	599	Article 23
Pasal 4(2)	836	117	Article 4(2)
Pasal 21	<u>-</u>	<u>30</u>	Article 21
	<u>11,874</u>	<u>2,686</u>	
	<u>14,115</u>	<u>6,197</u>	
 Jumlah	 <u>20,435</u>	 <u>12,864</u>	 Total

d. Beban pajak penghasilan

d. Income tax expense

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Perusahaan			The Company
Kini	42,611	50,888	Current
Tangguhan	(8,705)	5,831	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	<u>1,555</u>	<u>-</u>	Adjustment in respect of prior years
	<u>35,461</u>	<u>56,719</u>	
 Entitas anak			 Subsidiaries
Kini	24,894	22,012	Current
Tangguhan	198	280	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	<u>-</u>	<u>152</u>	Adjustment in respect of prior years
	<u>25,092</u>	<u>22,444</u>	
 Jumlah	 <u>60,553</u>	 <u>79,163</u>	 Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

d. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The reconciliations between consolidated profit before income tax and the estimated taxable income for the years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan	483,930	374,161	Consolidated profit before income tax expenses
Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada tingkat konsolidasian	<u>(24,803)</u>	<u>(22,709)</u>	Profit before tax of subsidiaries after consolidation adjustment
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	<u>459,127</u>	<u>351,452</u>	Profit before income tax - the Company
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Provisi atas liabilitas imbalan pascakerja	2,932	27,304	Post-employment benefits obligation
Provisi atas bonus karyawan	15,238	(6,903)	Provision for employee bonus
Provisi atas cadangan penurunan nilai piutang	(2,296)	1,720	Provision for impairment of receivables
Penyusutan yang diijinkan untuk aktiva tetap lebih dari biaya penyusutan dalam laporan keuangan	(10,243)	(9,727)	Allowable tax depreciation of fixed assets in excess than depreciation expense in the financial statements
Provisi atas hak guna aset	55,114	-	Provision for right of use assets
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	115,086	157,713	Expense not deductible for tax purposes
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(11,947)	(6,414)	Interest income subject to final tax
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(1,026,747)	(1,102,208)	Revenue subject to final tax
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	619,703	821,016	Cost of revenue related to revenue subject to final tax
Bagian atas laba bersih ventura bersama	<u>(22,283)</u>	<u>(30,403)</u>	Share in net profit of a joint venture
	<u>(265,443)</u>	<u>(147,902)</u>	
Laba kena pajak Perusahaan	<u>193,684</u>	<u>203,550</u>	Taxable income of the Company
Beban pajak kini:			Current tax expenses:
Perusahaan	42,611	50,888	The Company
Entitas Anak	<u>24,894</u>	<u>22,012</u>	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan kini konsolidasian	<u>67,505</u>	<u>72,900</u>	Consolidated current income tax

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

d. Income tax expense (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Beban pajak kini	42,611	50,888	Current income taxes
Dikurangi:			Less:
Pajak dibayar di muka			Prepaid income taxes
- Pasal 25	17,217	23,642	Article 25 -
- Pasal 23	23,815	23,759	Article 23 -
	<u>41,032</u>	<u>47,401</u>	
 Kurang bayar pajak penghasilan - Perusahaan	 <u>1,579</u>	 <u>3,487</u>	 Underpayment corporate income tax - the Company
Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak ("DJP"). Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Grup berbeda dari nilai teoritis yang muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas konsolidasian sebagai berikut:			
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	483,930	374,161	Consolidated profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	106,464	93,540	Income tax calculated at applicable tax rate
Dampak pajak penghasilan atas:			Tax effects of:
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	50,704	60,501	Expenses not deductible for tax purposes
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(269,559)	(291,811)	Revenue subject to final tax
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	171,263	215,624	Cost of revenue related to revenue subject to final tax
Bagian atas laba bersih ventura bersama	(4,902)	(7,600)	Share in profit of a joint venture
Penyesuaian tahun lalu	1,555	152	Adjustment in respect of prior years
Penyesuaian pajak tangguhan	<u>5,028</u>	<u>8,757</u>	Deferred tax adjustment
 Beban pajak penghasilan konsolidasian	 <u>60,553</u>	 <u>79,163</u>	 Consolidated income tax expense

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

e. Aset pajak tangguhan

e. Deferred tax assets

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah
sebagai berikut:

The details of deferred tax assets are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Aset pajak tangguhan, neto			Deferred tax assets, net
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Aset atas sewa pembiayaan	(9,228)	(7,130)	Finance lease assets
Penyertaan saham	(965)	-	Investment in shares
Penyusutan aset tetap	36	193	Fixed assets depreciation
Provisi atas bonus karyawan	5,559	2,398	Provision for employee bonus
Sewa	12,896	-	Leases
Liabilitas imbalan pascakerja	18,827	20,373	Post-employment benefit obligations
Provisi penurunan nilai piutang usaha	<u>14,184</u>	<u>15,678</u>	Provision for impairment of trade receivables
	<u>41,309</u>	<u>31,512</u>	
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Sewa	(47)	-	Leases
Penyusutan aset tetap	(443)	(456)	Fixed assets depreciation
Liabilitas imbalan pascakerja	926	980	Post-employment benefit obligations
Provisi penurunan nilai piutang usaha	1,370	1,525	Provision for impairment of trade receivables
Provisi penurunan nilai persediaan	<u>-</u>	<u>3</u>	Provision for impairment of inventories
	<u>1,806</u>	<u>2,052</u>	
	<u>43,115</u>	<u>33,564</u>	
Liabilitas pajak tangguhan, neto			Deferred tax liabilities, net
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Penyusutan aset tetap	(10)	-	Fixed assets depreciation
Provisi penurunan nilai persediaan	3	-	Provision for impairment of inventories
Provisi penurunan nilai piutang usaha	<u>3</u>	<u>-</u>	Provision for impairment of trade receivables
	<u>(4)</u>	<u>-</u>	
Jumlah	<u>43,111</u>	<u>33,564</u>	Total
Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disajikan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:			Deferred tax assets and liabilities presented in the statement of financial position are as follows:
Aset pajak tangguhan	43,115	33,564	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	<u>(4)</u>	<u>-</u>	Deferred tax liabilities
Jumlah	<u>43,111</u>	<u>33,564</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

f. Analisis perubahan aset pajak tangguhan

f. Analysis of changes in deferred tax assets

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Aset pajak tangguhan, neto - awal tahun	33,564	37,260	Deferred tax assets, net - beginning balance
Dampak penerapan standar baru	(69)	-	Impact of adoption new standard
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	8,507	(6,502)	Deferred tax benefit/(expense)
Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	<u>1,109</u>	<u>2,806</u>	Recognised in other comprehensive income
Aset pajak tangguhan, neto - akhir tahun	<u>43,111</u>	<u>33,564</u>	Deferred tax assets, net - ending balance

g. Administrasi

g. Administration

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities which are domiciled in Indonesia, calculates and pays taxes on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

16. PINJAMAN

16. BORROWINGS

Pinjaman jangka pendek

Short-term borrowings

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank BNI Syariah	-	25,516	PT Bank BNI Syariah
Jumlah	<u>-</u>	<u>25,516</u>	Total

PKG

PKG

PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

Berdasarkan surat keputusan pembiayaan No. 001/QARDH813/PLAFOND/II/19 tanggal 27 Februari 2019, BNIS menyetujui pinjaman yang diajukan oleh PKG, dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp30.000.

Based on Decision Letter No. 001/QARDH813/PLAFOND/II/19 dated on 27 February 2019, BNIS approved the proposed loan by PKG, with a maximum amount of Rp30,000.

Jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan sejak akad ditandatangani. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp nil dan Rp25.516.

The loan is valid for 12 months from the date the financing agreement is signed. The loan balance as at 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp nil and Rp25.516, respectively.

Fasilitas pinjaman ini sudah berakhir dan dibayar lunas di bulan Februari 2020.

This loan facility has ended and fully repaid in February 2020.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 24)		
<i>Notional pooling</i> - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	88,124	-
Pihak ketiga		
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	705,023	848,336
PT Bank Syariah Mandiri	206,910	-
PT Bank BNI Syariah	149,861	83,073
PT Bank Tokyo Mitsubishi UFJ	98,896	147,084
	<u>1,160,690</u>	<u>1,078,493</u>
Jumlah	<u>1,248,814</u>	<u>1,078,493</u>
Jatuh tempo dalam satu tahun	364,928	200,225
Bagian jangka panjang	883,886	878,268

PKT

PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

Berdasarkan surat keputusan pembiayaan No. CLG/04/309/R tanggal 17 September 2014, BNIS menyetujui pinjaman yang diajukan oleh PKT, entitas anak, sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investasi I (Murabahah) dengan nilai maksimum sebesar Rp3.859 jangka waktu 12 bulan sejak akad pembiayaan ditandatangani; dan
- Fasilitas Kredit Investasi II (Murabahah) dengan jumlah maksimum Rp6.200 atau maksimum 80% dari nilai proyek yang akan dibiayai. Jangka waktu pinjaman 5 tahun sejak akad pembiayaan ditandatangani. Margin nominal ditetapkan pada saat pencairan adalah setara dengan 13,75% per tahun.

Saldo pinjaman pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp nil dan Rp139.

Fasilitas pinjaman ini sudah berakhir dan dibayar lunas di bulan Juni 2020.

16. BORROWINGS (continued)

Long-term borrowings

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
			Government-related entities (Note 24)
			<i>Notional pooling</i> - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
			Third parties
			<i>PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia</i>
			<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
			<i>PT Bank BNI Syariah</i>
			<i>PT Bank Tokyo Mitsubishi UFJ</i>
	<u>1,160,690</u>	<u>1,078,493</u>	
Jumlah	<u>1,248,814</u>	<u>1,078,493</u>	Total
Jatuh tempo dalam satu tahun	364,928	200,225	<i>Due next year</i>
Bagian jangka panjang	883,886	878,268	<i>Non-current portion</i>

PKT

PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

Based Decision Letter No. CLG/04/309/R dated 17 September 2014, BNIS approved the proposed loan by PKT, a subsidiary, as follows:

- Investment Credit Facility I (Murabahah) with a maximum credit limit amounting to Rp3,859 for a period of 12 months after the financing agreement is signed; and*
- Investment Credit Facility II (Murabahah) with a maximum credit limit of Rp6,200 or 80% of the value of the project to be financed. The loan is valid for five years from the date the financing agreement is signed. The nominal margin set at the time of disbursement is equivalent to 13.75% per annum.*

The loan balance as at 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp nil and Rp139, respectively.

This loan facility has ended and fully repaid in June 2020.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (lanjutan)

PKG

**Notional Pooling PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
("Mandiri")**

Berdasarkan perjanjian *Notional Pooling* No. 050/C0000-PKG/IV/2020 tanggal 20 April 2020, Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas *Notional Pooling* kepada PT Pertamina (Persero) dan beberapa anak perusahaannya. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah satu tahun dan otomatis diperpanjang sampai dengan lima tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp14.414 dan Rp nil.

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")

BNIS

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BNIS adalah sebagai berikut:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ <i>Type of loan and maximum credit limit</i>	Bunga/ <i>Interest</i>	Bulan jatuh tempo fasilitas/ <i>Facility maturity</i>	Peruntukan/ <i>Purpose</i>	Saldo 31 Desember 2020/ <i>Balance as at 31 December 2020</i>
Fasilitas kredit investasi kapal/ <i>Vessel investing credit facility</i> Rp82.934/Rp82,839	7,58% per tahun/ 7.58% per annum	Juli 2026/ July 2026	Pembiayaan pembelian kapal Transko Taurus/Financing for purchase of Transko Taurus	Rp78.309/Rp78,309
Fasilitas kredit investasi kapal/ <i>Vessel investing credit facility</i> Rp44.720 /Rp44,720	7,50% per tahun/ 7.58% per annum	November 2027/ November 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/ Financing for purchase of Harbour Tug	Rp44.720/ Rp44,720
Fasilitas kredit investasi kapal/ <i>Vessel investing credit facility</i> Rp26.832/Rp26,832	7,50% per tahun/ 7.58% per annum	Desember 2027/ December 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/ Financing for purchase of Harbour Tug	Rp26.832/ Rp26,832

**Notional Pooling PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
("Mandiri")**

Berdasarkan perjanjian *Notional Pooling* No. 006/H00000/2016-SO tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian diubah berdasarkan perjanjian No. 008/H0000/2016-SO tanggal 14 Oktober 2016, Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas *Notional Pooling* kepada PT Pertamina (Persero) dan beberapa anak perusahaannya. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah satu tahun dan otomatis diperpanjang sampai dengan lima tahun.

Berdasarkan surat No. 014/H1810/2016-SO tanggal 18 Agustus 2016, PT Pertamina (Persero) setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp73,710 dan Rp nil.

16. BORROWINGS (continued)

Long-term borrowings (continued)

PKG

**Notional Pooling PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
("Mandiri")**

Based on *Notional Pooling* agreement No. 050/C0000-PKG/IV/2020 dated 20 April 2020, Mandiri agreed to provide *Notional Pooling* facilities to PT Pertamina (Persero) and its certain subsidiaries. The term of the agreement is one year and will be automatically renewed to five years. The balance of the loan as at 31 December 2020 and 2019 was Rp14,414 and Rp nil, respectively.

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")

BNIS

The details of the long-term bank loans from BNIS are as follows:

**Notional Pooling PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
("Mandiri")**

Based on *Notional Pooling* agreement No. 006/H00000/2016-SO dated 15 August 2016, later amended based on agreement No. 008/H0000/2016-SO dated 14 October 2016, Mandiri agreed to provide *Notional Pooling* facilities to PT Pertamina (Persero) and its several subsidiaries. The term of the agreement was one year and will be automatically renewed to five years.

Based on letter No. 014/H1810/2016-SO dated 18 August 2016, PT Pertamina (Persero) agreed to provide a loan to the Company. The balance of the loan as at 31 December 2020 and 2019 was Rp73,710 and Rp nil, respectively.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Tokyo Mitsubishi UFJ ("BOTM")

Berdasarkan perjanjian kredit No. 17-0320-GC-LN tanggal 13 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dengan nilai fasilitas maksimum sebesar AS\$15.935.000.

Jangka waktu pinjaman adalah tahun 2022 dengan *grace period* selama 3 bulan sejak tanggal perjanjian. Bunga atas pinjaman tersebut adalah LIBOR + 1,35% per tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2020 adalah sebesar AS\$7.011.400 (nilai penuh) atau setara dengan Rp98.896 (2019: US\$10,580.840 (nilai penuh) atau setara dengan Rp147.084).

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI")

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BSMI adalah sebagai berikut:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp148.548 /Rp148,548	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at a rates of JIBOR +1.75% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility AS\$8.800.000 (nilai penuh)/ US\$8,800,000 (full amount)	Tingkat bunga LIBOR +1,37% per tahun/Interest at a rates of LIBOR +1.37% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility AS\$4.400.000/US\$4,400,000	Tingkat bunga LIBOR +1,37% per tahun/Interest at a rates of LIBOR +1.37% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility AS\$11.326.400/US\$11,326,400	Tingkat bunga LIBOR +1,35% per tahun/Interest at a rates of LIBOR +1.35% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp330.239/Rp330,239	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at a rates of JIBOR +1.75% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp148.548/Rp148,548	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at a Rates of JIBOR +1.75% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp93.759/Rp93,759	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at a rates of JIBOR +1.75% per annum

16. BORROWINGS (continued)

Long-term borrowings (continued)

PT Bank Tokyo Mitsubishi UFJ ("BOTM")

Based on loan agreement No. 17-0320-GC-LN dated 13 October 2017, the Company obtained financing facility with a maximum amount of US\$15,935,000.

The loan period is until 2022 with a grace period of three months from the date of the agreement. Interest of the loan is LIBOR + 1.35% per annum. The loan balance as at 31 December 2020 is US\$7,011,400 (full amount) or equivalent to Rp98,896 (2019: US\$10,580,840 (full amount) or equivalent to Rp147,084).

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI")

The details of the long-term bank loans from BSMI are as follows:

Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2020/ Balance as at 31 December 2020
November 2023/ November 2023	Pembiayaan pembelian kapal Transko Antasena/Financing for purchase of Transko Antasena	Rp95.580/ Rp95,580
November 2021/ November 2021	Pembiayaan pembelian kapal Transko Aquila & Aries/ Financing for purchase of Transko Aquila & Aries	US\$3.242.104 (nilai penuh), setara dengan Rp45.730/ US\$3,242,104 (full amount), equivalent to Rp45,730
November 2021/ November 2021	Pembiayaan pembelian kapal Transko Bima/Financing for purchase of Transko Bima	US\$1.662.224 (nilai penuh), setara dengan Rp23.446/ US\$1,662,224 (full amount), equivalent to Rp23,446
September 2024/ September 2024	Pembiayaan pembelian kapal Transko Cempala, Sikatan & Gelatik/Financing for purchase of Transko Cempala, Sikatan & Gelatik	US\$7.011.400 (nilai penuh), setara dengan Rp105.687/ US\$7,011,400 (full amount), equivalent to Rp105,687
Agustus 2024/ August 2024	Pembiayaan pembelian kapal HT3200 HP dan Gagak/Financing for purchase of HT3200 HP and Gagak	Rp224.175/ Rp224,175
September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Yudhistira/ Financing for purchase of Transko Yudhistira	Rp123.790/ Rp123,790
September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Rajawali/ Financing for purchase of Transko Rajawali	Rp86.615/ Rp86,615

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan perjanjian kredit No. 22/043/CB2-FOG/VIII/2020/MSYR tanggal 27 Agustus 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp206.910.

Jangka waktu pinjaman adalah 66 bulan sejak akad pembiayaan ditandatangani. Bunga atas pinjaman tersebut adalah JIBOR + 2,35% per tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp206.910 dan Rp nil.

16. BORROWINGS (continued)

Long-term borrowings (continued)

PT Bank Syariah Mandiri

Based on loan agreement No. 22/043/CB2-FOG/VIII/2020/MSYR dated 27 August 2020, the Company obtained financing facility with a maximum amount of Rp206,910.

The loan is for 66 months from the date that the financing agreement was signed. Interest on the loan is JIBOR + 2.35% per annum. The balance of the loan as at 31 December 2020 and 2019 was Rp206,910 and Rp nil, respectively.

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Grup memberikan imbalan pascakerja kepada semua karyawan tetapnya. Imbalan yang diberikan adalah imbalan pasti yang berkaitan dengan penghargaan masa kerja yang tergantung pada lamanya masa kerja. Grup mengakui timbulnya biaya pada saat Grup menerima manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan karyawan.

Grup melakukan penyisihan untuk liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang. Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, sesuai laporannya tanggal 8 Januari 2021, menggunakan metode projected unit credit dan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, sesuai laporannya tanggal 23 Januari 2020, menggunakan metode projected unit credit.

Nilai yang termasuk dalam laporan posisi keuangan yang berasal dari kewajiban Grup sehubungan dengan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Group provides post-employment benefits to all permanent employees. Benefits provided are defined benefits related to long service appreciation. The Group recognises expenses when the economic benefits of the services provided by the employees have been received.

The Group provide provision for long-term employee benefits liabilities. Long-term employee benefits liabilities as at 31 December 2020 are based on calculation performed by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, as per its reports dated 8 January 2021, using the projected unit credit method and Long-term employee benefit liabilities as at 31 December 2019 are based on calculation performed by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, as per its reports dated 23 January 2020, using the projected unit credit method.

The amounts included in the statement of financial position arising from the Group's obligation in respect of these post-employment benefits are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Nilai kini liabilitas	309,405	283,967	Present value of obligation
Nilai wajar aset program	<u>(131,003)</u>	<u>(122,660)</u>	Fair value of plan assets
Liabilitas imbalan kerja	<u>178,402</u>	<u>161,307</u>	Employee benefits liability

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Beban imbalan pascakerja yang dibebankan di
laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

*Amounts charged in the profit or loss and in respect
of these post-employment benefits are as follows:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Biaya jasa kini	12,567	11,033	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	20,169	2,070	<i>Past service cost</i>
Biaya bunga	(8,379)	11,514	<i>Interest cost</i>
Pengukuran kembali atas liabilitas yang diakui sebagai imbalan kerja jangka panjang lainnya	836	-	<i>Remeasurement on obligation recognised as other long-term employee benefit</i>
Biaya imbalan pascakerja	<u>25,193</u>	<u>24,617</u>	<i>Employee benefits expense</i>

Mutasi nilai kini kewajiban yang tidak didanai selama
tahun berjalan adalah sebagai berikut:

*The movements in the present value of unfunded
obligations in the current year were as follows:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pada awal tahun	161,307	137,003	<i>Beginning of the year</i>
Penyesuaian tahun lalu	-	(587)	<i>Prior year adjustment</i>
Dibebankan pada laporan laba rugi	25,193	24,617	<i>Charged to profit or loss</i>
Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	10,746	21,942	<i>Charged to other comprehensive income</i>
Iuran Perusahaan	(8,911)	(10,402)	<i>Company's contribution</i>
Pembayaran imbalan	(9,933)	(11,266)	<i>Benefit payment</i>
Nilai kini liabilitas pada akhir tahun	<u>178,402</u>	<u>161,307</u>	<i>Present value of obligation at the end of the year</i>

Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah
sebagai berikut:

The main assumptions used are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Tingkat diskonto	7.2%	7.7%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9.0%	9.0%	<i>Basic salary growth rate</i>
Tabel mortalita	TMI IV - 2019	TMI III - 2011	<i>Mortality table</i>
Usia pensiun normal	56	56	<i>Normal retirement age</i>

Dampak akibat dari setiap satu persen (1%)
perubahan dari asumsi tingkat diskonto dan tingkat
kenaikan gaji pada 31 Desember 2020 adalah
sebagai berikut:

*A one percentage (1%) point change in the assumed
discount rate and increase rate at 31 December
2020, would have the following effects:*

Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	<u>Perubahan asumsi/Change in assumption</u>	<u>Naik menjadi/ Increase to</u>	<u>Turun menjadi/ Decrease to</u>
Tingkat diskonto	1.0%	(279,708)	331,641
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.0%	316,424	(292,236)

Pada 31 Desember 2020, rata-rata durasi atas
provisi imbalan pascakerja karyawan adalah 12,54
tahun.

*As at 31 December 2020, the weighted average
duration of the provision for employee service
entitlements is 12.54 years.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at 31 December 2020 is presented below:

	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1 sampai 5 tahun/ Between 1 and 5 years	5 sampai 10 tahun/ Between 5 and 10 years	Lebih dari 10 tahun/ Over 10 years	Jumlah/Total	
Liabilitas imbalan pascakerja	25,802	99,639	159,442	965,655	1,250,538	Post-employment benefit obligation

18. MODAL SAHAM

18. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The structure of shareholders and the percentage of ownerships as at 31 December 2020 and 2019 are as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh)/ Number of shares (full amount)	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Shareholders
Saham Seri A				Series A shares
PT Pertamina (Persero)	693,698	693,698	99.88%	PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Pedeve Indonesia	10	10	0.01%	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Saham Seri B				Series B shares
PT Pertamina (Persero)	819	1	0.11%	PT Pertamina (Persero)
Jumlah	694,527	693,709	100%	Total

Berdasarkan keputusan pemegang saham, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2020 sebesar Rp2.

Based on the shareholders decision, the shareholders' approved the distribution of cash dividends for 2020 with a total amount of Rp2.

19. PENDAPATAN USAHA

19. REVENUE

	2020	2019*	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan			Revenues from contract with customers
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	924,671	898,236	<i>Marine operations support services</i>
Jasa penyediaan tenaga kerja	364,139	273,447	<i>Labour supply services</i>
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	295,664	242,638	<i>Shipping agency and port services</i>
Pengerukan	220,037	69,338	<i>Dredging</i>
Perdagangan umum	109,384	38,635	<i>General trading</i>
Air bersih	57,734	52,469	<i>Clean water</i>
Bongkar muat	47,800	31,783	<i>Cargo handling</i>
Jasa broker kapal - net	17,136	20,442	<i>Charter broker service - net</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	8,540	2,122	<i>Others (each below Rp2,000)</i>
	2,045,105	1,629,110	
Pendapatan lainnya			Other revenues
Sewa kapal	1,009,611	906,832	<i>Vessel charter</i>
Sewa gudang	3,481	3,864	<i>Warehouse rental</i>
	1,013,092	910,696	
Jumlah	3,058,197	2,539,806	Total

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

*As restated (Notes 30) *)*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

Grup mengakui kontrak aset terkait pendapatan berikut ini:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kontrak Aset		
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	301,801	275,442
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	281,841	242,664
Pengerukan	160,738	22,491
Jasa penyediaan tenaga kerja	42,435	30,196
Air bersih	<u>15,629</u>	<u>7,349</u>

**Jumlah, setelah dikurangi
provisi penurunan nilai**

802,444 578,142

Kewajiban pelaksanaan belum dipenuhi yang tersisa akan dipenuhi antara tahun 2021 dan 2028.

Lihat catatan 24 untuk informasi terkait pihak berelasi.

19. REVENUE (continued)

The Group has recognised contract assets related to the following revenues:

*Contract assets
Shipping agency and
port services
Marine operations support services
Dredging
Labour supply services
Clean water*

Total, net of expected credit loss

The remaining unsatisfied performance obligation will be satisfied between 2021 and 2028.

Refer to Note 24 for related party information.

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
Penyediaan tenaga kerja	555,572	410,640
Sewa kapal	404,098	434,128
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	398,524	504,538
Penyusutan (Catatan 10 & 14)	243,062	190,600
Pengerukan	223,458	60,745
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	198,017	154,460
Perdagangan umum	83,233	46,416
Air bersih	38,380	38,620
Bongkar muat	33,743	17,317
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	<u>3,463</u>	<u>2,368</u>
Jumlah	<u>2,181,550</u>	<u>1,859,832</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

20. COST OF REVENUE

*Labour supply services
Vessel charter
Marine operations support services
Depreciation (Note 10 & 14)
Dredging
Shipping agency and port services
General trading
Clean water
Cargo handling
Others (each below Rp2,000)*

Total

As restated (Notes 30) *)

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Umum		
Biaya karyawan dan kesejahteraan	219,551	203,509
Pemeliharaan bangunan dan gedung kantor	38,855	33,174
Perlengkapan kantor	24,521	11,435
Hubungan masyarakat	8,819	9,954
Sewa	4,917	8,124
Telekomunikasi	5,283	4,295
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	<u>3,170</u>	<u>4,011</u>
	<u>305,116</u>	<u>274,502</u>

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

General
*Employee costs and welfare
Maintenance of buildings and office building
Office supplies
Public relations
Rent
Telecommunication
Others (each below Rp2,000)*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/68 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

**21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
(continued)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Administrasi			Administrative
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 10 & 14)	6,910	3,305	Depreciation and amortisation (Note 10 & 14)
Biaya bank	4,062	5,935	Bank charges
Jasa profesional	1,430	4,113	Professional fees
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	<u>578</u>	<u>289</u>	Others (each below Rp2,000)
	<u>12,980</u>	<u>13,642</u>	
Jumlah	<u>318,096</u>	<u>288,144</u>	Total

22. (BEBAN)/KEUNTUNGAN LAIN-LAIN, NETO

22. OTHER (EXPENSES)/INCOME, NET

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rugi selisih kurs, neto	(21,505)	(1,763)	Foreign exchange loss, net
Beban denda pajak	(15,949)	(3,342)	Tax penalties
Penyisihan piutang tak tertagih	(2,106)	(2,415)	Bad debt expense
Pemulihan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	5,583	-	Reversal of impairment on trade receivables (Note 5)
Penerimaan atas denda penyerahan kapal	1,481	38,596	Settlement from late delivery of vessels
Lain-lain, neto	<u>5,541</u>	<u>4,227</u>	Others, net
Jumlah	<u>(26,955)</u>	<u>35,303</u>	Total

23. BEBAN KEUANGAN

23. FINANCE COSTS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Beban keuangan atas pinjaman jangka panjang	(52,839)	(72,965)	Finance cost of long-term borrowing
Beban keuangan atas liabilitas sewa	<u>(6,021)</u>	<u>-</u>	Finance costs of lease liabilities
Jumlah	<u>(58,860)</u>	<u>(72,965)</u>	Total

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH**

**24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES**

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama ataupun entitas berelasi dengan Pemerintah. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

In the normal course of business, the Group enters into trade and non-trade with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control or Government-related entities. Sales or purchase price among related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between third parties.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 8,67% dan 11,62% dari jumlah aset.

Piutang usaha (Catatan 5)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo piutang usaha pada pihak berelasi masing-masing sebesar 8,61% dan 6,57% dari jumlah aset.

Kontrak aset (Catatan 6)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kontrak aset yang ditempatkan pada pihak berelasi masing-masing sebesar 10,43% dan 8,65% dari total aset.

Penyertaan saham

	Kepemilikan/ Ownership (%)	2020	2019	
PT Pertamina Patra Niaga	0.09%	<u>8,098</u>	<u>598</u>	PT Pertamina Patra Niaga
Jumlah		<u>8,098</u>	<u>598</u>	Total

Utang usaha (Catatan 11)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang usaha pada pihak berelasi masing-masing sebesar 13,37% dan 12,82% dari jumlah liabilitas.

Kontrak liabilitas (Catatan 13)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kontrak liabilitas pada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,003% dan 0% dari jumlah liabilitas.

Pinjaman jangka panjang (Catatan 16)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman jangka panjang pada entitas berelasi dengan pemerintah masing-masing sebesar 2,58% dan 0% dari jumlah liabilitas.

**24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows:

Cash and cash equivalents (Note 4)

As at 31 December 2020 and 2019, the balances of cash and cash equivalents placed in Government-related entities represent 8.67% and 11.62%, respectively, of the total assets.

Trade receivables (Note 5)

As at 31 December 2020 and 2019, the balances of trade receivables to related parties represent 8.61% and 6.57%, respectively, of the total assets.

Contract assets (Note 6)

As at 31 December 2020 and 2019, the balances of contract assets placed in related parties represent 10.43% and 8.65%, respectively, from the total assets.

Investment in shares

Trade payables (Note 11)

As at 31 December 2020 and 2019, the balances of trade payables to related parties represent 13.37% and 12.82%, respectively, of the total liabilities.

Contract liabilities (Note 13)

As at 31 December 2020 and 2019, the balances of contract liability to related parties represent 0.003% and 0%, respectively, of the total liabilities.

Long-term borrowings (Note 16)

As at 31 December 2020 and 2019, the balances of long-term borrowings to Government-related entities represent 2.58% and 0%, respectively, of the total liabilities.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/70 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

**24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Pendapatan usaha (Catatan 19)

Revenue (Note 19)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Pertamina (Persero)	1,829,994	1,302,955
PT Pertamina Hulu Mahakam	179,778	150,270
PT Pertamina Gas	192,068	2,689
PT Pertamina Retail	156,243	109,870
PT Pertamina International Shipping	108,769	72,700
PT Pertamina Hulu Energi OSES	76,064	18,153
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	52,629	89,168
PT Nusantara Regas	14,085	19,511
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	9,603	1,811
PT Pertamina Hulu Energi NSO	6,619	3,661
PT Pertamina Hulu Energi JM	5,535	3,701
PT Elnusa Tbk.	5,520	2,646
PT Pertamina Hulu Energi WMO	3,899	3,960
PT Pertamina EP	3,754	688
PT Pertamina Patra Niaga	1,050	7,360
PT Perta Arun Gas	-	89,168
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	-	22,491
PT Elnusa Trans Samudera	-	6,087
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	-	4,294
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	<u>2,047</u>	<u>3,379</u>
Jumlah	<u>2,647,657</u>	<u>1,914,562</u>

PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Retail
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Hulu Energi OSES
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ
PT Nusantara Regas
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Energi NSO
PT Pertamina Hulu Energi JM
PT Elnusa Tbk.
PT Pertamina Hulu Energi WMO
PT Pertamina EP
PT Pertamina Patra Niaga
PT Perta Arun Gas
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
PT Elnusa Trans Samudera
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga
Others (each below Rp2,000)

Persentase dari jumlah pendapatan	<u>86.58%</u>	<u>75.38%</u>

**Percentage from
total revenues**

Beban pokok pendapatan (Catatan 20)

Cost of revenues (Note 20)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Pertamina (Persero)	188,371	181,029
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	27,759	16,167
PT Perta Arun Gas	11,724	24,243
PT Pertamina Lubricants	9,569	9,096
PT Pertamina Patra Niaga	4,478	-
PT Pertamina Patra Niaga	2,143	1,667
PT Mitra Tours and Travel	-	2,111
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	<u>1,324</u>	<u>237</u>
Jumlah	<u>245,368</u>	<u>234,550</u>

PT Pertamina (Persero)
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
PT Perta Arun Gas
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Bina Medika
PT Mitra Tours and Travel
Others (each below Rp2,000)

Persentase dari jumlah beban pokok pendapatan	<u>11.25%</u>	<u>12.61%</u>

**Percentage from total
cost of revenues**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/71 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

**24. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT ENTITIES (continued)**

Kompensasi dan imbalan lain

Compensation and other benefits

Kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan
kepada manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Compensation provided by the Company to its key
management is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Gaji dan imbalan lainnya	8,809	10,813	Salaries and other benefits

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang
berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with
related parties are as follows:

<u>Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationships</u>	<u>Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions</u>
PT Pertamina (Persero)	Pemegang saham mayoritas/ Majority shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, utang usaha, dan modal saham/Revenue, cost of revenue, trade receivables, trade payables and share capital
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Pemegang saham/Shareholder	Modal saham/Share capital
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan penyertaan saham/Revenue, trade receivables and investment in shares
PT Perta Arun Gas	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, trade receivables and trade payables
PT Pertamina International Shipping	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan utang usaha /Revenue, trade receivables and trade payables
PT Pertamina Gas	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Mahakam	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi OSES	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi WMO	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi JM	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Lubricants	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Nusantara Regas	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina EP	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Elnusa Tbk.	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/72 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

**24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT ENTITIES (continued)**

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang
berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*The nature of transactions and relationships with
related parties are as follows: (continued)*

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Elnusa Trans Samudera	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Retail	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
Pertamina International Marketing & Distribution Pte. Ltd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of revenue and trade payables
PT Pertamina Bina Medika	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of revenue and trade payables
PT Mitra Tours and Travel	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of revenue and trade payables
PT Trans Yeong Maritime	Perusahaan ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Piutang sewa pembiayaan/ <i>Finance lease receivables</i>
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Utang usaha/Trade payables
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Utang usaha/Trade payables
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/73 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. SALDO LABA DICADANGKAN

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib dari laba bersih sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah membentuk dana cadangan sebesar Rp75.943.

25. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 issued in August 2007, requires each company to establish a statutory reserve from net profits amounting to at least 20% of a Company's issued and paid up capital. There is no time limit on the establishment of such reserve.

As at 31 December 2020 and 2019, the Company has provided for Rp75,943 as general reserves.

26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI

a. Perjanjian kerjasama dengan PT Perta Arun Gas

Pada tanggal 30 Januari 2015 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan terminal antara Perusahaan dengan PT Perta Arun Gas. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah untuk jasa rutin sebesar Rp40.990 per tahun, dan untuk jasa non-rutin adalah sebesar pengeluaran nyata ditambah dengan margin yang sudah di atur dalam perjanjian.

Pada tanggal 30 Mei 2017, perjanjian ini diperpanjang selama lima belas tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

b. Perjanjian kerjasama dengan Asosiasi Produsen Biofel Indonesia ("APROBI")

Pada tanggal 30 April 2019 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan *ship-to-ship* antara Perusahaan dengan APROBI. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut untuk jasa rutin adalah sebesar Rp28.968 per bulan, dan untuk jasa non-rutin adalah sebesar pengeluaran nyata ditambah dengan *fee* yang sudah di atur dalam perjanjian.

Pada tanggal 20 Juli 2020, telah ditandatangani perpanjangan dari perjanjian kerjasama tersebut yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Cooperation agreement with PT Perta Arun Gas

On 30 January 2015, a cooperation agreement for port terminal management was signed between the Company and PT Perta Arun Gas. The agreement is valid for three years and may be extended according to the agreement. The contract value of the agreement is for a routine services at Rp40,990 per year, and for non-routine services amounting to actual expenditures plus a margin as set out in the agreement.

On 30 May 2017, this agreement was extended for fifteen years and may be extended according to the agreement.

b. Cooperation agreement with Indonesia Biofuel Producer Association ("APROBI")

On 30 April 2019, a cooperation agreement for ship-to-ship management was signed between the Company and APROBI. The agreement is valid for one year and may be extended according to the agreement. The contract value of the agreement is for a routine services at Rp28,968 per month and for non-routine services amounted to real expenditures plus a fee set as part of the agreement.

On 20 July 2020, an extension of this agreement was signed and validated for one year and may be extended according to the agreement.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/74 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

c. Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja ("RUU Cipta Kerja") yang biasa dikenal dengan "Undang-Undang Omnibus", yang kemudian ditandatangani Presiden pada tanggal 2 November 2020. Undang-Undang Omnibus mengamandemen lebih dari 75 undang-undang, dan mengharuskan pemerintah pusat untuk menerbitkan lebih dari 30 peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang harus dikeluarkan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan Undang-Undang Omnibus. Undang-Undang Omnibus berfokus pada peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia (diantaranya, menyederhanakan proses perizinan, menyederhanakan proses pengadaan tanah, memformalkan zona ekonomi, memberikan lebih banyak insentif untuk zona perdagangan bebas, dan mengubah undang-undang ketenagakerjaan). Meskipun pengaturan secara detil akan diatur dalam peraturan pelaksanaan, diharapkan bahwa peraturan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, baik untuk kegiatan operasional yang sudah ada maupun untuk investasi baru.

Pada tanggal laporan keuangan ini, Grup masih melakukan tinjauan dampak dari peraturan baru tersebut

26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Job Creation Bill

On 5 October 2020, the Indonesian Parliament approved the Job Creation Law - commonly known as the "Omnibus Law", which was later signed by the President on 2 November 2020. The Omnibus Law amended more than 75 current laws and will require the central government to issue more than 30 government regulations and other implementing regulations which must be issued within three months of its enactment. The Omnibus Law focuses on increasing the ease of doing business in Indonesia (e.g., simplifying licensing processes, simplifying land acquisition processes, formalising economic zones, providing more incentives for free trade zones and amending the labour law). While the details will be provided in the implementing regulations, it is expected that these regulations will provide positive impacts on the company, both for the existing operations and for the new investments.

As at the date of these financial statements, the Group is still assessing the impact of the Omnibus Law.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

• **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas, utang pembiayaan konsumen, liabilitas sewa pembiayaan dan pinjaman bank jangka panjang yang dimiliki Grup.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices which represent interest rate risk and foreign currency risk. Market prices contain two types of risk: interest rate risk and foreign exchange rate risk.

• **Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's cash and cash equivalents, consumer finance liability, finance lease liabilities, and long-term bank loans

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

• **Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)**

Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi/lebih rendah sebesar 100 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp27.226 terutama sebagai akibat lebih tinggi/lebih rendah biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

• **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi oleh Grup sebagai akibat fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan pinjaman bank jangka panjang, utang usaha, utang lain-lain, dan biaya yang masih harus dibayar, dan piutang sewa pembiayaan dalam mata uang Dolar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing melemah/menguat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp8.200.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

• **Interest rate risk (continued)**

There is no formal hedging policy with respect to the interest rate exposure. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis.

As at 31 December 2020, had the interest rates of the loans and borrowings been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, income before corporate income tax for the year ended 31 December 2020 would have been Rp27,226 lower/higher, accordingly, mainly as a result of higher/lower interest charges on the loans and borrowings with floating interest rates.

• **Foreign exchange rate risk**

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from USD denominated long-term bank loans, trade payables, other payables and accrued expenses and finance lease receivables.

As at 31 December 2020, had the exchange rate of the Rupiah against the foreign currency depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, profit before final and income tax for the year ended 31 December 2020 would have been Rp8,200 higher/lower.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/76 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari debitur atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk debitur individu dan memantau risiko terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha dan kontrak aset telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit gabungan dan waktu jatuh tempo

Tarif kerugian ekspektasian adalah berdasarkan profil pembayaran penjualan masing-masing selama periode 24 bulan sebelum 31 Desember 2020 atau 1 Januari 2020 dan kerugian kredit historis terkait yang dialami dalam periode ini. Tarif historis kerugian disesuaikan dengan informasi pada saat ini dan di masa depan atas faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutangnya. Grup telah mengidentifikasi harga minyak mentah sebagai faktor yang paling relevan dan menyesuaikan tarif kerugian historis berdasarkan perubahan yang diekspektasi pada faktor tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang usaha sebesar Rp722.474 (31 Desember 2019: Rp492.871) mengalami penurunan nilai dan telah diprovokasi sebesar Rp96.716 (31 Desember 2019: Rp86.505).

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas kas Grup terutama berasal dari kebutuhan untuk melakukan pembayaran biaya operasional kapal dan pelunasan atas pinjaman bank jangka panjang. Sumber dana pembayaran berasal dari kontrak sewa kapal jangka pendek, menengah dan panjang dan pendanaan yang diperoleh melalui pinjaman bank jangka panjang.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from its debtors or counterparties' failure to fulfill their contractual obligations. The Group manages and controls this credit risk by setting limits on the amount of risk it is willing to accept for individual debtors and by monitoring exposures in relation to such limits.

To measure the ECL, trade receivables and contract assets have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

The expected loss rates are based on the payment profiles of sales over a period of 24 months before 31 December 2020 or 1 January 2020, respectively, and the corresponding historical credit losses experienced within this period. The historical loss rates are adjusted to reflect current and forwardlooking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables. The Group has identified the crude oil prices to be the most relevant factor and accordingly adjusts the historical loss rates based on expected changes in this factor.

As at 31 December 2020, trade receivables of Rp722,474 (31 December 2019: Rp492,871) were impaired and had been provided for with an amount of Rp96,716 (31 December 2019: Rp86,505).

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statement of financial position.

Liquidity risk

The liquidity risk is defined as a risk when the cash flow position of the Group indicate that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

The Group's liquidity requirements mainly come from repayments of bank loans and related interest and vessel operation costs. The source of funds to fulfil the repayment of long-term bank loans is from contractual rental with third parties in the short, medium and long-term and funds obtained from long-term bank loans.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/77 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual dalam kontrak:

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 year</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 year</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 year</u>	<u>Jumlah/Total</u>
31 Desember 2020					
Liabilitas keuangan					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	456,758	-	-	-	456,758
- Pihak ketiga	189,211	-	-	-	189,211
Biaya yang masih harus dibayar	1,147,039	-	-	-	1,147,039
Liabilitas kontrak					
- Pihak berelasi	105	-	-	-	105
- Pihak ketiga	115,066	-	-	-	115,066
Liabilitas sewa	27,123	33,794	-	-	60,917
Pinjaman jangka panjang	299,816	517,284	419,443	44,814	1,281,357
Jumlah	2,256,771	544,407	448,493	75,219	3,250,453

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 year</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 year</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 year</u>	<u>Jumlah/Total</u>
31 Desember 2019					
Liabilitas keuangan					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	306,478	-	-	-	306,478
- Pihak ketiga	179,563	-	-	-	179,563
Biaya yang masih harus dibayar	562,353	-	-	-	562,353
Liabilitas kontrak					
- Pihak berelasi	-	-	-	-	-
- Pihak ketiga	64,808	-	-	-	64,808
Pinjaman jangka pendek	25,516	-	-	-	25,516
Pinjaman jangka panjang	197,721	444,534	296,619	111,294	1,050,168
Jumlah	1,335,439	444,534	296,619	111,294	2,188,886

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The Group evaluates its projected and actual cash flow information and continuously maintain its payables and receivables days' stability.

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments:

31 December 2020
Financial liabilities
Trade payables
Related parties -
Third parties -
Accrued expenses
Contract liabilities
Related parties -
Third parties -
Lease liabilities
Long-term borrowings
Total

31 December 2019
Financial liabilities
Trade payables
Related parties -
Third parties -
Accrued expenses
Contract liabilities
Related parties -
Third parties -
Short-term borrowings
Long-term borrowings
Total

28. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp2.163.768 (2019: Rp1.792.472) sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, serta mengklasifikasikan penyertaan saham sebesar Rp8.098 (2019: Rp598) sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup mengklasifikasikan utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, kontrak liabilitas, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang sebesar Rp3.156.993 (2019: Rp2.217.211) sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya amortisasi.

28. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2020, the Group classified its cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, contract assets and finance lease receivables amounting to Rp2,163,768 (2019: Rp1,792,472) as loans and receivables, and classified its investment in shares amounting to Rp8,098 (2019: Rp598) as available-for-sale financial assets.

As at 31 December 2020, the Group classified its trade payables, accrued expenses, contract liabilities, short-term borrowings and long-term borrowings amounting to Rp3,156,993 (2019: Rp2,217,211) as financial liabilities measured at amortised cost.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. INFORMASI TAMBAHAN KAS

29. SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION

Transaksi non-kas

Non-cash transaction

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Perolehan aset tetap melalui peningkatan biaya yang masih harus dibayar	222,512	5,560	Acquisition of fixed assets through increase in accrued expenses
Perolehan aset tetap melalui penerimaan atas denda penyerahan kapal	1,481	38,596	Acquisition of fixed assets through settlement from late delivery of vessels
Pembagian dividen melalui transaksi non-kas	176,996	-	Dividend declared through non-cash transactions

Informasi tambahan kas

Supplementary cash flow information

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated cash flow statements are as follows:

	<u>1 Januari/ 1 January 2020</u>	<u>Arus kas/ Cash flow</u>	<u>Selisih kurs/ Foreign exchange</u>	<u>31 Desember/ 31 December 2020</u>	
Pinjaman jangka panjang	1,078,493	161,510	8,811	1,248,814	Long - term borrowings
Pinjaman jangka Pendek	25,516	(25,516)	-	-	Short - term borrowings
Jumlah	<u>1,104,009</u>	<u>135,994</u>	<u>8,811</u>	<u>1,248,814</u>	Total
	<u>1 Januari/ 1 January 2019</u>	<u>Arus kas/ Cash flow</u>	<u>Selisih kurs/ Foreign exchange</u>	<u>31 Desember/ 31 December 2019</u>	
Pinjaman jangka panjang	1,254,731	(155,798)	(20,440)	1,078,493	Long - term borrowings
Pinjaman jangka Pendek	-	25,516	-	25,516	Short - term borrowings
Jumlah	<u>1,254,731</u>	<u>(130,282)</u>	<u>(20,440)</u>	<u>1,104,009</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/79 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Dalam proses penyusunan laporan keuangan Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, manajemen mempertimbangkan ulang interpretasi atas fakta, keadaan dan perlakuan akuntansi yang relevan terkait dengan pengaturan *charter broker back-to-back* dimana Perusahaan berperan sebagai agen atau broker untuk mencari kapal sewa. Perusahaan mengakui pendapatan sejumlah imbalan neto yang menjadi bagian Perusahaan setelah membayar sewa kepada pemilik kapal. Sebelumnya Perusahaan berpendapat bahwa Perusahaan berperan sebagai prinsipal pada saat menyewakan kapal-kapal sewa tersebut ke pelanggannya. Oleh karenanya Perusahaan memutuskan untuk menyajikan kembali laporan laba-rugi Perusahaan tahun 2019 terkait dengan pengaturan tersebut.

Dampak atas penyajian kembali terhadap laporan laba-rugi sebagai berikut:

30. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

In the process of preparing the Company's financial statements as at and for the year ended 31 December 2020, management reconsidered its interpretation of the facts, circumstances and relevant accounting treatment related to charter brokerage back-to-back arrangements in which the Company acts as an agent or broker to find charter vessels. The Company recognises revenue on the net amount that the Company retains after paying the rent to vessel owners. Previously, the Company was of the opinion that the Company played a role as the principal when it came to leasing these charter vessels to its customers. Therefore, the Company decided to restate the Company's 2019 profit or loss in connection with these arrangements.

The impact of the restatement on the profit or loss is as follows:

	2019			
	Sebelum penyajian kembali/ <i>Before restatement</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Setelah penyajian kembali/ <i>After restatement</i>	
Pendapatan usaha	2,772,220	(232,414)	2,539,806	Revenue
Beban pokok pendapatan	(2,092,246)	232,414	(1,859,832)	Cost of revenue
Laba bruto	679,974	-	679,974	Gross profit

Penyajian kembali diatas tidak memiliki dampak terhadap laporan posisi keuangan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

The restatement has no impact on the statement of financial position and statement of cash flows as at and for the year ended 31 December 2019.

LAPORAN TAHUNAN **2020** ANNUAL REPORT **PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL**

Creating Value for Sustainable Growth

Menciptakan Nilai untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Kantor Pusat/ Head Office

Jl. Kramat Raya No.29

Jakarta Pusat 10450

Telp. : (+6221) 31923005

Fax. : (+6221) 3106804

E-mail : ptkpusat@ptk-shipping.com

Website : www.ptk-shipping.com

Marketing Department

Jl. Kramat Raya No.29

Jakarta Pusat 10450

Telp. : (+6221) 31923005 (ext.225)

Fax. : (+6221) 3989923

E-mail : marketingptk@ptk-shipping.com